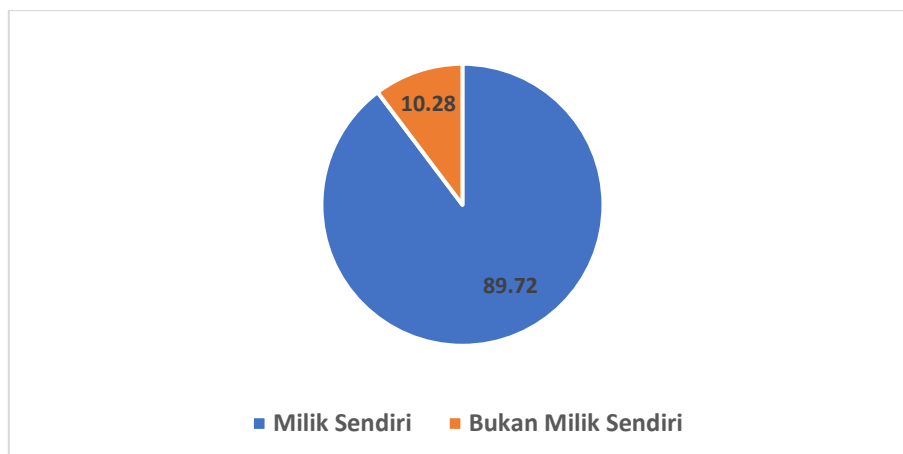




Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2023

Gambar III-454 Persentase RT Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal 2019

A. Terdampak Kegiatan Proyek

Hasil observasi di wilayah studi, kualitas kesehatan lingkungan dilihat dari jumlah rumah penduduk menurut jenisnya, mayoritas sudah termasuk katagori permanen, dan cukup memadai standar kualitas kesehatan lingkungan. Kondisi rumah di wilayah studi, mayoritas sudah berlantai semen/plester, tegel/ubin/keramik, berdinding tembok/kayu dan beratap seng/asbes/genteng. Berdasarkan data dari Puskesmas Saumlaki, jumlah rumah sehat di desa terdampak kegiatan proyek mengalami penurunan yang mana Desa Latdalam merupakan desa dengan jumlah rumah sehat terbanyak. Tabel berikut ini menampilkan jumlah rumah sehat di desa terdampak kegiatan proyek.

Tabel III-389 Jumlah Rumah Sehat yang Memenuhi Syarat di Desa Terdampak Kegiatan Proyek Tahun 2016-2018

Desa	2016	2017	2018
	Σ	Σ	Σ
Bomaki	263	263	89
Lermatang	314	314	119
Lat Dalam	437	437	340
Matakus	111	111	52

Sumber: Puskesmas Saumlaki 2016-2018



Kondisi rumah di Desa Lorulun



Kondisi rumah di Desa Lermatang

Sumber: Survei Sosial INPEX, 2020

Gambar III-455 Kondisi Rumah di Desa Terdampak Kegiatan Proyek

B. Terpengaruh Kegiatan Proyek

Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat disimpulkan bahwa rumah yang memenuhi syarat sehat di Kecamatan Tanimbar Selatan dari tahun 2016 hingga tahun 2017 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2018, sebanyak 2 desa mengalami peningkatan jumlah rumah sehat. Desa yang mengalami peningkatan jumlah rumah sehat yaitu Desa Saumlaki dan Desa Sifnana. Desa Saumlaki mengalami peningkatan jumlah sekitar 65% atau sejumlah 1.541 rumah sehat, sedangkan Desa Sifnana mengalami peningkatan sekitar 3% atau sejumlah 11 rumah sehat. Sedangkan desa yang lain mengalami penurunan jumlah rumah sehat.

Tabel III-390 Jumlah Rumah Sehat yang Memenuhi Syarat di Desa Terpengaruh Kegiatan Proyek Tahun 2016-2018

Desa	2016	2017	2018
	Σ	Σ	Σ
Saumlaki	2.358	2.358	3.899
Olilit	892	892	630
Sifnana	422	422	433
Lauran	443	443	361
Kabiarat	193	193	77
Ilngai	310	310	147
Wowonda	415	415	200

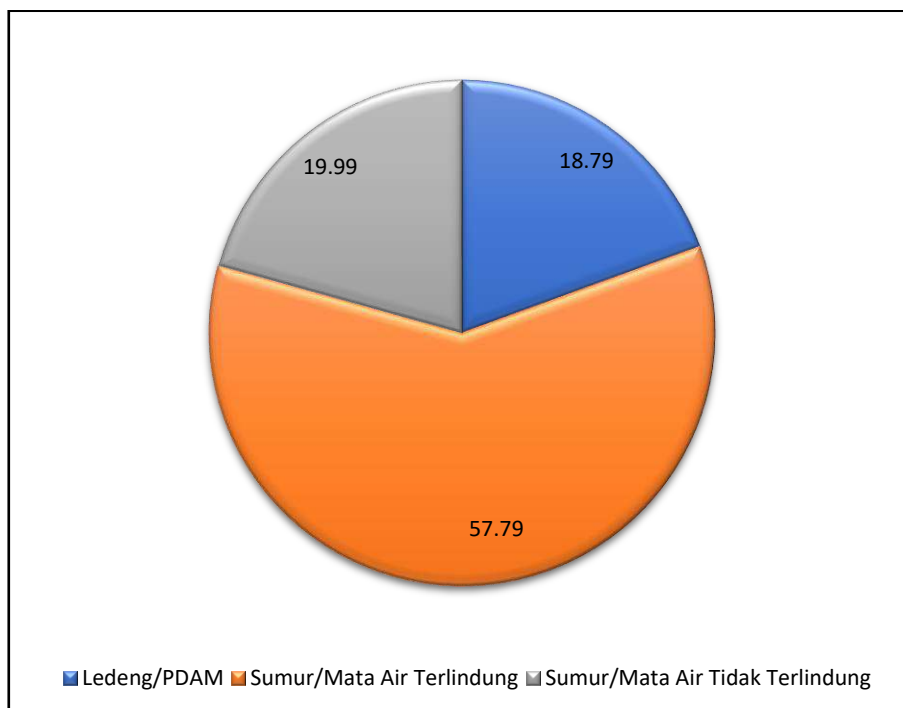
Sumber: Puskesmas Saumlaki, 2016-2018

- Sumber Air Penduduk

Indikator kesehatan lingkungan juga didasarkan pada kondisi/kualitas air yang digunakan, baik untuk minum/masak maupun untuk mandi/cuci. Data kebutuhan air keperluan rumah tangga meliputi jenis sumber utama air yang digunakan untuk seluruh keperluan rumah tangga termasuk minum dan memasak, jumlah pemakaian air per orang per hari, jenis sumber air minum, jarak dan waktu tempuh ke sumber air minum, serta akses terhadap sumber air minum. Pengelompokan jumlah pemakaian air untuk keperluan rumah tangga per orang per hari mengacu pada kriteria risiko kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan *higiene* yang digunakan WHO (World Health Organization). Jumlah pemakaian air per orang per hari adalah jumlah pemakaian air rumah tangga dalam sehari semalam dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Jumlah pemakaian air dikelompokkan menjadi beberapa kriteria, yaitu:

- Pemakaian air lebih kecil dari 5 liter/orang/hari, menunjukkan tidak akses
- Pemakaian air antara 5-19,9 liter/orang/hari, menunjukkan akses kurang
- Pemakaian air antara 20-49,9 liter/orang/hari, menunjukkan akses dasar
- Pemakaian air antara 50-99,9 liter/orang/hari, menunjukkan akses menengah
- Pemakaian air lebih besar atau sama dengan 100 liter/orang/hari, menunjukkan akses optimal.

Untuk menilai akses terhadap sumber air minum, digunakan dua kriteria, yaitu kriteria yang digunakan pemerintah dalam laporan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2016-2030 dan kriteria yang digunakan Joint Monitoring program (JMP) WHO-UNICEF 2004.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Tanimbar-Diolah dari SUSENAS 2019

Gambar III-456 Sarana dan Akses Air Bersih Penduduk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2019

Sumber air yang digunakan penduduk di wilayah studi untuk kegiatan domestik berasal dari ledeng/PDAM, sumur/mata air terlindung dan sumur/mata air tidak terlindung, dan sumber air lainnya. Gambar di bawah ini merupakan inventarisasi sumber air bersih yang digunakan penduduk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Persentase tertinggi sumber air utama, rumah tangga yang digunakan untuk MCK adalah sumur/mata air terlindung, sebanyak 57,79%, sumur/mata air tak terlindung yaitu 19,99%, dan ledeng /PDAM sebesar 18,79%.

Penggunaan akses air bersih di Kecamatan Wertamrian dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, dari jumlah keluarga yang diperiksa sebanyak 692, sekitar 75% atau sebanyak 516 sudah memiliki akses air bersih. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2017 dari jumlah yang diperiksa sebanyak 502, sebanyak 99,00% atau sebanyak 497 keluarga memiliki akses air bersih.

Tabel III-391 Persentase Keluarga yang Menggunakan Akses Air Bersih di Kecamatan Wertamrian 2016-2018

Keterangan	2016		2017		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jumlah Diperiksa	460	100,00	502	100,00	692	100,00
Memiliki Akses Air Bersih	330	71,74	497	99,00	516	74,57

Sumber: Puskesmas Lorulun, 2019

Penggunaan akses air bersih di Kecamatan Tanimbar Selatan tahun 2021 dari jumlah air minum yang diperiksa dengan diambil sampelnya sebanyak 404 dan sudah memenuhi syarat, selain itu untuk jumlah air yang diinpeksi kesehatan lingkungan juga sebanyak 404 dengan jumlah persentasenya 100%.

Tabel III-392 Persentase Keluarga yang Menggunakan Akses Air Bersih di Kecamatan Tanimbar Selatan 2021

Desa	Jumlah Air Minum	Inpeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)		Pemeriksaan			
		Jumlah IKL	%	Jumlah yang diambil sampel	%	Jumlah sarana memenuhi syarat	%
Bomaki	203	203	100,00	203	100,00	203	100,00
Lermatang	24	83	100,00	83	100,00	83	100,00
Lat Dalam	29	29	100,00	29	100,00	29	100,00
Matakus	83	89	100,00	89	100,00	89	100,00

Sumber: Puskesmas Saumlaki, 2021

A. Terdampak Kegiatan Proyek

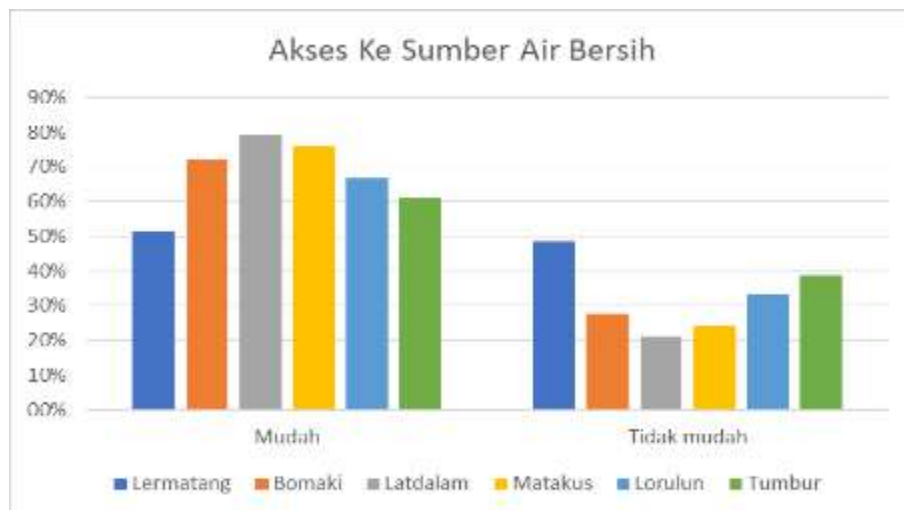
Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa sarana penyediaan air minum penduduk di Kecamatan Tanimbar Selatan menggunakan empat jenis sarana yaitu sumur gali terlindung, mata air terlindung, penampungan air hujan, dan perpipaan. Namun, pada desa terdampak kegiatan proyek masyarakat menggunakan sumur gali terlindung dan perpipaan untuk akses pada sumber air bersih. Dari keempat desa yang tercatat oleh Puskesmas Saumlaki, Desa Bomaki yang menggunakan sumur gali terlindung dan perpipaan, sementara desa lainnya hanya menggunakan sumur gali terlindung.

Tabel III-393 Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) yang Memenuhi Syarat di Desa Terdampak Kegiatan Proyek Tahun 2021

Desa	Sumur Gali Terlindung			Mata Air terlindung			Penampungan air hujan			Perpipaan		
	Jumlah sarana	Memenuhi syarat		Jumlah sarana	Memenuhi syarat		Jumlah sarana	Memenuhi syarat		Jumlah sarana	Memenuhi syarat	
		Jumlah sarana	Jml penduduk pengguna		Jumlah sarana	Jml penduduk pengguna		Jumlah sarana	Jml penduduk pengguna		Jumlah sarana	Jml penduduk pengguna
Bomaki	1	1	46	-	-	-	-	-	-	184	184	1217
Lermatang	23	20	178	-	-	1	-	-	-	-	-	774
Lat Dalam	29	25	2.534	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Matakus	2	2	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Puskesmas Saumlaki, 2021

Berdasarkan hasil survei dari hasil pengamatan lapangan disimpulkan, secara umum (rata-rata) akses air untuk keperluan rumah tangga di wilayah studi yang paling banyak termasuk dalam kategori akses menengah, diikuti katagori akses dasar, dan katagori optimal, sedangkan katagori kurang akses serta tidak akses masih ada. Jarak dan waktu tempuh ke sumber air minum dan kemudahan memperoleh air minum yang tertinggi adalah sangat mudah, serta mudah, sedangkan kategori sulit dan cukup sulit masih ada tetapi jumlahnya kecil. Hal ini mengingat banyak penduduk yang memiliki sumur sendiri. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa akses terhadap air bersih bisa dikatakan baik.



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-457 Akses ke Sumber Air Bersih untuk Masyarakat Sekitar Proyek

Namun hasil berdasarkan akses air bersih, hampir 50% masyarakat di Desa Lermatang tidak mudah dalam mengakses sumber air bersih. Air digunakan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk air minum, memasak, mandi, mencuci, ternak maupun irigasi. Pemanfaatan air tersebut berasal dari berbagai sumber yaitu air kran PDAM, sumur bor, air hujan, air sungai, mata air, air laut, galon, dan membeli dari mobil air yang lewat. Pada musim kemarau masyarakat biasanya akan membeli air bersih dengan harga rata-rata Rp 150.000 untuk 650 liter. Berdasarkan hasil wawancara, diasumsikan kebutuhan air sebesar 650 liter dipakai untuk kebutuhan keluarga dengan 4 anggota keluarga untuk sekitar 2-3 hari.



Pipa PDAM



Mobil Penjual Air Bersih

Sumber: Survei Sosial INPEX, 2020

Gambar III-458 Akses Air Bersih di Desa Lermatang

Berdasarkan hasil observasi di Desa Matakus, masyarakat pada umumnya memiliki tangki penampungan air hujan yang terbuat dari semen. Namun saat musim kemarau, ketika tangki air hujan sudah habis, maka masyarakat akan mengambil air di bukit yang jaraknya sekitar 2-3 km dari pemukiman. Sebenarnya pemerintah desa juga menyediakan air bersih pada tangki yang diletakkan di pusat Desa Matakus, namun tangki tersebut kerap kosong sehingga masyarakat tetap memilih mengambil air bersih langsung ke mata air di bukit.



Tangki Penampungan Air Hujan



Tangki Penampungan di Pusat Desa

Sumber: Survei Sosial INPEX, 2020

Gambar III-459 Akses Air Bersih di Desa Matakus

Berbeda pula dengan akses air bersih di Desa Latdalam, Desa Lorulun, dan Desa Tumbur. Desa Latdalam merupakan salah satu desa yang mudah dalam mengakses sumber air bersih. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, di Desa Latdalam, masyarakat pada umumnya menggunakan sumber mata air Werturleli untuk mandi ataupun mencuci. Sementara Desa Lorulun memiliki sumur air pada setiap rumah untuk mandi ataupun mencuci. Menurut masyarakat pada saat wawancara, sudah terpasang pipa yang menyalurkan air bersih dari mata air ke rumah warga di Desa Lorulun walaupun belum semuanya terpasang. Hampir mirip dengan kondisi di Desa Lorulun, Desa Tumbur pun memiliki sumur air hampir pada setiap rumah dan juga telah memasang pipa untuk menyalurkan air dari sumber mata air ke Sebagian rumah warga.



Sumber Mata Air Werturleli di Desa Latdalam
untuk Kegiatan Mandi dan Mencuci Warga



Sumur Air di Desa Lorulun

Sumber: Survei Sosial INPEX, 2020

Gambar III-460 Akses Air Bersih di Desa Latdalam dan Desa Lorulun

B. Terpengaruh Kegiatan Proyek

Berdasarkan tabel di bawah ini, Desa Saumlaki merupakan desa yang menggunakan empat jenis sarana yaitu sumur gali terlindung, mata air terlindung, penampungan air hujan, dan perpipaan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk di Desa Saumlaki lebih banyak dibandingkan dengan desa lainnya, sehingga memerlukan pasokan air lebih banyak. Pasokan air untuk Desa Saumlaki didapat tidak hanya dari dalam desa melainkan juga dari desa lainnya.

Tabel III-394 Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) yang Memenuhi Syarat di Desa Terpengaruh Kegiatan Proyek Tahun 2018

Desa	Sumur Gali Terlindung			Mata Air terlindung			Penampungan air hujan			Perpipaan (PDAM)		
	Jumlah sarana	Memenuhi syarat		Jumlah sarana	Memenuhi syarat		Jumlah sarana	Memenuhi syarat		Jumlah sarana	Memenuhi syarat	
		Jumlah sarana	Jml penduduk pengguna		Jumlah sarana	Jml penduduk pengguna		Jumlah sarana	Jml penduduk pengguna		Jumlah sarana	Jml penduduk pengguna
Saumlaki	535	530	1300	5	5	3000	91	85	91	1683	1683	152200
Olilit	11	11	275	-	-	-	60	53	60	810	800	72800
Sifnana	24	23	600	-	-	-	-	-	-	529	528	51600
Lauran	20	18	500	-	-	-	-	-	-	463	460	6000
Kabiarat	2	2	50	-	-	-	-	-	-	103	100	9400
Lingei	43	40	400	-	-	-	-	-	-	62	60	6000
Wowonda	21	18	525	-	-	-	-	-	-	338	332	3300

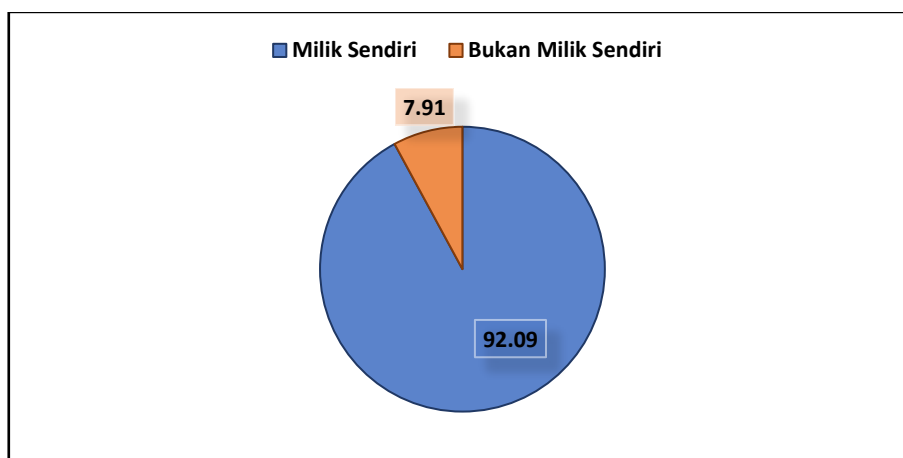
Sumber: Puskesmas Saumlaki, 2018

Sanitasi lingkungan segala sesuatu yang merupakan upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Misalnya membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pengolahan sampah dengan baik. Beberapa upaya pendekatan dalam menciptakan sanitasi lingkungan salah satunya dengan indikator sanitas total berbasis masyarakat yang disingkat dengan STBM. Sanitasi total berbasis masyarakat merupakan upaya pendekatan dalam mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat. Indikator-indikator dalam STBM diantaranya adalah stop buang air besar sembarang, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan air minum dan makan, serta pengelolaan air limbah domestik.

- Sarana Jamban

Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam studi ini adalah faktor kesehatan lingkungan yang berhubungan erat dengan status kesehatan masyarakat di wilayah studi. Berdasarkan observasi dan data sekunder di wilayah pemantauan diketahui bahwa sebagian masyarakat telah memiliki sarana sanitasi yang memadai.

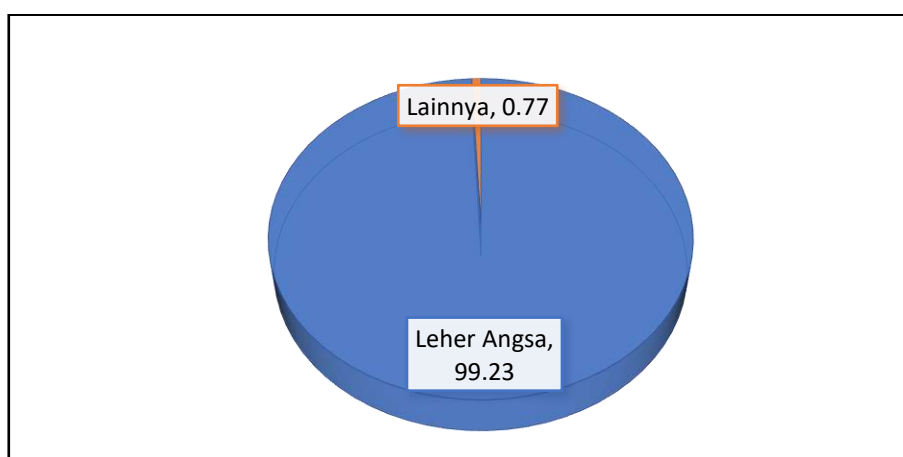
Proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas jamban/toilet milik sendiri di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2019 mencapai 92,09%, dan bukan milik sendiri mencapai 7,91%. Bukan milik sendiri ini adalah fasilitas Bersama (MCK umum), dan tidak ada/tidak menggunakan fasilitas BAB.



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 2023

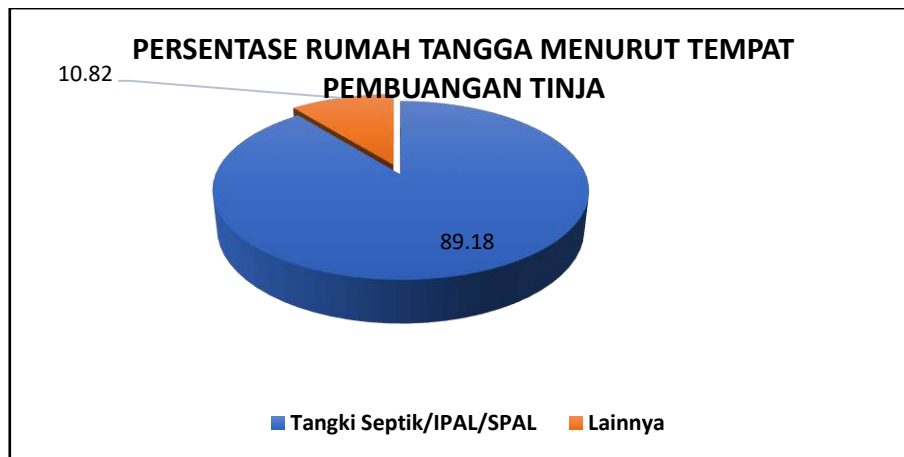
Gambar III-461 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Fasilitas Jamban di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2023

Jenis kloset yang paling aman dan sehat serta paling banyak digunakan rumah tangga adalah leher angsa. Terdapat sekitar 99,23% rumah tangga telah menggunakan leher angsa. Adapun pada tempat pembuangan akhir tinja yang paling memenuhi persyaratan kesehatan adalah jenis tangka septic. Tangki septic melindungi lingkungan sekitar sehingga tidak tercemar oleh tinja karena mengalami proses pengolahan baik secara kimiawi maupun biologis. Sebanyak 89,18% rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki tangki septic, selebihnya adalah WC Cemplung. Gambar berikut ini menampilkan data persentase rumah tangga menurut jenis kloset dan tempat pembuangan akhir tinja.



Sumber: Statistik BPS Kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Tanimbar-Diolah dari SUSENAS 2019

Gambar III-462 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang Digunakan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2019



Sumber: Statistik BPS Kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Tanimbar-Diolah dari SUSENAS 2019

Gambar III-463 Sarana Jamban, Pengelolaan Limbah Domestik dan Saluran Pembuangan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2019

Lebih dari 60% masyarakat sekitar proyek sudah memiliki MCK di masing-masing rumahnya. Sisanya, masyarakat menggunakan sungai, MCK umum/tetangga, tanjung pantai dan lainnya untuk Mandi Cuci Kakus. Masyarakat yang menggunakan tanjung pantai untuk kegiatan mandi cuci kaskus yaitu Desa Lermatang dengan persentase mencapai 5%. Masyarakat yang tidak memiliki fasilitas MCK di rumahnya, memanfaatkan MCK umum atau dari tetangga di sekitar. Masyarakat yang memanfaatkan MCK umum/tetangga ini mencapai 10%.



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-464 Persentase Keberadaan Fasilitas MCK di Masyarakat Sekitar Proyek



Sumber: Survei Sosial INPEX, 2020

Gambar III-465 Kondisi MCK di Desa Matakus

Berdasarkan hasil survei, pembuangan hajat keluarga masyarakat sekitar proyek menggunakan jamban leher angsa, jamban cemplung, bilik yang ada di sungai, di sembarang tempat, MCK umum, dan pantai. Lebih dari 60% masyarakat desa menggunakan jamban leher angsa untuk buang tinja. Namun, sebagian kecil (kurang dari 10%) masyarakat Desa Lermatang masih membuang hajat di bilik yang ada di sungai, di sembarang tempat, dan pantai. Kurang dari 10% masyarakat Desa Tumbur membuang tinja di di MCK umum. Persentase pembuangan tinja keluarga di desa terdampak kegiatan proyek disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

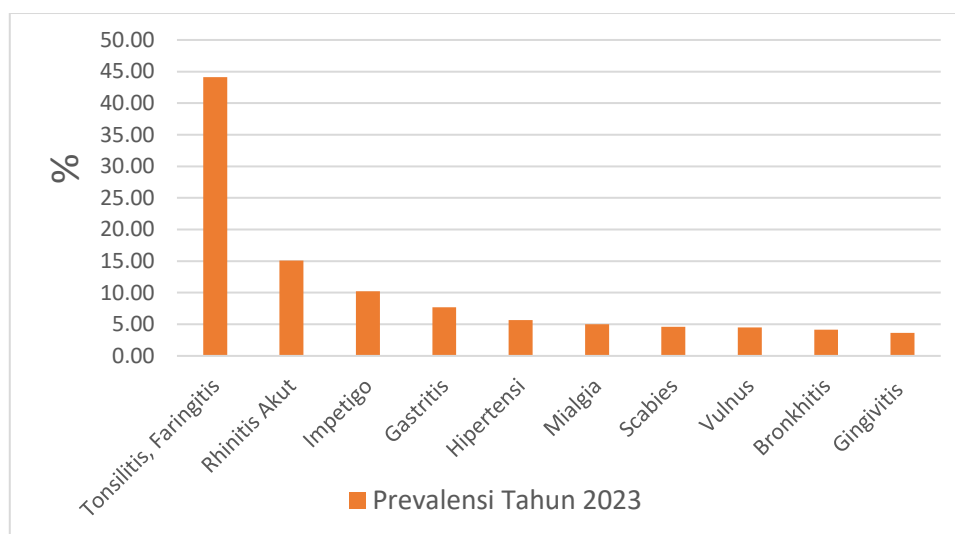
Gambar III-466 Persentase Pembuangan Tinja Rumah Tangga di Desa Terdampak Kegiatan Proyek

Berdasarkan data rona awal sarana air bersih yang sehat untuk Kecamatan Wetamrian baru mencapai 75.57%, sedangkan untuk Kecamatan Tanimbar Selatan sudah mencapai 100%. Dari sisi kepemilikan jamban di Tanimbar Selatan mencapai 92,09% sudah memiliki jamban sendiri dan dominan sudah menggunakan jenis kloset model leher angsa (99.23%). Sebanyak 89,18% rumah

tangga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah memiliki tangki septik, selebihnya adalah WC cemplung. Lebih dari 60% masyarakat sekitar proyek sudah memiliki MCK di masing-masing rumahnya.

3.3.5.2 Kabupaten Maluku Barat Daya

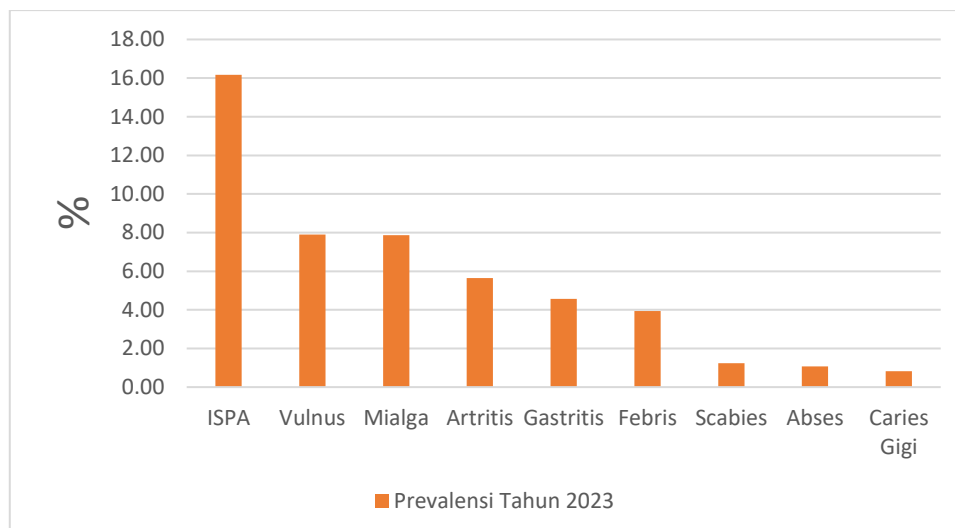
Morbiditas merupakan angka yang menggambarkan banyaknya penyakit atau keluhan kesehatan dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Morbiditas menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat. Hasil studi di kabupaten Maluku Barat Daya menunjukkan angka prevalensi 10 penyakit terbanyak yang berbeda-beda pada masing-masing wilayah kajian.



Sumber: Profil Kesehatan Kecamatan MOA Tahun 2023

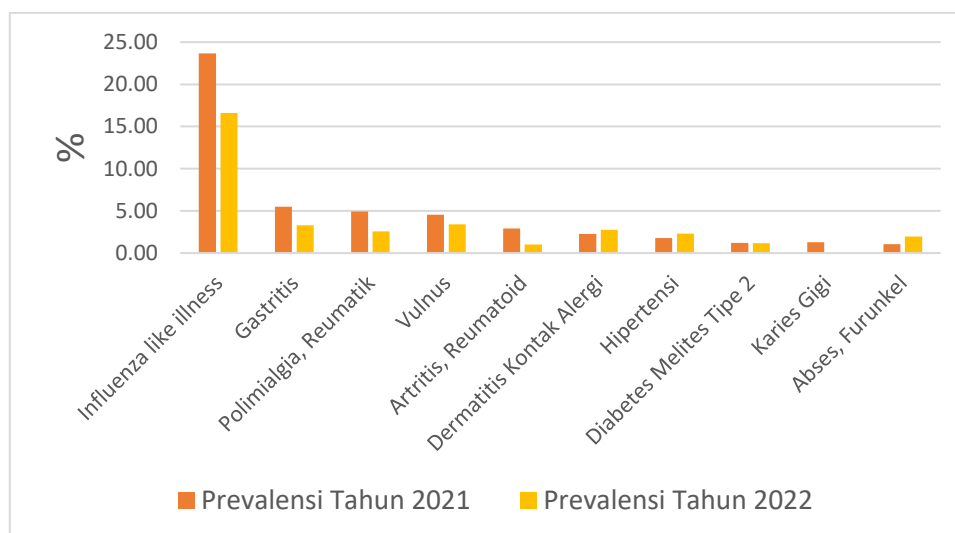
Gambar III-467. Prevalensi 10 Penyakit Terbanyak di Puskesmas Tiakur Tahun 2023

Grafik di atas menunjukkan bahwa nilai prevalensi tertinggi terdapat pada penyakit tonsilitis/peradangan, selanjutnya diikuti oleh penyakit rhinitis akut. Hal tersebut menandakan bahwa banyak masyarakat yang terjangkit penyakit tersebut, terutama di wilayah kerja Puskesmas Tiakur (Kelurahan Tiakur, Desa Kaiwatu, dan Desa Wakarleli).



Gambar III-468. Prevalensi 10 Penyakit Terbanyak di Puskesmas Werwaru Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, prevalensi tertinggi dimiliki oleh penyakit ISPA yang selanjutnya diikuti oleh penyakit vulnus dan mialga. Kasus penyakit ISPA banyak menjangkit masyarakat terutama di wilayah kerja Puskesmas Werwaru (Desa Werwaru, Desa Klis, dan Desa Patti). Hasil survei wawancara dan observasi lapang, keluhan permasalahan kesehatan masyarakat yang ditemukan di Kecamatan Moa (Desa Kaiwatu, Klis, dan Patti) paling banyak yaitu *influenza like illness* dan peradangan seperti faringitis. Gejala sakit flu yang sering terjadi yaitu batuk kering atau berdahak, demam, dan pilek yang cenderung menyerang anak-anak dan remaja. Selain itu ditemukan juga penyakit menular tertinggi yaitu ISPA. Penyakit tersebut menjangkit masyarakat di segala usia.

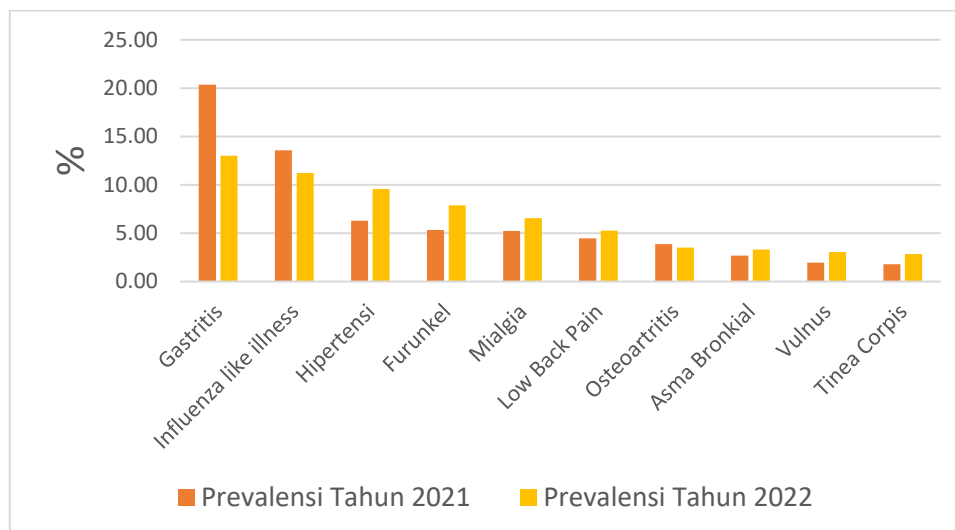


Sumber: Profil Kesehatan Kecamatan Letti, 2023

Gambar III-469. Prevalensi 10 Penyakit Terbanyak di Kecamatan Letti Tahun 2021 dan 2022

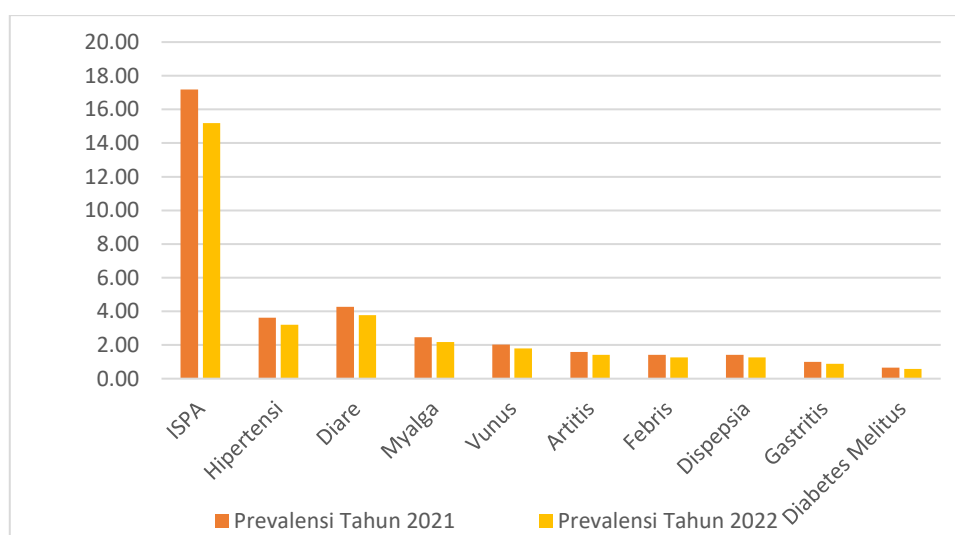
Grafik di atas merupakan prevalensi 10 penyakit terbanyak yang ada di Kecamatan Letti di mana kasus jenis ISPA mendominasi penyakit di kecamatan tersebut. Nilai prevalensi ISPA pada tahun 2021 mencapai 23,65% dan menurun pada tahun 2022 menjadi 16,6%. Berdasarkan hasil survei dan wawancara untuk keluhan permasalahan kesehatan di Desa Tutuwaru, bahwa masyarakat Desa Tutuwaru cenderung sering mengeluhkan sakit *influenza like illness* dan reumatik. Gejala sakit flu

yang sering terjadi yaitu batuk kering atau berdahak, demam, dan pilek yang cenderung menyerang anak-anak dan remaja. Reumatik cenderung menjangkit masyarakat lanjut usia di wilayah tersebut.



Gambar III-470. Prevelensi 10 Penyakit Terbanyak Kecamatan Lakor Tahun 2021 dan Tahun 2022

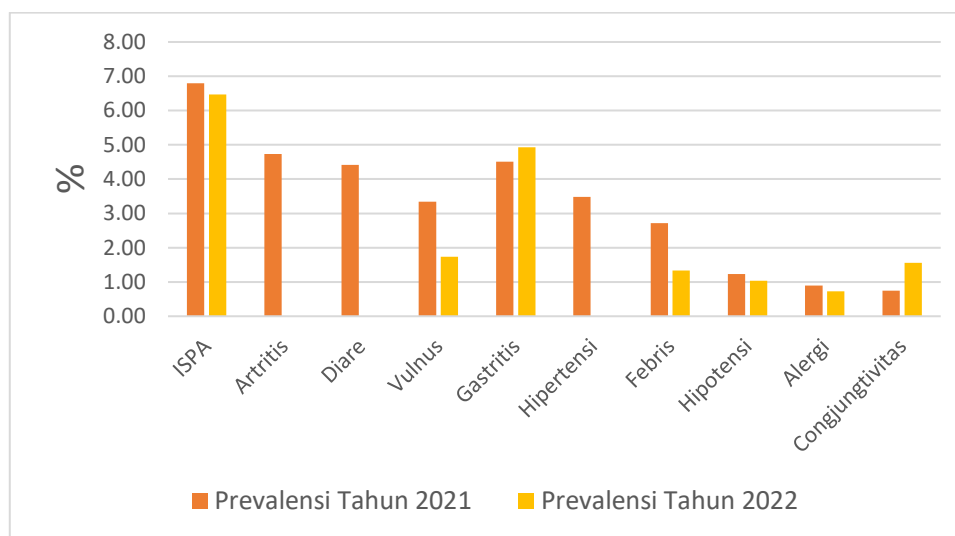
Berdasarkan grafik di atas, gastritis merupakan penyakit yang memiliki nilai prevalensi tertinggi di Pulau Lakor. Prevalensi gastritis pada tahun 2021 mencapai 20,37% dan terdapat penurunan prevalensi menjadi 13,02% pada tahun 2022. Terdapat beberapa kasus yang mengalami kenaikan prevalensi pada tahun 2022 yaitu hipertensi, furunkel, mialgia, *low back pain*, asma, vulnus, dan tinea corpis. Hasil studi wawancara dan observasi ditemukan bahwa keluhan permasalahan kesehatan masyarakat di Desa Ketty Letpey paling banyak yaitu *influenza like illness*. Gejala sakit yang sering terjadi yaitu batuk kering atau berdahak, demam, dan pilek yang cenderung menyerang segala usia. Gastritis dan hipertensi menjadi penyakit yang banyak diderita oleh orang dewasa.



Sumber : Profil Kesehatan Kecamatan Masela

Gambar III-471. Prevelensi 10 Penyakit Terbanyak di Pulau Masela Tahun 2021 – 2022

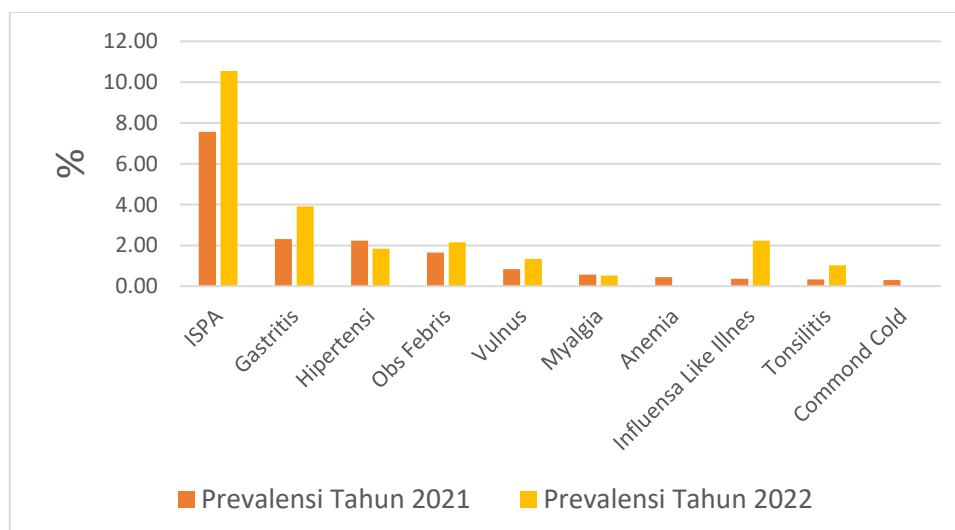
Berdasarkan grafik di atas penyakit terbanyak adalah ISPA. Kasus ISPA pada tahun 2021 mencapai 17,18%, namun terjadi penurunan kasus ISPA pada tahun 2022 dengan prevalensi 15,19%. Berdasarkan hasil studi wawancara dan hasil observasi di wilayah studi (Desa Masela, Iblatmuntah, Talarora) permasalahan kesehatan yang dikeluhkan oleh masyarakat paling banyak yaitu stroke, asam urat, dan gastritis. Keluhan kesehatan tersebut banyak dikeluhkan oleh para orang tua. Terdapat genetik langka yang ditemukan di beberapa wilayah kerja Puskesmas Masela yaitu permasalahan albino (kulit, rambut dan lainnya berwarna putih). Selain itu, hipertensi menjadi penyakit tertinggi kedua setelah ISPA.



Sumber : Profil Kesehatan Kecamatan Pulau Babar

Gambar III-472. Prevelensi 10 Penyakit Terbanyak di Kecamatan Pulau Babar Timur Tahun 2021 - 2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Pulau Babar Timur terjadi penurunan kasus 10 penyakit terbanyak (khususnya ISPA dan Gastritis). Jumlah kasus ISPA mengalami penurunan menjadi 6,47% kasus pada tahun 2022. Hasil studi observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Letwurung didapatkan kasus keluhan kesehatan seperti ISPA. Penyakit tersebut banyak menyerang anak-anak, bayi maupun balita dan tidak menutup kemungkinan juga menyerang ke orang dewasa juga. Keluhan kesehatan lainnya yang dikeluhkan masyarakat yaitu hipertensi, kolesterol, diabetes, dan asam urat banyak menyerang masyarakat lanjut usia.



Sumber: Profil Kesehatan Kecamatan Pulau Pulau Babar Tahun 2023

Gambar III-473. Prevalensi 10 Penyakit terbanyak di Kecamatan Pulau Babar Tahun 2021 - 2022

Berdasarkan grafik tersebut, menunjukkan bahwa di Pulau Babar penyakit yang mendominasi yaitu ISPA. Prevalensi ISPA tahun 2021 mencapai 7,56% dan meningkat secara signifikan pada tahun 2022 mencapai 10,54%. Hasil wawancara dan observasi di Desa Tepa, Yaltubung, dan Tela ditemukan bahwa masyarakat desa cenderung mengeluhkan penyakit hipertensi dan asam urat. Selain penyakit tersebut, masyarakat juga mengeluhkan penyakit asam lambung yang menyerang masyarakat usia remaja hingga dewasa.

Tabel III-395. Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan di Wilayah Studi 2023

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Status/Lokasi	Jumlah
1	RSUD Tiakur	Induk	1
2	Puskesmas	Tiakur	1
		Werwaru	1
		Weet	1
3	Puskesmas Pembantu	Klis	1
		Patti	1
		Tounwawan	1
4	Pos Kesehatan Desa	Nyama	1
		Kiera	1
		Moain	1
Jumlah			10

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya, 2021-2023

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari RSUD Tiakur, puskesmas, puskesmas pembantu, dan pos kesehatan desa. Terdapat 3 puskesmas yang aktif dalam melakukan pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas Tiakur, Puskesmas Werwaru, dan Puskesmas Weet. Wilayah kerja Puskesmas Werwaru meliputi tiga desa (Desa Werwaru, Klis, dan Desa Patti). Fasilitas Puskesmas Werwaru cukup memadai sebagai Puskesmas non rawat inap, namun ada beberapa fasilitas yang masih kurang. Oleh karena itu, jika pasien memiliki gejala-gejala medis yang cukup berat, pengobatan harus dialihkan ke RSUD Tiakur. Jarak puskesmas dengan masyarakat desa lain cukup jauh, sehingga masyarakat sedikit kesusahan untuk menjangkaunya apabila tidak memiliki kendaraan pribadi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, fasilitas kesehatan Puskesmas Werwaru sudah cukup baik dan lengkap. Puskesmas Werwaru termasuk puskesmas yang sangat ramai dikunjungi, warga banyak yang memanfaatkan fasilitas kesehatan yang diberikan puskesmas dengan sangat baik. Biaya berobat di Puskesmas Werwaru yaitu gratis. Banyak masyarakat di desa-desa cakupan Puskesmas Werwaru sudah memiliki jaminan kesehatan. Masyarakat Desa Patti sangat menyayangkan bahwa desanya masuk ke cakupan Puskesmas Werwaru karena lokasinya sangat jauh dari desa Patti, padahal Desa Patti lokasinya lebih dekat ke Puskesmas Tiakur. Puskesmas Tiakur memiliki fasilitas yang cukup baik, namun belum ada fasilitas untuk poli gigi sehingga masyarakat belum bisa memperbaiki *caries* gigi di puskesmas tersebut. Puskesmas Tiakur merupakan puskesmas non rawat

inap. Puskesmas tersebut sudah memiliki fasilitas *ambulance* yang digunakan untuk mengantar pasien yang memiliki gejala berat menuju RSUD Tiakur.



Tampak Depan Puskesmas Werwaru Kec. Moa



Ruang Pelayanan di Puskesmas Tiakur



Ruangan IGD di Puskesmas Werwaru



Ruangan Poli Gigi Puskesmas Tiakur

Komponen tenaga kesehatan yang tersedia di wilayah studi meliputi tenaga medis dan non medis. Tenaga medis meliputi dokter umum, dokter gigi, perawat umum, dan bidan. Tenaga medis paling banyak di Kecamatan Moa yaitu perawat umum. Tabel berikut menunjukkan tenaga kesehatan non medis yang meliputi ahli gizi, ahli farmasi, ahli teknis medis, ahli sanitasi, dan ahli kesehatan masyarakat.

Tabel III-396. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Pulau Pulau Babar Tahun 2023

Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan		RSUD Tiakur		Puskesmas Tiakur		Puskesmas Werwaru		Puskesmas Weet	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Dokter Umum	0	0	6	3.57	2	4.44	1	2.78	2	7.41
Dokter Gigi	0	0	1	0.60	1	2.22	1	2.78	0	0.00
Perawat Umum	30	34.48	93	55.36	16	35.56	12	33.33	6	22.22
Bidan	2	2.30	19	11.31	8	17.78	5	13.89	6	22.22
Ahli Gizi	4	4.60	2	1.19	3	6.67	2	5.56	1	3.70
Ahli Farmasi	1	1.15	0	0.00	0	0.00	1	2.78	0	0.00
Ahli Teknis Medis	1	1.15	7	4.17	3	6.67	3	8.33	1	3.70
Ahli Sanitasi	11	12.64	3	1.79	3	6.67	5	13.89	3	11.11
Ahli Kesehatan Masyarakat	25	28.74	2	1.19	0	0.00	1	2.78	3	11.11

Sumber: Dinas Kesehatan Maluku Barat Daya Tahun 2023

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Kecamatan Letti yaitu Puskesmas Serwaru yang memiliki empat puskesmas pembantu. Terdapat fasilitas rawat inap di puskesmas ini dan menjadi satu-satunya puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap di Kecamatan Letti. Fasilitas Puskesmas Serwaru cukup memadai, namun ada beberapa fasilitas yang masih kurang. Oleh karena itu, jika pasien memiliki gejala-gejala medis yang cukup berat, pengobatan harus dialihkan ke rumah sakit yang ada di Pulau Moa (penduduk harus menyebrang menggunakan kapal). Jarak puskesmas dengan masyarakat desa lain cukup jauh, sehingga masyarakat sedikit kesusahan untuk menjangkaunya apabila tidak memiliki kendaraan pribadi. Tabel di bawah ini menunjukkan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah studi pada tahun 2023.

Tabel III-397. Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan di Wilayah Studi 2023

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas Rawat Inap	1
2	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	1
3	Puskesmas Pembantu	4

Sumber: Kecamatan Letti dalam Angka 2023

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Kecamatan Letti, untuk skala bangunan Puskesmas Serwaru sudah cukup baik dan lengkap. Bangunan berdiri kokoh dengan fasilitas rawat inap yang tersedia di bagian belakang. Puskesmas Serwaru termasuk puskesmas yang sangat ramai dikunjungi.

Warga banyak yang memanfaatkan fasilitas kesehatan yang diberikan desa dan puskesmas dengan sangat baik. Biaya berobat di Puskesmas yaitu gratis. Banyak masyarakat di pulau tersebut yang sudah memiliki jaminan kesehatan.



Tampak Depan Puskesmas Serwaru Kec. Letti



Gedung Pelayanan di Puskesmas Serwaru



Ruangan Rawat Inap di Puskesmas Serwaru



Gedung Rawat Inap Puskesmas Serwaru

Tenaga kesehatan di Kecamatan Letti terdiri dari tenaga medis dan non medis. Tenaga medis meliputi dokter umum, dokter gigi, perawat umum, dan bidan. Pada tabel ini terdapat tenaga kesehatan non medis meliputi ahli gizi, ahli farmasi, ahli teknis medis, ahli sanitasi, dan ahli kesehatan masyarakat. Tenaga medis paling banyak di Kecamatan Letti yaitu perawat umum.

Tabel III-398. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Letti Tahun 2023

Tenaga Kesehatan	Puskesmas Serwaru		Puskesmas Nuwewang	
	Σ	%	Σ	%
Dokter Umum	1	1.61	1	4.76
Dokter Gigi	0	0.00	0	0.00
Perawat Umum	22	35.48	9	42.86
Bidan	11	17.74	3	14.29
Ahli Gizi	6	9.68	2	9.52
Ahli Farmasi	0	0.00	0	0.00
Ahli Teknis Medis	2	3.23	0	0.00
Ahli Sanitasi	2	3.23	1	4.76

Tenaga Kesehatan	Puskesmas Serwaru		Puskesmas Nuwewang	
	Σ	%	Σ	%
Ahli Kesehatan Masyarakat	2	3.23	2	9.52

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Pulau Lakor yaitu Puskesmas Sera. Wilayah kerja puskesmas tersebut mencakup lima desa, antara lain Desa Letoda, Ketty Letpey, Sera, Yamuli, dan Desa Lolotuara. Puskesmas Sera memiliki dua puskesmas pembantu dan tiga pos kesehatan desa. Terdapat satu puskesmas baru yang masih dalam tahap pengembangan di Pulau Lakor. Tabel di bawah ini menunjukkan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah studi.

Tabel III-399. Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan di Wilayah Studi 2023

No	Jenis Sarana Kesehatan	Status/Lokasi	Jumlah
1	Puskesmas	Induk	1
		Pengembangan	1
2	Puskesmas Pembantu	Lolotuara	1
		Ketty Letpey	1
3	Pos Kesehatan Desa	Yamuli	1
		Letwaru	1
		Werawawan	1

Sumber: Puskesmas Sera Tahun 2023

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Ketty Letpey, untuk fasilitas yang ada di puskesmas pembantu sangat kurang memadai. Fasilitas di Puskesmas Sera cukup memadai untuk menangani pasien dengan penyakit ringan. Namun, jika pasien memiliki gejala-gejala medis yang cukup berat, pengobatan harus dialihkan ke rumah sakit yang ada di Pulau Moa (penduduk harus menyebrang menggunakan kapal). Jarak puskesmas dengan masyarakat desa lain cukup jauh sehingga masyarakat sedikit kesusahan untuk menjangkaunya.

Tabel III-400. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Wilayah Studi 2023

Kecamatan	Puskesmas	Pustu	Poskesdes	Polindes
Pulau Lakor	Sera	Yamulily	-	-
	Letoda	Lototwara	Werwawan	-
		Ketiletpei		

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya, 2023

Kecamatan Lakor memiliki dua puskesmas dengan masing-masing puskesmas memiliki puskesmas pembantu dan poskesdes. Puskesmas Sera memiliki satu puskesmas pembantu, sementara Puskesmas Letoda memiliki dua puskesmas pembantu. Puskesmas Sera termasuk puskesmas yang sangat ramai dikunjungi, warga banyak yang memanfaatkan fasilitas kesehatan yang diberikan desa dan puskesmas dengan sangat baik. Biaya berobat di puskesmas yaitu gratis. Banyak masyarakat di pulau tersebut yang sudah memiliki jaminan Kesehatan. Posyandu setiap bulan aktif dalam melakukan pemeriksaan terhadap balita di setiap desanya. Setiap bulannya, posyandu memberikan makanan bergizi untuk para balita sebagai pencegahan adanya *wasting*, gizi buruk, dan *stunting*.

Tenaga kesehatan di Kecamatan Lakor meliputi tenaga medis dan non medis. Tenaga medis meliputi dokter umum, dokter gigi, perawat umum, dan bidan. Jumlah tenaga medis paling mendominasi di

Kecamatan Lakor yaitu perawat umum. Pada tabel ini terdapat tenaga kesehatan non medis meliputi ahli gizi, ahli farmasi, ahli teknis medis, ahli sanitasi, dan ahli kesehatan masyarakat.

Tabel III-401. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Lakor Tahun 2023

Tenaga Kesehatan	Puskesmas Sera		Puskesmas Letoda	
	Σ	%	Σ	%
Dokter Umum	1	2.94	1	5,88
Dokter Gigi	0	0.00	0	0,00
Perawat Umum	8	23.53	5	29,41
Bidan	5	14.71	5	29,41
Ahli Gizi	2	5.88	1	5,88
Ahli Farmasi	0	0.00	0	0,00
Ahli Teknis Medis	2	5.88	0	0,00
Ahli Sanitasi	3	8.82	2	11,76
Ahli Kesehatan Masyarakat	3	8.82	1	5,88

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Masela dapat dikatakan belum memadai ataupun belum lengkap. Terdapat dua puskesmas di Kecamatan Masela yaitu Puskesmas Masela dan Latola Besar. Puskesmas Masela memiliki puskesmas pembantu, puskesmas keliling hingga rumah paramedis, namun di Puskesmas Latola Besar hanya terdapat puskesmas pembantu, posyandu dan rumah paramedis. Tabel di bawah ini menunjukkan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah studi.

Tabel III-402. Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan di Wilayah Studi 2023

No.	Jenis Sarana Kesehatan	Puskesmas Masela	Puskesmas Lataloa Besar
1.	Puskesmas	1	1
2.	Rumah Paramedis	3	1
3.	Puskesmas Keliling	1	-
4.	Puskesmas Pembantu	1	2
5.	Posyandu	-	6

Sumber: Puskesmas Masela dan Puskesmas Lataloa Besar Tahun 2023

Dari hasil studi yang didapat di Desa Iblatmuntah, terdapat 13 ibu hamil yang rutin melakukan pengecekan ke posyandu di wilayah Desa Iblatmuntah. Namun, fasilitas seperti puskesmas pembantu di desa sudah tidak layak dipakai karena sudah rusak total. Bangunan puskesmas maupun fasilitas sudah hancur selama 7 tahun lebih, sehingga pelayanan kesehatan seperti posyandu dialihkan ke balai desa maupun rumah kepala Desa Iblath Muntah sendiri.

Puskesmas Masela memiliki wilayah kerja yang meliputi 7 desa. Bentuk fasilitas pelayanan maupun penunjang kesehatan di puskesmas sendiri juga masih belum lengkap sepenuhnya karena keterbatasan dana dan bantuan dari Desa. Jarak dari Puskesmas Masela ke perumahan padat

penduduk sangat jauh sekali dan akses menuju ke puskesmas cukup sulit dengan jalan masih tanah serta bebatuan. Bahkan ketika sedang musim hujan terjadi, Puskesmas Masela biasanya tidak akan beroperasi dikarenakan banjir serta akses jalan menuju puskesmas tertutup. Hal tersebut mengakibatkan pelayanan kesehatan ketika musim hujan tidak maksimal. Selain itu apabila dilihat dari hasil observasi, bangunan Puskesmas Masela juga sempat retak di beberapa titik. Retakan tersebut diakibatkan dari dampak gempa di wilayah Maluku Barat Daya. Namun, sampai saat ini belum ada perbaikan yang mengakibatkan bangunan hanya ditopang oleh kayu agar tidak rubuh.

Sebenarnya untuk lokasi Puskesmas Masela awalnya ada di dekat bibir pantai, namun alat kesehatan menjadi berkarat karena efek air laut, sehingga dipindahkan ke lokasi yang sekarang. Gedung puskesmas yang ada di bibir pantai sendiri nantinya akan dialokasikan menjadi tempat rawat inap atau rumah paramedis bagi para staf.

Puskesmas Lataola Besar ini memiliki fasilitas berupa rumah tinggal untuk paramedis yang bekerja di Puskesmas Lataola Besar. Selain itu, terdapat juga fasilitas kesehatan penunjang berupa *ambulance* dan *genset* dikarenakan akses listrik hanya 6 jam per hari. Bangunan Puskesmas Lataola Besar sudah cukup baik dan luas, tetapi alat kesehatan masih belum lengkap. Letak Puskesmas Lataola Besar bisa dibilang cukup strategis karena mudah diakses baik dengan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Akses jalan menuju puskesmas sudah cukup baik, sehingga jarak tempuh masyarakat dari desa ke puskesmas yaitu sekitar 10-20 menit.

Hasil studi lainnya yang dapat diambil dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Masela, pelayanan bersalin difasilitasi semua oleh desa secara gratis seperti adanya bidan yang hadir secara langsung maupun dukun beranak. Bahkan, setiap desa di Pulau Masela memiliki dua dukun yang turut membantu menangani masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat, baik permasalahan kesehatan untuk luka luar ataupun luka dalam. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dukun dilakukan secara sukarela dan tidak dipungut biaya.

Beberapa tahun lalu sempat terjadi konflik kecil antara pihak puskesmas dengan dukun, dikarenakan masyarakat di Pulau Masela masih banyak yang memiliki persepsi bahwa berobat ke dukun akan lebih cepat sembuh. Ada beberapa warga desa yang mengunjungi Bapak Yohanes (Dukun Lalawang) untuk berobat. Konflik tersebut sudah diselesaikan dan diambil jalan tengahnya. Terkait jaminan kesehatan hanya tinggal sebagian masyarakat yang belum memiliki. Oleh karena itu, kepala desa setempat sedang dalam proses untuk melengkapi BPJS masyarakat yang belum memilikinya.



Kondisi Rumah Penginapan Paramedis di
Puskesmas Lataola Besar



Bangunan Retak di Puskesmas Masela yang
Ditopang Kayu Penyangga



Akses Jalan menuju Puskesmas Masela



Akses Jembatan satu satunya Menuju Puskesmas Masela

Tenaga kesehatan yang tersedia di Kecamatan Masela, meliputi tenaga medis dan non medis. Tenaga medis meliputi dokter umum, dokter gigi, perawat umum, dan bidan. Sedangkan tenaga kesehatan non medis meliputi ahli gizi, ahli farmasi, ahli teknis medis, ahli sanitasi, dan ahli kesehatan masyarakat. Dapat dilihat bahwa Puskesmas Lataloa besar memiliki jumlah tenaga kesehatan mencapai 20 orang.

Tabel III-403. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Masela Tahun 2023

Tenaga Kesehatan	Puskesmas Masela		Puskesmas Lataloa Besar	
	Σ	%	Σ	%
Dokter Umum	0	0,00	0	0,00
Dokter Gigi	0	0,00	0	0,00
Perawat Umum	4	66,66	9	45
Bidan	1	16,66	3	15
Ahli Gizi	1	16,66	2	10
Ahli Farmasi	0	0,00	0	0,00
Ahli Teknis Medis	0	0,00	0	0,00
Ahli Sanitasi	0	0,00	1	5
Ahli Kesehatan Masyarakat	0	0,00	5	25
Jumlah	6	100,00	20	100,00

Sumber: Puskesmas Masela dan Puskesmas Lataloa Besar Tahun 2023

Menurut hasil studi dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa jumlah kader setiap Kecamatan Masela terdiri dari 4 kader posyandu dan 1 kader *stunting* atau PMT. Dari 5 kader di setiap desa inilah yang nantinya akan membantu maupun menjadi panjang tangan puskesmas untuk pelaksanaan program posbindu dan posyandu yang dijalankan rutin selama 1 bulan sekali, baik untuk permasalahan KIA maupun kesehatan lansia.

Terdapat tanaman yang dimanfaatkan oleh kader kesehatan di puskesmas yaitu berupa tanaman herbal dengan nama lokal *uprola* (khasiatnya sendiri untuk mencegah diabetes). Jumlah petugas puskesmas sangat kurang, sehingga program yang dijalankan puskesmas hanya dipegang oleh dua orang.



Gambar III-474 Tanaman *uplora*

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Babar Timur (Puskesmas Letwurung) masih belum memadai ataupun belum lengkap. Puskesmas Letwurung memiliki puskesmas pembantu, poskesdes hingga gedung rawat inap. Tabel di bawah ini menunjukkan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah studi.

Tabel III-404. Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan di Wilayah Studi 2023

No.	Jenis Sarana Kesehatan	Puskesmas Letwurung
1.	Puskesmas	1
2.	Gedung Rawat Inap	1
3.	Gedung PONED	1
4.	Puskesmas Pembantu	1
5.	Poskesdes	-

Sumber: Puskesmas Letwurung Tahun 2023

Berdasarkan hasil studi di wilayah Kecamatan Babar Timur, untuk pelayanan kesehatan berupa persalinan, Puskesmas Letwurung bekerja sama dengan dukun beranak untuk dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Selain itu, untuk kegiatan posyandu dan polindes dilakukan secara rutin selama satu bulan sekali. Fasilitas kesehatan yang tersedia di Puskesmas Letwurung meliputi dua gedung puskesmas (yang satu digunakan untuk penyediaan layanan pertama dan yang kedua digunakan untuk rawat inap).

Tersedia juga panel surya dan *genset* untuk menunjang kegiatan di puskesmas. Selain itu, fasilitas berupa *ambulance* juga tersedia dengan baik di Puskesmas Letwurung. Terdapat program pelayanan kesehatan untuk kesehatan ibu dan anak di wilayah kerja Puskesmas Letwurung yaitu KORIM (Kordinator Imunisasi) serta BIDKOR (Bidang Kordinator) yang rutin berjalan. Selain itu, terdapat rumah sakit di Desa Letwurung, akan tetapi rumah sakit tersebut sudah terbengkalai sejak tahun 2019 dikarenakan ada permasalahan terkait administrasi serta birokrasi.



Fasilitas Pelayanan di Puskesmas Induk Letwurung Gedung untuk Rawat Inap



Fasilitas Pelayanan di Puskesmas Induk Letwurung



Genset dan Surya Panel di Puskesmas Letwurung



Fasilitas Berupa Ambulance di Puskesmas Letwurung

Kecamatan Babar Timur memiliki dua puskesmas yaitu Puskesmas Letwurung dan Puskesmas Ahari. Tabel di bawah ini jumlah tenaga kesehatan yang ada di kecamatan Babar Timur pada tahun 2023.

Tabel III-405. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Babar Timur Tahun 2023

Tenaga Kesehatan	Puskesmas Letwurung		Puskesmas Ahari	
	Σ	%	Σ	%
Dokter Umum	0	0,00	1	3,84
Dokter Gigi	0	0,00	0	0,00
Perawat Umum	7	46,66	8	30,76
Bidan	5	16,66	9	34,61
Ahli Gizi	2	33,33	3	11,53
Ahli Farmasi	0	0,00	0	0,00
Ahli Teknis Medis	0	0,00	0	0,00
Ahli Sanitasi	0	0,00	0	5
Ahli Kesehatan Masyarakat	1	6,66	5	19,23
Jumlah	15	100,00	26	100,00

Sumber: Puskesmas Letwurung dan Puskesmas Anhari Tahun 2023

Menurut hasil studi dari hasil wawancara dan observasi ditemukan bahwa jumlah kader posyandu di setiap desa berjumlah 5 orang. Jumlah keseluruhan kader posyandu dan posbindu sekitar 60 orang lebih. Kader posyandu sering menggunakan tanaman herbal untuk pengobatan. Salah satu tanaman herbal yang sering dimanfaatkan untuk pengobatan yaitu daun sukun yang dimolah menjadi teh (menggunakan daun yang warnanya kuning atau sudah kering). Daun sukun tersebut mempunyai manfaat untuk masalah hati. Selain itu, ada daun behanong yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Daun behanong direbus bersama minyak kelapa yang bermanfaat sebagai obat gatal gatal, luka terbuka/tertutup, dan nyeri otot. Ramuan ini bisa diminum ataupun dioleskan pada bagian tubuh yang sakit.



Daun Bahenong yang digunakan untuk Kesehatan Oleh kader Posyandu



Hasil Ramuan dari Daun Bahenong

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Pulau-Pulau Babar dapat dikatakan masih belum memadai ataupun belum lengkap. Kecamatan Pulau Babar hanya memiliki satu puskesmas yaitu Puskesmas Tapa. Puskesmas tersebut hanya memiliki satu puskesmas pembantu. Terdapat fasilitas gedung rawat inap dan non rawat inap. Tabel di bawah ini menunjukkan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah studi.

Tabel III-406. Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan di Wilayah Studi 2022

No.	Jenis Sarana Kesehatan	2020	2021	2022
1.	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	-	2	1
2.	Puskesmas Rawat Inap	-	1	3
3.	Puskesmas Pembantu	-	-	3

Sumber: Puskesmas Tapa Tahun 2022

Terkait pelayanan kesehatan, Puskesmas Tapa termasuk puskesmas yang sangat ramai dikunjungi, warga banyak yang memanfaatkan fasilitas kesehatan yang diberikan desa dan Puskesmas dengan sangat baik. Posyandu dan polindes sendiri berjalan rutin satu bulan satu kali. Selain itu program terkait KIA dan PMT juga berjalan rutin.

Puskesmas Tapa sendiri sudah memiliki fasilitas kesehatan yang baik. Puskesmas Tapa juga menjadi salah satu puskesmas induk di Kecamatan Pulau-Pulau Babar. Puskesmas Tapa memiliki tiga gedung, gedung pertama untuk beberapa pelayanan Kesehatan tingkat dasar, gedung kedua difungsikan untuk pelayanan rawat inap, dan gedung terakhir sedang dalam tahap pembangunan. Posyandu, polindes, dan posbindu berjalan dengan baik dan rutin selama satu bulan sekali. Setiap bulannya, posyandu membagikan makanan tambahan berupa susu, telur, bubur, kacang hijau dan biskuit.

Terkait masalah jaminan kesehatan yang dimiliki oleh warga Desa Tela dan sekitarnya, rata-rata masyarakat sudah menggunakan BPJS. Terdapat beberapa masyarakat yang belum memiliki BPJS dan saat ini kepala desa sedang membantu proses administrasinya.



Gedung Rawat Inap di Wilayah Kerja Puskesmas Tapa



Gedung Pelayanan Tingkat Dasar di Puskesmas Tapa



Ruangan Rawat Inap di Puskesmas Rawat Inap



Pelayanan Posyandu di Desa Tela

Tenaga Kesehatan di Kecamatan Pulau-Pulau Babar meliputi tenaga medis dan non medis. Tenaga medis meliputi dokter umum, dokter gigi, perawat umum, dan bidan. Tenaga kesehatan non medis terdiri dari ahli gizi, ahli farmasi, ahli teknis medis, ahli sanitasi, dan ahli kesehatan masyarakat. Dapat dilihat pada tabel berikut, bahwa Puskesmas Tapa memiliki jumlah tenaga kesehatan mencapai 36 orang.

Tabel III-407. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Pulau-Pulau Babar Tahun 2023

Tenaga Kesehatan	Puskesmas Tapa		Puskesmas manuwui		Puskesmas Tela		Puskesmas Sinairusi	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Dokter Umum	1	2,77	1	5,88	0	0,00	0	0,00
Dokter Gigi	1	2,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Perawat Umum	19	52,77	8	47,05	11	68,75	7	63,63
Bidan	6	16,66	3	17,64	2	12,50	4	36,36
Ahli Gizi	3	8,33	4	23,52	1	6,25	0	0,00
Ahli Farmasi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ahli Teknis Medis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ahli Sanitasi	5	13,88	2	11,76	2	12,50	0	0,00
Ahli Kesehatan Masyarakat	1	2,77	0	0,00	0	0	0,00	0
Jumlah	36	100,00	17	100,00	16		11	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023

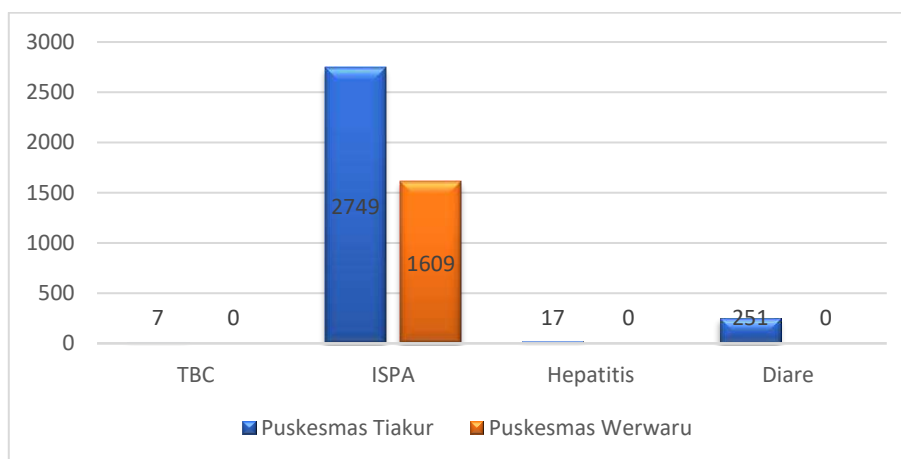
Salah satu aspek dalam menghitung kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan perbandingan rasio tenaga kesehatan. Rasio tenaga kesehatan adalah perbandingan jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Rasio ini digunakan untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan dalam mencapai target pembangunan kesehatan dokter dengan penduduk. Wilayah-wilayah 3T masih banyak kekurangan tenaga medis khususnya dokter. Hasil menunjukkan nilai perbandingan pada **rasio dokter dan penduduk untuk wilayah 3T adalah 1 : 2250**.

Rasio Dokter dan Penduduk Wilayah 3T	Nilai	Keterangan
1 : ≤ 2250	5	Sangat baik
1 : 2251 – 2295	4	Baik
1 : 2296 – 2340	3	Sedang
1: 2341 - 2430	2	Buruk
1 : >2430	1	Sangat Buruk

* diasumsikan kenaikan jumlah penduduk ya kenaikan 2% / tahun dan kelipatannya
Rekomendasi (WHO, 2022) satu dokter per 1000 penduduk.

3.3.5.2.1 Penyakit Menular

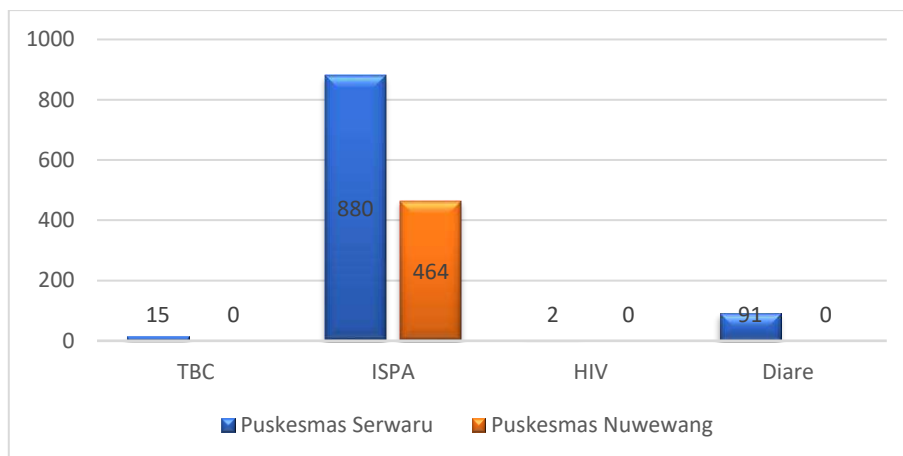
Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit. Wilayah studi selain Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah Kabupaten Maluku Barat Daya yang terdiri dari Kecamatan Moa, Letti, Lakor, Masela, Babar Timur dan Pulau-Pulau Babar. Berikut penjelasan mengenai kondisi penyakit menular di Kabupaten Maluku Barat Daya.



Sumber: Profil Puskesmas Kecamatan MOA, 2023

Gambar III-475. Jumlah dan Jenis Penyakit Menular di Kecamatan Moa pada Tahun 2023

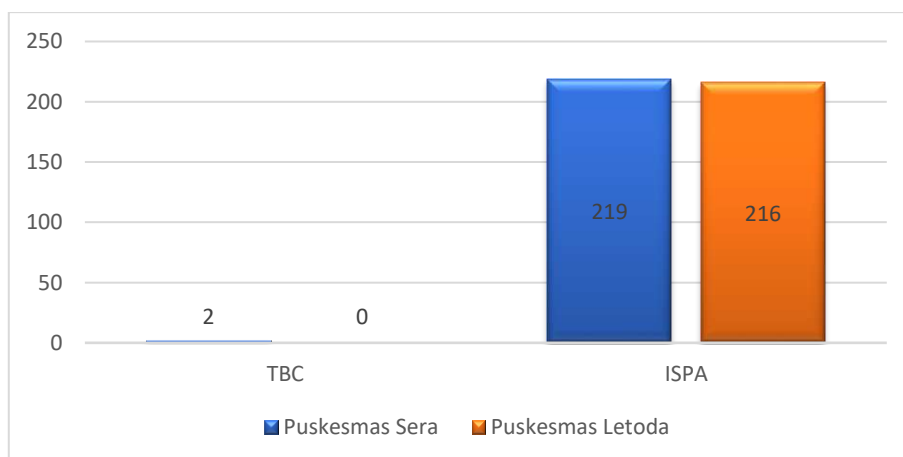
Grafik di atas menunjukkan jumlah kasus penyakit menular wilayah Kecamatan Moa (Puskesmas Tiakur dan Puskesmas Werwaru). Kasus penyakit menular tertinggi yaitu ISPA dengan jumlah kasus di Puskesmas Tiakur mencapai 2.749 dan di Puskesmas Werwaru mencapai 1.609 kasus. Selain ISPA, kasus diare juga cukup banyak menjangkit masyarakat Kecamatan Moa.



Sumber: Profil Puskesmas Kecamatan Letti, 2023

Gambar III-476. Jumlah dan Jenis Penyakit Menular di Kecamatan Letti pada Tahun 2023

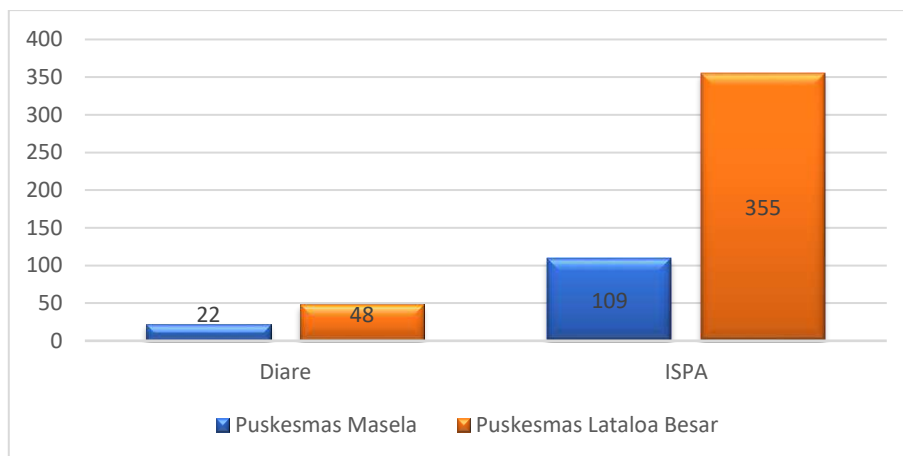
Berdasarkan hasil pencatatan di Puskesmas Serwaru dan Nuweweng bahwa angka penyakit menular yang dominan adalah ISPA dengan kasus 880 di Puskesmas Serwaru dan 464 kasus di Puskesmas Nuweweng. Selanjutnya penyakit lain adalah diare dan TBC tercatat di Puskesmas Serwaru.



Sumber: Profil Puskesmas Kecamatan Lakor, 2023

Gambar III-477. Jumlah dan Jenis Penyakit Menular di Kecamatan Lakor pada Tahun 2023

Wilayah Kecamatan Lakor terdiri dari dua puskesmas. Berdasarkan data dari puskesmas, jumlah kasus penyakit menular tertinggi di dua puskesmas tersebut adalah ISPA dengan jumlah 219 kasus di Puskesmas Sera dan 216 kasus di Puskesmas Letoda, serta terdapat beberapa kasus TBC.



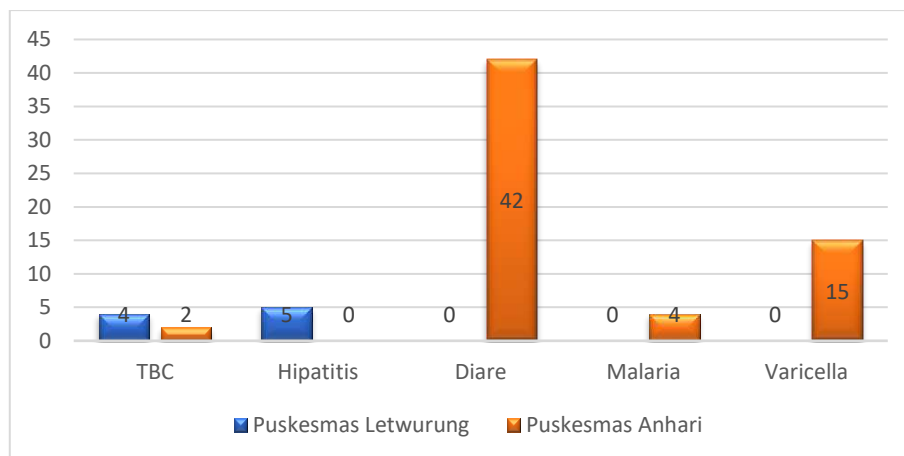
Sumber: Profil Puskesmas Pulau Masela, 2023

Gambar III-478. Jumlah dan Jenis Penyakit Menular di Pulau Masela pada Tahun 2023

Pulau Masela terdiri dari Puskesmas Masela dan Latola Besar. Berdasarkan hasil pencatatan puskesmas tahun 2023 kasus penyakit menular yang dominan adalah ISPA, diikuti dengan kasus diare. Hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat Pulau Masela, rata-rata masyarakat terutama balita, anak-anak, dan lansia lebih rentan terkena ISPA. Ditemukan tugu yang bertuliskan catatan-catatan permasalahan kesehatan penyakit menular dan penyakit tidak menular di Desa Lalawang. Terdapat catatan di dalam tugu tersebut terkait beberapa kasus penyakit. Tahun 1920 pernah terjadi kasus muntaber di Desa Lalawang, yang kedua pada tahun 1937 pernah terjadi kasus cacar yang menimpa Desa Lalawang. Hingga terakhir pada tahun 1947, terdapat banyak kasus kematian ibu pasca melahirkan atau meningkatnya angka kematian ibu.



Gambar III-479. Tugu yang Menceritakan Kisah Permasalahan Kesehatan di Desa Lalawang



Sumber: Profil Puskesmas Kecamatan Babar Timur, 2023

Gambar III-480. Jumlah dan Jenis Penyakit Menular di Kecamatan Babar Timur pada Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, Kecamatan Babar Timur tercatat bahwa penyakit dominan adalah diare yang mencapai 42 kasus selanjutnya varicella dan TBC. Menurut hasil observasi dan wawancara di masyarakat, kasus diare yang tinggi disebabkan oleh masyarakat mengonsumsi buah-buahan tanpa dicuci dahulu. Kasus diare meningkat ketika musim buah-buahan sedang terjadi. Selain musim buah-buahan, kasus diare dan gatal-gatal cenderung meningkat ketika musim hujan. Kasus tersebut sering menjangkit anak-anak yang tidak bisa menjaga kebersihan.

Tabel III-408. Jumlah dan Jenis Penyakit Menular Tahun 2023

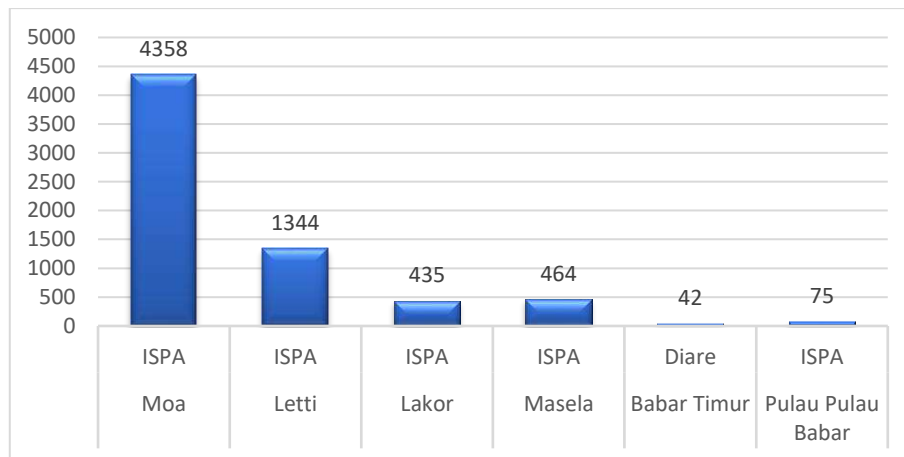
No.	Jenis Penyakit	Puskesmas Kecamatan Babar			
		Puskesmas Tapa	Puskesmas Tela	Puskesmas Munuwui	Puskesmas Sinairusi
1	ISPA	75	--	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa data tercatat hanya di wilayah Puskesmas Tapa yaitu terkait kasus ISPA saja. Hasil lainnya pada kasus penyakit menular yang dominan di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2023 dijelaskan dalam tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel III-409. Jumlah Kasus Penyakit Menular di Kabupaten Maluku Barat Tahun 2023

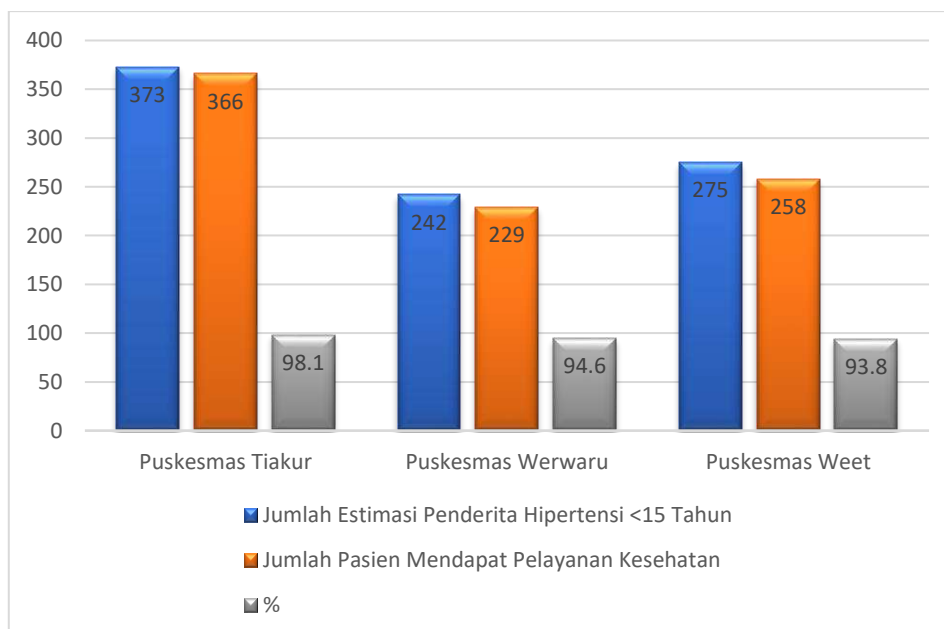
No	Kecamatan	Penyakit Menular terbanyak	Jumlah Kasus
1	Moa	ISPA	4358
2	Letti	ISPA	1344
3	Lakor	ISPA	435
4	Masela	ISPA	464
5	Babar Timur	Diare	42
6	Pulau Pulau Babar	ISPA	75



Gambar III-481. Jumlah kasus Penyakit Menular Terbanyak di Kecamatan-Kecamatan Maluku Barat Daya Tahun 2023

3.3.5.2.2 Penyakit Tidak Menular

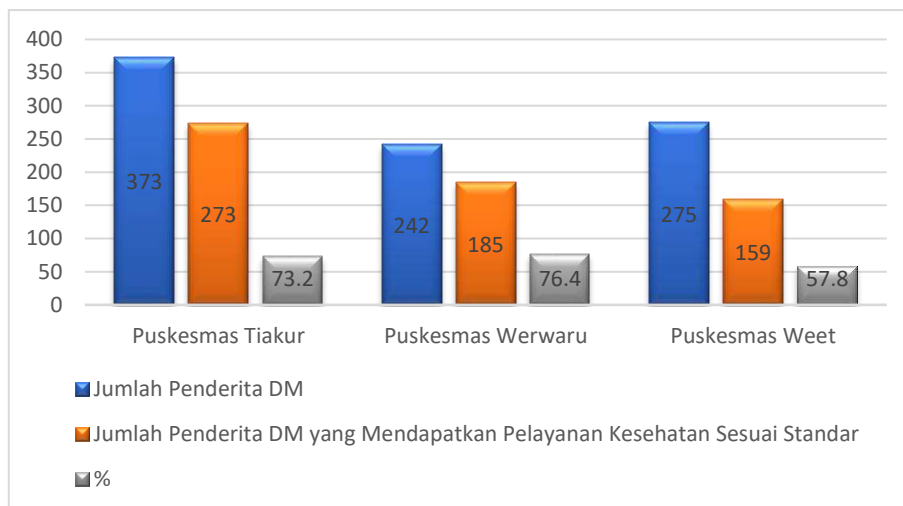
Penyakit tidak menular (PTM), juga dikenal sebagai penyakit kronis, cenderung berlangsung lama dan merupakan hasil dari kombinasi faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku. Jenis utama PTM adalah penyakit kardiovaskular (seperti serangan jantung dan stroke), kanker, penyakit pernafasan kronis (seperti penyakit paru obstruktif kronik dan asma) dan diabetes. CD secara tidak proporsional mempengaruhi masyarakat di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, dimana lebih dari tiga perempat kematian NCD global (31,4 juta) terjadi. Berikut di bawah ini merupakan kondisi dan gejala penyakit tidak menular yang didapatkan dari lokasi studi yaitu di Kabupaten Maluku Barat Daya.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023

Gambar III-482. Estimasi penderita hipertensi di Kecamatan Moa Tahun 2023

Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering disebut sebagai *“the silent killer”*. Jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal pembuluh saraf tepi, dan gangguan saraf. Berdasarkan grafik di atas, jumlah pelayanan kesehatan untuk penderita hipertensi di Puskesmas Tiakur mencapai 98,1%, sementara untuk Puskesmas Werwaru mencapai 94,5%, dan Puskesmas Weet hanya 93,8%.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023

Gambar III-483 Pelayanan penyakit Diabetes Melitus Kecamatan Moa Tahun 2023

Kasus diabetes melitus di Kecamatan Moa cukup tinggi yaitu 890 kasus pada tahun 2023. Jumlah kasus tertinggi berada di Puskesmas Tiakur dengan jumlah mencapai 373 kasus atau 41,9 % kasus dari total penderita.

Tabel III-410. Pelayanan Hipertensi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas Tahun 2023

Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi <15 Tahun			Penderita DM
		Laki Laki	Perempuan	Laki Laki + Perempuan	Jumlah
Letti	Serwaru	148	164	312	283

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023

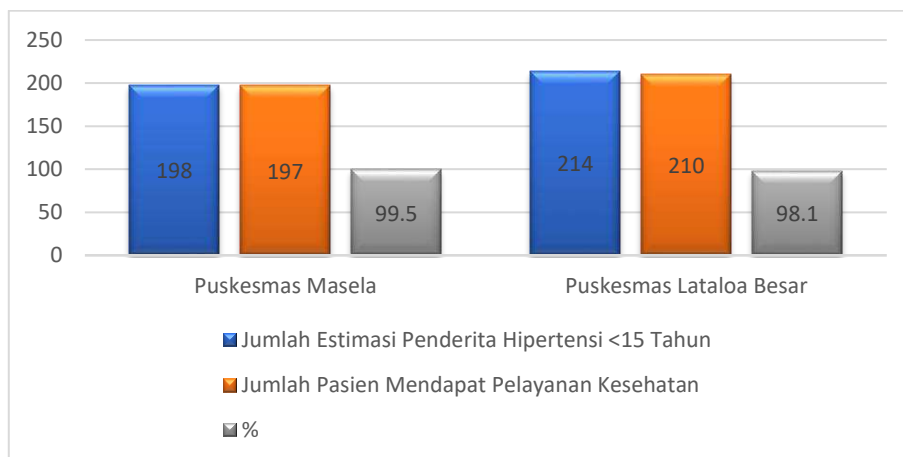
Berdasarkan tabel di atas, estimasi jumlah penderita hipertensi dengan umur <15 tahun di Kecamatan Letti (Puskesmas Serwaru) yaitu sekitar 312 orang dan jumlah kasus diabetes melitus di Kecamatan Letti sebanyak 283 kasus.

Tabel III-411. Pelayanan Hipertensi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas Tahun 2023

Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi <15 Tahun			Penderita DM
		Laki Laki	Perempuan	Laki Laki + Perempuan	Jumlah
Lakor	Sera	119	132	251	251

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023

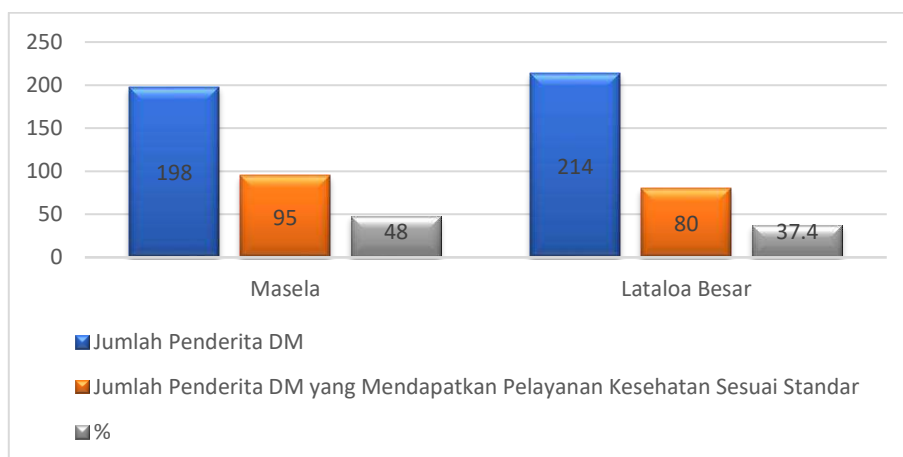
Tabel di atas menunjukkan bahwa estimasi jumlah penderita hipertensi dengan umur <15 tahun di Kecamatan Lakor (Puskesmas Sera) yaitu sekitar 251 orang dan jumlah kasus diabetes melitus di Kecamatan lakor selama tahun 2023 mencapai 251 kasus.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023

Gambar III-484. Estimasi Penderita Hipertensi di Pulau Masela tahun 2023

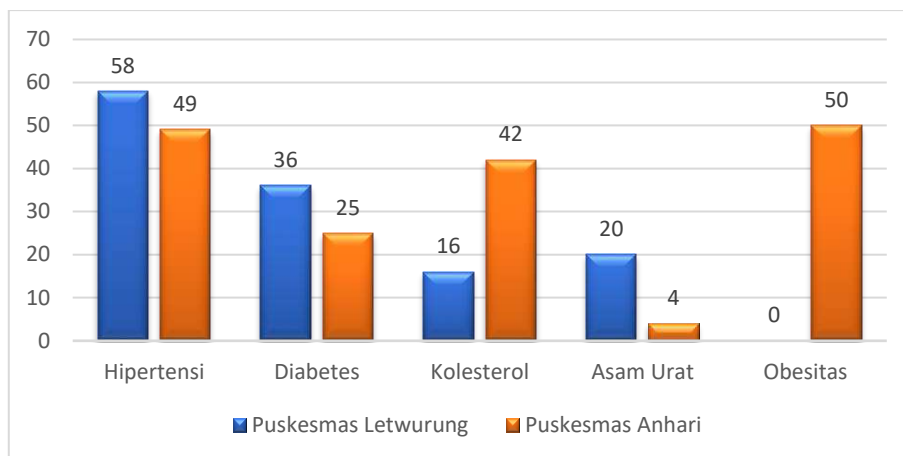
Jumlah estimasi penderita hipertensi di dua puskesmas Pulau Masela mencapai 412 kasus dengan kasus terbanyak di Puskesmas Lataloa Besar. Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas Masela untuk penderita hipertensi mencapai 99,5% dan Puskesmas Lataloa Besar mencapai 98,1%. Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas Masela penderita diabetes melitus masih cukup rendah yaitu sekitar 48% dan Puskesmas Lataloa Besar sebesar 37,4%.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023

Gambar III-485. Pelayanan Diabetes Melitus Kecamatan dan Puskesmas Tahun 2023

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat yang rentan terkena hipertensi rata-rata berusia remaja dan masyarakat lanjut usia, meskipun setiap harinya masyarakat berusia muda dan orang tua sering melakukan aktivitas fisik seperti bermain voli dan sepak bola. Masyarakat di Kecamatan Masela mempunyai kebiasaan unik untuk memasak yaitu selain menggunakan minyak goreng, masyarakat juga menggunakan pasir untuk memasak (biasanya untuk memasak pisang goreng atau sukun goreng).



Sumber: Puskesmas Letwurung dan Anhari Tahun 2023

Gambar III-486. Jumlah dan Jenis Penyakit Tidak Menular Kecamatan Babar Timur Tahun 2023

Penyakit tidak menular di Kecamatan Babar Timur tahun 2023 yang didominasi oleh penyakit hipertensi dengan jumlah 58 kasus di Puskesmas Letwurung dan 49 kasus di Puskesmas Anhari, kemudian disusul dengan penyakit obesitas mencapai 50 kasus, dan penyakit tidak menular lainnya (diabetes, kolesterol dan asam urat).

Tabel III-412. Pelayanan Hipertensi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas Tahun 2023

Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi <15 Tahun			Mendapat Pelayanan Kesehatan	
		Laki Laki	Perempuan	Laki Laki + Perempuan	Laki Laki + Perempuan	
					Jumlah	%
Pulau-Pulau Babar	Tepa	127	137	264	228	86.4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023

Penyakit tidak menular dengan kasus terbanyak di Kecamatan Pulau-Pulau Babar pada tahun 2023 yaitu hipertensi dan diabetes melitus. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masyarakat terbiasa membuat kue-kue lokal menggunakan bahan baku berupa biji mangga karena dapat mengurangi kalori, kolesterol, dan hipertensi. Masyarakat berharap dengan mengonsumsi biji mangga dapat menurunkan risiko terkena hipertensi.

3.3.5.2.3 Status Gizi Masyarakat

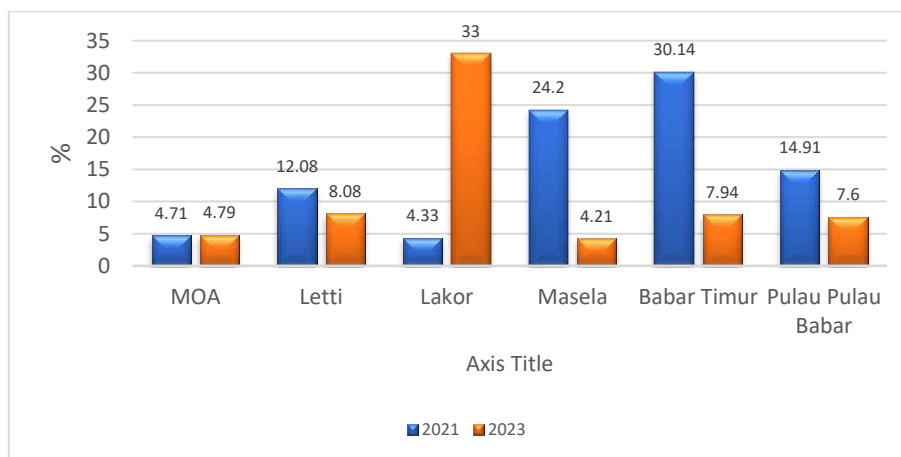
Status gizi masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai kondisi kesehatan suatu populasi. Status gizi yang baik mencerminkan keseimbangan antara asupan nutrisi dan kebutuhan metabolisme tubuh. Berikut penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi masyarakat meliputi stunting dan wasting pada lokasi studi di Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai berikut.

Tabel III-413. Data Prevalensi Stunting dan Wasting di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021 dan 2023

No	Kecamatan/Pulau	Prevalensi Stunting		Prevalensi Wasting	
		2021	2023	2021	2023
1	MOA	4,71	4,79	3,08	2,65
2	Letti	12,08	8,08	5	8,97
3	Lakor	4,33	33	2,52	7,6
4	Masela	24,2	4,21	9,09	1,86
5	Babar Timur	30,14	7,94	0,45	0,89
6	Pulau Pulau Babar	14,91	7,6	20	8,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021 dan 2023

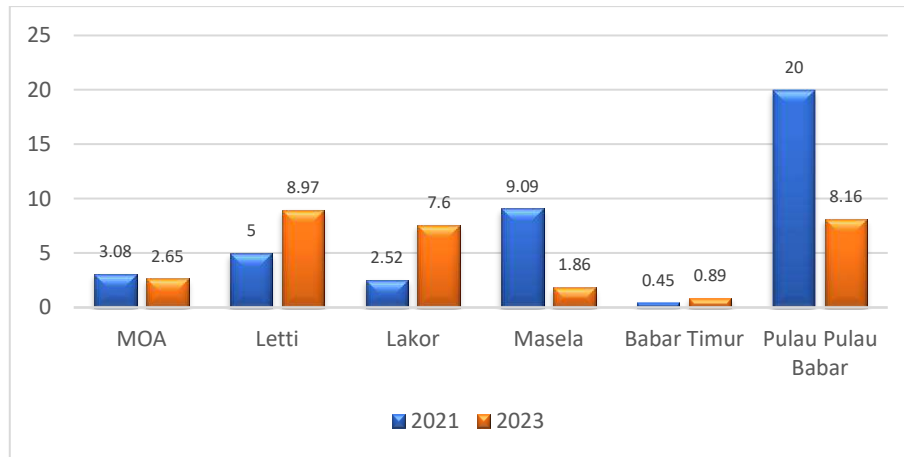
Secara garis besar di Kabupaten Maluku Barat Daya didapatkan data-data yang fluktuatif mengenai data status gizi balita terutama yang berkaitan dengan kejadian *stunting* dan *wasting*. *Stunting* merupakan permasalahan yang mendasar berkaitan dengan kondisi pembangunan manusia dan pembangunan kesehatan masyarakat.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021 dan 2023

Gambar III-487. Prevalensi Stunting MBD tahun 2021 dan 2023

Berdasarkan grafik di atas, angka prevalensi *stunting* tertinggi di Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2021 adalah di Kecamatan Babar Timur (30,14%), sedangkan untuk tahun 2023 prevalensi *stunting* tertinggi yaitu di Kecamatan Lakor (33%). Angka prevalensi *stunting* setiap kecamatan mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2023, akan tetapi ada satu kecamatan yang mengalami peningkatan prevalensi yaitu di Kecamatan Lakor dengan peningkatan yang cukup signifikan.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021 dan 2023

Gambar III-488. Prevelensi wasting MBD tahun 2021 dan 2023.

Berdasarkan grafik prevalensi *wasting* tertinggi di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Tahun 2021 adalah di Kecamatan Pulau-Pulau Babar sebesar 20% sedangkan untuk tahun 2023 tertinggi di Kecamatan Letti sebesar 8,97%. Angka prevalensi *wasting* setiap kecamatan mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2023, akan tetapi ada satu kecamatan yang mengalami peningkatan prevalensi cukup signifikan yaitu di Kecamatan Lakor.

Penduduk Kecamatan Moa memiliki akses yang mudah dalam mendapatkan makanan seperti daging. Kebutuhan daging masyarakat Kecamatan Moa tercukupi karena adanya hewan ternak. Hampir seluruh masyarakat Moa beternak hewan seperti sapi, kambing, babi, dan kerbau. Pulau Moa sendiri terkenal akan kerbau endemiknya. Kerbau tersebut dipelihara secara liar oleh masyarakat. Biasanya kerbau endemik tersebut berkumpul dan berkubang di sekitar Gunung Kerbau. Kerbau di Pulau Moa akan disembelih jika ada acara-acara adat yang sedang berlangsung. Akses masyarakat Moa untuk mendapatkan sayur-sayuran dan kacang-kacangan berasal dari hasil pertanian pribadi. Hasil pertanian yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat yaitu sukun, singkong, jagung, bayam, dan kangkung.

Masyarakat Kecamatan Letti memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan daging-dagingan. Banyak masyarakat yang beternak babi ataupun hewan lainnya, sehingga kebutuhan daging dapat terpenuhi. Masyarakat Kecamatan Letti memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan sayur-sayuran dan kacang-kacangan karena berasal dari hasil pertanian pribadi (jagung, bayam, dan kangkung). Ketika masa paceklik, masyarakat Pulau Letti akan mengonsumsi olahan biji buah mangga yang dikeringkan dan dicampur parutan kelapa. Makanan tersebut digunakan sebagai pengganti makanan pokok.

Masyarakat Lakor memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan makanan berupa daging. Kebutuhan daging dapat terpenuhi karena masyarakat banyak yang beternak hewan seperti sapi, kambing dan babi. Pulau Lakor sendiri terkenal akan kambing lokalnya yang dipelihara secara liar oleh masyarakat lokal. Masyarakat Kecamatan Lakor memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan sayur-sayuran dan kacang-kacangan karena berasal dari hasil pertanian pribadi (sukun, singkong, jagung, bayam, dan kangkung).

Masyarakat Pulau Masela sangat sulit untuk mendapatkan daging, akan tetapi untuk pemenuhan nutrisi dan gizi tergantung oleh adanya ikan-ikan hasil tangkapan. Sayur-sayuran dan kacang-kacangan diperoleh dari hasil bertani. Jumlah hasil pertanian di pulau ini cukup sedikit karena tanah di Pulau Masela cenderung bebatuan (tidak subur dan sulit ditanami).

Masyarakat Babar Timur memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan daging karena ada beberapa warga yang berternak hewan seperti sapi, kambing dan babi. Bahkan, sapi liar juga diburu oleh warga untuk dikonsumsi, sehingga masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan daging-dagingan. Sayur-sayuran dan kacang-kacangan didapatkan dari hasil bertani (sukun, singkong, jagung, talas, ubi, dan kacang hijau).

Masyarakat desa di Pulau Babar juga sering mengonsumsi ikan seperti ikan bubara, ikan tongkol, dan ikan kembung. Selain itu, program pelayanan kesehatan untuk KIA dari Puskesmas Letwurung terus berjalan dengan nama KORIM (Koordinator Imunisasi) serta BIDKOR (Bidang Koordinator) karena banyak kasus terkait gizi kurang pada balita di Desa Letwurung.

3.3.5.2.4 Sanitasi Lingkungan

Status kesehatan lingkungan di wilayah studi dapat dilihat dari kondisi lingkungan yang meliputi kualitas air, udara, tanah, kondisi rumah, serta sarana sanitasi lingkungan penduduk di sekitar lokasi kegiatan. Sarana sanitasi tersebut diantaranya adalah sumber air bersih, prasarana air bersih dan sanitasi (sarana mandi, cuci, kakus, saluran drainase, sarana pembuangan sampah, dan pengendalian vektor penyakit). Parameter indikator pengukuran pada sanitasi lingkungan pada wilayah studi diantaranya pengelolaan air bersih, sarana jamban, pengelolaan dan pembuangan sampah, pengendalian vektor penyakit, dan tingkat kenyamanan lingkungan penduduk. Hasil observasi pengukuran parameter indikator tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

- Pengelolaan Air Bersih

Berdasarkan data yang diperoleh di Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2023, jumlah mengenai sumber air minum masyarakat desa (untuk memasak, mencuci dan kakus) paling utama disokong oleh sumur dan leding yang lokasinya tersebar hingga ke seluruh desa. Selain itu, banyaknya desa menurut sumber air minum di Kecamatan Moa Tahun 2019 – 2021 ada pada tabel di bawah ini.

Tabel III-414. Banyaknya Desa atau Kelurahan Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga di Kecamatan Moa Tahun 2019 – 2021

Fasilitas	2019	2020	2021
	Σ	Σ	Σ
Sumur Bor atau Pompa Air	-	2	1
Sumur	6	3	2
Mata Air	-	1	1
Air Hujan	-	-	-
Leding dengan meteran	1	-	-
Leding tanpa meteran	-	-	1

Sumber: Kecamatan Moa dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapang di Desa Klis Kecamatan Moa, terdapat mata air yang ditampung ke dalam bak dengan ukuran 2 sampai 3 m². Air yang telah ditampung akan dialirkan ke rumah-rumah warga. Warga dikenakan iuran Rp 15.000 per bulan untuk penggunaan

air tersebut. Selain Desa Klis, seluruh penduduk Desa Kaiwatu juga menggunakan mata air sebagai sumber air utamanya.



Sumur di Desa Klis



Bak Penampung Air di Desa Klis



Tempat Penampung Air di Desa Kaiwatu

Berdasarkan data Kecamatan Letti tahun 2023, jumlah mengenai sumber air minum masyarakat desa yang dipergunakan untuk memasak, mencuci, dan kakus paling utama disokong oleh mata air dan sumur bor yang lokasinya tersebar hingga ke seluruh desa. Terdapat sumur bor yang payau di Desa Tutuwaru. Sumur payau biasanya digunakan untuk mandi, mencuci, dan bertani. Selain itu, banyaknya desa menurut sumber air minum di Kecamatan Letti Tahun 2019 – 2021 ada pada tabel di bawah ini.

Tabel III-415. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga di Kecamatan Letti Tahun 2019 – 2021

Fasilitas	2019	2020	2021
	Σ	Σ	Σ
Sumur Bor atau Pompa Air	-	-	-
Sumur	1	1	3
Mata Air	6	6	4
Air Hujan	-	-	-

Sumber: Kecamatan Letti dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung, di Desa Tutuwaru Kecamatan Letti terdapat dua sumur bor. Namun, hanya satu sumur bor saja yang bisa digunakan untuk memasak dan minum. Hal tersebut dikarenakan satu sumur lainnya mengandung kapur, sehingga sumur tersebut hanya dapat digunakan untuk mencuci. Jadi, masyarakat Desa Tutuwaru hanya menggunakan satu sumur saja sebagai sumur utama.



Sumur Bor Hasil Bantuan
Tahun 2023



Pipa yang Menyalurkan Air ke
Bak Penampungan



Bak Penampung Air

Sumber air minum masyarakat Kecamatan Lakor rata-rata menggunakan air dari mata air, sumur, dan air hujan. Berdasarkan data Kecamatan Lakor tahun 2023, jumlah mengenai sumber air minum masyarakat desa yang dipergunakan untuk memasak, mencuci, dan kakus paling utama disokong oleh mata air dan sumur bor yang lokasinya tersebar hingga ke seluruh desa. Terdapat sumur gali yang payau di setiap desanya. Sumur payau biasanya digunakan untuk mandi dan mencuci. Berikut tabel di bawah ini terhadap fasilitas air bersih yang digunakan di wilayah Kecamatan Lakor.

Tabel III-416. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga di Kecamatan Lakor Tahun 2019 – 2021

Fasilitas	2019	2020	2021
	Σ	Σ	Σ
Sumur Bor atau Pompa Air	-	-	2
Sumur	2	2	-
Mata Air	3	3	3
Air Hujan	-	-	-

Sumber: Kecamatan Lakor dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan hasil studi secara langsung di Desa Ketty Letpey Kecamatan Lakor, dapat diketahui bahwa sumber air di desa tersebut menggunakan dua sumber yaitu mata air dan sumur pasang surut. Sumber air utama berasal dari mata air dari gunung. Mata air tersebut akan ditampung ke dalam bak berukuran $3 \times 3 \text{ m}^2$. Setelah ditampung, air tersebut akan dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah penduduk sekitar desa. Sumur pasang surut digunakan untuk mencuci, mandi, kakus, dan bertani.



Bak Penampung Air dari Mata Air Gunung di
Desa Ketty Letpey



Tampak dalam Sumur Pasang Surut

Tampak Luar Sumur Pasang Surut di Desa
Ketty Letpey



Pipa Penyalur Air dari Bak Penampungan ke
Rumah Warga

Fasilitas air bersih di Pulau Masela menurut data yang diperoleh, sumber air minum masyarakat desa yang dipergunakan untuk memasak, mencuci, dan kakus paling utama disokong oleh penampungan air hujan yang jumlahnya mencapai 270 titik tersebar hingga ke seluruh desa. Terdapat sumur gali yang berjumlah 12 titik. Selain itu, banyaknya desa menurut sumber air minum di Kecamatan Masela Tahun 2019 – 2021 ada pada tabel di bawah ini.

Tabel III-417. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga di Kecamatan Masela Tahun 2019 – 2021

Desa	2019	2020	2021
	Σ	Σ	Σ
Sumur Bor atau Pompa Air	-	1	2
Sumur	2	2	2
Mata Air	2	2	1
Air Hujan	7	6	6

Sumber: Kecamatan Masela Dalam Angka Tahun 2022

Hasil observasi dan wawancara kepada warga mengenai sumber mata air yang digunakan masyarakat untuk MCK, dapat diketahui bahwa di Desa Lataloa besar terdapat sumur tua yang mempunyai nama *wakwea* (air batu) yang artinya tidak pernah kering walaupun sedang musim kemarau sekalipun. Sumur tersebut dikelola oleh kepala desa maupun masyarakat dan sudah menggunakan mesin pompa air. Seluruh desa rata-rata menggunakan penampungan air hujan untuk memenuhi kebutuhan MCKnya, ada juga yang sudah memiliki sumur, akan tetapi jumlahnya tidak begitu banyak. Kebutuhan untuk minum bagi warga desa rata-rata terpenuhi dengan adanya air mineral kemasan. Selain itu, Pulau Masela sanitasi air bersih yang buruk. Sudah terdapat dua proyek penyediaan air minum, tetapi sampai sekarang belum ada proyek yang berhasil (salah satunya gagal karena salah titik pengeboran). Proyek tersebut yaitu penyediaan air minum untuk sanitasi berbasis masyarakat (PANSIMAS) dan yang kedua dari PDAM, semua gagal karena air nya terasa sangat asin serta berlumpur, sehingga tidak bisa diminum langsung oleh masyarakat desa.

Pulau Masela sendiri terdapat sumur yang menghasilkan air yang tawar dan jumlahnya ada tiga, satunya untuk minum dan dua sumur lainnya untuk kebutuhan MCK. Selain itu, ada sumur tua yang dianggap sangat sakral dan dilindungi oleh warga Iblatmuntah. Sumur tersebut dapat diminum secara langsung tanpa harus dimasak karena airnya sangat segar dan tidak berbau. Alasan sumur tersebut dilindungi karena sumur tersebut sudah ada dari dahulu. Selain itu, sumur tua tersebut

idak pernah kekeringan bahkan ketika musim kemarau sedang berlangsung sehingga ada beberapa warga dari desa lainnya mengambil air dari sumur tersebut. Nama sumur tersebut adalah *tua tanyema*.



Pengambilan Air di Sumur TUA TANYEMA yang Disakralkan Masyarakat di Desa Iblathmunta



Kondisi Sumur TUA TANYEMA yang Disakralkan Masyarakat di Desa Iblathmunta



Kondisi Sumur Tua di Desa LTB



Tempat Penampungan Air Hujan



Kondisi Sumur Tua di Desa LTB



Pengelolaan Sumber Air Bersih yang Diperoleh dari Sumur di Desa LTB



Salah Satu Selang Proyek Pansimas yang Gagal

Menurut data yang diperoleh di Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Puskesmas Letwuring, untuk wilayah Kecamatan Babar Timur terhitung memiliki Jumlah sarana air minum mencapai 370 titik dan untuk jumlah sarana MCK sendiri mencapai 533 pada tahun 2023. Selain itu, setiap desa yang ada di Desa Letwuring sudah melaksanakan sanitasi berbasis masyarakat di

lingkungannya. Jumlah sasaran air bersih tertinggi ada pada Desa Letwurung yang memiliki 90 titik sumur gali yang tersebar di wilayah tersebut.

Tabel III-418. Sarana Air Bersih & MCK menurut Kecamatan Pada Tahun 2023

Kecamatan	Puskesmas Kecamatan	Jumlah Sarana Air Minum	Jumlah Sarana MCK
		Σ	Σ
Kecamatan Babar Timur	Puskesmas Letwurung dan Puskesmas Ahanari	370	533

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023

Tabel III-419. Data Kesling UPTD Puskesmas Rawat Inap Letwurung Tahun 2023

Nama Desa Kecamatan Letwurung	Jumlah KK	Desa Yang Melaksanakan STBM	Jumlah Sasaran Air Bersih		
			Sumur Gali	Mata Air Dilindungi	Perpiaan
Letwurung	1333	1	90	1	20
Kokwari	793	1	60	-	-
Kroing	508	1	6	2	65
Yatoke	642	1	-	2	77
Nakarhamto	249	1	-	2	32
Ilwiyar	249	1	-	2	32

Sumber: Puskesmas Letwurung Tahun 2023

Menurut hasil studi yang diperoleh di Desa Letwurung hingga ke Anhanari dan sekitarnya, untuk kebutuhan sanitasi air lebih banyak memanfaatkan sumber mata air secara langsung maupun sumur gali, dan sumur bor yang difungsikan oleh masyarakat desa sebagai penunjang keperluan MCK. Akan tetapi, ada juga yang menggunakan air PAM dari PDAM. Berdasarkan hasil observasi di Desa Emplawas terdapat pipa Pansimas, tetapi sudah tidak berfungsi lagi. Pipa tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar lagi. Kondisi pipa tersebut saat ini sudah terputus bahkan seperti proyek yang gagal.



Gambaran Sumur Gali yang ada di Desa Emplawas



Sumur Gali yang Sudah Menggunakan Pompa Air yang Digunakan oleh Masyarakat Emplawas



Kondisi Pipa PANSIMAS yang Terhubung di Desa Emplawas



Kondisi Pipa PANSIMAS yang Sudah Rusak Terpotong

Menurut data yang diperoleh di Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya, Kecamatan Pulau-Pulau Babar memiliki jumlah sarana air minum mencapai 392 titik dan untuk jumlah sarana MCK sendiri juga mencapai 710 titik pada tahun 2023. Berikut rincian data dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III-420. Sarana Air Bersih & MCK menurut Kecamatan Pada Tahun 2023

Kecamatan	Puskesmas Kecamatan	Jumlah Sarana Air Minum	Jumlah Sarana MCK
		Σ	Σ
Kecamatan Pulau Babar	Puskesmas Tapa, Tela, Manuwui, dan Sinairusi	392	710

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023

Berdasarkan hasil studi, akses air bersih di Kecamatan Pulau-Pulau Babar sangat banyak dan melimpah, sehingga masyarakat di Desa Tapa maupun desa lainnya bisa memanfaatkan mata air yang mengalir untuk digunakan sebagai kebutuhan MCK. Masyarakat di kecamatan juga ada yang menggunakan sumur bor maupun sumur gali. Selain itu, PANSIMAS dan PAM juga ada di Desa Tapa. Masyarakat dibebani iuran sekitar 100 – 200 ribu untuk pembayaran air bersih. Selain itu, di Desa Tela terdapat sumber air bersih yang berasal dari mata air dan air tersebut bisa langsung diminum tanpa harus dimasak terlebih dahulu.



Sumber Mata Air Terletak di Desa Tela



Sarana Air Bersih yang Ada di Desa Tela

- Sarana Jamban

Hampir setengah rumah tangga di Kecamatan Moa memiliki jamban pribadi. Sisanya memakai jamban komunal, baik berbagi dengan tetangga ataupun dengan keluarga lainnya. Berikut daftar jumlah jamban yang dimiliki masyarakat Kecamatan Moa.

Tabel III-421. Sarana MCK menurut Kecamatan Pada Tahun 2024

Jumlah Rumah	Yang Memiliki MCK	Keterangan
1027	607	

Sumber: UPTD Puskesmas Werwaru Tahun 2024

Berdasarkan hasil observasi lapang dan wawancara, dapat diketahui bahwa hampir seluruh penduduk Pulau Moa sudah memiliki jamban di masing-masing rumah mereka untuk perilaku Buang Air Besar (BAB). Ada yang sudah memiliki jamban jenis leher angsa dan ada yang menggunakan jenis jamban cemplung, akan tetapi ada juga warga desa di Kecamatan Moa yang masih menggunakan toilet atau jamban komunal. Menurut hasil studi observasi dan wawancara, dapat diketahui bahwa hampir seluruh penduduk P. Moa sudah bertanggung jawab akan perilaku BABS.



Gambar III-489 Salah satu jamban milik warga Desa Kaiwatu Kecamatan Moa

Berdasarkan hasil observasi lapang dan wawancara di Kecamatan Letti, dapat diketahui bahwa hampir seluruh penduduk Pulau Letti sudah memiliki jamban di masing-masing rumah mereka untuk perilaku Buang Air Besar (BAB). Ada yang sudah memiliki jamban jenis leher angsa dan ada yang menggunakan jenis jamban cemplung, akan tetapi ada juga warga desa di Kecamatan Letti yang masih menggunakan komunal.



Gambar III-490 Salah satu jamban milik warga Desa Tutuwaru P. Letti

Hampir seluruh penduduk Pulau Lakor sudah memiliki jamban di masing-masing rumah mereka untuk perilaku Buang Air Besar (BAB). Ada yang sudah memiliki jamban jenis leher angsa dan ada yang menggunakan jenis jamban cemplung, akan tetapi ada juga warga desa di Kecamatan Lakor yang masih menggunakan jamban komunal.



Gambar III-491 Salah satu jamban milik warga Desa Ketty Letpey P. Lakor

Terkait perilaku Buang Air Besar (BAB) warga desa di Pulau Masela rata-rata sudah memiliki jamban pribadi di masing-masing rumah. Ada yang sudah memiliki jamban jenis leher angsa dan ada yang menggunakan jenis jamban cemplung, akan tetapi ada juga warga desa di Kecamatan Masela yang masih menggunakan jamban komunal.



Gambar III-492 Salah Satu Jamban masyarakat Desa Iblathmuntah

Berdasarkan studi yang didapatkan di Pulau Babar untuk perilaku Buang Air Besar (BAB), warga desa rata-rata sudah memiliki jamban di masing-masing rumah, akan tetapi kondisinya masih kurang baik. Selain itu, ada yang sudah memiliki jamban jenis leher angsa dan ada yang menggunakan jenis jamban cemplung.



Gambar III-493 Jamban yang ada di Desa Emplawas

Permasalahan terkait Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sudah teratasi dengan sangat baik, dibuktikan dengan di Desa Tepa, Kecamatan Pulau-Pulau Babar sudah tidak ada kasus kejadian mengenai BABS. Tahun lalu juga sempat ada bantuan dalam bentuk materil untuk pembangunan jamban bagi masyarakat yang belum memiliki jamban sendiri.



Gambar III-494 Jamban yang ada di Desa Tepa

- **Pengelolaan dan Pembuangan Sampah**

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, masyarakat Pulau Moa membuang sampah dengan cara dikumpulkan di kebun atau pantai. Sampah yang sudah terkumpul akan dibakar oleh masyarakat. Belum ada pengelolaan terkait limbah dan sampah di pulau tersebut. Sudah terdapat

tempat pembuangan akhir di Desa Kaiwatu dan berfungsi dengan baik. Di Desa Kaiwatu di setiap rumahnya sudah memiliki tong sampah. Setiap 2-3 hari sekali, tim kebersihan desa akan memungut sampah di tong tersebut lalu dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Setiap rumah akan dikenakan iuran kebersihan sebesar Rp 10.000.



Tong Sampah di Depan
Rumah Warga Desa Kaiwatu



Mobil *Pick Up* Pengangkut
Sampah



TPA Desa Kaiwatu

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, masyarakat wilayah Kecamatan Letti memiliki perilaku membuang sampah dengan cara dikumpulkan di kebun atau pantai. Sampah yang sudah terkumpul akan dibakar oleh masyarakat. Belum ada pengelolaan terkait limbah dan sampah di pulau tersebut. Tempat pembuangan akhir belum tersedia di pulau ini.

Perilaku membuang sampah masyarakat Pulau Lakor masih menggunakan cara yang sama seperti di pulau lainnya yaitu dengan cara dikumpulkan di kebun atau pantai. Sampah yang sudah terkumpul akan dibakar oleh masyarakat. Belum ada pengelolaan terkait limbah dan sampah di pulau tersebut. Berdasarkan hasil studi terkait perilaku maupun kebiasaan pengelolaan dan pembuangan sampah, masyarakat Desa Iblatmuntah, memiliki dua macam cara untuk mengelola sampah. Pengelolaan yang pertama yaitu sampah dibakar menggunakan batok kelapa, yang kedua sampah ditimbun di dalam pasir. Sejauh ini menurut hasil observasi dan wawancara, Pulau Masela belum memiliki tempat penampungan akhir maupun tempat pengelolaan sampah.

Menurut hasil studi yang didapatkan dari warga Kecamatan Babar timur terkait perilaku kebiasaan masyarakat dalam pembuangan maupun pengelolaan sampah, masyarakat cenderung membuangnya dengancara ditimbun ataupun dibakar. Hal tersebut dilakukan karena di desa tersebut masih belum memiliki tempat penampungan akhir ataupun tempat pengelolaan sampah. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya sampah yang berserakan di pantai dan di jalanan sekitar wilayah Kecamatan Babar Timur. Perilaku pembuangan ataupun pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau-Pulau Babar, ditemukan bahwa masyarakat cenderung membakar sampahnya secara langsung tanpa diolah secara 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*). Selain itu, saluran IPAL oleh masyarakat dialirkan langsung menuju laut.



Gambar III-495 Gambaran Saluran IPAL Masyarakat di Desa Tela

- **Pengendalian Vektor Penyakit**

Vektor pembawa penyakit adalah Vektor adalah hewan yang bertindak sebagai penular penyebab penyakit (agen) dari host pejamu yang sakit ke pejamu lain. *Rodent* adalah binatang transmitter penyakit dengan hewan mamalia seperti tikus, kucing, anjing, yang perlu diwaspadai. Hal tersebut perlu diwaspadai karena keberadaan hewan/serangga transmitter erat kaitannya dengan status kesehatan lingkungan di wilayah studi. Kegiatan domestik akan menghasilkan timbulan limbah padat maupun cair. Populasi vektor dan *rodent* transmitter penyakit ini cenderung meningkat diakibatkan oleh adanya timbulan sampah organik maupun anorganik akibat kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya (sampah dari kegiatan domestik yang dihasilkan oleh tenaga kerja, air yang tergenang, musim/cuaca, dan lain-lain).

Musim tertentu (pancaroba, penghujan) di wilayah studi akan terjadi peningkatan populasi vektor pembawa penyakit. Di wilayah studi wabah penyakit menular yang disebabkan vektor penyakit adalah Demam Berdarah Dengue (DB) dan malaria pada bulan-bulan tertentu (prevalensinya meningkat). Oleh karena itu, dilakukan program pengendalian vektor penyakit berupa penyemprotan dan pengasapan. Namun, pengendalian vektor di wilayah studi belum dilakukan secara optimal.

- **Tingkat Kenyamanan Lingkungan Penduduk**

Status kesehatan masyarakat di wilayah studi bisa dikenali/diukur dengan tingkat kenyamanan lingkungan yang dirasakan oleh penduduk. Variabel untuk mengukur tingkat kenyamanan penduduk adalah adanya gangguan lingkungan akibat paparan bising, kemacetan lalu lintas, dan lain-lain. Variabel yang diukur untuk menilai gangguan kesehatan lingkungan misalnya gangguan kenyamanan lingkungan (*infermity*) akibat paparan polutan, seperti paparan debu, kebisingan, kemacetan, dan lain-lain. Gangguan kesehatan masyarakat, ketika timbul kesakitan (*morbidity*), dan timbulnya keterbatasan (*disability*), serta yang paling ekstrim adalah timbulnya kematian (*mortality*). Cara melihat adanya gangguan kesehatan lingkungan di wilayah pemantauan yaitu perlu dilakukan wawancara terkait apakah terdapat keluhan adanya paparan pencemar. Setelah itu, dianalisis mengenai kondisi/kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat di wilayah studi. Dari hasil survei terkait dengan gangguan kenyamanan lingkungan yang dirasakan responden adalah sebagai berikut: gangguan kenyamanan lingkungan karena paparan paparan debu dengan

frekuensi jarang; paparan kebisingan dengan frekuensi sering; paparan sampah dengan frekuensi jarang; sedangkan yang mengeluhkan adanya gangguan air keruh, dan jalan rusak tidak ada. Selanjutnya gangguan Kesehatan yang terkait dengan kenyamanan lingkungan, dengan variabel: keluhan mata pedih (frekuensi jarang), keluhan sesak nafas (frekuensi sering, keluhan batuk pilek (frekuensi sering), keluhan gatal kulit (frekuensi sering).

- Skala Sanitasi Lingkungan

Status kesehatan lingkungan di wilayah studi dapat dilihat dari kondisi lingkungan yang meliputi kualitas air, udara, dan tanah; kondisi rumah, serta sarana sanitasi lingkungan penduduk di sekitar lokasi kegiatan. Sarana sanitasi tersebut diantaranya adalah sumber air bersih, prasarana air bersih dan sanitasi (sarana mandi, cuci, kakus, saluran drainase, sarana pembuangan sampah, dan pengendalian vektor penyakit). Kondisi/status kesehatan lingkungan sangat memengaruhi kualitas kesehatan masyarakat karena kebutuhan hidup secara hayati manusia dipenuhi oleh lingkungannya. Kondisi sanitasi lingkungan terhadap potensi munculnya suatu penyakit atau terjadinya gangguan kesehatan di masyarakat sekitar lokasi rencana kegiatan, meliputi sumber air bersih dan tempat pembuangan tinja, dan makanan. Berdasarkan indikator STBM untuk pengukuran skala lingkungan sanitasi lingkungan perlu adanya data mengenai sarana jamban. Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masyarakat cakupan sudah hampir tidak ada. Sesuai dengan RPJMN Kemenkes tahun 2024, bahwa target sanitasi total berbasis masyarakat adalah 90%.

Sanitasi Layak	Nilai	Keterangan
$\geq 90\%$	5	Sangat baik
70 - 89	4	Baik
60 - 69	3	Sedang
50 - 59	2	Buruk
$< 50\%$	1	Sangat Buruk

Hasil menunjukkan untuk indikator sanitasi layak mengacu kepada 5 pilar indikator sanitasi total berbasis masyarakat, yaitu:

- Stop BABS
- Cuci Tangan Pakai Sabun
- Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga
- Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

3.3.5.3 Evaluasi Komponen Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan evaluasi untuk komponen kesehatan dilihat dari beberapa aspek seperti 10 penyakit terbanyak, penyakit menular, penyakit tidak menular, dan status gizi. Hal tersebut ada kaitannya dengan kondisi lingkungan. Faktor-faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat yang paling besar pengaruhnya adalah perilaku dan lingkungan, lalu diikuti dengan fasilitas kesehatan, dan genetik.

Berdasarkan dokumen sebelumnya didapatkan informasi bahwa penyakit paling dominan dari 10 penyakit terbanyak yang tercatat adalah ISPA, sedangkan untuk data terbaru penyakit yang dominan adalah ISPA juga. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara data sebelumnya dengan data terbaru yang berkaitan dengan 10 penyakit.

Penyakit menular yang dominan pada dokumen sebelumnya adalah diare, akan tetapi untuk data yang terbaru kasus diare dari beberapa lokasi studi tidak mendominasi. Terkait masalah penyakit tidak menular dari dokumen sebelumnya yaitu hipertensi dan diabetes. Penyakit tersebut masih sama dengan data terbaru.

Permasalahan gizi yang berkaitan dengan masalah lingkungan adalah *stunting* dan *wasting*. Belum ada informasi terkait data-data tersebut di dokumen sebelumnya. Berdasarkan data terbaru, didapatkan hampir di setiap lokasi studi terjadi penurunan angka prevalensi *stunting*. Namun, ada satu lokasi yang jumlah kasusnya mengalami peningkatan yaitu di Kecamatan Lakor, sedangkan prevalensi *wasting* mengalami peningkatan di Kecamatan Letti dan Lakor.

3.4 Usaha dan/atau Kegiatan Lainnya di Sekitar Lokasi Proyek

Pada lokasi rencana kegiatan proyek OLNG, yaitu yang terletak di sisi sebelah barat Teluk Saumlaki, masuk dalam wilayah Desa Lermatang, tidak ditemukan adanya kegiatan-kegiatan antara lain industri, transportasi darat yang padat (kepadatan lalu lintas darat saat ini diperkirakan memiliki rasio V/C sekitar <0,2 yang masuk dalam tingkat pelayanan A), maupun permukiman yang padat yang secara signifikan dapat berpengaruh atau menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

A. Perkebunan Tebu

Terdapat rencana pengembangan perkebunan tebu dan pabrik gula pasir, yang akan dibangun oleh PT Tanimbar Nanim Sejahtera sebagai pemrakarsa proyek, mencakup area seluas 11.280 ha yang sudah memperoleh izin lingkungan melalui sistem OSS, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar). Meskipun demikian, di dalam izin lokasi kegiatan tersebut yang tertuang dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat No. 503-893-Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Lahan Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula Pasir atas nama PT Tanimbar Nanim Sejahtera Pada Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun 2017, pada Butir 9, tercantum “Apabila lahan yang diberikan izin lokasi ditetapkan sebagai lokasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan proyek strategis nasional bagi pembangunan fasilitas Lapangan Abadi Wilayah Kerja Blok Masela maka pemegang izin wajib untuk melepaskan lahan dimaksud kepada pelaksana proyek strategis nasional Blok Masela melalui Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kegiatan ini kelak pada tahap konstruksi maupun operasi berpotensi menimbulkan dampak terhadap kegiatan proyek Pengembangan lapangan Gas Abadi, terutama kegiatan OLNG.

B. Pemukiman Penduduk dan Kampung Nelayan

Pemukiman penduduk di sekitar lokasi proyek adalah kampung Lermatang Lama dan Lermatang Baru, Bomaki dan Latdalam. Keempat kampung ini terletak di pesisir laut, dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan, maka juga merupakan kampung nelayan.

Aktivitas nelayan melakukan penangkapan ikan di laut. Penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan perahu mesin tempel (*outboard engine*) maupun mesin dalam (*inboard engine*), yang terlihat di kawasan laut di Teluk Saumlaki. Di samping itu, terdapat kegiatan nelayan yang sebagian merupakan nelayan pancing dan terdapat beberapa buah bagan-bagan kecil berukuran lebih-kurang 30 m x 30 m yang tersebar di mulut Teluk Saumlaki. Gambar di bawah ini menunjukkan kondisi desa nelayan di Desa Lermatang.

Kegiatan nelayan diperkirakan tidak menimbulkan dampak terhadap rencana kegiatan proyek, namun akan menerima dampak dari kegiatan rencana proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi, terutama kegiatan OLNG.



Gambar III-496 Kondisi Desa Nelayan di Desa Lermatang.

C. Pengumpulan Hasil Hutan

Aktivitas pengumpulan hasil hutan kayu dan non-kayu (madu, buah-buahan, tanaman obat, dan lainnya) dari hutan sekunder oleh masyarakat di sekitar proyek.

Aktivitas ini diperkirakan tidak menimbulkan dampak terhadap rencana kegiatan proyek.

D. Budidaya Rumput Laut

Budidaya rumput laut tersebar di sekitar pesisir Teluk Saumlaki dan Pulau Selaru pada perairan laut yang dangkal. Kondisi perairan dan kualitas air laut di daerah ini merupakan habitat rumput laut sehingga mendukung dijadikan lokasi-lokasi budidaya rumput. Di sekitar rencana proyek OLNG terdapat budidaya rumput laut yang dikelola oleh masyarakat Lermatang, dan terdapat pengolahan rumput laut di dekat Desa Lermatang.

Kegiatan budidaya rumput laut ini diperkirakan tidak menimbulkan dampak terhadap rencana kegiatan proyek, namun akan menerima dampak dari kegiatan rencana proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi, terutama kegiatan OLNG.

E. Kegiatan Pertanian

Tidak terdapat secara khusus daerah pertanian yang terkonsentrasi dalam suatu wilayah, namun kegiatan pertanian dilakukan oleh masyarakat terutama penduduk Kampung Lermatang Lama dan Lermatang Baru secara terbatas sekali yang tersebar tidak merata dengan cara tradisional, yaitu dengan menebang semak belukar dan/atau membakar semak belukar (tebas-bakar) untuk ditanami dengan tanaman-tanaman budidaya seperti antara lain pisang, singkong, dan tanaman semusim lainnya. Secara umum kondisi tanah di Pulau Yamdena, di sekitar lokasi proyek, memiliki ketebalan solum tanah yang sangat tipis. Pola pertanian ladang dengan cara tebas-bakar.

Kegiatan ini diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan OLNG, karena gas sangat sensitif terhadap sumber percikan api.



Gambar III-497 Lahan Ladang Tradisional Masyarakat

F. Bandar Udara (Bandara) Mathilda Batlayeri

Bandara Mathilda Batlayeri terletak sekitar 21 km sebelah utara rencana lokasi OLNG merupakan fasilitas transportasi antar pulau, dari Ambon, Tual, dan Kisar. Bandara ini merupakan bandara baru, mulai beroperasi pada 9 Mei 2014 menggantikan Bandara Saumlaki. Bandara Mathilda Batlayeri memiliki panjang lintasan 1.640 m dan lebar 30 m dan dapat didarati pesawat jenis ATR-72. Saat ini jadwal rutin penerbangan Ambon – Saumlaki dan sebaliknya dilayani oleh 2 (dua) maskapai penerbangan swasta yang beroperasi setiap hari. INPEX direncanakan akan menggunakan Bandara Mathilda Batlayeri untuk operasional kegiatan INPEX selama tahap konstruksi dan operasi. Mengingat jarak antara bandara Mathilda Batlayeri dan lokasi rencana OLNG cukup jauh, diperkirakan tidak ada dampak langsung dari kegiatan bandara terhadap rencana kegiatan OLNG.

Kegiatan Bandara Mathilda Batlayeri ini diperkirakan tidak menimbulkan dampak terhadap rencana kegiatan proyek, namun akan menerima dampak dari kegiatan rencana proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi, terutama kegiatan OLNG.



Gambar III-498 Bandar Udara Mathilda Batlayeri, Saumlaki

G. Pelabuhan Laut Saumlaki

Pelabuhan Saumlaki merupakan pelabuhan Kelas IV dengan panjang jettty 150 meter dan kedalaman 6-9 meter. Beban yang mampu diterima oleh dermaga maksimum 5 ton/m². Merupakan pintu gerbang keluar masuk barang dan komoditas lainnya dari dan ke Saumlaki serta tempat berlabuhnya kapal nelayan untuk menurunkan hasil tangkapan. Komoditas barang yang dibongkar di Pelabuhan Saumlaki didistribusikan ke seluruh Pulau Yamdena, serta hasil komoditas pertanian dan lainnya dari Pulau Yamdena dimuat di Saumlaki termasuk keberangkatan dan penurunan penumpang yang menggunakan jasa transportasi kapal laut. Pelabuhan Saumlaki terletak di sisi Timur Teluk Saumlaki serta di sebelah Timur rencana lokasi Proyek O LNG.

Kegiatan Pelabuhan Laut Saumlaki ini diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap rencana kegiatan proyek, oleh lalu lintas kapal menuju dan dari pelabuhan serta akan menerima dampak dari kegiatan rencana proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi oleh pergerakan kapal-kapal proyek selama tahap konstruksi dan operasi.



Gambar III-499 Pelabuhan Saumlaki

H. Depo Minyak Pertamina

Depo Minyak Pertamina UPMS VI – Saumlaki merupakan depo penyimpanan bahan bakar minyak yang dilengkapi dengan tanki-tanki untuk penyimpanan BBM (minyak diesel, bensin, minyak tanah dan avtur) untuk menyuplai kebutuhan BBM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Depo Minyak Pertamina memiliki jetti sepanjang 300 m untuk merapat kapal tanker pembawa BBM.

Kegiatan Depo Minyak Pertamina Saumlaki ini diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap rencana kegiatan proyek, oleh lalu lintas kapal pengangkut minyak menuju dan dari pelabuhan akan menerima dampak dari kegiatan rencana proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi oleh pergerakan kapal-kapal proyek selama tahap konstruksi dan operasi.



Gambar III-500 Terminal BBM Saumlaki PT Pertamina



Gambar III-501 Jetty Depo BBM Pertamina

I. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanan terletak di Saumlaki sebelah utara Pelabuhan Saumlaki. Pelabuhan Perikanan ini sebagai *fish landing* untuk hasil tangkap ikan maupun produk laut lainnya oleh nelayan dari Teluk Saumlaki maupun luar Teluk Saumlaki.

Kegiatan Pelabuhan Perikanan ini diperkirakan tidak menimbulkan dampak terhadap rencana kegiatan proyek, namun akan menerima dampak dari kegiatan rencana proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi, terutama kegiatan OLNG. Baik tahap konstruksi maupun tahap operasi.

J. Kegiatan Pariwisata

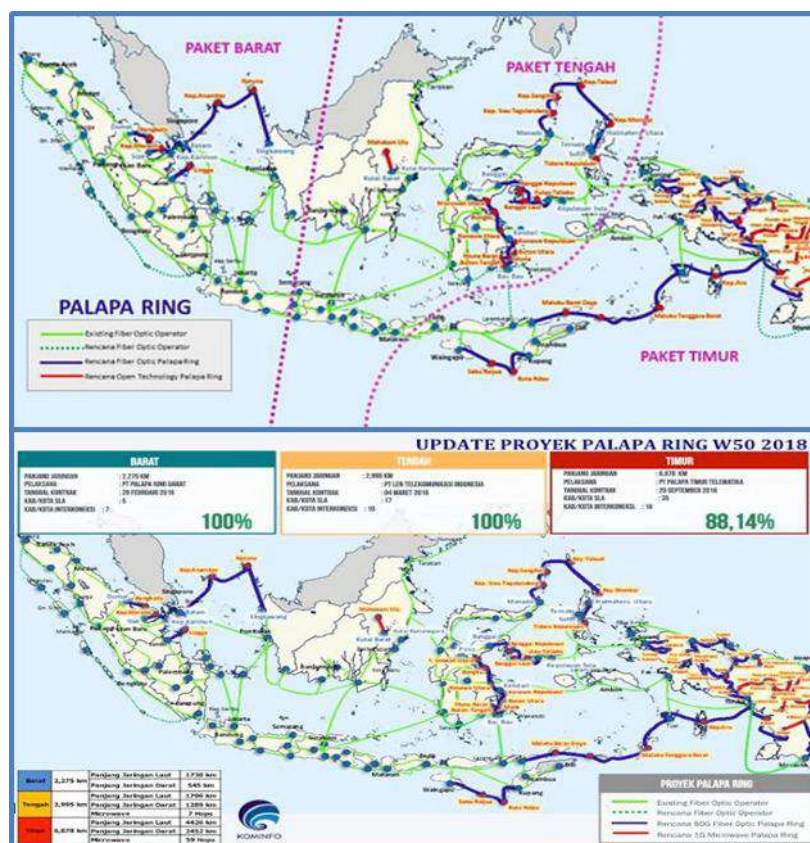
Saat ini tidak terdapat kegiatan pariwisata di sekitar rencana kegiatan proyek, namun pemda setempat merencanakan akan membangun daerah pariwisata di Pulau Matakus, Pulau Anggarmasa dan Pulau Astubun namun ketiga pulau ini masuk dalam Kawasan PIPPIB.

Apabila Kawasan pariwisata kelak dibangun, kegiatan ini diperkirakan tidak berpotensi menimbulkan dampak terhadap proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi, terutama kegiatan OLNK.

K. Kabel Laut Palapa Ring Timur

Pemerintah Indonesia merencanakan membangun Kabel Laut Palapa Ring Timur yang membentang dari NTT hingga Papua. Kabel Laut ini dari Sumbawa diletakkan di bawah laut melewati Pulau Yamdena (Saumlaki) tersambung ke Pulau Tual dan berlanjut ke Pulau Papua seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Kegiatan peletakan kabel laut Palapa Ring Timur, diperkirakan tidak berpotensi menimbulkan dampak terhadap rencana kegiatan proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi, namun pihak INPEX akan memetakan lokasi kabel laut ini, sebelum kegiatan konstruksi dan operasi berlangsung.



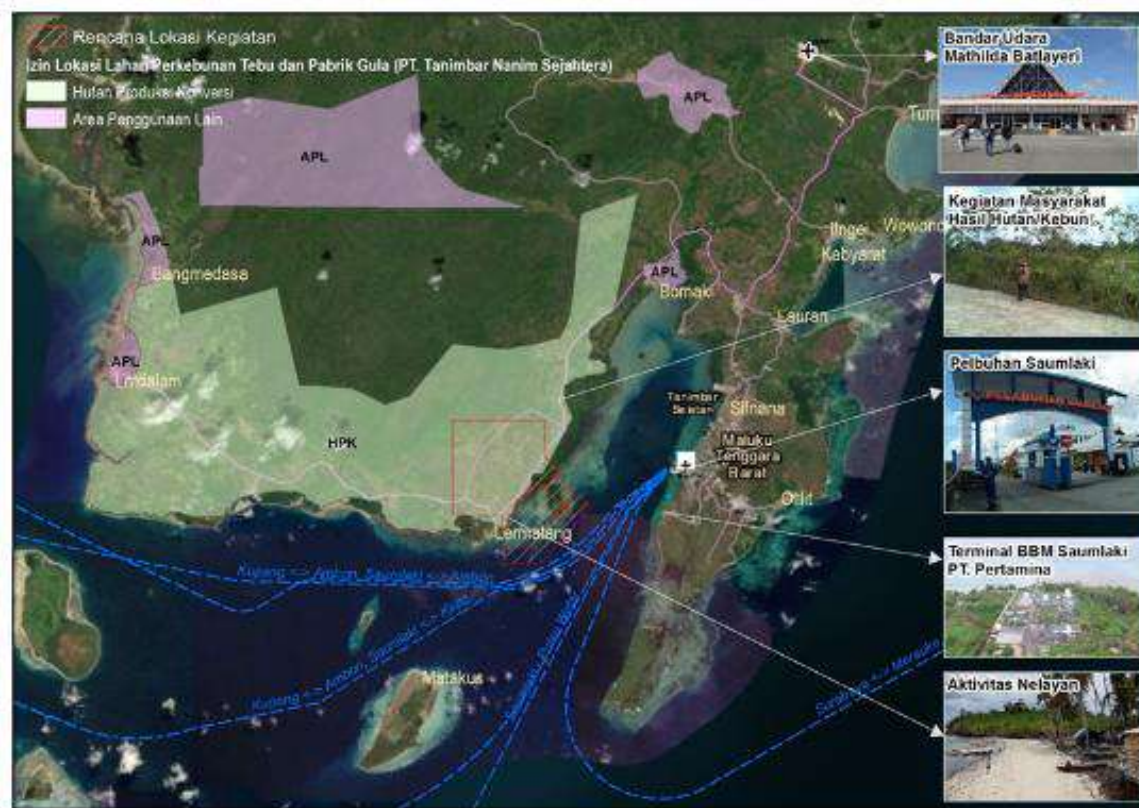
Gambar III-502 Letak Jalur Palapa Ring Timur

L. Kegiatan Migas di Sekitar Lokasi Proyek

Wilayah Kerja West Yamdena yang berlokasi di Kepulauan Tanimbar daratan dan lepas pantai dioperasikan oleh PT. Saka Energi Yamdena Barat. Wilayah kerja tersebut ditandatangani pada tahun

2018, saat ini masuk dalam tahapan eksplorasi. Di samping itu, terdapat Wilayah Kerja Babar Selaru yang dioperasikan oleh INPEX Babar Selaru Ltd. yang masuk dalam tahap eksplorasi.

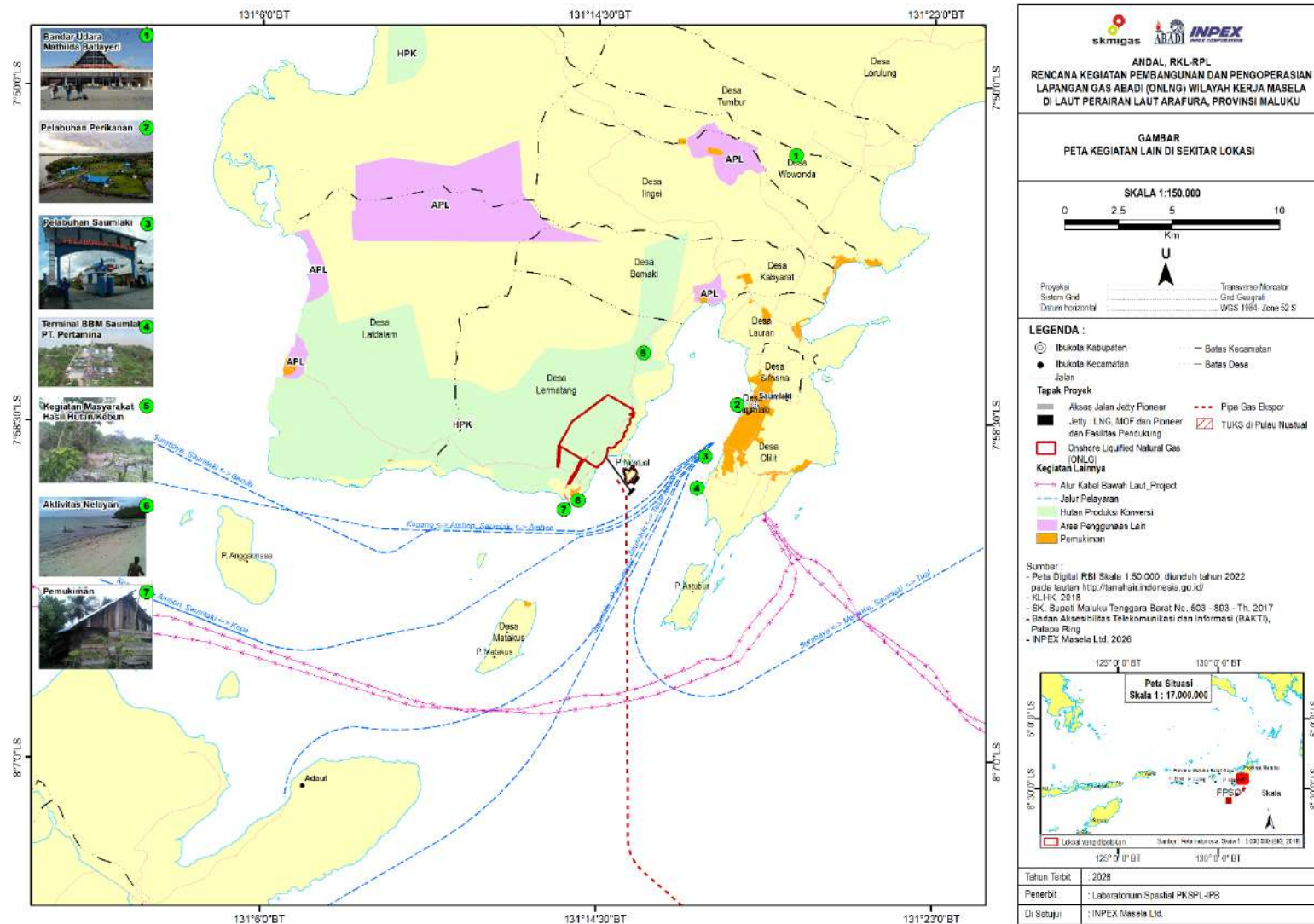
Secara keseluruhan, kegiatan lain di sekitar rencana lokasi proyek tercantum gambar di bawah ini dan **Peta III-19**, sementara jarak masing-masing kegiatan tersebut di atas dengan lokasi OLNK tercantum pada tabel di bawah ini.



Gambar III-503 Kegiatan Lainnya di Sekitar Lokasi Proyek

Tabel III-422 Jarak Kegiatan Lainnya dengan Lokasi Rencana Proyek OLNK

No	Kegiatan Lainnya	Jarak Dari Lokasi OLNK
1	Perkebunan Tebu	1,92 km
2	Pemukiman Penduduk dan Kampung nelayan	1,69 km
3	Bandar Udara (Bandara) Mathilda Batlayeri	18,20 km
4	Budidaya Rumput Laut	1,92 km
5	Pelabuhan Laut Saumlaki	5,38 km
6	Kabel Laut Palapa Ring Timur	18,77 km
7	Kegiatan Migas di Sekitar Lokasi Proyek.	5,34 km



Peta III-19 Kegiatan Lainnya di Sekitar Rencana Lokasi OLNG

BAB IV

HASIL DAN EVALUASI PELIBATAN MASYARAKAT

Pelibatan Masyarakat rencana kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi telah dilakukan oleh INPEX pada tahun 2019. Pelaksanaan pelibatan masyarakat sebelumnya mengacu pada Permen LH No. 17 Tahun 2012, yang merupakan bagian dari kelengkapan dokumen Kerangka Acuan Andal yang telah disepakati oleh KPA Pusat Kementerian Lingkungan dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. SK.14/PKTL/PDLUK/PLA.4/2/2020 tanggal 25 Februari 2020. Pelibatan masyarakat merujuk pada pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, di mana Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal wajib melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui (a) pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan (b) konsultasi publik. Pada prinsipnya pelaksanaan pelibatan masyarakat yang telah dilakukan pada tahun 2019 oleh INPEX yaitu melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung dan masyarakat yang terpengaruh oleh proyek adalah sejalan dengan yang diamanatkan dalam Pasal 28. Dengan sistem penilaian Dokumen Amdal yang akan dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUK), maka tidak lagi ditetapkan adanya wakil masyarakat terdampak langsung yang duduk sebagai anggota TUK, namun seluruh hasil pelibatan masyarakat (konsultasi publik) akan disampaikan dan dievaluasi oleh TUK.

Konsultasi publik dan sosialisasi rencana kegiatan (pelibatan masyarakat) sebagai prasyarat penyusunan KA-Andal, secara khusus dilakukan oleh INPEX setelah disetujuinya Revisi POD-1 (*Plan of Development-1*). Pelibatan masyarakat diawali dengan mengumumkan rencana proyek melalui media massa (terutama surat kabar dan radio). Konsultasi publik bertujuan:

- Untuk menyediakan sarana bagi masyarakat menyampaikan isu-isu penting atau aspirasi terkait proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi;
- Merupakan bagian dari pengelolaan risiko sosial dengan menyediakan saluran penyampaian pendapat dan aspirasi dari masyarakat
- Untuk memastikan transparansi dalam seluruh proses penyusunan Amdal; dan
- Untuk menjalin kemitraan di antara para pemangku kepentingan terkait.

Pelibatan masyarakat meliputi pengumuman rencana kegiatan, konsultasi publik, dan memilih perwakilan masyarakat yang akan duduk pada komisi penilai Amdal. Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah adanya Saran, Pendapat, dan Tanggapan (SPT) mengenai rencana kegiatan.

INPEX Masela, Ltd selaku pemrakarsa telah melakukan pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal. Kegiatan pelibatan masyarakat yang telah dilakukan dijelaskan secara rinci pada sub-bab berikut ini.

4.1 Pengumuman Rencana Kegiatan di Media Massa

Pengumuman rencana kegiatan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk memenuhi Permen LH No. 17 Tahun 2012. Pengumuman rencana kegiatan telah dilakukan menggunakan media massa pada tanggal 26 Juli 2019 meliputi:

1. Koran Kompas

2. Koran The Jakarta Post
3. Koran Siwalima
4. Koran Ambon Ekspres
5. Radio RRI Pro 1 Saumlaki

INPEX tidak menerima SPT tertulis dari pengumuman rencana kegiatan melalui media massa dan radio.

4.2 Konsultasi Publik

4.2.1 Konsultasi Publik di KKT

Kegiatan konsultasi publik telah dilaksanakan pada tanggal 03-16 Agustus 2019. Konsultasi publik diawali dengan sosialisasi rencana kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten pada 8 Agustus 2019 yang dihadiri oleh pemerintah terkait. Detail pelaksanaan sosialisasi proyek dan konsultasi publik tercantum dalam berikut.

Tabel IV-1 Detail Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

No	Tanggal	Tempat	Lokasi	Waktu (WIT)	Jumlah Peserta (org)
1	06 Agustus 2019	Ballroom Banda Naira	Kota Ambon	09.00 – 13.00	62
2	08 Agustus 2019	Gedung Serba Guna, Hotel Galaxy	Kota Saumlaki	09.00 – 13.00	147
3	15 Agustus 2019	Balai Desa Olilit Raya	Desa Olilit	19.00 – 23.30	151
4	09 Agustus 2019	Kantor Kecamatan Wertamrian	Desa Lorulun*	10.00 – 13.00	96
5	10 Agustus 2019	Balai Desa Lermatang	Desa Lermatang	15.30 – 18.30	150
6	12 Agustus 2019	Balai Desa Bomaki	Desa Bomaki	09.30 – 12.00	78
7	13 Agustus 2019	Balai Desa Latdalam	Desa Latdalam	10.00 – 13.00	325
8	14 Agustus 2019	Balai Desa Matakus	Desa Matakus	11.30 – 14.00	108

Catatan: *Kegiatan di Desa Lorulun melibatkan masyarakat dari Desa Lolulun dan Desa Tumbur

Dokumentasi pelaksanaan konsultasi publik dan sosialisasi rencana usaha dan/atau kegiatan disajikan pada gambar berikut.



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

(f)



(g)

(h)



(i)



(j)



(k)



(l)



(m)



(n)



(o)



(p)

Gambar IV-1 (a-b) Sosialisasi Publik di Ambon; (c-d) Sosialisasi Publik di Saumlaki; (e-f) Konsultasi Publik di Kecamatan Wertamrian; (g-h) Konsultasi Publik di Desa Lermatang; (i-j) Konsultasi Publik di Desa Bomaki; (k-l) Konsultasi Publik di Desa Latdalam; (m-n) Konsultasi Publik di Desa Matakus; (o-p) Konsultasi Publik di Desa Olilit

Konsultasi publik bertujuan untuk mengumpulkan isu-isu penting, masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan yang digunakan sebagai masukan dalam penyusunan dokumen Amdal. Seluruh rangkaian kegiatan konsultasi publik direkam melalui audio-video. Kegiatan konsultasi publik secara umum memaparkan rencana kegiatan dan potensi dampak yang akan timbul dari rencana kegiatan. Berdasarkan catatan dan hasil rekaman selama konsultasi publik, masukan dari pemangku kepentingan dapat diringkas sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan masyarakat mengharapkan dan mendukung sepenuhnya kehadiran INPEX Ltd. untuk beroperasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3. Proses pembebasan lahan sedapat mungkin dilakukan dengan cara transparan dan dapat menguntungkan masyarakat.
4. Pengelolaan terhadap lingkungan yang baik sehingga tidak mencemari lingkungan masyarakat, terutama untuk perairan yang menjadi tempat mencari nafkah utama bagi nelayan.
5. Diharapkan adanya peningkatan program-program pemberdayaan kepada petani, nelayan dan masyarakat umum dalam berbagai bentuk, terutama supaya diusahakan adanya beasiswa untuk anak-anak lokal yang sedang bersekolah.
6. Memerhatikan dan melindungi cagar budaya dan cagar alam yang dijadikan sebagai tempat keramat oleh masyarakat lokal.
7. Prioritas penggunaan tenaga kerja lokal selama kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi.

Acara konsultasi publik dilanjutkan dengan penerimaan SPT dari peserta yang hadir. INPEX menerima 291 SPT tertulis dari kegiatan sosialisasi rencana kegiatan dan konsultasi publik. Dari 291

SPT, diidentifikasi ada 736 butir saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat yang dapat dikelompokkan ke dalam hak-hal penting berikut:

1. Persepsi Masyarakat (mendukung proyek)
2. Dampak terhadap Lingkungan
3. Dampak terhadap Sosial
4. Kesempatan Kerja
5. Peningkatan Ekonomi Lokal
6. Pemberdayaan Masyarakat
7. Pendidikan dan Pelatihan
8. Dampak terhadap Mata Pencarian/Kegiatan Perikanan
9. Dampak terhadap Kesehatan
10. Pelestarian Warisan Budaya dan Situs Sakral
11. Fasilitas Umum dan Infrastruktur
12. Pengadaan Lahan dan Relokasi
13. Keterlibatan dalam Amdal
14. Kerja sama Antar Instansi
15. Kekhawatiran Terjadinya Bencana Alam
16. Informasi yang jelas tentang Proyek
17. Lain-lain

Hasil kategorisasi butir-butir SPT masyarakat menunjukkan bahwa harapan munculnya kesempatan kerja tertinggi sebanyak 13% dari 736 butir SPT. Empat hal penting lainnya adalah dampak terhadap sosial 11%, dampak terhadap lingkungan 11%, dukungan masyarakat terhadap Rencana kegiatan 11%, dan harapan terjadinya perbaikan fasilitas umum dan infrastruktur 10%. Tabel berikut menyajikan jumlah SPT dan persentase hal-hal penting dari SPT.

Tabel IV-2 Jumlah SPT yang Diterima dari Sosialisasi Rencana Kegiatan dan Konsultasi Publik

Kegiatan	Jumlah SPT	Jumlah Peserta
Konsultasi Publik Lorulun	32	96
Konsultasi Publik Tumbur	18	
Konsultasi Publik Lermatang	31	150
Konsultasi Publik Bomaki	51	78
Konsultasi Publik Latdalam	20	325
Konsultasi Publik Matakus	35	108
Sosialisasi Kegiatan Ambon	30	62
Sosialisasi Kegiatan Saumlaki	74	147
Sosialisasi Kegiatan Olilit*	0	151
Total	291	1.117

Catatan: *Sosialisasi Kegiatan di Olilit tidak disebarkan formulir SPT

Tabel IV-3 Jumlah dan Persentase Hal-hal Penting dari SPT Masyarakat

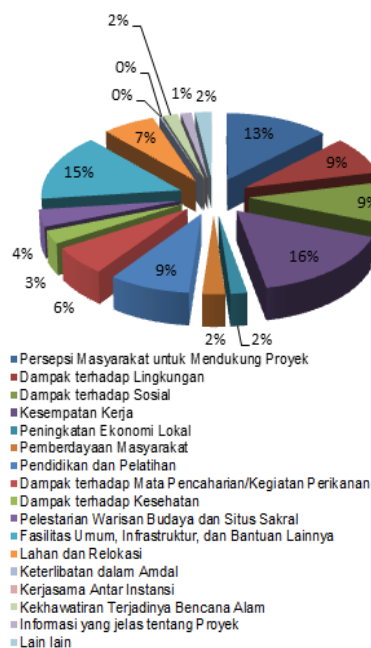
Hal-Hal Penting	Jumlah SPT			%
	Sosialisasi Kegiatan	Konsultasi Publik	Total	
Persepsi Masyarakat (Mendukung Proyek)	23	57	80	11%
Dampak terhadap Lingkungan	42	38	80	11%
Dampak terhadap Sosial	39	41	80	11%
Kesempatan Kerja	23	72	95	13%
Peningkatan Ekonomi Lokal	11	8	19	3%
Pemberdayaan Masyarakat	18	11	29	4%
Pendidikan dan Pelatihan	13	39	52	7%
Dampak terhadap Mata Pencarian/ Kegiatan Perikanan	12	28	40	5%
Pelestarian Warisan Budaya dan Situs Sakral	6	17	22	3%
Fasilitas Umum, Infrastruktur, dan Bantuan Lainnya	9	66	75	10%
Lahan dan Relokasi	5	29	34	5%
Keterlibatan dalam Amdal	20	1	21	3%
Kerja Sama Antar Instansi	11	0	11	1%
Kekhawatiran Terjadinya Bencana Alam	8	8	16	2%
Informasi yang jelas tentang proyek	23	6	29	4%
Lain-lain	26	9	35	5%
Total	293	443	736	100%

Catatan: *Sosialisasi Kegiatan di Olilit tidak disebarkan formulir SPT

Gambar IV-2 menunjukkan hal penting yang paling besar proporsinya dari Sosialisasi Rencana Kegiatan adalah dampak terhadap lingkungan sebesar 14%, diikuti oleh dampak terhadap sosial 13%. Selanjutnya harapan masyarakat untuk kesempatan kerja, informasi yang jelas tentang proyek, dan persepsi masyarakat untuk mendukung proyek sebanyak 8%. Dari kegiatan konsultasi publik seperti yang ditunjuk pada **Gambar IV-3**, porsi yang paling besar dimunculkan oleh masyarakat adalah harapan adanya lapangan kerja sebanyak 16%, harapan supaya adanya pembangunan fasilitas umum, infrastruktur, dan bantuan lainnya sebanyak 15%, dan pendidikan dan pelatihan 13%. Isu mengenai pembebasan lahan disampaikan sebanyak 7%.



Gambar IV-2 Proporsi Hal-hal Penting dari Sosialisasi Rencana Kegiatan



Gambar IV-3 Proporsi Hal-hal Penting dari Konsultasi Publik

Jabaran hal-hal penting yang disuarakan oleh masyarakat dari sosialisasi Rencana Kegiatan dan konsultasi publik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV-4 Hal-hal Penting dari SPT Masyarakat KKT

Hal-hal Penting dari Masyarakat	Deskripsi
Persepsi Masyarakat (Mendukung Proyek)	Masyarakat mendukung secara penuh Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya.

Hal-hal Penting dari Masyarakat	Deskripsi
Dampak terhadap Lingkungan	Kekhawatiran masyarakat rencana kegiatan akan berdampak pada lingkungan seperti udara, kebisingan, daya dukung dan daya tampung Pulau Tanimbar, dan perambahan hutan.
Dampak terhadap Sosial	Kekhawatiran masyarakat akan terjadinya dampak terhadap aspek sosial seperti perubahan nilai dan norma sosial akibat dari Rencana Kegiatan.
Kesempatan Kerja	Harapan masyarakat supaya INPEX dapat merekrut tenaga kerja lokal untuk kegiatan proyek.
Peningkatan Ekonomi Lokal	Harapan masyarakat dan pemerintah lokal agar rencana kegiatan dapat mengangkat perekonomian lokal yang saat ini masih tergolong rendah.
Pemberdayaan Masyarakat	Harapan masyarakat agar program pemberdayaan masyarakat seperti melalui CSR/investasi sosial dapat dilakukan dengan tepat sasaran, sinergis dengan pemerintah dan berkesinambungan.
Pendidikan dan Pelatihan	Harapan masyarakat supaya bisa mendapatkan bantuan pendidikan seperti beasiswa dan juga pembekalan dan pelatihan kepada anak-anak lokal supaya nantinya memiliki kompetensi bekerja untuk proyek INPEX.
Dampak terhadap Mata Pencarian/Kegiatan Perikanan	Kekhawatiran masyarakat rencana kegiatan seperti pemboran , pemipaan, dan fasilitas OILNG dapat mengganggu mata pencarian seperti hilangnya lahan pertanian, terganggunya kegiatan nelayan dan budidaya rumput laut.
Pelestarian Warisan Budaya dan Situs Sakral	Harapan supaya rencana kegiatan dapat melindungi cagar budaya dan cagar alam di daerah proyek seperti di Desa Lermatang yang terdapat Sumur Suci Wetutune dan Gereja Tua.
Fasilitas Umum dan Infrastruktur	Harapan masyarakat supaya INPEX dapat membantu meningkatkan fasilitas umum dan infrastruktur.
Pembebasan Lahan dan Relokasi	Kekhawatiran masyarakat akan adanya rencana pembebasan lahan dan relokasi pemukiman masyarakat karena rencana kegiatan.

Hal-hal Penting dari Masyarakat	Deskripsi
Keterlibatan dalam Amdal	Harapan beberapa anggota masyarakat dan lembaga pemerhati lingkungan untuk dapat terlibat dalam proses kajian Amdal.
Kerja sama Antar Instansi	Harapan masyarakat dan pemerintah supaya antar instansi pemerintah ada kerja sama terkait dengan rencana kegiatan INPEX.
Kekhawatiran Terjadinya Bencana	Kekhawatiran terjadinya bencana seperti gempa bumi dan bencana lumpur serupa seperti 'Lumpur Sidoarjo' dan kekhawatiran keberadaan proyek dapat meningkatkan tingkat kerentanan bencana.
Informasi yang jelas tentang Proyek	Masyarakat mengharapkan informasi yang lebih jelas tentang rencana kegiatan seperti lokasi proyek dan lahan yang akan diperlukan.
Dampak terhadap Kesehatan	Kekhawatiran masyarakat rencana kegiatan dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat lokal.

Sumber: Hasil FGD, 2024

4.2.2 Focus Group Discussion di MBD

Pelaksanaan *Focus Group Discussion* di MBD telah dilaksanakan pada tanggal 17 Januari, 22 Januari, dan 01 Februari 2024. Detail pelaksanaan *Focus Group Discussion* tercantum dalam tabel berikut.

Tabel IV-5 Detail Pelaksanaan *Focus Group Discussion* di MBD Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

No	Tanggal	Lokasi	Waktu (WIT)	Jumlah Peserta (org)
1	17 Januari 2024	Pulau Luang	11.00 – 14.30	39
2	17 Januari 2024	Pulau Moa	11.00 – 14.30	20
3	17 Januari 2024	Pulau Lakor	09.00 – 12.30	15
4	22 Januari 2024	Pulau Marselia	11.00 – 14.00	34
5	22 Januari 2024	Kecamatan Masela	11.00 – 14.00	21
6	01 Februari 2024	Kecamatan Babar Barat	11.00 – 14.00	12
7	01 Februari 2024	Kecamatan Babar Timur	11.50 – 14.00	9
8	01 Februari 2024	Pulau Babar	11.00 – 14.00	12



Gambar IV-4. Jumlah Peserta FGD di Tiap Lokasi MBD

Dokumentasi pelaksanaan konsultasi publik dan sosialisasi rencana usaha dan/atau kegiatan disajikan pada gambar berikut.



Gambar IV-5. Dokumentasi FGD di MBD

4.3 Perwakilan Masyarakat

Setelah konsultasi publik, masyarakat dari desa terdampak langsung oleh rencana kegiatan melakukan musyawarah untuk menentukan wakil masyarakat. Perwakilan ini bertujuan untuk menyusun saran dan keinginan dari masyarakat untuk disampaikan ke pihak INPEX.

INPEX memahami perubahan peraturan saat ini dengan merujuk pada PP No 22 Tahun 2021, di mana perwakilan masyarakat sudah ditiadakan untuk duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal. Anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUK) sesuai PP 22 Tahun 2021, tidak menetapkan wakil masyarakat terdampak sebagai anggota TUK. Tujuan penyajian data hasil pelibatan masyarakat Tahun 2019 adalah untuk menunjukkan seluruh dokumentasi hasil pelibatan masyarakat (konsultasi publik) yang telah dilakukan oleh INPEX pada tahun 2019.

Jumlah total wakil masyarakat dari 6 desa terdampak adalah 19 orang. Masing-masing desa diambil 3 perwakilan kecuali wakil dari Desa Lermatang berjumlah 4 orang dengan pertimbangan merupakan desa yang paling terdampak dengan Rencana Kegiatan. Perwakilan masyarakat dipilih dari berbagai unsur masyarakat, yaitu tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh pemerintahan desa, tokoh nelayan, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan/wanita. Tabel berikut menunjukkan nama-nama wakil masyarakat dari semua desa terdampak.

Tabel IV-6 Perwakilan Masyarakat Desa Terdampak

No	Desa	Jumlah	Nama	Jabatan/Unsur Masyarakat
Kecamatan Tanimbar Selatan				
1	Desa Lermatang	4	Jantje Rangkoly	Kepala Desa
			Abraham Rangkoly	Tua Adat
			Karel F. Larifmas, SH	Tokoh Agama
			Martha Masela	Tokoh Perempuan
2	Desa Bomaki	3	Virgilius Lavere	Kepala Desa
			Thomas Nikmat	Tokoh Nelayan
			Pius P. Kundre	Tokoh Pemuda
3	Desa Latdalam	3	Yustus Luanmase	Kepala Seksi Pemerintahan
			Aser Watumlwar	Tokoh Agama
			Yokbet Luturmas	Tokoh Perempuan
4	Desa Matakus	3	Fredy Turalely	Kepala Desa
			Coris J. Elwuar	Kepala Sekolah SMP
			Bertha Kavoralma	Tokoh Agama
Kecamatan Wertamrian				
1	Desa Lorulun	3	Yohanis Lerebulan	Tokoh Masyarakat
			Felix Laware	Tokoh Masyarakat
			Alexander Mille	Tokoh Agama
2	Desa Tumbur	3	Inosensius Tamanak	Ketua BPD
			Yohanis Lerebulan	Tokoh Masyarakat
			Felix Laware	Tokoh Masyarakat

Sumber: Hasil FGD, 2024

4.4 Evaluasi Pelaksanaan Konsultasi Publik

Evaluasi pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana dan harapan pelaksanaan untuk desa-desa terdampak dan pemangku kepentingan kunci. Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan masyarakat.
2. Hal sangat penting yang dapat ditarik dari kegiatan konsultasi publik ini adalah terkait dengan lahan. Permasalahan terkait lahan dapat diidentifikasi dari keingintahuan masyarakat terhadap lokasi akurat LNG Darat berada di mana dan berapa luasan lahan yang dibutuhkan. Hal ini berdampak pada keingintahuan apakah:
 - a. Lahan masyarakat akan dipakai habis untuk kegiatan Proyek yang pada akhirnya masyarakat perlu direlokasi.
 - b. Kekhawatiran masyarakat adanya makelar tanah yang turut serta dalam proses pembebasan lahan dan merugikan masyarakat.
 - c. Timbul fitnah terhadap INPEX yang seakan-akan telah membocorkan berapa luas lahan dan letak tapak proyek LNG Darat kepada pihak-pihak yang mau mendapatkan untung besar dari proses pengadaan lahan untuk Proyek.
3. Permasalahan lahan dapat tereskalasi dan berpotensi menjadi isu yang dapat mengganggu tahapan kegiatan proyek. Untuk itu, seperti harapan masyarakat dalam konsultasi publik, diperlukan adanya kegiatan sosialisasi lanjutan, sehingga lebih banyak masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat lain pada umumnya dapat memahami informasi tentang proyek termasuk permasalahan tanah tanpa mendengar dari orang lain yang selama ini bersifat provokatif.
4. Saran, Pendapat, dan Tanggapan (SPT) yang disampaikan oleh para peserta konsultasi publik sebagaimana disampaikan pada **Tabel IV-4** di atas, selanjutnya menjadi bahan pertimbangan di dalam Pelingkupan. Adapun tindak lanjut terhadap SPT tersebut di dalam dokumen Andal, RKL-RPL ini adalah sebagai berikut.

Tabel IV-7 Evaluasi dan Tindak Lanjut Terhadap Saran, Pendapat dan Tanggapan pada Saat Konsultasi Publik

Hal-Hal Penting dari Masyarakat	Deskripsi
Persepsi Masyarakat (Mendukung Proyek)	SPT perubahan persepsi masyarakat telah menjadi bentuk pengelolaan yang dituangkan pada Matriks RKL-RPL, khususnya: • Dampak Kegiatan penyediaan lahan terhadap timbulnya kekhawatiran serta harapan dan keluhan masyarakat • Dampak kegiatan perekrutan tenaga kerja konstruksi dan operasi terhadap kekhawatiran serta harapan dan keluhan masyarakat
Dampak terhadap Lingkungan	SPT dampak pada lingkungan seperti udara, kebisingan, kualitas air laut, biota pesisir dan laut telah menjadi bentuk pengelolaan yang dituangkan pada Matriks RKL-RPL, khususnya: • Dampak kegiatan transportasi peralatan dan bahan terhadap biota pesisir, biota laut, mamalia laut • Dampak kegiatan pengeboran terhadap kualitas air laut, biota pesisir dan biota laut, padang lamun, habitat terumbu karang • Dampak kegiatan pemasangan pipa terhadap biota pesisir dan biota laut • Dampak kegiatan pembuangan air <i>Hydrotest</i> terhadap penurunan kualitas air laut • Dampak kegiatan pembersihan lahan terhadap kualitas udara (peningkatan TSP), kebisingan, perubahan pola drainase, peningkatan aliran permukaan, peningkatan erosi, biota terrestrial • Dampak kegiatan pengerukan terhadap peningkatan konsentrasi TSS, biota pesisir dan biota laut, padang lamun, habitat terumbu karang • Dampak kegiatan pengoperasian peralatan, mesin dan kendaraan bermotor terhadap Peningkatan emisi CO₂, CH₄, N₂O

Hal-Hal Penting dari Masyarakat	Deskripsi
Dampak terhadap Sosial	- SPT dampak terhadap sosial telah menjadi bentuk pengelolaan yang dituangkan pada Matriks RKL-RPL, khususnya: - Dampak Kegiatan penyediaan lahan terhadap perubahan akses ke sumber mata pencaharian - Dampak kegiatan penerimaan tenaga kerja terhadap peningkatan migrasi/mobilitas penduduk, perubahan pertumbuhan penduduk, gangguan keamanan masyarakat
Kesempatan Kerja	SPT dampak terhadap peningkatan kesempatan kerja telah menjadi bentuk pengelolaan yang dituangkan pada Matriks RKL-RPL, khususnya: Dampak kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi dan operasi terhadap perubahan kesempatan kerja
Peningkatan Ekonomi Lokal	SPT dampak terhadap peningkatan ekonomi lokal telah menjadi bentuk pengelolaan yang dituangkan pada Matriks RKL-RPL, khususnya: Dampak kegiatan transportasi peralatan dan bahan terhadap kegiatan perikanan - Dampak kegiatan penerimaan tenaga kerja terhadap perubahan peluang berusaha, perubahan tingkat pendapatan masyarakat, perubahan pola mata pencaharian - Dampak kegiatan pembangunan jalan lintasan terhadap kegiatan perikanan
Pemberdayaan Masyarakat	SPT Harapan masyarakat agar program pemberdayaan masyarakat seperti melalui CSR/investasi sosial dapat dilakukan dengan tepat sasaran, sinergis dengan pemerintah dan berkesinambungan. SPT terhadap pemberdayaan masyarakat telah menjadi bentuk pengelolaan yang dituangkan pada Matriks RKL-RPL, khususnya: - Dampak pengoperasian kilang OLNG terhadap perubahan peluang usaha lokal - Dampak turunan dari peningkatan migrasi terhadap Masyarakat rentan

Hal-Hal Penting dari Masyarakat	Deskripsi
Pendidikan dan Pelatihan	Harapan masyarakat supaya bisa mendapatkan bantuan pendidikan seperti beasiswa dan juga pembekalan dan pelatihan kepada anak-anak lokal supaya nantinya memiliki kompetensi bekerja untuk proyek INPEX. SPT terhadap Pendidikan dan pelatihan telah menjadi bentuk pengelolaan yang dituangkan pada Matriks RKL-RPL, khususnya: Dampak pengoperasian kilang OLNG terhadap perubahan peluang usaha lokal dan perubahan pola mata pencaharian masyarakat
Dampak terhadap Mata Pencaharian/Kegiatan Perikanan	Kekhawatiran masyarakat rencana kegiatan seperti pemboran, pemipaan, dan fasilitas OLNG dapat mengganggu mata pencaharian seperti hilangnya lahan pertanian, terganggunya kegiatan nelayan dan budidaya rumput laut. SPT dampak terhadap mata pencaharian telah menjadi bentuk pengelolaan yang dituangkan pada Matriks RKL-RPL, khususnya: Dampak pengoperasian kilang OLNG terhadap perubahan peluang usaha lokal dan perubahan pola mata pencaharian masyarakat.
Pelestarian Warisan Budaya dan Situs Sakral	SPT dampak terhadap pelestarian sosial budaya telah menjadi bentuk pengelolaan yang dituangkan pada Matriks RKL-RPL, khususnya: - Dampak kegiatan penyediaan lahan terhadap masyarakat adat - Dampak kegiatan penerimaan tenaga kerja terhadap perubahan budaya, perubahan norma dan nilai sosial, pengaruh terhadap warisan budaya, gangguan terhadap situs sakral, pengaruh terhadap kelompok masyarakat rentan
Fasilitas Umum dan Infrastruktur	Harapan masyarakat supaya INPEX dapat membantu meningkatkan fasilitas umum dan infrastruktur diakomodir dalam program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat yang programnya perlu disepakati

Hal-Hal Penting dari Masyarakat	Deskripsi
	antara pelaku usaha dan Masyarakat serta diselenggarakan dengan program pemerintah.
Pembebasan Lahan dan Relokasi	SPT Kekhawatiran masyarakat akan adanya rencana pembebasan lahan dan relokasi pemukiman masyarakat telah menjadi bentuk pengelolaan yang dituangkan pada Matriks RKL-RPL, khususnya: Dampak kegiatan penyediaan lahan terhadap perubahan akses sumber mata pencaharian, pengaruh terhadap masyarakat adat, dan kekhawatiran masyarakat.
Keterlibatan dalam Amdal	Harapan beberapa anggota masyarakat dan lembaga pemerhati lingkungan untuk dapat terlibat dalam proses kajian Amdal. SPT keterlibatan Masyarakat dalam AMDAL sudah diatur dalam PP No 22 Tahun 2021, pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 45, 47.
Kerja sama Antar Instansi	Harapan masyarakat dan pemerintah supaya antar instansi pemerintah ada kerja sama terkait dengan rencana kegiatan INPEX. SPT Kerjasama antar instansi telah dituangkan pada Matriks RKL-RPL, khususnya pada institusi pengelolaan lingkungan dan institusi pemantauan lingkungan.
Kekhawatiran Terjadinya Bencana	Kekhawatiran terjadinya bencana seperti gempa bumi dan bencana lumpur serupa seperti 'Lumpur Sidoarjo' dan kekhawatiran keberadaan proyek dapat meningkatkan tingkat kerentanan bencana. SPT kekhawatiran terjadinya bencana merupakan kasus <i>emergency</i> keselamatan kerja yang dibuatkan SOP.
Informasi yang jelas tentang Proyek	Masyarakat mengharapkan informasi yang lebih jelas tentang rencana kegiatan seperti lokasi proyek dan lahan yang akan diperlukan. SPT informasi yang jelas tentang proyek melalui pelaksanaan sosialisasi telah menjadi bentuk pengelolaan yang dituangkan pada Matriks RKL-RPL, khususnya:

Hal-Hal Penting dari Masyarakat	Deskripsi
	Dampak kegiatan penyediaan lahan terhadap perubahan akses sumberdaya, pengaruh terhadap masyarakat adat, harapan dan keluhan masyarakat
Dampak terhadap Kesehatan	SPT dampak terhadap kesehatan masyarakat telah menjadi bentuk pengelolaan yang dituangkan pada Matriks RKL-RPL, khususnya: - Dampak mobilitas penduduk terhadap perubahan penyakit menular, penyakit tidak menular, - Dampak turunan perubahan tingkat pendapatan terhadap perubahan status gizi masyarakat - Dampak turunan dari perubahan kepadatan penduduk terhadap perubahan sanitasi lingkungan - Dampak kegiatan pengolahan dan pembuangan sampah rumah tangga terhadap perubahan sanitasi lingkungan

5. Saran, Pendapat, dan Tanggapan (SPT) Masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan rangkuman *Focus Group Discussion* adalah sebagai berikut.

Tabel IV-8 Hal-hal Penting dari SPT Masyarakat MBD

Hal-hal Penting dari Masyarakat	Deskripsi
Persepsi Masyarakat (Mendukung Proyek)	Perwakilan masyarakat Moa, Letti, Lakor, Babar setuju proyek Inpex untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah.
Dampak terhadap Lingkungan	Ketergantungan tinggi antara masyarakat dengan laut; tidak mengganggu ekosistem laut (terkait dengan usaha budidaya rumput laut, perikanan tangkap); tidak mengubah biofisik laut yang berpotensi terdampak proyek dampak terhadap alam (eksploitasi besar-besaran dapat menghilangkan / merusak ekosistem); Ketakutan akan adanya kapal migas yang mencemari laut MBD; upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan tetap dapat dilakukan.

Hal-hal Penting dari Masyarakat	Deskripsi
Penurunan muka tanah	Jika migas diambil secara terus menerus dan habis, maka akan terjadi penurunan muka tanah (<i>land subsidence</i>) atau ambles, bagaimana nasib penduduk sekitar bila itu terjadi? Maka perlu dikaji dengan baik batas-batas pengambilan migas.
Sosial Budaya	Diharapkan tidak merusak budaya dan lingkungan; di MBD ada budaya " <i>Laor</i> " atau menangkap cacing laut; Blok Masela diharapkan tidak membuat gesekan sosial /identitas (isu identitas / primordial); Hukum dan peraturan adat masih berlaku dan dijaga oleh masyarakat Pulau Letti dan Lakor; Dewan adat berperan sebagai penengah dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi di masyarakat; Permasalahan dalam wilayah diselesaikan dalam lingkup <i>soa-soa</i> , namun jika permasalahan terjadi melibatkan dua desa atau lebih maka diselesaikan juga dengan melibatkan seluruh desa, diwakilkan dan diselesaikan secara adat; Kegiatan adat yang masih dianut diantaranya pernikahan, pelantikan, penyambutan tamu, dan kematian.
Kesempatan Kerja	Diharapkan ada lowongan kerja bagi pemuda-pemuda daerah, serta peningkatan pengalaman atau kapasitas SDM diharapkan ada pemetaan <i>skill</i> anak MBD dampak sosial (masuknya tenaga kerja baru yang tidak sesuai budaya daerah); masyarakat lokal terpinggirkan, budaya adat lokal tergeser, tidak berkontribusi positif pada SDM lokal.
Peningkatan Ekonomi Lokal	Pelibatan masyarakat dalam peningkatan ekonomi; tidak mengubah rona lingkungan; dikhawatirkan adanya dampak yang dapat merusak sistem mata pencaharian masyarakat yang bergantung dengan alam khususnya perairan.
Pemberdayaan Masyarakat	Berpotensi menimbulkan konflik, komitmen CSR tidak ditaati perusahaan tambang .

Hal-hal Penting dari Masyarakat	Deskripsi
Pendidikan dan Pelatihan	Terdapat fasilitas pemerintahan untuk pelatihan dan upaya peningkatan SDM di Letti.

Hasil FGD tidak ditampilkan diagram jumlah dan persentase peserta berdasarkan jenis saran pendapat dan tanggapan yang diberikan karena tidak lakukan penyebaran kuesioner.

BAB V

PENETAPAN DAMPAK PENTING HIPOTETIK (DPH), BATAS WILAYAH STUDI DAN BATAS WAKTU KAJIAN

5.1 Penentuan Dampak Penting Hipotetik

5.1.1 Identifikasi Dampak Potensial

Dalam pelingkupan dilakukan evaluasi terhadap dampak potensial untuk menentukan Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH). Penentuan DPH dan DTPH dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

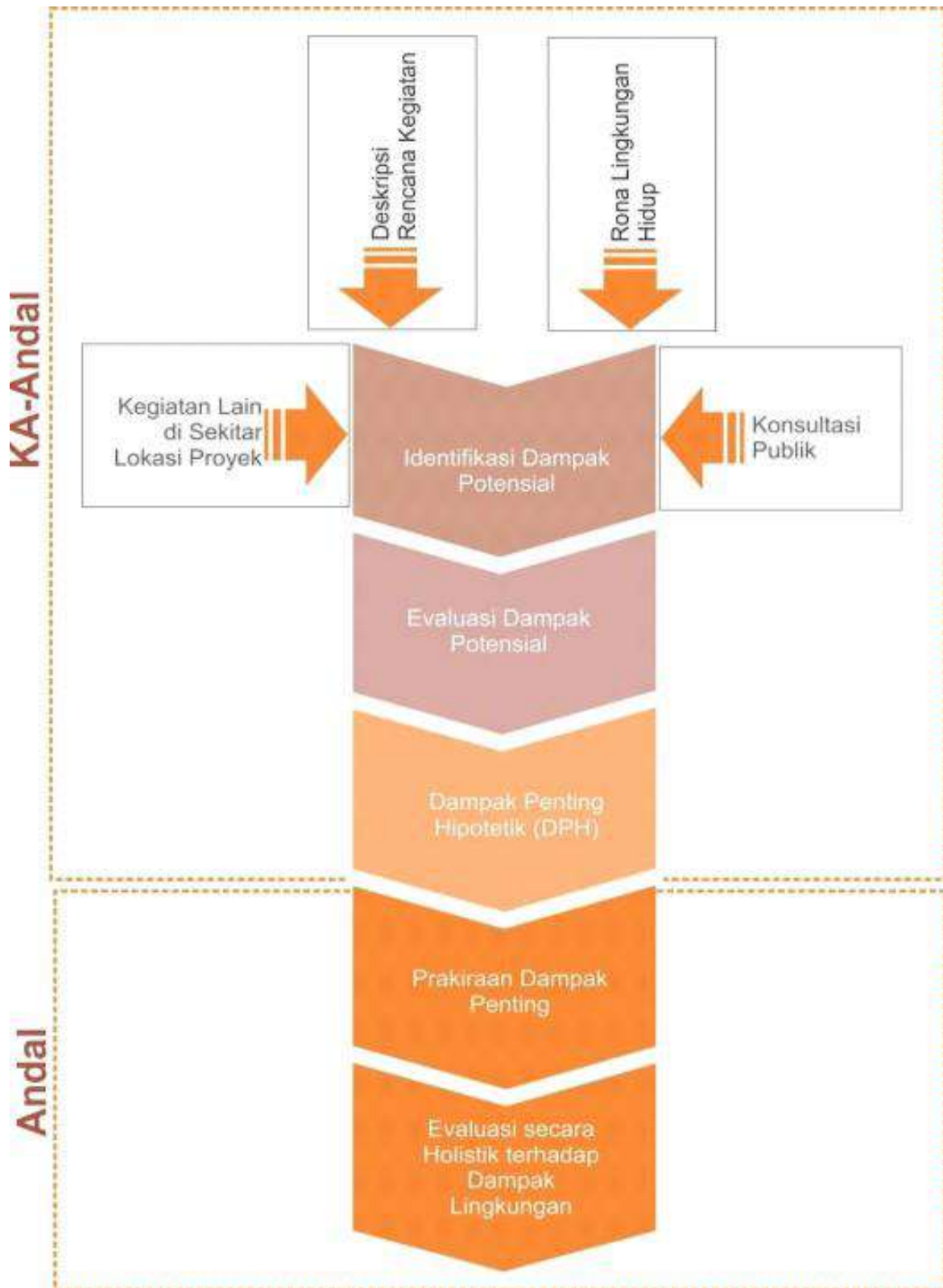
- Mengidentifikasi dampak potensial dengan membuat matriks interaksi antara kegiatan yang menjadi sumber dampak dan parameter lingkungan yang berpotensi terkena dampak
- Mengevaluasi dampak potensial dengan menelaah secara seksama setiap dampak sehingga didapatkan dampak-dampak yang perlu dikaji lebih lanjut dalam Andal sebagai dampak penting hipotetik (DPH) dan Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) yang tidak dikaji lebih lanjut dalam Andal.

Sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar V-1**, proses pelingkupan meliputi penelaahan terhadap: (a) deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, (b) rona lingkungan hidup, (c) kegiatan lain di sekitar lokasi proyek, dan (d) sosialisasi rencana kegiatan dan konsultasi publik, kemudian dilanjutkan dengan lokakarya pelingkupan untuk menentukan dampak potensial.

Evaluasi terhadap dampak potensial untuk menentukan Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) tercantum pada **Tabel V1**.

5.1.2 Evaluasi Dampak Potensial

Hasil identifikasi dampak potensial selanjutnya dievaluasi untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang secara hipotetik dapat menimbulkan dampak penting terhadap komponen dan parameter lingkungan. Dampak Penting Hipotetik (DPH) ditentukan dengan menelaah secara seksama terhadap setiap dampak potensial; hasilnya untuk meniadakan dampak potensial yang tidak memerlukan kajian lebih lanjut dalam Andal dan mengategorikannya sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH). Evaluasi dampak potensial dicantumkan dalam **Tabel V-1** berikut.



Gambar V-1. Tahapan Proses Pelingkupan untuk Mengidentifikasi Dampak Penting Hipotetik

Tabel V-1. Evaluasi Terhadap Dampak Potensial untuk Menentukan Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH)

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
A. Tahap Pra Konstruksi								
1.	Sosialisasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	a. Menyusun rencana sosialisasi usaha dan/atau kegiatan untuk Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement and Consultation Plan</i> - SECP) sesuai dengan IFC-PS1. b. Mensosialisasikan rencana kegiatan proyek kepada pemangku kegiatan mengenai lokasi fasilitas-fasilitas yang akan dibangun, rencana dimulainya konstruksi dan operasi proyek	Sosial Budaya	Kekhawatiran Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan sosialisasi rencana Pengembangan Lapangan Gas Abadi dilakukan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pemerintah Kecamatan dan desa serta tokoh masyarakat. Sosialisasi dilakukan untuk menjelaskan rencana kegiatan yang dilakukan serta antisipasi penanganan dampaknya agar kekhawatiran masyarakat dapat diminimalisir. B. Kondisi Rona Lingkungan Jumlah responden yang memiliki kekhawatiran terhadap rencana proyek tertinggi yaitu pada responden Desa Matakus dan Desa Tumbur sebanyak lebih dari 50%. Untuk empat desa lainnya jumlah responden yang menyatakan khawatir kurang dari 45%. Rasa khawatir ini muncul karena rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap rencana proyek dan lebih banyak informasi dari berbagai pihak yang tidak berwenang. Selain itu pengalaman yang muncul di berbagai wilayah di Indonesia dan di luar negeri terkait dampak proyek migas juga menjadi faktor munculnya rasa khawatir di masyarakat. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Sekitar Kegiatan lain di sekitar adalah pemukiman penduduk dan aktivitas nelayan akan terpengaruh oleh kegiatan konstruksi dan operasi namun adanya sosialisasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan akan mengurangi kekhawatiran masyarakat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Hasil FGD di Kabupaten Tanimbar menunjukkan bahwa kekhawatiran masyarakat di hampir semua desa di Kabupaten Tanimbar lebih ke bidang ekonomi dan lingkungan. Kekhawatiran ekonomi yaitu masyarakat desa takut adanya persaingan usaha dengan pendatang baru, terganggunya mata pencaharian baik di bidang pertanian darat maupun sebagai nelayan di laut sedangkan kekhawatiran lingkungan yaitu terkait limbah, kegiatan yang merusak lingkungan. Kekhawatiran lain yang timbul adalah masuknya pendatang yang akan mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat. Hal-hal seperti pergaulan bebas, pernikahan beda agama, dan lunturnya adat khususnya di kalangan generasi muda. Berdasarkan hasil FGD di Kabupaten Maluku Barat Daya, diketahui dari berbagai bentuk kekhawatiran di masyarakat, kekhawatiran yang paling tinggi terkait dengan dampak lingkungan. Masyarakat Kepulauan Babar khususnya di Pulau Masela dan Pulau Babar merupakan kelompok masyarakat pesisir yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari sumber daya alam di laut dan di darat. Kehadiran proyek migas menimbulkan rasa khawatir terhadap rusaknya sumber daya alam di kawasan pesisir dan berdampak negatif terhadap wilayah tangkap	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					masyarakat. Apalagi masyarakat di Kepulauan Babar merupakan kelompok masyarakat adat yang kental dengan budaya sasi meti sebagai kearifan lokal untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. E. Kesimpulan Dengan sudah dilakukannya sosialisasi rencana kegiatan. Masyarakat menjadi lebih paham dan meminimalisir rasa khawatir masyarakat. Dengan demikian sosialisasi rencana usaha dan/atau kegiatan diidentifikasi sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).			
		a. Menyusun dan menerapkan mekanisme penyampaian keluhan dan tanggapan terhadap keluhan b. Menanggapi setiap keluhan para pemangku kepentingan terutama masyarakat terdampak c. Membuat Tim manajemen penanganan keluhan		Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan sosialisasi rencana Pengembangan Lapangan Gas Abadi dilakukan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pemerintah Kecamatan dan desa serta tokoh masyarakat. Sosialisasi dilakukan untuk menjelaskan rencana kegiatan yang dilakukan serta antisipasi penanganan dampaknya agar masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang rencana perusahaan. B. Kondisi Rona Lingkungan Sebanyak 28% berharap terbukanya lapangan kerja, sebanyak 13% berharap peningkatan kesejahteraan melalui terciptanya lapangan kerja dan peluang usaha, sebanyak 8% berharap nelayan tidak terganggu dan 17% berharap bantuan untuk meningkatkan usaha masyarakat. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Sekitar Kegiatan lain di sekitar adalah pemukiman penduduk dan aktivitas nelayan akan terpengaruh oleh kegiatan konstruksi dan operasi namun adanya sosialisasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan akan mengurangi kekhawatiran masyarakat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Secara umum, intensitas perhatian masyarakat terhadap komponen persepsi masyarakat di Kabupaten Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong tinggi dengan berbagai catatan positif dan negatif serta harapan yang positif. E. Kesimpulan Harapan masyarakat merupakan dampak turunan dari adanya kekhawatiran masyarakat. Oleh karena kekhawatiran masyarakat tidak berkembang menjadi keluhan secara umum dan terbuka, maka dampak kegiatan terhadap harapan dan keluhan masyarakat dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH), namun tetap akan dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
2	Penyediaan Lahan	a. Melakukan penyediaan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan	Sosial Ekonomi	Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penyediaan lahan untuk pembangunan Kilang OLNG berikut Fasilitas Pendukungnya terdiri atas ±662,3 ha kawasan HPK dan ±28,9 ha APL di Pulau Nustual untuk pembangunan TUKS yang penggunaannya bersifat jangka panjang, dan ±3 ha lahan APL di dekat Desa Lermatang untuk pembangunan TUKS-Pionir yang penggunaannya bersifat jangka pendek	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		Kawasan Hutan untuk daerah lahan yang berlokasi di Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) b. Melibatkan masyarakat terdampak termasuk pemerintah daerah dan para tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan penyediaan lahan. c. Melakukan penyediaan lahan sesuai peraturan yang berlaku termasuk Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan IFC-PS 5 tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali. d. Mensosialisasikan rencana kegiatan dan mekanisme penyediaan lahan.			atau sementara, di mana pada kedua lokasi APL tersebut tidak terdapat permukiman penduduk. Luas masing-masing area atau kawasan dengan peruntukan sebagaimana tersebut di atas merupakan estimasi dan masih dapat berubah berdasarkan hasil kajian studi rancang/desain serta perkembangan pelaksanaan penyediaan lahan, tanpa melebihi luas maksimal <700 ha. B. Kondisi Rona Lingkungan Mata pencaharian utama masyarakat Lermatang di Kabupaten Tanimbar adalah sebagai petani 40% dan nelayan 33%. Pola pertanian masyarakat Kepulauan Tanimbar umumnya merupakan peladang berpindah-pindah dan masih bersifat tradisional. Umumnya masyarakat secara berkelompok membuka lahan hutan untuk kegiatan pertanian secara berpindah-pindah dan mencari hasil hutan. Sebagian besar lahan yang direncanakan untuk penyediaan lahan berstatus kawasan hutan dan hanya sebagian kecil yang merupakan APL. Mata pencaharian lainnya adalah peternakan 8%, dagang/wiraswasta 7% dan pencaharian lainnya 12%. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Sekitar Kegiatan lain di sekitar adalah budidaya pertanian. Dari seluruh rangkaian proses penyediaan lahan (penggunaan tanah di kawasan hutan, pengadaan tanah di kawasan non hutan dan sewa tanah di kawasan non hutan), diperkirakan akan menimbulkan perubahan pola mata pencaharian masyarakat khususnya di kawasan non hutan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Pelaksanaan sosialisasi kegiatan dan konsultasi publik yang sudah dilakukan diketahui sebanyak 40 peserta (5%) dari total 736 peserta memberikan saran pendapat dan tanggapan akibat penyediaan lahan akan berdampak terhadap perubahan terhadap pola pencaharian masyarakat dari kegiatan penyediaan lahan. E. Kesimpulan Desa terdekat dengan lokasi Kilang OLNG beserta fasilitas pendukungnya adalah Desa Lermatang. Mata pencaharian utama masyarakat Lermatang adalah sebagai petani dan nelayan. Sebagian besar lahan yang direncanakan untuk penyediaan lahan berstatus kawasan hutan dan hanya sebagian kecil yang merupakan APL. Dengan demikian, perubahan pola mata pencaharian masyarakat disimpulkan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik.			
		a. Sejauh memungkinkan menghindari terjadinya hambatan akses bagi masyarakat ke sumber mata pencaharian b. Menyediakan akses bagi masyarakat ke sumber mata pencahariannya apabila terjadi perubahan akses akibat pembangunan proyek		Perubahan Akses ke Sumber Mata Pencaharian dan <i>Ecosystem Services</i>	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penyediaan lahan untuk pembangunan Kilang OLNG berikut Fasilitas Pendukungnya terdiri atas ±662,3 ha kawasan HPK dan ±28,9 ha APL di Pulau Nustual untuk pembangunan TUKS yang penggunaannya bersifat jangka panjang, dan ±3 ha lahan APL di dekat Desa Lermatang untuk pembangunan TUKS-Pionir yang penggunaannya bersifat jangka pendek	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas	Batas waktu kajian selama dua tahun yaitu selama kegiatan penyediaan lahan dan enam bulan setelah kegiatan

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		c. Membuat dan melaksanakan program restorasi mata pencaharian atau program pengembangan masyarakat			atau sementara, di mana pada kedua lokasi APL tersebut tidak terdapat permukiman penduduk. Luas masing-masing area atau kawasan dengan peruntukan sebagaimana tersebut di atas merupakan estimasi dan masih dapat berubah berdasarkan hasil kajian studi rancang/desain serta perkembangan pelaksanaan penyediaan lahan, tanpa melebihi luas maksimal <700 ha. B. Kondisi Rona Lingkungan Mata pencaharian utama masyarakat Lermatang di Kabupaten Tanimbar adalah sebagai petani 40% dan nelayan 33%. Pola pertanian masyarakat Kepulauan Tanimbar umumnya merupakan peladang berpindah-pindah dan masih bersifat tradisional. Umumnya masyarakat secara berkelompok membuka lahan hutan untuk kegiatan pertanian secara berpindah-pindah dan mencari hasil hutan. Sebagian besar lahan yang direncanakan untuk penyediaan lahan berstatus kawasan hutan dan hanya sebagian kecil yang merupakan APL. Mata pencaharian lainnya adalah peternakan 8%, dagang/wiraswasta 7% dan pencaharian lainnya 12%. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Sekitar Dari seluruh rangkaian proses penyediaan lahan (penggunaan tanah di kawasan hutan, pengadaan tanah di kawasan non hutan dan sewa tanah di kawasan non hutan), diperkirakan akan menimbulkan perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan <i>Ecosystem Services</i> di kawasan hutan maupun di kawasan non hutan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat yang sudah dilakukan diketahui sebanyak 40 peserta (5%) dari total 736 peserta memberikan saran pendapat dan tanggapan akibat penyediaan lahan akan berdampak terhadap perubahan terhadap pola pencaharian masyarakat dari kegiatan penyediaan lahan. E. Kesimpulan Mempertimbangkan bahwa luasan yang dibutuhkan untuk penyediaan lahan adalah <700 ha yang terdiri dari APL dan HPK yang dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian, maka kegiatan penyediaan lahan merupakan dampak bersifat penting hipotetik dan perlu dikaji lebih lanjut dalam Andal.		proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang dan Desa Bomaki.	penyediaan lahan selesai dilaksanakan
		a. Menyusun rencana sosialisasi usaha dan/atau kegiatan untuk Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement and Consultation Plan - SECP) sesuai dengan IFC-PS1. b. Mensosialisasikan rencana kegiatan proyek kepada pemangku kegiatan mengenai lokasi fasilitas-fasilitas yang akan dibangun, rencana dimulainya konstruksi dan operasi proyek.	Sosial Budaya	Kekhawatiran Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penyediaan lahan untuk pembangunan Kilang OLNG berikut Fasilitas Pendukungnya dicadangkan terdiri atas ±662,3 ha kawasan HPK dan ±28,9 ha APL di Pulau Nustual untuk pembangunan TUKS yang penggunaannya bersifat jangka panjang, dan ±3 ha lahan APL di dekat Desa Lermatang untuk pembangunan TUKS-Pionir yang penggunaannya bersifat jangka pendek atau sementara, di mana pada kedua lokasi APL tersebut tidak terdapat permukiman penduduk. Luas masing-masing area atau kawasan dengan peruntukan sebagaimana tersebut di atas merupakan estimasi dan masih dapat berubah berdasarkan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa	Batas waktu kajian selama dua tahun yaitu selama kegiatan penyediaan lahan dan enam bulan setelah kegiatan penyediaan lahan selesai dilaksanakan

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					hasil kajian studi rancang/desain serta perkembangan pelaksanaan penyediaan lahan, tanpa melebihi luas maksimal <700 ha. B. Kondisi Rona Lingkungan Jumlah responden yang memiliki kekhawatiran terhadap rencana proyek tertinggi yaitu pada responden Desa Matakus dan Desa Tumbur sebanyak lebih dari 50%. Untuk empat desa lainnya jumlah responden yang menyatakan khawatir kurang dari 45%. Rasa khawatir ini muncul karena rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap rencana proyek dan lebih banyak informasi dari berbagai pihak yang tidak berwenang. Selain itu pengalaman yang muncul di berbagai wilayah di Indonesia dan di luar negeri terkait dampak proyek migas juga menjadi faktor munculnya rasa khawatir di masyarakat. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dari seluruh rangkaian proses penyediaan lahan (penggunaan tanah di kawasan hutan, pengadaan tanah di kawasan non hutan dan sewa tanah di kawasan non hutan) untuk kilang OLNG dan TUKS, diperkirakan akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat di sekitar lokasi pengadaan lahan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Hasil FGD di Kabupaten Tanimbar menunjukkan bahwa kekhawatiran masyarakat di hampir semua desa di Kabupaten Tanimbar lebih ke bidang ekonomi dan lingkungan. Kekhawatiran ekonomi yaitu masyarakat desa takut adanya persaingan usaha dengan pendatang baru, terganggunya mata pencaharian baik di bidang pertanian darat maupun sebagai nelayan di laut sedangkan kekhawatiran lingkungan yaitu terkait limbah, kegiatan yang merusak lingkungan. Kekhawatiran lain yang timbul adalah masuknya pendatang yang akan mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat. Hal-hal seperti pergaulan bebas, pernikahan beda agama, dan lunturnya adat khususnya di kalangan generasi muda. Berdasarkan hasil FGD di Kabupaten Maluku Barat Daya, diketahui dari berbagai bentuk kekhawatiran di masyarakat, kekhawatiran yang paling tinggi terkait dengan dampak lingkungan. Masyarakat Kepulauan Babar khususnya di Pulau Masela dan Pulau Babar merupakan kelompok masyarakat pesisir yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari sumber daya alam di laut dan di darat. Kehadiran proyek migas menimbulkan rasa khawatir terhadap rusaknya sumber daya alam di kawasan pesisir dan berdampak negatif terhadap wilayah tangkap masyarakat. Apalagi masyarakat di Kepulauan Babar merupakan kelompok masyarakat adat yang kental dengan budaya sasi meti sebagai kearifan lokal untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. E. Kesimpulan Dengan pengoptimalan berdasarkan hasil kajian studi rancang/desain, rencana penyediaan lahan untuk keseluruhan kegiatan di darat <700 ha		Lermatang dan Desa Bomaki.	

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					yang terdiri atas HPK dan APL di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan hasil konsultasi publik terdapat kekhawatiran masyarakat terkait adanya rencana penyediaan lahan dan relokasi pemukiman masyarakat akibat dari pembangunan Kilang OLNG beserta fasilitas pendukungnya. Kekhawatiran masyarakat tersebut juga merupakan dampak turunan dari perubahan pola dan akses mata pencaharian penduduk dan berpotensi menimbulkan dampak Harapan dan Keluhan masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif. Dengan demikian dampak terhadap kekhawatiran masyarakat diperkirakan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut pada Andal.			
		a. Melibatkan masyarakat terdampak termasuk pemerintah daerah dan para tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan penyediaan lahan b. Mensosialisasikan rencana kegiatan dan mekanisme penyediaan lahan. c. Mensosialisasikan rencana kegiatan proyek kepada pemangku kegiatan mengenai lokasi fasilitas-fasilitas yang akan dibangun, rencana dimulainya konstruksi dan operasi proyek.		Pengaruh Terhadap Masyarakat Adat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penyediaan lahan akan dilakukan untuk pembangunan Kilang OLNG berikut Fasilitas Pendukungnya di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Luas area yang dicadangkan terdiri atas ±662,3 ha kawasan HPK dan ±28,9 ha APL di Pulau Nustual untuk pembangunan TUKS yang penggunaannya bersifat jangka panjang, dan ±3 ha lahan APL di dekat Desa Lermatang untuk pembangunan TUKS-Pionir yang penggunaannya bersifat jangka pendek atau sementara, di mana pada kedua lokasi APL tersebut tidak terdapat permukiman penduduk. Luas masing-masing area atau kawasan dengan peruntukan sebagaimana tersebut di atas merupakan estimasi dan masih dapat berubah berdasarkan hasil kajian studi rancang/desain serta perkembangan pelaksanaan penyediaan lahan, tanpa melebihi luas maksimal <700 ha. B. Kondisi Rona Lingkungan Masyarakat di Tanimbar khususnya di Lermatang merupakan masyarakat patrilineal di mana anak laki-laki adalah penanggung jawab untuk menghidupi keluarganya dan mengolah lahan sementara perempuan mengolah dan memanfaatkan hasilnya untuk kemakmuran keluarga. Pola ini memiliki kesesuaian dengan filosofi adat utama orang Tanimbar yakni Duan-Lolat. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dari seluruh rangkaian proses penyediaan lahan (penggunaan tanah di kawasan hutan, pengadaan tanah di kawasan non hutan dan sewa tanah di kawasan non hutan), diperkirakan akan menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat adat di sekitar lokasi pengadaan lahan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Hasil FGD di Kabupaten Tanimbar menunjukkan bahwa kekhawatiran masyarakat di hampir semua desa di Kabupaten Tanimbar lebih ke bidang ekonomi dan lingkungan. Kekhawatiran ekonomi yaitu masyarakat desa takut adanya persaingan usaha dengan pendatang baru, terganggunya mata pencaharian baik di bidang pertanian darat maupun sebagai nelayan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang dan Desa Bomaki.	Batas waktu kajian selama dua tahun yaitu selama kegiatan penyediaan lahan dan enam bulan setelah kegiatan penyediaan lahan selesai dilaksanakan

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					di laut sedangkan kekhawatiran lingkungan yaitu terkait limbah, kegiatan yang merusak lingkungan. Kekhawatiran lain yang timbul adalah masuknya pendatang yang akan mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat. Hal-hal seperti pergaulan bebas, pernikahan beda agama, dan luntarnya adat khususnya di kalangan generasi muda. Berdasarkan hasil FGD di Kabupaten Maluku Barat Daya, diketahui dari berbagai bentuk kekhawatiran di masyarakat, kekhawatiran yang paling tinggi terkait dengan dampak lingkungan. Masyarakat Kepulauan Babar khususnya di Pulau Masela dan Pulau Babar merupakan kelompok masyarakat pesisir yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari sumber daya alam di laut dan di darat. Kehadiran proyek migas menimbulkan rasa khawatir terhadap rusaknya sumber daya alam di kawasan pesisir dan berdampak negatif terhadap wilayah tangkap masyarakat. Apalagi masyarakat di Kepulauan Babar merupakan kelompok masyarakat adat yang kental dengan budaya sasi meti sebagai kearifan lokal untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. E. Kesimpulan Dengan pengoptimalan berdasarkan hasil kajian studi rancang/desain, rencana penyediaan lahan untuk keseluruhan kegiatan di darat <700 ha yang terdiri atas HPK dan APL di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penyediaan lahan di wilayah kehutanan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menggunakan mekanisme pelepasan kawasan hutan, sedangkan penyediaan lahan di kawasan non-kehutanan atau area penggunaan lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan menggunakan mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dominan mata pencaharian utama masyarakat di Kepulauan Tanimbar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan kegiatan pertanian lahan kering pada lokasi hutan sekunder yang ditebang dan dibiarkan kering sebelum akhirnya dibakar. Lahan yang dibuka oleh masyarakat tersebut merupakan lahan yang terletak di dalam wilayah petuanan dari masing-masing marga atau soa. Dengan demikian lokasi penyediaan lahan untuk OLANG beserta fasilitas penunjangnya diperkirakan dapat berpengaruh terhadap masyarakat adat sehingga disimpulkan sebagai Dampak Penting Hipotetik			
		a. Membuat, mensosialisasikan dan melaksanakan mekanisme penyampaian dan penanganan keluhan. b. Membuat tim manajemen penanganan keluhan.		Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Luas area yang dicadangkan terdiri atas ±662,3 ha kawasan HPK dan ±28,9 ha APL di Pulau Nustual untuk pembangunan TUKS yang penggunaannya bersifat jangka panjang, dan ±3 ha lahan APL di dekat Desa Lermatang untuk pembangunan TUKS-Pionir yang penggunaannya bersifat jangka	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak	Batas waktu kajian selama dua tahun yaitu selama kegiatan penyediaan lahan

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		c. Menjalin komunikasi secara efektif dengan para stakeholder.			pendek atau sementara, di mana pada kedua lokasi APL tersebut tidak terdapat permukiman penduduk. Luas masing-masing area atau kawasan dengan peruntukan sebagaimana tersebut di atas merupakan estimasi dan masih dapat berubah berdasarkan hasil kajian studi rancang/desain serta perkembangan pelaksanaan penyediaan lahan, tanpa melebihi luas maksimal <700 ha. B. Kondisi Rona Lingkungan Sebanyak 28% berharap terbukanya lapangan kerja, sebanyak 13% berharap peningkatan kesejahteraan melalui terciptanya lapangan kerja dan peluang usaha, sebanyak 8% berharap nelayan tidak terganggu dan 17% berharap bantuan untuk meningkatkan usaha masyarakat. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dari seluruh rangkaian proses penyediaan lahan (penggunaan tanah di kawasan hutan, pengadaan tanah di kawasan non hutan dan sewa tanah di kawasan non hutan), diperkirakan akan menimbulkan harapan dan keluhan masyarakat khususnya di lokasi pengadaan lahan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Hasil FGD di Kabupaten Tanimbar menunjukkan bahwa kekhawatiran masyarakat di hampir semua desa di Kabupaten Tanimbar lebih ke bidang ekonomi dan lingkungan. Kekhawatiran ekonomi yaitu masyarakat desa takut adanya persaingan usaha dengan pendatang baru, terganggunya mata pencaharian baik di bidang pertanian darat maupun sebagai nelayan di laut sedangkan kekhawatiran lingkungan yaitu terkait limbah, kegiatan yang merusak lingkungan. Kekhawatiran lain yang timbul adalah masuknya pendatang yang akan mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat. Hal-hal seperti pergaulan bebas, pernikahan beda agama, dan luntarnya adat khususnya di kalangan generasi muda. Berdasarkan hasil FGD di Kabupaten Maluku Barat Daya, diketahui dari berbagai bentuk kekhawatiran di masyarakat, kekhawatiran yang paling tinggi terkait dengan dampak lingkungan. Masyarakat Kepulauan Babar khususnya di Pulau Masela dan Pulau Babar merupakan kelompok masyarakat pesisir yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari sumber daya alam di laut dan di darat. Kehadiran proyek migas menimbulkan rasa khawatir terhadap rusaknya sumber daya alam di kawasan pesisir dan berdampak negatif terhadap wilayah tangkap masyarakat. Apalagi masyarakat di Kepulauan Babar merupakan kelompok masyarakat adat yang kental dengan budaya sasi meti sebagai kearifan lokal untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. E. Kesimpulan		langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	dan enam bulan setelah kegiatan penyediaan lahan selesai dilaksanakan

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Berdasarkan hasil konsultasi publik terdapat harapan masyarakat agar proses penyediaan lahan sedapat mungkin dilakukan dengan cara transparan, dan dapat menguntungkan masyarakat. Proses penyediaan lahan akan menimbulkan sejumlah Harapan dan Keluhan Masyarakat yang merupakan dampak turunan perubahan pola mata pencaharian, akses mata pencaharian dan kekhawatiran masyarakat. diprakirakan bersifat dampak penting hipotetik sehingga perlu dikaji lebih lanjut pada Andal.			
B. Tahap Konstruksi								
1.	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	A. Memberikan pengumuman kebutuhan pekerjaan pra-konstruksi secara transparan di kantor desa/kelurahan, kecamatan dan instansi terkait B. Memprioritaskan menggunakan tenaga kerja setempat berkualifikasi yang memenuhi persyaratan C. Membuat perjanjian kerja yang jelas dan transparan yang mengacu pada UU Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 tahun 2000 dan Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. D. Menerapkan juga praktik nasional dan internasional lainnya (yaitu melarang tenaga kerja anak, kerja paksa, dan tidak ada diskriminasi). E. Menetapkan standar kesehatan dan keselamatan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang kesehatan dan keselamatan kerja F. Membuat perjanjian kontrak dengan pemasok tenaga kerja (jika ada) yang berkomitmen untuk pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012, serta praktik nasional dan internasional lainnya	Demografi	Peningkatan Migrasi (Mobilitas) Penduduk.	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada seluruh kegiatan pada tahap konstruksi adalah total sejumlah 12.611 tenaga kerja, diantaranya sejumlah 10.000 tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi OLNG, untuk FPSO sejumlah 662, SURF sejumlah 929, GEP (<i>onshore</i> dan <i>offshore</i>) sejumlah 750 dan pengeboran sumur gas sejumlah 270 tenaga kerja. Sebanyak ±20% akan direkrut dari penduduk lokal. B. Kondisi Rona Lingkungan Jumlah penduduk Kecamatan Tanimbar Selatan Tahun 2022 sebanyak 65.097 jiwa dengan kepadatan 47 jiwa/Km² dan laju pertumbuhan 2,33%/tahun. Jumlah penduduk Kecamatan Wetarmian Tahun 2022 sebanyak 6.128 jiwa dengan kepadatan 9 jiwa/Km² dan laju pertumbuhan 2,01%/tahun. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Sekitar Kegiatan sekitar yang akan terpengaruh oleh kegiatan penerimaan tenaga kerja adalah pemukiman penduduk yang akan mengalami penambahan dan kepadatan pemukiman. Intensitas Perhatian Masyarakat Berdasarkan hasil konsultasi publik terhadap komponen lingkungan demografi dari kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja konstruksi tidak menjadikan perhatian masyarakat. D. Kesimpulan Aktivitas ini diperkirakan adalah Dampak Primer sekaligus juga Dampak Penting Hipotetik (DPH) terhadap migrasi dan perlu dikaji lebih lanjut di dalam studi Andal. Aktivitas ini diperkirakan adalah Dampak Primer sekaligus juga Dampak Penting Hipotetik (DPH) terhadap migrasi dan perlu dikaji lebih lanjut di dalam studi Andal.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian dampak 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi. Perubahan demografi, sosial ekonomi akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi
				Perubahan Komposisi Penduduk (Usia, Jenis kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama, Mata Pencaharian)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada seluruh kegiatan pada tahap konstruksi adalah total sejumlah 12.611 tenaga kerja, diantaranya sejumlah 10.000 tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi OLNG, untuk FPSO sejumlah 662, SURF sejumlah 929, GEP (<i>onshore</i> dan <i>offshore</i>) sejumlah 750 dan pengeboran sumur gas sejumlah 270 tenaga kerja. Sebanyak ±20% akan direkrut dari penduduk lokal.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas	Batas waktu kajian dampak 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		(yaitu melarang tenaga kerja anak, kerja paksa, dan tidak ada diskriminasi G. Melakukan pendaftaran migrasi yang mengacu pada UU No. 52/2009 tentang Pengembangan Populasi dan Pengembangan Keluarga.			B. Kondisi Rona Lingkungan Pada tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, persentase penduduk usia produktif adalah 62,5% dan non produktif sebesar 37,4%. Maka, dapat disimpulkan angka ketergantungan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 62,5%, hal tersebut berarti setiap 100 penduduk produktif akan menanggung 62 orang yang tidak produktif. Pada tahun 2022, persentase penduduk usia produktif atau angkatan kerja di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah 72,4%, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 72 orang penduduk usia non-produktif atau non-angkatan kerja. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Sekitar Kegiatan sekitar yang akan terpengaruh oleh kegiatan penerimaan tenaga kerja adalah pemukiman penduduk yang akan mengalami penambahan dan kepadatan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak kegiatan terhadap pertumbuhan penduduk menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik maupun wawancara responden. E. Kesimpulan Aktivitas ini diperkirakan adalah Dampak Primer sekaligus juga Dampak Penting Hipotetik (DPH) terhadap perubahan komposisi penduduk dan perlu dikaji lebih lanjut di dalam studi Andal.		proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	(termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi. Perubahan demografi, sosial ekonomi akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi
				Perubahan Pertumbuhan Populasi	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada seluruh kegiatan pada tahap konstruksi adalah total sejumlah 12.611 tenaga kerja, diantaranya sejumlah 10.000 tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi OLNG, untuk FPSO sejumlah 662, SURF sejumlah 929, GEP (<i>onshore</i> dan <i>offshore</i>) sejumlah 750 dan pengeboran sumur gas sejumlah 270 tenaga kerja. Sebanyak ±20% akan direkrut dari penduduk lokal. B. Kondisi Rona Lingkungan Jumlah penduduk Kecamatan Tanimbar Selatan Tahun 2022 sebanyak 65.097 jiwa dengan kepadatan 47 jiwa/Km² dan laju pertumbuhan 2,33%/tahun. Jumlah penduduk Kecamatan Wetarmian Tahun 2022 sebanyak 6.128 jiwa dengan kepadatan 9 jiwa/Km² dan laju pertumbuhan 2,01%/tahun. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Sekitar Kegiatan sekitar yang akan terpengaruh oleh kegiatan penerimaan tenaga kerja adalah pemukiman penduduk yang akan mengalami penambahan dan kepadatan pemukiman. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak kegiatan terhadap pertumbuhan penduduk menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik maupun wawancara responden. E. Kesimpulan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian dampak 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi. Perubahan demografi, sosial ekonomi akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Aktivitas ini diperkirakan adalah Dampak Primer sekaligus juga Dampak Penting Hipotetik (DPH) terhadap perubahan komposisi penduduk dan perlu dikaji lebih lanjut di dalam studi Andal.			desa-desa di sekitarnya. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi
				Perubahan Kepadatan Penduduk	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada seluruh kegiatan pada tahap konstruksi adalah total sejumlah 12.611 tenaga kerja, diantaranya sejumlah 10.000 tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi OLNG, untuk FPSO sejumlah 662, SURF sejumlah 929, GEP (<i>onshore</i> dan <i>offshore</i>) sejumlah 750 dan pengeboran sumur gas sejumlah 270 tenaga kerja. Sebanyak ±20% akan direkrut dari penduduk lokal. B. Kondisi Rona Lingkungan Kepadatan penduduk di wilayah studi relatif tetap setiap tahunnya. Kepadatan penduduk di Kecamatan Tanimbar Selatan lebih tinggi bila dibandingkan di Kecamatan Wertamrian setiap tahunnya. Kepadatan penduduk di Kecamatan Tanimbar Selatan masuk kategori Tidak Padat yaitu 43.91 jiwa/km² dan kepadatan di Kecamatan Wertamrian juga Tidak Padat yaitu 9.39 jiwa/km² pada tahun 2021. Kepadatan penduduk di kedua kecamatan tersebut cenderung tidak terlalu berubah sejak tahun 2017 kecuali di Tanimbar Selatan pada tahun 2021. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Sekitar Kegiatan sekitar yang akan terpengaruh oleh kegiatan penerimaan tenaga kerja adalah pemukiman penduduk yang akan mengalami penambahan dan kepadatan pemukiman. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak kegiatan terhadap kepadatan penduduk tidak menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik dan wawancara responden. E. Kesimpulan Aktivitas ini diperkirakan adalah Dampak Primer sekaligus juga Dampak Penting Hipotetik (DPH) terhadap perubahan komposisi penduduk dan perlu dikaji lebih lanjut di dalam studi Andal.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian dampak 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi. Perubahan demografi, sosial ekonomi akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi
				Gangguan Terhadap Keamanan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada seluruh kegiatan pada tahap konstruksi adalah total sejumlah 12.611 tenaga kerja, diantaranya sejumlah 10.000 tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi OLNG, untuk FPSO sejumlah 662, SURF sejumlah 929, GEP (<i>onshore</i> dan <i>offshore</i>) sejumlah 750 dan pengeboran sumur gas sejumlah 270 tenaga kerja. Sebanyak ±20% akan direkrut dari penduduk lokal. B. Kondisi Rona Lingkungan Tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari tahun 2015 hingga 2019 relatif mengalami penurunan. Pada tahun 2019, jumlah tindak pidana yaitu sebanyak 170 kasus yang berkurang hingga 27% dari tahun 2018 yang mencapai 234 kasus, namun terus turun hingga 22,5%	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki,	Batas waktu kajian dampak 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					pada tahun 2021. Tindak pidana paling tinggi di tahun 2021 adalah kekerasan secara bersama-sama yang mencapai 15 kasus. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Sekitar Kegiatan sekitar yang akan terpengaruh oleh kegiatan penerimaan tenaga kerja adalah pemukiman penduduk yang akan mengalami penambahan dan kepadatan pemukiman. Pekerja pendatang tidak terbatas pada homogenitas golongan, ras, dan budaya, sehingga tingkat keberagaman masyarakat di lokasi proyek akan cukup tinggi. Peningkatan jumlah penduduk, beban kehidupan, dan perbedaan ras serta budaya menyebabkan dampak terhadap keamanan masyarakat. Hal tersebut diprediksi akan meningkatkan jumlah kriminalitas di sekitar lokasi proyek. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak kegiatan terhadap kepadatan penduduk tidak menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik dan wawancara responden. E. Kesimpulan Oleh karena itu, kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja pada tahap konstruksi diperkirakan menyebabkan Dampak Penting Hipotetik (DPH) terhadap perubahan keamanan masyarakat dan perlu dikaji lebih lanjut di dalam studi Andal. Gangguan terhadap keamanan masyarakat ini tergolong dalam Dampak Turunan dari, peningkatan migrasi (mobilitas penduduk), peningkatan penyalahgunaan zat adiktif (narkoba dan alkohol); dan perubahan norma dan nilai sosial.		Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Perubahan demografi, sosial ekonomi akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi
		A. Membuat dan melaksanakan perjanjian kerja yang bersih dan jelas yang mengacu pada UU Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 tahun 2003 dan Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. B. Menetapkan dan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan yang mengacu pada PP No. 50 tahun 2012 tentang kesehatan dan keselamatan kerja C. Membuat dan menerapkan perjanjian kontrak dengan pemasok tenaga kerja (jika ada) yang berkomitmen untuk pelaksanaan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan	Sosial Ekonomi	Kesempatan Kerja	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada seluruh kegiatan pada tahap konstruksi adalah total sejumlah 12.611 tenaga kerja, diantaranya sejumlah 10.000 tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi OLNG, untuk FPSO sejumlah 662, SURF sejumlah 929, GEP (<i>onshore</i> dan <i>offshore</i>) sejumlah 750 dan pengeboran sumur gas sejumlah 270 tenaga kerja. Sebanyak ±20% akan direkrut dari penduduk lokal. B. Kondisi Rona Lingkungan Jumlah angkatan kerja penduduk berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2022 sebesar 79.473 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja sebesar 50.610 jiwa (Kepulauan Tanimbar dalam Angka, 2023), sedangkan menurut data Kabupaten Maluku Barat Daya dalam Angka, diketahui jumlah angkatan kerja penduduk berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2022 sebesar 54.777 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja sebesar 52.930 jiwa. Jumlah pengangguran pada tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 2.518 orang, di Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 1.008 orang dan di Provinsi Maluku sebanyak 57.504 orang. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Sekitar Kegiatan lain di sekitar adalah budidaya pertanian dan nelayan yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat. Adanya kegiatan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus Serta desa-desa di P Babar, P Masela, P	Batas waktu kajian dampak 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing kegiatan selesai untuk demobilisasi tenaga kerja. Perubahan sosial ekonomi masyarakat akan berlangsung

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		Pemerintah No. 50 tahun 2012, dan praktik nasional dan internasional lainnya (yaitu melarang tenaga kerja anak, kerja paksa, dan tidak ada diskriminasi). D. Memprioritaskan tenaga kerja dari tenaga kerja setempat sesuai dengan kebutuhan proyek dan sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja setempat yang tersedia. E. Menginformasikan kepada masyarakat mengenai jumlah kesempatan kerja yang tersedia melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Melakukan sosialisasi kesempatan kerja kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat secara terbuka dan transparan.			penerimaan tenaga kerja, diperkirakan akan mempengaruhi pola mata pencaharian masyarakat akibat adanya kesempatan kerja baru. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Kesempatan kerja menjadi topik yang sangat diperhatikan masyarakat karena besarnya harapan masyarakat terhadap kegiatan pengembangan INPEX memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. E. Kesimpulan Oleh karena itu, kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja selama tahap konstruksi diperkirakan dapat menimbulkan Dampak Penting Hipotetik (DPH) terhadap komponen perubahan partisipasi tenaga kerja sehingga perlu dikaji lebih lanjut di dalam studi Andal. Kegiatan ini memberikan dampak langsung pada perubahan partisipasi tenaga kerja (peluang kerja) sehingga termasuk dalam Dampak Primer.		Luang, P Lakor, P Moa, P Leti.	terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.
		INPEX secara berkala akan melakukan sosialisasi peluang kesempatan kontraktor lokal kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat secara terbuka dan transparan.		Perubahan Peluang Usaha Lokal	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada seluruh kegiatan pada tahap konstruksi adalah total sejumlah 12.611 tenaga kerja, diantaranya sejumlah 10.000 tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi OLNG, untuk FPSO sejumlah 662, SURF sejumlah 929, GEP (<i>onshore</i> dan <i>offshore</i>) sejumlah 750 dan pengeboran sumur gas sejumlah 270 tenaga kerja. Sebanyak $\pm 20\%$ akan direkrut dari penduduk lokal. B. Kondisi Rona Lingkungan Jumlah usaha/perorangan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tercatat sebanyak 12.649 unit meliputi skala mikro kecil (99,49%) dan skala menengah besar (0,51%). Banyaknya usaha di Kabupaten Maluku Barat Daya tercatat sebanyak 6.461 unit terdiri dari usaha skala mikro kecil (99,47%) dan skala menengah besar (0,53%). Banyaknya usaha mikro di Kecamatan Tanimbar Selatan tercatat 770 unit dan di Kecamatan Wertamrian sebanyak 121 unit usaha yang meliputi bidang perdagangan, hotel, dan restoran. Usaha skala kecil terbanyak adalah usaha perdagangan dan usaha bangunan yang berkembang di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian. Di dua kecamatan, tercatat koperasi yang bergerak pada jenis usaha simpan pinjam, bahan bakar minyak (BBM), pertanian, perikanan, waserda, reparasi, dan warnet. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Sekitar Kegiatan lain yang ada di sekitar rencana kegiatan adalah usaha perdagangan dan jasa. Kegiatan penerimaan tenaga kerja dan mobilisasi tenaga kerja untuk pembangunan fasilitas proyek akan mempengaruhi pertumbuhan usaha lokal secara signifikan yang berdampak pada perubahan pola mata pencaharian.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus, serta desa-desa di P Babar, P Masela, P Luang, P Lakor, P Moa, P Leti.	Batas waktu kajian dampak 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing kegiatan selesai untuk demobilisasi tenaga kerja. Perubahan sosial ekonomi masyarakat akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					D. Intensitas Perhatian Masyarakat Hasil konsultasi publik dan wawancara responden terungkap bahwa masyarakat sangat berharap kegiatan pengembangan dapat meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat lokal. E. Kesimpulan Kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja akan mempengaruhi pertumbuhan usaha lokal dan juga berdampak pada perubahan pola mata pencaharian. Kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja pada tahap konstruksi diperkirakan dapat menimbulkan Dampak Penting Hipotetik (DPH) terhadap pertumbuhan usaha lokal sehingga perlu dikaji lebih lanjut di dalam studi Andal.			desa-desa di sekitarnya. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.
		INPEX akan mengikuti Keputusan Gubernur Maluku tentang upah minimum regional kabupaten/kota di Provinsi Maluku.		Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada seluruh kegiatan pada tahap konstruksi adalah total sejumlah 12.611 tenaga kerja, diantaranya sejumlah 10.000 tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi OLNG, untuk FPSO sejumlah 662, SURF sejumlah 929, GEP (<i>onshore</i> dan <i>offshore</i>) sejumlah 750 dan pengeboran sumur gas sejumlah 270 tenaga kerja. Sebanyak $\pm 20\%$ akan direkrut dari penduduk lokal. B. Kondisi Rona Lingkungan Nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.945.953,-/bulan. Berdasarkan hasil survei, 34,5 % responden di wilayah studi memiliki pengeluaran sebesar Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 2.400.664,- /bulan dan 33% responden di wilayah studi berada pada kelompok pengeluaran kurang dari Rp 1.000.000,- /bulan. Sisanya berada pada kelompok pengeluaran antara Rp 2.400.644,- sampai lebih dari Rp 4.000.000,- /bulan Rata-rata pengeluaran rutin rumah tangga masyarakat adalah Rp 2.411.866,- /bulan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Sekitar Kegiatan lain yang ada di sekitar rencana kegiatan adalah usaha perdagangan dan jasa. Kegiatan penerimaan tenaga kerja dan mobilisasi tenaga kerja untuk pembangunan fasilitas proyek akan mempengaruhi pertumbuhan usaha lokal secara signifikan yang berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Hasil konsultasi publik dan wawancara responden terungkap bahwa masyarakat sangat berharap kegiatan pengembangan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat lokal karena akan memberikan dampak turunan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. E. Kesimpulan Oleh karena itu, perubahan tingkat pendapatan masyarakat diklasifikasi sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan perlu dikaji lebih lanjut di dalam studi Andal. Perubahan tingkat pendapatan masyarakat merupakan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus, serta desa-desa di P Babar, P Masela, P Luang, P Lakor, P Moa, P Leti.	Batas waktu kajian dampak 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing kegiatan selesai untuk demobilisasi tenaga kerja. Perubahan sosial ekonomi masyarakat akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Dampak Turunan dari perubahan partisipasi tenaga kerja (peluang kerja) dan perubahan Peluang Usaha Lokal.			
		INPEX akan mengikuti Keputusan Gubernur Maluku tentang upah minimum regional kabupaten/kota di Provinsi Maluku.		Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada seluruh kegiatan pada tahap konstruksi adalah total sejumlah 12.611 tenaga kerja, diantaranya sejumlah 10.000 tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi OLNG, untuk FPSO sejumlah 662, SURF sejumlah 929, GEP (<i>onshore</i> dan <i>offshore</i>) sejumlah 750 dan pengeboran sumur gas sejumlah 270 tenaga kerja. Sebanyak ±20% akan direkrut dari penduduk lokal. B. Kondisi Rona Lingkungan Mata pencaharian utama masyarakat Lermatang di Kabupaten Tanimbar adalah sebagai petani 40% dan nelayan 33%. Mata pencaharian lainnya adalah peternakan 8%, dagang/wiraswasta 7% dan pencaharian lainnya 12%. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Sekitar Kegiatan lain di sekitar adalah budidaya pertanian, nelayan, peternakan, perdagangan dan jasa. Kegiatan penerimaan tenaga kerja diperkirakan akan menimbulkan perubahan pola mata pencaharian masyarakat khususnya pada angkatan kerja muda. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Hasil konsultasi publik dan wawancara responden terungkap bahwa masyarakat sangat berharap kegiatan pengembangan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat lokal. E. Kesimpulan Oleh karena itu, penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja tahap konstruksi diperkirakan dapat menimbulkan Dampak Penting Hipotetik (DPH) pada pola mata pencaharian dan perlu dikaji lebih lanjut di dalam studi Andal.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian dampak 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing kegiatan selesai untuk demobilisasi tenaga kerja. Perubahan sosial ekonomi masyarakat akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.
		INPEX akan mengikuti Keputusan Gubernur Maluku tentang upah minimum regional kabupaten/kota di Provinsi Maluku.		Perubahan Terhadap Keberadaan Fasilitas Umum dan Sosial	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada seluruh kegiatan pada tahap konstruksi adalah total sejumlah 12.611 tenaga kerja, diantaranya sejumlah 10.000 tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi OLNG, untuk FPSO sejumlah 662, SURF sejumlah 929, GEP (<i>onshore</i> dan <i>offshore</i>) sejumlah 750 dan pengeboran sumur gas sejumlah 270 tenaga kerja. Sebanyak ±20% akan direkrut dari penduduk lokal. B. Kondisi Rona Lingkungan	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Fasilitas umum yang terdapat di desa terdampak antara lain pasar sebanyak 18 unit, warung kelontong 15 unit, Puskesmas Pembantu 4 unit, fasilitas pendidikan 22 unit C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Sekitar Kegiatan lain yang ada di sekitar rencana lokasi OLNK adalah kegiatan pendidikan (sekolah), pelayanan kesehatan (Pustu), aktivitas perdagangan (pasar, toko kelontong). Perekrutan tenaga kerja sebanyak 12.611 orang akan berdampak pada kebutuhan sarana dan prasarana sosial kehidupan tenaga kerja. Proyek akan menyediakan <i>camp</i> dan fasilitas pendukung untuk tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja proyek sehingga fasilitas umum dan sosial milik masyarakat tidak terganggu. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Hasil konsultasi publik dan wawancara responden terungkap bahwa masyarakat tidak khawatir akan penggunaan fasilitas umum dan sosial oleh pekerja. E. Kesimpulan Oleh karena itu, penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja tahap konstruksi diperkirakan Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) pada perubahan terhadap keberadaan fasilitas umum dan sosial.			
		INPEX akan menyusun, mensosialisasikan dan dan menerapkan manajemen penanganan keluhan kepada masyarakat.	Sosial Budaya	Kekhawatiran Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada seluruh kegiatan pada tahap konstruksi adalah total sejumlah 12.611 tenaga kerja, diantaranya sejumlah 10.000 tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi OLNK, untuk FPSO sejumlah 662, SURF sejumlah 929, GEP (<i>onshore</i> dan <i>offshore</i>) sejumlah 750 dan pengeboran sumur gas sejumlah 270 tenaga kerja. Sebanyak ±20% akan direkrut dari penduduk lokal. B. Kondisi Rona Lingkungan Sebanyak 45% khawatir terhadap adanya proyek, 60% khawatir terganggu mata pencaharian, 60% khawatir terganggu aktivitas nelayan, 42% khawatir terjadi kerusakan lingkungan dan 20% khawatir berkurangnya area tangkapan nelayan. Rasa khawatir ini muncul karena rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap rencana proyek. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Sekitar Kegiatan lain di sekitar adalah budidaya pertanian, nelayan, peternakan, perdagangan dan jasa. Kegiatan penerimaan tenaga kerja diperkirakan akan menurunkan kekhawatiran masyarakat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Hasil konsultasi publik dan wawancara responden terungkap bahwa masyarakat sangat berharap kegiatan pengembangan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat lokal. E. Kesimpulan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-deso sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus serta desa-desa di P Babar, P Masela, P Luang, P Lakor, P Moa, P Leti	Batas waktu kajian dampak berlangsung 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNK (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing kegiatan selesai untuk pelepasan tenaga kerja. Perubahan sosial budaya akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Kekhawatiran masyarakat pada kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja tahap konstruksi dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan memerlukan pengkajian lebih lanjut dalam studi Andal. Kekhawatiran masyarakat muncul akibat dari Dampak Turunan dari perubahan kesempatan kerja, perubahan peluang usaha lokal dan gangguan terhadap keamanan masyarakat.			proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya serta Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.
		A. Mensosialisasikan kepada tenaga kerja migran terkait dengan warisan budaya yang ada di desa terdampak B. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemilik warisan budaya dan tokoh adat setempat terkait dengan keberadaan cagar budaya C. Membuat Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk kelestarian budaya		Perubahan Budaya	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada seluruh kegiatan pada tahap konstruksi adalah total sejumlah 12.611 tenaga kerja, diantaranya sejumlah 10.000 tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi OLNG, untuk FPSO sejumlah 662, SURF sejumlah 929, GEP (<i>onshore</i> dan <i>offshore</i>) sejumlah 750 dan pengeboran sumur gas sejumlah 270 tenaga kerja. Sebanyak $\pm 20\%$ akan direkrut dari penduduk lokal. B. Kondisi Rona Lingkungan Sebagian besar penduduk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah Suku Tanimbar. Etnis yang datang sebagai migran ke wilayah ini seperti secara tradisi yang ter data adalah dari etnis yang tinggal di pulau Sulawesi seperti Makassar atau Bugis yang beragama Islam, etnis dari daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang beragama Islam maupun Kristen, serta etnis Ambon dari daerah Pulau Seram, Tanimbar dari provinsi lainnya, maupun etnis Jawa dari daerah Jawa timur yang pada umumnya berdagang hasil bumi dan rumput laut yang secara tradisional sudah terjadi. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Migrasi masuk sebagai akibat dari penerimaan tenaga kerja dan mobilisasi berpotensi menimbulkan dampak turunan terhadap perubahan budaya akibat adanya akulturasi dan asimilasi antara pendatang dan masyarakat setempat. Hal ini juga berpotensi menyebabkan dampak pada perubahan kepercayaan yang berlaku di masyarakat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Masuknya tenaga kerja dari luar diduga akan memberikan perubahan budaya masyarakat lokal pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Masuknya tenaga kerja yang berasal dari luar daerah dengan berbagai latar belakang pendidikan, agama dan kebudayaan dalam jumlah yang relatif banyak yang berdampak hipotetik terhadap perubahan migrasi penduduk, diperkirakan juga akan berdampak signifikan terhadap perubahan budaya dan dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang perlu dikaji lebih lanjut dalam studi Andal.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian dampak berlangsung 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing kegiatan selesai untuk pelepasan tenaga kerja. Perubahan sosial budaya akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya serta Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.
				Perubahan Norma dan Nilai Sosial	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada seluruh kegiatan pada tahap konstruksi adalah total sejumlah 12.611 tenaga kerja, diantaranya sejumlah 10.000 tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi OLNG, untuk FPSO	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan	Batas waktu kajian dampak berlangsung 6 bulan pertama

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					sejumlah 662, SURF sejumlah 929, GEP (<i>onshore</i> dan <i>offshore</i>) sejumlah 750 dan pengeboran sumur gas sejumlah 270 tenaga kerja. Sebanyak $\pm 20\%$ akan direkrut dari penduduk lokal. B. Kondisi Rona Lingkungan Norma dan pola sosial masyarakat yang ada adalah sistem kekerabatan. Sistem ini bisa dikatakan sebagai pilar interaksi sosial masyarakat Tanimbar. Selain pengaruh terhadap interaksi sosial, sistem kekerabatan ini juga akan berpengaruh pada sistem temurial atau relasi antara manusia dengan sumber daya agraria baik daratan maupun lautan. Di Indonesia terdapat tiga jenis pola kekerabatan yakni sistem paternal, sistem patrilineal dan sistem matrilineal. Dalam sistem paternal, sang anak akan mengaitkan diri sebagai pewaris kedua orang tuanya dan menghubungkan dirinya dengan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Dalam sistem patrilineal, sang anak menghubungkan dirinya dengan ayahnya atau berdasarkan garis keturunan laki-laki. Dalam sistem patrilineal, kedudukan laki-laki dan keturunan laki-lakinya akan memiliki posisi lebih tinggi, hak lebih banyak, dan berhak meneruskan nama keluarga. Sementara itu, sistem matrilineal adalah di mana sang anak akan mengaitkan dirinya dengan ibu berdasarkan garis keturunan perempuan dan menghubungkan dirinya dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan. Dalam sistem yang terakhir, kedudukan perempuan lebih tinggi, dan memiliki hak lebih banyak (Muhammad 2006). C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Tenaga kerja yang bekerja di lingkungan proyek memiliki latar belakang yang berbeda terkait budaya, agama, dan gaya hidup. Mobilisasi tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan migrasi penduduk serta perubahan budaya sebagai dampak turunannya, juga berpotensi menimbulkan dampak turunan terhadap perubahan norma dan nilai sosial masyarakat setempat. Masyarakat asli Tanimbar masih mempertahankan beberapa norma adat dalam budaya tradisional mereka diantaranya: Pengenalan orang luar komunitas pada roh desa, Ritual dan tradisi siklus hidup, Peran sopi dan Sasi. Berdasarkan hasil konsultasi publik, terdapat kekhawatiran perubahan norma dan nilai sosial di masyarakat dengan adanya kegiatan proyek. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini termasuk salah satu yang menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Oleh karena itu, perubahan norma dan nilai sosial dapat dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan perlu dikaji lebih lanjut dalam studi Andal.		terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan O LNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing kegiatan selesai untuk pelepasan tenaga kerja. Perubahan sosial budaya akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek O LNG meliputi desa-desa di sekitarnya serta Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.
				Pengaruh Terhadap Warisan Budaya	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada seluruh kegiatan pada tahap konstruksi adalah total sejumlah 12.611 tenaga kerja, diantaranya sejumlah	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang	Batas waktu kajian dampak berlangsung 6

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					10.000 tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi OLNG, untuk FPSO sejumlah 662, SURF sejumlah 929, GEP (<i>onshore</i> dan <i>offshore</i>) sejumlah 750 dan pengeboran sumur gas sejumlah 270 tenaga kerja. Sebanyak $\pm 20\%$ akan direkrut dari penduduk lokal. B. Kondisi Rona Lingkungan Masyarakat masih memiliki warisan budaya berupa kain tenun, kerajinan kayu, tradisi, tarian, lagu, permainan rakyat, ataupun tanah adat yang diturunkan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perubahan warisan budaya diperkirakan terjadi pada warisan budaya baik secara fisik (makam, gua, dan tempat keramat) atau warisan non fisik (cerita rakyat, tradisi, tarian, dan lagu) yang akan cenderung diabaikan seiring dengan semakin mengecilnya komposisi penduduk asli. Berdasarkan hasil konsultasi publik ada harapan masyarakat agar kegiatan proyek dapat melindungi cagar budaya dan cagar alam di daerah Proyek seperti di Desa Lermatang yang terdapat Sumur Suci Wetutune dan Gereja Tua. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Warisan budaya termasuk aspek yang diangkat masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Oleh karena itu, perubahan warisan budaya dapat dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan perlu ditinjau lebih lanjut dalam studi Andal. Pengaruh terhadap warisan budaya ini adalah Dampak Turunan dari perubahan budaya serta perubahan norma dan nilai sosial.		akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing kegiatan selesai untuk pelepasan tenaga kerja. Perubahan sosial budaya akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya serta Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.
				Gangguan Terhadap Situs Sakral Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada seluruh kegiatan pada tahap konstruksi adalah total sejumlah 12.611 tenaga kerja, diantaranya sejumlah 10.000 tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi OLNG, untuk FPSO sejumlah 662, SURF sejumlah 929, GEP (<i>onshore</i> dan <i>offshore</i>) sejumlah 750 dan pengeboran sumur gas sejumlah 270 tenaga kerja. B. Kondisi Rona Lingkungan Desa Lermatang yang merupakan lokasi tempat konstruksi kilang OLNG memiliki situs yang disakralkan atau dikeramatkan oleh masyarakat. Beberapa situs sakral di Desa Lermatang yaitu mata air Wempas Dalam, sumur keramat Wetutune, Batu Layar, dan Bukit Keldasar. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Datangnya para tenaga kerja untuk tahap konstruksi dapat berpengaruh kepada beberapa objek wisata dan budaya sekitar. Berdasarkan hasil konsultasi publik ada harapan masyarakat agar kegiatan dapat melindungi	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian dampak berlangsung 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					cagar budaya dan cagar alam di daerah Proyek seperti di Desa Lermatang yang terdapat Sumur Suci Wetutune dan Gereja Tua. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Situs sakral termasuk aspek yang diangkat masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Oleh karena situs sakral masyarakat memiliki nilai yang sangat penting, maka potensi dampak gangguan situs sakral masyarakat diperkirakan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan dikaji lebih lanjut dalam Andal. Gangguan ini merupakan hasil Dampak Turunan dari peningkatan migrasi (mobilitas penduduk) dan Pengaruh Terhadap Warisan Budaya.			kegiatan selesai untuk pelepasan tenaga kerja. Perubahan sosial budaya akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya serta Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.
		INPEX akan menyusun, mensosialisasikan dan dan menerapkan manajemen penanganan keluhan kepada masyarakat.		Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada seluruh kegiatan pada tahap konstruksi adalah total sejumlah 12.611 tenaga kerja, diantaranya sejumlah 10.000 tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi OLNG, untuk FPSO sejumlah 662, SURF sejumlah 929, GEP (<i>onshore</i> dan <i>offshore</i>) sejumlah 750 dan pengeboran sumur gas sejumlah 270 tenaga kerja. Sebanyak ±20% akan direkrut dari penduduk lokal. B. Kondisi Rona Lingkungan Hasil wawancara menunjukkan harapan masyarakat terhadap peningkatan kesempatan kerja sebanyak 28%, peningkatan kesejahteraan masyarakat sebanyak 13%, tidak terganggunya aktivitas nelayan sebanyak 8% dan adanya bantuan peningkatan modal usaha sebanyak 17%.. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dampak harapan dan keluhan masyarakat, merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat dengan adanya kesempatan kerja, peluang usaha lokal dan gangguan keamanan, yang juga merupakan dampak turunan perubahan norma dan nilai sosial, serta gangguan situs sakral masyarakat yang merupakan dampak penting hipotetik. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Harapan terhadap penerimaan tenaga kerja menjadi aspek yang dibahas saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Meningat banyaknya potensi dampak penting hipotetik akibat adanya kegiatan penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi yang dapat menimbulkan harapan dan keluhan masyarakat akibat adanya kegiatan penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi, maka dampak terhadap harapan dan keluhan masyarakat dikategorikan sebagai dampak penting hipotetik dan akan dikaji lebih lanjut pada Andal.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian dampak berlangsung 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing kegiatan selesai untuk pelepasan tenaga kerja. Perubahan sosial budaya akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya serta Kota Saumlaki dan

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
								desa-desa di sekitarnya.
			Pengaruh Terhadap Kelompok Masyarakat Rentan (Wanita, Anak-Anak, Miskin, Lansia, dan Difabel)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada seluruh kegiatan pada tahap konstruksi adalah total sejumlah 12.611 tenaga kerja, diantaranya sejumlah 10.000 tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi OLNG, untuk FPSO sejumlah 662, SURF sejumlah 929, GEP (<i>onshore</i> dan <i>offshore</i>) sejumlah 750 dan pengeboran sumur gas sejumlah 270 tenaga kerja. Sebanyak ±20% akan direkrut dari penduduk lokal. B. Kondisi Rona Lingkungan Sejak tahun 2012 hingga 2019, angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak lebih dari sekitar 30%. Pada desa terdampak kegiatan proyek, ditemukan kelompok masyarakat rentan meliputi janda, anak yatim, lansia, dan masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik atau difabel. Pada tahun 2020 pemerintah memiliki beberapa program untuk kelompok masyarakat rentan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penerimaan tenaga kerja dan mobilisasi diperkirakan akan memberikan manfaat bagi penduduk setempat yang cukup memiliki kemampuan bekerja. Namun di sisi lain akan memberikan dampak terhadap perubahan struktur sosial ekonomi di desa-desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perubahan struktur sosial ekonomi tersebut diperkirakan menimbulkan dampak bagi kelompok rentan di masyarakat termasuk wanita, anak-anak, orang tua, dan orang miskin baik dalam memperebutkan kesempatan ekonomi, perlindungan sosial maupun dalam hubungan sosial. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Pengaruh kegiatan terhadap kelompok masyarakat rentan menjadi salah satu aspek yang diangkat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Oleh karena itu, dampak terhadap kelompok masyarakat rentan dari kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan perlu ditinjau lebih lanjut dalam studi Andal. Dampak ini muncul akibat dari Dampak Turunan dari peningkatan migrasi (mobilitas penduduk).	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian dampak berlangsung 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing kegiatan selesai untuk pelepasan tenaga kerja. Perubahan sosial budaya akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya serta Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.	
		A. Melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon karyawan sebelum mulai bekerja, penyediaan asuransi kesehatan (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan) B. Melakukan tes kesehatan terhadap tenaga kerja secara berkala C. INPEX akan melakukan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di bidang Kesehatan bagi masyarakat yang terkena dampak	Kesehatan Masyarakat	Perubahan Penyakit Menular	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja untuk pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya akan meningkatkan migrasi penduduk ke wilayah proyek. Diperkirakan sekitar 12.611 tenaga kerja akan datang ke lokasi proyek pada puncak kegiatan konstruksi. B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan dari data sekunder 10 penyakit terbanyak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021 – 2023 ISPA menduduki peringkat pertama dengan prevalensi dari tahun 2021 – 2013 adalah 14.6%, 15,7% dan 12,8%	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa	Batas waktu kajian dampak berlangsung 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS),

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian													
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)															
					C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Diperkirakan prevalensi ISPA akan semakin meningkat dari kondisi sebelumnya karena adanya migrasi tenaga kerja dan aktivitas konstruksi. Peningkatan jumlah orang di wilayah proyek kemungkinan akan mengubah pola penyakit di daerah studi, akan mempunya risiko peningkatan prevalensi ISPA semakin meningkat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Beberapa aspek yang menjadi perhatian masyarakat atas dampak kegiatan terhadap aspek kesehatan antara lain:; sanitasi lingkungan , penyakit infeksi dan pengelolaan sampah rumah tangga. E. Kesimpulan Perubahan penyakit menular dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan perlu dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Dampak ini adalah akibat dari Dampak Turunan dari peningkatan migrasi (mobilitas penduduk), perubahan norma dan nilai sosial, perubahan tingkat pendapatan masyarakat, perubahan status gizi masyarakat, serta perubahan sanitasi lingkungan		Lermatang Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing kegiatan selesai untuk pelepasan tenaga kerja. Perubahan kesehatan masyarakat akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya serta Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi													
				Perubahan Penyakit Tidak Menular	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja untuk pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya akan meningkatkan migrasi penduduk ke wilayah proyek. Diperkirakan sekitar 12.611 tenaga kerja akan datang ke lokasi proyek pada puncak kegiatan konstruksi. B. Kondisi Rona Lingkungan Pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, penyakit tidak menular yang paling banyak diderita oleh masyarakat adalah hipertensi dan Menurut kunjungan pasien di Puskesmas Pembantu Lermatang – Kecamatan Tanimbar selatan (2015 – 2019), PTM yang masuk 10 penyakit terbanyak di pelayanan kesehatan diantaranya adalah Penyakit Hipertensi. Tabel kasus hipertensi di beberapa desa <table><tr><td>Desa</td><td>Kasus</td></tr><tr><td>Latdalam</td><td>26</td></tr><tr><td>Bomaki</td><td>14</td></tr><tr><td>Lermatang</td><td>20</td></tr><tr><td>Matakus</td><td>2</td></tr><tr><td>Olilit Barat</td><td>21</td></tr><tr><td>Olilit Timur</td><td>39</td></tr><tr><td>Lauran</td><td>31</td></tr></table>	Desa	Kasus	Latdalam	26	Bomaki	14	Lermatang	20	Matakus	2	Olilit Barat	21	Olilit Timur	39	Lauran	31
Desa	Kasus																				
Latdalam	26																				
Bomaki	14																				
Lermatang	20																				
Matakus	2																				
Olilit Barat	21																				
Olilit Timur	39																				
Lauran	31																				

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian																																												
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)																																														
					<table><tr><td>Ilngei</td><td>13</td></tr><tr><td>Wowonda</td><td>17</td></tr><tr><td>Sifnana</td><td>15</td></tr><tr><td>Kabiarat</td><td>13</td></tr></table> C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah populasi yang besar dari orang yang berada wilayah proyek serta kontak antara masyarakat pendatang dan masyarakat setempat yang meningkat yang dikaitkan dengan faktor risiko adanya perubahan penyakit tidak menular . D. Intensitas Perhatian Masyarakat Beberapa aspek yang menjadi perhatian masyarakat atas dampak kegiatan terhadap aspek kesehatan antara lain: penyakit tidak menular, gizi, sanitasi lingkungan dan perubahan pola perilaku. E. Kesimpulan Perubahan penyakit tidak menular dari kegiatan ini dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan perlu dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Dampak ini adalah akibat dari Dampak Turunan dari peningkatan migrasi (mobilitas penduduk), perubahan norma dan nilai sosial, perubahan sanitasi lingkungan, perubahan tingkat pendapatan masyarakat, dan perubahan status gizi masyarakat.	Ilngei	13	Wowonda	17	Sifnana	15	Kabiarat	13			kesehatan masyarakat akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya serta Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi																																				
Ilngei	13																																																			
Wowonda	17																																																			
Sifnana	15																																																			
Kabiarat	13																																																			
			Peningkatan Penyalahgunaan Zat Adiktif (Narkoba, Alkohol).	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja untuk pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya akan meningkatkan migrasi penduduk ke wilayah proyek. Diperkirakan sekitar 12.611 tenaga kerja akan datang ke lokasi proyek pada puncak kegiatan konstruksi. B. Kondisi Rona Lingkungan Kasus penyalahgunaan zat adiktif yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menurut pantauan Puskesmas Saumlaki adalah tingkat mengonsumsi minuman beralkohol, relatif tinggi. Terdapat toko penjual minuman beralkohol, dan terdapat kasus mabuk minuman beralkohol, tetapi belum ada catatan kasus Narkoba. Berikut tabel mengenai konsumsi alkohol <table><tr><td>Desa</td><td>Jml Toko</td><td>Jml Konsumsi Miras</td><td>Jumlah yang mabuk</td><td>%</td></tr><tr><td>Bomaki</td><td>5</td><td>53</td><td>25</td><td>47,</td></tr><tr><td>Matakus</td><td>2</td><td>50</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Ilngei</td><td>7</td><td>79</td><td>49</td><td>62,0</td></tr><tr><td>Kabiarat</td><td>1</td><td>35</td><td>2</td><td>5,8</td></tr><tr><td>Wowonda</td><td>1</td><td>350</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Lorulun*</td><td>16</td><td>567</td><td>76</td><td>13,4</td></tr><tr><td>Tumbur</td><td>-</td><td>15</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>Rata Rata</td><td></td><td>160</td><td>21,71</td><td>18,3</td></tr></table> C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bertambahnya jumlah penduduk dari masyarakat yang datang dari luar Saumlaki berpotensi mengubah nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat	Desa	Jml Toko	Jml Konsumsi Miras	Jumlah yang mabuk	%	Bomaki	5	53	25	47,	Matakus	2	50	0	0	Ilngei	7	79	49	62,0	Kabiarat	1	35	2	5,8	Wowonda	1	350	0	0	Lorulun*	16	567	76	13,4	Tumbur	-	15	-		Rata Rata		160	21,71	18,3	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian dampak berlangsung 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing kegiatan selesai untuk pelepasan tenaga kerja. Perubahan kesehatan masyarakat akan berlangsung
Desa	Jml Toko	Jml Konsumsi Miras	Jumlah yang mabuk	%																																																
Bomaki	5	53	25	47,																																																
Matakus	2	50	0	0																																																
Ilngei	7	79	49	62,0																																																
Kabiarat	1	35	2	5,8																																																
Wowonda	1	350	0	0																																																
Lorulun*	16	567	76	13,4																																																
Tumbur	-	15	-																																																	
Rata Rata		160	21,71	18,3																																																

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					terkait minuman alkohol dan penyalahgunaan zat adiktif, sehingga adanya risiko peningkatan konsumsi alkohol/miras dengan adanya migrasi tenaga kerja yang berefek tingkat orang yang mabuk akan meningkat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Masyarakat Saumlaki memiliki tradisi mengonsumsi Sopi, yang merupakan minuman tradisional yang mengandung alkohol, dan diproduksi secara tradisional oleh masyarakat setempat sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Sehingga hal ini tidak terlalu menjadi perhatian masyarakat akan tetapi ini akan berdampak kepada tenaga konstruksi non lokal. E. Kesimpulan Potensi peningkatan penyalahgunaan zat adiktif dengan adanya kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga diperkirakan berdampak signifikan sehingga dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik			terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya serta Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi
		A. Melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon karyawan sebelum mulai bekerja, penyediaan asuransi kesehatan (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan) B. Melakukan tes kesehatan terhadap tenaga kerja secara berkala C. INPEX akan melakukan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di bidang Kesehatan bagi masyarakat yang terkena dampak		Perubahan Status Gizi Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja untuk pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya akan meningkatkan migrasi penduduk ke wilayah proyek. Diperkirakan sekitar 12.611 tenaga kerja akan datang ke lokasi proyek pada puncak kegiatan konstruksi. B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan data BPS tahun 2022 kecamatan Tanimbar rata-rata jumlah balita kekurangan gizi sebanyak 6 kasus dan di kecamatan Wertamrian ada 2 kasus. Berdasarkan data SKI tahun 2023 kepulauan Tanimbar prevalensi stunting 25,1% Tingginya masalah gizi disebabkan asupan yang adekuat akibat tingkat ekonomi masyarakat dan minimnya pengetahuan orang tua tentang gizi serta berkaitan dengan ketahanan pangan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peningkatan jumlah populasi proyek dapat mempengaruhi kondisi status gizi masyarakat sekitar. Karena akan banyak pemukim baru yang membutuhkan ketersediaan pangan yang lebih besar, risiko kerawanan pangan di musim kemarau akan meningkat D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perubahan gizi masyarakat menjadi salah satu aspek yang disorot pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Peningkatan jumlah populasi proyek dapat mempengaruhi kondisi status gizi masyarakat yang berkaitan dengan ketersediaan pangan. Sehingga diprediksi jika adanya lonjakan jumlah penduduk akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan. Perubahan status gizi masyarakat dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH)	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian dampak berlangsung 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing kegiatan selesai untuk pelepasan tenaga kerja. Perubahan kesehatan masyarakat akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya serta Kota Saumlaki dan desa-desa di

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
								sekitarnya. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi
		A. Melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon karyawan sebelum mulai bekerja, penyediaan asuransi kesehatan (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan) B. Melakukan tes kesehatan terhadap tenaga kerja secara berkala C. INPEX akan melakukan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di bidang Kesehatan bagi masyarakat yang terkena dampak		Perubahan Sanitasi Lingkungan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja untuk pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya akan meningkatkan migrasi penduduk ke wilayah proyek. Diperkirakan sekitar 12.611 tenaga kerja akan datang ke lokasi proyek pada puncak kegiatan konstruksi. B. Kondisi Rona Lingkungan Indikator sanitasi layak mengacu kepada 5 pilar indikator Sanitasi total berbasis masyarakat Adlah Stop BABS , Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga dengan cakupan 90%. Berdasarkan data STBM Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk sanitasi layak 81,37% , desa dengan STBM 91,46% dan Desa stop BABS 46% C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bertambahnya penduduk akibat banyaknya tenaga kerja pencari kerja pada suatu kegiatan pembangunan akan dapat mempengaruhi kondisi sanitasi lingkungan di suatu daerah baik dari penggunaan air bersih, sarana MCK dan timbulan sampah. Berdasarkan rona terlihat bahwa sari sumber air bersih dan jenis septik tank sudah menggunakan leher angsa khawatirnya dengan adanya aktivitas pembangunan ONLG dan fasilitas pendukungnya akan mempengaruhi kondisi sanitasi masyarakat termasuk akan menyebabkan timbulan sampah dan limbah yang akan menurunkan sanitasi lingkungan D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perubahan sanitasi lingkungan menjadi salah satu aspek yang disorot pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Perubahan sanitasi lingkungan dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH).).	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian dampak berlangsung 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing kegiatan selesai untuk pelepasan tenaga kerja. Perubahan kesehatan masyarakat akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya serta Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi
		A. Melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon karyawan sebelum mulai bekerja, penyediaan asuransi kesehatan (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan) B. Melakukan tes kesehatan terhadap tenaga kerja secara berkala		Perubahan Fasilitas Kesehatan dan Akses ke Layanan Kesehatan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja untuk pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya akan meningkatkan migrasi penduduk ke wilayah proyek. Diperkirakan sekitar 12.611 tenaga kerja akan datang ke lokasi proyek pada puncak kegiatan konstruksi. B. Kondisi Rona Lingkungan	Disimpulkan sebagai DTPH, namun tetap dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		C. INPEX akan melakukan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di bidang Kesehatan bagi masyarakat yang terkena dampak			FASKES di Lokasi Studi kondisi eksisting adalah: Rumah Sakit Umum (4), Rumah Bersalin (1), Puskesmas (12), Posyandu (159), Polindes/Poliklinik (14). Tenaga medis yang ada adalah sebagai berikut (lebih dari 50% berada di Kecamatan Tanimbar Selatan): Dokter 55 tenaga, Perawat 342 tenaga, Bidan 83 tenaga, Farmasi 25 tenaga, Ahli Gizi 16 tenaga, Teknisi Medis 4 tenaga, Ahli Sanitasi/Kesehatan Lingkungan 11 tenaga, dan Ahli Kesehatan Masyarakat 39 tenaga. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambahan jumlah penduduk secara pesat akibat kegiatan konstruksi akan menimbulkan beban bagi pelayanan kesehatan di wilayah sekitar proyek, tempat para pendatang menetap. Terdapat pula peningkatan kebutuhan dari masyarakat setempat dari pengobatan tradisional menjadi pengobatan modern karena kompleksitas penyakit yang ada. Proyek berencana akan membangun camp beserta fasilitas pendukungnya (seperti pelayanan kesehatan) bagi tenaga kerja. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Salah satu harapan masyarakat dengan adanya proyek adalah terjadinya peningkatan fasilitas umum di daerah mereka. E. Kesimpulan Proyek berencana akan membangun <i>camp</i> beserta fasilitas pendukungnya (seperti pelayanan kesehatan) bagi tenaga kerja. Sehingga hal ini dapat mengurangi beban penanganan kesehatan akibat penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja. Perubahan fasilitas kesehatan dan akses pelayanan kesehatan dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) namun perlu dikelola dan dipantau oleh proyek.			
		A. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan/DLLAJR dan Satlantas setempat. B. Menyiapkan rambu-rambu keselamatan lalu lintas. C. Menyiapkan prosedur standar keselamatan dalam berkendara.	Transportasi	Gangguan Terhadap Transportasi Darat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Mobilisasi tenaga kerja selama masa konstruksi akan berlangsung sekitar 54 bulan B. Kondisi Rona Lingkungan Ruas jalan yang dilewati sebanyak 7, kinerjanya masih di bawah batas yang ditetapkan 0.7 C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Tenaga kerja untuk proyek konstruksi Kilang OLNG akan ditempatkan pada <i>camp</i> yang sudah disediakan sehingga pemanfaatan transportasi darat dari dan menuju lokasi konstruksi oleh tenaga kerja dapat diminimalisir. Oleh karena itu, diperkirakan volume transportasi darat pada tahap konstruksi tidak mengalami banyak peningkatan D. Intensitas Perhatian Masyarakat Gangguan terhadap transportasi darat tidak menjadi isu saat konsultasi publik E. Kesimpulan Tenaga kerja untuk proyek konstruksi Kilang OLNG akan ditempatkan pada <i>camp</i> yang sudah disediakan sehingga pemanfaatan transportasi darat dari	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					dan menuju lokasi konstruksi oleh tenaga kerja dapat diminimalisir. Oleh karena itu, diperkirakan volume transportasi darat pada tahap konstruksi tidak mengalami banyak peningkatan. Dengan demikian, gangguan terhadap transportasi darat akibat mobilisasi tenaga kerja pada tahap konstruksi dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).			
2.	Mobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja menggunakan Jalur Laut serta Jalur Darat	Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kelayakan mesin kapal yang digunakan, untuk memastikan kondisi mesin yang digunakan dalam keadaan laik sesuai dengan Perpres No. 29 tahun 2012 (Lampiran VI MARPOL 73/78).	Kebisingan	Peningkatan Kebisingan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pengeboran sumur pengembangan akan menggunakan 2 kapal pengeboran (<i>drilling vessel</i>), 4 kapal tunda (<i>tug boats</i>) dan 6 kapal pendukung (<i>supply vessel</i>). Kapal pengeboran (<i>drilling vessel</i>) akan berada di lokasi SURF dan akan dioperasikan secara bersamaan selama pengeboran sumur-sumur gas berlangsung, dengan perkiraan waktu pengeboran setiap sumurnya sekitar 3 bulan. Kegiatan SURF meliputi penarikan sumbu sumur, pemasangan sumur bawah laut, struktur <i>riser base</i>, <i>flowline</i> termasuk PLET, <i>manifold</i> produksi, <i>manifold</i> ekspor, SDH, <i>jumper</i> sumur, <i>tie-in spool</i>, <i>flying lead</i>, <i>riser</i> dan <i>umbilical</i>. Kegiatan ini akan menggunakan minimal 5 jenis kapal yang terlibat dalam kegiatan pemasangan fasilitas SURF meliputi MSV, LWIV, FLV, HCV dan ISV. Pemasangan pipa menggunakan 1 (satu) buah tongkang pengangkut pipa, 1 (satu) buah <i>lay barge</i>, 1 (satu) atau 2 (dua) buah <i>tug boat</i>, 1(satu) buah <i>chase boat</i>, 1 (satu) <i>trenching barge</i>, 1 (satu) <i>hook up barge</i>, serta 1 (satu) kapal HDD dengan frekuensi pelayaran sebanyak satu kali selama pemasangan pipa. Mobilisasi tenaga kerja menggunakan 1 (satu) buah kapal dengan frekuensi setiap dua minggu B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan data total call dapat dipastikan jumlah bangkitan lalu lintas kapal menggunakan alur pelayaran Teluk Dalam selama bulan Oktober 2019 sebanyak 288 tiba dan berangkat, ini berarti bahwa setiap hari rata-rata terdapat 9 unit kapal yang melakukan tiba dan berangkat C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Mobilisasi menggunakan transportasi laut menimbulkan gangguan kebisingan yang bersumber dari suara mesin kapal yang digunakan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak menjadi isu saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Dampak digolongkan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
		Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kelayakan mesin kapal yang digunakan, untuk memastikan kondisi mesin yang digunakan dalam keadaan laik sesuai dengan Perpres No. 29 tahun 2012 (Lampiran VI MARPOL 73/78).	Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan Terhadap Mamalia Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan mobilisasi tenaga kerja, peralatan, dan bahan yang menggunakan transportasi laut meliputi pengeboran dan SURF; FPSO; GEP; dan OLNG. 1. Pengeboran dan SURF Kegiatan pengeboran sumur pengembangan akan menggunakan 2 kapal pengeboran (<i>drilling vessel</i>), 4 kapal tunda (<i>tug boats</i>) dan 6 kapal pendukung (<i>supply vessel</i>). Kapal pengeboran (<i>drilling vessel</i>) akan berada	Disimpulkan sebagai DPH	Dampak gangguan terhadap mamalia laut tersebar sepanjang jalur transportasi	Sebagai dampak turunan dari adanya peningkatan kebisingan dan secara langsung dapat

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					di lokasi SURF dan akan dioperasikan secara bersamaan selama pengeboran sumur-sumur gas berlangsung, dengan perkiraan waktu pengeboran setiap sumurnya sekitar 3 bulan. Kegiatan penarikan sumbu sumur, pemasangan sumur bawah laut, struktur riser base, flowline termasuk PLET, manifold produksi, manifold ekspor, SDH, jumper sumur, tie-in spool, flying lead, riser dan umbilical akan menggunakan minimal 5 jenis kapal yang terlibat dalam kegiatan pemasangan fasilitas SURF meliputi MSV, LWIV, FLV, HCV dan ISV. Pemasangan pipa menggunakan 1 (satu) buah tongkang pengangkut pipa, 1 (satu) buah lay barge, 1 (satu) atau 2 (dua) buah tug boat, 1(satu) buah chase boat, 1 (satu) trenching barge, 1 (satu) hook up barge, serta 1 (satu) kapal HDD dengan frekuensi pelayaran sebanyak satu kali selama pemasangan pipa. Mobilisasi tenaga kerja menggunakan 1 (satu) buah kapal dengan frekuensi setiap dua minggu. Seluruh material yang diperlukan untuk konstruksi pipa akan dikirim ke TUKS INPEX di Teluk Saumlaki menggunakan tongkang atau langsung dikirim ke kapal konstruksi. Lama waktu pelaksanaan kegiatan pemasangan pipa akan berlangsung sekitar sembilan bulan pada saat cuaca tenang. 2. FPSO FPSO yang sudah siap akan dibawa ke lokasi yang telah ditetapkan di Laut Arafura menggunakan 4 (empat) kapal tunda. Instalasi SURF dan mooring ke FPSO akan menggunakan 4 (empat) buah tongkang, 6 (enam) buah kapal tunda untuk positioning and station keeping FPSO, 1 (satu) buah workboat dan 1 (satu) buah Anchor Handling Tug. 3. GEP Dibutuhkan waktu sekitar sembilan bulan untuk peletakan pipa bawah laut sepanjang lebih kurang 167,26 km. Selama peletakan pipa, jenis kapal yang akan digunakan antara lain: material barges termasuk tug boat, kapal pemasok (suply boat), crew boat, kapal konstruksi (construction vessel), terdiri dari pipelay barge, trenching barge, hook up barge, serta kapal HDD dan kapal survei untuk mengetahui keakuratan peletakan pipa. 4. OILNG Mobilisasi alat-alat maupun material dilakukan dengan menggunakan transportasi laut (kapal) yang disesuaikan dengan ukuran dan bobot peralatan dan/atau bahan-bahan yang akan diangkut. Jenis kendaraan berat yang digunakan tercantum dalam tabel berikut.		laut, sehingga sebaran dampak sebagai batas ekologi menyebar sangat luas dari lokasi TUKS di Teluk Saumlaki hingga FPSO di laut lepas Arafura.	menyebabkan tertubruknya mamalia laut. Dampak akan berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda dengan estimasi batas waktu kajian dampak selama 2 tahun selama kegiatan SURF, FPSO dan GEP berlangsung.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian																																																																																														
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)																																																																																																
				<table><thead><tr><th>Peralatan</th><th>Perkiraan Berat Kendaraan/Alat Berat (ton)</th><th>Perkiraan Jumlah saat Puncak Kegiatan Konstruksi</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kegiatan Umum</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bulldozer, di bawah 20 ton</td><td><25</td><td>14</td></tr><tr><td>Bulldozer, di atas 20 ton</td><td>>25</td><td>8</td></tr><tr><td>Backhoe</td><td>10</td><td>12</td></tr><tr><td>Excavator</td><td>30</td><td>18</td></tr><tr><td>Wheel loader</td><td>30</td><td>15</td></tr><tr><td>Motor Grader</td><td>33</td><td>6</td></tr><tr><td>Dump truck</td><td>>20</td><td>40</td></tr><tr><td>Road Roller (tandem, tier, vibration)</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>Compactor (plate, trench, d frog)</td><td>12</td><td>13</td></tr><tr><td>Concrete batch plant</td><td>-</td><td>2</td></tr><tr><td>Concrete pump</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>Mixer truck</td><td>14</td><td>20</td></tr><tr><td>Water truck/fuel truck</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>Pile driving rig</td><td>>20</td><td>10</td></tr><tr><td>Pekerjaan Mekanikal</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ringer crane, 1200 to 1500 ton</td><td>>20</td><td>1</td></tr><tr><td>Heavy lift crane 800 ton</td><td>>20</td><td>1</td></tr><tr><td>Heavy lift crane 450 atau 500 ton</td><td>>20</td><td>1</td></tr><tr><td>Crane 150 ton</td><td>>20</td><td>6</td></tr><tr><td>Crane 100 to 120 ton</td><td>>20</td><td>5</td></tr><tr><td>Crane 30 to 50 ton</td><td>>20</td><td>13</td></tr><tr><td>Crane below 30 ton</td><td>>20</td><td>15</td></tr><tr><td>Tower Crane</td><td>>20</td><td>1</td></tr><tr><td>Self propelled transporter with power pack</td><td>18/26(2)</td><td>20</td></tr><tr><td>Low bed trailer, 60 to 100 ton</td><td>>25</td><td>5</td></tr><tr><td>Flat bed trailer 30 to 50 ton</td><td>>25</td><td>10</td></tr><tr><td>Boom truck</td><td>15</td><td>12</td></tr><tr><td>Forklift</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>Welding generators</td><td>3</td><td>150</td></tr><tr><td>Power generators</td><td>3</td><td>4</td></tr></tbody></table> Kegiatan mobilisasi tenaga kerja, peralatan, dan bahan yang menggunakan transportasi laut meliputi pengeboran dan SURF; FPSO; GEP; dan OLNK, maka dapat menyebabkan peningkatan kebisingan bawah laut di lokasi studi. B. Kondisi Rona Lingkungan Untuk data rona lingkungan kebisingan bawah laut alami di lokasi studi tidak tersedia. Menurut Veeriyen and Rajendran, nilai kebisingan alami di bawah laut berkisar antara 60 – 90 dB re 1 μPa dalam rentang 10-100 Hz. Keberadaan mamalia laut berdasarkan data rona yang dikumpulkan pada tahun 2012, 2013, 2019 dan 2020 dijumpai 13 jenis mamalia laut yang terdiri dari kelompok paus sebanyak 8 jenis, kelompok lumba-lumba 4 jenis, dan 1 jenis kelompok sirenia yang dijumpai di sekitar lokasi kajian. 13 Jenis mamalia laut yang dijumpai di lokasi studi termasuk dalam rentang suara <i>high frequency</i>, <i>low frequency</i> dan <i>sirenians frequency</i>, sehingga diketahui rentang nilai TTS (<i>Temporary Threshold Shifts</i>/Ambang Batas Kebisingan Sementara) terendah sebesar 213 dB re 1 μPa dan nilai PTS (<i>Permanent Threshold Shifts</i>/Ambang Batas Kebisingan Permanen) terendah sebesar 219 dB re 1 μPa. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dengan adanya kegiatan mobilisasi tenaga kerja, peralatan, dan bahan yang menggunakan transportasi laut yang meliputi pengeboran dan SURF; FPSO; GEP; dan OLNK dengan <i>Vessels transiting (offset, supply, research,</i>	Peralatan	Perkiraan Berat Kendaraan/Alat Berat (ton)	Perkiraan Jumlah saat Puncak Kegiatan Konstruksi	Kegiatan Umum			Bulldozer, di bawah 20 ton	<25	14	Bulldozer, di atas 20 ton	>25	8	Backhoe	10	12	Excavator	30	18	Wheel loader	30	15	Motor Grader	33	6	Dump truck	>20	40	Road Roller (tandem, tier, vibration)	10	10	Compactor (plate, trench, d frog)	12	13	Concrete batch plant	-	2	Concrete pump	10	4	Mixer truck	14	20	Water truck/fuel truck	10	9	Pile driving rig	>20	10	Pekerjaan Mekanikal			Ringer crane, 1200 to 1500 ton	>20	1	Heavy lift crane 800 ton	>20	1	Heavy lift crane 450 atau 500 ton	>20	1	Crane 150 ton	>20	6	Crane 100 to 120 ton	>20	5	Crane 30 to 50 ton	>20	13	Crane below 30 ton	>20	15	Tower Crane	>20	1	Self propelled transporter with power pack	18/26(2)	20	Low bed trailer, 60 to 100 ton	>25	5	Flat bed trailer 30 to 50 ton	>25	10	Boom truck	15	12	Forklift	2	4	Welding generators	3	150	Power generators	3	4		
Peralatan	Perkiraan Berat Kendaraan/Alat Berat (ton)	Perkiraan Jumlah saat Puncak Kegiatan Konstruksi																																																																																																				
Kegiatan Umum																																																																																																						
Bulldozer, di bawah 20 ton	<25	14																																																																																																				
Bulldozer, di atas 20 ton	>25	8																																																																																																				
Backhoe	10	12																																																																																																				
Excavator	30	18																																																																																																				
Wheel loader	30	15																																																																																																				
Motor Grader	33	6																																																																																																				
Dump truck	>20	40																																																																																																				
Road Roller (tandem, tier, vibration)	10	10																																																																																																				
Compactor (plate, trench, d frog)	12	13																																																																																																				
Concrete batch plant	-	2																																																																																																				
Concrete pump	10	4																																																																																																				
Mixer truck	14	20																																																																																																				
Water truck/fuel truck	10	9																																																																																																				
Pile driving rig	>20	10																																																																																																				
Pekerjaan Mekanikal																																																																																																						
Ringer crane, 1200 to 1500 ton	>20	1																																																																																																				
Heavy lift crane 800 ton	>20	1																																																																																																				
Heavy lift crane 450 atau 500 ton	>20	1																																																																																																				
Crane 150 ton	>20	6																																																																																																				
Crane 100 to 120 ton	>20	5																																																																																																				
Crane 30 to 50 ton	>20	13																																																																																																				
Crane below 30 ton	>20	15																																																																																																				
Tower Crane	>20	1																																																																																																				
Self propelled transporter with power pack	18/26(2)	20																																																																																																				
Low bed trailer, 60 to 100 ton	>25	5																																																																																																				
Flat bed trailer 30 to 50 ton	>25	10																																																																																																				
Boom truck	15	12																																																																																																				
Forklift	2	4																																																																																																				
Welding generators	3	150																																																																																																				
Power generators	3	4																																																																																																				

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					<i>monitoring</i>) akan menambah kebisingan bawah laut sebesar 192 dB re 1 μPa (Martin <i>et al</i>, 2021). D. Intensitas Perhatian Masyarakat Berdasarkan hasil konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan yang sudah dilakukan, gangguan terhadap mamalia laut akibat Mobilisasi Tenaga Kerja, Peralatan, dan Bahan menggunakan Transportasi Laut selama tahap konstruksi tidak menjadi perhatian yang tinggi dari masyarakat. E. Kesimpulan <i>Vessels transiting (offset, supply, research, monitoring)</i> dari kegiatan mobilisasi tenaga kerja, peralatan, dan bahan yang menggunakan transportasi laut untuk aktivitas pengeboran dan SURF; FPSO; GEP; dan OLNK akan meningkatkan nilai kebisingan bawah laut yang menyebabkan gangguan terhadap mamalia laut yang bersifat sementara maupun permanen. Maka gangguan terhadap mamalia laut yang berasal dari kegiatan Mobilisasi Tenaga Kerja, Peralatan, dan Bahan menggunakan Transportasi Laut selama tahap konstruksi menjadi Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal.			
		A. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan. B. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan aktivitas di laut. C. Menyiapkan rambu-rambu keselamatan pelayaran. D. Menyiapkan prosedur standar keselamatan dalam pelayaran.	Sosial Ekonomi	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pengeboran sumur pengembangan akan menggunakan 2 kapal pengeboran (<i>drilling vessel</i>), 4 kapal tunda (<i>tug boats</i>) dan 6 kapal pendukung (<i>supply vessel</i>). Kapal pengeboran (<i>drilling vessel</i>) akan berada di lokasi SURF dan akan dioperasikan secara bersamaan selama pengeboran sumur-sumur gas berlangsung, dengan perkiraan waktu pengeboran setiap sumurnya sekitar 3 bulan. Kegiatan SURF meliputi penarikan sumbu sumur, pemasangan sumur bawah laut, struktur <i>riser base</i>, <i>flowline</i> termasuk PLET, <i>manifold</i> produksi, <i>manifold</i> ekspor, SDH, <i>jumper</i> sumur, <i>tie-in spool</i>, <i>flying lead</i>, <i>riser</i> dan <i>umbilical</i>. Kegiatan ini akan menggunakan minimal 5 jenis kapal yang terlibat dalam kegiatan pemasangan fasilitas SURF meliputi MSV, LWIV, FLV, HCV dan ISV. Pemasangan pipa menggunakan 1 (satu) buah tongkang pengangkut pipa, 1 (satu) buah <i>lay barge</i>, 1 (satu) atau 2 (dua) buah <i>tug boat</i>, 1(satu) buah <i>chase boat</i>, 1 (satu) <i>trenching barge</i>, 1 (satu) <i>hook up barge</i>, serta 1 (satu) kapal HDD dengan frekuensi pelayaran sebanyak satu kali selama pemasangan pipa. Mobilisasi tenaga kerja menggunakan 1 (satu) buah kapal dengan frekuensi setiap dua minggu. B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi sebelum adanya kegiatan proyek ini, terdapat kegiatan nelayan terutama perikanan tangkap/kapal nelayan dari <i>fishing base</i> menuju dan kembali dari <i>fishing ground</i> ke <i>landing base</i> secara normal. Masyarakat melakukan budidaya rumput laut di sepanjang pantai Lermatang dan Pulau Matakus.	Disimpulkan sebagai DTPH, namun tetap dipantau dan dikelola	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Proyek merencanakan menggunakan transportasi laut untuk mobilisasi peralatan, dan bahan. Kegiatan tersebut akan melalui jalur pelayaran yang sudah ditentukan selama 60 bulan. Mobilisasi tersebut akan melalui pionir jetty untuk pembangunan O LNG. Pada pembangunan FPSO, transportasi alat dan bahan akan langsung diangkut menuju lokasi FPSO melalui jalur pelayaran yang sudah ditentukan. Jalur pelayaran tersebut merupakan jalur pelayaran yang telah ada dan tidak beririsan dengan lokasi pelayaran nelayan ataupun lokasi mencari ikan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak terhadap aktivitas perikanan menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Proyek merencanakan menggunakan transportasi laut untuk mobilisasi peralatan, dan bahan. Kegiatan tersebut akan melalui jalur pelayaran yang sudah ditentukan selama 60 bulan. Mobilisasi tersebut akan melalui pionir jetty untuk pembangunan O LNG. Pada pembangunan FPSO, transportasi alat dan bahan akan langsung diangkut menuju lokasi FPSO melalui jalur pelayaran yang sudah ditentukan. Jalur pelayaran tersebut merupakan jalur pelayaran yang telah ada dan tidak beririsan dengan lokasi pelayaran nelayan ataupun lokasi mencari ikan. Dengan demikian, gangguan terhadap kegiatan perikanan dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) dan namun tetap akan dipantau dan dikelola.			
		A. Membuat, mensosialisasikan dan melaksanakan mekanisme penyampaian dan penanganan keluhan. B. Menjalin komunikasi efektif dengan para <i>stakeholder</i>.	Sosial Budaya	Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pengeboran sumur pengembangan akan menggunakan 2 kapal pengeboran (<i>drilling vessel</i>), 4 kapal tunda (<i>tug boats</i>) dan 6 kapal pendukung (<i>supply vessel</i>). Kapal pengeboran (<i>drilling vessel</i>) akan berada di lokasi SURF dan akan dioperasikan secara bersamaan selama pengeboran sumur-sumur gas berlangsung, dengan perkiraan waktu pengeboran setiap sumurnya sekitar 3 bulan. Kegiatan SURF meliputi penarikan sumbu sumur, pemasangan sumur bawah laut, struktur <i>riser base</i>, <i>flowline</i> termasuk PLET, <i>manifold</i> produksi, <i>manifold</i> ekspor, SDH, <i>jumper</i> sumur, <i>tie-in spool</i>, <i>flying lead</i>, <i>riser</i> dan <i>umbilical</i>. Kegiatan ini akan menggunakan minimal 5 jenis kapal yang terlibat dalam kegiatan pemasangan fasilitas SURF meliputi MSV, LWIV, FLV, HCV dan ISV. Pemasangan pipa menggunakan 1 (satu) buah tongkang pengangkut pipa, 1 (satu) buah <i>lay barge</i>, 1 (satu) atau 2 (dua) buah tug boat, 1(satu) buah <i>chase boat</i>, 1 (satu) <i>trenching barge</i>, 1 (satu) <i>hook up barge</i>, serta 1 (satu) kapal HDD dengan frekuensi pelayaran sebanyak satu kali selama pemasangan pipa. Mobilisasi tenaga kerja menggunakan 1 (satu) buah kapal dengan frekuensi setiap dua minggu. B. Kondisi Rona Lingkungan	Disimpulkan sebagai DTPH, namun tetap dipantau dan dikelola	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Berdasarkan hasil wawancara responden menunjukkan bahwa harapan masyarakat adalah peningkatan kesempatan kerja sebanyak 28%, peningkatan kesejahteraan masyarakat sebanyak 13%, tidak mengganggu aktivitas nelayan sebanyak 8% dan peningkatan modal usaha sebanyak 17%. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perpindahan lokasi tangkapan ikan ke lokasi lain yang bersifat sementara akan meningkatkan hasil tangkapan, atau sebaliknya, menurunkan hasil tangkapan. Penurunan dukungan berasal dari kelompok nelayan yang hasil tangkapannya menurun dan kemudian menyatakan penyebab penurunan hasil tangkapan disebabkan oleh kegiatan penggelaran pipa. Penurunan dukungan tersebut dengan cepat akan menyebar dan menimbulkan persepsi negatif dalam masyarakat. Namun diperkirakan keluhan yang timbul bersifat sementara dan segera berubah setelah adanya koordinasi dan informasi yang baik dengan nelayan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak kegiatan terhadap aspek ini tidak muncul saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Perpindahan lokasi tangkapan ikan ke lokasi lain yang bersifat sementara akan meningkatkan hasil tangkapan, atau sebaliknya, menurunkan hasil tangkapan. Penurunan dukungan berasal dari kelompok nelayan yang hasil tangkapannya menurun dan kemudian menyatakan penyebab penurunan hasil tangkapan disebabkan oleh kegiatan penggelaran pipa. Penurunan dukungan tersebut dengan cepat akan menyebar dan menimbulkan persepsi negatif dalam masyarakat. Namun diperkirakan keluhan yang timbul bersifat sementara dan segera berubah setelah adanya koordinasi dan informasi yang baik dengan nelayan. Dampak terhadap keluhan masyarakat pada kegiatan mobilisasi tenaga Kerja, peralatan, dan bahan menggunakan transportasi laut dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) namun perlu dikelola.			
		A. INPEX akan mematuhi peraturan yang berlaku tentang navigasi (PP No. 5 Tahun 2010). B. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan. C. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan aktivitas di laut. D. Menyiapkan rambu-rambu keselamatan pelayaran. E. Menyiapkan prosedur standar keselamatan pelayaran.	Transportasi	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pengeboran sumur pengembangan akan menggunakan 2 kapal pengeboran (<i>drilling vessel</i>), 4 kapal tunda (<i>tug boats</i>) dan 6 kapal pendukung (<i>supply vessel</i>). Kapal pengeboran (<i>drilling vessel</i>) akan berada di lokasi SURF dan akan dioperasikan secara bersamaan selama pengeboran sumur-sumur gas berlangsung, dengan perkiraan waktu pengeboran setiap sumurnya sekitar 3 bulan. Kegiatan SURF meliputi penarikan sumbu sumur, pemasangan sumur bawah laut, struktur <i>riser base</i>, <i>flowline</i> termasuk PLET, <i>manifold</i> produksi, <i>manifold</i> ekspor, SDH, <i>jumper</i> sumur, <i>tie-in spool</i>, <i>flying lead</i>, <i>riser</i> dan <i>umbilical</i>. Kegiatan ini akan menggunakan minimal 5 jenis kapal yang terlibat dalam kegiatan pemasangan fasilitas SURF meliputi MSV, LWIV, FLV, HCV dan ISV.	Disimpulkan sebagai DTPH, namun tetap dipantau dan dikelola	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Pemasangan pipa menggunakan 1 (satu) buah tongkang pengangkut pipa, 1 (satu) buah <i>lay barge</i>, 1 (satu) atau 2 (dua) buah <i>tug boat</i>, 1(satu) buah <i>chase boat</i>, 1 (satu) <i>trenching barge</i>, 1 (satu) <i>hook up barge</i>, serta 1 (satu) kapal HDD dengan frekuensi pelayaran sebanyak satu kali selama pemasangan pipa. Mobilisasi tenaga kerja menggunakan 1 (satu) buah kapal dengan frekuensi setiap dua minggu. B. Kondisi Rona Lingkungan Pergerakan lalu lintas laut terpantau sebanyak 110 unit didominasi oleh kapal nelayan sebanyak 98 unit, dan kelompok waktu dengan frekuensi terpadat antara jam 03.00 sampai dengan jam 06.00 pagi sebanyak 33 unit kemudian terpadat ke-2 pada jam 06.00 – 09.00 sebanyak 23 unit. Untuk kasus lalu lintas yang melalui selat Nustual, terpantau hanya 5 unit kapal nelayan kecil yaitu pada kelompok waktu 12.00-15.00 sebanyak 2 unit dan 15.00-18.00 sebanyak 3 unit, kemungkinan besar untuk melalui selat tersebut sangat tergantung dengan pasang surut. Pergerakan lalu lintas laut terpantau sebanyak 110 unit didominasi oleh kapal nelayan sebanyak 98 unit, dan kelompok waktu dengan frekuensi terpadat antara jam 03.00 sampai dengan jam 06.00 pagi sebanyak 33 unit kemudian terpadat ke-2 pada jam 06.00 – 09.00 sebanyak 23 unit. Untuk kasus lalu lintas yang melalui selat Nustual, terpantau hanya 5 unit kapal nelayan kecil yaitu pada kelompok waktu 12.00-15.00 sebanyak 2 unit dan 15.00-18.00 sebanyak 3 unit, kemungkinan besar untuk melalui selat tersebut sangat tergantung dengan pasang surut. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Transportasi laut yang digunakan selama konstruksi OLNG dan TUKS antara lain <i>support vessel</i>, <i>tug boat</i>, <i>material barge</i> dan LCT. Sebagian besar peralatan akan dimobilisasi ke lokasi dengan tongkang dan diturunkan di TUKS Pionir (WARF). Peralatan dan material untuk kebutuhan konstruksi OLNG dari lokasi TUKS Pionir akan diangkut melalui jalan baru yang akan dibangun INPEX untuk mendukung kegiatan. Mobilisasi Tenaga Kerja, Peralatan, dan Bahan menggunakan Transportasi Laut melalui diprakirakan berdampak tidak penting hipotetik terhadap gangguan transportasi laut. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak kegiatan terhadap transportasi laut tidak menjadi aspek yang menjadi perhatian saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Pelaksanaan mobilisasi peralatan dan material, akan diarahkan agar tetap berada pada jarak aman sehingga merupakan dampak tidak penting hipotetik dan akan tetap dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.			
3.	Mobilisasi Material dan Tenaga Kerja	Melaksanakan rekomendasi manajemen lalu lintas udara.	Kebisingan	Peningkatan Kebisingan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan transportasi tenaga kerja menggunakan helikopter yang terbang dari Bandara Mathilda Batlayeri ke area FPSO, berpotensi meningkatkan	Disimpulkan sebagai DPH	Batas maksimal sumber	Kebisingan akan berlangsung sekitar maksimum 10-15

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian				
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)						
	Menggunakan Helikopter				nilai kebisingan sebesar 30 dBA yang akan berlangsung selama 10-15 menit setelah tinggal landas. Peningkatan kebisingan ini dapat berdampak pada sensitif reseptor, misalnya manusia dan burung. B. Kondisi Rona Lingkungan Tidak terdapat data rona lingkungan kebisingan pada area FPSO. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan transportasi tenaga kerja dan bahan menggunakan helikopter akan menimbulkan peningkatan kebisingan dari mesin helikopter. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terungkap adanya kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Peningkatan kebisingan akibat dari perlintasan helikopter menjadi Dampak Primer dan juga termasuk dalam Dampak Penting Hipotetik (DPH).		kebisingan adalah sekitar 500m dari batas pagar proyek (secara horizontal) dan khusus untuk helikopter diperkirakan akan terjadi dari helipad hingga lepas pantai Teluk Saumlaki serta daerah sekitar Kilang OLNG.	menit setelah tinggal landas setiap kali penggunaan helikopter menuju lokasi SURF (untuk pengeboran) dan FPSO. Akan berlangsung pada ruang dan waktu yang sama dengan estimasi batas waktu kajian dampak selama 2 tahun pada tahap konstruksi.				
			Biota Terestrial dan Ekosistem	Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (<i>Trigger Species*</i>)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Adanya mobilisasi karyawan dari dan/atau ke tempat kerja menggunakan helikopter yang frekuensinya disesuaikan dengan jadwal pergantian personel (<i>crew change</i>) atau ditentukan lain sesuai kebutuhan. B. Kondisi Rona Lingkungan Di rencana lokasi setidaknya terdapat sebanyak 23 jenis mamalia, 111 jenis burung, 3 jenis amfibia dan 24 jenis reptilia. Pedoman internasional dalam penentuan habitat kritis mengacu pada pedoman IFC Performance Standard (PS) 6. Habitat kritis adalah area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi dan sangat penting bagi spesies dengan status terancam (<i>endangered</i>) dan/atau terancam punah (<i>critically endangered</i>) menurut <i>redlist book</i> IUCN. Berdasarkan studi yang telah dilakukan pada daerah sekitar lokasi proyek, terdapat beberapa flora fauna yang termasuk kategori perlindungan, yakni: <table><tr><td>Kategori Perlindungan</td><td>Deskripsi</td></tr><tr><td>Kriteria 1: Spesies Terancam Punah atau Spesies Terancam</td><td> - Kelelawar buah berjanggut hitam <i>Pteropus melanopogon</i> - Spesies pohon yang terancam (<i>Manilkara kanosiensis</i>) </td></tr></table>	Kategori Perlindungan	Deskripsi	Kriteria 1: Spesies Terancam Punah atau Spesies Terancam	- Kelelawar buah berjanggut hitam <i>Pteropus melanopogon</i> - Spesies pohon yang terancam (<i>Manilkara kanosiensis</i>)	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak gangguan terhadap spesies kunci terutama burung diperkirakan akan terjadi di beberapa pulau-pulau sebagai habitat burung (Pulau Nustabun, Pulau Matakus dan Pulau Asutubun) yang terletak di antara Pulau Yamdena dan Pulau Selaru.	Sebagai dampak turunan dari peningkatan kebisingan akan berlangsung sekitar maksimum 10-15 menit setelah helikopter tinggal landas setiap kali penggunaan helikopter menuju lokasi SURF (untuk pengeboran) dan FPSO. Akan berlangsung pada ruang dan waktu yang sama di lokasi keberadaan spesies kunci (<i>Trigger Species</i>) dengan estimasi waktu selama 2 tahun pada tahap konstruksi.
Kategori Perlindungan	Deskripsi											
Kriteria 1: Spesies Terancam Punah atau Spesies Terancam	- Kelelawar buah berjanggut hitam <i>Pteropus melanopogon</i> - Spesies pohon yang terancam (<i>Manilkara kanosiensis</i>)											

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Kriteria 2: Spesies Endemik dan Sub-Spesies; Spesies dengan rentang terbatas - Hewan pengerat asli <i>Melomys cooperae</i>; <i>Melomys howi</i> - Kelelawar buah berhidung <i>Keast Nyctimene keasti</i> (rentan) dan Kelelawar goa <i>Taphozous Achates</i> <i>Herpetofauna Litoria capitula</i>, <i>Lophognathus maculilabris</i>, <i>Carlia babarensis</i>, <i>Morelia nutala</i> dan <i>Cylindrophis yamdena</i>. 31 spesies burung Kriteria 4: Sangat Terancam dan Ekosistem Unik Hutan gugur lembab Kepulauan Banda Area dilindungi secara formal Cagar alam Pulau Angwarmase C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pada pulau-pulau di sekitar wilayah studi, terdapat burung-burung endemik yang dapat terpengaruh oleh suara bising dari helikopter tersebut. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Masyarakat setempat kurang mengetahui dan/atau memperhatikan keberadaan jenis satwa yang menjadi <i>trigger species</i>. E. Kesimpulan Pada pulau-pulau di sekitar wilayah studi, terdapat burung-burung endemik yang dapat terpengaruh oleh suara bising dari helikopter tersebut. Oleh karena itu, kegiatan transportasi tenaga kerja dengan helikopter akan menjadi Dampak Penting Hipotetik (DPH). Pada aspek ini, tergolong dalam Dampak Turunan dari adanya kegiatan peningkatan kebisingan dari helikopter dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal			
		A. INPEX akan menyusun, mensosialisasikan dan menerapkan manajemen penanganan keluhan kepada masyarakat. B. Menjalin komunikasi efektif dengan para stakeholder.	Sosial Budaya	Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan transportasi tenaga kerja menggunakan helikopter yang terbang dari Bandara Mathilda Batlayeri ke area FPSO, berpotensi meningkatkan nilai kebisingan sebesar 30 dBA yang akan berlangsung selama 10-15 menit setelah tinggal landas. B. Kondisi Rona Lingkungan Saat ini tidak ada harapan dan keluhan terhadap kegiatan mobilisasi tenaga kerja. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan proyek berencana menggunakan helikopter sebagai salah satu sarana transportasi yang akan digunakan oleh tenaga kerja proyek. Harapan dan keluhan masyarakat merupakan dampak turunan dari dampak kebisingan yang timbul. D. Intensitas Perhatian Masyarakat	Disimpulkan sebagai DTPH, namun tetap dipantau dan dikelola	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Dampak Harapan dan Keluhan Masyarakat akibat transportasi menggunakan helikopter tidak muncul saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Kegiatan proyek berencana menggunakan helikopter sebagai salah satu sarana transportasi yang akan digunakan oleh tenaga kerja proyek. Harapan dan keluhan masyarakat merupakan dampak turunan dari dampak kebisingan yang timbul. Oleh karena itu harapan dan keluhan akibat transportasi tenaga kerja oleh helikopter disimpulkan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) dan perlu dikelola.			
4.	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	A. Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan terbatas hanya di dalam lokasi proyek dan dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan jarak terdekat dengan pemukiman maupun infrastruktur umum untuk menghindari terjadinya dampak turunan. B. Segera melakukan penanaman pada lokasi kegiatan setelah penyiapan lahan selesai dilakukan. C. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam lokasi kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang RTH.	Biota Pesisir	Gangguan/perubahan tutupan vegetasi	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Total lahan yang akan dibersihkan dan disiapkan seluas <700 ha, dengan rincian untuk lokasi Kilang OLNK beserta seluruh fasilitas pendukungnya serta jalan akses ke TUKS. B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi tutupan vegetasi di rencana lokasi kegiatan berupa hutan sekunder kering, semak belukar, mangrove sekunder dan pertanian lahan kering. Di rencana lokasi setidaknya terdapat sebanyak 164 jenis tumbuhan dari 56 famili yang terbagi ke dalam 6 tipikal habitus. Tidak dijumpai jenis tumbuhan dilindungi ataupun masuk ke dalam Apendiks CITES. Tidak terdapat jenis tumbuhan yang termasuk kategori terancam punah. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Rencana lokasi kegiatan INPEX tidak berada di lokasi kawasan konservasi. Pada sebagian lokasi rencana kegiatan terdapat areal budidaya (pertanian lahan kering) yang menggunakan metode tebas-bakar (<i>slash and burn</i>). Akan tetapi kepemilikan lokasi tersebut sudah diselesaikan dengan cara ganti rugi terhadap pemilik/pengelola. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Pengelolaan lahan budidaya masyarakat di rencana lokasi kegiatan dilakukan dengan metode tebas-bakar (<i>slash and burn</i>). Tidak dijumpai pengelolaan kebun yang intensif. Masyarakat tidak mempermasalahkan pengambilan lahan budidaya mereka selama proses ganti rugi berjalan dengan baik. E. Kesimpulan Dampak gangguan/perubahan tutupan vegetasi akibat kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH	Pulau Nustual	Selama kegiatan konstruksi
				Gangguan terhadap habitat satwa liar	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Total lahan yang akan dibersihkan dan disiapkan seluas <700 ha, dengan rincian untuk lokasi Kilang OLNK beserta seluruh fasilitas pendukungnya serta jalan akses ke TUKS. B. Kondisi Rona Lingkungan Di rencana lokasi setidaknya terdapat sebanyak 23 jenis mamalia, 111 jenis burung, 3 jenis amfibia dan 24 jenis reptilia. Berdasarkan status konservasinya, terdapat jenis satwa dilindungi dan/atau masuk dalam	Disimpulkan sebagai DTPH	Pulau Nustual	Selama kegiatan konstruksi

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Appendiks CITES dan/atau termasuk kategori terancam punah. Selain itu, juga terdapat jenis satwa endemik. Rencana lokasi kegiatan tidak berada pada wilayah daerah penting bagi burung (IBA). C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan seluas <700 ha yang akan dilakukan berpotensi terhadap perubahan/penurunan kondisi habitat satwa. Hilangnya tutupan vegetasi (habitat satwa) yang terjadi jika dibandingkan dengan luas areal berhutan di P. Jamdena dan P. Nustual secara keseluruhan sangat kecil. Selain itu, satwa dinilai akan mampu berpindah ke areal berhutan yang berada di sekitar rencana lokasi kegiatan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak dijumpai adanya kasus konflik masyarakat dengan satwa yang ada. Masyarakat tidak merasa khawatir adanya potensi berpindahnya satwaliar (hama) ke lahan perkebunan mereka sebagai akibat dari pembersihan/penyiapan lahan yang akan dilakukan. E. Kesimpulan Dampak gangguan terhadap habitat satwaliar akibat kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).			
		Melakukan pengurangan timbulan debu dengan cara penyiraman/ penyemprotan air ke permukaan tanah pada lokasi proyek terutama pada hari-hari tidak hujan.	Kualitas Udara ambien: CO < 100 µg/m ³ NO ₂ < 5µg/m ³ SO ₂ < 20-21 µg/m ³ O ₃ < 20µg/m ³ HC K 50 µg/m ³ TSP 13,1-77,5 µg/m ³ PM ₁₀ 2,5-72,5 µg/m ³ PM _{2.5} 0,9-61,5 µg/m ³	Peningkatan Konsentrasi Partikulat (TSP, PM ₁₀ dan PM _{2.5})	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan ini meliputi pembersihan lahan dari vegetasi, perataan lahan, gali dan urug, <i>blasting</i>, dan pengerasan atau pemadatan lahan. Lahan yang akan dibersihkan dan disiapkan untuk lokasi Kilang O LNG beserta seluruh fasilitas pendukungnya adalah <700 ha. B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi rona lingkungan untuk parameter NO₂, dan SO₂ di sekitar O LNG tergolong baik. Kadar SO₂ dan NO₂ maksimum yang terukur di lapangan berada di bawah 50% baku mutu udara ambien menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan gali-urug dan pergerakan kendaraan di lokasi proyek dapat menimbulkan peningkatan konsentrasi debu (TSP, PM₁₀ dan PM_{2.5}) di udara. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak kegiatan pembersihan lahan terhadap kualitas udara menjadi salah satu aspek yang disorot pada saat konsultasi publik E. Kesimpulan Peningkatan konsentrasi partikulat diperkirakan tergolong sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH).	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak partikulat ditetapkan maksimum dalam radius 500 m dari batas pagar proyek untuk O LNG secara horizontal dengan kebisingan yang bersifat kontinu.	Batas waktu kajian maksimum dua tahun yaitu selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan serta pengalihan dan pembangunan jalan berlangsung.
		Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebisingan pada malam hari.	Kebisingan	Peningkatan Kebisingan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak kebisingan	Berlangsung pada ruang dan waktu berbeda.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Suatu sumber suara akan meradiasikan kebisingan secara merata ke seluruh arah dengan tingkat penurunan kebisingan sebesar 6 dB setiap penambahan jarak 100 m dari sumber suara B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan pengambilan sampel data rona lingkungan, tingkat kebisingan di Lermatang sebesar 51,9 dBA pada musim kemarau dan 57 dbA pada musim hujan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Gangguan kebisingan salah satunya bersumber dari aktivitas pembersihan dan perataan lahan yang menggunakan alat berat seperti <i>bulldozer, wheel loader, excavator, vibrator</i>, dan <i>dump truck</i>. Jika dioperasikan secara bersamaan, tingkat kebisingan di lokasi proyek akan meningkat. Selain itu, aktivitas peledakan juga akan menimbulkan kebisingan dengan tingkat yang tinggi. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak kegiatan pembersihan lahan terhadap kebisingan menjadi salah satu aspek yang disorot pada saat konsultasi publik E. Kesimpulan Peningkatan kebisingan akibat kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan tergolong sebagai dampak penting hipotetik (DPH)		ditetapkan maksimum dalam radius 500 m dari batas pagar proyek untuk OLNG secara horizontal dengan kebisingan yang bersifat kontinu.	Penyiapan lahan tapak proyek OLNG termasuk konstruksi base-camp akan berlangsung selama lebih kurang 2 tahun. Konstruksi kilang OLNG termasuk fasilitas pendukung di <i>onshore</i> dan <i>nearshore</i> (<i>jetty, storage tank, LNG process train, power generation</i> dan lainnya) akan berlangsung selama lebih kurang 3 tahun.
		A. Membangun sistem drainase sementara limpasan air hujan dilengkapi dengan kolam sedimentasi dan penangkap serasah. B. Pembukaan lahan dilakukan terbatas pada daerah konstruksi.	Hidrologi	Perubahan Pola Drainase	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya <700 ha, terdiri atas ± 662,3 ha kawasan HPK di Pulau Yamdena, ± 28,9 ha APL di Pulau Nustual untuk pembangunan TUKS yang penggunaannya bersifat jangka panjang, dan ±3 ha lahan APL di dekat Desa Lermatang untuk pembangunan TUKS-Pionir yang penggunaannya bersifat jangka pendek atau sementara. B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan identifikasi DEM Nasional 8 m, pola drainase di wilayah studi tergolong ke dalam kelompok dendritik di mana aliran air dari perbukitan kecil tersebar pada wilayah tengah dan hilir DAS yang berdekatan dengan pantai. Secara geologi litologi wilayah studi terdiri dari batugamping (<i>limestone</i>) dan batuan napal, yang memungkinkan untuk terbentuk porositas sekunder berupa rekahan, sehingga aliran permukaan dapat meresap langsung ke dalam air bawah tanah (<i>groundwater</i>) melalui celah-celah (yang terbentuk akibat pelarutan batu kapur yang terdapat di bawah batugamping dan akan mengisi aliran air bawah tanah pada gua-gua dan sungai bawah tanah. Kondisi sistem hidrologi seperti tersebut diatas mengakibatkan pola aliran permukaan tidak selalu mengikuti sistem drainase permukaan, tetapi air hujan sebagai <i>runoff</i> dapat langsung masuk ke air bawah tanah (melalui rekahan-rekahan batu kapur) yang kemudian dapat mengalir menuju sumber mata air, menuju sungai-sungai	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak hidrologi terbatas akan terjadi di dalam tapak proyek OLNG dan diprakirakan tidak menyebar keluar dari batas proyek.	Batas waktu kajian maksimum dua tahun yaitu selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan untuk tapak proyek OLNG dan fasilitas pendukungnya serta pengalihan dan pembangunan jalan berlangsung. Perubahan pola drainase dan peningkatan aliran permukaan berlangsung setelah pembukaan lahan. Setelah pemadatan lahan dan drainase di tapak proyek selesai dilakukan,

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					di wilayah bawahnya atau tertahan di dalam gua-gua di bawah batuan kapur. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan penyiapan lahan yang meliputi pembersihan lahan serta penggalian dan pengurugan (<i>cut and fill</i>), <i>blasting</i> untuk mendapatkan areal tapak proyek sesuai dengan rancangan kegiatan pembangunan kilang OLNG yang direncanakan. Penggalian dan pengurugan tersebut menyebabkan pengurugan beberapa saluran drainase/parit alami dan digantikan dengan fasilitas drainase buatan yang ditujukan untuk mengalirkan air keluar dari lokasi tapak proyek. Meskipun saluran drainase buatan didesain dengan mempertimbangkan sistem drainase alami (terutama saluran drainase primer), pola saluran drainase buatan dapat berbeda dengan saluran drainase alami terutama yang terletak pada tapak proyek kilang OLNG. Selain itu, beberapa saluran drainase/parit alami perlu dialihkan untuk meningkatkan keamanan bangunan kilang OLNG dari bahaya gerusan air dan ancaman bencana banjir ketika musim penghujan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perubahan pola drainase aliran bawah tanah menjadi salah satu aspek yang diangkat masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Area yang terdampak pola perubahan drainase akibat pembersihan dan penyiapan lahan sangat besar sehingga dampak ini dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH). Adanya perubahan dari kegiatan ini menjadikan dampak ini tergolong dalam Dampak Primer.			maka drainase akan terkendali serta laju aliran air permukaan akan dapat dikendalikan.
				Peningkatan Aliran Air Permukaan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya <700 ha, terdiri atas ± 662,3 ha kawasan HPK di Pulau Yamdena, ± 28,9 ha APL di Pulau Nustual untuk pembangunan TUKS yang penggunaannya bersifat jangka panjang, dan ±3 ha lahan APL berada di DAS Lematang dan DAS Lematang 1. Rencana pembangunan akan melakukan pembukaan lahan untuk kilang OLNG beserta fasilitas pendukungnya sebagian dari <700 Ha. B. Kondisi Rona Lingkungan Wilayah kegiatan berada di DAS Lematang dan Lematang 1, Morfologi lahan yang sebagian besar berupa dataran (kemiringan lereng 0–3%) dan wilayah dataran-berombak (kemiringan lereng 4 – 8 %), dan bergelombang (9-15%). Penggunaan lahan eksisting pada rencana kegiatan terdiri dari ladang, kebun campuran, semak belukar, hutan lahan kering sekunder dan vegetasi mangrove. Hasil perhitungan koefisien aliran permukaan/<i>runoff</i> atau nilai “C” sebesar 0,3 artinya 30% dari volume air hujan akan menjadi aliran permukaan tergolong kecil. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak hidrologi terbatas akan terjadi di dalam tapak proyek OLNG dan diprakirakan tidak menyebar keluar dari batas proyek.	Batas waktu kajian maksimum dua tahun yaitu selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan untuk tapak proyek OLNG dan fasilitas pendukungnya serta pengalihan dan pembangunan jalan berlangsung. Perubahan pola drainase dan peningkatan aliran permukaan berlangsung setelah pembukaan lahan. Setelah

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Pembersihan dan penyiapan lahan untuk lokasi proyek seluas <700 hektar akan berdampak pada perubahan tutupan lahan secara masif. Terdapat kemungkinan terjadinya akumulasi aliran air di beberapa tempat. Secara umum perubahan utama pada debit air terjadi karena: Peningkatan volume air yang menjadi air limpasan karena penambahan lahan terbuka yang menyebabkan peningkatan koefisien aliran permukaan (nilai C) yang pada awalnya 0,3 bisa menjadi 0,5, sehingga mengurangi jumlah air yang dapat terinfiltrasi ke dalam tanah dan meningkatnya aliran permukaan >60%. Perubahan tersebut dapat menyebabkan genangan di areal tapak proyek atau sekitarnya atau peningkatan debit di sungai dan menyebabkan banjir. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Peningkatan aliran air permukaan menjadi salah satu aspek yang diangkat masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Dampak peningkatan aliran air permukaan dari kegiatan pembersihan lahan merupakan dampak turunan dari perubahan pola drainase dan dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik, yang akan dikaji lebih lanjut pada Andal.			pemadatan lahan dan drainase di tapak proyek selesai dilakukan, maka drainase akan terkendali serta laju aliran air permukaan akan dapat dikendalikan.
			Tanah	Peningkatan Erosi Tanah	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Luas lahan yang akan dibuka untuk kilang OLNG beserta fasilitas pendukungnya adalah sekitar <700 Ha. Morfologi lahan yang sebagian besar berupa dataran (kemiringan lereng 0–3%) dan wilayah dataran-berombak (kemiringan lereng 4 – 8 %), dan bergelombang (9-15%). B. Kondisi Rona Lingkungan Penggunaan lahan eksisting pada rencana kegiatan terdiri dari ladang, kebun campuran, semak belukar, hutan lahan kering sekunder dan vegetasi mangrove. Dengan erosi sub DAS Lematang sebesar 11,87 ha sedangkan sub DAS Lematang 1 15,62ha. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pada saat kegiatan penyiapan lahan semua tutupan lahan tersebut akan dibuka, bentang lahan akan dirombak melalui kegiatan pengerukan dan penimbunan (<i>cut & fill</i>) dan <i>blasting</i> untuk mendapatkan level topografi yang relatif datar dengan sistem teras bertingkat sesuai dengan rancangan tapak proyek. Hilangnya tutupan lahan pada saat penyiapan lahan menyebabkan air hujan langsung jatuh ke permukaan tanah sehingga menyebabkan peningkatan laju erosi pada permukaan lahan yang telah dibuka. Intensitas Perhatian Masyarakat Peningkatan erosi tanah menjadi salah satu aspek yang diangkat masyarakat pada saat konsultasi publik. D. Kesimpulan	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak erosi tanah akan terjadi di dalam tapak proyek OLNG dan diprakirakan tidak menyebar keluar dari batas proyek.	Merupakan dampak turunan dari perubahan pola drainase dan peningkatan air larian sehingga batas waktu kajian adalah maksimum dua tahun yaitu selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan serta pengalihan dan pembangunan jalan berlangsung.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Erosi tanah merupakan dampak turunan dari peningkatan laju aliran air permukaan dan termasuk dalam Dampak Penting Hipotetik (DPH).			
		Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan terbatas hanya di dalam lokasi proyek dan dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan jarak terdekat dengan pemukiman maupun infrastruktur umum untuk menghindari terjadinya dampak turunan.	Fisiografi	Perubahan Lanskap	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Luas lahan yang akan dibuka untuk kilang OLNG beserta fasilitas pendukungnya adalah sekitar <700 Ha. Akan melakukan pembersihan dan perataan lahan . Kondisi Rona Lingkungan Penggunaan lahan eksisting pada rencana kegiatan terdiri dari ladang, kebun campuran, semak belukar, hutan lahan kering sekunder dan vegetasi mangrove. Morfologi lahan yang sebagian besar berupa dataran (kemiringan lereng 0–3%) dan wilayah dataran-berombak (kemiringan lereng 4 – 8 %), dan bergelombang (9-15%). B. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembersihan dan persiapan dengan perataan lahan cut and fill. Kondisi topografi sebagian berupa dataran sehingga tidak akan terjadi perubahan lanskap secara signifikan akibat adanya proses gali urug dan perataan lahan. C. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak perubahan lanskap tidak muncul pada saat konsultasi publik. D. Kesimpulan Kegiatan pembersihan dan persiapan lahan berdampak pada perubahan lanskap akibat adanya proses gali urug dan perataan lahan. Namun demikian kegiatan ini hanya dilakukan pada area-area yang akan dibangun fasilitas. Dan perubahan bentuk lahan tidak signifikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dampak dari kegiatan terhadap perubahan lanskap termasuk Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
		Melakukan Kajian hidrogeologi untuk menentukan target akuifer yang akan di sadap air tanahnya guna memenuhi kebutuhan air bersih pada kegiatan.	Hidrogeologi	Perubahan Muka Air Tanah	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan kilang OLNG beserta beberapa fasilitas pendukung lainnya mengakibatkan hilangnya tutupan lahan dan perubahan bentang lahan dan perubahan tutupan lahan pada wilayah seluas <700 hektar, yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan infiltrasi B. Kondisi Rona Lingkungan Debit air tanah bebas di sekitar tapak proyek (termasuk sumur keramat di dalamnya) adalah sekitar 6.79 lt/detik pada kedalaman dangkal tergolong dominan air meteorik dengan imbuhan lokal dari infiltrasi. Sistem airtanah di daerah rencana pembangunan OLNG adalah hidrogeologi sistem karst yang imbuhan dari berbagai sumber baik lokal dan regional melalui infiltrasi melalui tanah dan masuk ke dalam akuifer sistem karst melalui rekahan dan banyak masyarakat memanfaatkan sumber airtanah dangkal. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penggalian dan pengurugan tanah (<i>cut & fill</i>) serta pemadatan tanah akan menyebabkan meningkatnya aliran permukaan dan mengurangi laju	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak erosi tanah akan terjadi di dalam tapak proyek OLNG dan diperkirakan tidak menyebar keluar dari batas proyek.	Merupakan dampak turunan dari perubahan pola drainase dan peningkatan air larian sehingga batas waktu kajian adalah maksimum dua tahun yaitu selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan serta pengalihan dan pembangunan jalan berlangsung.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian																																																																																																											
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)																																																																																																													
					infiltrasi gilirannya mengakibatkan penurunan kemampuan tanah dalam meresapkan air sehingga dapat mengurangi pengisian cadangan air bawah tanah (<i>ground water storage</i>). Karena solum tanah pada lokasi tapak proyek cukup dangkal (50-75 cm) maka kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan akan menyebabkan tanah lapisan bawah yang padat (sub soil) dan sebagian batuan di bawah tanah (<i>bed rock</i>) muncul di permukaan tanah. Batuan tersebut mempunyai hantaran hidrolik yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan lapisan tanah sehingga akan mengurangi jumlah air yang akan mengisi cadangan air tanah dangkal, . D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak perubahan muka air tanah akibat kegiatan pembukaan lahan dibahas pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Perubahan muka air tanah dapat terjadi di tapak proyek OLNG seiring dengan berjalannya proyek akibat proses pembukaan lahan. Oleh karena itu perubahan muka air tanah dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut.																																																																																																														
		Menerapkan dan membangun fasilitas pengendalian erosi pada lokasi proyek dengan memperhatikan kemiringan lahan dan arah aliran air.	Kualitas Air Permukaan	Peningkatan Konsentrasi Padatan Tersuspensi Total (TSS)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Luas lahan yang akan dibuka untuk kilang OLNG beserta fasilitas pendukungnya adalah sekitar <700 Ha. Morfologi lahan yang sebagian besar berupa dataran (kemiringan lereng 0–3%) dan wilayah dataran-berombak (kemiringan lereng 4 – 8 %), dan bergelombang (9-15%). Pembersihan dan pematangan untuk kilang OLNG dan fasilitas penunjang akan meningkatkan erosi tanah dan menimbulkan dampak turunan terhadap kualitas air permukaan berupa peningkatan TSS. B. Kondisi Rona Lingkungan Hasil pengukuran debit pada musim kemarau (November 2019) ditemukan sungai-sungai di wilayah studi dalam kondisi kering, walaupun ada airnya memiliki kecepatan aliran sangat rendah. Debit Sungai Sesaat Pada Musim Kemarau di Lokasi Studi (November 2019) sebagai berikut: <table><tr><th>Kode</th><th>Longitude</th><th>Latitude</th><th>Nama Sungai</th><th>Lebar (m)</th><th>Kedalaman (m)</th><th>Debit (m3/dt)</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>SWH1</td><td>131010'52,003"E</td><td>7059'4,809" S</td><td>Werbacire/ Lermatang</td><td>10,00</td><td>0,73</td><td>0,003</td><td>Muara sungai</td></tr><tr><td>SWH2</td><td>131011'56,566"E</td><td>7059'33,499"S</td><td>Ompang</td><td>4,60</td><td>0,70</td><td>-</td><td>Muara sungai, Menggenang</td></tr><tr><td>SWH3</td><td>131014'36,246"E</td><td>7058'1,080" S</td><td>Siok</td><td>6,50</td><td>-</td><td>-</td><td>Muara sungai Kering</td></tr><tr><td>SWH4</td><td>131015'26,819"E</td><td>7056'49,902"S</td><td>Weminak</td><td>26,60</td><td>0,42</td><td>0,16</td><td>Muara sungai</td></tr><tr><td>SWH5</td><td>131017'5,966"E</td><td>7055'13,335"S</td><td>Ngatun</td><td>10,20</td><td>0,40</td><td>0,01</td><td>Muara sungai</td></tr><tr><td>SWH6</td><td>131017'53,966"E</td><td>7054'45,157"S</td><td>Loribungan</td><td>22,30</td><td>0,40</td><td>0,52</td><td>Muara sungai</td></tr><tr><td>SWH7</td><td>131013' 51,312"E</td><td>7057'15,678"S</td><td>Hutan Ibang</td><td>6,00</td><td>-</td><td>-</td><td>Sungai bagian hulu Kering</td></tr></table> Debit Sungai sesaat pada musim hujan di lokasi studi sebagai berikut: <table><tr><th rowspan="2">T (tahun)</th><th rowspan="2">CH rencana (mm)</th><th colspan="3">Intensitas Hujan Rencana (mm/jam)</th></tr><tr><th>Alur Siok</th><th>Alur Lermatang</th><th>Alur Selatan</th></tr><tr><td>2</td><td>62,3</td><td>42,2</td><td>35,1</td><td>52,2</td></tr><tr><td>5</td><td>90,4</td><td>61,2</td><td>50,9</td><td>75,6</td></tr><tr><td>10</td><td>109,3</td><td>74,0</td><td>61,5</td><td>91,5</td></tr><tr><td>20</td><td>127,2</td><td>86,1</td><td>71,6</td><td>106,5</td></tr><tr><td>25</td><td>133,2</td><td>90,2</td><td>75,0</td><td>111,5</td></tr><tr><td>50</td><td>151,0</td><td>102,2</td><td>85,0</td><td>126,3</td></tr><tr><td>100</td><td>168,6</td><td>114,1</td><td>94,9</td><td>141,1</td></tr></table> Sumber: Hasil analisis, 2020	Kode	Longitude	Latitude	Nama Sungai	Lebar (m)	Kedalaman (m)	Debit (m3/dt)	Keterangan	SWH1	131010'52,003"E	7059'4,809" S	Werbacire/ Lermatang	10,00	0,73	0,003	Muara sungai	SWH2	131011'56,566"E	7059'33,499"S	Ompang	4,60	0,70	-	Muara sungai, Menggenang	SWH3	131014'36,246"E	7058'1,080" S	Siok	6,50	-	-	Muara sungai Kering	SWH4	131015'26,819"E	7056'49,902"S	Weminak	26,60	0,42	0,16	Muara sungai	SWH5	131017'5,966"E	7055'13,335"S	Ngatun	10,20	0,40	0,01	Muara sungai	SWH6	131017'53,966"E	7054'45,157"S	Loribungan	22,30	0,40	0,52	Muara sungai	SWH7	131013' 51,312"E	7057'15,678"S	Hutan Ibang	6,00	-	-	Sungai bagian hulu Kering	T (tahun)	CH rencana (mm)	Intensitas Hujan Rencana (mm/jam)			Alur Siok	Alur Lermatang	Alur Selatan	2	62,3	42,2	35,1	52,2	5	90,4	61,2	50,9	75,6	10	109,3	74,0	61,5	91,5	20	127,2	86,1	71,6	106,5	25	133,2	90,2	75,0	111,5	50	151,0	102,2	85,0	126,3	100	168,6	114,1	94,9	141,1	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
Kode	Longitude	Latitude	Nama Sungai	Lebar (m)	Kedalaman (m)	Debit (m3/dt)	Keterangan																																																																																																												
SWH1	131010'52,003"E	7059'4,809" S	Werbacire/ Lermatang	10,00	0,73	0,003	Muara sungai																																																																																																												
SWH2	131011'56,566"E	7059'33,499"S	Ompang	4,60	0,70	-	Muara sungai, Menggenang																																																																																																												
SWH3	131014'36,246"E	7058'1,080" S	Siok	6,50	-	-	Muara sungai Kering																																																																																																												
SWH4	131015'26,819"E	7056'49,902"S	Weminak	26,60	0,42	0,16	Muara sungai																																																																																																												
SWH5	131017'5,966"E	7055'13,335"S	Ngatun	10,20	0,40	0,01	Muara sungai																																																																																																												
SWH6	131017'53,966"E	7054'45,157"S	Loribungan	22,30	0,40	0,52	Muara sungai																																																																																																												
SWH7	131013' 51,312"E	7057'15,678"S	Hutan Ibang	6,00	-	-	Sungai bagian hulu Kering																																																																																																												
T (tahun)	CH rencana (mm)	Intensitas Hujan Rencana (mm/jam)																																																																																																																	
		Alur Siok	Alur Lermatang	Alur Selatan																																																																																																															
2	62,3	42,2	35,1	52,2																																																																																																															
5	90,4	61,2	50,9	75,6																																																																																																															
10	109,3	74,0	61,5	91,5																																																																																																															
20	127,2	86,1	71,6	106,5																																																																																																															
25	133,2	90,2	75,0	111,5																																																																																																															
50	151,0	102,2	85,0	126,3																																																																																																															
100	168,6	114,1	94,9	141,1																																																																																																															

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Berdasarkan hasil analisis laboratorium di 7 titik pengamatan air permukaan (air sungai), satu lokasi (SW-3/Sungai Siok) tidak ada data pada musim kemarau karena kering, dua lokasi (SW-3 dan SW-7/Lokasi sungai hutan Ibang), tidak ada data pada musim hujan. Sementara pada lokasi lainnya, TSS pada musim kemarau berkisar antara 7-92 mg/L, sedangkan pada musim hujan berkisar antara <1-7 mg/L (BM 50 mg/L). Lokasi yang melebihi nilai ambang baku mutu terdapat pada dua titik yaitu di SW-1 (67 mg/L) dan SW-7 (92 mg/L). Kedua lokasi ini (SW-1 dan SW-7) mempunyai jarak yang agak jauh dari calon lokasi OLNG, sehingga diperkirakan tidak akan terkena dampak kegiatan. Konsentrasi TSS di SW-2 hingga SW-6 pada musim kemarau berkisar antara 7-26 mg/L, sedangkan pada musim hujan berkisar antara <1-7 mg/L (BM 50 mg/L). C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembukaan dan penyiapan lahan akan meningkatkan koefisien limpasan dan terjadinya erosi tanah yang akan membawa partikel-partikel tanah menuju aliran air permukaan maupun menuju laut. Kegiatan ini akan meningkatkan TSS pada air permukaan INPEX akan menerapkan dan membangun bangunan-bangunan pengendalian erosi pada lokasi proyek sehingga air limpasan yang membawa partikel tanah tidak akan langsung menuju badan air, tetapi partikel tanah akan diendapkan terlebih dahulu dan TSS akan menurun. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Masyarakat tidak memunculkan dampak ini pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, dampak perubahan kualitas air permukaan dengan peningkatan TSS sebagai dampak turunan dari erosi akibat kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan dapat digolongkan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH), namun dikelola sesuai dengan yang sudah direncanakan.			
		Menerapkan dan membangun fasilitas pengendalian erosi pada lokasi proyek dengan memperhatikan kemiringan lahan dan arah aliran air.	Kualitas Air Laut	Peningkatan Jumlah Sampah (Benda Terapung) dan Konsentrasi TSS	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Lahan yang akan dibersihkan dan disiapkan untuk lokasi Kilang OLNG beserta seluruh fasilitas pendukungnya adalah <700 ha. Keadaan lahan di sekitar area yang akan dilakukan gali urug didominasi oleh ladang (215,4 ha), kebun campuran (323,4 ha), semak belukar (134,6 ha), hutan sekunder lahan kering (104,9 ha) dan hutan mangrove seluas 21,6 ha. B. Kondisi rona lingkungan Tidak ada sampah atau materi terapung yang ditemukan pada perairan Teluk Saumlaki (BM = Nihil) dan nilai TSS berkisar antara 2-7 mg/L (BM coral dan lamun 20 mg/L). C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan Pembukaan dan penyiapan lahan akan meningkatkan koefisien limpasan dan terjadinya erosi tanah yang akan membawa partikel-partikel tanah menuju aliran air permukaan maupun menuju laut. Selain itu aliran	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					permukaan dan sungai juga akan meningkatkan potongan-potongan dan daun tumbuhan masuk ke sungai dan perairan pantai/laut, sehingga meningkatkan sampah (benda terapung) dan konsentrasi TSS air laut. INPEX akan menerapkan dan membangun bangunan-bangunan pengendalian erosi pada lokasi proyek sehingga air limpasan yang membawa partikel tanah tidak akan langsung menuju badan air, tetapi partikel tanah akan diendapkan terlebih dahulu dan TSS akan menurun untuk lokasi Kilang OLNG beserta seluruh fasilitas pendukungnya adalah <700 ha yang turun ke badan air sungai dan perairan pantai. Hal yang sama juga terhadap sampah atau potongan tumbuhan yang akan terbawa ke laut. D. Intensitas perhatian masyarakat Masyarakat tidak memunculkan dampak sampah (benda terapung) dan konsentrasi TSS pada saat konsultasi publik dari kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan. E. Kesimpulan Berdasarkan penjeian di atas, dengan demikian rencana usaha dan/atau kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan, diidentifikasi sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) terhadap perubahan kualitas air dengan peningkatan sampah (benda terapung) dan konsentrasi TSS, tidak dikaji lebih lanjut dalam studi Andal.			
		A. Pembukaan lahan dilakukan terbatas pada daerah konstruksi dan atau operasi. B. Segera melakukan penanaman pada lokasi kegiatan setelah penyiapan lahan selesai dilakukan. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam lokasi kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang RTH.	Biota Terrestrial dan Ekosistem	Perubahan Fungsi Lahan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Lahan yang akan dibersihkan dan disiapkan untuk lokasi Kilang OLNG beserta seluruh fasilitas pendukungnya (<700 ha) termasuk jalan akses ke lokasi TUKS. B. Kondisi Rona Lingkungan Keadaan lahan di sekitar area yang akan dilakukan gali urug didominasi oleh ladang (215,4 ha), kebun campuran (323,4 ha), semak belukar (134,6 ha), hutan sekunder lahan kering (104,9 ha) dan hutan mangrove seluas 21,6 ha. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan lokasi Kilang OLNG beserta seluruh fasilitas pendukungnya dan jalan akses ke lokasi TUKS dengan areal seluas <700 ha akan merubah fungsi lahan, yang semula memiliki tutupan vegetasi menjadi areal terbuka/terbangun. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Masyarakat lokal tidak keberatan dengan masalah perubahan fungsi lahan akibat pembersihan/penyiapan lahan, selama proses ganti rugi berjalan dengan baik. E. Kesimpulan Fungsi lahan pada lokasi rencana proyek didominasi oleh semak belukar serta pertanian lahan kering berupa kebun kelapa. Kawasan ini sendiri lebih banyak diperuntukkan untuk hutan produksi konversi dan area penggunaan	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak perubahan tutupan lahan terbatas pada lahan-lahan yang akan dibuka, yaitu tapak Kilang OLNG dan lokasi TUKS di Pulau Nustual.	Batas waktu kajian maksimum dua tahun yaitu selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan serta pengalihan dan pembangunan jalan berlangsung, perubahan fungsi lahan akan berlangsung secara gradual sesuai perkembangan penyiapan lahan berlangsung. Dampak akan berkurang setelah kegiatan revegetasi lahan terbuka yang tidak digunakan untuk fasilitas

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian							
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)									
					lain. Selain itu, terdapat juga tutupan lahan lain berupa mangrove di sekitar pesisir. Perubahan lahan ini menjadi Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Adanya perubahan lahan ini juga tergolong dalam kategori Dampak Primer.			permanen (ruang terbuka hijau) selesai dilakukan.							
				Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari <i>Trigger Species</i>	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan ini meliputi pembersihan lahan dari vegetasi, perataan lahan, gali dan urug, dan pengerasan atau pemadatan lahan. Lahan yang akan dibersihkan dan disiapkan untuk lokasi Kilang OLNG dan seluruh fasilitas pendukungnya serta jalan akses ke TUKS seluas <700 ha. B. Kondisi Rona Lingkungan Di rencana lokasi setidaknya terdapat sebanyak 23 jenis mamalia, 111 jenis burung, 3 jenis amfibia dan 24 jenis reptilia. Pedoman internasional dalam penentuan habitat kritis mengacu pada pedoman IFC Performance Standard (PS) 6. Habitat kritis adalah area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi dan sangat penting bagi spesies dengan status terancam (<i>endangered</i>) dan/atau terancam punah (<i>critically endangered</i>) menurut <i>redlist book</i> IUCN. Berdasarkan studi yang telah dilakukan pada daerah sekitar lokasi proyek, terdapat beberapa flora fauna yang termasuk kategori perlindungan, yakni: <table><tr><td>Kategori Perlindungan</td><td>Deskripsi</td></tr><tr><td>Kriteria 1: Spesies Terancam Punah atau Spesies Terancam</td><td> - Kelelawar buah berjanggut hitam <i>Pteropus melanopogon</i> - Spesies pohon yang terancam (<i>Manilkara kanosiensis</i>) </td></tr><tr><td>Kriteria 2: Spesies Endemik dan Sub-Spesies; Spesies dengan rentang terbatas</td><td> - Hewan pengerat asli <i>Melomys cooperae</i>; <i>Melomys howi</i> - Kelelawar buah berhidung <i>Keast Nyctimene keasti</i> (rentan) dan Kelelawar goa <i>Taphozous Achates</i> <i>Herpetofauna</i> <i>Litoria capitula</i>, <i>Lophognathus maculilabris</i>, <i>Carlia babarensis</i>, <i>Morelia nutala</i> dan <i>Cylindrophis yamdena</i>. 31 spesies burung </td></tr><tr><td>Kriteria 4: Sangat Terancam dan Ekosistem Unik</td><td>Hutan gugur lembab Kepulauan Banda</td></tr><tr><td>Area dilindungi secara formal</td><td>Cagar alam Pulau Angwarmase</td></tr></table> C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Kategori Perlindungan	Deskripsi	Kriteria 1: Spesies Terancam Punah atau Spesies Terancam	- Kelelawar buah berjanggut hitam <i>Pteropus melanopogon</i> - Spesies pohon yang terancam (<i>Manilkara kanosiensis</i>)	Kriteria 2: Spesies Endemik dan Sub-Spesies; Spesies dengan rentang terbatas	- Hewan pengerat asli <i>Melomys cooperae</i>; <i>Melomys howi</i> - Kelelawar buah berhidung <i>Keast Nyctimene keasti</i> (rentan) dan Kelelawar goa <i>Taphozous Achates</i> <i>Herpetofauna</i> <i>Litoria capitula</i>, <i>Lophognathus maculilabris</i>, <i>Carlia babarensis</i>, <i>Morelia nutala</i> dan <i>Cylindrophis yamdena</i>. 31 spesies burung	Kriteria 4: Sangat Terancam dan Ekosistem Unik	Hutan gugur lembab Kepulauan Banda	Area dilindungi secara formal	Cagar alam Pulau Angwarmase
Kategori Perlindungan	Deskripsi														
Kriteria 1: Spesies Terancam Punah atau Spesies Terancam	- Kelelawar buah berjanggut hitam <i>Pteropus melanopogon</i> - Spesies pohon yang terancam (<i>Manilkara kanosiensis</i>)														
Kriteria 2: Spesies Endemik dan Sub-Spesies; Spesies dengan rentang terbatas	- Hewan pengerat asli <i>Melomys cooperae</i>; <i>Melomys howi</i> - Kelelawar buah berhidung <i>Keast Nyctimene keasti</i> (rentan) dan Kelelawar goa <i>Taphozous Achates</i> <i>Herpetofauna</i> <i>Litoria capitula</i>, <i>Lophognathus maculilabris</i>, <i>Carlia babarensis</i>, <i>Morelia nutala</i> dan <i>Cylindrophis yamdena</i>. 31 spesies burung														
Kriteria 4: Sangat Terancam dan Ekosistem Unik	Hutan gugur lembab Kepulauan Banda														
Area dilindungi secara formal	Cagar alam Pulau Angwarmase														

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan seluas <700 ha berpotensi menyebabkan perubahan/gangguan terhadap habitat <i>trigger species</i>. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Masyarakat setempat kurang mengetahui dan/atau memperhatikan keberadaan jenis satwa yang menjadi trigger species beserta habitatnya. E. Kesimpulan Lokasi proyek yang berada di sekitar lokasi habitat kritis dapat saja menjadi tempat persinggahan jenis fauna terancam punah atau endemik. Dengan demikian dampak kegiatan terhadap keberadaan habitat kritis sekitarnya perlu dikaji lebih lanjut dan dikategorikan sebagai dampak penting hipotetik. Gangguan ini muncul akibat dari Dampak Turunan perubahan tutupan lahan dan peningkatan kebisingan.			
				Gangguan Terhadap Ekosistem Unik	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan ini meliputi pembersihan lahan dari vegetasi, perataan lahan, gali dan urug, <i>blasting</i> dan pengerasan atau pemadatan lahan. Lahan yang akan dibersihkan dan disiapkan untuk lokasi Kilang OLNG beserta seluruh fasilitas pendukungnya (<700 ha) termasuk jalan akses ke lokasi TUKS. B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi ekosistem di rencana lokasi kegiatan umumnya berupa ladang, kebun campuran, semak belukar, hutan sekunder lahan kering dan hutan mangrove. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan seluas <700 ha berpotensi dapat mengganggu ekosistem unik yang ada di area rencana kegiatan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Masyarakat lokal dinilai kurang memperhatikan eksistensi ekosistem yang ada. Bahkan pengelolaan lahan oleh masyarakat untuk areal budidaya dilakukan dengan cara tebas-bakar (<i>slash and burn</i>), sehingga mengancam kelestarian ekosistem alami yang ada. E. Kesimpulan Tutupan lahan pada lokasi rencana proyek didominasi oleh semak belukar serta pertanian lahan kering berupa kebun kelapa. Kawasan ini sendiri lebih banyak diperuntukkan untuk hutan produksi konversi dan area penggunaan lain. Ekosistem mangrove yang terkena dampak sangat kecil untuk lokasi proyek sehingga digolongkan Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
				Gangguan Terhadap Kawasan Lindung (Ekosistem)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan ini meliputi pembersihan lahan dari vegetasi, perataan lahan, gali dan urug, dan pengerasan atau pemadatan lahan. Lahan yang akan dibersihkan dan disiapkan untuk lokasi Kilang OLNG beserta seluruh fasilitas pendukungnya (<700 ha) termasuk jalan akses ke lokasi TUKS. B. Kondisi Rona Lingkungan	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Kawasan/ekosistem dilindungi yang terdapat di sekitar lokasi proyek adalah hutan mangrove. Adapun kawasan konservasi yang ada yakni Cagar Alam Pulau Angwarmase., namun lokasinya relatif jauh dari rencana lokasi kegiatan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan seluas <700 ha berpotensi dapat mengganggu kawasan/ekosistem dilindungi dan/atau kawasan konservasi yang ada di area rencana kegiatan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Masyarakat lokal tidak menaruh perhatian secara khusus terkait keberadaan kawasan/ekosistem dilindungi, selama proses ganti rugi berjalan dengan baik serta tidak mengganggu aktivitas mereka sebagai nelayan. E. Kesimpulan Terdapat kawasan/ekosistem dilindungi di rencana lokasi, yaitu hutan mangrove. Namun areal mangrove yang terkena rencana kegiatan sangat kecil. Kawasan konservasi/dilindung yang terdapat di sekitar lokasi proyek yakni Cagar Alam Pulau Angwarmase. Lokasi CA relatif jauh dan diperkirakan tidak terdampak oleh kegiatan proyek sehingga menjadi Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).			
		A. Pembukaan lahan dilakukan terbatas pada daerah konstruksi dan atau operasi. B. Segera melakukan penanaman pada lokasi kegiatan setelah penyiapan lahan selesai dilakukan. C. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam lokasi kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang RTH.	Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan Terhadap Mangrove	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan ini meliputi pembersihan lahan dari vegetasi, perataan lahan, gali dan urug, <i>blasting</i> dan pengerasan atau pemadatan lahan. Lahan yang akan dibersihkan dan disiapkan untuk lokasi Kilang O LNG beserta seluruh fasilitas pendukungnya (<700 ha) termasuk jalan akses ke lokasi TUKS. B. Kondisi Rona Lingkungan Hutan mangrove di sekitar rencana lokasi kegiatan adalah hutan mangrove sekunder. Terdapat setidaknya enam jenis mangrove di lokasi, antara lain: <i>Sonneratia alba</i>, <i>Rhizophora apiculata</i>, <i>Avicennia marina</i>, <i>Rhizophora stylosa</i>, <i>Bruguiera gymnorhiza</i>, <i>Xylocarpus granatum</i>, <i>Excoecaria agallocha</i> dan <i>Acanthus ilicifolius</i>. Kerapatan pohon yang ada sekitar 700 pohon/ha. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Potensi rencana kegiatan yang berdampak terhadap keberadaan ekosistem mangrove adalah pembukaan/penyiapan lahan untuk jalan akses ke lokasi TUKS seluas <700 ha. Luasan ini dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan kawasan hutan mangrove yang ada di Pulau Nustual. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa areal mangrove yang berdekatan dengan pemukiman umumnya mengalami kerusakan akibat banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. E. Kesimpulan	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Luasan tapak proyek pembangunan jalan akses ke lokasi TUKS yang terkena mangrove tergolong kecil jika dibandingkan dengan kawasan hutan mangrove yang ada di Pulau Nustual. Oleh karenanya, gangguan terhadap mangrove akibat kegiatan penyiapan lahan dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).			
		Mempertimbangkan dan memprioritaskan pengusaha lokal sesuai kebutuhan dan persyaratan proyek dan kualifikasi serta spesifikasi yang dimiliki oleh pengusaha lokal.	Sosial Ekonomi	Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya <700 ha, terdiri atas ± 664,1 ha kawasan HPK di Pulau Yamdena, ± 28,9 ha APL di Pulau Nustual untuk pembangunan TUKS yang penggunaannya bersifat jangka panjang, dan ±3 ha lahan APL di dekat Desa Lermatang untuk pembangunan TUKS-Pionir yang penggunaannya bersifat jangka pendek atau sementara. B. Kondisi Rona Lingkungan Masyarakat di desa-desa wilayah studi mayoritas bekerja sebagai petani (40%), nelayan (33%), peternakan (8%), pedagang/wiraswasta (7%), pencaharian lainnya (12%). Perempuan di wilayah studi memiliki pekerjaan sampingan membuat dan menjual makanan dan juga hasil kerajinan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan akan membutuhkan keterlibatan pengusaha besar (kontraktor EPC) maupun kecil. Kegiatan ini berpotensi meningkatkan peluang berusaha masyarakat setempat dalam pengangkutan material, warung makan untuk para tenaga kerja, kios, serta jasa lain yang diperlukan oleh para tenaga kerja selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak kegiatan terhadap perubahan pola mata pencaharian masyarakat tidak menjadi perhatian saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan akan membutuhkan keterlibatan pengusaha besar (kontraktor EPC) maupun kecil. Kegiatan ini berpotensi meningkatkan peluang berusaha masyarakat setempat dalam pengangkutan material, warung makan untuk para tenaga kerja, kios, serta jasa lain yang diperlukan oleh para tenaga kerja selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung. Maka dari kegiatan ini tergolong dalam Dampak Penting Hipotetik (DPH). Dampak ini termasuk Dampak Turunan dari perubahan Peluang Usaha Lokal dan perubahan akses ke sumber mata pencaharian (<i>livelihood</i>).	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Pembersihan lahan , pembangunan base-camp dan konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya termasuk pengalihan dan pembangunan jalan berlangsung lebih kurang 5 tahun. Seluruh kegiatan tersebut akan meyebabkan terjadinya perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari petani peladang dan nelayan ke profesi lainnya. Serta perubahan akses ke sumber mata pencaharian (<i>Ecosystem Services</i>) yaitu antara lain akses ke sumber air, hasil kehutanan, sumber daya lahan, sumber daya perikanan dan lainnya.
				Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan <i>Ecosystem Services</i>	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya <700 ha, terdiri atas ± 664,1 ha kawasan HPK di Pulau Yamdena, ± 28,9 ha APL di Pulau Nustual untuk pembangunan TUKS yang penggunaannya bersifat jangka panjang, dan ±3 ha lahan APL di dekat Desa	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh	Pembersihan lahan , pembangunan base-camp dan konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Lermatang untuk pembangunan TUKS-Pionir yang penggunaannya bersifat jangka pendek atau sementara. B. Kondisi Rona Lingkungan Masyarakat di desa-desa wilayah studi mayoritas bekerja sebagai petani (40%), nelayan (33%), peternakan (8%), pedagang/wiraswasta (7%), pencaharian lainnya (12%). Perempuan di wilayah studi memiliki pekerjaan sampingan membuat dan menjual makanan dan juga hasil kerajinan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembersihan dan penyiapan lahan akan berpotensi menimbulkan dampak terhadap akses mata pencaharian, terhadap masyarakat yang sebelumnya memanfaatkan atau menjadikan lokasi rencana proyek sebagai akses mata pencahariannya. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak perubahan akses ke sumber mata pencaharian akibat kegiatan penyiapan lahan tidak menjadi perhatian saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Kegiatan pematangan lahan yang berpotensi membatasi akses mata pencaharian masyarakat ini, perlu dikaji lebih lanjut dalam Andal dan dimasukkan dalam Dampak Penting Hipotetik (DPH). Dampak ini juga termasuk dalam Dampak Primer.		aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	termasuk pengalihan dan pembangunan jalan berlangsung lebih kurang 5 tahun. Seluruh kegiatan tersebut akan meyebabkan terjadinya perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari petani peladang dan nelayan ke profesi lainnya. Serta perubahan akses ke sumber mata pencaharian (<i>Ecosystem Services</i>) yaitu antara lain akses ke sumber air, hasil kehutanan, sumber daya lahan, sumber daya perikanan dan lainnya.
		A. INPEX akan menyusun, mensosialisasikan dan menerapkan manajemen penanganan keluhan kepada masyarakat. B. Menjalinkan komunikasi efektif dengan para stakeholder.	Sosial Budaya	Kekhawatiran Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan ini meliputi pembersihan lahan dari vegetasi, perataan lahan, gali dan urug, dan pengerasan atau pemadatan lahan. Lahan yang akan dibersihkan dan disiapkan untuk lokasi Kilang OLNG beserta seluruh fasilitas pendukungnya adalah <700 ha. B. Kondisi Rona Lingkungan Lebih dari 60% masyarakat memanfaatkan laut sebagai sumber makanan dan juga sebagai sumber mata pencahariannya. Sebagian besar ikan, udang, maupun biota laut lainnya untuk konsumsi maupun untuk dijual diperoleh dari laut melalui perikanan tangkap. Rumput laut juga merupakan tanaman laut yang dibudidayakan di pesisir pantai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak 60% responden khawatir terjadinya gangguan aktivitas nelayan dan 20% khawatir berkurangnya area tangkapan nelayan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian dampak selama konstruksi berlangsung yaitu 5 tahun.. Kekhawatiran dan harapan serta keluhan masyarakat merupakan dampak turunan oleh adanya gangguan terhadap kegiatan perikanan dan gangguan transportasi laut.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan akan menimbulkan munculnya kekhawatiran masyarakat sekitar akan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Kekhawatiran ini juga muncul sebagai Dampak Turunan dari: Perubahan Peluang Usaha Lokal, Perubahan pola mata pencaharian masyarakat, dan Perubahan akses ke sumber mata pencaharian (<i>Ecosystem Services</i>). E. Kesimpulan Kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan akan menimbulkan munculnya kekhawatiran masyarakat sekitar akan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini. Kegiatan ini dianggap sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih mendalam dalam Andal.			
				Gangguan Terhadap Situs Sakral	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan ini meliputi pembersihan lahan dari vegetasi, perataan lahan, gali dan urug, <i>blasting</i> dan pengerasan atau pemadatan lahan. Lahan yang akan dibersihkan dan disiapkan untuk lokasi Kilang OLNG beserta seluruh fasilitas pendukungnya adalah <700 ha. B. Kondisi Rona Lingkungan Desa Lermatang yang merupakan lokasi tempat konstruksi kilang OLNG memiliki situs yang disakralkan atau dikeramatkan oleh masyarakat. Beberapa situs sakral di Desa Lermatang yaitu mata air Wempas Dalam, sumur keramat Wetutune, Batu Layar, dan Bukit Keldasar. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Lokasi penyiapan lahan merupakan area yang tidak memiliki situs sakral. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Gangguan terhadap situs sakral akibat penyiapan lahan tidak menjadi perhatian saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Berdasarkan informasi konsultasi publik, di Desa Lermatang tidak terdapat situs sakral, sehingga Gangguan terhadap Situs Sakral di kategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
				Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan ini meliputi pembersihan lahan dari vegetasi, perataan lahan, gali dan urug, <i>blasting</i> dan pengerasan atau pemadatan lahan. Lahan yang akan dibersihkan dan disiapkan untuk lokasi Kilang OLNG beserta seluruh fasilitas pendukungnya adalah <700 ha. B. Kondisi Rona Lingkungan Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak 28% berharap adanya kesempatan kerja, sebanyak 13% berharap adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, 8% berharap tidak mengganggu aktivitas nelayan dan 18% berharap adanya bantuan modal usaha. Tidak ada keluhan masyarakat oleh kegiatan pembuatan sarana dan prasarana pipa	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-deso sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki,	Batas waktu kajian dampak selama konstruksi berlangsung yaitu 5 tahun.. Kekhawatiran dan harapan serta keluhan masyarakat merupakan dampak turunan oleh adanya

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					dan TUKS tetapi terdapat 60% responden yang khawatir akan terjadinya gangguan aktivitas nelayan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan (pengoperasian alat berat, peledakan, gali-urug, perataan dan pemadatan) secara langsung merubah fungsi lahan yang tadinya dapat ditanami oleh jenis tumbuhan pangan tertentu menjadi tidak bisa ditanami karena fungsi lahan telah diubah. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak kegiatan akibat penyiapan lahan tidak menjadi perhatian saat konsultasi publik. Terdapat 60% responden yang khawatir terjadi gangguan mata pencaharian dan terdapat 20% yang khawatir terjadi pengurangan area tangkapan nelayan. E. Kesimpulan Dampak terhadap harapan dan keluhan masyarakat ini dikategorikan juga sebagai dampak penting hipotetik dan akan dikaji lebih lanjut pada Andal.		Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	gangguan terhadap kegiatan perikanan dan gangguan transportasi laut.
5.	Pemboran untuk Pengembangan Sumur-Sumur Gas (RFSU dan <i>Infill</i>)	Mengupayakan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebisingan pada malam hari.	Kebisingan	Peningkatan Kebisingan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pengeboran dan pengembangan sumur gas berada di dasar laut dan berjarak lebih kurang 167,26 km dari aktivitas masyarakat di darat. Penurunan tingkat kebisingan terhadap reseptor bervariasi tergantung pada jarak sumber suara dan karakteristiknya. Suatu sumber suara akan yang meradiasikan kebisingan secara merata ke seluruh arah dengan tingkat penurunan kebisingan sebesar 6 dB setiap pertambahan jarak 100mm dari sumber suara B. Kondisi Rona Lingkungan Tidak ada rona lingkungan kebisingan bawah air di area PFSO dan sekitarnya. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan kegiatan Pengeboran untuk Pengembangan Sumur-Sumur Gas (RFSU dan <i>Infill</i>) diperkirakan akan menyebabkan peningkatan kebisingan dan gangguan terhadap mamalia laut sebagai dampak turunan dari peningkatan kebisingan D. Intensitas Perhatian Masyarakat Peningkatan kebisingan pada saat kegiatan pengeboran sumur-sumur gas tidak menjadi isu pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Lokasi kegiatan pengeboran dan pengembangan sumur gas berada di lepas pantai. Oleh karena itu, dampak kebisingan dari pengeboran sumur-sumur gas dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH)	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
		A. Memastikan bahwa operasi pengeboran tidak dimulai saat mamalia laut berada dalam zona eksklusi radius 500 m, dengan durasi setidaknya 30 menit sebelum pengeboran dimulai.	Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan Terhadap Mamalia Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi direncanakan akan dilakukan melalui pengeboran dengan perkiraan 24 (dua puluh empat) sumur pengembangan yang sudah terjadwal. Pengeboran untuk sumur pengembangan (RFSU dan <i>Infill</i>) direncanakan akan dilakukan dengan mempergunakan 2 (dua) rig	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		B. Operasi pengeboran hanya dapat dimulai setelah mamalia laut berada di luar zona eksklusif			lepas pantai secara bersamaan, atau penggunaan satu (1) rig juga dipertimbangkan. Jenis rig yang digunakan akan berupa rig terapung (bisa <i>semi submersible</i> maupun <i>drill ship</i>), sehingga tidak akan ada struktur rig yang akan berpijak ke dasar laut yang memiliki kedalaman sekitar 600 – 800 m dari permukaan laut. Pelaksanaan pengeboran (sampai dengan selesai OH <i>logging</i>) sumur pengembangan di Lapangan Gas Abadi memerlukan waktu kurang lebih 51 sampai 62 hari (<i>Dry Hole Basis</i>, tidak termasuk estimasi durasi mob dan demob selama 28 hari). B. Kondisi Rona Lingkungan Untuk data rona lingkungan kebisingan bawah laut alami di lokasi studi tidak tersedia. Menurut Veeriyen and Rajendran, nilai kebisingan alami di bawah laut berkisar antara 60 – 90 dB re 1 µPa dalam rentang 10-100 Hz. Keberadaan mamalia laut berdasarkan data rona yang dikumpulkan pada tahun 2012, 2013, 2019 dan 2020 dijumpai 13 jenis mamalia laut yang terdiri dari kelompok paus sebanyak 8 jenis, kelompok lumba-lumba 4 jenis, dan 1 jenis kelompok sirenia yang dijumpai di sekitar lokasi kajian. 13 Jenis mamalia laut yang dijumpai di lokasi studi termasuk dalam rentang suara <i>high frequency</i>, <i>low frequency</i> dan <i>sirenians frequency</i>, sehingga diketahui rentang nilai TTS (<i>Temporary Threshold Shifts</i>/Ambang Batas Kebisingan Sementara) terendah sebesar 213 dB re 1 µPa dan nilai PTS (<i>Permanent Threshold Shifts</i>/Ambang Batas Kebisingan Permanen) terendah sebesar 219 dB re 1 µPa. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengeboran untuk Pengembangan Sumur-Sumur Gas (RFSU dan <i>Infill</i>) selama tahap konstruksi menurut Martin et al, 2021 akan meningkatkan kebisingan bawah laut alami sebesar 155 – 197 dB re 1 µPa yang menyebabkan gangguan terhadap mamalia laut. Peningkatan kebisingan bawah laut akibat pengeboran untuk pengembangan sumur-sumur gas (RFSU dan <i>Infill</i>) bersifat <i>intermitent</i> dan akan berkurang <i>gradually</i> dengan bertambahnya jarak dari sumber kebisingan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Berdasarkan hasil konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan yang sudah dilakukan, gangguan terhadap mamalia laut akibat peningkatan kebisingan yang dihasilkan dari kegiatan pengeboran untuk Pengembangan Sumur-Sumur Gas (RFSU dan <i>Infill</i>) selama tahap konstruksi tidak menjadi perhatian yang tinggi dari masyarakat. E. Kesimpulan Adanya pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan untuk memitigasi peningkatan kebisingan yang menyebabkan gangguan terhadap mamalia laut serta peningkatan kebisingan bawah laut yang dihasilkan dari kegiatan pengeboran untuk pengembangan sumur-sumur gas (RFSU dan <i>Infill</i>) bersifat <i>intermitent</i> dan akan berkurang <i>gradually</i> dengan bertambahnya			

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					jarak dari sumber kebisingan. Maka gangguan mamalia laut akibat peningkatan kebisingan yang dihasilkan dari Pengeboran untuk Pengembangan Sumur-Sumur Gas (RFSU dan <i>Infill</i>) selama tahap konstruksi menjadi Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).			
6.	Penyelesaian Sumur (Suar / <i>Flaring</i>)	A. Melakukan <i>Flaring</i> hanya apabila diperlukan. B. Melakukan pemetaan terhadap jangkauan pendaran cahaya.	Cahaya	Pendaran Cahaya (Dampak Visual)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Selama pembersihan sumur (<i>well clean-up</i>) yang akan dilakukan sebelum tahap produksi, <i>Flaring</i> akan dilakukan di drilling rig selama 24-60 jam untuk masing-masing sumur yang dibor. Laju <i>Flaring</i> selama proses <i>well clean-up</i> dapat mencapai 130 MMSCFD. B. Kondisi Rona Lingkungan Lokasi rencana tapak proyek merupakan area yang belum terbangun sehingga tidak ada sumber pendaran cahaya baik di rencana lokasi OLNG maupun di FPSO. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pendaran cahaya dari proses <i>Flaring</i> merupakan <i>given impact</i> atau dampak yang tidak terhindarkan. <i>Flaring</i> pada saat penyelesaian sumur hanya dilakukan dengan frekuensinya yang sedikit dan tidak akan berulang dalam pengoperasian normal. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Pendaran cahaya dari kegiatan <i>flaring</i> tidak menjadi isu pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan diatas, maka disimpulkan bahwa dampak dari <i>Flare</i> disimpulkan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
		A. Menerapkan rencana pengelolaan gas rumah kaca yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan, regulasi di Indonesia, dan regulasi internasional. B. Menghitung, dan melaporkan seluruh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan berdasarkan regulasi nasional dan internasional. C. Memprediksi emisi gas rumah kaca di masa depan untuk mengantisipasi potensi dampak yang dihasilkan di masa depan.	Gas Rumah Kaca	Peningkatan Emisi CO ₂ , CH ₄ dan N ₂ O	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Selama pembersihan sumur (<i>well clean-up</i>) yang akan dilakukan sebelum tahap produksi, <i>Flaring</i> akan dilakukan di <i>drilling rig</i> selama 24-60 jam untuk masing-masing sumur yang dibor. Laju <i>Flaring</i> selama proses <i>well clean-up</i> dapat mencapai 130 MMSCFD. B. Kondisi Rona Lingkungan Secara nasional emisi CO₂ dari aktivitas antropogenik adalah 1200 juta ton CO₂e per tahun C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Proses <i>flaring</i> yang dilakukan selama pekerjaan penyelesaian sumur akan meningkat emisi gas rumah kaca D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terungkap adanya kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Dampak kegiatan ini termasuk sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH, namun tetap dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	-	-
7.	Transportasi dan Pemasangan FPSO (<i>Mooring</i>)	Tidak terdapat pengelolaan secara khusus terhadap gangguan benthos. Gangguan terhadap benthos merupakan konsekuensi	Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan Terhadap Benthos	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Pemasangan FPSO akan dilakukan dengan menggunakan tiang jangkar yang ditanam dalam dasar laut untuk pengikat kapal FPSO untuk tetap pada	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		(dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Namun demikian perubahan benthos akan dipantau.			posisinya. Pemasangan <i>mooring</i> akan menggunakan 4 buah tongkang, 6 buah kapal tunda untuk <i>positioning & station keeping</i> FPSO, 1 buah <i>workboat</i> dan 1 buah <i>Anchor Handling Tug</i>. B. Kondisi rona lingkungan Kelimpahan benthos air laut tertinggi adalah pada musim hujan sebesar 512 ind/m² di plot MWB 14, sedangkan pada musim kemarau kelimpahan tertinggi adalah sebesar 182 ind/m² di plot MWB 2. Jenis benthos dengan kelimpahan terbanyak pada musim kemarau adalah <i>Nereis sp.</i> (196 ind/m²) sedangkan pada musim hujan jenis dengan kelimpahan terbanyak adalah <i>Notomastus sp.</i> (384 ind/m²). C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan Kegiatan Transportasi dan Pemasangan FPSO (<i>Mooring</i>) diperkirakan mengakibatkan gangguan terhadap benthos. Namun, Gangguan terhadap benthos merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). D. Intensitas perhatian masyarakat Berdasarkan hasil konsultasi publik gangguan terhadap benthos akibat kegiatan Transportasi dan Pemasangan FPSO (<i>Mooring</i>) tidak mendapatkan intensitas perhatian masyarakat yang tinggi. E. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas dengan demikian rencana usaha dan/atau kegiatan Transportasi dan Pemasangan FPSO (<i>Mooring</i>) diidentifikasi sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH), tidak dikaji dalam andal dan pengelolaan dan pemantauannya.			
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus untuk gangguan terhadap mamalia laut. Gangguan terhadap mamalia laut merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>) dari kegiatan.		Gangguan Terhadap Mamalia Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan FPSO yang sudah siap akan dibawa ke lokasi yang telah ditetapkan di Laut Arafura menggunakan kapal tunda. Transportasi dan Pemasangan FPSO (<i>Mooring</i>) akan menggunakan 4 buah tongkang, 6 buah kapal tunda untuk <i>positioning & station keeping</i> FPSO, 1 buah <i>workboat</i> dan 1 buah <i>Anchor Handling Tug</i>. B. Kondisi Rona Lingkungan Untuk data rona lingkungan kebisingan bawah laut alami di lokasi studi tidak tersedia. Menurut Veeraiyan and Rajendran, nilai kebisingan alami di bawah laut berkisar antara 60 – 90 dB re 1 µPa dalam rentang 10-100 Hz. Keberadaan mamalia laut berdasarkan data rona yang dikumpulkan pada tahun 2012, 2013, 2019 dan 2020 dijumpai 13 jenis mamalia laut yang terdiri dari kelompok paus sebanyak 8 jenis, kelompok lumba-lumba 4 jenis, dan 1 jenis kelompok sirenia yang dijumpai di sekitar lokasi kajian. 13 Jenis mamalia laut yang dijumpai di lokasi studi termasuk dalam rentang suara <i>high frequency</i>, <i>low frequency</i> dan <i>sirenians frequency</i>, sehingga diketahui rentang nilai TTS (<i>Temporary Threshold Shifts</i>/Ambang Batas Kebisingan Sementara) terendah sebesar 213 dB re 1 µPa dan nilai PTS	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					(<i>Permanent Threshold Shifts</i>/Ambang Batas Kebisingan Permanen) terendah sebesar 219 dB re 1 μPa. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Transportasi dan Pemasangan FPSO (<i>Mooring</i>) selama tahap konstruksi menurut Martin et al, 2021 akan meningkatkan kebisingan bawah laut alami sebesar 192 dB re 1 μPa yang menyebabkan gangguan terhadap mamalia laut. Peningkatan kebisingan bawah laut akibat transportasi dan pemasangan FPSO (<i>Mooring</i>) bersifat <i>intermitent</i> dan akan berkurang <i>gradually</i> dengan bertambahnya jarak dari sumber kebisingan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Berdasarkan hasil konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan yang sudah dilakukan, gangguan terhadap mamalia laut akibat peningkatan kebisingan yang dihasilkan dari transportasi dan pemasangan FPSO (<i>Mooring</i>) selama tahap konstruksi tidak menjadi perhatian yang tinggi dari masyarakat. E. Kesimpulan Peningkatan kebisingan bawah laut yang dihasilkan dari kegiatan transportasi dan pemasangan FPSO (<i>Mooring</i>) bersifat <i>intermitent</i> dan akan berkurang <i>gradually</i> dengan bertambahnya jarak dari sumber kebisingan serta merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Maka gangguan mamalia laut akibat peningkatan kebisingan yang dihasilkan dari kegiatan transportasi dan pemasangan FPSO (<i>Mooring</i>) selama tahap konstruksi menjadi Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) namun tetap akan dilakukan pengelolaan dan pemantauan.			
8.	Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) Lepas Pantai	Tidak terdapat pengelolaan secara khusus terhadap gangguan benthos. Gangguan terhadap benthos merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Namun demikian perubahan benthos akan dipantau.	Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan Terhadap Benthos	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) Lepas Pantai pada kedalaman kurang dari 12 m dilakukan dengan <i>excavator/backhoe dredger</i>. Kedalaman lebih dari 12 m dilakukan dengan <i>dredging vessel</i> untuk tanah keras atau <i>trailing hopper dredger</i> untuk tanah berpasir atau lumpur. B. Kondisi rona lingkungan Kelimpahan benthos air laut tertinggi adalah pada musim hujan sebesar 512 ind/m2 di plot MWB 14, sedangkan pada musim kemarau kelimpahan tertinggi adalah sebesar 182 ind/m2 di plot MWB 2. Jenis benthos dengan kelimpahan terbanyak pada musim kemarau adalah <i>Nereis sp.</i> (196 ind/m2) sedangkan pada musim hujan jenis dengan kelimpahan terbanyak adalah <i>Notomastus sp.</i> (384 ind/m2). C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan Kegiatan pemasangan pipa ekspor gas bawah laut (GEP) lepas pantai diperkirakan menyebabkan gangguan terhadap benthos sekitar 100 m pada sisi kiri dan kanan <i>center line</i> pipa dan akan menyebabkan hilangnya individu benthos di area terdampak. Pemasangan pipa ekspor bawah laut (GEP) dari FPSO ke OLNK lebih kurang 167,26 km dan akan berlangsung selama lebih kurang 9 bulan selama tahap konstruksi.	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak sebagai batas ekologi diperkirakan sekitar 100 m pada sisi kiri dan kanan <i>center line</i> pipa.	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda. Pemasangan pipa ekspor bawah laut (GEP) dari FPSO ke OLNK lebih kurang 167,26 km berlangsung selama lebih kurang 9 bulan. Dampak terhadap benthos pada setiap segmen (diperkirakan sekitar 4 km per minggu bergerak dari FPSO ke perairan pantai)

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					D. Intensitas perhatian masyarakat Hasil konsultasi publik untuk kegiatan pemasangan pipa dengan metode <i>dredging vessel</i> untuk tanah keras atau <i>trailing hopper dredger</i> di perairan lepas pantai yang menyebabkan gangguan terhadap benthos mendapatkan Intensitas perhatian masyarakat yang cukup tinggi. E. Kesimpulan Gangguan terhadap benthos sekitar 100 m pada sisi kiri dan kanan <i>center line</i> pipa akibat Pemasangan pipa ekspor bawah laut (GEP) dari FPSO ke O LNG lebih kurang 167,26 km dan akan berlangsung selama lebih kurang 9 bulan selama tahap konstruksi serta tidak terdapat pengelolaan secara khusus terhadap gangguan benthos maka dapat disimpulkan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal.			Gangguan terhadap benthos hanya berlangsung 1-2 bulan, pada setiap segmen lokasi kegiatan pemasangan pipa tersebut berlangsung, oleh karena benthos akan segera pulih setelah kegiatan pemasangan pipa berhenti.
		A. Memastikan bahwa kegiatan pemasangan pipa tidak dimulai saat mamalia laut berada dalam zona eksklusi radius 500 m, dengan durasi setidaknya 30 menit sebelum pengeboran dimulai. B. Operasi pemasangan hanya dapat dimulai setelah mamalia laut berada di luar zona eksklusi		Gangguan Terhadap Mamalia Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pemasangan pipa kedalaman >20 m dapat dilakukan dengan kapal pemasang khusus. Metode untuk memasang pipa bawah laut yang akan digunakan adalah metode <i>S-lay</i> dan/atau <i>J-lay</i>. Berdasarkan pada metode <i>S-lay</i> dan <i>J-lay</i>, pipa laut mengalami beban yang berbeda selama instalasi dari kapal pemasang. Beban-beban tersebut adalah tekanan hidrostatik, tarikan (<i>tension</i>) dan pembengkokan (<i>buckling</i>). B. Kondisi Rona Lingkungan Untuk data rona lingkungan kebisingan bawah laut alami di lokasi studi tidak tersedia. Menurut Veeriyen and Rajendran, nilai kebisingan alami di bawah laut berkisar antara 60 – 90 dB re 1 μPa dalam rentang 10-100 Hz. Keberadaan mamalia laut berdasarkan data rona yang dikumpulkan pada tahun 2012, 2013, 2019 dan 2020 dijumpai 13 jenis mamalia laut yang terdiri dari kelompok paus sebanyak 8 jenis, kelompok lumba-lumba 4 jenis, dan 1 jenis kelompok sirenia yang dijumpai di sekitar lokasi kajian. 13 Jenis mamalia laut yang dijumpai di lokasi studi termasuk dalam rentang suara <i>high frequency</i>, <i>low frequency</i> dan <i>sirenians frequency</i>, sehingga diketahui rentang nilai TTS (<i>Temporary Threshold Shifts/Ambang Batas Kebisingan Sementara</i>) terendah sebesar 213 dB re 1 μPa dan nilai PTS (<i>Permanent Threshold Shifts/Ambang Batas Kebisingan Permanen</i>) terendah sebesar 219 dB re 1 μPa. A. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) Lepas Pantai selama tahap konstruksi menurut Martin et al, 2021 akan meningkatkan kebisingan bawah laut alami sebesar 165 - 175 dB re 1 μPa yang menyebabkan gangguan terhadap mamalia laut. Peningkatan kebisingan bawah laut akibat transportasi dan pemasangan FPSO (<i>Mooring</i>) bersifat <i>intermittent</i> dan akan berkurang <i>gradually</i> dengan bertambahnya jarak dari sumber kebisingan.	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					B. Intensitas Perhatian Masyarakat Berdasarkan hasil konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan yang sudah dilakukan, gangguan terhadap mamalia laut untuk kegiatan yang berasal dari kapal-kapal Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) Lepas Pantai selama tahap konstruksi tidak menjadi perhatian yang tinggi dari masyarakat. C. Kesimpulan Adanya pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan untuk memitigasi gangguan terhadap mamalia laut dengan cara kegiatan pemasangan pipa tidak dimulai saat mamalia laut berada dalam zona eksklusi radius 500 m, dengan durasi setidaknya 30 menit sebelum pengeboran dimulai serta Operasi pemasangan hanya dapat dimulai setelah mamalia laut berada di luar zona eksklusi. Selain itu, peningkatan kebisingan bawah laut akibat transportasi dan pemasangan FPSO (Mooring) bersifat <i>intermitent</i> dan akan berkurang <i>gradually</i> dengan bertambahnya jarak dari sumber kebisingan. Maka gangguan mamalia laut akibat kegiatan yang berasal dari kapal-kapal Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) Lepas <i>Pantai</i> selama tahap konstruksi menjadi Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).			
			Sosial Ekonomi	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pemasangan pipa ekspor bawah laut (GEP) dari FPSO ke OLNG sepanjang lebih kurang 167,26 km akan berlangsung selama lebih kurang 9 bulan. Kecepatan rata-rata pemasangan pipa bawah laut adalah lebih kurang 19, 4 km per bulan atau rata-rata lebih kurang 0.65 km per hari. B. Kondisi Rona Lingkungan Pada lokasi kegiatan terdapat kegiatan nelayan terutama perikanan tangkap/kapal nelayan dari <i>fishing base</i> menuju dan kembali dari <i>fishing ground</i> ke <i>landing base</i> secara normal. Masyarakat melakukan budidaya rumput laut di sepanjang pantai Lermatang dan Pulau Matakus. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan lain di sekitar penggelaran pipa adalah aktivitas nelayan dan transportasi laut. Penggelaran pipa bawah laut akan mengganggu lalu lintas pelayaran nelayan di sekitar lokasi kegiatan. Nelayan yang terbiasa melewati wilayah perairan tersebut akan mengambil rute pelayaran yang lebih jauh menuju daerah tangkapan ikan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak kegiatan terhadap aktivitas perikanan menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Penggelaran pipa bawah laut akan mengganggu lalu lintas pelayaran nelayan di sekitar lokasi kegiatan. Hal ini akan menimbulkan dampak gangguan aktivitas nelayan sehingga perlu dikaji sebagai Dampak Penting	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda. Pemasangan pipa ekspor bawah laut (GEP) dari FPSO ke OLNG lebih kurang 167,26 km berlangsung selama lebih kurang 9 bulan. Kecepatan rata-rata pemasangan pipa bawah laut adalah lebih kurang 19,4 km per bulan atau rata-rata lebih kurang 0,65 km per hari. Gangguan terhadap kegiatan perikanan hanya terjadi pada segmen lokasi pemasangan pipa.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Hipotetik (DPH) akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Kegiatan ini juga termasuk dalam kategori Dampak Primer.			
		A. INPEX akan menyusun, mensosialisasikan dan menerapkan manajemen penanganan keluhan kepada masyarakat. Menjalinkan komunikasi efektif dengan para stakeholder.	Sosial Budaya	Kekhawatiran Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pemasangan pipa ekspor bawah laut (GEP) dari FPSO ke OLNG sepanjang lebih kurang 167,26 km akan berlangsung selama lebih kurang 9 bulan. Kecepatan rata-rata pemasangan pipa bawah laut adalah lebih kurang 19, 4 km per bulan atau rata-rata lebih kurang 0.65 km per hari. B. Kondisi Rona Lingkungan Lebih dari 60% masyarakat memanfaatkan laut sebagai sumber makanan dan juga sebagai sumber mata pencahariannya. Sebagian besar ikan, udang, maupun biota laut lainnya untuk konsumsi maupun untuk dijual diperoleh dari laut melalui perikanan tangkap. Rumpuk laut juga merupakan tanaman laut yang dibudidayakan di pesisir pantai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak 60% responden khawatir terjadinya gangguan aktivitas nelayan dan 20% khawatir berkurangnya area tangkapan nelayan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pemasangan pipa bawah laut dari FPSO ke OLNG yang akan terutama pada daerah pesisir pantai akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebagai dampak turunan dari gangguan aktivitas nelayan yang merupakan dampak penting hipotetik. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak kekhawatiran akibat pemasangan pipa menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Dampak terhadap kekhawatiran masyarakat ini dikategorikan juga sebagai dampak penting hipotetik dan akan dikaji lebih lanjut pada Andal.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desanya sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian berlangsung selama pemasangan pipa ekspor bawah laut (GEP) dari FPSO ke OLNG berlangsung selama lebih kurang 9 bulan.
				Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pemasangan pipa ekspor bawah laut (GEP) dari FPSO ke OLNG sepanjang lebih kurang 167,26 km akan berlangsung selama lebih kurang 9 bulan. Kecepatan rata-rata pemasangan pipa bawah laut adalah lebih kurang 19,4 km per bulan atau rata-rata lebih kurang 0.65 km per hari. B. Kondisi Rona Lingkungan Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak 28% berharap adanya kesempatan kerja, sebanyak 13% berharap adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, 8% berharap tidak mengganggu aktivitas nelayan dan 18% berharap adanya bantuan modal usaha. Tidak ada keluhan masyarakat oleh kegiatan pembuatan sarana dan prasarana pipa dan TUKS tetapi terdapat 60% responden yang khawatir akan terjadinya gangguan aktivitas nelayan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Rencana kegiatan pemasangan pipa jalur pendaratan dari pesisir pantai ke OLNG akan melintasi dan membatasi sejumlah area di sepanjang jalur pipa	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desanya sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Merupakan dampak turunan dari adanya kekhawatiran masyarakat. Batas waktu kajian berlangsung selama pemasangan pipa ekspor bawah laut (GEP) dari FPSO ke OLNG berlangsung selama lebih kurang 9 bulan.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					tersebut. Lokasi pemasangan pipa jalur diantaranya akan melintasi dan berbatasan langsung dengan lahan serta jalur akses masyarakat. Adanya pembatasan area pada jalur pipa tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap kekhawatiran masyarakat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Terdapat 60% responden yang khawatir terjadi gangguan aktivitas nelayan dan terdapat 20% yang khawatir terjadi pengurangan area tangkapan nelayan. E. Kesimpulan Dampak pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (PEP) merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat dan diperkirakan akan bersifat dampak penting hipotetik yang akan dikaji lebih lanjut pada Andal.			
		A. Kegiatan pemasangan pipa akan dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Dan Gas Bumi B. Pemasangan pipa bawah laut akan mengacu Peraturan Menteri Perhubungan No. 129 tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 38 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 Tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air. C. INPEX akan mematuhi peraturan yang berlaku tentang navigasi (PP No. 5 Tahun 2010). D. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan. E. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan aktivitas di laut. F. Menyiapkan rambu-rambu keselamatan pelayaran. G. Menyiapkan prosedur standar keselamatan dalam pelayaran.	Transportasi	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pemasangan pipa kedalaman >20 m dapat dilakukan dengan kapal pemasang khusus. Metode untuk memasang pipa bawah laut yang akan digunakan adalah metode <i>S-lay</i> dan/atau <i>J-lay</i>. Berdasarkan pada metode <i>S-lay</i> dan <i>J-lay</i>, pipa laut mengalami beban yang berbeda selama instalasi dari kapal pemasang. Beban-beban tersebut adalah tekanan hidrostatik, tarikan (<i>tension</i>) dan pembengkokan (<i>buckling</i>). B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan data total call dapat dipastikan jumlah bangkitan lalu lintas kapal menggunakan alur pelayaran Teluk Dalam selama bulan Oktober 2019 sebanyak 288 tiba dan berangkat, ini berarti bahwa setiap hari rata-rata terdapat 9 unit kapal yang melakukan tiba dan berangkat. Data kedatangan dan keberangkatan terutama kapal-kapal dalam negeri dapat di kelompokkan berdasarkan kelompok waktu, didapatkan waktu-waktu dengan frekuensi tertinggi lalu lintas laut. Waktu frekuensi tertinggi saat kedatangan adalah pada kelompok waktu 06.00 – 09.00 yang dilakukan oleh kapal-kapal Nusantara dengan frekuensi sebanyak 26 unit dan kapal-kapal Perla dengan frekuensi sebanyak 28 unit sehingga total frekuensi 54 unit, sedangkan waktu dengan frekuensi tertinggi saat keberangkatan adalah di kelompok waktu 15.00 – 18.00 yang dilakukan berturut-turut oleh Kapal-kapal Nusantara 20 unit, Perintis 11 unit, dan Pertamina 4 sehingga total frekuensi keberangkatan 35 unit. Pergerakan lalu lintas laut terpantau sebanyak 110 unit didominasi oleh kapal nelayan sebanyak 98 unit, dan kelompok waktu dengan frekuensi terpadat antara jam 03.00 sampai dengan jam 06.00 pagi sebanyak 33 unit kemudian terpadat ke-2 pada jam 06.00 – 09.00 sebanyak 23 unit. Untuk kasus lalu lintas yang melalui selat Nustual, terpantau hanya 5 unit kapal nelayan kecil yaitu pada kelompok waktu 12.00-15.00 sebanyak 2 unit dan 15.00-18.00 sebanyak 3 unit, kemungkinan besar untuk melalui selat tersebut sangat tergantung dengan pasang surut. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) Lepas Pantai pada tahap konstruksi diperkirakan akan mempengaruhi pergerakan lalu lintas kapal dalam negeri maupun lokal khususnya yang melalui Selat Nustual. Pengaruh terhadap transportasi laut bersifat intermiten dan hanya berlangsung selama tahap konstruksi. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Berdasarkan hasil konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan yang sudah dilakukan, gangguan terhadap transportasi laut yang berasal dari kapal-kapal Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) Lepas Pantai selama tahap konstruksi menjadi perhatian yang tinggi dari masyarakat, namun kegiatan pemasangan pipa ini sudah mempunyai pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan E. Kesimpulan Kegiatan ini berpotensi berdampak terhadap gangguan transportasi laut. Kegiatan pemasangan pipa ini, akan dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepolisian Resort Kepulauan Tanimbar, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki, serta Instansi Pemerintah terkait lainnya. Selain itu, selama kegiatan pemasangan pipa, akan mengacu peraturan yang berlaku tentang navigasi (PP No. 5 Tahun 2010) serta memperhatikan ketentuan dari penggelaran pipa, serta pekerjaan bawah air yang didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 129 tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Nomor 71 Tahun 2013 tentang <i>Salvage</i> dan/atau Pekerjaan Bawah Air. Koordinasi dengan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki tentang rencana ini, akan meminimumkan atau bahkan meniadakan dampak terhadap gangguan transportasi laut. Karena kegiatan ini akan dimasukkan ke dalam berita pelaut, sehingga para pelaut yang keluar masuk alur tersebut dapat mengetahui adanya kegiatan ini. Oleh karena itu kegiatan ini merupakan Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) dan tidak akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal.			
9.	Pemasangan GEP di Perairan Pantai (Lermatang dan sebelah selatan calon lokasi <i>Causeway</i>)-Pengeboran Horizontal (HDD- <i>Horizontal Directional Drilling</i>)	A. Pemasangan pipa bawah laut akan mengacu Peraturan Menteri Perhubungan No. 129 tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Nomor 71 Tahun 2013 tentang <i>Salvage</i> dan/atau Pekerjaan Bawah Air.	Kualitas Air Laut	Peningkatan Konsentrasi TSS	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) di perairan pantai Lermatang dan sebelah selatan calon lokasi <i>Causeway</i> sepanjang ± 2 km serta di perairan pantai sebelah selatan calon lokasi TUKS-pemuatan LNG dan Kondensat pada kedalaman air <20m (khususnya di jalur-jalur sensitif secara ekologi) akan dilakukan dengan Teknik Pengeboran Terarah Horizontal (HDD) dan/atau Penggalian (<i>Trenching</i>), tergantung pada kondisi sedimen dan keseluruhan diameter pipa. B. Kondisi rona lingkungan	Disimpulkan sebagai DPH	Dampak terhadap benthos hanya terjadi pada lokasi <i>Trenching</i> dengan persebaran dampak sebagai batas	Batas waktu kajian dampak secara menyeluruh adalah sekitar 2-3 bulan untuk Alternatif- 1, sedangkan pembenaman pipa dengan <i>post-Trenching</i> pada Alternatif- 2 sekitar

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
	dan/atau Penggalian (<i>Trenching</i> di perairan pantai.	B. Memaksimalkan penggunaan metode HDD untuk pemasangan pipa bawah laut khususnya di jalur jalur sensitif secara ekologi) dan/atau trenching pada perairan dengan kedalaman < 20 m.			Berdasarkan data rona lingkungan yang diambil dari hasil survei rona pada musim kemarau (2019) dan musim hujan (2020) di perairan Teluk Saumlaki, konsentrasi TSS berkisar antara 2 – 7 mg/L dan tergolong baik (BM Coral dan lamun 20 mg/L, mangrove 80 mg/L). C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP)) di perairan pantai Lermatang dan sebelah selatan calon lokasi <i>Causeway</i> sepanjang ± 2 km serta di perairan lepas pantai pada kedalaman air <20m (khususnya di jalur-jalur sensitif secara ekologi) akan dilakukan dengan Teknik Pengeboran Terarah Horizontal (HDD) yang melibatkan penggunaan mesin <i>drilling directional dan attachment</i> dan/atau Penggalian (<i>Trenching</i>). Kegiatan ini dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi TSS di sekitar lokasi kegiatan. D. Intensitas perhatian masyarakat Hasil konsultasi publik menunjukkan bahwa adanya intensitas perhatian masyarakat terhadap dampak lingkungan dari kegiatan pemasangan pipa dengan metode pengeboran Terarah Horizontal (HDD) dan <i>trenching</i> akan meningkatkan sebaran partikulat TSS dalam air dan mempengaruhi biota air pesisir. E. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian rencana usaha dan/atau kegiatan pemasangan pipa di perairan pantai Lermatang dan sebelah selatan calon lokasi <i>Causeway</i> sepanjang ± 2 km serta di perairan lepas pantai pada kedalaman air <20m (khususnya di jalur-jalur sensitif secara ekologi) akan dilakukan dengan metode pengeboran Terarah Horizontal (HDD) dan/atau Penggalian (<i>Trenching</i>) tergantung pada kondisi tanah dan keseluruhan diameter pipa akan menghasilkan sebaran partikulat TSS dalam air dan diidentifikasi sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) serta akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal.		ekologi diperkirakan sekitar 250 m sisi kiri dan kanan dari lokasi <i>Trenching</i> .	4 hari. Dampak terhadap benthos pada setiap segmen (diperkirakan sekitar 0,5-1,0 km per minggu bergerak dari ujung pipa gas lepas pantai menuju lokasi pendaratan pipa) berlangsung hanya beberapa bulan (diperkirakan 1-2 bulan) pada setiap segmen lokasi kegiatan HDD dan <i>Trenching</i> tersebut berlangsung, oleh karena benthos akan segera pulih setelah kegiatan berhenti (Alternatif-1), sedangkan dampak pada benthos laut pada Alternatif -2 hanya pada pembenaman pipa dan secara total diperkirakan berlangsung sekitar 4-6 hari
		Memaksimalkan penggunaan metode HDD untuk pemasangan pipa bawah laut < 20 m. Gangguan terhadap benthos merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Namun demikian perubahan benthos akan dipantau, sedangkan gangguan terhadap plankton tidak dikelola dan dipantau karena kondisi lingkungan perairan dan plankton segera pulih.	Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan Terhadap Benthos dan plankton	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengeboran horizontal akan menggunakan rig HDD, dengan tipikal rig HDD membutuhkan area kerja 60 m x 60 m untuk peralatan dan penyimpanan material dengan pengeboran sebanyak 6 lubang dengan diameter pipa 32 inchi, sedangkan <i>trenching</i> pada kedalaman kurang dari 12 m dilakukan dengan <i>excavator/backhoe dredger</i> dan Kedalaman lebih dari 12 m dilakukan dengan <i>dredging vessel</i> untuk tanah keras atau <i>trailing hopper dredger</i> untuk tanah berpasir atau lumpur. B. Kondisi Rona Lingkungan	Disimpulkan sebagai DPH	Dampak terhadap benthos hanya terjadi pada lokasi <i>Trenching</i> dengan persebaran dampak	Batas waktu kajian dampak secara menyeluruh adalah sekitar 2-3 bulan. Dampak terhadap benthos pada setiap segmen (diperkirakan sekitar 0,5-1,0 km

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Kelimpahan benthos air laut tertinggi adalah pada musim hujan sebesar 512 ind/m² di plot MWB 14, sedangkan pada musim kemarau kelimpahan tertinggi adalah sebesar 182 ind/m² di plot MWB 2. Jenis benthos dengan kelimpahan terbanyak pada musim kemarau adalah <i>Nereis sp.</i> (196 ind/m²) sedangkan pada musim hujan jenis dengan kelimpahan terbanyak adalah <i>Notomastus sp.</i> (384 ind/m²). Tingkat keanekaragaman fitoplankton air laut berkisar antara 1,04 – 1,62 (rendah) pada musim kemarau dan 0,67– 2,32 (rendah-sedang) pada musim penghujan dimana jenis dengan kelimpahan individu tertinggi yaitu <i>Chaetoceros sp.</i> baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman fitoplankton berada pada tingkat rendah pada musim kemarau dan meningkat menjadi rendah-sedang pada musim hujan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pemasangan GEP diperairan pantai dengan teknik <i>trenching</i> diperkirakan akan menyebabkan gangguan terhadap benthos dan plankton, namun gangguan terhadap benthos merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Dampak terhadap benthos hanya terjadi pada lokasi <i>Trenching</i> dengan persebaran dampak sebagai batas ekologi yang diperkirakan sekitar 250 m sisi kiri dan kanan dari lokasi <i>Trenching</i>. Namun tidak menyebabkan gangguan terhadap plankton karena kondisi lingkungan perairan dan plankton segera pulih. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Hasil konsultasi publik untuk kegiatan Pemasangan GEP diperairan lepas pantai dengan teknik <i>trenching</i> di perairan pantai yang menyebabkan gangguan terhadap benthos mendapatkan Intensitas perhatian masyarakat yang cukup tinggi. E. Kesimpulan Tidak terdapat pengelolaan secara khusus terhadap gangguan benthos di sekitar 250 m sisi kiri dan kanan dari lokasi <i>Trenching</i> akibat Pemasangan pipa ekspor bawah laut (GEP) di perairan pantai selama tahap konstruksi maka dapat disimpulkan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal, sedangkan gangguan terhadap planton tidak dikelola dan dipantau karena kondisi lingkungan perairan dan plankton segera pulih.		sebagai batas ekologi diperkirakan sekitar 250 m sisi kiri dan kanan dari lokasi <i>Trenching</i> .	per minggu bergerak dari ujung pipa gas lepas pantai menuju lokasi pendaratan pipa) berlangsung hanya beberapa bulan (diperkirakan 1-2 bulan) pada setiap segmen lokasi kegiatan HDD dan <i>Trenching</i> tersebut berlangsung, oleh karena benthos akan segera pulih setelah kegiatan berhenti.
		Memaksimalkan penggunaan metode HDD untuk pemasangan pipa bawah laut < 20 m. Gangguan terhadap terumbu karang merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Namun demikian perubahan habitat terumbu karang akan dipantau.		Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang.	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) Lepas Pantai pada jalur-jalur sensitif akan dilakukan dengan Teknik Pengeboran Terarah Horizontal (HDD) tergantung pada kondisi tanah dan keseluruhan diameter pipa, di mana akan dilakukan pemboran jalur pipa horizontal. B. Kondisi Rona Lingkungan Hasil pemantauan Desember 2023 terhadap komunitas terumbu karang di perairan Lokasi kegiatan, kondisi penutupan terumbu karang di sekitar	Disimpulkan sebagai DPH	Dampak gangguan terhadap habitat terumbu karang hanya terjadi pada lokasi	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda. HDD dan <i>Trenching</i> berlangsung selama lebih kurang 4 bulan.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					perairan Saumlaki berada pada kisaran 36,72 % sd. 77,04 % termasuk kategori sedang hingga baik sekali. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pemasangan pipa menggunakan teknik HDD akan mengganggu dan berdampak terhadap terumbu karang karena dapat meningkatkan TSS. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Gangguan terhadap terumbu karang menjadi perhatian masyarakat pada saat konsultasi publik E. Kesimpulan Dampak Pemasangan pipa GEP terhadap ekosistem terumbu karang merupakan Dampak Penting Hipotetik (DPH).		<i>Trenching</i> dengan persebaran dampak sebagai batas ekologi diperkirakan sekitar 250 m sisi kiri dan kanan dari lokasi <i>Trenching</i>.	Gangguan terhadap terumbu karang bersifat jangka panjang dan memerlukan skema <i>offset</i> .
		A. Memaksimalkan penggunaan metode HDD untuk pemasangan pipa bawah laut < 20 m. Gangguan terhadap terumbu karang merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (given impact). Namun demikian perubahan habitat terumbu karang akan dipantau. B. Memaksimalkan HDD di daratan Pulau Nustual sepanjang 650 ke arah perairan sebelah timur pada kedalaman <20m. Gangguan terhadap padang lamun/rumput merupakan dampak turunan dari peningkatan TSS.		Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) Lepas Pantai pada jalur sensitif akan dilakukan dengan Teknik Pengeboran Terarah Horizontal (HDD) tergantung pada kondisi tanah dan keseluruhan diameter pipa, di mana akan dilakukan pemboran jalur pipa horizontal. B. Kondisi Rona Lingkungan Terdapat tiga jenis lamun yang ditemukan di area studi yaitu <i>Enhalus acoroides</i>, <i>Thalassia sp.</i> dan <i>Halodule sp.</i> Penutupan lamun di Kepulauan Tanimbar mencapai 60% yang didominasi oleh <i>Thalassia hemprichii</i> 45,88%, <i>Halophila minor</i> 37,10%. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan Pemasangan PIPA GEP mengganggu habitat lamun dan meningkatkan TSS. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut menjadi perhatian masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Gangguan kegiatan pemasangan PIPA GEP terhadap ekosistem lamun merupakan dampak penting hipotetik (DPH)	Disimpulkan sebagai DPH	Dampak gangguan terhadap padang lamun hanya terjadi pada lokasi <i>Trenching</i> dengan persebaran dampak sebagai batas ekologi diperkirakan sekitar 250 m sisi kiri dan kanan dari lokasi <i>Trenching</i>	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda. HDD dan <i>Trenching</i> berlangsung selama lebih kurang 4 bulan. Gangguan terhadap padang lamun/rumput laut akan segera dapat pulih kembali dalam beberapa bulan.
10.	Pendaratan Pipa (GEP) ke OLN Berdekatan dengan Causeway	Kegiatan pemasangan pipa akan dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Dan Gas Bumi	Sosial Ekonomi	Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Rencana kegiatan pemasangan pipa jalur pendaratan dari pesisir pantai ke OLN akan melintasi dan membatasi sejumlah area di sepanjang jalur pipa tersebut. Lokasi pemasangan pipa jalur diantaranya akan melintasi dan berbatasan langsung dengan lahan serta jalur akses masyarakat. Pembatasan ini berpotensi berdampak terhadap perubahan akses ke sumber mata pencaharian (<i>Ecosystem Services</i>). B. Kondisi Rona Lingkungan Rute pelayaran nelayan berada di sekitar lokasi pendaratan pipa. Nelayan melakukan penangkapan ikan, teripang, dan budidaya rumput laut di sekitar lokasi pendaratan pipa. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki,	Batas waktu kajian selama sekitar 6 bulan yaitu selama kegiatan penyediaan lahan berlangsung untuk koridor jalur pipa gas di darat.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Rencana kegiatan pemasangan pipa jalur pendaratan dari pesisir pantai ke OLNG akan melintasi dan membatasi sejumlah area di sepanjang jalur pipa tersebut. Lokasi pemasangan pipa jalur diantaranya akan melintasi dan berbatasan langsung dengan lahan serta jalur akses masyarakat. Pembatasan ini berpotensi berdampak terhadap perubahan akses ke sumber mata pencaharian (<i>Ecosystem Services</i>). D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan <i>ecosystem services</i> tidak menjadi perhatian serius oleh masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Mata pencaharian utama masyarakat di kepulauan Tanimbar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Adanya pembatasan area tersebut diperkirakan akan berdampak penting hipotetik terhadap perubahan jalur akses mata pencaharian masyarakat dan perlu dikaji lebih lanjut dalam Andal.		Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	
			Sosial Budaya	Kekhawatiran Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Rencana kegiatan pemasangan pipa jalur pendaratan dari pesisir pantai ke OLNG akan melintasi dan membatasi sejumlah area di sepanjang jalur pipa tersebut. Lokasi pemasangan pipa jalur diantaranya akan melintasi dan berbatasan langsung dengan lahan serta jalur akses masyarakat. Pembatasan ini berpotensi berdampak terhadap perubahan akses ke sumber mata pencaharian (<i>Ecosystem Services</i>). B. Kondisi Rona Lingkungan Lebih dari 60% masyarakat memanfaatkan laut sebagai sumber makanan dan juga sebagai sumber mata pencahariannya. Sebagian besar ikan, udang, maupun biota laut lainnya untuk konsumsi maupun untuk dijual diperoleh dari laut melalui perikanan tangkap. Rumput laut juga merupakan tanaman laut yang dibudidayakan di pesisir pantai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak 60% responden khawatir terjadinya gangguan aktivitas nelayan dan 20% khawatir berkurangnya area tangkapan nelayan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Rencana kegiatan pemasangan pipa jalur pendaratan dari pesisir pantai ke OLNG akan melintasi dan membatasi sejumlah area di sepanjang jalur pipa tersebut. Lokasi pemasangan pipa jalur diantaranya akan melintasi dan berbatasan langsung dengan lahan serta jalur akses masyarakat. Adanya pembatasan area pada jalur pipa tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap kekhawatiran masyarakat. Kekhawatiran masyarakat yang timbul akan berkaitan erat dan merupakan dampak turunan dari pembatasan jalur akses masyarakat terutama di yang memiliki lahan dan daerah sumber mata pencaharian di sekitar lokasi OLNG di desa Lermatang. D. Intensitas Perhatian Masyarakat	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian berlangsung selama pemasangan pipa ekspor bawah laut (GEP) dari FPSO ke OLNG berlangsung selama lebih kurang 9 bulan.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Kekhawatiran masyarakat muncul saat konsultasi publik akibat adanya potensi gangguan akses ke mata pencaharian. E. Kesimpulan Adanya pembatasan area pada jalur pipa tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap kekhawatiran masyarakat. Kekhawatiran masyarakat yang timbul akan berkaitan erat dan merupakan dampak turunan dari pembatasan jalur akses masyarakat terutama di yang memiliki lahan dan daerah sumber mata pencaharian di sekitar lokasi O LNG di desa Lermatang. Dengan demikian dampak terhadap kekhawatiran masyarakat ini bersifat dampak penting hipotetik dan perlu dikaji lebih lanjut dalam Andal.			
				Pengaruh Terhadap Masyarakat Adat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Rencana kegiatan pemasangan pipa jalur pendaratan dari pesisir pantai ke O LNG akan melintasi dan membatasi sejumlah area di sepanjang jalur pipa tersebut. Lokasi pemasangan pipa jalur diantaranya akan melintasi dan berbatasan langsung dengan lahan serta jalur akses masyarakat. Pembatasan ini berpotensi berdampak terhadap perubahan akses ke sumber mata pencaharian (<i>Ecosystem Services</i>). B. Kondisi Rona Lingkungan Sistem kekerabatan yang dianut pada dasarnya adalah sistem patrilineal, dengan pewarisan marga jatuh kepada laki-laki dan pengolahan tanah juga ke tanah pihak laki-laki (Lolat). Mata pencaharian masyarakat adalah menggarap lahan dengan cara membakar dan tadah hujan, kepemilikan lahan dapat diperoleh karena dimiliki oleh Soa, dan anggota Soa dapat memiliki lahan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dominan mata pencaharian utama masyarakat di kepulauan Tanimbar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan kegiatan pertanian lahan kering pada lokasi hutan sekunder yang ditebang dan dibiarkan kering sebelum akhirnya dibakar. Lahan yang dibuka oleh masyarakat tersebut merupakan lahan yang terletak di dalam wilayah petuanan dari masing-masing marga atau soa. Pembatasan lokasi pendaratan jalur pipa dari daerah pesisir, dapat saja akan membatasi wilayah petuanan dari masing-masing marga atau soa. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak kegiatan terhadap pengaruh masyarakat adat menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Pembatasan lokasi pendaratan jalur pipa dari daerah pesisir, dapat saja akan membatasi wilayah petuanan dari masing-masing marga atau soa. Dengan demikian hal ini berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat adat. Potensi pembatasan akses masyarakat adat ini,	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian selama sekitar 6 bulan yaitu selama kegiatan penyediaan lahan berlangsung untuk koridor jalur pipa gas di darat.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					dampaknya diperkirakan bersifat penting hipotetik dan perlu dikaji lebih lanjut dalam Andal.			
		A. INPEX akan menyusun, mensosialisasikan dan menerapkan manajemen penanganan keluhan kepada masyarakat. B. Menjalinkan komunikasi efektif dengan para <i>stakeholder</i>.		Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Rencana kegiatan pemasangan pipa jalur pendaratan dari pesisir pantai ke OLNK akan melintasi dan membatasi sejumlah area di sepanjang jalur pipa tersebut. Lokasi pemasangan pipa jalur diantaranya akan melintasi dan berbatasan langsung dengan lahan serta jalur akses masyarakat. Pembatasan ini berpotensi berdampak terhadap perubahan akses ke sumber mata pencaharian (<i>Ecosystem Services</i>). B. Kondisi Rona Lingkungan Tidak ada keluhan masyarakat oleh kegiatan pendaratan pipa gas (GEP) ke OLNK berdekatan dengan <i>Causeway</i>. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak 28% berharap adanya kesempatan kerja, sebanyak 13% berharap adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, 8% berharap tidak mengganggu aktivitas nelayan dan 18% berharap adanya bantuan modal usaha. Tidak ada keluhan masyarakat oleh kegiatan pembuatan sarana dan prasarana pipa dan TUKS tetapi terdapat 60% responden yang khawatir akan terjadinya gangguan aktivitas nelayan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pendaratan pipa gas (GEP) ke OLNK berdekatan dengan <i>Causeway</i> menimbulkan harapan dan keluhan masyarakat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Dampak terhadap harapan dan keluhan masyarakat dari kegiatan pemasangan pipa Jalur Pendaratan Pipa ke OLNK merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat dan dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik yang akan dikaji lebih lanjut pada Andal.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desanya sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Merupakan dampak turunan dari adanya kekhawatiran masyarakat. Batas waktu kajian berlangsung selama pemasangan pipa ekspor bawah laut (GEP) dari FPSO ke OLNK berlangsung selama lebih kurang 9 bulan.
11.	Pasokan Air (Desalinasi Air Laut) dan Pembuangan <i>Brine Water</i>	Tidak ada pengelolaan secara khusus terhadap peningkatan salinitas akibat pembuangan limbah proses desalinasi.		Peningkatan Salinitas	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Air tawar (<i>fresh water</i>) diperlukan di FPSO untuk keperluan air utilitas, air minum untuk personel, bahan baku air demin dan untuk air tambahan (<i>make up</i>). Air tawar diperoleh dari pengolahan air laut dengan proses desalinasi. Proses desalinasi air laut akan menggunakan membran (<i>reverse osmosis</i> - RO) untuk memisahkan garam dari air laut. Air buangan (<i>reject water</i>) dari proses desalinasi mengandung kadar garam yang tinggi (<i>Brine Water</i> atau limbah air asin) dan akan dibuang kembali ke laut B. Kondisi rona lingkungan Berdasarkan data rona lingkungan yang diambil dari hasil survei rona pada musim kemarau (2019), salinitas di perairan Teluk Saumlaki berkisar antara 29,9 – 34,40/00 dengan rata-rata 33,70/00. Sedangkan pada musim hujan (2020), salinitas di perairan Teluk Saumlaki berkisar antara 31,2 – 33,70/00 dengan rata-rata 32,50/00. C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak peningkatan salinitas air laut di Teluk Saumlaki diperkirakan maksimum sekitar 300 m dari titik <i>outfall</i> . Persebaran dampak adalah ke arah utara pada saat	Pembangunan OLNK akan memerlukan pasokan air bersih dan air minum yang berasal dari pengolahan air laut menggunakan RO. Limbah dari RO adalah <i>Brine Water</i> yang akan dibuang ke laut. Batas waktu kajian maksimum selama 5 tahun sejak

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Peningkatan salinitas dan persebarannya akibat pembuangan <i>Brine Water</i> dari proses desalinasi air laut akan menggunakan membran (<i>reverse osmosis</i> - RO) untuk keperluan air utilitas, air minum untuk personel, bahan baku air demin dan untuk air tambahan (<i>make up</i>). Pembuangan konsentrat dari proses desalinasi dapat meningkatkan salinitas di lokasi pembuangan secara signifikan. D. Intensitas perhatian masyarakat Hasil konsultasi publik Intensitas perhatian masyarakat dampak terhadap lingkungan berupa Peningkatan salinitas dan persebarannya akibat pembuangan <i>Brine Water</i>. E. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas dengan demikian rencana usaha dan/atau kegiatan Peningkatan salinitas dan persebarannya akibat pembuangan <i>Brine Water</i> dari proses desalinasi air laut akan menggunakan membran (<i>reverse osmosis</i> - RO) untuk keperluan air utilitas, air minum untuk personel, diidentifikasi sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal.		pasang dan ke arah selatan pada saat surut.	penyiapan lahan hingga selesainya konstruksi OLNG dan Dermaga, dampak peningkatan salinitas akan berlanjut ke tahap operasi.
12.	Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	Mengupayakan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebisingan pada malam hari.	Kebisingan	Peningkatan Kebisingan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan konstruksi kilang OLNG beserta fasilitas pendukungnya diperkirakan berlangsung selama lima tahun dengan menggunakan berbagai macam peralatan berat. Alat berat tersebut diprediksi akan digunakan di 13 lokasi tapak OLNG. B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan pengambilan sampel data rona lingkungan, tingkat kebisingan di Lermatang sebesar 51,9 dBA pada musim kemarau dan 57 dBA pada musim hujan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan konstruksi kilang serta fasilitas pendukung kilang akan banyak mengoperasikan alat berat serta pemasangan tiang pancang. Apabila aktivitas ini dilakukan secara bersamaan maka akan terjadi peningkatan kebisingan yang cukup besar. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terungkap adanya kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Peningkatan kebisingan akibat kegiatan konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya termasuk dampak penting hipotetik (DPH)	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak kebisingan ditetapkan maksimum dalam radius 500 m dari batas pagar proyek untuk OLNG secara horizontal dengan kebisingan yang bersifat kontinu.	Berlangsung pada ruang dan waktu berbeda. Penyiapan lahan tapak proyek OLNG termasuk konstruksi base-camp akan berlangsung selama lebih kurang 2 tahun. Konstruksi kilang OLNG termasuk fasilitas pendukung di onshore dan nearshore (<i>jetty</i> , storage tank, LNG process <i>train</i> , power generation dan lainnya) akan berlangsung selama lebih kurang 3 tahun.
		Dalam pendaur-ulangan dan pemanfaatan limbah Non-B3, INPEX akan mempertimbangkan dan memprioritaskan	Sosial Ekonomi	Perubahan Peluang Usaha Lokal	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan konstruksi kilang OLNG beserta fasilitas pendukungnya diperkirakan berlangsung selama lima tahun dengan menggunakan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda lebih

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		pengusaha lokal sesuai kebutuhan dan persyaratan proyek dan kualifikasi serta spesifikasi dimiliki oleh kontraktor dalam pengelolaan limbah non-B3.			berbagai macam peralatan berat. Alat berat tersebut diprediksi akan digunakan di 13 lokasi tapak OLNG. B. Kondisi Rona Lingkungan Jumlah usaha/perorangan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tercatat sebanyak 12.649 unit meliputi skala mikro kecil (99,49%) dan skala menengah besar (0,51%). Banyaknya usaha di Kabupaten Maluku Barat Daya tercatat sebanyak 6.461 unit terdiri dari usaha skala mikro kecil (99,47%) dan skala menengah besar (0,53%). Banyaknya usaha mikro di Kecamatan Tanimbar Selatan tercatat 770 unit dan di Kecamatan Wertamrian sebanyak 121 unit usaha yang meliputi bidang perdagangan, hotel, dan restoran. Usaha skala kecil terbanyak adalah usaha perdagangan dan usaha bangunan yang berkembang di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian. Di dua kecamatan, tercatat koperasi yang bergerak pada jenis usaha simpan pinjam, bahan bakar minyak (BBM), pertanian, perikanan, waserda, reparasi, dan warnet. Di Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat Usaha Pengolahan Ikan (UPI) sebanyak 5 unit serta 7 Koperasi yang bergerak di sektor perikanan C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Kilang OLNG akan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Jumlah tenaga kerja konstruksi OLNG diprediksi sebanyak 10.000 tenaga kerja. Jumlah tersebut akan membuka Peluang Usaha Lokal seperti pemenuhan kebutuhan makanan, tempat tinggal untuk keluarga dan saran lainnya. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Peluang berusaha menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Perubahan Peluang Usaha Lokal menjadi Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam Andal. Kegiatan ini juga termasuk dalam Dampak Primer.		akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	kurang 3 tahun selama masa konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya. Perubahan Peluang Usaha Lokal dan perubahan tingkat pendapatan masyarakat akan berlangsung secara gradual pada kurun waktu tersebut. Secara intens akan meningkat pada 2-4 bulan pertama dimulainya kegiatan konstruksi dan menurun pada akhir masa konstruksi.
				Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan konstruksi kilang OLNG beserta fasilitas pendukungnya diperkirakan berlangsung selama lima tahun dengan menggunakan berbagai macam peralatan berat. Alat berat tersebut diprediksi akan digunakan di 13 lokasi tapak OLNG. B. Kondisi Rona Lingkungan Nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.945.953,-/bulan. Berdasarkan hasil survei, lebih dari 50% responden di wilayah studi memiliki pendapatan rumah tangga kurang dari Rp 1.000.000/bulan. Sedangkan sekitar 26% responden memiliki pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1.000.000 hingga Rp 2.400.644 /bulan dan sebanyak 10% responden memiliki pendapatan rumah tangga sebesar Rp	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur,	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda lebih kurang 3 tahun selama masa konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya. Perubahan Peluang Usaha Lokal dan perubahan tingkat pendapatan masyarakat akan

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					2.400.664 hingga Rp 4.000.000/bulan. Sisanya, sekitar 9% responden memiliki pendapatan lebih dari Rp 4.000.000/bulan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Adanya pembangunan kilang OLNG akan berdampak pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sekitar. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perubahan tingkat pendapatan menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Adanya pembangunan kilang OLNG akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sekitar. Perubahan tingkat pendapatan masyarakat akan menjadi Dampak Penting Hipotetik (DPH). Dampak ini juga tergolong Dampak Turunan dari perubahan Peluang Usaha Lokal.		Desa Lorulun dan Desa Matakus	berlangsung secara gradual pada kurun waktu tersebut. Secara intens akan meningkat pada 2-4 bulan pertama dimulainya kegiatan konstruksi dan menurun pada akhir masa konstruksi.
				Perubahan Pola Mata Pencarian Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan konstruksi kilang OLNG beserta fasilitas pendukungnya diperkirakan berlangsung selama lima tahun dengan menggunakan berbagai macam peralatan berat. Alat berat tersebut diprediksi akan digunakan di 13 lokasi tapak OLNG. B. Kondisi Rona Lingkungan Masyarakat di desa-desa wilayah studi mayoritas bekerja sebagai petani (40%), nelayan (33%), peternakan (8%), pedagang/wiraswasta (7%), pencarian lainnya (12%). Perempuan di wilayah studi memiliki pekerjaan sampingan membuat dan menjual makanan dan juga hasil kerajinan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Adanya kegiatan konstruksi menyebabkan datangnya tenaga kerja, diperkirakan 10.000 tenaga kerja dibutuhkan saat tahap konstruksi OLNG. Adanya kegiatan ini memberikan pengaruh yang signifikan pada aspek ekonomi. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perubahan pola mata pencarian akibat kegiatan menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Adanya kegiatan konstruksi menyebabkan datangnya tenaga kerja, diperkirakan 10.000 tenaga kerja dibutuhkan saat tahap konstruksi OLNG. Adanya kegiatan ini memberikan pengaruh yang signifikan pada aspek ekonomi. Maka dari itu, kegiatan ini termasuk dalam Dampak Penting Hipotetik (DPH) untuk dikaji dalam Andal. Dampak ini termasuk Dampak Turunan dari perubahan Peluang Usaha Lokal dan perubahan akses ke sumber mata pencarian (<i>livelihood</i>).	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Pembersihan lahan, pembangunan base-camp dan konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya termasuk pengalihan dan pembangunan jalan berlangsung lebih kurang 5 tahun. Seluruh kegiatan tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan pola mata pencarian masyarakat dari petani peladang dan nelayan ke profesi lainnya. Serta perubahan akses ke sumber mata pencarian (<i>Ecosystem Services</i>) yaitu antara lain akses ke sumber air, hasil kehutanan, sumber daya lahan, sumber

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
								daya perikanan dan lainnya.
			Sosial Budaya	Kekhawatiran Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan konstruksi kilang OLNG beserta fasilitas pendukungnya diperkirakan berlangsung selama lima tahun dengan menggunakan berbagai macam peralatan berat. Alat berat tersebut diprediksi akan digunakan di 13 lokasi tapak OLNG. B. Kondisi Rona Lingkungan Lebih dari 60% masyarakat memanfaatkan laut sebagai sumber makanan dan juga sebagai sumber mata pencahariannya. Sebagian besar ikan, udang, maupun biota laut lainnya untuk konsumsi maupun untuk dijual diperoleh dari laut melalui perikanan tangkap. Rumput laut juga merupakan tanaman laut yang dibudidayakan di pesisir pantai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak 60% responden khawatir terjadinya gangguan aktivitas nelayan dan 20% khawatir berkurangnya area tangkapan nelayan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas perikanan dan transportasi laut bagi nelayan setempat. Tidak peduli seberapa kecil gangguan ini, akan dapat menimbulkan kekhawatiran nelayan yang berpotensi berlanjut menjadi konflik antara nelayan dan proyek jika tidak ditangani secara seksama. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Kekhawatiran masyarakat akibat kegiatan ini muncul saat konsultasi publik sebagai dampak turunan. E. Kesimpulan Adanya pembangunan kilang OLNG akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sekitar. Perubahan tingkat pendapatan masyarakat akan menjadi Dampak Penting Hipotetik (DPH). Dampak ini juga tergolong Dampak Turunan dari perubahan Peluang Usaha Lokal.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian dampak selama konstruksi berlangsung yaitu 5 tahun. Kekhawatiran dan harapan serta keluhan masyarakat merupakan dampak turunan oleh adanya gangguan terhadap kegiatan perikanan dan gangguan transportasi laut.
		A. INPEX akan menyusun, mensosialisasikan dan menerapkan manajemen penanganan keluhan kepada masyarakat. B. Menjalin komunikasi efektif dengan para <i>stakeholder</i>.		Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan konstruksi kilang OLNG beserta fasilitas pendukungnya diperkirakan berlangsung selama lima tahun dengan menggunakan berbagai macam peralatan berat. Alat berat tersebut diprediksi akan digunakan di 13 lokasi tapak OLNG. B. Kondisi Rona Lingkungan Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak 28% berharap adanya kesempatan kerja, sebanyak 13% berharap adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, 8% berharap tidak mengganggu aktivitas nelayan dan 18% berharap adanya bantuan modal usaha. Tidak ada keluhan masyarakat oleh kegiatan pembuatan sarana dan prasarana pipa	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki,	Batas waktu kajian dampak selama konstruksi berlangsung yaitu 5 tahun. Kekhawatiran dan harapan serta keluhan masyarakat merupakan dampak turunan oleh adanya

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					dan TUKS tetapi terdapat 60% responden yang khawatir akan terjadinya gangguan aktivitas nelayan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kekhawatiran masyarakat yang berasal dari dampak turunan akibat perubahan peluang usaha lokal, perubahan pola mata pencaharian masyarakat, apabila tidak diperhatikan dan ditangani dengan baik akan menimbulkan harapan dan keluhan masyarakat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Harapan dan keluhan masyarakat akibat kegiatan ini muncul saat konsultasi publik sebagai dampak turunan. E. Kesimpulan Adanya pembangunan kilang OLNG akan berdampak pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sekitar. Perubahan tingkat pendapatan masyarakat akan menjadi Dampak Penting Hipotetik (DPH). Dampak ini juga tergolong Dampak Turunan dari perubahan Peluang Usaha Lokal.		Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	gangguan terhadap kegiatan perikanan dan gangguan transportasi laut.
13.	Pengalihan dan Pembangunan Jalan	A. Penyiraman jalan yang akan dibangun, frekuensi penyiraman ditingkatkan pada musim kemarau B. Pemakaian kendaraan, alat berat, dan peralatan berat yang lolos uji emisi C. Pencucian ban kendaraan yang keluar dari area konstruksi D. Emisi dari seluruh peralatan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P20/ MENLHK/SETJENKUM/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.	Kualitas Udara ambien: CO < 100 µg/m³ NO₂ < 5 µg/m³ SO₂ < 20-21 µg/m³ O₃ < 20 µg/m³ HC K 50 µg/m³ TSP 13,1-77,5 µg/m³ PM₁₀ 2,5-72,5 µg/m³ PM_{2,5} 0,9-61,5 µg/m³	Peningkatan Konsentrasi Partikulat (TSP, PM ₁₀ dan PM _{2,5})	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jaringan jalan baru akan dibangun di sekitar lokasi OLNG. Jalan tersebut berupa jalan aspal yang terdiri dari jalan primer dan jalan sekunder yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan akses ke semua fasilitas di dalam Kilang OLNG. Jalan primer terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 3 m (2x3 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 2 m (2x2 m). Jalan sekunder adalah semua jalan lain kecuali jalan patroli. Jalan sekunder terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 2 m (2x2 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 1,5 m (2x1,5 m). Jalan patroli akan dibangun secara paralel sepanjang pagar perimeter batas lahan kawasan Kilang OLNG. Jalan patroli ini terdiri dari 1 lajur dengan lebar 3 m B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi rona lingkungan untuk parameter NO₂, dan SO₂ di sekitar OLNG tergolong baik. Kadar SO₂ dan NO₂ maksimum yang terukur di lapangan berada di bawah 50% baku mutu udara ambien menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peningkatan konsentrasi TSP, PM₁₀ dan PM_{2,5} berasal dari aktivitas konstruksi yang terdiri dari pemakaian bahan bakar oleh alat berat dan kendaraan yang digunakan selama masa konstruksi yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan konsentrasi PM₁₀ dan PM_{2,5}. Selain itu terdapat emisi fugitif baik TSP, PM₁₀ maupun PM_{2,5} dari aktivitas alat berat maupun resuspensi debu jalan saat berlangsungnya mobilisasi kendaraan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terungkap adanya kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan	Disimpulkan sebagai DPH	Kendaraan kontruksi dan lokasi pengalihan dan pembangunan jalan	Batas waktu kajian maksimum dua tahun yaitu selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan serta pengalihan dan pembangunan jalan berlangsung.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Peningkatan konsentrasi partikulat dari aktivitas pembangunan jalan termasuk dalam kategori dampak penting hipotetik dan akan dikaji lebih lanjut di Andal.			
		A. Membangun sistem drainase sementara limpasan air hujan dilengkapi dengan kolam sedimentasi dan penangkap serasah. B. Pembukaan lahan dilakukan terbatas pada daerah konstruksi.	Hidrologi	Perubahan Pola Drainase	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jaringan jalan baru akan dibangun di sekitar lokasi OLNG. Jalan tersebut berupa jalan aspal yang terdiri dari jalan primer dan jalan sekunder yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan akses ke semua fasilitas di dalam Kilang OLNG. Jalan primer terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 3 m (2x3 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 2 m (2x2 m). Jalan sekunder terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 2 m (2x2 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 1,5 m (2x1,5 m). Perkiraan total panjang jalan baru dan jalan pengalihan yang akan dibangun adalah sekitar 6 km. B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan pengamatan lapang tidak dijumpai air sungai yang masuk (hilang) kedalam tanah (batuan) dan dolina merupakan indikasi bahwa drainase lateral lebih dominan dibandingkan dengan drainase vertikal. Panjang sungai yang digunakan adalah alur sungai hasil prediksi model SWAT dengan input utama DEM Nasional 8 m, sedangkan luas daerah aliran sungai adalah luas tapak proyek yaitu seluas <700 ha. Pajang seluruh alur drainase yang terdapat pada lokasi tapak proyek adalah 18.21 km, sehingga kerapatan drainasenya adalah 2.28. Kerapatan drainase tersebut dikategorikan kedalam klasifikasi sedang yang menunjukkan bahwa alur sungai melewati batuan dengan resistensi yang lebih lunak sehingga angkutan sedimennya akan lebih besar (Soewarno, 1991) C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengalihan dan pembangunan jalan di area proyek dapat mengubah pola drainase. Terdapat kemungkinan terjadinya akumulasi aliran air di beberapa tempat. Secara umum perubahan utama pada debit air terjadi karena: - Peningkatan volume air yang menjadi air limpasan karena meningkatnya lahan terbuka yang mengurangi jumlah air yang dapat terinfiltrasi ke dalam tanah. - Perubahan dalam efisiensi hidrolis di drainase buatan, parit dan sistem pengumpul air hujan yang akan meningkatkan kecepatan aliran dan besaran puncak banjir. D. Intensitas Perhatian Masyarakat INPEX telah menyiapkan tindakan pengelolaan terhadap potensi munculnya dampak ini sehingga tidak menjadi isu pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Pengalihan dan pembangunan jalan di area proyek dapat mengubah pola drainase. Terdapat kemungkinan terjadinya akumulasi aliran air di	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian						
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)								
					beberapa tempat. Secara umum perubahan utama pada debit air terjadi karena: - Peningkatan volume air yang menjadi air limpasan karena meningkatnya lahan terbuka yang mengurangi jumlah air yang dapat terinfiltrasi ke dalam tanah. - Perubahan dalam efisiensi hidrolik di drainase buatan, parit dan sistem pengumpul air hujan yang akan meningkatkan kecepatan aliran dan besaran puncak banjir. INPEX akan membangun sistem drainase sementara limpasan air hujan dilengkapi dengan kolam sedimentasi dan penangkap serasah, sehingga dapat mencegah timbulnya genangan air dan digolongkan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).									
				Peningkatan Aliran Air Permukaan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jaringan jalan baru akan dibangun di sekitar lokasi OLNG. Jalan tersebut berupa jalan aspal yang terdiri dari jalan primer dan jalan sekunder yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan akses ke semua fasilitas di dalam Kilang OLNG. Jalan primer terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 3 m (2x3 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 2 m (2x2 m). Jalan sekunder terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 2 m (2x2 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 1,5 m (2x1,5 m). Perkiraan total panjang jalan baru dan jalan pengalihan yang akan dibangun adalah sekitar 6 km. B. Kondisi Rona Lingkungan Wilayah studi rencana pembangunan Fasilitas OLNG dan Jalan tersebar pada wilayah Sub DAS Lematang 209,01 dan Sub DAS Lematang 1 seluas 455,92 Ha. <table><tr><td>Nama Sub DAS</td><td>C-Komposit (Koefisien Aliran Permukaan)</td></tr><tr><td>Sub DAS Lematang</td><td>0.18</td></tr><tr><td>Sub Das Lematang 1</td><td>0.19</td></tr></table> C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Aliran air permukaan meningkat seiring dengan perubahan tutupan lahan akibat adanya pembangunan jalan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat INPEX telah menyiapkan tindakan pengelolaan terhadap potensi munculnya dampak ini sehingga tidak menjadi isu pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Aliran air permukaan meningkat seiring dengan perubahan tutupan lahan akibat adanya pembangunan jalan. Apabila tidak dikelola dengan baik, dampak ini dapat menimbulkan dampak sekunder seperti banjir dan erosi tanah. Namun dampak ini dapat diminimalisir dengan melakukan	Nama Sub DAS	C-Komposit (Koefisien Aliran Permukaan)	Sub DAS Lematang	0.18	Sub Das Lematang 1	0.19	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
Nama Sub DAS	C-Komposit (Koefisien Aliran Permukaan)													
Sub DAS Lematang	0.18													
Sub Das Lematang 1	0.19													

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian																								
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)																										
					pembangunan drainase baru sehingga aliran air permukaan dikelola dan tergolong sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).																											
			Tanah	Peningkatan Erosi Tanah	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jaringan jalan baru akan dibangun di sekitar lokasi OLNG. Jalan tersebut berupa jalan aspal yang terdiri dari jalan primer dan jalan sekunder yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan akses ke semua fasilitas di dalam Kilang OLNG. Jalan primer terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 3 m (2x3 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 2 m (2x2 m). Jalan sekunder terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 2 m (2x2 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 1,5 m (2x1,5 m). Perkiraan total panjang jalan baru dan jalan pengalihan yang akan dibangun adalah sekitar 6 km lebar 6 sehingga luas lebih kurang 36.000 m² B. Kondisi Rona Lingkungan. Laju erosi aktual (E-akt) adalah hasil antara laju erosi potensial dengan pola penggunaan lahan pada masing-masing Sub DAS. Daerah tangkapan air terdiri dari beberapa klasifikasi penggunaan lahan. Hasil analisis laju erosi aktual (E-akt) pada masing masing Sub DAS adalah sebagai berikut. Tabel Hasil perhitungan laju erosi potensial dan aktual pada Sub DAS <table><tr><th>No</th><th>Sub DAS</th><th>Luas</th><th>R</th><th>K</th><th>LS</th><th>CP</th><th>A</th></tr><tr><td>1</td><td>Wae Lematang</td><td>209.01</td><td>694.4</td><td>0.19</td><td>0.45</td><td>0.2</td><td>11.87</td></tr><tr><td>2</td><td>Wae Lematang 1</td><td>455.92</td><td>694.4</td><td>0.25</td><td>0.45</td><td>0.2</td><td>15.62</td></tr></table> Sumber: Hasil analisis, 2024 C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peningkatan aliran air permukaan karena perubahan tutupan lahan akibat adanya pembangunan jalan dapat mengakibatkan peningkatan erosi tanah. D. Intensitas Perhatian Masyarakat INPEX telah menyiapkan tindakan pengelolaan terhadap potensi munculnya dampak erosi dengan membangun sedimen pond dan pembukaan lahan secara bertahap dan segera menanam tanaman penutup (<i>cover cropp</i>) sehingga tidak menjadi isu pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Erosi tanah merupakan dampak turunan dari peningkatan laju aliran air permukaan dan juga termasuk dalam Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	No	Sub DAS	Luas	R	K	LS	CP	A	1	Wae Lematang	209.01	694.4	0.19	0.45	0.2	11.87	2	Wae Lematang 1	455.92	694.4	0.25	0.45	0.2	15.62	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
No	Sub DAS	Luas	R	K	LS	CP	A																									
1	Wae Lematang	209.01	694.4	0.19	0.45	0.2	11.87																									
2	Wae Lematang 1	455.92	694.4	0.25	0.45	0.2	15.62																									
		Pengalihan dan pembangunan jalan dilakukan terbatas hanya pada jalur yang menuju lokasi proyek.	Fisiografi	Perubahan Lanskap	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jaringan jalan baru akan dibangun di sekitar lokasi OLNG. Jalan tersebut berupa jalan aspal yang terdiri dari jalan primer dan jalan sekunder yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan akses ke semua fasilitas di dalam Kilang OLNG. Jalan primer terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 3 m (2x3 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 2 m (2x2 m). Jalan sekunder terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 2 m (2x2 m) yang diapit	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-																								

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					oleh bahu jalan dengan lebar 1,5 m (2x1,5 m). Perkiraan total panjang jalan baru dan jalan pengalihan yang akan dibangun adalah sekitar 6 km. B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi topografi wilayah studi terutama pembangunan jalan dan fasilitas umumnya relatif datar (kemiringan 0-3%), landai/berombak (kemiringan 3-8%), sebagian kecil bergelombang (kemiringan 8-15%). C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pengalihan dan pembangunan jalan berdampak pada perubahan lanskap akibat adanya perataan dan pemadatan dengan melakukan pemotongan topografi dan penimbunan (<i>cut and fill</i>) D. Intensitas Perhatian Masyarakat INPEX hanya melakukan pembukaan lahan pada area yang akan dibangun khususnya jalan dan fasilitas lainnya sehingga tidak menjadi isu pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Kegiatan pengalihan dan pembangunan jalan berdampak pada perubahan lanskap akibat adanya perataan dan pemadatan lahan (<i>cut and fill</i>). Namun demikian kegiatan ini hanya dilakukan pada area-area yang akan dibangun fasilitas. Oleh karena itu dampak dari kegiatan tersebut terhadap perubahan lanskap termasuk Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).			
		A. Membangun sistem drainase sementara limpasan air hujan dilengkapi dengan kolam sedimentasi dan penangkap serasah. B. Pembukaan lahan dilakukan terbatas pada daerah konstruksi.	Kualitas Air Permukaan	Peningkatan Konsentrasi Padatan Tersuspensi Total (TSS)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jaringan jalan yang sudah ada akan dialihkan ke jaringan jalan baru yang akan dibangun di sekitar lokasi OLNG. Jalan baru tersebut berupa jalan aspal yang terdiri dari jalan primer dan jalan sekunder yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan akses ke semua fasilitas di dalam Kilang OLNG. Jalan primer terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 3 m (2x3 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 2 m (2x2 m). Jalan sekunder terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 2 m (2x2 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 1,5 m (2x1,5 m). Perkiraan total panjang jalan baru dan jalan pengalihan yang akan dibangun adalah sekitar 6 km. Pembukaan jalan baru ini akan meningkatkan erosi tanah, aliran permukaan dan TSS dalam badan. B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan hasil analisis laboratorium di 7 titik pengamatan air permukaan (air sungai), satu lokasi (SW-3/Sungai Siok) tidak ada data pada musim kemarau karena kering, dua lokasi (SW-3 dan SW-7/Lokasi sungai hutan Ibang), tidak ada data pada musim hujan. Sementara itu, lokasi SW-1 dan SW-7 agak jauh dari calon lokasi ONLG, sehingga yang akan terdampak adalah SW-2 hingga SW-6. Konsentrasi TSS di SW-2 hingga SW-6 pada musim kemarau berkisar antara 7-26 mg/L, sedangkan pada musim hujan berkisar antara <1-7 mg/L (BM 50 mg/L). C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Pembukaan, penyiapan dan pematangan lahan dalam pengalihan akan meningkatkan koefisien limpasan dan terjadinya erosi tanah yang akan membawa partikel-partikel tanah menuju aliran air permukaan (sungai). Partikel-partikel tanah yang terbawa aliran permukaan ini akan meningkatkan TSS pada badan air penerimanya. INPEX akan menerapkan dan membangun bangunan pengendalian erosi pada lokasi proyek sehingga air limpasan yang membawa partikel tanah tidak akan langsung menuju badan air, tetapi partikel tanah akan diendapkan terlebih dahulu dan TSS akan menurun. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Masyarakat tidak memunculkan dampak ini pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, dampak perubahan kualitas air permukaan dengan peningkatan TSS sebagai dampak turunan dari erosi akibat kegiatan pembangunan jalan baru dapat digolongkan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH), namun dikelola sesuai dengan yang sudah direncanakan.			
			Sosial Ekonomi	Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jaringan jalan baru akan dibangun di sekitar lokasi OLNG. Jalan tersebut berupa jalan aspal yang terdiri dari jalan primer dan jalan sekunder yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan akses ke semua fasilitas di dalam Kilang OLNG. Jalan primer terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 3 m (2x3 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 2 m (2x2 m). Jalan sekunder adalah semua jalan lain kecuali jalan patroli. Jalan sekunder terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 2 m (2x2 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 1,5 m (2x1,5 m). Jalan patroli akan dibangun secara paralel sepanjang pagar perimeter batas lahan kawasan Kilang OLNG. Jalan patroli ini terdiri dari 1 lajur dengan lebar 3 m. B. Kondisi Rona Lingkungan Masyarakat di desa-desa wilayah studi mayoritas bekerja sebagai petani (40%), nelayan (33%), peternakan (8%), pedagang/wiraswasta (7%), pencaharian lainnya (12%). Perempuan di wilayah studi memiliki pekerjaan sampingan membuat dan menjual makanan dan juga hasil kerajinan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pengalihan dan pembangunan jalan akan menyebabkan dampak yang cukup signifikan pada sektor ekonomi. Jarak tempuh yang lebih jauh ataupun dekat akan berdampak pada waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perubahan pola mata pencaharian akibat kegiatan menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Pembersihan lahan , pembangunan base-camp dan konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya termasuk pengalihan dan pembangunan jalan berlangsung lebih kurang 5 tahun. Seluruh kegiatan tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari petani peladang dan nelayan ke profesi lainnya. Serta perubahan akses ke sumber mata pencaharian (<i>Ecosystem Services</i>) yaitu

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Kegiatan pengalihan dan pembangunan jalan akan menyebabkan dampak yang cukup signifikan pada sektor ekonomi. Jarak tempuh yang lebih jauh ataupun dekat akan berdampak pada waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Dampak ini tergolong dalam Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam Andal. Dampak ini termasuk Dampak Turunan dari perubahan Peluang Usaha Lokal dan perubahan akses ke sumber mata pencaharian (<i>Ecosystem Services</i>).			antara lain akses ke sumber air, hasil kehutanan, sumber daya lahan, sumber daya perikanan dan lainnya.
			Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan <i>Ecosystem Services</i>		A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jaringan jalan baru akan dibangun di sekitar lokasi OLNG. Jalan tersebut berupa jalan aspal yang terdiri dari jalan primer dan jalan sekunder yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan akses ke semua fasilitas di dalam Kilang OLNG. Jalan primer terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 3 m (2x3 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 2 m (2x2 m). Jalan sekunder adalah semua jalan lain kecuali jalan patroli. Jalan sekunder terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 2 m (2x2 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 1,5 m (2x1,5 m). Jalan patroli akan dibangun secara paralel sepanjang pagar perimeter batas lahan kawasan Kilang OLNG. Jalan patroli ini terdiri dari 1 lajur dengan lebar 3 m. B. Kondisi Rona Lingkungan Masyarakat melakukan kegiatan usaha sebagai petani dan mengambil manfaat dari hutan di lahan seluas 8,13 ha yang akan dijadikan lokasi jalan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dan pengalihan jalan akan dilakukan pada lokasi hutan lahan kering sekunder dan pertanian lahan kering yang merupakan sumber mata pencaharian masyarakat. Sehingga masyarakat berpotensi kehilangan akses untuk bertani di lahan kering dan mengambil manfaat dari hutan lahan kering yang menjadi lokasi kegiatan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Hasil konsultasi publik dan wawancara responden menunjukkan bahwa tidak ada kekhawatiran masyarakat terhadap rencana pembuatan jalan. E. Kesimpulan Pengalihan dan pembangunan jalan memberikan dampak pada mata pencaharian (<i>Ecosystem Services</i>). Mata pencaharian yang terpengaruh ini akan dikaji lebih lanjut dalam Andal dan dimasukkan dalam Dampak Penting Hipotetik (DPH). Dampak ini juga termasuk dalam Dampak Primer.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Pembersihan lahan , pembangunan base-camp dan konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya termasuk pengalihan dan pembangunan jalan berlangsung lebih kurang 5 tahun. Seluruh kegiatan tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari petani peladang dan nelayan ke profesi lainnya. Serta perubahan akses ke sumber mata pencaharian (<i>Ecosystem Services</i>) yaitu antara lain akses ke sumber air, hasil kehutanan, sumber daya lahan, sumber daya perikanan dan lainnya.
			Sosial Budaya	Kekhawatiran Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jaringan jalan baru akan dibangun di sekitar lokasi OLNG. Jalan tersebut berupa jalan aspal yang terdiri dari jalan primer dan jalan sekunder yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan akses ke semua fasilitas di dalam	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan	Batas waktu kajian dampak selama konstruksi

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Kilang OLNG. Jalan primer terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 3 m (2x3 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 2 m (2x2 m). Jalan sekunder adalah semua jalan lain kecuali jalan patroli. Jalan sekunder terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 2 m (2x2 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 1,5 m (2x1,5 m). Jalan patroli akan dibangun secara paralel sepanjang pagar perimeter batas lahan kawasan Kilang OLNG. Jalan patroli ini terdiri dari 1 lajur dengan lebar 3 m. B. Kondisi Rona Lingkungan Mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan yang melakukan aktivitas mengangkut hasil pertanian atau perikanannya ke Saumlaki sebagai pusat kota. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Adanya kegiatan pengalihan dan pembangunan jalan ini dikhawatirkan menimbulkan gangguan terhadap pola mata pencaharian masyarakat yang menjadi terbatas. Selain itu, pengalihan jalan ke rute yang baru dikhawatirkan membuat jarak menuju Saumlaki yang merupakan pusat kota menjadi lebih jauh. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak kekhawatiran masyarakat akibat pembangunan jalan tidak menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Kekhawatiran masyarakat di prediksi akan tinggi karena jalan yang akan terkena dampak aktivitas konstruksi adalah jalan utama yang biasa masyarakat gunakan. Oleh karena itu, Kekhawatiran masyarakat pada kegiatan pengalihan dan pembangunan jalan di nilai sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal.		terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	berlangsung yaitu 5 tahun. Kekhawatiran dan harapan serta keluhan masyarakat merupakan dampak turunan oleh adanya gangguan terhadap kegiatan perikanan dan gangguan transportasi laut.
		A. INPEX akan menyusun, mensosialisasikan dan menerapkan manajemen penanganan keluhan kepada masyarakat B. Menjalin komunikasi efektif dengan para <i>stakeholder</i>.		Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jaringan jalan baru akan dibangun di sekitar lokasi OLNG. Jalan tersebut berupa jalan aspal yang terdiri dari jalan primer dan jalan sekunder yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan akses ke semua fasilitas di dalam Kilang OLNG. Jalan primer terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 3 m (2x3 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 2 m (2x2 m). Jalan sekunder adalah semua jalan lain kecuali jalan patroli. Jalan sekunder terdiri dari jalan raya untuk 2 lajur dengan lebar masing-masing lajur berukuran 2 m (2x2 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 1,5 m (2x1,5 m). Jalan patroli akan dibangun secara paralel sepanjang pagar perimeter batas lahan kawasan Kilang OLNG. Jalan patroli ini terdiri dari 1 lajur dengan lebar 3 m. B. Kondisi Rona Lingkungan Lebih dari 60% masyarakat memanfaatkan laut sebagai sumber makanan dan juga sebagai sumber mata pencahariannya. Sebagian besar ikan, udang, maupun biota laut lainnya untuk konsumsi maupun untuk dijual	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian dampak selama konstruksi berlangsung yaitu 5 tahun. Kekhawatiran dan harapan serta keluhan masyarakat merupakan dampak turunan oleh adanya gangguan terhadap kegiatan perikanan dan gangguan transportasi laut.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					diperoleh dari laut melalui perikanan tangkap. Rumput laut juga merupakan tanaman laut yang dibudidayakan di pesisir pantai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak 60% responden khawatir terjadinya gangguan aktivitas nelayan dan 20% khawatir berkurangnya area tangkapan nelayan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Harapan dan keluhan masyarakat merupakan dampak turunan dari kekhawatiran masyarakat. Apabila kekhawatiran masyarakat yang disebabkan dari dampak turunan perubahan peluang usaha lokal, perubahan pola mata pencaharian masyarakat, perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan <i>Ecosystem Services</i>, dan gangguan terhadap transportasi darat tidak diperhatikan dan ditangani dengan baik, maka akan timbul harapan dan keluhan masyarakat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak harapan dan keluhan masyarakat akibat pembangunan jalan tidak menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat dan disimpulkan menjadi Dampak Penting Hipotetik.			
		A. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan/DLLAJR dan Sat lantas setempat. B. Menyiapkan rambu-rambu keselamatan lalu lintas. C. Menyiapkan prosedur standar keselamatan dalam berkendara.	Transportasi	Gangguan Terhadap Transportasi Darat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jalan baru akan dibangun dengan panjang 6 Km, dengan lebar 10 M, dan akan dibangun selama 1 tahun. B. Kondisi Rona Lingkungan Ruas jalan yang dialihkan adalah 6 M, kemungkinan ruas jalan yang akan terdampak adalah Jalan Prof. Boediono dengan tingkat pelayanan V/C ratio 0,13, Jalan Ingei-Batu Putih Segmen 1 dengan tingkat pelayanan V/C ratio 0,02, dan Jalan Ingei-Batu Putih Segmen 2 dengan tingkat pelayanan V/C ratio 0,02. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Mobilisasi peralatan dan material konstruksi ke lokasi pembangunan jalan berpotensi meningkatkan volume lalu lintas, terutama pada saat pengangkutan alat berat. Aktivitas ini akan menimbulkan gangguan lalu lintas darat diprediksi akan terjadi di daerah Lermatang dan Bomaki. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Gangguan terhadap transportasi darat tidak menjadi isu saat konsultasi publik E. Kesimpulan Kegiatan pengalihan dan pembangunan jalan akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Mobilisasi peralatan dan material konstruksi ke lokasi pembangunan jalan berpotensi meningkatkan volume lalu lintas, terutama pada saat pengangkutan alat berat. Aktivitas ini akan menimbulkan gangguan lalu lintas darat diprediksi akan terjadi di daerah Lermatang dan Bomaki. Jalan tersebut merupakan salah satu jalan utama yang digunakan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-deso sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Sejak dimulainya tahap konstruksi sampai dengan selesainya pembangunan kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya yang akan berlangsung sekitar 5 tahun

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					oleh masyarakat sehari-hari sehingga kegiatan tersebut dapat menyebabkan gangguan terhadap transportasi darat yang cukup signifikan. Oleh kereta itu, gangguan terhadap transportasi darat akibat kegiatan pengalihan dan pembangunan jalan dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Kegiatan ini termasuk dalam golongan Dampak Primer.			
14.	Pembangunan TUKS: Pengerukan dan Pembuangan Hasil Pengerukan	A. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai: Pengerukan dan Reklamasi (Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 52 Tahun 2011 dan No. PM 74 Tahun 2014). B. Mematuhi peraturan yang berlaku tentang navigasi (PP No. 5 tahun 2010). C. Memenuhi baku mutu kualitas air laut ambien (Lampiran VIII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 untuk Biota Laut).	Kualitas Air Laut	Peningkatan Konsentrasi TSS	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Dalam proses operasi, beberapa kapal dengan berbagai ukuran akan berlabuh di fasilitas Dermaga pionir, TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat, sehingga diperlukan kedalaman air kolam pelabuhan dan/atau alur yang sesuai dengan kebutuhan ukuran kapal yang akan berlabuh di TUKS. Pekerjaan pengerukan di Dermaga pionir, TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat akan menghasilkan material keruk dengan total volume sekira 84.500 m³. Hasil pengerukan akan digunakan sebagai material timbunan untuk pembangunan jalan lintasan (Causeway) ke TUKS, baik Causeway ke Dermaga pionir sejumlah 8.500 m³, maupun Causeway ke TUKS-Bongkar Muat (MOF) 76.000 m³, sehingga semua material keruk untuk Dermaga pionir, TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat digunakan untuk penimbunan Causeway. Pengerukan dan penempatan material keruk di Causeway secara langsung akan meningkatkan TSS perairan. B. Kondisi rona lingkungan Berdasarkan data rona lingkungan yang diperoleh dari hasil analisis sampling pada musim kemarau (November 2019) dan musim hujan (Maret 2020), konsentrasi TSS di Teluk Saumlaki (titik pengamatan MWB 1-MWB 18) adalah 2-7 mg/L (BM coral dan lamun 20 mg/L). C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan Peningkatan konsentrasi TSS di lokasi pengerukan dan penempatan/pembuangan material keruk di Causeway Dermaga pionir, TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat merupakan dampak yang tidak dapat dihindarkan. Peningkatan TSS ini akan mempengaruhi biota pesisir dan biota laut di sekitar lokasi kegiatan. D. Intensitas perhatian masyarakat Hasil konsultasi publik adanya intensitas perhatian masyarakat terhadap dampak lingkungan berupa penurunan kualitas air dengan peningkatan konsentrasi TSS akibat pengerukan pendalaman kolam pelabuhan dan/atau alur pada fasilitas Dermaga pionir, TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat. E. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian rencana usaha dan/atau kegiatan pengerukan pendalaman kolam pelabuhan dan/atau alur untuk	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak peningkatan konsentrasi TSS air laut di Teluk Saumlaki diperkirakan maksimum sekitar 500 m dari lokasi pengerukan dan penempatan material hasil keruk pada daerah transisi. Arus laut di Teluk Saumlaki dominan disebabkan gerakan pasang-surut, maka persebaran dampak adalah ke arah utara pada saat pasang dan ke arah selatan pada saat surut.	Batas waktu kajian dampak untuk pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan diperkirakan selama 6-12 bulan. Dampak terjadi hanya beberapa saat (diperkirakan selama 1-2 hari) saat setelah pengerukan dan penempatan hasil keruk berlangsung oleh karena TSS akan segera mengendap.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					fasilitas bongkar muat TUKS diidentifikasi sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) , akan dikaji dalam Andal RKL dan RPL.			
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus terhadap gangguan benthos. Gangguan terhadap benthos merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Namun demikian perubahan benthos akan dipantau.	Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan Terhadap Benthos	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Dalam proses operasi, beberapa kapal dengan berbagai ukuran akan berlabuh di fasilitas TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat, untuk itu diperlukan kedalaman air tertentu yang sesuai dengan kebutuhan ukuran kapal yang akan berlabuh di TUKS. Pekerjaan pengerukan dan lokasi penempatan hasil pengerukan dengan perkiraan total volume pengerukan adalah 84.500 m³. Hasil pengerukan akan digunakan sebagai material timbunan untuk pembangunan jalan lintasan (<i>Causeway</i>) ke TUKS. B. Kondisi rona lingkungan Berdasarkan data rona lingkungan yang diperoleh dari hasil analisis sampling pada musim kemarau (November 2019) dan musim hujan (Maret 2020), nilai TSS di sekitar titik pembuangan serbuk dan lumpur bor bekas di DC 1, DC 2, DC 3 dan DC 4 adalah <2 mg/L. C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan Gangguan terhadap biota perairan merupakan dampak turunan peningkatan kualitas air laut yang berupa adanya konsentrasi TSS akibat pekerjaan pengerukan berlabuh fasilitas TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat dengan kedalaman >20 m akan mengganggu biota perairan. D. Intensitas perhatian masyarakat Hasil konsultasi publik adanya intensitas perhatian masyarakat terhadap dampak lingkungan berupa penurunan kualitas air adanya konsentrasi TSS yang mengakibatkan gangguan terhadap biota perairan akibat pengerukan pendalaman alur pelabuhan fasilitas TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat. E. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas dengan demikian rencana usaha dan/atau pengerukan pendalaman alur pelabuhan untuk fasilitas bongkar muat TUKS mengakibatkan adanya gangguan terhadap biota perairan dari peningkatan TSS diidentifikasi sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH), akan dikaji dalam Andal RKL dan RPL.	Disimpulkan sebagai DPH	Pengerukan akan dilakukan pada beberapa lokasi (<i>GP Wharf, MOF, Heavy Duty Ramp, Sea Water Intake, Causeway dan Bommies</i>) dengan total volume pengerukan sekitar 84.500 m ³ . Persebaran dampak terhadap benthos akibat pengerukan dasar laut terbatas akan terjadi pada lokasi-lokasi pengerukan dan lokasi penempatan material hasil keruk di lokasi rencana <i>Causeway</i> .	Batas waktu kajian dampak untuk pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan diperkirakan selama 6-12 bulan. Benthos akan segera pulih setelah kegiatan pengerukan dan penempatan hasil keruk berhenti. Dampak terhadap benthos pada setiap segmen berlangsung hanya beberapa bulan (diperkirakan 1-2 bulan) pada segmen lokasi kegiatan pengerukan dan penempatan hasil keruk berlangsung.
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus terhadap gangguan terumbu karang. Gangguan terhadap terumbu karang merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Namun demikian perubahan habitat terumbu karang akan dipantau serta akan dilakukan penanam kembali terumbu karang pada lokasi yang sesuai (<i>offset</i>)		Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Dalam proses operasi, beberapa kapal dengan berbagai ukuran akan berlabuh di fasilitas TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat, untuk itu diperlukan kedalaman air tertentu yang sesuai dengan kebutuhan ukuran kapal yang akan berlabuh di TUKS. Pekerjaan pengerukan dan penempatan hasil pengerukan dengan perkiraan total volume pengerukan adalah 84.500 m³. Hasil pengerukan akan digunakan sebagai material timbunan untuk pembangunan jalan lintasan (<i>Causeway</i>) ke TUKS.	Disimpulkan sebagai DPH	Pengerukan akan dilakukan pada beberapa lokasi (<i>GP Wharf, MOF, Heavy Duty Ramp, Sea Water Intake, Causeway dan</i>	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda. Lebih kurang 2 tahun selama masa konstruksi berlangsung. Gangguan terhadap terumbu karang

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					B. Kondisi rona lingkungan Berdasarkan data rona lingkungan yang diperoleh dari hasil analisis sampling pada musim kemarau (November 2019) dan musim hujan (Maret 2020), nilai TSS di sekitar titik pembuangan serbuk dan lumpur bor bekas di DC 1, DC 2, DC 3 dan DC 4 adalah <2 mg/L. C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan Gangguan terhadap terumbu karang merupakan dampak turunan peningkatan kualitas air laut yang berupa adanya konsentrasi TSS akibat pekerjaan pengerukan berlabuh fasilitas TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat dengan kedalaman >20 m akan mengganggu biota perairan. D. Intensitas perhatian masyarakat Hasil konsultasi publik adanya intensitas perhatian masyarakat terhadap dampak lingkungan berupa penurunan kualitas air adanya konsentrasi TSS yang mengakibatkan gangguan terhadap terumbu karang akibat pengerukan pendalaman alur pelabuhan fasilitas TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat. E. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas dengan demikian rencana usaha dan/atau pengerukan pendalaman alur pelabuhan untuk fasilitas bongkar muat TUKS mengakibatkan adanya gangguan terhadap terumbu karang dari peningkatan TSS diidentifikasi sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH), akan dikaji dalam Andal RKL dan RPL.		Bommies) dengan total volume pengerukan sekitar 84.500 m³. Persebaran dampak gangguan terhadap habitat terumbu karang akibat pengerukan dasar laut terbatas akan terjadi pada lokasi-lokasi pengerukan dan tersebar dalam radius sekitar 150 m dari lokasi pengerukan.	bersifat jangka panjang dan memerlukan skema offset.
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus terhadap padang lamun/rumput laut dan gangguan terhadap padang lamun/rumput laut merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Namun demikian perubahan habitat Padang Lamun akan dipantau.		Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dalam proses operasi, beberapa kapal dengan berbagai ukuran akan berlabuh di fasilitas TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat, untuk itu diperlukan kedalaman air tertentu yang sesuai dengan kebutuhan ukuran kapal yang akan berlabuh di TUKS. Pekerjaan pengerukan dan penempatan hasil pengerukan dengan perkiraan total volume pengerukan adalah 84.500 m³. Hasil pengerukan akan digunakan sebagai material timbunan untuk pembangunan jalan lintasan (<i>Causeway</i>) ke TUKS. B. Kondisi Rona Lingkungan Terdapat tiga jenis padang lamun yang umum ditemukan di sekitar lokasi kegiatan, yakni <i>Cymodecea rotundata</i>, <i>Cymodecea serulata</i> dan <i>Halodule pinnatifolia</i>. Pertumbuhan padang lamun/rumput laut di perairan ini tergolong cukup baik karena ditunjang dari kondisi fisik-kimia air laut untuk perkembangannya. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan akan mengganggu dan berdampak pada padang lamun karena berada dekat dengan tepi pantai. D. Intensitas Perhatian Masyarakat	Disimpulkan sebagai DPH	Pengerukan akan dilakukan pada beberapa lokasi (GP <i>Wharf</i>, <i>MOF</i>, <i>Heavy Duty Ramp</i>, <i>Sea Water Intake</i>, <i>Causeway</i> dan <i>Bommies</i>) dengan total volume pengerukan sekitar 84.500 m³. Persebaran dampak gangguan terhadap padang lamun akibat	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda. Lebih kurang 2 tahun selama masa konstruksi berlangsung. Gangguan terhadap padang lamun/rumput laut akan segera dapat pulih kembali dalam beberapa bulan

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Gangguan terhadap padang lamun dan rumput laut menjadi perhatian masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut termasuk dalam Dampak Penting Hipotetik (DPH)		pengerukan dasar laut terbatas akan terjadi pada lokasi-lokasi pengerukan dan tersebar dalam radius sekitar 150 m dari lokasi pengerukan.	
		A. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan. B. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan aktivitas di laut. C. Menyiapkan rambu-rambu keselamatan pelayaran Menyiapkan prosedur standar keselamatan dalam kegiatan pengerukan.	Sosial Ekonomi	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dalam proses operasi, beberapa kapal dengan berbagai ukuran akan berlabuh di fasilitas TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat, untuk itu diperlukan kedalaman air tertentu yang sesuai dengan kebutuhan ukuran kapal yang akan berlabuh di TUKS. Perkiraan total volume pengerukan adalah 84.500 m³. Hasil pengerukan akan digunakan sebagai material timbunan untuk pembangunan jalan lintasan (<i>Causeway</i>) ke TUKS. B. Kondisi Rona Lingkungan Kegiatan perikanan utamanya adalah perahu penangkap ikan yang menuju maupun kembali dari <i>fishing ground</i>, berlangsung secara normal mengikuti alur yang biasa dilaluinya dan juga termasuk melalui areal pengerukan yang akan menjadi rencana proyek. Pembudidaya rumput laut dan pencari teripang dan ikan karang di lokasi TUKS berlangsung secara normal. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dengan pertimbangan keselamatan, maka zona eksklusi (<i>exclusion zone</i>) keselamatan akan ditetapkan di sepanjang koridor lokasi pembangunan TUKS pada bagian-bagian yang masih berlangsung. <i>Exclusion zone</i> akan membatasi akses nelayan ke lokasi penangkapan ikan. Namun, luas zona eksklusi di sekitar lokasi pembangunan TUKS yang sedang berlangsung diperkirakan relatif kecil dan akan berpindah dari satu segmen ke segmen lainnya sesuai perkembangan pembangunan TUKS. TUKS direncanakan memiliki ketinggian 20 m di atas muka air surut terendah (LWL), TUKS dengan ketinggian ini akan memungkinkan kapal nelayan untuk lewat di bawah bagian TUKS yang telah selesai dibangun. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Gangguan terhadap kegiatan perikanan menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas, gangguan aktivitas nelayan karena pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan disimpulkan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		A. Menginformasikan rencana dan kemajuan konstruksi TUKS kepada Kantor Syahbandar. B. Melakukan sosialisasi secara berkala tentang rencana dan kemajuan konstruksi TUKS kepada kepala desa (Lurah) dan Camat secara terbuka dan transparan.	Sosial Budaya	Kekhawatiran Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dalam proses operasi, beberapa kapal dengan berbagai ukuran akan berlabuh di fasilitas TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat, untuk itu diperlukan kedalaman air tertentu yang sesuai dengan kebutuhan ukuran kapal yang akan berlabuh di TUKS. Perkiraan total volume pengerukan adalah 84.500 m³. Hasil pengerukan akan digunakan sebagai material timbunan untuk pembangunan jalan lintasan (<i>Causeway</i>) ke TUKS. B. Kondisi Rona Lingkungan Mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan yang melakukan aktivitas sehari-hari tanpa perlu khawatir akan adanya gangguan. Terdapat 60% responden yang khawatir terjadi gangguan mata pencaharian, sebanyak 60% khawatir terjadi gangguan aktifitas nelayan dan terdapat 20% yang khawatir terjadi pengurangan area tangkapan nelayan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan dari kegiatan konstruksi TUKS berlokasi di wilayah studi. Proyek sudah merencanakan lokasi pembuangan yang jauh dari aktivitas penduduk. Langkah tersebut guna untuk meminimalisir gangguan aktivitas bagi masyarakat. Sehingga kekhawatiran akibat keafiatan tersebut dapat diminimalisir. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak kekhawatiran masyarakat akibat kegiatan ini tidak menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Kekhawatiran masyarakat pada kegiatan pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan akibat konstruksi TUKS di kategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) dan perlu dikelola.	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
		A. INPEX akan menyusun, mensosialisasikan dan menerapkan manajemen penanganan keluhan kepada masyarakat. B. Menjalin komunikasi efektif dengan para stakeholder.		Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dalam proses operasi, beberapa kapal dengan berbagai ukuran akan berlabuh di fasilitas TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat, untuk itu diperlukan kedalaman air tertentu yang sesuai dengan kebutuhan ukuran kapal yang akan berlabuh di TUKS. Perkiraan total volume pengerukan adalah 84.500 m³. Hasil pengerukan akan digunakan sebagai material timbunan untuk pembangunan jalan lintasan (<i>Causeway</i>) ke TUKS. B. Kondisi Rona Lingkungan Tidak ada keluhan akibat terganggunya kegiatan masyarakat sehari-hari. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Proyek sudah merencanakan lokasi pembuangan yang jauh dari aktivitas penduduk. Langkah tersebut guna untuk meminimalisir keluhan dari masyarakat. Sehingga keluhan akibat keafiatan tersebut dapat diminimalisir.	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					D. Intensitas Perhatian Masyarakat Harapan dan keluhan masyarakat akibat kegiatan pengerukan dan pembuangan hasil kerukan tidak menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat. Oleh karena itu, harapan dan keluhan masyarakat pada kegiatan pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan akibat konstruksi TUKS di kategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) dan perlu dikelola.			
		A. INPEX akan mematuhi peraturan yang berlaku tentang navigasi (PP No. 5 Tahun 2010). B. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan. C. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan aktivitas di laut. D. Menyiapkan rambu-rambu keselamatan. E. Menyiapkan prosedur standar keselamatan dalam kegiatan pengerukan	Transportasi	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Sebuah <i>Marine Backhoe Dredger</i> (BHD) yang cocok dengan berbasis <i>air stasioner excavator</i> dipasang khusus pada meja Ponton, pengerukan berputar akan didukung dengan tongkang untuk memindahkan bahan pengerukan. Untuk perairan dangkal, pengerukan akan menggunakan kapal keruk <i>backhoe</i> di tongkang. Metodologi pengerukan dan kegiatan konstruksi kelautan akan dikembangkan oleh subkontraktor spesialis kelautan. Estimasi waktu pengerukan kurang lebih 3 bulan. B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan data total call dapat dipastikan jumlah bangkitan lalu lintas kapal menggunakan alur pelayaran Teluk Dalam selama bulan Oktober 2019 sebanyak 288 tiba dan berangkat, ini berarti bahwa setiap hari rata-rata terdapat 9 unit kapal yang melakukan tiba dan berangkat. Data kedatangan dan keberangkatan terutama kapal-kapal dalam negeri dapat di kelompokkan berdasarkan kelompok waktu, didapatkan waktu-waktu dengan frekuensi tertinggi lalu lintas laut. Waktu frekuensi tertinggi saat kedatangan adalah pada kelompok waktu 06.00 – 09.00 yang dilakukan oleh kapal-kapal Nusantara dengan frekuensi sebanyak 26 unit dan kapal-kapal Perla dengan frekuensi sebanyak 28 unit sehingga total frekuensi 54 unit, sedangkan waktu dengan frekuensi tertinggi saat keberangkatan adalah di kelompok waktu 15.00 – 18.00 yang dilakukan berturut-turut oleh Kapal-kapal Nusantara 20 unit, Perintis 11 unit, dan Pertamina 4 sehingga total frekuensi keberangkatan 35 unit. Pergerakan lalu lintas laut terpantau sebanyak 110 unit didominasi oleh kapal nelayan sebanyak 98 unit, dan kelompok waktu dengan frekuensi terpadat antara jam 03.00 sampai dengan jam 06.00 pagi sebanyak 33 unit kemudian terpadat ke-2 pada jam 06.00 – 09.00 sebanyak 23 unit. Untuk kasus lalu lintas yang melalui selat Nustual, terpantau hanya 5 unit kapal nelayan kecil yaitu pada kelompok waktu 12.00-15.00 sebanyak 2 unit dan 15.00-18.00 sebanyak 3 unit, kemungkinan besar untuk melalui selat tersebut sangat tergantung dengan pasang surut. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Pengerukan dan Pembuangan Hasil Pengerukan pada tahap konstruksi diperkirakan akan mempengaruhi pergerakan lalu lintas kapal dalam negeri maupun lokal khususnya yang melalui Selat Nustual. Pengaruh terhadap transportasi laut bersifat intermitent dan hanya berlangsung selama tahap konstruksi. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Berdasarkan hasil konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan yang sudah dilakukan, gangguan terhadap transportasi laut yang berasal dari kapal-kapal Pengerukan dan Pembuangan Hasil Pengerukan selama tahap konstruksi menjadi perhatian yang tinggi dari masyarakat, namun kegiatan Pengerukan dan Pembuangan Hasil Pengerukan ini sudah mempunyai pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan. E. Kesimpulan Kegiatan pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan direncanakan akan berlokasi di dalam area OLNG Lokasi tersebut berada cukup jauh dari fasilitas yang masyarakat gunakan sehari dan bukan berada di lokasi pendaratan maupun pencarian ikan nelayan. Sehingga dampak yang ditimbulkan diprediksi tidak signifikan terhadap aktivitas transportasi laut. Gangguan terhadap transportasi laut pada kegiatan Pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan akibat konstruksi TUKS di kategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) namun perlu di kelola.			
15.	Pembangunan TUKS: Pembangunan Jalan Lintasan (<i>Causeway</i>) ke TUKS	Mengupayakan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebisingan pada malam hari.	Kebisingan Lsm: 45,1-54,5 dBA	Peningkatan Kebisingan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Causewaya akan dibangun sepanjang 2 km. Lebar Causeway terbagi menjadi dua (2) bagian, yaitu jalan akses dari pantai ke TUKS-Bongkar Muat (<i>GP Wharf/MOF</i>) adalah 15 m untuk mengakomodasi operasi lalu lintas dan memuat jaringan pipa, dan lebar jalan 6 m untuk jalan akses dari persimpangan TUKS-Bongkar Muat (<i>GP Wharf/MOF</i>) menuju zona transisi ke Jembatan Pipa (<i>Trestle Bridge</i>). B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi kebisingan tergolong baik, Lsm < 55 dBA C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembangunan jalan lintasan (<i>causeway</i>) akan meningkatkan kebisingan dari pengoperasian peralatan yang digunakan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terungkap adanya kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Kegiatan pembangunan jalan lintasan (<i>causeway</i>) tergolong dalam Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
		A. INPEX akan mematuhi peraturan yang berlaku tentang navigasi (PP No. 5 tahun 2010).	Kualitas Air Laut	Peningkatan Konsentrasi TSS	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Jalan lintasan (<i>causeway</i>) ke TUKS diperlukan untuk menghubungkan arus lalu lintas dari fasilitas Kilang OLNG di darat ke fasilitas Dermaga Pionir, TUKS-Dermaga Pemuatan Material (MOF) dan TUKS-Dermaga Pemuatan LNG dan	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak peningkatan konsentrasi	Pembangunan jalan lintasan (<i>Causeway</i>) ke TUKS akan

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		B. Memenuhi baku mutu kualitas air laut ambien (Lampiran VIII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 untuk Biota Laut).			Kondensat. Pembangunan <i>Causeway</i> akan menggunakan material tanah hasil <i>cutting</i> di calon area ONLG yang ditempatkan di bibir pantai hingga titik di mana dermaga akan dibangun, kemudian dipadatkan. Penimbunan untuk <i>Causeway</i> juga ditambah dari hasil material hasil pengerukan kolam pelabuhan Dermaga pionir, TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat. Dalam proses penempatan material tanah dan materil keruk serta pemadatan tanah tersebut, sebagian material tanah dapat terlepas dan meningkatkan konsentrasi TSS air laut di lokasi pembangunan <i>Causeway</i>. Peningkatan TSS di perairan pantai akan semakin tinggi pada saat penempatan material keruk dari Dermaga pionir, TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat. Peningkatan konsentrasi TSS merupakan dampak yang tidak dapat dihindarkan. Diperkirakan sekitar 637.500 m³ material penimbunan yang diperlukan, terdiri atas 553.000 m³ material tanah dan 84.500 m³ material hasil pengerukan Dermaga pionir, TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat. akan digunakan untuk pembangunan <i>Causeway</i> ini. B. Kondisi rona lingkungan Berdasarkan data rona lingkungan yang diperoleh dari hasil analisis sampling pada musim kemarau (November 2019) dan musim hujan (Maret 2020), nilai TSS di Teluk Saumlaki (titik pengamatan MWB 1-MWB 18) adalah 2-7 mg/L (BM coral dan lamun 20 mg/L). C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan Material tanah yang terlepas ke dalam air dari dinding pembatas <i>Causeway</i> dapat meningkatkan konsentrasi TSS air laut di lokasi pembangunan <i>Causeway</i> tersebut. TSS di perairan pantai akan semakin meningkat pada saat penempatan material hasil pengerukan dari Dermaga pionir, TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat yang mengandung air, yang mana TSS tersebut akan tersebar akibat arus pasang surut di sekitar lokasi kegiatan sebelum mengendap. D. Intensitas perhatian masyarakat Hasil konsultasi publik adanya intensitas perhatian masyarakat terhadap dampak lingkungan berupa penurunan kualitas air berupa peningkatan konsentrasi TSS akibat pembangunan <i>Causeway</i> akan menggunakan material tanah yang ditempatkan di bibir pantai hingga Dermaga dan penempatan material hasil pengerukan dari Dermaga pionir, TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat pada penimbunan <i>Causeway</i> tersebut E. Kesimpulan Berdasarkan penjeian di atas, dengan demikian rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan <i>Causeway</i> dengan penimbunan material tanah yang ditempatkan di bibir pantai hingga Dermaga dan penempatan material hasil pengerukan dari Dermaga pionir, TUKS-Bongkar Muat (MOF) dan TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat pada penimbunan <i>Causeway</i> tersebut,		TSS air laut di Teluk Saumlaki diperkirakan maksimum sekitar 500 m dari lokasi jalan penghubung dermaga di daerah transisi. Arus laut di Teluk Saumlaki dominan disebabkan gerakan pasang-surut, maka persebaran dampak adalah ke arah utara pada saat pasang dan ke arah selatan pada saat surut.	berlangsung selama 2 tahun, sehingga batas waktu kajian adalah 2 tahun. Panjang <i>Causeway</i> sekitar 1.8 km, Peningkatan TSS akan terjadi pada segmen dimana kegiatan berlangsung (diperkirakan 20-30 m per minggu, peningkatan TSS akan terjadi sekitar 2-3 hari pada setiap segmen karena TSS akan segera mengendap .

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					diidentifikasi sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) , akan dikaji dalam Andal, dan dituangkan dalam RKL serta RPL.			
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus terhadap gangguan benthos. Gangguan terhadap benthos merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Namun demikian perubahan benthos akan dipantau.	Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan Terhadap Benthos	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan <i>Causeway</i> akan menggunakan material tanah yang ditempatkan di bibir pantai hingga titik di mana dermaga akan dibangun, kemudian dipadatkan. Dalam proses penempatan material tanah dan pemadatan tanah tersebut, sebagian material tanah dapat terlepas dan meningkatkan konsentrasi TSS air laut di lokasi pembangunan <i>Causeway</i>. Peningkatan konsentrasi TSS merupakan dampak yang tidak dapat dihindarkan. Diperkirakan sekitar maksimum 84.500 m³ material tanah akan digunakan untuk pembangunan <i>Causeway</i> ini B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan data rona lingkungan yang diperoleh dari hasil analisis sampling pada musim kemarau (November 2019) dan musim hujan (Maret 2020), nilai TSS di sekitar titik pembuangan serbuk dan lumpur bor bekas di DC 1, DC 2, DC 3 dan DC 4 adalah <2 mg/L. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan lintasan ke TUKS (<i>Causeway</i>) akan menimbulkan dampak terhadap habitat benthos. Hal ini dikarenakan material yang digunakan merupakan tanah yang dipadatkan. Material ini kemungkinan akan mengganggu benthos di sekitar pembangunan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Hasil konsultasi publik, gangguan terhadap benthos menjadi perhatian masyarakat. E. Kesimpulan Pembangunan jalan lintasan (<i>causeway</i>) terhadap gangguan benthos merupakan Dampak Penting Hipotetik (DPH)	Disimpulkan sebagai DPH	Pembangunan jalan lintasan (<i>Causeway</i>) ke TUKS, memiliki panjang <i>Causeway</i> 1.845 m dengan lebar 15 m, akan dilakukan pengerukan sedalam 1,5 m sehingga persebaran dampak terhadap benthos sebagai batas ekologi diperkirakan adalah 150 m di sisi kiri dan kanan jalan penghubung TUKS.	Pembangunan jalan lintasan (<i>Causeway</i>) ke TUKS serta pembangunan TUKS akan berlangsung selama 2 tahun, sehingga batas waktu kajian adalah 2 tahun. Panjang <i>Causeway</i> sekitar 1.8 km, Gangguan terhadap benthos akan terjadi pada segmen dimana kegiatan berlangsung (diperkirakan 20-30 m per minggu, seluruh benthos pada segmen tersebut akan hilang.. Demikian juga pada lokasi-lokasi tiang pancang di setiap TUKS yang dibangun
		A. Pengurugan dilakukan terbatas pada daerah konstruksi. B. Segera melakukan penanaman pada lokasi kegiatan setelah penyiapan lahan selesai dilakukan. C. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam lokasi kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang RTH.		Gangguan Terhadap Mangrove	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan <i>Causeway</i> akan menggunakan material tanah yang ditempatkan di bibir pantai hingga titik dimana dermaga akan dibangun, kemudian dipadatkan. Diperkirakan sekitar maksimum 84.500 m³ material tanah akan digunakan untuk pembangunan <i>Causeway</i> ini. B. Kondisi Rona Lingkungan Hutan mangrove di sekitar area rencana TUKS adalah hutan mangrove sekunder. Terdapat setidaknya enam jenis mangrove di lokasi, antara lain: <i>Avicennia Marina</i>, <i>Ceriops tagal</i>, <i>Rhizophora apiculate</i>, <i>R. Mucronata</i>, <i>Bruguera sp.</i>, dan <i>Xylocarpus granatum</i>. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak gangguan terhadap mangrove akan terjadi pada segmen dimana kegiatan berlangsung.	Pembangunan jalan lintasan (<i>Causeway</i>) ke TUKS serta pembangunan seluruh TUKS (terutama Pulau Nustual) akan berlangsung selama 2 tahun, sehingga batas

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Kegiatan pembangunan TUKS berdampak terhadap ekosistem mangrove karena melewati area ekosistem mangrove yang menyebabkan berkurangnya area mangrove khususnya pada daerah konstruksi. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Gangguan kegiatan terhadap mangrove tidak menjadi perhatian masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas, maka Gangguan kegiatan pembangunan jalan lintasan (<i>causeway</i>) terhadap gangguan ekosistem mangrove merupakan Dampak Penting Hipotetik (DPH)			waktu kajian adalah 2 tahun.
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus terhadap gangguan terumbu karang. Gangguan terhadap terumbu karang merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Namun demikian perubahan habitat terumbu karang akan dipantau.		Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan <i>Causeway</i> akan menggunakan material tanah yang ditempatkan di bibir pantai hingga titik di mana dermaga akan dibangun, kemudian dipadatkan. Diperkirakan sekitar maksimum 84.500 m³ material tanah akan digunakan untuk pembangunan <i>Causeway</i> ini. B. Kondisi Rona Lingkungan Hasil pemantauan Desember 2023 terhadap komunitas terumbu karang di perairan Lokasi kegiatan, kondisi penutupan terumbu karang di sekitar perairan Saumlaki berada pada kisaran 36,72 % sd. 77,04 % termasuk kategori sedang hingga baik sekali. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan jalan lintasan (<i>Causeway</i>) ke TUKS dapat mengganggu ekosistem terumbu karang akibat dari sedimentasi yang terjadi dari hasil pengurukan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Pada saat konsultasi publik, dampak terhadap ekosistem terumbu karang menjadi perhatian masyarakat. E. Kesimpulan Gangguan terhadap terumbu karang dari aktivitas pembuatan jalan lintasan ke TUKS merupakan Dampak Penting Hipotetik (DPH).	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak gangguan terhadap habitat terumbu karang akibat pengerukan dasar laut terbatas akan terjadi pada lokasi-lokasi pengerukan dan sekitar 150 m sisi kiri dan kanan jalan penghubung TUKS .	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda. Lebih kurang 2 tahun selama masa konstruksi berlangsung.. Gangguan terhadap terumbu karang bersifat jangka panjang dan memerlukan skema offset.
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus terhadap padang lamun/rumput laut dan gangguan terhadap padang lamun/rumput laut merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Namun demikian perubahan habitat padang lamun akan dipantau.		Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan <i>Causeway</i> akan menggunakan material tanah yang ditempatkan di bibir pantai hingga titik di mana dermaga akan dibangun, kemudian dipadatkan. Diperkirakan sekitar maksimum 84.500 m³ material tanah akan digunakan untuk pembangunan <i>Causeway</i> ini. B. Kondisi Rona Lingkungan Terdapat tiga jenis lamun yang ditemukan di area studi yaitu <i>Enhalus acoroides</i>, <i>Thalassia sp.</i> dan <i>Haloudle sp.</i> Penutupan lamun di Kepulauan Tanimbar mencapai 60% yang didominasi oleh <i>Thalassia hemprichii</i> 45,88%, <i>Halophila minor</i> 37,10%. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan jalan lintasan (<i>Causeway</i>) ke TUKS dapat mengganggu ekosistem lamun akibat dari sedimentasi yang terjadi dari hasil pengurukan.	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak gangguan terhadap padang lamun akibat pengerukan dasar laut terbatas akan terjadi pada lokasi-lokasi pengerukan dan sekitar 150	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda. Lebih kurang 2 tahun selama masa konstruksi berlangsung.. Gangguan terhadap padang lamun/rumput laut akan segera dapat pulih kembali

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					D. Intensitas Perhatian Masyarakat Pada saat konsultasi publik, dampak terhadap ekosistem padang lamun karang menjadi perhatian masyarakat. E. Kesimpulan Gangguan terhadap ekosistem padang lamun akibat aktivitas pembuatan jalan lintasan ke TUKS merupakan Dampak Penting Hipotetik (DPH).		m sisi kiri dan kanan jalan penghubung TUKS .	dalam beberapa bulan
		A. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan. B. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan aktivitas di laut. C. Menyiapkan rambu-rambu keselamatan pelayaran. D. Menyiapkan prosedur standar keselamatan dalam pembangunan jalan TUKS.	Sosial Ekonomi	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan <i>Causeway</i> akan dibangun sepanjang 2 km. Lebar jalan Lintasan (<i>Causeway</i>) terbagi menjadi dua (2) bagian, yaitu jalan akses dari pantai ke TUKS-Bongkar Muat (GP <i>Wharf</i>/MOF) adalah 15 m untuk mengakomodasi operasi lalu lintas dan memuat jaringan pipa, dan lebar jalan 6 m untuk jalan akses dari persimpangan TUKS-Bongkar Muat (GP <i>Wharf</i>/MOF) menuju zona transisi ke Jembatan Pipa (<i>Trestle Bridge</i>). B. Kondisi Rona Lingkungan Kegiatan perikanan utamanya adalah perahu penangkap ikan yang menuju maupun kembali dari <i>fishing ground</i>, berlangsung secara normal mengikuti alur yang biasa dilaluinya dan juga termasuk melalui areal pengerukan yang akan menjadi rencana proyek. Pembudidaya rumput laut dan pencari teripang dan ikan karang di lokasi TUKS berlangsung secara normal. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bagian pertama dari TUKS akan dibangun berbentuk struktur masif, dan sisanya berbentuk struktur <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i>. Pembangunan jalan penghubung TUKS berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas perikanan. Dengan pertimbangan keselamatan, maka zona eksklusi (<i>exclusion zone</i>) keselamatan akan ditetapkan di sepanjang koridor lokasi pembangunan TUKS pada bagian-bagian yang masih berlangsung. <i>Exclusion zone</i> akan membatasi akses nelayan ke lokasi penangkapan ikan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat 60% responden yang khawatir terjadi gangguan aktivitas nelayan dan sebanyak 20% khawatir terjadi penurunan area tangkapan nelayan. E. Kesimpulan Oleh karena itu, gangguan aktivitas nelayan karena pembangunan jalan lintas ke TUKS disimpulkan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam Andal. Kegiatan ini termasuk dalam golongan Dampak Primer.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Pembangunan jalan lintasan (<i>Causeway</i>) ke TUKS akan berlangsung selama lebih kurang 2 tahun. <i>Causeway</i> akan mengganggu jalur tradisional lalu lintas laut dan kegiatan perikanan masyarakat. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.
			Sosial Budaya	Kekhawatiran Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan <i>Causeway</i> akan dibangun sepanjang 2 km. Lebar jalan Lintasan (<i>Causeway</i>) terbagi menjadi dua (2) bagian, yaitu jalan akses dari pantai ke TUKS-Bongkar Muat (GP <i>Wharf</i>/MOF) adalah 15 m untuk mengakomodasi	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek	Batas waktu kajian dampak selama konstruksi

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					operasi lalu lintas dan memuat jaringan pipa, dan lebar jalan 6 m untuk jalan akses dari persimpangan TUKS-Bongkar Muat (GP <i>Wharf</i>/MOF) menuju zona transisi ke Jembatan Pipa (<i>Trestle Bridge</i>). B. Kondisi Rona Lingkungan Masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari sebagai nelayan tangkap dan nelayan budidaya tanpa perlu khawatir akan adanya gangguan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembangunan ini termasuk dalam pembangunan TUKS. Hal ini juga akan menimbulkan munculnya kekhawatiran masyarakat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini muncul saat konsultasi publik karena merupakan dampak turunan dari dampak lain. E. Kesimpulan Kegiatan pembangunan ini termasuk dalam pembangunan TUKS. Hal ini juga akan menimbulkan munculnya kekhawatiran masyarakat. Kekhawatiran ini perlu dikaji dalam dokumen Andal dan termasuk dalam Dampak Penting Hipotetik (DPH). Kegiatan ini termasuk dalam Dampak Turunan dari: Peningkatan konsentrasi TSS, Gangguan terhadap benthos, Gangguan terhadap habitat terumbu karang, Gangguan terhadap padang lamun/rumput laut, Gangguan terhadap kegiatan perikanan; dan Gangguan transportasi laut.		yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Lauran, Desa Kabayat, Desa Ingei, Desa Wowonda	berlangsung yaitu 5 tahun. Kekhawatiran dan harapan serta keluhan masyarakat merupakan dampak turunan oleh adanya gangguan terhadap kegiatan perikanan dan gangguan transportasi laut.
		A. INPEX akan menyusun, mensosialisasikan dan menerapkan manajemen penanganan keluhan kepada masyarakat. B. Menjalani komunikasi efektif dengan para <i>stakeholder</i>.		Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan <i>Causeway</i> akan dibangun sepanjang 2 km. Lebar jalan Lintasan (<i>Causeway</i>) terbagi menjadi dua (2) bagian, yaitu jalan akses dari pantai ke TUKS-Bongkar Muat (GP <i>Wharf</i>/MOF) adalah 15 m untuk mengakomodasi operasi lalu lintas dan memuat jaringan pipa, dan lebar jalan 6 m untuk jalan akses dari persimpangan TUKS-Bongkar Muat (GP <i>Wharf</i>/MOF) menuju zona transisi ke Jembatan Pipa (<i>Trestle Bridge</i>). B. Kondisi Rona Lingkungan Masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari sebagai nelayan tangkap dan nelayan budidaya tanpa perlu khawatir akan adanya gangguan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembangunan ini termasuk dalam pembangunan TUKS. Hal ini juga akan menimbulkan munculnya kekhawatiran masyarakat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini muncul saat konsultasi publik karena merupakan dampak turunan dari dampak lain. E. Kesimpulan Kegiatan pembangunan ini termasuk dalam pembangunan TUKS. Hal ini juga akan menimbulkan munculnya kekhawatiran masyarakat. Kekhawatiran ini perlu dikaji dalam dokumen Andal dan termasuk dalam Dampak Penting Hipotetik (DPH). Kegiatan ini termasuk dalam Dampak Turunan dari: Peningkatan konsentrasi TSS, Gangguan terhadap benthos,	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desanya sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian dampak selama konstruksi berlangsung yaitu 5 tahun. Kekhawatiran dan harapan serta keluhan masyarakat merupakan dampak turunan oleh adanya gangguan terhadap kegiatan perikanan dan gangguan transportasi laut.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Gangguan terhadap habitat terumbu karang, Gangguan terhadap padang lamun/rumput laut, Gangguan terhadap kegiatan perikanan; dan Gangguan transportasi laut.			
		A. Mematuhi peraturan yang berlaku tentang navigasi (PP No. 5 Tahun 2010). B. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan. C. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan aktivitas di laut. D. Menyiapkan rambu-rambu keselamatan. E. Menyiapkan prosedur standar keselamatan dalam berkendara.	Transportasi	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jalan lintasan (Causeway) di perlukan untuk menghubungkan arus lalu lintas dari fasilitas OLNG di darat ke TUKS dan platform pemuatan. Jalan lintas TUKS ini juga menyediakan rute yang efisien untuk koridor pipa antara tanki penyimpanan LNG dan kondensat di darat dan platform pemuatan, jarak TUKS LNG ke pantai kira-kira 2 Km. Lebar jalan Lintasan (Causeway) terbagi menjadi 2 bagian, yaitu jalan akses dari pantai ke TUKS Pemuatan Material (GP Wharf/MOF) adalah 15 m untuk mengakomodasi operasi lalu lintas dan memuat jaringan pipa, dan lebar jalan 6 m untuk jalan akses dari persimpangan TUKS Pemuatan Material (GP Wharf/MOF) menuju zona transisi ke Jembatan Pipa (Trestle Bridge). Pembangunan Causeway diperkirakan berlangsung selama maksimum 2 tahun. B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan data total call dapat dipastikan jumlah bangkitan lalu lintas kapal menggunakan alur pelayaran Teluk Dalam selama bulan Oktober 2019 sebanyak 288 tiba dan berangkat, ini berarti bahwa setiap hari rata-rata terdapat 9 unit kapal yang melakukan tiba dan berangkat. Data kedatangan dan keberangkatan terutama kapal-kapal dalam negeri dapat di kelompokkan berdasarkan kelompok waktu, didapatkan waktu-waktu dengan frekuensi tertinggi lalu lintas laut. Waktu frekuensi tertinggi saat kedatangan adalah pada kelompok waktu 06.00 – 09.00 yang dilakukan oleh kapal-kapal Nusantara dengan frekuensi sebanyak 26 unit dan kapal-kapal Perla dengan frekuensi sebanyak 28 unit sehingga total frekuensi 54 unit, sedangkan waktu dengan frekuensi tertinggi saat keberangkatan adalah di kelompok waktu 15.00 – 18.00 yang dilakukan berturut-turut oleh Kapal-kapal Nusantara 20 unit, Perintis 11 unit, dan Pertamina 4 sehingga total frekuensi keberangkatan 35 unit. Pergerakan lalu lintas laut terpantau sebanyak 110 unit didominasi oleh kapal nelayan sebanyak 98 unit, dan kelompok waktu dengan frekuensi terpadat antara jam 03.00 sampai dengan jam 06.00 pagi sebanyak 33 unit kemudian terpadat ke-2 pada jam 06.00 – 09.00 sebanyak 23 unit. Untuk kasus lalu lintas yang melalui selat Nustual, terpantau hanya 5 unit kapal nelayan kecil yaitu pada kelompok waktu 12.00-15.00 sebanyak 2 unit dan 15.00-18.00 sebanyak 3 unit, kemungkinan besar untuk melalui selat tersebut sangat tergantung dengan pasang surut. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Rencana pembangunan jalan lintasan ke TUKS, direncanakan urugannya didapat dari hasil pengerukan dasar laut di sekitar lokasi pembangunan jalan lintasan tersebut sehingga bangkitan atau ritasi hasil pengerukan ke lokasi pembangunan memotong perlintasan kapal-kapal nelayan maupun	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Luran, Desa Kabayat, Desa Ingei, Desa Wowonda	Pembangunan jalan lintasan (Causeway) ke TUKS akan berlangsung selama lebih kurang 2 tahun. Causeway akan mengganggu jalur tradisional lalu lintas laut dan kegiatan perikanan masyarakat. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					kapal penumpang antar pulau. Dengan adanya pembangunan tersebut, maka alur pelayaran kapal-kapal tersebut agak bergeser ke selatan. Pengerukan akan berlangsung selama 3 bulan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Berdasarkan hasil konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan yang sudah dilakukan, gangguan terhadap transportasi laut yang berasal dari kapal-kapal Pembangunan Jalan Lintasan (<i>Causeway</i>) ke TUKS selama tahap konstruksi menjadi perhatian yang tinggi dari masyarakat. E. Kesimpulan Kegiatan pembangunan jalan penghubung TUKS akan memerlukan material konstruksi yang akan diangkut dan didatangkan, akan berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas laut. Selain itu, dengan pertimbangan keselamatan, maka zona eksklusi (<i>exlusion zone</i>) keselamatan akan ditetapkan di sepanjang koridor pembangunan jalan penghubung TUKS yang akan membatasi akses nelayan ke lokasi penangkapan ikan dan sebaliknya. Luas zona eksklusi diperkirakan relatif terbatas sekitar bagian TUKS yang sedang dibangun; namun demikian oleh karena kegiatan pembangunan TUKS diperkirakan berlangsung selama lebih kurang dua tahun dan akan berlangsung hingga tahap operasi, maka dampak terhadap gangguan lalu-lintas laut tergolong sebagai DPH dan akan dikaji lebih lanjut dalam Andal.			
16.	Pembangunan TUKS: Pembangunan TUKS-Pemuatan Material MOF (MOF), TUKS-Dermaga Pionir, TUKS-Dermaga Pemuatan LNG dan Kondensat	Mengupayakan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebisingan pada malam hari.	Kebisingan	Peningkatan Kebisingan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas-fasilitas TUKS yang akan dibangun untuk keperluan operasi Kilang OLNK: TUKS pionir, TUKS bongkar muat, dan TUKS pemuatan LNG dan kondensat B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan pengambilan sampel data rona lingkungan, tingkat kebisingan di Lermatang sebesar 51,9 dBA pada musim kemarau dan 57 dbA pada musim hujan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembangunan TUKS akan meningkatkan kebisingan dari pengoperasian peralatan seperti alat berat dan alat pendukung lainnya. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Peningkatan kebisingan akibat kegiatan tidak menjadi perhatian masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Lokasi permukiman terdekat berjarak sekitar 220 m dari lokasi kegiatan, maka tingkat kebisingan yang diterima adalah sebesar 53 dBA sehingga tidak bernilai signifikan dan tergolong dalam Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
		A. Mematuhi peraturan yang berlaku tentang navigasi (PP No. 5 tahun 2010).	Kualitas Air Laut	Peningkatan Konsentrasi TSS	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan TUKS Pemuatan Material MOF (MOF), TUKS Pionir, TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat akan melakukan kegiatan pemancangan	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		B. Memenuhi baku mutu kualitas air laut ambien (Lampiran VIII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 untuk Biota Laut).			beberapa <i>sheet pile</i> yang akan dilakukan pada lokasi akhir jalan penghubung dan dasar perairan yang telah dikeruk. Pemasangan tiang pancang berpotensi meningkatkan TSS air laut disekitar lokasi kegiatan. B. Kondisi rona lingkungan Berdasarkan data rona lingkungan yang diperoleh dari hasil analisis sampling pada musim kemarau (November 2019) dan musim hujan (Maret 2020), nilai TSS di Teluk Saumlaki (titik pengamatan MWB 1-MWB 18) adalah 2-7 mg/L (BM coral dan lamun 20 mg/L). C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan Adanya penurunan kualitas air laut yang berupa peningkatan konsentrasi TSS akibat kegiatan pemancangan <i>sheet pile</i> di lokasi pembangunan TUKS yang akan dilakukan pada lokasi akhir jalan penghubung dan dasar perairan yang telah dikeruk dengan waktu relatif singkat. D. Intensitas perhatian masyarakat Hasil konsultasi publik, tidak ada intensitas perhatian masyarakat terhadap dampak lingkungan berupa penurunan kualitas air dengan peningkatan konsentrasi TSS akibat kegiatan pemancangan <i>sheet pile</i> yang akan dilakukan pada lokasi akhir jalan penghubung dan dasar perairan untuk pembangunan TUKS. E. Kesimpulan Berdasarkan penjeian di atas, dengan demikian rencana usaha dan/atau kegiatan pemancangan <i>sheet pile</i> yang akan dilakukan pada lokasi akhir jalan penghubung dan dasar perairan yang telah dikeruk diidentifikasi sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) dan tidak dikaji dalam Andal RKL dan RPL.			
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus terhadap gangguan benthos. Gangguan terhadap benthos merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Namun demikian perubahan benthos akan dipantau.	Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan Terhadap Benthos	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan TUKS akan melakukan kegiatan pemancangan <i>sheet pile</i> yang akan dilakukan pada lokasi akhir jalan penghubung dan dasar perairan yang telah dikeruk. B. Kondisi rona lingkungan Berdasarkan data rona lingkungan yang diambil dari hasil survei rona pada musim kemarau (2019) dan musim hujan (2020) di perairan Teluk Saumlaki, konsentrasi TSS berkisar antara 2 – 7 mg/L. Konsentrasi TSS di area pengerukan TUKS pionir dan TUKS utama berkisar antara 2-5 mg/L. Konsentrasi TSS di sekitar area. C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan Dampak turunan gangguan terhadap biota perairan adanya penurunan kualitas air laut yang berupa adanya konsentrasi TSS akibat kegiatan pemancangan <i>sheet pile</i> di lokasi pembangunan TUKS yang akan dilakukan pada lokasi akhir jalan penghubung dan dasar perairan yang telah dikeruk dengan waktu relatif singkat. D. Intensitas perhatian masyarakat	Disimpulkan sebagai DPH	Gangguan terhadap benthos akan terjadi pada segmen dimana kegiatan pembangunan TUKS berlangsung.	Pembangunan jalan lintasan (<i>Causeway</i>) ke TUKS serta pembangunan TUKS akan berlangsung selama 2 tahun, sehingga batas waktu kajian adalah 2 tahun. Panjang <i>Causeway</i> sekitar 1.8 km, Gangguan terhadap benthos akan terjadi pada segmen dimana kegiatan

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Hasil konsultasi publik adanya intensitas perhatian masyarakat terhadap dampak lingkungan berupa penurunan kualitas air adanya konsentrasi TSS akibat terganggunya biota perairan dari kegiatan pemancangan <i>sheet pile</i> yang akan dilakukan pada lokasi akhir jalan penghubung dan dasar perairan area TUKS. E. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas dengan demikian rencana usaha dan/atau kegiatan pemancangan <i>sheet pile</i> yang akan dilakukan pada lokasi akhir jalan penghubung dan dasar perairan yang telah dikeruk di area TUKS diidentifikasi sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH), dikaji dalam Andal RKL dan RPL.			berlangsung (diperkirakan 20-30 m per minggu, seluruh benthos pada segmen tersebut akan hilang.. Demikian juga pada lokasi lokasi tiang pancang di setiap TUKS yang dibangun .
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus terhadap gangguan terumbu karang. Gangguan terhadap terumbu karang merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Namun demikian perubahan habitat terumbu karang akan dipantau, serta akan dilakukan penanam kembali terumbu karang pada lokasi yang sesuai (<i>offset</i>)		Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan TUKS akan melakukan kegiatan pemancangan <i>sheet pile</i> yang akan dilakukan pada lokasi akhir jalan penghubung dan dasar perairan yang telah dikeruk. B. Kondisi Rona Lingkungan Luasan substrat di sekitar Pulau Nustual yang merupakan area TUKS-LNG & Kondensat dan TUKS-MOF didominasi oleh karang mati/<i>rubble</i> sebesar 36,83%, sedangkan substrat lainnya adalah Andal Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya, Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku III-368 karang hidup 21,27%, pasir 32,90%, dan lamun 9,00%. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Terganggunya ekosistem terumbu karang akibat pemancangan <i>sheet pile</i>. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Pada saat konsultasi publik, dampak terhadap ekosistem terumbu karang menjadi perhatian masyarakat. E. Kesimpulan Gangguan ekosistem terumbu karang akibat Pembangunan TUKS merupakan Dampak Penting Hipotetik (DPH).	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak gangguan terhadap terumbu karang akan terjadi terbatas pada lokasi-lokasi pemancangan <i>sheet pile</i> TUKS, dengan luas total sekitar 6,4 ha.	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda. Lebih kurang 2 tahun selama masa konstruksi berlangsung.. Gangguan terhadap terumbu karang bersifat jangka panjang dan memerlukan skema <i>offset</i> .
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus terhadap padang lamun/rumput laut dan gangguan terhadap padang lamun/rumput laut merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Namun demikian perubahan habitat padang lamun/akan dipantau.		Gangguan Terhadap Padang Lamun/ Rumput Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan TUKS akan melakukan kegiatan pemancangan <i>sheet pile</i> yang akan dilakukan pada lokasi akhir jalan penghubung dan dasar perairan yang telah dikeruk. B. Kondisi Rona Lingkungan Terdapat tiga jenis lamun yang ditemukan di area studi yaitu <i>Enhalus acoroides</i>, <i>Thalassia sp.</i> dan <i>Halodule sp.</i> Penutupan lamun di Kepulauan Tanimbar mencapai 60% yang didominasi oleh <i>Thalassia hemprichii</i> 45,88%, <i>Halophila minor</i> 37,10%. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Terganggunya ekosistem lamun akibat pemancangan <i>sheet pile</i>. D. Intensitas Perhatian Masyarakat	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak gangguan terhadap padang lamun akan terjadi terbatas pada lokasi-lokasi pemancangan <i>sheet pile</i> TUKS, dengan	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda. Lebih kurang 2 tahun selama masa konstruksi berlangsung. Gangguan terhadap padang lamun/rumput laut akan segera dapat pulih kembali

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Pada saat konsultasi publik, dampak terhadap ekosistem padang lamun karang menjadi perhatian masyarakat. E. Kesimpulan Gangguan ekosistem padang lamun akibat Pembangunan TUKS merupakan Dampak Penting Hipotetik (DPH).		luas total sekitar 6,4 ha.	dalam beberapa bulan.
		A. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan. B. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan aktivitas di laut. C. Menyiapkan rambu-rambu keselamatan. D. Menyiapkan prosedur standar keselamatan dalam pembangunan TUKS.	Sosial Ekonomi	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas-fasilitas TUKS yang akan dibangun untuk keperluan operasi Kilang OLNK: TUKS pionir, TUKS bongkar muat, dan TUKS pemuatan LNG dan kondensat. B. Kondisi Rona Lingkungan Pada lokasi kegiatan terdapat kegiatan nelayan terutama perikanan tangkap/kapal nelayan dari <i>fishing base</i> menuju dan kembali dari <i>fishing ground</i> ke <i>landing base</i> secara normal. Masyarakat melakukan budidaya rumput laut di sepanjang pantai Lermatang dan Pulau Matakus. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bagian pertama dari TUKS akan dibangun berbentuk struktur masif, dan sisanya berbentuk <i>struktur sheet pile</i> atau <i>open pile</i>. Pembangunan TUKS berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas perikanan. Dengan pertimbangan keselamatan, maka zona eksklusi (<i>exclusion zone</i>) keselamatan akan ditetapkan di sepanjang koridor lokasi pembangunan TUKS pada bagian-bagian yang masih berlangsung. <i>Exclusion zone</i> akan membatasi akses nelayan ke lokasi penangkapan ikan. Namun, luas zona eksklusi di sekitar lokasi pembangunan TUKS yang sedang berlangsung diperkirakan relatif kecil dan akan berpindah dari satu segmen ke segmen lainnya sesuai perkembangan pembangunan TUKS. TUKS direncanakan memiliki ketinggian 20 m di atas muka air surut terendah (LWL), TUKS dengan ketinggian ini akan memungkinkan kapal nelayan untuk lewat di bawah bagian TUKS yang telah selesai dibangun. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Gangguan terhadap kegiatan perikanan akibat pembangunan TUKS merupakan Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
			Sosial Budaya	Kekhawatiran Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas-fasilitas TUKS yang akan dibangun untuk keperluan operasi Kilang OLNK: TUKS pionir, TUKS bongkar muat, dan TUKS pemuatan LNG dan kondensat. B. Kondisi Rona Lingkungan Masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari sebagai nelayan tangkap dan nelayan budidaya tanpa perlu khawatir akan adanya gangguan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembangunan ini termasuk dalam pembangunan TUKS. Hal ini juga akan menimbulkan munculnya kekhawatiran masyarakat.	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini muncul saat konsultasi publik karena merupakan dampak turunan dari dampak lain. E. Kesimpulan Kegiatan pembangunan TUKS berdampak tidak signifikan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kekhawatiran masyarakat tergolong sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) dan perlu dikelola.			
		A. INPEX akan menyusun, mensosialisasikan dan menerapkan manajemen penanganan keluhan kepada masyarakat. B. Menjalinkan komunikasi efektif dengan para <i>stakeholder</i> .		Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas-fasilitas TUKS yang akan dibangun untuk keperluan operasi Kilang OLNK: TUKS pionir, TUKS bongkar muat, dan TUKS pemuatan LNG dan kondensat. B. Kondisi Rona Lingkungan Masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari sebagai nelayan tangkap dan nelayan budidaya tanpa perlu khawatir akan adanya gangguan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pembangunan ini termasuk dalam pembangunan TUKS. Hal ini juga akan menimbulkan munculnya kekhawatiran masyarakat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini muncul saat konsultasi publik karena merupakan dampak turunan dari dampak lain. E. Kesimpulan Harapan dan keluhan masyarakat merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat dan dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
		A. Mematuhi peraturan yang berlaku tentang navigasi (PP No. 5 Tahun 2010). B. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan. C. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan aktivitas di laut. D. Menyiapkan rambu-rambu keselamatan. E. Menyiapkan prosedur standar keselamatan dalam pembangunan TUKS.	Transportasi	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas-fasilitas TUKS yang akan dibangun untuk keperluan operasi Kilang OLNK: TUKS pionir, TUKS bongkar muat, dan TUKS pemuatan LNG dan kondensat. B. Kondisi Rona Lingkungan Pergerakan lalu lintas laut terpantau sebanyak 110 unit didominasi oleh kapal nelayan sebanyak 98 unit, dan kelompok waktu dengan frekuensi terpadat antara jam 03.00 sampai dengan jam 06.00 pagi sebanyak 33 unit kemudian terpadat ke-2 pada jam 06.00 – 09.00 sebanyak 23 unit. Untuk kasus lalu lintas yang melalui selat Nustual, terpantau hanya 5 unit kapal nelayan kecil yaitu pada kelompok waktu 12.00-15.00 sebanyak 2 unit dan 15.00-18.00 sebanyak 3 unit, kemungkinan besar untuk melalui selat tersebut sangat tergantung dengan pasang surut. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dalam pembangunan TUKS akan ada mobilitas kapal untuk mengangkut alat dan bahan yang diperkirakan akan mengganggu lalu lintas laut. Kegiatan berlangsung singkat selama tahap konstruksi berlangsung. D. Intensitas Perhatian Masyarakat	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Hasil konsultasi publik dan hasil wawancara responden menunjukkan bahwa tidak ada kekhawatiran masyarakat akan terjadinya gangguan transportasi laut. Hasil konsultasi publik dan hasil wawancara responden menunjukkan bahwa tidak ada kekhawatiran masyarakat akan terjadinya gangguan transportasi laut. E. Kesimpulan Kegiatan konstruksi TUKS diperkirakan berpotensi terhadap transportasi laut terutama aktivitas nelayan dan transportasi masyarakat. Lokasi rencana TUKS, bukan berada di lokasi pendaratan maupun pencarian ikan nelayan. Sehingga dampak yang ditimbulkan diprediksi tidak signifikan terhadap aktivitas transportasi laut nelayan. Selain itu, INPEX telah menyiapkan pengelolaan dan akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Sehingga gangguan terhadap transportasi laut pada kegiatan pembangunan TUKS akibat konstruksi TUKS di kategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) namun perlu di kelola.			
17.	Konsumsi Bahan Bakar	A. Melakukan pemantauan dan pemeriksaan rutin terhadap mesin-mesin kendaraan dan peralatan yang menggunakan bahan bakar sehingga selalu dalam kondisi optimal B. Pemakaian kendaraan yang lolos uji emisi C. Memastikan semua kendaraan yang digunakan dalam kegiatan mobilisasi alat dan material laik jalan dan memenuhi baku mutu emisi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/3/ 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan kategori O. D. Melakukan monitoring secara rutin terhadap emisi dari knalpot kendaraan dan peralatan-peralatan yang menggunakan bahan bakar.	Kualitas Udara ambien: CO < 100 ug/m³ NO₂ < 5ug/m³ SO₂ < 20-21 ug/m³ O₃ < 20ug/m³ HC K 50 ug/m³ TSP 13,1-77,5 ug/m³ PM10 2,5-72,5 ug/m³ PM2,5 0,9-61,5 ug/m³	Peningkatan Konsentrasi SO₂ dan NOx serta konsentrasi CO	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Konsumsi bahan bakar diesel selama masa konstruksi Kilang OLNG diperkirakan sebesar 3.000 m³/bulan dan total kapasitas penyimpanan sebesar 3.000 m³. B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi rona lingkungan untuk parameter NO₂, dan SO₂ di sekitar OLNG tergolong baik. Kadar SO₂ dan NO₂ maksimum yang terukur di lapangan berada di bawah 50% baku mutu udara ambien menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembakaran bahan bakar fosil dapat menghasilkan sejumlah kecil gas buang dalam bentuk SO₂ dan Nox serta CO. Berdasarkan Pedoman Inventarisasi Emisi Pencemar Udara di Perkotaan (KLHK, 2013), truk yang beroperasi dapat mengemisikan NO₂ 17,7 gram/km dan SO₂ 0,82 gram/km serta CO sebesar 8,4 gram/km. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Peningkatan konsentrasi SO₂ dan NOx serta CO tidak menjadi fokus masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Peningkatan konsentrasi pencemar tersebut diperkirakan masih dapat teratasi secara alami, sehingga dampak yang dihasilkan dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH, namun tetap dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	-	-
		A. Menerapkan rencana pengelolaan gas rumah kaca yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan, regulasi di Indonesia, dan regulasi internasional. B. Memonitor, menghitung, dan melaporkan seluruh emisi gas rumah kaca yang	Gas Rumah Kaca	Peningkatan Emisi CO₂, CH₄ dan N₂O	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Konsumsi bahan bakar diesel selama masa konstruksi Kilang OLNG diperkirakan sebesar 3.000 m³/bulan. B. Kondisi Rona Lingkungan Kontribusi GRK Provinsi Maluku umumnya dan Kabupaten MBD khususnya relatif kecil terhadap beban emisi GRK nasional	Disimpulkan sebagai DTPH	Gas rumah kaca akan menyebar secara horizontal dan vertikal, mula-	Konsumsi bahan bakar sebagai penghasil gas rumah kaca selama masa konstruksi SURF, FPSO, GEP

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		dihasilkan berdasarkan regulasi nasional dan internasional. Memprediksi emisi gas rumah kaca di masa depan untuk mengantisipasi potensi dampak yang dihasilkan di masa depan.			C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembakaran gas untuk penyelesaian sumur dengan proses <i>flaring</i> akan meningkatkan emisi CO ₂ . Namun, proses ini hanya akan dilakukan pada tahap konstruksi dalam jangka waktu pendek sehingga CO ₂ yang dihasilkan secara menyeluruh relatif kecil D. Intensitas Perhatian Masyarakat Intensitas perhatian masyarakat terhadap peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca akibat SURF - Penyelesaian Sumur (<i>Flaring</i>) rendah E. Kesimpulan Oleh karena itu, kegiatan ini termasuk sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).		mula secara regional dan berlanjut secara global, oleh karena itu batas wilayah studi penyebaran gas rumah kaca adalah bersifat global.	dan OLNK. Emisi GRK akan berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda dengan estimasi waktu selama 5 tahun selama konstruksi berlangsung. dan dapat berlanjut ke tahap operasi.
		Membangun tangki bahan bakar yang anti air dilengkapi dengan tanggul sebagai penampungan sekunder (<i>secondary containment</i>) apabila terjadi kebocoran atau ceceran bahan bakar.	Tanah	Peningkatan Konsentrasi <i>Total Petroleum Hydrocarbon</i> (TPH)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Konsumsi bahan bakar diesel selama masa konstruksi Kilang OLNK diperkirakan sebesar 3.000 m ³ /bulan. B. Kondisi Rona Lingkungan Konsentrasi senyawa organik (pestisida dan hidrokarbon) di bawah batas kemampuan ukur alat laboratorium (tidak terdeteksi). Demikian juga untuk Benz(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Pentachlorophenol dan Thallium. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Konsumsi bahan bakar dapat mencemari tanah akibat adanya kebocoran tangki ataupun ceceran bahan bakar yang tidak disengaja. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Pencemaran TPH tanah tidak menjadi fokus masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Konsumsi bahan bakar dapat mencemari tanah akibat adanya kebocoran tangki ataupun ceceran bahan bakar yang tidak disengaja. Namun INPEX telah menyiapkan rencana pengelolaan sejak dini agar apabila terjadi kebocoran dan ceceran bahan bakar tidak mencemari tanah di lokasi tersebut. Dengan demikian, dampak ini dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH), namun pengelolaan dan pemantauannya akan tetap dimasukkan dalam RKL dan RPL.	Disimpulkan sebagai DTPH, namun tetap dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	-	-
		A. Membangun tempat penyimpanan dan pengisian bahan bakar yang dilapisi oleh <i>concrete</i> atau material lainnya yang kedap air dan dilengkapi dengan tanggul. B. Menyusun Rencana Tanggap Darurat Tumpahan Minyak (<i>Oil Spill Contingency Plan</i> : OSCP). Tumpahan minyak diesel yang tidak disengaja mungkin terjadi dari FPSO atau kapal. Rencana tanggap darurat	Kualitas Air Laut	Peningkatan Konsentrasi Minyak dan Lemak (Total Hidrokarbon)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Selama konstruksi Kilang OLNK, bahan bakar diesel diperlukan untuk Pembangkit Listrik Diesel Sementara (<i>Temporary Diesel Generator</i>), peralatan berat, <i>crane</i> , dan kendaraan-kendaraan untuk kegiatan konstruksi. Kebutuhan bahan bakar diesel untuk konstruksi Kilang OLNK akan disimpan dalam Tangki Penyimpanan Diesel Sementara di darat (di lokasi konstruksi) dan di kapal <i>barge</i> . Konsumsi bahan bakar diesel selama masa konstruksi Kilang OLNK diperkirakan sebesar 3.000 m ³ /bulan dan total kapasitas penyimpanan sebesar 3.000 m ³ .	Disimpulkan sebagai DTPH, namun tetap dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		untuk tumpahan bahan bakar akan dijabarkan dalam OSCP.			B. Kondisi rona lingkungan Hasil analisis sampling air laut di <i>nearshore</i> (Teluk Saumlaki) dan di <i>offshore</i> pada musim kemarau (November 2019) dan musim hujan (Maret 2020) nilai minyak lemak masih di bawah batas kemampuan ukur alat laboratorium (tidak terdeteksi) dan di bawah nilai ambang baku mutu yaitu <0,2 mg/L, begitu juga di perairan Maluku Barat Daya (MBD) bahwa konsentrasi minyak dan lemak masih di bawah baku mutu yaitu <0,3 mg/L. C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan Penggunaan bahan bakar yang kurang baik dapat menyebabkan terjadinya kebocoran dan ceceran bahan bakar. Tumpahan bahan bakar tersebut dapat terbawa limpasan air hujan dan terbawa menuju badan air. Tumpahan bahan bakar di atas kapal juga dapat mengalir menuju air laut. Akan tetapi, INPEX telah menyiapkan rencana pengelolaan sejak dini agar apabila terjadi kebocoran dan ceceran bahan bakar tidak mencemari air, diantaranya dengan membangun tempat penyimpanan dan pengisian bahan bakar yang dapat mengantisipasi tumpahan bahan bakar untuk tidak mencemari air permukaan maupun air laut. D. Intensitas perhatian masyarakat Hasil konsultasi publik menunjukkan bahwa tidak ada intensitas perhatian masyarakat terhadap kekhawatiran penurunan kualitas air laut dengan terjadi peningkatan terhadap konsentarsi minyak lemak akibat ceceran minyak dari Diesel Sementara (<i>Temporary Diesel Generator</i>), peralatan berat, <i>crane</i>, dan kendaraan-kendaraan di kegiatan konstruksi, dan tumpahan minyak yang tidak disengaja mungkin terjadi dari FPSO atau kapal. E. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian rencana usaha dan/atau kegiatan penggunaan bahan bakar diesel sementara (<i>Temporary Diesel Generator</i>), peralatan berat, <i>crane</i>, dan kendaraan-kendaraan di kegiatan konstruksi, dan tumpahan minyak yang tidak disengaja mungkin terjadi dari FPSO atau kapal diidentifikasi sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH), namun pengelolaan dan pemantauannya akan tetap dimasukkan dalam RKL dan RPL.			
18.	Pengolahan Limbah: Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, dan Limbah Terkontaminasi)	A. Air Limbah domestik (<i>sewage</i>) akan dikumpulkan dan diolah di Fasilitas Pengolahan Air Limbah <i>sewage</i>, sehingga olahannya yang dibuang ke laut sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Permen LH 19 tahun 2010, Permen LH No 08 tahun 2016 dan Annex IV MARPOL 73/78 tahun 2005. B. Air limbah terkontaminasi minyak (termasuk drainase dek kapal-kapal)	Kualitas Air Laut	Perubahan Konsentrasi Minyak dan Lemak (Total Hidrokarbon), TSS, Klorin Bebas, Sulfida, DO, BOD, COD, TOC, Ortofosfat (PO ₄ -P) dan Nitrat (NO ₃ -N)	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan selama tahap konstruksi adalah total sejumlah 12.611 tenaga kerja, diantaranya sejumlah 10.000 tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi OILNG, untuk FPSO sejumlah 662, SURF sejumlah 929, GEP (<i>onshore</i> dan <i>offshore</i>) sejumlah 750 dan pengeboran sumur gas sejumlah 270 tenaga kerja. Jika diasumsikan bahwa setiap pekerja menghasilkan limbah cair sebanyak 90 liter/hari dan limbah padat 0,4 kg/hari (UNESCO/WHO/UNEP, 1992 <i>Water Quality Assessment</i>), maka 12.622 pekerja akan menghasilkan limbah cair sebanyak ± 1.134 m³/hari dan limbah padat ± 5,04 ton/hari.	Disimpulkan sebagai DTPH, namun tetap dipantau dan dikelola	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		konstruksi di <i>nearshore</i> dan <i>offshore</i>) akan dikumpulkan ditempat pengumpulan sementara dan diolah di <i>oily treament</i>, sehingga olahannya yang dibuang ke laut sesuai ketentuan Permen LH 19 tahun 2010 dan Annex I MARPOL 73/78. C. Air limbah terkontaminasi bahan kimia Non-B3 (termasuk di kapal-kapal konstruksi di <i>nearshore</i> dan <i>offshore</i>) akan dikumpulkan dan diolah <i>contaminated treament</i>, sesuai ketentuan Permen LH 19 tahun 2010 dan Annex I MARPOL 73/78.			Ceceran minyak dan bahan kimia Non-B3 selama tahap konstruksi OLNG akan terbawa limpasan air permukaan. Limbah berminyak dan limbah terkontaminasi bahan kimia Non-B3 akan masuk ke saluran sementara dan air laut Teluk Saumlaki. Hal yang sama juga terjadi pada drainase dek kapal-kapal konstruksi SURF, FPSO, GEP, sehingga dapat mencemari air laut di <i>offshore</i>. B. Kondisi rona lingkungan Berdasarkan data rona lingkungan yang diambil dari hasil survei pada musim kemarau 2019 dan musim hujan 2020, di perairan Teluk Saumlaki dan Maluku Barat Daya (MBD) konsentrasi tertinggi dari parameter-parameter dampak pada air ambient sebagai berikut : • Klorin Bebas : <0,01 mg/L dan tidak ada baku mutu-nya (BM) berdasarkan PP No.22 tahun 2021, Lampiran VIII untuk biota air; • BOD : <2 mg/L, tergolong baik, BM 20 mg/L; • COD : 8 mg/L, tidak ada baku mutu; • TOC : 3,8 mg/L, tidak ada baku mutu; • Ortofosfat : 0,111 m/L, tergolong tinggi, BM 0,015 mg/L; • Nitrat : 0,066 mg/L, tergolong tinggi, BM 0,006 mg/L; • Total Amoniak: <0,02 mg/L, tergolong baik, BM 0,3 mg/L • Sulfida : <0,002 mg/L; tergolong baik, BM 0,01 mg/L; • Minyak dan Lemak: <1 mg/L dan tergolong baik, BM 1 mg/L; • Total Fenol : <0,001 mg/L; tergolong baik, BM 0,002 mg/L; Nilai indeks pencemaran (IP) air laut di Teluk Saumlaki, baik musim kemarau maupun musim hujan pada umumnya tergolong baik (IP<1) dan tercemar ringan (1<IP<5), kecuali di di MWB 1 tercemar sedang (5<IP<10) pada musim hujan karena kekeruhan, nitrat dan ortofosfat yang tinggi, sementara nilai IP di perairan offshore (FPSO) dan pesisir MBD tergolong baik. C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan Pembuangan air limbah (limbah domestik, limbah berminyak, dan limbah terkontaminasi) pada tahap konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan adanya penurunan kualitas air laut berupa peningkatan beberapa parameter yaitu Klorin Bebas, BOD,COD, TOC, Ortofosfat, Nitrat, Ammonia, dan Sulfida. Air limbah yang dihasilkan selama kegiatan konstruksi, pre-<i>Commissioning</i> dan <i>Commissioning</i> Kilang OLNG terutama adalah air limbah domestik yang akan diolah di fasilitas pengolahan air limbah sementara (<i>Temporary Waste Water Treatment Facility</i>). Kapasitas desain fasilitas pengolahan air limbah akan memperhitungkan jumlah maksimum tenaga kerja konstruksi yang akan berada di lokasi kilang OLNG dengan fasilitas pengolahan air limbah sementara adalah sebesar 700 m³/jam, dan kapasitas pengolahan <i>sewage</i> (air limbah domestik) di FPSO adalah sebesar 30 liter/menit dengan			

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					pengolahan mengacu pada sesuai ketentuan Permen LH No. 19 tahun 2010 dan Annex I MARPOL 73/78. D. Intensitas perhatian masyarakat Hasil konsultasi publik tidak ada intensitas perhatian masyarakat terhadap dampak lingkungan berupa penurunan kualitas air akibat pembuangan air limbah (limbah domestik, limbah berminyak, dan limbah terkontaminasi bahan kimia non-B3). E. E. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian rencana usaha dan/atau kegiatan pembuangan air limbah (limbah domestik, limbah berminyak, dan limbah terkontaminasi) pada tahap konstruksi diidentifikasi sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH), namun akan tetap dikelola dan dipantau.			
19.	Pengolahan Limbah: Pengelolaan Air <i>Ballast</i>	INPEX akan mengelola air <i>ballast</i> agar aman terhadap lingkungan dalam kegiatan pengambilan dan pembuangan air sesuai dengan ketentuan MARPOL dan ketentuan MARPOL dan PM No. 29 Tahun 2014.	Biota Pesisir dan Biota Laut	Introduksi Spesies Ekstotik Biota Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan air ballast akan mengikuti ketentuan <i>International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments (Ballast Water Management Convention or BWM Convention)</i> Tahun 2004 oleh IMO (<i>International Maritime Organization</i>) yang mulai berlaku efektif sejak September 2017 yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 132 Tahun 2015 tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Pengendalian Air Ballast dan Sedimen dari Kapal, 2004; Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Pasal 5 dan Pasal 6); Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim (Bagian Kedua, Paragraf 3, Pasal 48-50). B. Kondisi Rona Lingkungan Hasil perikanan seperti teripang, lola, udang, cumi–cumi, kerapu, tenggiri, lobster, kepiting, kima, kakap, sakuda, cakalang dan rumput laut menjadi komoditas bagi kabupaten ini. Kima sudaah dilindungi berdasarkan Permen LHK No. 106 Tahun 2018. Hewan ETP (<i>Endangered, Threatened and Protected</i>) seperti penyu, dugong, pari manta, hiu, lumba–lumba dan paus menjadikan KKT sebagai area mencari makan (<i>feeding area</i>) dan jalur migrasi menuju Australia, Papua dan Samudera Pasifik. Tabel Jenis Hewan <i>Endangered, Threatened, and Protected</i> (ETP) yang diduga memiliki feeding area dan jalur migrasi di perairan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) disajikan pada tabel berikut.	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian																																																			
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)																																																					
					<table><tr><th>No</th><th>Nama Lokal</th><th>Nama Ilmiah</th><th>Status Konservasi (IUCN)</th></tr><tr><td>1</td><td>Penyu hijau</td><td><i>Chelonia mydas</i></td><td>Endangered (Genting)</td></tr><tr><td>2</td><td>Penyu sisik</td><td><i>Eretmochelys imbricata</i></td><td>Critically endangered (Kritis)</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyu lekang</td><td><i>Lepidochelys olivacea</i></td><td>Vulnerable (Rentan)</td></tr><tr><td>4</td><td>Penyu tempayan</td><td><i>Caretta caretta</i></td><td>Vulnerable (Rentan)</td></tr><tr><td>5</td><td>Dugong</td><td><i>Dugong dugon</i></td><td>Vulnerable (Rentan)</td></tr><tr><td>6</td><td>Lumba-lumba hidung botol indopasifik</td><td><i>Tursiops aduncus</i></td><td>Data deficient (Kurang informasi)</td></tr><tr><td>7</td><td>Lumba-lumba hidung botol biasa</td><td><i>Tursiops truncatus</i></td><td>Least concern (Resiko rendah)</td></tr><tr><td>8</td><td>Lumba-lumba spinner</td><td><i>Stenella longirostris</i></td><td>Data deficient (Kurang informasi)</td></tr><tr><td>9</td><td>Lumba-lumba totol</td><td><i>Stenella attenuata</i></td><td>Least concern (Resiko rendah)</td></tr><tr><td>10</td><td>Lumba-lumba bongkok indopasifik</td><td><i>Sousa chinensis</i></td><td>Near threatened (Hampir terancam)</td></tr><tr><td>11</td><td>Paus bridei</td><td><i>Balaenoptera bridei</i></td><td>-</td></tr><tr><td>12</td><td>Pari manta</td><td><i>Mobul birostris</i></td><td>Endangered (Genting)</td></tr></table> Sumber: Khan (2005), EBA WK West Yamdena-Saka Energy (2019) C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembuangan air ballast berpotensi terjadinya introduksi spesies asing yang berpotensi merusak ekosistem setempat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Hasil konsultasi publik menunjukkan tidak menjadi itensitas perhatian masyarakat yang tinggi terhadap dampak lingkungan pembuangan air balast terhadap Introduksi Spesies Ekstotik Biota Laut E. Kesimpulan Pengelolaan air <i>ballast</i> hanya terjadi di dekat area kapal sehingga tidak menimbulkan dampak negatif pada spesies eksotik di laut dan merupakan Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Status Konservasi (IUCN)	1	Penyu hijau	<i>Chelonia mydas</i>	Endangered (Genting)	2	Penyu sisik	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Critically endangered (Kritis)	3	Penyu lekang	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Vulnerable (Rentan)	4	Penyu tempayan	<i>Caretta caretta</i>	Vulnerable (Rentan)	5	Dugong	<i>Dugong dugon</i>	Vulnerable (Rentan)	6	Lumba-lumba hidung botol indopasifik	<i>Tursiops aduncus</i>	Data deficient (Kurang informasi)	7	Lumba-lumba hidung botol biasa	<i>Tursiops truncatus</i>	Least concern (Resiko rendah)	8	Lumba-lumba spinner	<i>Stenella longirostris</i>	Data deficient (Kurang informasi)	9	Lumba-lumba totol	<i>Stenella attenuata</i>	Least concern (Resiko rendah)	10	Lumba-lumba bongkok indopasifik	<i>Sousa chinensis</i>	Near threatened (Hampir terancam)	11	Paus bridei	<i>Balaenoptera bridei</i>	-	12	Pari manta	<i>Mobul birostris</i>	Endangered (Genting)		
No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Status Konservasi (IUCN)																																																								
1	Penyu hijau	<i>Chelonia mydas</i>	Endangered (Genting)																																																								
2	Penyu sisik	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Critically endangered (Kritis)																																																								
3	Penyu lekang	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Vulnerable (Rentan)																																																								
4	Penyu tempayan	<i>Caretta caretta</i>	Vulnerable (Rentan)																																																								
5	Dugong	<i>Dugong dugon</i>	Vulnerable (Rentan)																																																								
6	Lumba-lumba hidung botol indopasifik	<i>Tursiops aduncus</i>	Data deficient (Kurang informasi)																																																								
7	Lumba-lumba hidung botol biasa	<i>Tursiops truncatus</i>	Least concern (Resiko rendah)																																																								
8	Lumba-lumba spinner	<i>Stenella longirostris</i>	Data deficient (Kurang informasi)																																																								
9	Lumba-lumba totol	<i>Stenella attenuata</i>	Least concern (Resiko rendah)																																																								
10	Lumba-lumba bongkok indopasifik	<i>Sousa chinensis</i>	Near threatened (Hampir terancam)																																																								
11	Paus bridei	<i>Balaenoptera bridei</i>	-																																																								
12	Pari manta	<i>Mobul birostris</i>	Endangered (Genting)																																																								
20.	Hydrotest dan Pembuangan Air Hydrotest	A. Tidak ada pengolahan secara khusus air <i>Hydrotest</i> sebelum dibuang ke laut. B. Pembuangan air hidrotest akan dilakukan secara bertahap sehingga tidak menyebabkan penurunan oksigen terlarut (DO) air laut secara mendadak. C. Pembuangan air hidrotest dilakukan pada lokasi bawah permukaan laut sehingga terjadi dispersi secara optimal D. Bahan kimia yang digunakan pada <i>Hydrotest</i> terutama <i>oxygen scavanger</i> sesuai ketentuan yang berlaku dan rekomendasi Kementerian Energi dan Sumber daya	Kualitas Air Laut	Peningkatan Konsentrasi TSS dan DO	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Uji <i>Hydrotest</i> terhadap seluruh jaringan sistem Pipa Gas Ekspor (GEP) dengan volume air yang diperlukan untuk pengujian hidrostatik Pipa Gas Ekspor adalah sekitar 100.000 m³. Selanjutnya volume air untuk pengujian hidrostatik pada tangki -tangki di Kilang O LNG adalah sekitar 85.000 m³. Air yang digunakan untuk uji hidrostatik adalah hasil desalinasi air laut menjadi air tawar. Air bekas uji <i>hydrotest</i> ini mengandung partikel-partikel kotoran dalam pipa dan tangki serta mengandung oksigen yang akibat penggunaan <i>oxygen scavanger</i>. B. Kondisi rona lingkungan Hasil sampling pada musim kemarau (November 2019) dan musim hujan (Maret 2020), nilai TSS di perairan Teluk Saumlaki (<i>Nearshore</i>) berkisar antara 2-7 m/L (Kategori baik dengan TSS<Baku mutu atau <20 mg/L), sedangkan nilai TSS di <i>offshore</i> <2 mg/ L. Sementara itu, hasil sampling pada musim kemarau (November 2019) dan musim hujan (Maret 2020), nilai DO di perairan <i>Nearshore</i> berkisar antara 4-5,85 m/L (Kategori kurang baik dengan DO< Baku Mutu atau <5 mg/L hingga baik dengan DO>5 mg/L), sedangkan nilai DO di titik sampling sekitar FPSO (area pembuangan air <i>Hydrotest</i>) kurang baik (<4 mg/L). C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan	Disimpulkan sebagai DPH (Penurunan konsentrasi DO)	Tidak lebih dari 500 m dari titik pembuangan (pada kedalaman - 3m LAT) dengan dominasi arah persebaran Barat Laut	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda dengan estimasi 1-2 bulan selama <i>Hydrotest</i> berlangsung untuk setiap jaringan pipa yang dilakukan <i>Hydrotest</i> .																																																			

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Air buangan untuk <i>Hydrotest</i> dapat membawa padatan-padatan dari proses <i>Hydrotest</i> itu sendiri. Padatan-padatan ini dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi TSS di area pembuangan air <i>Hydrotest</i>. Air yang digunakan untuk <i>Hydrotest</i> akan langsung dibuang ke laut secara perlahan agar tidak terjadi peningkatan kekeruhan dan terjadinya penurunan konsentrasi DO air laut. mengingat besarnya volume air <i>Hydrotest</i> yang akan dibuang, kandungan <i>oxygen scavanger</i> yang mungkin tersisa dalam air bekas <i>Hydrotest</i> tersebut dapat menyebabkan penurunan DO pada badan air penerima limbah. D. Intensitas perhatian masyarakat Hasil konsultasi publik menunjukan bahwa tidak ada intensitas perhatian masyarakat terhadap kekhawatiran penurunan kualitas air dengan terjadi peningkatan TSS dan penurunan DO akibat limbah kegiatan uji hidrostatik pipa penyalur dan tanki di Kilang OLNG. E. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian rencana usaha dan/atau kegiatan pembuangan air <i>Hydrotest</i> terhadap penurunan kualitas air laut diidentifikasi sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) terhadap TSS, namun Dampak Penting Hipotetik (DPH) terhadap DO dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal.			
21.	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Bahan Habis Terpakai: Oli, Bahan Bakar, Baterai, Majun)	Mengupayakan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebisingan pada malam hari.	Kebisingan	Peningkatan Kebisingan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kebutuhan listrik di FPSO selama kegiatan instalasi berlangsung akan disediakan oleh pembangkit listrik dengan turbin berbahan bakar ganda. Oleh karena bahan bakar gas belum tersedia, maka pengoperasian turbin pembangkit listrik ini akan menggunakan bahan bakar minyak diesel. Daya listrik maksimum di FPSO pada saat instalasi yang dapat disediakan oleh satu turbin pembangkit listrik adalah sebesar 15 MW dengan perkiraan konsumsi bahan bakar minyak diesel sebesar 5,71 ton/jam B. Kondisi Rona Lingkungan Mengacu pada hasil pengukuran kebisingan, tingkat kebisingan di rencana lokasi OLNG berada dalam rentang 45,1 -54,5 dBA pada musim kemarau dan rentang 35,4 – 57,0 dBA pada musim hujan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit listrik tenaga diesel digunakan dalam aktivitas konstruksi. Pembangkit listrik diletakan di di lokasi tapak proyek yang berjarak kurang lebih 2 km dari permukiman terdekat. Penurunan tingkat kebisingan terhadap reseptor bervariasi tergantung pada jarak sumber suara dan karakteristiknya. Suatu sumber suara akan meradiasikan kebisingan secara merata ke seluruh arah dengan tingkat penurunan kebisingan sebesar 6 dB setiap penambahan jarak 100 m dari sumber suara D. Intensitas Perhatian Masyarakat	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Peningkatan kebisingan akibat pengoperasian pembangkit listrik tidak menjadi perhatian masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Dampak dari pengoperasian pembangkit listrik tenaga diesel pada masa konstruksi dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).			
22.	Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam: (1) pengelolaan sampah (sesuai UU No. 18 Tahun 2008); (2) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (sesuai PP No. 81 Tahun 2012).	Air Tanah	Peningkatan Konsentrasi Total Nitrogen, Ortofosfat dan TOC	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan lapangan migas Abadi menimbulkan mobilisasi tenaga kerja untuk pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya akan meningkatkan migrasi penduduk ke wilayah proyek. Diperkirakan sekitar 12.611 tenaga kerja akan datang ke lokasi proyek pada puncak kegiatan konstruksi. Kegiatan konstruksi diperkirakan akan menimbulkan limbah padat domestik pada sebesar 9,458 m³/hari atau 283,748 m³/bulan. Selain itu, Jika diasumsikan bahwa setiap pekerja menghasilkan limbah padat 0,4 kg/hari (UNESCO/WHO/UNEP, 1992 <i>Water Quality Assessment</i>), maka 12.611 pekerja akan menghasilkan limbah padat ± 5.044 kg/hari atau ± 5 ton/hari atau ± 151,3 ton/bulan. Limbah ini berpotensi menyebabkan timbulnya air lindi (<i>leachate</i>) yang dapat mencemari tanah dan kemudian terinfiltrasi sehingga mencemari air tanah. B. Kondisi Rona Lingkungan Konsentrasi TDS air tanah di dalam dan sekitar calon lokasi ONLG (Desa Lermatang dan sekitarnya) hasil pengamatan musim kemarau dan musim hujan tahun 2019 berkisar antara 366-3.010 mg/L (BM 300 mg/L), Nitrat 0,098-1,02 mg/L (BM 20 mg/L), nitrit <<0,001-0,053 mg/L (BM 3 mg/L) serta semua air tanah sudah tercemar fecal dan total coliform. Sementara total nitrogen dan ortofosfat atau total fosfat tidak dipersyaratkan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Tumpukan timbulan limbah padat, terutama sampah domestik dapat menyebabkan timbulnya air lindi (<i>leachate</i>) yang dapat mencemari tanah dan kemudian terinfiltrasi sehingga mencemari air tanah. Infiltrasi air lindi tersebut dapat meningkatkan TDS, Nitrat, dan nitrit pada air tanah. INPEX akan mengelola limbah padat dengan menyediakan dan membangun fasilitas yang dilengkapi dengan pengelolaan air lindi. Air lindi kemudian akan diolah dalam IPAL domestik. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perubahan pola pengolahan dan pembuangan sampah rumah tangga menjadi topik yang muncul saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas dan dengan telah disiapkan rencana pengelolaan limbah padat dan air lindi, maka dampak terhadap air tanah disimpulkan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH), sehingga tidak dikaji dalam Andal.	Disimpulkan sebagai DTPH	-	--

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		Menyediakan fasilitas MCK yang memadai bagi para tenaga kerja selama tahap konstruksi berlangsung.	Kesehatan Masyarakat	Perubahan Sanitasi Lingkungan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan lapangan migas Abadi menimbulkan mobilisasi tenaga kerja untuk pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya akan meningkatkan migrasi penduduk ke wilayah proyek. Diperkirakan sekitar 12.611 tenaga kerja akan datang ke lokasi proyek pada puncak kegiatan konstruksi. B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan data bahwa penyakit yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan, personal hygiene adalah diare. Kondisi sanitasi lingkungan di beberapa desa di Kecamatan Tanimbar masih buruk. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pada puncak tahap konstruksi OLNG akan melibatkan tenaga kerja maksimum sejumlah 10.000 tenaga kerja. Tenaga kerja ini akan bekerja pada lokasi OLNG yang relatif terkonsentrasi pada daerah Lermatang, Bomaki dan Latdalam. Penanganan tenaga kerja sejumlah tersebut memerlukan fasilitas MCK yang memadai, dari kondisi awal bahwa PHBS penduduk masih rendah akan ditambah dengan tenaga kerja non lokal selama tahap konstruksi maka akan mempengaruhi kondisi sanitasi lingkungan sebelumnya. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perubahan sanitasi lingkungan menjadi dampak yang dikhawatirkan masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Penurunan sanitasi lingkungan di lokasi kerja maupun sekitarnya tergolong Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam Andal. Selain itu, kegiatan ini juga termasuk dalam Dampak Primer.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus. Desa-desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Lauran, Desa Kabayat, Desa Ingei, Desa Wowonda.	Batas waktu kajian dampak selama konstruksi berlangsung yaitu 5 tahun, sejak dimulainya kegiatan konstruksi kilang OLNG beserta fasilitas pendukungnya berlangsung,
23.	Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga dari Kegiatan di Lepas Pantai	A. INPEX akan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam: (1) pengelolaan sampah (sesuai UU No 18 Tahun 2008); (2) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (sesuai PP No. 81 Tahun 2012). B. Tidak melakukan pembuangan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di lepas pantai, melainkan akan ditransportasi ke darat dan dikelola lebih lanjut.	Kualitas Air Laut	Perubahan Jumlah Sampah (Benda Terapung), Perubahan Konsentrasi TSS, DO, BOD, COD, TOC, Ortofosfat (PO ₄ -P) dan Nitrat (NO ₃ -N)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan konstruksi di lepas pantai akan menggunakan bahan atau benda padat yang dapat menghasilkan potongan-potongan bahan yang tidak digunakan. Selain itu terdapat limbah padat kemasan, kaleng bekas, dan limbah padat pekerja (sampah rumah tangga dan sejenis, tidak termasuk sampah spesifik) atau limbah padat domestik tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di untuk FPSO adalah 662 orang dan pengeboran sumur gas sejumlah 270 tenaga kerja (total 932 tenaga kerja). Jika diasumsikan bahwa setiap pekerja menghasilkan limbah padat 0,4 kg/hari (UNESCO/WHO/UNEP, 1992 <i>Water Quality Assessment</i>), maka 932 pekerja akan menghasilkan limbah padat ± 373 kg/hari. B. Kondisi Rona Lingkungan. Berdasarkan data rona lingkungan yang diambil dari hasil survei di perairan Laut Arafura (MS-01/MWO-9 hingga MS-09/MWO-1) pada musim hujan	Disimpulkan sebagai DTPH, namun tetap dipantau dan dikelola.	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					2020, nilai parameter-parameter yang potensila terdampak pada kualitas air ambient sebagai berikut : • Benda terapung = Nihil (BM = Nihil); • TSS <2 mg/L (BM Coral 20 mg/L); • DO 4 mg/L (BM >5 mg/L); • BOD 5-6 mg/L (BM 20 mg/L); • TOC dan COD tidak ada data di lepas pantai (<i>offshore</i>) dan juga tidak ada baku mutunya; • Ortofosfat <0,01 mg/L (BM 0,015 mg/L); • Nitrat <0,00 mg/L (BM 0,006 mg/L) C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bahan-bahan konstruksi yang berupa benda padat atau potongan benda padat dapat terlepas ke laut dan menjadi sampah yang terapung. Selanjutnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, terutama sampah domestik yang dihasilkan dari aktivitas konstruksi apabila langsung dibuang ke laut, maka dapat menyebabkan peningkatan TSS, BOD, Ortofosfat dan Nitrat. Peningkatan konsentrasi BOD dan akan seiring dengan penurunan konsentrasi DO. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Hasil konsultasi publik tidak ada intensitas perhatian masyarakat terhadap dampak lingkungan berupa penurunan kualitas air akibat pembuangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga dari kegiatan di lepas pantai. E. Kesimpulan Semua parameter yang berpotensi terkena dampak pembuangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga dari kegiatan konstruksi di lepas pantai tidak menimbulkan dampak yang nyata terhadap lingkungan karena sampah-sampah tersebut sudah disiapkan rencana pengelolaannya sehingga termasuk ke dalam Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH), namun tetap kelola dan dipantau.			
24.	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	A. INPEX akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan. B. Secara berkala akan menginformasikan kepada masyarakat mengenai jumlah kesempatan kerja yang tersedia melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar. C. Melakukan sosialisasi tentang pelepasan tenaga kerja pada seluruh tahap.	Sosial Ekonomi	Hilangnya Kesempatan kerja	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pada akhir kegiatan konstruksi akan dilakukan pelepasan tenaga kerja (PHK). Tenaga kerja konstruksi yang dilepaskan sebanyak 12.611 orang. Namun beberapa diantaranya akan direkrut kembali sebagai tenaga kerja operasi. B. Kondisi Rona Lingkungan Perkembangan tingkat pengangguran di Kabupaten Kepulauan Tanimbar selang periode tahun 2018-2023 cenderung mengalami penurunan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mencapai 62%. Jumlah penduduk yang menganggur pada tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 2.518 orang. Tingkat pengangguran di Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2023 sebesar 2,43%, lebih rendah dibandingkan dengan angka pengangguran di	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur,	Batas waktu kajian dampak 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun yang sama. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pelepasan tenaga kerja pada akhir tahap konstruksi berpotensi dapat meningkatkan pengangguran di desa-desa asal tenaga kerja. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Pelepasan tenaga kerja cukup menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Penerimaan dan pelepasan (mobilisasi dan demobilisasi) tenaga kerja semi-terampil dan terutama tenaga kerja tidak terampil dikelola oleh Kontraktor dan/atau perusahaan pemasok tenaga kerja (<i>labour supplier</i>) akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia (UU No. 13 Tahun 2003, Undang-undang No. 6 tahun 2023, dan PP No. 45 Tahun 2015). Umumnya kontrak perjanjian kerja akan mencakup proses penerimaan dan pemberhentian bagi tenaga kerja yang tidak diperlukan lagi oleh proyek berikut pesangon sesuai ketentuan yang berlaku. Proyek selama tahap konstruksi akan mempekerjakan tenaga kerja tidak terampil dalam jumlah cukup besar, sehingga pelepasan tenaga kerja pada akhir tahap konstruksi berpotensi dapat meningkatkan pengangguran di desa-desa asal tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan pengangguran akibat pelepasan tenaga kerja digolongkan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Kegiatan ini menjadi Dampak Primer terhadap perubahan partisipasi tenaga kerja (peluang kerja).		Desa Lorulun dan Desa Matakus	masing-masing kegiatan selesai untuk demobilisasi tenaga kerja. Perubahan sosial ekonomi masyarakat akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.
				Perubahan Peluang Usaha Lokal	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pada akhir kegiatan konstruksi akan dilakukan pelepasan tenaga kerja (PHK). Tenaga kerja konstruksi yang dilepaskan sebanyak 12.611 orang. Namun beberapa diantaranya akan direkrut kembali sebagai tenaga kerja operasi. B. Kondisi Rona Lingkungan Jumlah usaha/perorangan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tercatat sebanyak 12.649 unit meliputi skala mikro kecil (99,49%) dan skala menengah besar (0,51%). Banyaknya usaha di Kabupaten Maluku Barat Daya tercatat sebanyak 6.461 unit terdiri dari usaha skala mikro kecil (99,47%) dan skala menengah besar (0,53%). Banyaknya usaha mikro di Kecamatan Tanimbar Selatan tercatat 770 unit dan di Kecamatan Wertamrian sebanyak 121 unit usaha yang meliputi bidang perdagangan, hotel, dan restoran. Usaha skala kecil terbanyak adalah usaha perdagangan dan usaha bangunan yang berkembang di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian. Di dua kecamatan, tercatat koperasi yang bergerak pada jenis usaha simpan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian dampak 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing kegiatan selesai untuk demobilisasi tenaga kerja. Perubahan sosial

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					pinjam, bahan bakar minyak (BBM), pertanian, perikanan, waserda, reparasi, dan warnet. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pelepasan tenaga kerja pada tahap konstruksi diperkirakan akan menimbulkan dampak yang penting terhadap penurunan permintaan barang dan jasa di pasar lokal serta pada pemasok lokal untuk kegiatan proyek. Hal ini juga akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan mata pencaharian. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak perubahan peluang berusaha akibat pelepasan tenaga kerja cukup menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Pelepasan tenaga kerja pada tahap konstruksi diperkirakan akan menimbulkan dampak yang penting terhadap penurunan permintaan barang dan jasa di pasar lokal serta pada pemasok lokal untuk kegiatan proyek. Hal ini juga akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan mata pencaharian. Oleh karena itu, potensi dampak pertumbuhan usaha lokal kegiatan ini dikategorikan Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Kegiatan ini memberikan dampak langsung dan tergolong Dampak Primer.			ekonomi masyarakat akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.
				Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pada akhir kegiatan konstruksi akan dilakukan pelepasan tenaga kerja (PHK). Tenaga kerja konstruksi yang dilepaskan sebanyak 12.611 orang. Namun beberapa diantaranya akan direkrut kembali sebagai tenaga kerja operasi. B. Kondisi Rona Lingkungan Nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.945.953,-/bulan. Berdasarkan hasil survei, 34,5 % responden di wilayah studi memiliki pengeluaran sebesar Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 2.400.664,- /bulan dan 33% responden di wilayah studi berada pada kelompok pengeluaran kurang dari Rp 1.000.000,- /bulan. Sisanya berada pada kelompok pengeluaran antara Rp 2.400.644,- sampai lebih dari Rp 4.000.000,-. /bulan Rata-rata pengeluaran rutin rumah tangga masyarakat adalah Rp 2.411.866,- /bulan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Sekitar Kegiatan lain di sekitar adalah budidaya pertanian, nelayan, peternakan, perdagangan dan jasa. Tenaga kerja yang dilepas diperkirakan akan kembali menjalankan profesi sebelumnya. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak perubahan pendapatan akibat pelepasan tenaga kerja cukup menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian dampak 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing kegiatan selesai untuk demobilisasi tenaga kerja. Perubahan sosial ekonomi masyarakat akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Pelepasan tenaga kerja berpotensi secara signifikan mempengaruhi pendapatan masyarakat setempat, oleh karena itu dampak pelepasan tenaga kerja terhadap perubahan tingkat pendapatan masyarakat digolongkan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Dampak ini termasuk dalam Dampak Turunan dari kegiatan perubahan partisipasi tenaga kerja (peluang kerja) dan perubahan peluang usaha.			proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.
			Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pada akhir kegiatan konstruksi akan dilakukan pelepasan tenaga kerja (PHK). Tenaga kerja konstruksi yang dilepaskan sebanyak 12.611 orang. Namun beberapa diantaranya akan direkrut kembali sebagai tenaga kerja operasi. B. Kondisi Rona Lingkungan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku mayoritas bermatapencaharian sebagai petani dan nelayan. Jumlah rumah tangga pertanian di Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah ± 14.244 rumah tangga, sedangkan di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah ± 11.032 rumah tangga. jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kecamatan Tanimbar Selatan sebanyak 703 rumah tangga dan di Kecamatan Wertamrian sebanyak 181 rumah tangga. Sedangkan jumlah rumah tangga perikanan budidaya di Kecamatan Tanimbar Selatan sebanyak 199 rumah tangga. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 2.534 rumah tangga. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan lain di sekitar adalah budidaya pertanian, nelayan, peternakan, perdagangan dan jasa. Pelepasan tenaga kerja pada akhir kegiatan akan mencari sumber mata pencaharian lain, termasuk bagi mereka yang memilih untuk kembali ke tempat asalnya dan mencari mata pencaharian di kampung atau mungkin juga akan membuka peluang bisnis baru dengan keterampilan tambahan dan keahlian yang mereka dapat saat bekerja di proyek tersebut. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak perubahan pola mata pencaharian akibat pelepasan tenaga kerja cukup menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Perubahan pola mata pencaharian dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Dampak ini termasuk dalam Dampak Turunan dari kegiatan perubahan kesempatan dan perubahan peluang usaha.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian dampak 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing kegiatan selesai untuk demobilisasi tenaga kerja. Perubahan sosial ekonomi masyarakat akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya. Dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.	

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
				Perubahan Terhadap Keberadaan Fasilitas Umum dan Sosial	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pada akhir kegiatan konstruksi akan dilakukan pelepasan tenaga kerja (PHK). Tenaga kerja konstruksi yang dilepaskan sebanyak 12.611 orang. Namun beberapa diantaranya akan direkrut kembali sebagai tenaga kerja operasi. B. Kondisi Rona Lingkungan Fasilitas umum yang terdapat di desa terdampak antara lain pasar sebanyak 18 unit, warung kelontong 15 unit, Puskesmas Pembantu 4 unit, fasilitas pendidikan 22 unit C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pelepasan tenaga kerja pada proyek pada tahap konstruksi adalah sebanyak 12.611 tenaga kerja. Pelepasan tenaga kerja yang cukup tinggi akan berdampak pada penurunan kebutuhan sarana dan prasarana sosial kehidupan tenaga kerja. <i>Camp</i> dan fasilitas pendukung untuk tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja proyek selama konstruksi telah disediakan oleh proyek itu sendiri. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perubahan terhadap keberadaan fasilitas umum dan sosial akibat pelepasan tenaga kerja tidak menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Pelepasan tenaga kerja pada proyek pada tahap konstruksi adalah sebanyak 12.611 tenaga kerja. Pelepasan tenaga kerja yang cukup tinggi akan berdampak pada penurunan kebutuhan sarana dan prasarana sosial kehidupan tenaga kerja. <i>Camp</i> dan fasilitas pendukung untuk tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja proyek selama konstruksi telah disediakan oleh proyek itu sendiri. Oleh karena itu, pelepasan tenaga kerja tahap konstruksi diperkirakan bersifat Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) pada perubahan terhadap keberadaan fasilitas umum dan sosial.	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
			Sosial Budaya	Kekhawatiran Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pada akhir kegiatan konstruksi akan dilakukan pelepasan tenaga kerja (PHK). Tenaga kerja konstruksi yang dilepaskan sebanyak 12.611 orang. Namun beberapa diantaranya akan direkrut kembali sebagai tenaga kerja operasi. B. Kondisi Rona Lingkungan Tidak ada kekhawatiran masyarakat akibat perubahan pola mata pencaharian masyarakat. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pada saat puncak konstruksi proyek, tenaga kerja yang dipekerjakan oleh proyek diperkirakan maksimum sejumlah 12.611. Sebagian besar tenaga kerja adalah tenaga kerja semi-terampil dan/atau tenaga kerja tidak terampil. Pelepasan tenaga kerja oleh kontraktor dan/atau perusahaan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur,	Batas waktu kajian dampak berlangsung 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					pemasok tenaga kerja berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat di sekitar proyek, seperti penghematan secara langsung akan mempengaruhi pendapatan mereka. INPEX tidak dapat memenuhi semua harapan tenaga kerja yang dilepas dan dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Kekhawatiran akibat pelepasan tenaga kerja konstruksi menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Kekhawatiran masyarakat akibat pelepasan tenaga kerja di kategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Kekhawatiran masyarakat muncul akibat dari Dampak Turunan dari Perubahan kesempatan kerja, Perubahan peluang usaha lokal, perubahan tingkat pendapatan dan perubahan pola mata pencaharian masyarakat.		Desa Lorulun dan Desa Matakus	konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing kegiatan selesai untuk pelepasan tenaga kerja. Perubahan sosial budaya akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya serta Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.
		A. Menyusun dan melaksanakan manajemen penanganan keluhan. B. Menjalinkan komunikasi efektif dengan para <i>stakeholder</i>.		Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pada akhir kegiatan konstruksi akan dilakukan pelepasan tenaga kerja (PHK). Tenaga kerja konstruksi yang dilepaskan sebanyak 12.611 orang. Namun beberapa diantaranya akan direkrut kembali sebagai tenaga kerja operasi. B. Kondisi Rona Lingkungan Keluhan masyarakat diperkirakan akan muncul karena kekhawatiran masyarakat akan penurunan tarap hidup dikarenakan hilangnya kesempatan kerja, menurunnya bahkan tutupnya peluang usaha lokal, gangguan terhadap kegiatan perikanan, dan berkurangnya aksesibilitas akibat gangguan terhadap transportasi darat. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pelepasan tenaga kerja konstruksi akan menimbulkan harapan dan keluhan karena INPEX tidak dapat memenuhi semua keinginan yang muncul. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini cukup menjadi perhatian saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat yang bersifat dampak penting hipotetik. Sehingga dampak pelepasan tenaga kerja konstruksi dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik dan akan dikaji lebih lanjut pada Andal.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Batas waktu kajian dampak berlangsung 6 bulan pertama pada saat dimulainya kegiatan konstruksi SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk TUKS), selama kurang lebih 5 tahun pada saat pekerjaan konstruksi dan 6 bulan sesudah masing-masing kegiatan selesai untuk pelepasan tenaga kerja. Perubahan sosial budaya akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
								di sekitarnya serta Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.
C. Tahap Operasi								
1.	Penerimaan Tenaga Kerja Operasi	A. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan ketenagakerjaan. B. Mendukung dan mempertimbangkan untuk mempekerjakan tenaga kerja setempat sesuai kebutuhan proyek dan untuk memenuhi spesifikasi dan kualifikasi yang diprasyaratkan. C. Secara berkala akan menginformasikan kepada masyarakat mengenai jumlah kesempatan kerja yang tersedia melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar. D. Secara berkala akan melakukan sosialisasi kesempatan kerja kepada Kepala Desa dan Camat secara terbuka dan transparan.	Sosial Ekonomi	Kesempatan kerja	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kebutuhan tenaga kerja pada tahap operasi untuk berbagai peran, termasuk teknisi ahli, manajer operasional, mekanik, staf pemeliharaan, petugas keamanan, dan staf umum. Akan ada tenaga kerja permanen maupun paruh waktu. Tenaga kerja tidak terampil (buruh) yang akan dipekerjakan saat masa operasi diperkirakan tidak akan sebanyak saat pra-konstruksi dan konstruksi. Pada saat puncak kegiatan, diperkirakan sekitar 850 orang tenaga kerja dibutuhkan untuk kegiatan operasi Kilang OLNG (636 orang) dan Fasilitas Pendukungnya (214 orang). Kebutuhan tenaga kerja akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya. B. Kondisi Rona Lingkungan Jumlah tenaga kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 58.488 orang dengan tingkat pengangguran 4,31%. Sedangkan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 37.756 orang dengan tingkat pengangguran 1,79%. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan perekrutan tenaga kerja akan menurunkan Tingkat pengangguran dan meningkatkan peluang kerja. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perhatian masyarakat atas dampak kesempatan kerja akibat penerimaan tenaga kerja operasi sangat tinggi saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Kegiatan perekrutan tenaga kerja akan menurunkan Tingkat pengangguran dan meningkatkan peluang kerja. Oleh karena itu, perubahan partisipasi tenaga kerja akibat penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja digolongkan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus KKT, Serta desa-desa di P Babar, P Masela, P Luang, P Lakor, P Moa, P Leti Kab MBD	Batas waktu kajian dampak adalah 5 tahun. Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja operasi merupakan kegiatan lanjutan dari tahap pelepasan tenaga kerja konstruksi. Jumlah tenaga kerja pada tahap operasi jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan pada tahap konstruksi.
		A. Menyediakan beasiswa pendidikan perguruan tinggi untuk siswa sekolah menengah atas yang terpilih sebagai kandidat potensial untuk dipekerjakan oleh Proyek. B. Menginformasikan jumlah peluang kerja kepada masyarakat secara transparan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan		Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kebutuhan tenaga kerja pada tahap operasi untuk berbagai peran, termasuk teknisi ahli, manajer operasional, mekanik, staf pemeliharaan, petugas keamanan, dan staf umum. Akan ada tenaga kerja permanen maupun paruh waktu. Tenaga kerja tidak terampil (buruh) yang akan dipekerjakan saat masa operasi diperkirakan tidak akan sebanyak saat pra-konstruksi dan konstruksi. Pada saat puncak kegiatan, diperkirakan sekitar 850 orang tenaga kerja dibutuhkan untuk kegiatan operasi Kilang OLNG (636 orang)	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa	Batas waktu kajian dampak adalah 5 tahun. Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja operasi merupakan kegiatan lanjutan dari tahap pelepasan tenaga

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar. C. Melakukan sosialisasi kesempatan kerja secara berkala Kepala Desa (Lurah) dan Camat secara terbuka dan transparan.			dan Fasilitas Pendukungnya (214 orang). Kebutuhan tenaga kerja akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya. B. Kondisi Rona Lingkungan Pendapatan rata-rata masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar Rp 2.686.125,- per bulan dan pendapatan rata-rata masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp 2.412.124,- per bulan .Perubahan. Jenis lapangan pekerjaan utama lainnya yaitu dalam sektor jasa (rumah makan, perdagangan, dan lain-lain) sebanyak 14.056 orang. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perubahan tingkat pendapatan masyarakat merupakan dampak turunan dari peningkatan peluang kerja (lihat penjelasan di atas) oleh tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada tahap operasi. Adanya penerimaan tenaga kerja operasi berpotensi memberikan dampak terhadap pendapatan Masyarakat, baik Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun Kabupaten Maluku Barat Daya. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perhatian masyarakat atas dampak perubahan tingkat pendapatan masyarakat akibat penerimaan tenaga kerja operasi sangat tinggi saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Adanya penerimaan tenaga kerja operasi berpotensi memberikan dampak terhadap pendapatan Masyarakat, baik Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun Kabupaten Maluku Barat Daya. Pendapatan rata-rata masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar Rp 2.686.125,- per bulan dan pendapatan rata-rata masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp 2.412.124,- per bulan. Jenis lapangan pekerjaan utama lainnya yaitu dalam sektor jasa (rumah makan, perdagangan, dan lain-lain) sebanyak 14.056 orang. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini digolongkan dalam kategori Dampak Turunan dari perubahan partisipasi tenaga kerja (peluang kerja).		Lauran, Desa Kabyarat, Desa Ingei, Desa Wowonda KKT, Serta desa- desa di P Babar, P Masela, P Luang, P Lakor, P Moa, P Leti Kab. MBD.	kerja konstruksi. Jumlah tenaga kerja pada tahap operasi jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan pada tahap konstruksi.
		A. Menginformasikan jumlah peluang kerja kepada masyarakat secara transparan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar. B. Melakukan sosialisasi kesempatan kerja secara berkala Kepala Desa (Lurah) dan Camat secara terbuka dan transparan.			A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kebutuhan tenaga kerja pada tahap operasi untuk berbagai peran, termasuk teknisi ahli, manajer operasional, mekanik, staf pemeliharaan, petugas keamanan, dan staf umum. Akan ada tenaga kerja permanen maupun paruh waktu. Tenaga kerja tidak terampil (buruh) yang akan dipekerjakan saat masa operasi diperkirakan tidak akan sebanyak saat pra-konstruksi dan konstruksi. Pada saat puncak kegiatan, diperkirakan sekitar 850 orang tenaga kerja dibutuhkan untuk kegiatan operasi Kilang OLNG (636 orang) dan Fasilitas Pendukungnya (214 orang). Kebutuhan tenaga kerja akan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang	Sebagai dampak turunan dari: Timbulnya kebisingan dan gangguan terhadap kegiatan perikanan oleh transportasi peralatan dan bahan melalui laut. Perubahan partisipasi tenaga

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya. B. Kondisi Rona Lingkungan Tidak ada kekhawatiran masyarakat yang timbul dari adanya kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja operasi. Terdapat 28% responden yang berharap adanya peningkatan kesempatan kerja. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Walaupun penerimaan tenaga kerja pada tahap operasi terbatas, akan tetapi hal ini tetap akan memicu ekspektasi yang tinggi dari masyarakat untuk dipekerjakan. Apabila INPEX tidak bisa memenuhi ekspektasi pencari kerja yang berasal dari daerah di sekitar wilayah dampak, hal ini akan menimbulkan kecemburuan dan kekhawatiran di antara masyarakat yang masih mencari kerja – dan pada kasus tertentu dapat memicu ketidakharmonisan antara satu desa dengan desa lainnya terkait akses kepada peluang kerja. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perhatian masyarakat atas dampak kekhawatiran masyarakat akibat penerimaan tenaga kerja operasi sangat tinggi saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Apabila INPEX tidak dapat memenuhi ekspektasi pencari kerja berasal dari area di sekitar wilayah dampak proyek, hal ini akan menimbulkan kecemburuan dan kekhawatiran di antara masyarakat pencari kerja, sehingga kekhawatiran masyarakat tergolong sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan di kaji lebih lanjut dalam Andal. Kekhawatiran masyarakat ini muncul sebagai Dampak Turunan dari: Perubahan partisipasi tenaga kerja (peluang kerja); dan perubahan tingkat pendapatan masyarakat.		Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus KKT, serta desa-desa di P Babar, P Masela, P Luang, P Lakor, P Moa, P Leti Kab. MBD.	kerja operasi dan tingkat pendapatan masyarakat oleh penerimaan tenaga kerja operasi. Batas waktu kajian dampak 5 tahun
		A. INPEX akan menyusun, mensosialisasikan dan menerapkan manajemen penanganan keluhan kepada masyarakat. B. Menjalinkan komunikasi efektif dengan para <i>stakeholder</i>.		Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kebutuhan tenaga kerja pada tahap operasi untuk berbagai peran, termasuk teknisi ahli, manajer operasional, mekanik, staf pemeliharaan, petugas keamanan, dan staf umum. Akan ada tenaga kerja permanen maupun paruh waktu. Tenaga kerja tidak terampil (buruh) yang akan dipekerjakan saat masa operasi diperkirakan tidak akan sebanyak saat pra-konstruksi dan konstruksi. Pada saat puncak kegiatan, diperkirakan sekitar 850 orang tenaga kerja dibutuhkan untuk kegiatan operasi Kilang OLNG (636 orang) dan Fasilitas Pendukungnya (214 orang). Kebutuhan tenaga kerja akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya. B. Kondisi Rona Lingkungan Masyarakat tidak memiliki kekhawatiran akan adanya proyek sehingga tidak ada harapan dan keluhan masyarakat terkait dengan kegiatan Kilang OLNG.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Lauran, Desa Kabyarat, Desa Ingei, Desa Wowonda, serta Pulau Selaru dan pulau-pulau	Sebagai dampak turunan dari: Timbulnya kebisingan dan gangguan terhadap kegiatan perikanan oleh transportasi peralatan dan bahan melalui laut. Perubahan partisipasi tenaga kerja operasi dan tingkat pendapatan masyarakat oleh penerimaan tenaga kerja operasi.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Masyarakat menjadi berharap dengan adanya kegiatan Kilang OLNG dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar. Namun jika kegiatan pada saat tahap operasi menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat sekitar maka akan timbulnya keluhan masyarakat terkait dengan kegiatan Kilang OLNG. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perhatian masyarakat atas dampak harapan dan keluhan masyarakat akibat penerimaan tenaga kerja operasi sangat tinggi saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Merupakan dampak turunan dari kekhawatiran masyarakat, sehingga harapan dan keluhan masyarakat tergolong sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan di kaji lebih lanjut dalam Andal.		kecil di Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu; pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Lakor, Pulau Moa, Pulau Leti dan sekitarnya	Batas waktu kajian dampak 5 tahun
2.	Mobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja Menggunakan Jalur Laut serta Jalur Darat	Melaksanakan rekomendasi manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas sesuai dokumen alur pelayaran yang telah disetujui.	Kebisingan	Peningkatan Kebisingan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peralatan atau bahan-bahan keperluan operasi akan diangkut ke lokasi FPSO dan OLNG dengan tongkang atau kapal dan diangkut di lepas pantai oleh kapal instalasi yang dipilih. B. Kondisi Rona Lingkungan Area lokasi rencana FPSO, tingkat kebisingan tidak diukur karena lokasi tersebut berada di tengah lautan dengan jarak sekitar 167,26 Km ke lokasi OLNG di darat C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Mobilisasi menggunakan transportasi laut menimbulkan gangguan kebisingan yang bersumber dari suara mesin kapal yang digunakan D. Intensitas Perhatian Masyarakat Peningkatan kebisingan tidak menjadi perhatian masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Mobilisasi menggunakan transportasi laut menimbulkan gangguan kebisingan yang bersumber dari suara mesin kapal yang digunakan. Aktivitas mobilisasi dengan transportasi laut berjarak jauh dari aktivitas penduduk sehingga tidak menimbulkan gangguan. Kegiatan ini tergolong dalam Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus gangguan terhadap mamalia laut. Gangguan terhadap mamalia laut merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>) dari kegiatan.	Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan Terhadap Mamalia Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peralatan atau bahan-bahan keperluan operasi akan diangkut ke lokasi FPSO dan OLNG dengan tongkang atau kapal dan diangkut di lepas pantai oleh kapal instalasi yang dipilih. Ketika peralatan difabrikasi atau bahan-bahan dikirim dari lokasi yang jauh dari TUKS atau pelabuhan umum, diasumsikan bahwa peralatan atau bahan-bahan tersebut akan diangkut dengan kapal pasokan atau HLV, tergantung pada ukuran atau berat peralatan dan bahan serta lokasi fabrikasi peralatan atau penyedia bahan. Frekuensi pergerakan lalu lintas kapal akan lebih tinggi selama kegiatan konstruksi dibanding pada tahap operasi. Pergerakan kapal untuk	Disimpulkan sebagai DPH	Sebaran dampak sebagai batas ekologi menyebar sangat luas dari lokasi TUKS di Teluk Saumlaki hingga FPSO di	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak selama 5 tahun.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					keperluan proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi akan melalui koridor lalu lintas laut yang telah ditentukan. Lalu lintas dan kedatangan kapal juga akan dijadwalkan untuk memastikan proses operasi yang efisien dan menghindari kepadatan lalu lintas kapal di perairan Teluk Saumlaki. B. Kondisi Rona Lingkungan Untuk data rona lingkungan kebisingan bawah laut alami di lokasi studi tidak tersedia. Menurut Veeriyen and Rajendran, nilai kebisingan alami di bawah laut berkisar antara 60 – 90 dB re 1 µPa dalam rentang 10-100 Hz. Keberadaan mamalia laut berdasarkan data rona yang dikumpulkan pada tahun 2012, 2013, 2019 dan 2020 dijumpai 13 jenis mamalia laut yang terdiri dari kelompok paus sebanyak 8 jenis, kelompok lumba-lumba 4 jenis, dan 1 jenis kelompok sirenia yang dijumpai di sekitar lokasi kajian. 13 Jenis mamalia laut yang dijumpai di lokasi studi termasuk dalam rentang suara <i>high frequency</i>, <i>low frequency</i> dan <i>sirenians frequency</i>, sehingga diketahui rentang nilai TTS (<i>Temporary Threshold Shifts</i>/Ambang Batas Kebisingan Sementara) terendah sebesar 213 dB re 1 µPa dan nilai PTS (<i>Permanent Threshold Shifts</i>/Ambang Batas Kebisingan Permanen) terendah sebesar 219 dB re 1 µPa. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dengan adanya kegiatan transportasi Peralatan dan Bahan Melalui Laut selama tahap operasi menurut Martin et al, 2021 akan meningkatkan kebisingan bawah laut alami sebesar 192 dB re 1 µPa yang menyebabkan gangguan terhadap mamalia laut. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Berdasarkan hasil konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan yang sudah dilakukan, gangguan terhadap mamalia laut akibat Peningkatan kebisingan bawah laut akibat Transportasi Peralatan dan Bahan Melalui Laut tahap operasi tidak menjadi perhatian yang tinggi dari masyarakat. E. Kesimpulan <i>Vessels transiting (offset, supply, research, monitoring)</i> dari kegiatan mobilisasi tenaga kerja, peralatan, dan bahan yang menggunakan transportasi laut pada tahap operasi akan meningkatkan nilai kebisingan bawah laut yang menyebabkan gangguan terhadap mamalia laut yang bersifat sementara maupun permanen serta gangguan terhadap mamalia laut merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>) dari kegiatan tersebut. Maka gangguan terhadap mamalia laut yang berasal dari kegiatan Mobilisasi Tenaga Kerja, Peralatan, dan Bahan menggunakan Transportasi Laut selama tahap operasi menjadi Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal.		laut lepas Arafura	
		A. Menginformasikan tentang transportasi peralatan dan bahan kepada Kantor Syahbandar Kabupaten secara berkala.	Sosial Ekonomi	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		Mematuhi peraturan yang berlaku terkait navigasi (PP No. 5 Tahun 2010).			Peralatan atau bahan-bahan keperluan operasi akan diangkut ke lokasi FPSO dan OLNK dengan tongkang atau kapal dan diangkut di lepas pantai oleh kapal instalasi yang dipilih. B. Kondisi Rona Lingkungan Kegiatan perikanan utamanya adalah perahu penangkap ikan yang menuju maupun kembali dari <i>fishing ground</i>, berlangsung secara normal mengikuti alur yang biasa dilaluinya dan juga termasuk melalui areal pengerukan yang akan menjadi rencana proyek. Pembudidaya rumput laut dan pencari teripang dan ikan karang di lokasi TUKS berlangsung secara normal. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Transportasi peralatan dan bahan melalui laut pada tahap operasi diperkirakan menggunakan kapal suplai, diperkirakan akan terdapat pergerakan tongkang sekitar 2 – 3 unit per hari (termasuk transportasi bahan). Namun demikian oleh karena transportasi peralatan dan bahan akan berlangsung secara kontinu dan ada kemungkinan terjadinya penumpukan sejumlah tongkang alat dan bahan yang menunggu proses bongkar-muat di TUKS, maka akan berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas laut terutama bagi kapal atau perahu nelayan serta pelayaran lainnya. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Transportasi peralatan dan bahan melalui laut pada tahap operasi diperkirakan menggunakan kapal suplai. Frekuensi mobilisasi tongkang dan kapal tersebut relatif rendah, namun demikian akan sedikit berdampak pada kegiatan perikanan sehingga dampak ini dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam Andal. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini digolongkan dalam kategori Dampak Primer.		akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak selama 5 tahun.
		A. Mematuhi peraturan yang berlaku tentang navigasi (PP No. 5 Tahun 2010). B. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan. C. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan aktivitas di laut. D. Menyiapkan rambu-rambu keselamatan pelayaran. E. Menyiapkan prosedur standar keselamatan pelayaran.	Transportasi	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Mayoritas transportasi alat dan bahan pada tahap operasi akan menggunakan transportasi laut. Proyek membangun TUKS sendiri untuk kebutuhan ONLG. Peningkatan volume tongkang di laut akan berdampak pada aktivitas nelayan. Volume tongkang per hari sekitar 2-3 unit per hari (termasuk transportasi bahan). B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan data total call dapat dipastikan jumlah bangkitan lalu lintas kapal menggunakan alur pelayaran Teluk Dalam selama bulan Oktober 2019 sebanyak 288 tiba dan berangkat, ini berarti bahwa setiap hari rata-rata terdapat 9 unit kapal yang melakukan tiba dan berangkat. Data kedatangan dan keberangkatan terutama kapal-kapal dalam negeri dapat di kelompokkan berdasarkan kelompok waktu, didapatkan waktu-waktu dengan frekuensi tertinggi lalu lintas laut. Waktu frekuensi tertinggi	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					saat kedatangan adalah pada kelompok waktu 06.00 – 09.00 yang dilakukan oleh kapal-kapal Nusantara dengan frekuensi sebanyak 26 unit dan kapal-kapal Perla dengan frekuensi sebanyak 28 unit sehingga total frekuensi 54 unit, sedangkan waktu dengan frekuensi tertinggi saat keberangkatan adalah di kelompok waktu 15.00 – 18.00 yang dilakukan berturut-turut oleh Kapal-kapal Nusantara 20 unit, Perintis 11 unit, dan Pertamina 4 sehingga total frekuensi keberangkatan 35 unit. Pergerakan lalu lintas laut terpantau sebanyak 110 unit didominasi oleh kapal nelayan sebanyak 98 unit, dan kelompok waktu dengan frekuensi terpadat antara jam 03.00 sampai dengan jam 06.00 pagi sebanyak 33 unit kemudian terpadat ke-2 pada jam 06.00 – 09.00 sebanyak 23 unit. Untuk kasus lalu lintas yang melalui selat Nustual, terpantau hanya 5 unit kapal nelayan kecil yaitu pada kelompok waktu 12.00-15.00 sebanyak 2 unit dan 15.00-18.00 sebanyak 3 unit, kemungkinan besar untuk melalui selat tersebut sangat tergantung dengan pasang surut. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Transportasi Peralatan dan Bahan Melalui Laut yang akan dilakukan dengan volume tongkang per hari sekitar 2-3 unit per hari (termasuk transportasi bahan) akan mempengaruhi transportasi laut dalam negeri maupun lokal khususnya yang melintasi selat Nustual. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Berdasarkan hasil konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan yang sudah dilakukan, gangguan terhadap transportasi laut yang berasal dari kapal-kapal Pembangunan Jalan Lintasan (<i>Causeway</i>) ke TUKS selama tahap konstruksi menjadi perhatian yang tinggi dari masyarakat. Namun akan dilakukan pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan. E. Kesimpulan Mayoritas transportasi alat dan bahan pada tahap operasi akan menggunakan transportasi laut. Proyek membangun TUKS sendiri untuk kebutuhan ONLG. Peningkatan volume tongkang di laut akan berdampak pada aktivitas nelayan. Volume tongkang per hari sekitar 2-3 unit per hari (termasuk transportasi bahan). Frekuensi mobilisasi tongkang dan kapal tersebut relatif rendah. Dampak terhadap gangguan lalu lintas laut akibat transportasi alat dan bahan tahap operasi dikategorikan sebagai Dampak Tidak Peting Hipotetik (DTPH) namun akan dikelola.			
3.	Mobilisasi Material dan Tenaga Kerja Menggunakan Helikopter	Melaksanakan rekomendasi manajemen lalu lintas udara.	Kebisingan	Peningkatan Kebisingan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jadwal penerbangan normal akan dua kali seminggu sebagai pendahuluan berdasarkan jadwal roster dengan durasi 3 - 4 minggu On dan durasi 3 – 4 minggu Off. Semua penerbangan dan akomodasi tambahan diperlukan untuk mendukung kegiatan akan diidentifikasi dalam rencana 90 hari. B. Kondisi Rona Lingkungan	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak kebisingan oleh aktivitas helikopter diprakirakan	Kebisingan akan berlangsung sekitar maksimum 10-15 menit setelah tinggal landas setiap kali

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian				
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)						
					Area lokasi rencana FPSO, tingkat kebisingan tidak diukur karena lokasi tersebut berada di tengah lautan dengan jarak sekitar 167,26 Km ke lokasi O LNG di darat C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan transportasi tenaga kerja dan bahan menggunakan helikopter akan menimbulkan peningkatan kebisingan dari mesin helikopter. Hasil pemodelan kebisingan menunjukkan bahwa tingkat kebisingan akibat aktivitas helikopter di sekitar area FPSO adalah sebesar 30-35 dBA sehingga tidak melampaui baku mutu kebisingan D. Intensitas Perhatian Masyarakat Peningkatan kebisingan akibat transportasi menggunakan helikopter tidak menjadi perhatian pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Kegiatan transportasi tenaga kerja dan bahan menggunakan helikopter akan menimbulkan peningkatan kebisingan dari mesin helikopter. Lintasan helikopter dapat melewati permukiman ataupun lokasi aktivitas penduduk dan bising yang ditimbulkan mesin helikopter cukup besar sehingga tingkat kebisingan yang ditimbulkan untuk penduduk bernilai signifikan. Kegiatan ini tergolong dalam Dampak Penting Hipotetik (DPH). Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini digolongkan dalam kategori Dampak Primer.		akan terjadi dari helipad hingga lepas pantai Teluk Saumlaki serta daerah sekitar Kilang O LNG saat konstruksi dan operasi	penggunaan helikopter menuju lokasi FPSO. Akan berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda dengan estimasi waktu kajian dampak sekitar 5 tahun.				
		A. Pembukaan lahan dilakukan terbatas pada daerah konstruksi dan atau operasi B. Segera melakukan penanaman pada lokasi kegiatan setelah penyiapan lahan selesai dilakukan C. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam lokasi kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang RTH.	Biota Terestrial dan Ekosistem	Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (<i>Trigger Species</i>)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jadwal penerbangan normal akan dua kali seminggu sebagai pendahuluan berdasarkan jadwal roster dengan durasi 3 - 4 minggu On dan durasi 3 – 4 minggu Off. Semua penerbangan dan akomodasi tambahan diperlukan untuk mendukung kegiatan akan diidentifikasi dalam rencana 90 hari B. Kondisi Rona Lingkungan Di rencana lokasi setidaknya terdapat sebanyak 23 jenis mamalia, 111 jenis burung, 3 jenis amfibia dan 24 jenis reptilia. Pedoman internasional dalam penentuan habitat kritis mengacu pada pedoman IFC Performance Standard (PS) 6. Habitat kritis adalah area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi dan sangat penting bagi spesies dengan status terancam (<i>endangered</i>) dan/atau terancam punah (<i>critically endangered</i>) menurut <i>redlist book</i> IUCN. Berdasarkan studi yang telah dilakukan pada daerah sekitar lokasi proyek, terdapat beberapa flora fauna yang termasuk kategori perlindungan, yakni: <table><tr><td>Kategori Perlindungan</td><td>Deskripsi</td></tr><tr><td>Kriteria 1: Spesies Terancam Punah atau Spesies Terancam</td><td> - Kelelawar buah berjanggut hitam <i>Pteropus melanopogon</i> - Spesies pohon yang terancam (<i>Manilkara kanosiensis</i>) </td></tr></table>	Kategori Perlindungan	Deskripsi	Kriteria 1: Spesies Terancam Punah atau Spesies Terancam	- Kelelawar buah berjanggut hitam <i>Pteropus melanopogon</i> - Spesies pohon yang terancam (<i>Manilkara kanosiensis</i>)	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak gangguan terhadap spesies kunci terutama burung diperkirakan akan terjadi di beberapa pulau-pulau sebagai habitat burung (Pulau Nustabun, Pulau Matakus dan Pulau Asutubun) yang terletak di antara Pulau Yamdena dan Pulau Selaru.	Sebagai dampak turunan dari peningkatan kebisingan akan berlangsung sekitar maksimum 10-15 menit setelah tinggal landas setiap kali penggunaan helikopter. Akan berlangsung pada ruang dan waktu yang sama di lokasi keberadaan spesies kunci (<i>Trigger Species</i>) dengan estimasi batas waktu kajian dampak adalah 5 tahun.
Kategori Perlindungan	Deskripsi											
Kriteria 1: Spesies Terancam Punah atau Spesies Terancam	- Kelelawar buah berjanggut hitam <i>Pteropus melanopogon</i> - Spesies pohon yang terancam (<i>Manilkara kanosiensis</i>)											

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Kriteria 2: Spesies Endemik dan Sub-Spesies; Spesies dengan rentang terbatas - Hewan pengerat asli <i>Melomys cooperae</i>; <i>Melomys howi</i> - Kelelawar buah berhidung <i>Keast Nyctimene keasti</i> (rentan) dan Kelelawar goa <i>Taphozous Achates</i> <i>Herpetofauna Litoria capitula</i>, <i>Lophognathus maculilabris</i>, <i>Carlia babarensis</i>, <i>Morelia nutala</i> dan <i>Cylindrophis yamdena</i>. 31 spesies burung Kriteria 4: Sangat Terancam dan Ekosistem Unik Hutan gugur lembab Kepulauan Banda Area dilindungi secara formal Cagar alam Pulau Angwarmase C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pada pulau-pulau di sekitar wilayah studi, terdapat burung-burung endemik yang dapat terpengaruh oleh kebisingan yang ditimbulkan dari operasional helikopter. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Masyarakat setempat kurang mengetahui dan/atau memperhatikan keberadaan jenis satwa yang menjadi <i>trigger species</i>. E. Kesimpulan Gangguan terhadap habitat kritis dari spesies kunci akibat kegiatan transportasi tenaga kerja dan bahan menggunakan helikopter merupakan Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Dampak dari kegiatan ini merupakan Dampak Turunan dari peningkatan kebisingan.			
4.	Pengoperasian FPSO : Keberadaan dan Pengoperasian FPSO	A. Untuk meredam kebisingan, revegetasi akan segera dilakukan pada area terbuka setelah lahan siap ditanami. B. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam lokasi proyek mengacu pada peraturan yang berlaku tentang ruang terbuka hijau.	Kebisingan Lsm: 45,1-54,5 dBA	Peningkatan Kebisingan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengoperasian FPSO menggunakan gas turbin generator, <i>gas export compression</i>, dan <i>flare</i>. B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi kebisingan tergolong baik, Lsm < 55 dBA C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan operasional FPSO mendapatkan sumber listrik dari generator. Seluruh aktivitas pada FPSO akan menimbulkan kebisingan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terungkap adanya kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Dampak digolongkan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
		A. Hanya mengoperasikan lampu penerangan apabila diperlukan.	Cahaya	Pendaran Cahaya (Dampak Visual)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jarak maksimum pendaran cahaya menuju iluminasi horizontal nol untuk kawasan FPSO <i>upper deck</i> adalah sebesar 20 meter, dengan rata-rata	Disimpulkan sebagai DPH	Sebaran dampak sebagai batas	Berlangsung pada ruang dan waktu yang sama selama

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		B. Melakukan pemetaan terhadap jangkauan pendaran cahaya.			iluminansi sebesar 100-150 lx di dalam area unit kerja. Untuk rata-rata iluminasi di kawasan FPSO <i>lower process deck</i> cenderung lebih tinggi (150-200 lx), karena jumlah lumener yang digunakan lebih banyak, karena kebutuhan tingkat pencahayaan di area unit tersebut lebih tinggi. Jarak pendaran cahaya sebesar 20 m relatif lebih kecil dibanding ukuran platform, sehingga risiko melukai biota laut akibat cahaya artifisial berlebihan pada permukaan air diperkirakan tidak akan melebihi jarak tersebut. Potensi pendaran cahaya berlangsung saat malam hari selama FPSO beroperasi (12 jam setiap harinya). B. Kondisi Rona Lingkungan FPSO terletak jauh dari permukiman warga dengan jarak 167,26 Km dari lokasi OLANG. Rencana desain FPSO terdiri dari dua bagian, yaitu <i>Upper Deck</i> dan <i>Lower Deck</i>. <i>Lower Deck</i> berada pada elevasi 41 meter dan <i>Upper Deck</i> berada pada elevasi 53 meter. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pendaran cahaya merupakan <i>given impact</i> atau dampak yang tidak terhindarkan. Cahaya pada FPSO bersumber dari penerangan (lampu) sebagai bagian dari pengoperasian FPSO. Lampu yang dinyalakan secara bersamaan dapat menimbulkan pendaran cahaya yang berdampak bagi masyarakat sekitar dan bagi biota yang berada di sekitar sumber cahaya. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terungkap adanya kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Dampak digolongkan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH).		ekologi FPSO di laut lepas Arafura	masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak selama 5 tahun
5.	Pengoperasian FPSO: Pasokan Air (Desalinasi Air Laut) dan Pembuangan <i>Brine Water</i>	A. Tidak ada pengelolaan secara khusus terhadap peningkatan salinitas akibat pembuangan limbah proses desalinasi. B. Inpex akan mengikuti Persetujuan teknis (Pertek) pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut oleh Inpex Masela Ltd No. S.376/PPKL/PPKP/PKI.I/9/2021	Kualitas Air Laut	Peningkatan Salinitas	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Air tawar (<i>fresh water</i>) diperlukan di FPSO untuk keperluan air utilitas, air minum untuk personel, bahan baku air demin dan untuk air tambahan (<i>make up</i>). Air tawar diperoleh dari pengolahan air laut dengan proses desalinasi. Proses desalinasi air laut akan menggunakan membran (<i>reverse osmosis</i> - RO) untuk memisahkan garam (TDS) dari air laut. Air buangan (<i>reject water</i>) dari proses desalinasi mengandung kadar garam yang tinggi (<i>Brine Water</i> atau limbah air asin) dan akan dibuang kembali ke laut. Sekitar 60 m³/jam (1.440 m³/hari) <i>brine water</i> akan dihasilkan dibuang ke lingkungan di sekitar FPSO melalui pipa pada kedalaman -8 hingga -10 m. B. Kondisi rona lingkungan Salinitas air laut di sekitar lokasi calon FPSO berkisar antara 35-36‰ dengan rata-rata 35,5‰ (BM berdasarkan lampiran VIII PP No. 22 tahun 21 untuk karang dan lamun 34 ‰ atau salinitas rata-rata air normal ±5%). Pertek No. S.376/PPKL/PPKP/PKI.I/9/2021 mensyaratkan bahwa salinitas air laut sama dengan salinitas pada kondisi alami pada jarak 30 m dari lokasi pembuangan. C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak peningkatan salinitas air laut diperkirakan maksimum sekitar 750 m dari titik <i>outfall</i> yang secara dominan persebarannya ke arah Barat Laut.	Peningkatan salinitas air laut akan dimodelkan menggunakan data hidrooseanografi. Batas waktu kajian dampak berupa sebaran peningkatan salinitas air laut adalah selama 5 tahun.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Pembuangan konsentrat dari proses desalinasi dapat meningkatkan salinitas air laut di lokasi pembuangan dan sekitarnya secara signifikan. D. Intensitas perhatian masyarakat Hasil konsultasi publik tidak ada intensitas perhatian masyarakat terhadap dampak lingkungan berupa peningkatan salinitas dan persebarannya akibat pembuangan <i>Brine Water</i> di <i>offshore</i> (FPSO). E. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian rencana usaha dan/atau kegiatan pasokan air (desalinasi air laut) dan pembuangan <i>Brine Water</i> di FPSO, diidentifikasi sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal.			
6.	Pengoperasian FPSO: Sistem Pendinginan dan Pembuangan Air Pendingin	A. Pembangunan dan pengoperasian kanal/saluran pembuangan air pendingin sebelum dilepas di <i>outfall</i>. B. Inpex akan mengikuti Persetujuan teknis (Pertek) pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut oleh Inpex Masela Ltd No. S.376/PPKL/PPKP/PKI.I/9/2021. C. INPEX akan memenuhi baku mutu air limbah yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi. D. INPEX akan memenuhi baku mutu kualitas air laut ambien (Lampiran VII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 untuk Biota Laut).	Kualitas Air Laut	Peningkatan Temperatur dan Klorin Bebas	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Sistem pendinginan pada fasilitas FPSO digunakan untuk mendinginkan sistem proses di alat penukar panas (<i>heat exchanger</i>) dengan sistem air pendingin sirkulasi tertutup (<i>closed circuit cooling water-CCW</i>). Air laut dari ke dalaman sekitar 160 m (berdasarkan desain saat ini) dipompa ke FPSO melalui pipa pengambilan air laut dengan jumlah sekitar 47.394 m³/jam atau 1.137.456 m³/hari, kemudian digunakan untuk mendinginkan sistem proses di alat dengan air pendingin sirkulasi tertutup yang kembali dari <i>process unit (cooling water return)</i> ke tanki ekspansi, kemudian air laut akan dialirkan kembali ke laut. Limbah air pendingin akan dibuang melalui pipa pada kedalaman -8 s/d -10 m. B. Kondisi rona lingkungan Suhu atau temperature air laut di sekitar lokasi calon FPSO pada pengamatan bulan Februari 2020 adalh 31 °C (BM 28-30 °C ±2 °C). Tidak ada data khlorin bebas pada air laut dan Baku mutu kualitas air laut ambien (Lampiran VIII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 untuk Biota Laut) tidak mengatur konsentrasi klorin bebas dalam air laut ambien. C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan Peningkatan Temperatur dan Klorin Bebas akibat Sistem pendinginan pada fasilitas FPSO digunakan untuk mendinginkan sistem proses di alat penukar panas (<i>heat exchanger</i>) dengan sistem air pendingin sirkulasi tertutup (<i>closed circuit cooling water-CCW</i>). Efek utama peningkatan temperatur dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan adanya <i>bleaching</i> terumbu karang. Air pendingin buangan ini juga mengandung konsentrasi klorin bebas. Pertek No. No. S.376/PPKL/PPKP/PKI.I/9/2021 mensyaratkan bahwa suhu maksimal air buangan adalah 40 °C dan konsentrasi klorin bebas dalam limbah air pendingin di titik pembuangan tidak boleh melebihi 0,5 mg/L. Dosis klorin dalam air pendingin akan disesuaikan oleh INPEX sehingga konsentrasi klorin bebas dalam air buangan tidak akan melebihi 0,5 mg/L. D. Intensitas perhatian masyarakat	Disimpulkan sebagai DPH (Peningkatan Temperatur)	Persebaran dampak peningkatan temperatur air laut diprakirakan maksimum sekitar 300 m dari titik <i>outfall</i> yang secara dominan persebarannya ke arah Barat Laut.	Peningkatan temperatur air laut akan dimodelkan menggunakan perangkat lunak MIKE 21 menggunakan data hidro-oseanografi. Batas waktu kajian dampak sebaran peningkatan temperatur air laut adalah selama 5 tahun.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Hasil konsultasi publik menunjukan bahwa tidak ada intensitas perhatian masyarakat terhadap dampak lingkungan berupa Peningkatan suhu dan Klorin Bebas serta persebarannya akibat pembuangan air pendingin di FPSO. E. Kesimpulan Berdasarkan penjelsaan di atas, dengan demikian rencana usaha dan/atau kegiatan Peningkatan salinitas dan persebarannya akibat pembuangan air pendingin dari sistem pendinginan pada fasilitas FPSO digunakan untuk mendinginkan sistem proses di alat penukar panas (<i>heat exchanger</i>) dengan sistem air pendingin sirkulasi tertutup (<i>closed circuit cooling water-CCW</i>), diidentifikasi sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) terhadap suhu atau temperatur dan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Sementara itu dampak terhadap klorin bebas dalam air laut termasuk Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).			
7.	Pengoperasian FPSO: Emisi Penggerak Turbin Gas dan Emisi PLTG	A. Mengelola setiap emisi udara dengan melakukan pengolahan lebih lanjut menggunakan teknologi pengendalian pencemaran udara hingga setiap parameter mencapai konsentrasi yang sesuai dengan baku mutu. B. Melakukan monitoring rutin terhadap emisi udara yang dikeluarkan melalui cerobong.	Kualitas Udara ambien: CO < 100 ug/m³ NO₂ < 5ug/m³ SO₂ < 20-21 ug/m³ O₃ < 20ug/m³ HC K 50 ug/m³ TSP 13,1-77,5 ug/m³ PM10 2,5-72,5 ug/m³ PM2,5 0,9-61,5 ug/m³	Peningkatan Konsentrasi SO ₂ dan NOx	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah bahan bakar gas yang diperlukan oleh Pembangkit Listrik Gas Turbin (GTG) adalah sekitar 12.991 kg/jam. Jumlah bahan bakar gas yang diperlukan oleh kompresor gas ekspor diperkirakan sebesar 24.090 kg/jam B. Kondisi Rona Lingkungan Tidak terdapat rona awal untuk konsentrasi SO₂ dan NO₂ di area FPSO karena lokasi berada di tengah lautan sekitar 150 Km ke arah barat daya dari OLNK. Namun kondisi rona lingkungan untuk parameter NO₂, dan SO₂ di sekitar OLNK tergolong baik. Kadar SO₂ dan NO₂ maksimum yang terukur di lapangan berada di bawah 50% baku mutu udara ambien menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan SO₂: Emisi gas dari pengoperasian FPSO berasal dari proses <i>Flaring</i> Jika melebihi baku mutu udara, dampak SO₂ bagi kesehatan adalah dapat mengiritasi saluran pernapasan yang berujung pada asma dan bronkhitis. Di lingkungan, SO₂ dapat menjadi penyebab hujan asam dan korosi pada material bangunan. <u>NOx:</u> NOx merupakan gas yang bersifat iritan, yang dalam jumlah melebihi standar akan mengiritasi sistem pernapasan dan menyebabkan penyakit paru-paru kronis. NOx juga berdampak bagi lingkungan karena dapat menghambat pertumbuhan pada tanaman. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terungkap adanya kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Dampak disimpulkan DPH	Disimpulkan sebagai DPH	Penyebaran dampak kualitas udara yang bersumber dari cerobong di FPSO akan menyebar secara dominan ke arah Barat Laut dengan jarak maksimum sekitar 1.0 -2.0 km dari cerobong, di daerah lepas pantai emisi udara akan lebih cepat terdispersi.	Berlangsung pada ruang dan waktu yang sama selama masa operasi OLNK dengan estimasi batas waktu kajian dampak selama 5 tahun
		A. Menerapkan rencana pengelolaan gas rumah kaca yang disesuaikan dengan	Gas Rumah Kaca	Peningkatan Emisi CO ₂ , CH ₄ dan N ₂ O	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Disimpulkan sebagai DPH	Gas rumah kaca apabila	Berlangsung pada ruang dan waktu

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		kebijakan perusahaan, regulasi di Indonesia, dan regulasi internasional. B. Menghitung, dan melaporkan seluruh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan berdasarkan regulasi nasional dan internasional. C. Memprediksi emisi gas rumah kaca di masa depan untuk mengantisipasi potensi dampak yang dihasilkan di masa depan.			Jumlah bahan bakar gas yang diperlukan oleh Pembangkit Listrik Gas Turbin (GTG) adalah sekitar 12.991 kg/jam. Jumlah bahan bakar gas yang diperlukan oleh kompresor gas ekspor diperkirakan sebesar 24.090 kg/jam B. Kondisi Rona Lingkungan Secara nasional emisi CO ₂ dari aktivitas antropogenik adalah sebesar 1.200 juta ton CO ₂ e per tahun. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengoperasian turbin merupakan bagian dari aktivitas operasi yang akan berlangsung selama kurang lebih 28 tahun. Dalam jangka waktu tersebut, pengoperasian turbin akan terus berlangsung. Total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama masa operasi adalah 5,4 juta ton CO ₂ ekuivalen per tahun. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Peningkatan emisi gas rumah kaca menjadi isu pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Dampak peningkatan emisi gas rumah kaca dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH)		teremisikan ke atmosfer, maka akan menyebar secara horizontal dan vertikal mula-mula secara regional dan berlanjut secara global, oleh karena itu batas ekologi penyebaran gas rumah kaca adalah bersifat global.	yang sama selama masa operasi OLNG dengan estimasi waktu selama 5 tahun. Emisi gas rumah kaca selama masa operasi OLNG akan diprediksi menggunakan perhitungan estimasi GRK sesuai dengan pedoman IPCC. Batas waktu kajian dampak untuk GRK adalah lebih dari 20 tahun.
8.	Pengoperasian FPSO: Gas Suar (<i>Flaring</i>)	A. Membuat dan menerapkan prosedur <i>Flaring</i> agar proses <i>Flaring</i> berlangsung dalam kondisi optimal. B. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap kondisi setiap peralatan yang digunakan dalam proses <i>Flaring</i> . C. Melakukan monitoring terhadap emisi gas yang dihasilkan dari proses <i>Flaring</i> .	Kualitas Udara ambien: CO < 100 ug/m ³ NO ₂ < 5ug/m ³ SO ₂ < 20-21 ug/m ³ O ₃ < 20ug/m ³ HC K 50 ug/m ³ TSP 13,1-77,5 ug/m ³ PM10 2,5-72,5 ug/m ³ PM2,5 0,9-61,5 ug/m ³	Opasitas	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penyalan suar bakar (<i>Flaring</i>) hanya dilakukan (diperbolehkan) selama operasi-operasi darurat, pemeliharaan, <i>shutdown</i> , dan <i>start-up</i> . Perkiraan volume gas alam yang dialirkan ke suar bakar pada saat <i>Flaring</i> dalam kondisi <i>start-up</i> dan darurat adalah 0,045 juta ton per tahun. Ketinggian cerobong suar bakar sekitar 150 m memastikan tingkat radiasi di seluruh fasilitas bagian atas (<i>topside</i>) FPSO berada dalam batas yang dapat diterima selama kondisi darurat. B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi rona lingkungan untuk parameter NO ₂ , dan SO ₂ di sekitar OLNG tergolong baik. Kadar SO ₂ dan NO ₂ maksimum yang terukur di lapangan berada di bawah 50% baku mutu udara ambien menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Proses <i>Flaring</i> dapat menghasilkan emisi dengan opasitas, khususnya pada kondisi tidak normal. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terungkap adanya kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Dampak disimpulkan DTPH	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
		A. Untuk meredam kebisingan, revegetasi akan segera dilakukan pada area terbuka setelah lahan siap ditanami. B. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam lokasi proyek mengacu pada	Kebisingan Lsm: 45,1-54,5 dBA	Peningkatan Kebisingan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penyalan suar bakar (<i>Flaring</i>) hanya dilakukan (diperbolehkan) selama operasi-operasi darurat, pemeliharaan, <i>shutdown</i> , dan <i>start-up</i> . Perkiraan volume gas alam yang dialirkan ke suar bakar pada saat <i>Flaring</i> dalam kondisi <i>start-up</i> dan darurat adalah 0,045 juta ton per tahun. Ketinggian	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		peraturan yang berlaku tentang ruang terbuka hijau.			cerobong suar bakar sekitar 150 m memastikan tingkat radiasi di seluruh fasilitas bagian atas (<i>topside</i>) FPSO berada dalam batas yang dapat diterima selama kondisi darurat. B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi kebisingan tergolong baik, $L_{sm} < 55$ dBA C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Aktivitas <i>Flaring</i> dapat menjadi sumber kebisingan. Suatu sumber suara akan meradiasikan kebisingan secara merata ke seluruh arah dengan tingkat penurunan kebisingan sebesar 6 dB setiap penambahan jarak 100 m dari sumber suara D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terungkap adanya kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Dampak digolongkan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).			
		A. Melakukan <i>Flaring</i> hanya apabila diperlukan. B. Melakukan pemetaan terhadap jangkauan pendaran cahaya.	Cahaya	Pendaran Cahaya (Dampak Visual)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penyalan suar bakar (<i>Flaring</i>) hanya dilakukan (diperbolehkan) selama operasi-operasi darurat, pemeliharaan, shutdown, dan start-up. Perkiraan volume gas alam yang dialirkan ke suar bakar pada saat <i>Flaring</i> dalam kondisi start-up dan darurat adalah 0,045 juta ton per tahun. B. Kondisi Rona Lingkungan FPSO terletak jauh dari permukiman warga dengan jarak 167,26 Km dari lokasi OLNG. Rencana desain FPSO terdiri dari dua bagian, yaitu <i>Upper Deck</i> dan <i>Lower Deck</i>. <i>Lower Deck</i> berada pada elevasi 41 meter dan <i>Upper Deck</i> berada pada elevasi 53 meter. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pendaran cahaya dari proses <i>Flaring</i> merupakan given impact atau dampak yang tidak terhindarkan. Namun <i>Flaring</i> hanya dilakukan apabila dalam keadaan abnormal sehingga frekuensinya akan sedikit. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terungkap adanya kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Pendaran cahaya dari proses <i>Flaring</i> merupakan <i>given impact</i> atau dampak yang tidak terhindarkan. Namun <i>Flaring</i> hanya dilakukan apabila dalam keadaan abnormal sehingga frekuensinya akan sedikit. Andal pun hanya akan mengkaji dampak yang dilakukan dari operasi normal, sehingga dampak yang ditimbulkan dari operasi abnormal tidak tercantum di dalam kajian Andal. Oleh karena itu, dampak dari <i>Flare</i> disimpulkan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		A. Membuat dan menerapkan prosedur <i>Flaring</i> agar proses <i>Flaring</i> berlangsung dalam kondisi optimal. B. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap kondisi setiap peralatan yang digunakan dalam proses <i>Flaring</i>. C. Melakukan monitoring terhadap emisi gas yang dihasilkan dari proses <i>Flaring</i>. D. Menerapkan rencana pengelolaan gas rumah kaca yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan, regulasi di Indonesia, dan regulasi internasional. E. Memonitor, menghitung, dan melaporkan seluruh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan berdasarkan regulasi nasional dan internasional. F. Memprediksi emisi gas rumah kaca di masa depan untuk mengantisipasi potensi dampak yang dihasilkan di masa depan.	Gas Rumah Kaca	Peningkatan Emisi CO ₂ , CH ₄ dan N ₂ O	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Tidak ada penyalan atau pembakaran suar bakar dari setiap unit selama operasi normal kecuali untuk pilot suar bakar dan <i>purging</i>. Perkiraan laju alir bahan bakar gas yang diperlukan untuk pilot gas dan <i>purge</i> gas adalah sebesar 0,17 MMSCFD. Penyalan suar bakar (<i>Flaring</i>) hanya dilakukan (diperbolehkan) selama operasi-operasi darurat, pemeliharaan, <i>shutdown</i>, dan <i>start-up</i>. Perkiraan volume gas alam yang dialirkan ke suar bakar pada saat <i>Flaring</i> dalam kondisi <i>start-up</i> dan darurat adalah 0,045 juta ton per tahun. B. Kondisi Rona Lingkungan Secara nasional emisi CO₂ dari aktivitas antropogenik adalah 1200 juta ton CO₂e per tahun C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Aktivitas <i>Flaring</i> yang merupakan pembakaran gas selama operasi FPSO yang akan mengemisikan gas rumah kaca. Namun <i>Flaring</i> tidak akan dilakukan secara kontinu sehingga emisi gas rumah kaca dari aktivitas <i>Flaring</i> tidak akan besar D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terungkap adanya kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Dampak peningkatan emisi gas rumah kaca dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
9.	Pengoperasian FPSO: Pemuatan dan Transportasi Kondensat	Membuat dan menerapkan prosedur pemuatan dan transportasi kondensat secara ketat.	Kualitas Udara	Peningkatan Konsentrasi VOC (sebagai BTEX)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kondensat sebagai produk dari FPSO akan disimpan dalam tangki kondensat dengan kapasitas sebesar minimum 160.000 m³ dan akan dimuat (<i>offload</i>) secara berkala ke kapal tanker. FPSO dilengkapi dengan <i>dual hose reels</i> untuk mengalirkan produk kondensat dari FPSO ke kapal tanker menggunakan pompa dengan kapasitas pemuatan 5.000 m³/jam. B. Kondisi Rona Lingkungan Tidak terdapat rona awal untuk konsentrasi BTEX di area FPSO karena lokasi berada di tengah lautan sekitar 150 Km ke arah barat daya dari OLANG. Namun di darat semua parameter BTEX tidak terdeteksi. Jadi dapat disimpulkan kondisi rona lingkungan adalah baik C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan VOC dapat terbentuk pada proses pemuatan dan transportasi kondensat, secara umum berasal dari uap yang terbentuk di dalam tangki kosong karena adanya evaporasi sisa produk dari pemuatan sebelumnya dan uap yang terbentuk pada saat pemindahan produk baik saat pemuatan maupun pengosongan tangki D. Intensitas Perhatian Masyarakat Peningkatan konsentrasi VOC (sebagai BTEX) tidak menjadi perhatian masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan	Disimpulkan sebagai DPH	Penyebaran dampak kualitas udara yang bersumber dari cerobong di FPSO akan menyebar secara dominan ke arah Barat Laut dengan jarak maksimum sekitar 1.0 -2.0 km dari cerobong, di daerah lepas pantai emisi udara akan lebih cepat terdispersi.	Berlangsung pada ruang dan waktu yang sama selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak selama 5 tahun

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Peningkatan konsentrasi BTEX tergolong sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH).			
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus gangguan terhadap mamalia laut. gangguan terhadap mamalia laut merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>) dari kegiatan.	Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan Terhadap Mamalia Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pemuatan dan transportasi kondensat diperlukan untuk menyalurkan produk kondensat yang dihasilkan di FPSO ke konsumen. Proses penyaluran ini menggunakan sarana kapal kondensat. Kegiatan pemuatan produk kondensat ini akan dilakukan secara rutin yaitu pada kondisi operasi normal diperkirakan akan dilakukan setiap 1-3 bulan dengan ukuran kapal tanker kondensat dari 25.000 DWT sampai 115.000 DWT. Berdasarkan data dari Pra-FEED, kapasitas tangki penyimpanan kondensat adalah 60.000 m³. Kemungkinan akan ada beberapa penyesuaian untuk mengakomodir berbagai perubahan yang mungkin terjadi dan Kegiatan pemuatan produk kondensat akan dilakukan ketika kapal berada di tambatan kapal (berth). Selama pengisian kondensat dari tangki penyimpanan kondensat ke kapal, pompa pada tangki akan mengalirkan kondensat dengan laju alir maksimum 3.000 m³/jam. B. Kondisi Rona Lingkungan Untuk data rona lingkungan kebisingan bawah laut alami di lokasi studi tidak tersedia. Menurut Veeraiyan and Rajendran, nilai kebisingan alami di bawah laut berkisar antara 60 – 90 dB re 1 µPa dalam rentang 10-100 Hz. Keberadaan mamalia laut berdasarkan data rona yang dikumpulkan pada tahun 2012, 2013, 2019 dan 2020 dijumpai 13 jenis mamalia laut yang terdiri dari kelompok paus sebanyak 8 jenis, kelompok lumba-lumba 4 jenis, dan 1 jenis kelompok sirenia yang dijumpai di sekitar lokasi kajian. 13 Jenis mamalia laut yang dijumpai di lokasi studi termasuk dalam rentang suara <i>high frequency</i>, <i>low frequency</i> dan <i>sirenians frequency</i>, sehingga diketahui rentang nilai TTS (<i>Temporary Threshold Shifts</i>/Ambang Batas Kebisingan Sementara) terendah sebesar 213 dB re 1 µPa dan nilai PTS (<i>Permanent Threshold Shifts</i>/Ambang Batas Kebisingan Permanen) terendah sebesar 219 dB re 1 µPa. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pemuatan dan Transportasi Kondensat selama tahap operasi menurut Martin et al, 2021 akan meningkatkan kebisingan bawah laut alami sebesar 192 dB re 1 µPa yang menyebabkan gangguan terhadap mamalia laut. Peningkatan kebisingan bawah laut akibat Pemuatan dan Transportasi Kondensat bersifat <i>intermitent</i> dan akan berkurang <i>gradually</i> dengan bertambahnya jarak dari sumber kebisingan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Berdasarkan hasil konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan yang sudah dilakukan, gangguan terhadap mamalia laut akibat kegiatan Pemuatan dan Transportasi Kondensat yang dihasilkan di FPSO selama tahap operasi tidak menjadi perhatian yang tinggi dari masyarakat.	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					E. Kesimpulan Tidak terdapat pengelolaan secara khusus untuk gangguan terhadap mamalia laut. Gangguan terhadap mamalia laut merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>) dari kegiatan Pemuatan dan Transportasi Kondensat yang dihasilkan di FPSO selama tahap operasi. Maka gangguan mamalia laut akibat Pemuatan dan Transportasi Kondensat yang dihasilkan di FPSO selama tahap operasi menjadi Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) namun tetap akan dilakukan pengelolaan dan pemantauan.			
10.	Pengoperasian OLNG: Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	A. Untuk meredam kebisingan, revegetasi akan segera dilakukan pada area terbuka setelah lahan siap ditanami. B. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam lokasi proyek mengacu pada peraturan yang berlaku tentang ruang terbuka hijau.	Kebisingan Lsm: 45,1-54,5 dBA	Peningkatan Kebisingan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kilang OLNG dirancang untuk mengakomodasi total kapasitas produksi dan pemuatan produk LNG sebesar 9,5 MTPA dan produk kondensat sebesar 6.392 barel/hari, dengan masa operasi kilang selama tiga puluh (30) tahun. B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi kebisingan tergolong baik, Lsm < 55 dBA C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pengoperasian kilang OLNG beserta fasilitas pendukungnya akan menggunakan berbagai mesin untuk menunjang operasi OLNG sehingga berpotensi menghasilkan kebisingan. Operasional OLNG juga berlangsung dalam waktu yang cukup lama yaitu 30 tahun dan terdapat kemungkinan untuk diperpanjang sampai dengan 20 tahun D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terungkap adanya kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Kebisingan dari pengoperasian OLNG termasuk dalam Dampak Penting Hipotetik (DPH)	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak kebisingan ditetapkan maksimum dalam radius 500 m dari batas pagar proyek untuk OLNG secara horizontal dengan kebisingan yang bersifat kontinu	Peningkatan kebisingan bersumber dari seluruh pengoperasian peralatan pada Kilang OLNG. Dampak berlangsung pada ruang dan waktu yang sama selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak selama 5 tahun.
		Pendaran cahaya dari keberadaan dan pengoperasian OLNG merupakan dampak yang tidak terhindarkan (<i>given impact</i>).	Cahaya	Pendaran Cahaya (Dampak Visual)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kilang OLNG dirancang untuk mengakomodasi total kapasitas produksi dan pemuatan produk LNG sebesar 9,5 MTPA dan produk kondensat sebesar 6.392 barel/hari, dengan masa operasi kilang selama tiga puluh (30) tahun. B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan dokumen Andal INPEX, tidak terdapat sumber cahaya di daerah OLNG pada malam hari sehingga iluminansi horizontal dan vertikal pada area unit diasumsikan bernilai sebesar 0 lux. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pendaran cahaya dari keberadaan dan pengoperasian OLNG akan bersifat kontinu selama fasilitas OLNG beroperasi D. Intensitas Perhatian Masyarakat Pendaran cahaya tidak menjadi perhatian masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Dampak pendaran cahaya terhadap keberadaan dan pengoperasian fasilitas OLNG dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH).	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak pendaran cahaya diperkirakan menyebar dalam radius sekitar 250 m dari sumber cahaya. Dampak dari pendaran cahaya akan dimodelkan dan dikaji lebih lanjut dalam Andal.	Pendaran cahaya bersumber dari lampu-lampu (penerangan) pada Kilang OLNG (termasuk TUKS). Dampak berlangsung pada ruang dan waktu yang sama selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak selama 5 tahun.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		Lokasi Kilang OLNG dipusatkan hanya di dalam lokasi proyek dan dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan jarak terdekat dengan pemukiman maupun infrastruktur umum untuk menghindari terjadinya dampak turunan.	Fisiografi	Perubahan Lanskap	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Lokasi OLNG dan fasilitas pendukungnya merupakan area <i>green field</i>. Di lokasi tersebut akan dibangun kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya antara lain Fasilitas Penerimaan Umpan (<i>Inlet Receiving Facility</i>), Sistem Pengolahan Gas, Sistem Penghilangan Hidrokarbon Berat dan Fraksinasi, Sistem Pencairan dan Pendinginan, Fasilitas Penyimpanan dan Pemuatan (<i>Loading</i>), Sistem Utilitas, Infrastruktur, Fasilitas Penyimpanan Logistik, dan Pembangkit Listrik. B. Kondisi Rona Lingkungan Sekitar ±664,1 ha merupakan lahan HPK dan sekitar ±28,9 ha merupakan lahan APL yang belum seluruhnya dimanfaatkan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Keberadaan kilang OLNG berdampak pada perubahan lanskap akibat adanya bangunan-bangunan baru dari fasilitas OLNG yang mengubah tatanan bentang alam sebelumnya. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perubahan lanskap karena keberadaan OLNG tidak menjadi isu saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Keberadaan kilang OLNG berdampak pada perubahan lanskap akibat adanya bangunan-bangunan baru dari fasilitas OLNG yang mengubah tatanan bentang alam sebelumnya. Namun demikian kegiatan ini hanya dilakukan pada area-area yang akan dibangun fasilitas. Oleh karena itu dampak dari kegiatan tersebut terhadap perubahan lanskap termasuk Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
		A. Segera melakukan penanaman pada lokasi kegiatan setelah penyiapan lahan selesai dilakukan. B. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam lokasi kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang RTH.	Biota Terestrial dan Ekosistem	Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari <i>Trigger Species</i> *	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Lokasi OLNG dan fasilitas pendukungnya merupakan area <i>green field</i>. Di lokasi tersebut akan dibangun kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya antara lain Fasilitas Penerimaan Umpan (<i>Inlet Receiving Facility</i>), Sistem Pengolahan Gas, Sistem Penghilangan Hidrokarbon Berat dan Fraksinasi, Sistem Pencairan dan Pendinginan, Fasilitas Penyimpanan dan Pemuatan (<i>Loading</i>), Sistem Utilitas, Infrastruktur, Fasilitas Penyimpanan Logistik, dan Pembangkit Listrik B. Kondisi Rona Lingkungan Di rencana lokasi setidaknya terdapat sebanyak 23 jenis mamalia, 111 jenis burung, 3 jenis amfibia dan 24 jenis reptilia. Pedoman internasional dalam penentuan habitat kritis mengacu pada pedoman IFC Performance Standard (PS) 6. Habitat kritis adalah area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi dan sangat penting bagi spesies dengan status terancam (<i>endangered</i>) dan/atau terancam punah (<i>critically endangered</i>) menurut <i>red list book</i> IUCN. Berdasarkan studi yang telah dilakukan pada daerah sekitar lokasi	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak gangguan terhadap spesies kunci terutama burung diperkirakan akan terjadi di beberapa pulau-pulau sebagai habitat burung (Pulau Nustabun, Pulau Matakus dan Pulau Asutubun) yang terletak	Sebagai dampak turunan dari adanya pendaran cahaya dan peningkatan kebisingan. Akan berlangsung pada ruang dan waktu yang sama di lokasi keberadaan spesies kunci (<i>Trigger Species</i>) dengan batas waktu kajian dampak 5 tahun.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian										
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)												
					proyek, terdapat beberapa flora fauna yang termasuk kategori perlindungan, yakni: <table><tr><td>Kategori Perlindungan</td><td>Deskripsi</td></tr><tr><td>Kriteria 1: Spesies Terancam Punah atau Spesies Terancam</td><td> - Kelelawar buah berjanggut hitam <i>Pteropus melanopogon</i> - Spesies pohon yang terancam (<i>Manilkara kanosiensis</i>) </td></tr><tr><td>Kriteria 2: Spesies Endemik dan Sub-Spesies; Spesies dengan rentang terbatas</td><td> - Hewan pengerat asli <i>Melomys cooperae</i>; <i>Melomys howi</i> - Kelelawar buah berhidung <i>Keast Nyctimene keasti</i> (rentan) dan Kelelawar goa <i>Taphozous Achates</i> <i>Herpetofauna Litoria capitula</i>, <i>Lophognathus maculilabris</i>, <i>Carlia babarensis</i>, <i>Morelia nutala</i> dan <i>Cylindrophis yamdena</i>. 31 spesies burung </td></tr><tr><td>Kriteria 4: Sangat Terancam dan Ekosistem Unik</td><td>Hutan gugur lembab Kepulauan Banda</td></tr><tr><td>Area dilindungi secara formal</td><td>Cagar alam Pulau Angwarmase</td></tr></table>	Kategori Perlindungan	Deskripsi	Kriteria 1: Spesies Terancam Punah atau Spesies Terancam	- Kelelawar buah berjanggut hitam <i>Pteropus melanopogon</i> - Spesies pohon yang terancam (<i>Manilkara kanosiensis</i>)	Kriteria 2: Spesies Endemik dan Sub-Spesies; Spesies dengan rentang terbatas	- Hewan pengerat asli <i>Melomys cooperae</i>; <i>Melomys howi</i> - Kelelawar buah berhidung <i>Keast Nyctimene keasti</i> (rentan) dan Kelelawar goa <i>Taphozous Achates</i> <i>Herpetofauna Litoria capitula</i>, <i>Lophognathus maculilabris</i>, <i>Carlia babarensis</i>, <i>Morelia nutala</i> dan <i>Cylindrophis yamdena</i>. 31 spesies burung	Kriteria 4: Sangat Terancam dan Ekosistem Unik	Hutan gugur lembab Kepulauan Banda	Area dilindungi secara formal	Cagar alam Pulau Angwarmase		di antara Pulau Yamdena dan Pulau Selaru.	
Kategori Perlindungan	Deskripsi																	
Kriteria 1: Spesies Terancam Punah atau Spesies Terancam	- Kelelawar buah berjanggut hitam <i>Pteropus melanopogon</i> - Spesies pohon yang terancam (<i>Manilkara kanosiensis</i>)																	
Kriteria 2: Spesies Endemik dan Sub-Spesies; Spesies dengan rentang terbatas	- Hewan pengerat asli <i>Melomys cooperae</i>; <i>Melomys howi</i> - Kelelawar buah berhidung <i>Keast Nyctimene keasti</i> (rentan) dan Kelelawar goa <i>Taphozous Achates</i> <i>Herpetofauna Litoria capitula</i>, <i>Lophognathus maculilabris</i>, <i>Carlia babarensis</i>, <i>Morelia nutala</i> dan <i>Cylindrophis yamdena</i>. 31 spesies burung																	
Kriteria 4: Sangat Terancam dan Ekosistem Unik	Hutan gugur lembab Kepulauan Banda																	
Area dilindungi secara formal	Cagar alam Pulau Angwarmase																	
		Pembukaan padang lamun dilakukan terbatas pada daerah konstruksi dan atau operasi.	Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan Terhadap Penyu	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kilang OLNG dirancang untuk mengakomodasi total kapasitas produksi dan pemuatan produk LNG sebesar 9,5 MTPA dan produk kondensat sebesar 6.392 barel/hari, dengan masa operasi kilang selama tiga puluh (30) tahun.	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-										

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Kegiatan Kilang OLNG beserta fasilitas pendukungnya merupakan kegiatan terbesar dari proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi, sehingga keberadaan dan pengoperasian kilang dalam waktu yang relatif cukup lama minimum 30 tahun dan terdapat kemungkinan untuk diperpanjang 2x10 tahun. B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada tahun 2019, teridentifikasi dua jenis penyu yang di pelihara warga di Pulau Matakus. Kedua jenis penyu tersebut adalah penyu hijau (<i>Chelonia mydas</i>) dan penyu sisik (<i>Eretmochelys imbricata</i>) yang tertangkap di perairan Pulau Matakus. Observasi juga dilakukan di Pantai Pasir Panjang yang terletak sekitar 1,5 km di sebelah barat Desa Lermatang. Pantai ini diindikasikan sebagai tempat penyu bertelur berdasarkan informasi dari masyarakat. Kondisi lokasi yang berupa pantai berpasir dengan lebar pasir pantai sekitar 10-15 meter dan kemiringan pantai sekitar 29-30 derajat. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG berpotensi menyebabkan memberikan gangguan terhadap penyu yaitu menyebabkan berkurangnya ladang lamun (berkurangnya <i>feeding ground</i>) akibat pembukaan yang dilakukan terbatas pada daerah konstruksi dan atau operasi kilang OLNG. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Berdasarkan hasil konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan yang sudah dilakukan, gangguan terhadap mamalia laut untuk Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG selama tahap operasi tidak menjadi perhatian yang tinggi dari masyarakat. E. Kesimpulan Diketahui keberadaan penyu di Pantai Pasir Panjang yang terletak di sekitar 1,5 km di sebelah barat Desa Lermatang yang diindikasikan sebagai tempat penyu bertelur, serta penyu hijau (<i>Chelonia mydas</i>) dan penyu sisik (<i>Eretmochelys imbricata</i>) yang tertangkap di perairan Pulau Matakus. Namun, pembukaan ladang lamun dilakukan terbatas pada daerah konstruksi dan atau operasi sehingga gangguan terhadap penyu akibat keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG termasuk Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).			
			Demografi	Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah migrasi yang akan datang ke lokasi proyek, diprediksi minimal jumlahnya sama dengan tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap operasi OLNG sebanyak 636 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut sekitar 15% atau 96 orang tenaga kerja diharapkan dapat dipenuhi dari tenaga kerja setempat. B. Kondisi Rona Lingkungan Data jumlah penduduk tahun 2015 hingga 2019 terjadi peningkatan penduduk yang signifikan ditahun 2017 dan 2018 akibat dari tingginya pendatang terutama di desa terdampak proyek, dengan laju pertumbuhan penduduk (<i>rate</i>) tertinggi di lokasi OLNG yaitu Desa Lermatang mencapai	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa	Merupakan kelanjutan dari dampak pada tahap konstruksi. Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi OLNG dengan estimasi

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					32%. Data jumlah penduduk tahun 2019 menunjukkan penurunan <i>rate</i> tertinggi di lokasi proyek -23% akibat migrasi keluar. Rata-rata masyarakat di enam desa terdampak telah menetap lebih dari 25 tahun, hal tersebut berarti mayoritas responden sudah tinggal sejak dari lahir. Alasan utama masyarakat di desa terdampak kegiatan proyek melakukan migrasi adalah pernikahan, pekerjaan dan pendidikan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Diprakirakan penerimaan tenaga kerja tahap operasi akan meningkatkan jumlah migrasi yang berdampak pada perubahan jumlah populasi, mengubah struktur penduduk (umur, jenis kelamin, pendidikan, etnis, agama dan mata pencaharian) dan keamanan. Selain itu, Arus migrasi tersebut akan menekan penduduk lokal sehingga di prediksi komposisi penduduk lokal semakin sedikit dibanding pendatang. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak peningkatan migrasi menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Peningkatan migrasi dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan perlu dikaji lebih lanjut di dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Primer.		Lermatang Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	batas waktu kajian dampak 5 tahun. Perubahan demografi akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.
			Perubahan Komposisi Penduduk (Usia, Jenis kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama, Mata Pencaharian)		A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah migrasi yang akan datang ke lokasi proyek, diprediksi minimal jumlahnya sama dengan tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap operasi OLNG sebanyak 636 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut sekitar 15% atau 96 orang tenaga kerja diharapkan dapat dipenuhi dari tenaga kerja setempat. B. Kondisi Rona Lingkungan Kategorisasi populasi berdasarkan usia bertujuan untuk mengetahui populasi yang produktif (15-64 tahun) dan non produktif (0-14 dan >64 tahun). Pada tahun 2022, persentase penduduk usia produktif adalah 62,5% dan non produktif sebesar 37,4%. Maka, dapat disimpulkan angka ketergantungan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 62,5%, hal tersebut berarti setiap 100 penduduk produktif akan menanggung 62 orang yang tidak produktif. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Migrasi masuk yang terjadi di kampung-kampung dalam wilayah studi karena kegiatan proyek pengembangan proyek OLNG secara keseluruhan dari masa konstruksi sampai operasi diprakirakan akan menambah jumlah penduduk di kampung-kampung tertentu di daerah sekitar lokasi proyek. Hal ini akan berpotensi mengubah struktur populasi (jumlah penduduk, kepadatan, usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, etnis dan agama); yang mempunyai dampak turunan berupa potensi perubahan nilai dan norma sosial, asimilasi dan akulturasi, keberadaan masyarakat adat lokal	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Lauran, Desa Kabyarat, Desa Ingei, Desa Wowonda	Merupakan kelanjutan dari dampak pada tahap konstruksi. Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi OLNG dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun. Perubahan demografi akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					(Indigenous People), kapasitas institusi lokal serta berdampak pula pada komponen sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak perubahan komposisi penduduk menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Perubahan komposisi penduduk akibat keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG merupakan Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan perlu dikaji lebih lanjut di dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Turunan dari peningkatan migrasi (mobilitas penduduk).			
				Perubahan Pertumbuhan Populasi	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah migrasi yang akan datang ke lokasi proyek, diprediksi minimal jumlahnya sama dengan tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap operasi OLNG sebanyak 636 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut sekitar 15% atau 96 orang tenaga kerja diharapkan dapat dipenuhi dari tenaga kerja setempat. B. Kondisi Rona Lingkungan Rata-rata pertumbuhan populasi di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian dari tahun 2017 hingga tahun 2021 sama yakni 2,33%. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja untuk proyek pengembangan OLNG secara keseluruhan dari masa konstruksi sampai operasi memiliki potensi dampak pada pertumbuhan populasi. Peningkatan signifikan jumlah migrasi penduduk di wilayah studi dalam waktu relatif singkat pada masa mobilisasi tenaga kerja yang dimulai sejak tahap konstruksi akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang pesat dibanding dengan pertumbuhan alami dari penduduk itu sendiri. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak perubahan pertumbuhan populasi menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Pertumbuhan populasi penduduk dikategorikan Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan perlu dikaji lebih lanjut di dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Turunan dari peningkatan migrasi (mobilitas penduduk).	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-deso sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Merupakan kelanjutan dari dampak pada tahap konstruksi. Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi OLNG dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun. Perubahan demografi akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.
				Perubahan Kepadatan Penduduk	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah migrasi yang akan datang ke lokasi proyek, diprediksi minimal jumlahnya sama dengan tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap operasi OLNG sebanyak 636 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut sekitar 15% atau 96 orang tenaga kerja diharapkan dapat dipenuhi dari tenaga kerja setempat. B. Kondisi Rona Lingkungan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa	Merupakan kelanjutan dari dampak pada tahap konstruksi. Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Kepadatan penduduk di desa terdampak kegiatan proyek setiap tahunnya memiliki penambahan rata-rata 1 jiwa/Km². Semua desa terdampak di Kecamatan Tanimbar Selatan dapat dikategorikan memiliki kepadatan penduduk rendah, karena memiliki kepadatan penduduk di bawah kepadatan penduduk tingkat kecamatan yaitu 47 jiwa/Km² pada tahun 2019. Rata-rata kepadatan penduduk tanpa adanya proyek hanya 9 jiwa/Km². C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peningkatan signifikan jumlah migrasi penduduk di wilayah studi dalam waktu relatif singkat pada masa mobilisasi tenaga kerja yang dimulai sejak tahap konstruksi akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang pesat dibanding dengan pertumbuhan alami dari penduduk itu sendiri. Sehingga berdampak juga pada perubahan kepadatan penduduk di sekitar lokasi proyek. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak perubahan kepadatan penduduk menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Kegiatan pengoperasian OLNG diperkirakan menyebabkan Dampak Penting Hipotetik (DPH) terhadap perubahan kepadatan penduduk dan perlu dikaji lebih lanjut di dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Turunan dari perubahan pertumbuhan populasi.		Olilit, Desa Sifnana, Desa Luran, Desa Kabyarat, Desa Ingei, Desa Wowonda	selama masa operasi OLNG dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun. Perubahan demografi akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.
				Gangguan Terhadap Keamanan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah migrasi yang akan datang kelokasi proyek, diprediksi minimal jumlahnya sama dengan tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap operasi OLNG sebanyak 636 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut sekitar 15% atau 96 orang tenaga kerja diharapkan dapat dipenuhi dari tenaga kerja setempat. B. Kondisi Rona Lingkungan Pada desa terdampak proyek hanya Desa Lermatang yang terdapat Perkelahian massal selama satu tahun terakhir (tahun 2019) dan memiliki korban jiwa. Sedangkan desa lain memiliki sejarah konflik tentang batas antar desa. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dari tahap konstruksi hingga operasi di lokasi proyek dapat memunculkan keresahan masyarakat terkait keamanan. Pendatang berasal dari beragam suku, ras, budaya dan Pendidikan. Gesekan sosial akan sangat mudah terjadi sehingga meningkatkan kondisi kerentanan sosial masyarakat yang berujung pada tingkat keamanan masyarakat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak gangguan terhadap keamanan menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Merupakan kelanjutan dari dampak pada tahap konstruksi. Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi OLNG dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun. Perubahan demografi akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					E. Kesimpulan Kegiatan pengoperasian OLNG diperkirakan menyebabkan Dampak Penting Hipotetik terhadap keamanan masyarakat dan perlu dikaji lebih lanjut di dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Turunan dari: Peningkatan migrasi (mobilitas penduduk) Peningkatan penyalahgunaan zat adiktif (narkoba dan alkohol); dan Perubahan norma dan nilai sosial.			Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.
			Sosial Ekonomi	Perubahan Peluang Usaha Lokal	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah migrasi yang akan datang kelokasi proyek, diprediksi minimal jumlahnya sama dengan tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap operasi OLNG sebanyak 636 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut sekitar 15% atau 96 orang tenaga kerja diharapkan dapat dipenuhi dari tenaga kerja setempat. B. Kondisi Rona Lingkungan Jumlah usaha/perorangan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tercatat sebanyak 12.649 unit meliputi skala mikro kecil (99,49%) dan skala menengah besar (0,51%). Banyaknya usaha di Kabupaten Maluku Barat Daya tercatat sebanyak 6.461 unit terdiri dari usaha skala mikro kecil (99,47%) dan skala menengah besar (0,53%). Banyaknya usaha mikro di Kecamatan Tanimbar Selatan tercatat 770 unit dan di Kecamatan Wertamrian sebanyak 121 unit usaha yang meliputi bidang perdagangan, hotel, dan restoran. Usaha skala kecil terbanyak adalah usaha perdagangan dan usaha bangunan yang berkembang di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian. Di dua kecamatan, tercatat koperasi yang bergerak pada jenis usaha simpan pinjam, bahan bakar minyak (BBM), pertanian, perikanan, waserda, reparasi, dan warnet. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Keberadaan dan pengoperasian OLNG diperkirakan akan mempengaruhi pertumbuhan usaha lokal di kampung-kampung sekitar proyek ataupun di kampung tempat transit para tenaga kerja dari adanya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan pencari kerja terhadap barang, jasa dan mungkin akomodasi. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak perubahan peluang usaha lokal menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik E. Kesimpulan Keberadaan dan pengoperasian OLNG dapat menimbulkan Dampak Penting Hipotetik (DPH) terhadap pertumbuhan usaha lokal sehingga perlu dikaji lebih lanjut di dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Primer.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Lauran, Desa Kabyarat, Desa Ingei, Desa Wowonda, serta desa-desa pada pulau-pulau kecil di Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu; pulau Masela, Pulau Bababr, Pulau Luang, Pulau Lakor, Pulau Moa, Pulau Leti dan sekitarnya	Keberadaan dan pengoperasian TUKS serta jalan akses ke TUKS akan menerapkan exclusion zone sehingga akan membatasi dan mengganggu akses dan kegiatan perikanan tradisional serta lalu lintas tradisional masyarakat. Adanya pembatasan ini menyebabkan akses masyarakat ke sumber mata pencaharian menjadi terbatas. Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun. Perubahan akses ke sumber mata pencaharian (<i>Ecosystem Services</i>) terutama akan terjadi

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
								terhadap sumber daya perikanan.
				Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah migrasi yang akan datang ke lokasi proyek, diprediksi minimal jumlahnya sama dengan tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap operasi OLNK sebanyak 636 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut sekitar 15% atau 96 orang tenaga kerja diharapkan dapat dipenuhi dari tenaga kerja setempat. B. Kondisi Rona Lingkungan Perkiraan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku tahun 2027 adalah sebesar Rp 4.823.289/bulan C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan operasi OLNK akan melibatkan tenaga kerja setempat yang berasal dari masyarakat setempat. Kesempatan kerja ini diperkirakan berdampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat setempat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak perubahan tingkat pendapatan menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Perubahan tingkat pendapatan masyarakat diklasifikasi sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut didalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Turunan dari perubahan Peluang Usaha Lokal.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus, serta desa-desa pada pulau-pulau kecil di Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu; pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Lakor, Pulau Moa, Pulau Leti dan sekitarnya	Keberadaan dan pengoperasian TUKS serta jalan akses ke TUKS akan menerapkan exclusion zone sehingga akan membatasi dan mengganggu akses dan kegiatan perikanan tradisional serta lalu lintas tradisional masyarakat. Adanya pembatasan ini menyebabkan akses masyarakat ke sumber mata pencaharian menjadi terbatas. Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun. Perubahan akses ke sumber mata pencaharian (<i>Ecosystem Services</i>) terutama akan terjadi terhadap sumber daya perikanan.
				Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah migrasi yang akan datang ke lokasi proyek, diprediksi minimal jumlahnya sama dengan tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap operasi	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh	Keberadaan dan pengoperasian TUKS serta jalan

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					OLNG sebanyak 636 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut sekitar 15% atau 96 orang tenaga kerja diharapkan dapat dipenuhi dari tenaga kerja setempat. B. Kondisi Rona Lingkungan Masyarakat di desa-desa wilayah studi mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani. Perempuan di wilayah studi memiliki pekerjaan sampingan membuat dan menjual makanan dan juga hasil kerajinan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengoperasian OLNG akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang sebagian disebabkan oleh pergeseran mata pencaharian tradisional menjadi bekerja untuk proyek OLNG. Dampak terhadap pola mata pencaharian merupakan turunan peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha lokal, serta akan memberikan dampak turunan lanjutan terhadap tingkat pendapatan masyarakat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak perubahan tingkat pendapatan menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Keberadaan dan pengoperasian OLNG diperkirakan dapat menimbulkan Dampak Penting Hipotetik (DPH) pada pola mata pencaharian dan akan dikaji lebih lanjut di dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Turunan dari perubahan Peluang Usaha Lokal.		oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Lauran, Desa Kabyarat, Desa Ingei, Desa Wowonda, serta desa-desa pada pulau-pulau kecil di Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu; pulau Masela, Pulau Bababr, Pulau Luang, Pulau Lakor, Pulau Moa, Pulau Leti dan sekitarnya	akses ke TUKS akan menerapkan exclusion zone sehingga akan membatasi dan mengganggu akses dan kegiatan perikanan tradisional serta lalu lintas tradisional masyarakat. Adanya pembatasan ini menyebabkan akses masyarakat ke sumber mata pencaharian menjadi terbatas. Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun. Perubahan akses ke sumber mata pencaharian (<i>Ecosystem Services</i>) terutama akan terjadi terhadap sumber daya perikanan.
				Perubahan Terhadap Keberadaan Fasilitas Umum dan Sosial	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah migrasi yang akan datang ke lokasi proyek, diprediksi minimal jumlahnya sama dengan tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap operasi OLNG sebanyak 636 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut sekitar 15% atau 96 orang tenaga kerja diharapkan dapat dipenuhi dari tenaga kerja setempat. B. Kondisi Rona Lingkungan	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Fasilitas umum yang terdapat di desa terdampak antara lain pasar sebanyak 18 unit, warung kelontong 15 unit, Puskesmas Pembantu 4 unit, fasilitas pendidikan 22 unit C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengoperasian OLNG akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang cukup lengkap untuk karyawan seperti <i>camp</i> dan fasilitas pendukungnya. Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak sosial yang dapat ditimbulkan adanya pengoperasian OLNG terutama kebutuhan terhadap fasilitas sosial. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak perubahan keberadaan fasilitas umum menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Keberadaan dan pengoperasian OLNG diperkirakan dapat menimbulkan Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) pada perubahan terhadap keberadaan fasilitas umum dan sosial dan perlu dikelola.			
			Sosial Budaya	Kekhawatiran Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah migrasi yang akan datang ke lokasi proyek, diprediksi minimal jumlahnya sama dengan tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap operasi OLNG sebanyak 636 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut sekitar 15% atau 96 orang tenaga kerja diharapkan dapat dipenuhi dari tenaga kerja setempat. B. Kondisi Rona Lingkungan Lebih dari 60% masyarakat memanfaatkan laut sebagai sumber makanan dan juga sebagai sumber mata pencahariannya. Sebagian besar ikan, udang, maupun biota laut lainnya untuk konsumsi maupun untuk dijual diperoleh dari laut melalui perikanan tangkap. Rumpun laut juga merupakan tanaman laut yang dibudidayakan di pesisir pantai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak 60% responden khawatir terjadinya gangguan aktivitas nelayan dan 20% khawatir berkurangnya area tangkapan nelayan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Secara keseluruhan, kegiatan operasi OLNG akan mempengaruhi dan ekspektasi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan terutama pada saat persepsi masyarakat kegiatan penerimaan tenaga kerja dan proses mobilisasi. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak kekhawatiran masyarakat akibat keberadaan dan pengoperasian OLNG menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Secara keseluruhan, kegiatan operasi OLNG akan mempengaruhi dan ekspektasi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan terutama pada saat persepsi masyarakat kegiatan penerimaan tenaga kerja dan proses mobilisasi. Oleh	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Merupakan kelanjutan dari dampak pada tahap konstruksi. Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi OLNG dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun. Perubahan sosial budaya akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					karena itu, dampak persepsi masyarakat dari kegiatan ini dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan perlu dikaji lebih lanjut dalam studi Andal.			
				Perubahan Budaya	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah migrasi yang akan datang ke lokasi proyek, diprediksi minimal jumlahnya sama dengan tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap operasi OLNG sebanyak 636 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut sekitar 15% atau 96 orang tenaga kerja diharapkan dapat dipenuhi dari tenaga kerja setempat. B. Kondisi Rona Lingkungan Sebagian besar penduduk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah Suku Tanimbar. Etnis yang datang sebagai migran ke wilayah ini seperti secara tradisi yang ter data adalah dari etnis yang tinggal di pulau Sulawesi seperti Makassar atau bugis yang beragama Islam, etnis dari daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang beragama islam maupun kristen, serta etnis Ambon dari daerah Pulau Seram, Tanimbar dari provinsi lainnya, maupun etnis Jawa dari daerah Jawa timur yang pada umumnya berdagang hasil bumi dan rumput laut yang secara tradisional sudah terjadi. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Migrasi masuk sebagai akibat dari perekrutan tenaga kerja dan mobilisasi akan menyebabkan dampak turunan terhadap akulturasi dan asimilasi antara pendatang dan masyarakat setempat. Hal ini juga menyebabkan dampak pada perubahan budaya dan kepercayaan yang berlaku di masyarakat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak perubahan budaya akibat keberadaan dan pengoperasian OLNG menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Asimilasi dan akulturasi dari kegiatan ini dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Turunan dari peningkatan migrasi (mobilitas penduduk).	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Luran, Desa Kabyarat, Desa Ingei, Desa Wowonda	Merupakan kelanjutan dari dampak pada tahap konstruksi. Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi OLNG dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun. Perubahan sosial budaya akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.
				Perubahan Norma dan Nilai Sosial	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah migrasi yang akan datang ke lokasi proyek, diprediksi minimal jumlahnya sama dengan tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap operasi OLNG sebanyak 636 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut sekitar 15% atau 96 orang tenaga kerja diharapkan dapat dipenuhi dari tenaga kerja setempat. B. Kondisi Rona Lingkungan Beberapa norma dan nilai sosial yang masih dilakukan oleh masyarakat Tanimbar antara lain duan lolat, sopi, sasi, pengenalan orang luar komunitas pada roh desa, ritual dan tradisi siklus hidup, pernikahan, penggarapan lahan, pengangkatan anak, dan lain-lain. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki,	Merupakan kelanjutan dari dampak pada tahap konstruksi. Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi OLNG dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja akan berdampak pada perubahan norma-norma dan nilai-nilai sosial sebagai turunan langsung dari dampak terhadap asimilasi dan akulturasi. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak perubahan norma dan nilai sosial akibat keberadaan dan pengoperasian OLNG menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja akan berdampak pada perubahan norma-norma dan nilai-nilai sosial sebagai turunan langsung dari dampak terhadap asimilasi dan akulturasi. Oleh karena itu, parameter ini dapat dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan perlu dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Turunan dari asimilasi dan akulturasi.		Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Perubahan sosial budaya akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.
				Pengaruh Terhadap Warisan Budaya	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah migrasi yang akan datang ke lokasi proyek, diprediksi minimal jumlahnya sama dengan tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap operasi OLNG sebanyak 636 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut sekitar 15% atau 96 orang tenaga kerja diharapkan dapat dipenuhi dari tenaga kerja setempat. B. Kondisi Rona Lingkungan Masyarakat masih memiliki warisan budaya berupa kain tenun, kerajinan kayu, tradisi, tarian, lagu, permainan rakyat, ataupun tanah adat yang diturunkan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dampak terhadap perubahan warisan budaya merupakan turunan tidak langsung dari dampak migrasi masuk yang diakibatkan oleh perekrutan tenaga kerja terhadap keberadaan penduduk asli. Perubahan warisan budaya diperkirakan terjadi pada warisan budaya baik secara fisik (makam, gua, dll) atau warisan non fisik (cerita rakyat, tradisi, tarian, dll) yang akan cenderung diabaikan seiring dengan semakin mengecilnya komposisi penduduk asli. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak pengaruh terhadap warisan budaya akibat keberadaan dan pengoperasian OLNG menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Perubahan warisan budaya dari kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Turunan dari asimilasi dan akulturasi dan perubahan norma dan nilai sosial.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Lauran, Desa Kabyarat, Desa Ingei, Desa Wowonda	Merupakan kelanjutan dari dampak pada tahap konstruksi. Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi OLNG dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun. Perubahan sosial budaya akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.
				Pengaruh Terhadap Masyarakat Adat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah migrasi yang akan datang ke lokasi proyek, diprediksi minimal jumlahnya sama dengan tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap operasi	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang	Merupakan kelanjutan dari dampak pada

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					OLNG sebanyak 636 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut sekitar 15% atau 96 orang tenaga kerja diharapkan dapat dipenuhi dari tenaga kerja setempat. B. Kondisi Rona Lingkungan Secara umum, masyarakat di wilayah studi merupakan masyarakat <i>gemeinschaft</i> atau masyarakat komunal. Sistem kekerabatan yang dianut pada dasarnya adalah sistem patrilineal. Dalam satu desa terdiri dari beberapa marga (Soa), dan satu soa terdiri dari beberapa marga. Masyarakat Tanimbar juga menganut sistem kekerabatan Duan Lolat. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dampak terhadap keberadaan masyarakat adat merupakan turunan langsung dari dampak migrasi masuk yang diakibatkan adanya kesempatan bekerja dan ekonomi lainnya selama masa konstruksi dan operasi. Hal tersebut diperkirakan menyebabkan komposisi penduduk asli menjadi semakin kecil dibandingkan komposisi para pendatang yang semakin bertambah. Dampak keberadaan penduduk asli ini akan memberikan dampak turunan berupa ketegangan sosial tidak hanya bersifat vertikal tapi juga horizontal akibat ketidakmampuan bersaing penduduk asli terhadap para pendatang yang mempunyai modal dan keterampilan lebih baik. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak pengaruh terhadap masyarakat adat akibat keberadaan dan pengoperasian OLNG menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Perubahan komposisi penduduk asli dari kegiatan ini dikategorikan sebagai dampak penting hipotetik dan perlu dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Turunan dari: Peningkatan migrasi (mobilitas penduduk), Asimilasi dan akulturasi; dan Perubahan norma dan nilai sosial.		akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	tahap konstruksi. Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi OLNG dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun. Perubahan sosial budaya akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.
		A. INPEX akan menyusun, mensosialisasikan dan menerapkan manajemen penanganan keluhan kepada masyarakat. B. Menjalinkan komunikasi efektif dengan para stakeholder.		Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah migrasi yang akan datang ke lokasi proyek, diprediksi minimal jumlahnya sama dengan tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap operasi OLNG sebanyak 636 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut sekitar 15% atau 96 orang tenaga kerja diharapkan dapat dipenuhi dari tenaga kerja setempat. B. Kondisi Rona Lingkungan Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak 28% berharap adanya kesempatan kerja, sebanyak 13% berharap adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, 8% berharap tidak mengganggu aktivitas nelayan dan 18% berharap adanya bantuan modal usaha. Tidak ada keluhan masyarakat oleh kegiatan pembuatan sarana dan prasarana pipa dan TUKS tetapi terdapat 60% responden yang khawatir akan terjadinya gangguan aktivitas nelayan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Keberadaan dan pengoperasian Kilang OLNG dapat menimbulkan kekhawatiran akan mata pencaharian, kekhawatiran akan gangguan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Lauran, Desa Kabayat, Desa Ingei, Desa Wowonda	Merupakan dampak turunan dari kekhawatiran masyarakat dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					aktivitas nelayan, kekhawatiran akan terjadinya kerusakan lingkungan, dan kekhawatiran akan wilayah tangkapan ikan yang semakin sempit. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak harapan dan keluhan masyarakat akibat keberadaan dan pengoperasian OLNG menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat dan dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik.			
			Kesehatan Masyarakat	Perubahan Penyakit Menular	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja yang besar pada tahap operasi sejumlah 850 personel terdiri dari tenaga kerja untuk Kilang OLNG termasuk seluruh TUKS sejumlah 636 orang, dan FPSO (termasuk SURF dan GEP yang akan dioperasikan secara <i>remote</i> dari FPSO) sejumlah 214 orang. B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan data sekunder untuk prevalensi penyakit 10 penyakit terbanyak dari tahun 2021 – 2023 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah ISPA yaitu tahun dengan prevalensi berturut-turut sebesar 14,6%, 15,7% dan 12,7% C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah populasi yang besar dari orang yang berada wilayah proyek serta kontak antara masyarakat pendatang dan masyarakat setempat yang meningkat (kadang-kadang diikuti oleh kondisi kesehatan lingkungan yang memburuk akibat populasi berlebih) kemungkinan prevalensi penyakit di daerah penelitian juga berubah, peningkatan kejadian penyakit yang ada dan baru sama. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perubahan penyakit menular merupakan aspek yang menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Kegiatan ini dikategorikan mempunyai Dampak Penting Hipotetik (DPH) terhadap perubahan penyakit menular dan perlu dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Turunan dari: Peningkatan migrasi (mobilitas penduduk), Perubahan norma dan nilai sosial; dan Perubahan sanitasi lingkungan.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Dampak terhadap kesehatan masyarakat merupakan dampak turunan oleh adanya perubahan terhadap demografi terutama oleh adanya influx (immigrasi) penduduk ke wilayah kerja INPEX. Dampak Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi OLNG dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun.
				Perubahan Penyakit Tidak Menular	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja yang besar pada tahap operasi sejumlah 850 personel terdiri dari tenaga kerja untuk Kilang OLNG termasuk seluruh TUKS sejumlah 636 orang, dan FPSO (termasuk SURF dan GEP yang akan dioperasikan secara <i>remote</i> dari FPSO) sejumlah 214 orang. B. Kondisi Rona Lingkungan Data prevalensi PTM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menurut gejala dan diagnosa yang diambil dari Profil Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2015 a prevalensi yang tertinggi adalah hipertensi Menurut kunjungan pasien di	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa	Dampak terhadap kesehatan masyarakat merupakan dampak turunan oleh adanya perubahan terhadap demografi

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian																										
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)																												
					Puskesmas Pembantu Lermatang – Kecamatan Tanimbar selatan (2015 – 2019), PTM yang masuk 10 penyakit terbanyak di Yankes tersebut adalah salah satu dan tertinggi adalah hipertensi. Pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, penyakit tidak menular yang paling banyak diderita oleh masyarakat adalah hipertensi dan Menurut kunjungan pasien di Puskesmas Pembantu Lermatang – Kecamatan Tanimbar selatan (2015 – 2019), PTM yang masuk 10 penyakit terbanyak di pelayanan kesehatan diantaranya adalah Penyakit Hipertensi. Tabel kasus hipertensi di beberapa desa <table><tr><th>Desa</th><th>Kasus</th></tr><tr><td>Latdalam</td><td>26</td></tr><tr><td>Bomaki</td><td>14</td></tr><tr><td>Lermatang</td><td>20</td></tr><tr><td>Matakus</td><td>2</td></tr><tr><td>Olilit Barat</td><td>21</td></tr><tr><td>Olilit Timur</td><td>39</td></tr><tr><td>Lauran</td><td>31</td></tr><tr><td>Ilngai</td><td>13</td></tr><tr><td>Wowonda</td><td>17</td></tr><tr><td>Sifnana</td><td>15</td></tr><tr><td>Kabiarat</td><td>13</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja untuk operasional OLNG akan meningkatkan migrasi penduduk ke wilayah proyek. Diperkirakan dua sampai dengan tiga kali lipat dari jumlah tenaga kerja yang direkrut menjadi pencari kerja dan pencari peluang ekonomi di berbagai kampung dekat proyek OLNG. Jumlah orang di wilayah proyek yang meningkat pesat kemungkinan akan mengubah pola penyakit di daerah studi, seperti masuknya penyakit baru atau strain penyakit baru bagi masyarakat setempat.. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perubahan penyakit tidak menular merupakan aspek yang menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Perubahan penyakit tidak menular dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan perlu dikaji lebih lanjut dalam studi ANDAL.	Desa	Kasus	Latdalam	26	Bomaki	14	Lermatang	20	Matakus	2	Olilit Barat	21	Olilit Timur	39	Lauran	31	Ilngai	13	Wowonda	17	Sifnana	15	Kabiarat	13				Lauran, Desa Kabyarat, Desa Ingei, Desa Wowonda	terutama oleh adanya influx (immigrasi) penduduk ke wilayah kerja INPEX. Dampak Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi OLNG dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun.
Desa	Kasus																																	
Latdalam	26																																	
Bomaki	14																																	
Lermatang	20																																	
Matakus	2																																	
Olilit Barat	21																																	
Olilit Timur	39																																	
Lauran	31																																	
Ilngai	13																																	
Wowonda	17																																	
Sifnana	15																																	
Kabiarat	13																																	
				Perubahan Status Gizi Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja yang besar pada tahap operasi sejumlah 850 personel terdiri dari tenaga kerja untuk Kilang OLNG termasuk seluruh TUKS sejumlah 636 orang, dan FPSO (termasuk SURF dan GEP yang akan dioperasikan secara <i>remote</i> dari FPSO) sejumlah 214 orang.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak	Dampak terhadap kesehatan masyarakat merupakan dampak turunan																										

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan data BPS tahun 2022 kecamatan Tanimbar rata-rata desa jumlah balita kekurangan gizi sebanyak 6 kasus dan di kecamatan Wertamrian ada 2 kasus. Berdasarkan data SKI tahun 2023 kepulauan Tanimbar prevalensi stunting 25,1% Tingginya angka gizi buruk disebabkan karena kebutuhan gizi harian balita terutama protein tidak terpenuhi akibat tingkat ekonomi masyarakat dan minimnya pengetahuan orang tua tentang gizi C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peningkatan jumlah populasi proyek dapat mempengaruhi kondisi status gizi masyarakat sekitar. Karena akan banyak pemukim baru yang membutuhkan ketersediaan pangan yang lebih besar sehingga risiko kerawanan pangan di musim kemarau akan meningkat D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perubahan status gizi masyarakat merupakan aspek yang menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Peningkatan jumlah populasi proyek dapat mempengaruhi kondisi status gizi masyarakat yang berkaitan dengan ketersediaan pangan. Sehingga diprediksi jika adanya lonjakan jumlah penduduk akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan . Perubahan status gizi masyarakat dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH).		langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	oleh adanya perubahan terhadap demografi terutama oleh adanya influx (immigrasi) penduduk ke wilayah kerja INPEX. Dampak Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi OLNK dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun.
				Perubahan Sanitasi Lingkungan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja yang besar pada tahap operasi sejumlah 850 personel terdiri dari tenaga kerja untuk Kilang OLNK termasuk seluruh TUKS sejumlah 636 orang, dan FPSO (termasuk SURF dan GEP yang akan dioperasikan secara <i>remote</i> dari FPSO) sejumlah 214 orang. B. Kondisi Rona Lingkungan Indikator sanitasi layak mengacu kepada 5 pilar indikator Sanitasi total berbasis masyarakat Adlah Stop BABS , Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga dengan cakupan 90%. Berdasarkan data STBM Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk sanitasi layak 81,37% , desa dengan STBM 91,46% dan Desa stop BABS 46% C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja akan mendorong para tenaga kerja dan pencari kerja menuju kampung-kampung di sekitar proyek. Pertambahan para pendatang ini diperkirakan terjadinya perubahan atau penurunan sanitasi lingkungan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perubahan sanitasi lingkungan merupakan aspek yang menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Luran, Desa Kabyarat, Desa Ingei, Desa Wowonda	Dampak terhadap kesehatan masyarakat merupakan dampak turunan oleh adanya perubahan terhadap demografi terutama oleh adanya influx (immigrasi) penduduk ke wilayah kerja INPEX. Dampak Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi OLNK dengan estimasi

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					E. Kesimpulan Pertambahan para pendatang ini diperkirakan menyebabkan tekanan pada kondisi kesehatan lingkungan kampung-kampung di sekitar proyek. Kegiatan ini berpotensi akan menimbulkan Dampak Penting Hipotetik (DPH) terhadap perubahan sanitasi lingkungan dan perlu dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Primer.			batas waktu kajian dampak 5 tahun.
				Perubahan Fasilitas Kesehatan dan Akses ke Layanan Kesehatan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja yang besar pada tahap operasi sejumlah 850 personel terdiri dari tenaga kerja untuk Kilang OLNG termasuk seluruh TUKS sejumlah 636 orang, dan FPSO (termasuk SURF dan GEP yang akan dioperasikan secara <i>remote</i> dari FPSO) sejumlah 214 orang. B. Kondisi Rona Lingkungan FASKES di Lokasi Studi kondisi eksisting adalah: Rumah Sakit Umum (4), Rumah Bersalin (1), Puskesmas (12), Posyandu (159), Polindes/Poliklinik (14). Tenaga medis yang ada adalah sebagai berikut (lebih dari 50% berada di Kecamatan Tanimbar Selatan): Dokter 55 tenaga, Perawat 342 tenaga, Bidan 83 tenaga, Farmasi 25 tenaga, Ahli Gizi 16 tenaga, Teknisi Medis 4 tenaga, Ahli Sanitasi/Kesehatan Lingkungan 11 tenaga, dan Ahli Kesehatan Masyarakat 39 tenaga, C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dengan adanya penambahan jumlah penduduk akibat operasi ONLG akan menimbulkan kesenjangan dan kualitas pelayanan kesehatan antara penduduk setempat dengan tenaga proyek yang menetap. Terdapat pula peningkatan kebutuhan dari masyarakat karena adanya kompleksitas penyakit. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Harapan masyarakat supaya INPEX dapat membantu meningkatkan fasilitas kesehatan. E. Kesimpulan Akses terhadap pelayanan kesehatan dari kegiatan ini dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Primer.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Dampak terhadap kesehatan masyarakat merupakan dampak turunan oleh adanya perubahan terhadap demografi terutama oleh adanya influx (immigrasi) penduduk ke wilayah kerja INPEX. Dampak Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi OLNG dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun.
			Transportasi	Gangguan Terhadap Transportasi Darat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Tenaga kerja Kilang OLNG ketika beroperasi sebanyak 636 orang dan untuk FPSO sebanyak 214 orang. Pada saat beroperasi akan ada bangkitan dan tarikan pergerakan, selama masa operasi kilang selama tiga puluh (30) tahun. B. Kondisi Rona Lingkungan Ruas jalan yang dilewati sebanyak 7, kinerjanya masih di bawah batas yang ditetapkan 0.7 C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa	Keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG akan meningkatkan volume lalu lintas dan dapat mengganggu transportasi darat.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Keberadaan dan pengoperasian OLNG akan berpengaruh terhadap transportasi darat karena adanya peningkatan penduduk dari tenaga kerja yang bekerja di tahap operasi OLNG serta dari kemungkinan hilir mudiknya kendaraan untuk menunjang kegiatan operasional baik dari dan menuju lokasi OLNG. Aktivitas ini akan menimbulkan gangguan lalu lintas darat yang signifikan di beberapa titik jalan karena adanya peningkatan volume kendaraan D. Intensitas Perhatian Masyarakat Gangguan terhadap transportasi darat tidak menjadi isu saat konsultasi publik E. Kesimpulan Keberadaan dan pengoperasian OLNG menyebabkan gangguan terhadap transportasi darat sehingga di kategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal.		Lauran, Desa Kabyarat, Desa Ingei, Desa Wowonda	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi OLNG dengan estimasi batas waktu kajian dampak adalah 5 tahun.
11.	Pengoperasian OLNG: Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU)	A. Melakukan pemantauan dan perawatan rutin terhadap unit pentawaran gas kecut agar dapat beroperasi secara optimal. B. Mengolah lebih lanjut emisi yang dihasilkan oleh unit pentawaran gas kecut hingga mencapai konsentrasi yang sesuai dengan baku mutu kualitas udara.	Kualitas Udara H ₂ S < 20 µg/m ³ (< 0,014 ppm)	Peningkatan Konsentrasi H ₂ S	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Unit Pentawaran Gas Kecut memiliki kapasitas untuk mengolah gas umpan di inlet Kilang OLNG sebesar 1.909 MMSCFD atau setara dengan produk LNG sebesar 9.5 MTPA. B. Kondisi Rona Lingkungan H ₂ S tidak terdeteksi (< 0,014 ppm). Jadi dapat disimpulkan kondisi rona lingkungan baik C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan jumlah gas kecut yang dilepas ke udara diperkirakan sebesar 205 ton/jam/train atau total untuk 2 Train sebesar 410 ton/jam. Lokasi cerobong pembuangan gas kecut direncanakan berada di dalam Unit Pentawaran Gas Kecut, yaitu di atas <i>Amine Regeneration Reflux Drum</i> pada ketinggian <i>pipelack</i> (sekitar 20 m) di atas tanah. Lokasi ini berjarak sekitar 2 km dari lokasi pemukiman penduduk terdekat yaitu Desa Lermatang. Potensi pelepasan gas kecut ini tergolong besar dan jarak 2 km relatif dekat D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak ada kekhawatiran masyarakat terkait dampak peningkatan konsentrasi H ₂ S E. Kesimpulan Atas dasar kehati-hatian dampak potensial peningkatan H ₂ S ini disimpulkan DPH	Disimpulkan sebagai DPH (Peningkatan Konsentrasi H ₂ S)	Persebaran dampak kualitas udara yang bersumber dari kegiatan OLNG diperkirakan akan menyebar secara dominan ke arah Barat-Barat Laut, mencapai jarak maksimum sekitar 2,5 km dari cerobong (<i>stack</i>).	Berlangsung pada ruang dan waktu yang sama selama masa operasi OLNG dengan estimasi batas waktu kajian dampak selama 5 tahun
		A. Menerapkan rencana pengelolaan gas rumah kaca yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan, regulasi di Indonesia, dan regulasi internasional. B. Memonitor, menghitung, dan melaporkan seluruh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan berdasarkan regulasi nasional dan internasional.	Gas Rumah Kaca	Peningkatan Merkuri	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Unit Pentawaran Gas Kecut memiliki kapasitas untuk mengolah gas umpan di inlet Kilang OLNG sebesar 1.909 MMSCFD atau setara dengan produk LNG sebesar 9.5 MTPA. B. Kondisi Rona Lingkungan Secara nasional emisi CO ₂ dari aktivitas antropogenik adalah 1200 juta ton CO ₂ e per tahun C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Disimpulkan sebagai DPH	Gas rumah kaca apabila teremisikan ke atmosfer, maka akan menyebar secara horizontal dan vertikal mula-	Berlangsung pada ruang dan waktu yang sama selama masa operasi OLNG dengan estimasi waktu selama 5 tahun. Emisi gas rumah kaca selama masa

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		C. Memprediksi emisi gas rumah kaca di masa depan untuk mengantisipasi potensi dampak yang dihasilkan di masa depan.			Unit pentawaran gas kecut ini mengonsumsi energi yang berasal dari pembakaran gas. Dengan demikian berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terungkap adanya kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Dampak peningkatan emisi gas rumah kaca dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH)		mula secara regional dan berlanjut secara global, oleh karena itu batas ekologi penyebaran gas rumah kaca adalah bersifat global.	operasi OLNG akan diprediksi menggunakan perhitungan estimasi GRK sesuai dengan pedoman IPCC. Batas waktu kajian dampak untuk GRK adalah lebih dari 20 tahun.
12.	Pengoperasian OLNG: Emisi Penggerak Turbin Gas dan Emisi PLTG	A. Mengelola setiap emisi udara dengan melakukan pengolahan lebih lanjut menggunakan teknologi pengendalian pencemaran udara hingga setiap parameter mencapai konsentrasi yang sesuai dengan baku mutu. B. Melakukan monitoring rutin terhadap emisi udara yang dikeluarkan melalui cerobong.	Kualitas Udara CO < 100 µg/m ³ NO ₂ < 5 µg/m ³ SO ₂ < 20-21 µg/m ³ O ₃ < 20 µg/m ³ HC K 50 µg/m ³ TSP 13,1-77,5 µg/m ³ PM10 2,5-72,5 µg/m ³ PM2,5 0,9-61,5 µg/m ³	Peningkatan Konsentrasi SO ₂ dan NOx	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Turbin gas penggerak kompresor (GTD) diperlukan untuk menggerakkan kompresor-kompresor refrigeran di Unit Pencairan Gas. Direncanakan akan dipasang empat (4) turbin gas penggerak kompresor dengan kapasitas masing-masing 110 MW. jumlah bahan bakar gas yang diperlukan oleh turbin gas penggerak kompresor (GTD) diperkirakan sebesar 94,5 ton/jam. Diperkirakan selama operasi normal dioperasikan 3 (tiga) GTG dengan 1 (satu) GTG sebagai cadangan. Berdasarkan hasil simulasi proses dalam studi Pra-FEED, jumlah bahan bakar gas yang diperlukan oleh turbin gas pembangkit listrik (GTG) diperkirakan sebesar 20,5 ton/jam B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi rona lingkungan untuk parameter NO ₂ , dan SO ₂ di sekitar OLNG tergolong baik. Kadar SO ₂ dan NO ₂ maksimum yang terukur di lapangan berada di bawah 50% baku mutu udara ambien menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan komposisi emisi gas turbin gas penggerak kompresor adalah CO ₂ dengan sebagian kecil polutan yaitu NOx (maksimum 25 ppm) dan SOx (maksimum 1,35 ppm). komposisi emisi gas turbin gas pembangkit listrik adalah CO ₂ dengan sebagian kecil polutan yaitu NOx (maksimum 25 ppm) dan SOx (maksimum 1.35 ppm). D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terungkap adanya kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Dampak disimpulkan DPH	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak kualitas udara yang bersumber dari kegiatan OLNG diperkirakan akan menyebar secara dominan ke arah Barat-Barat Laut, mencapai jarak maksimum sekitar 2.5 km dari cerobong (<i>stack</i>).	Berlangsung pada ruang dan waktu yang sama selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak selama 5 tahun
		A. Menerapkan rencana pengelolaan gas rumah kaca yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan, regulasi di Indonesia, dan regulasi internasional. B. Memonitor, menghitung, dan melaporkan seluruh emisi gas rumah kaca yang	Gas Rumah Kaca	Peningkatan Emisi CO ₂ , CH ₄ , dan N ₂ O	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan diperkirakan laju emisi CO ₂ dari tahap operasi adalah sebesar 7,698,890 ton per tahun. Peningkatan emisi CO ₂ akan berlangsung secara menerus selama tahap operasi berlangsung B. Kondisi Rona Lingkungan	Disimpulkan sebagai DPH	Gas rumah kaca apabila teremisikan ke atmosfer, maka akan menyebar	Emisi Penggerak Turbin Gas dan Emisi PLTG sebagai penghasil gas rumah kaca selama masa operasi FPSO.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		dihasilkan berdasarkan regulasi nasional dan internasional. C. Memprediksi emisi gas rumah kaca di masa depan untuk mengantisipasi potensi dampak yang dihasilkan di masa depan.			Secara nasional emisi CO ₂ dari aktivitas antropogenik adalah 1200 juta ton CO ₂ e per tahun C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dampak dari kegiatan Emisi Turbin Gas Penggerak Kompresor dan Emisi PLTG adalah peningkatan emisi gas rumah kaca (CO ₂ dan CH ₄). D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terungkap adanya kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Peningkatan emisi gas rumah kaca dari operasional generator/turbin dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH).		secara horizontal dan vertikal mula-mula secara regional dan berlanjut secara global, oleh karena itu batas ekologi penyebaran gas rumah kaca adalah bersifat global.	Emisi GRK akan berlangsung pada ruang dan waktu yang sama dengan estimasi waktu selama 5 tahun selama operasi FPSO berlangsung. Emisi gas rumah kaca akan diprediksi menggunakan perhitungan estimasi GRK sesuai dengan pedoman IPCC.
13.	Pengoperasian OLNG: <i>Flaring (HP Wet, HP Dry dan LP Dry Flaring)</i>	A. Membuat dan menerapkan prosedur <i>Flaring</i> agar proses <i>Flaring</i> berlangsung dalam kondisi optimal. B. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap kondisi setiap peralatan yang digunakan dalam proses <i>Flaring</i> . Melakukan monitoring terhadap emisi gas yang dihasilkan dari proses <i>Flaring</i> .	Kualitas Udara CO < 100 µg/m ³ NO ₂ < 5 µg/m ³ SO ₂ < 20-21 µg/m ³ O ₃ < 20 µg/m ³ HC K 50 µg/m ³ TSP 13,1-77,5 µg/m ³ PM ₁₀ 2,5-72,5 µg/m ³ PM _{2,5} 0,9-61,5 µg/m ³	Opasitas	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penyalan suar bakar (<i>Flaring</i>) hanya diizinkan selama operasi-operasi darurat (<i>emergency</i>), gangguan kilang, pemeliharaan, <i>shutdown</i> , dan <i>start-up</i> . Perkiraan volume gas alam yang dialirkan ke suar bakar pada saat <i>Flaring</i> dalam kondisi <i>start-up</i> dan darurat adalah 135 ton per tahun. Sistem suar bakar akan didesain untuk opasitas sebesar 40%. B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi rona lingkungan untuk parameter NO ₂ , dan SO ₂ di sekitar OLNG tergolong baik. Kadar SO ₂ dan NO ₂ maksimum yang terukur di lapangan berada di bawah 50% baku mutu udara ambien menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Proses <i>Flaring</i> yang dilakukan pada saat kondisi <i>emergency</i> dapat menimbulkan opasitas. Namun, pada saat kondisi normal tidak akan terdapat kegiatan <i>Flaring</i> . D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terungkap adanya kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Dengan pengoperasian yang tepat, tingkat opasitas dapat dikurangi sehingga dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
		A. Membuat dan menerapkan prosedur <i>Flaring</i> agar proses <i>Flaring</i> berlangsung dalam kondisi optimal. B. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap kondisi setiap peralatan yang digunakan dalam proses <i>Flaring</i>	Cahaya	Pendaran Cahaya	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penyalan suar bakar (<i>Flaring</i>) hanya diizinkan selama operasi-operasi darurat (<i>emergency</i>), gangguan kilang, pemeliharaan, <i>shutdown</i> , dan <i>start-up</i> . Perkiraan volume gas alam yang dialirkan ke suar bakar pada saat <i>Flaring</i> dalam kondisi <i>start-up</i> dan darurat adalah 135 ton per tahun. B. Kondisi Rona Lingkungan	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Berdasarkan dokumen Andal INPEX, tidak terdapat sumber cahaya di daerah OLNG pada malam hari sehingga iluminansi horizontal dan vertikal pada area unit diasumsikan bernilai sebesar 0 lux. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pendaran cahaya dari proses <i>Flaring</i> merupakan <i>given impact</i> atau dampak yang tidak terhindarkan. Namun <i>Flaring</i> hanya dilakukan apabila dalam keadaan abnormal sehingga frekuensinya akan sedikit. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Pendaran cahaya tidak menjadi perhatian masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Dampak dari <i>Flare</i> disimpulkan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).			
		A. Menerapkan rencana pengelolaan gas rumah kaca yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan, regulasi di Indonesia, dan regulasi internasional. B. Memonitor, menghitung, dan melaporkan seluruh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan berdasarkan regulasi nasional dan internasional. C. Memprediksi emisi gas rumah kaca di masa depan untuk mengantisipasi potensi dampak yang dihasilkan di masa depan.	Gas Rumah Kaca	Peningkatan Emisi CO ₂ , CH ₄ dan N ₂ O	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penyalan suar bakar (<i>Flaring</i>) hanya diizinkan selama operasi-operasi darurat (<i>emergency</i>), gangguan kilang, pemeliharaan, <i>shutdown</i>, dan <i>start-up</i>. Perkiraan volume gas alam yang dialirkan ke suar bakar pada saat <i>Flaring</i> dalam kondisi <i>start-up</i> dan darurat adalah 135 ton per tahun B. Kondisi Rona Lingkungan Secara nasional emisi CO₂ dari aktivitas antropogenik adalah 1200 juta ton CO₂e per tahun C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Proses <i>Flaring</i> yang hanya akan dilakukan pada saat kondisi tidak normal dan diperkirakan akan meningkatkan emisi gas rumah kaca. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Peningkatan emisi menjadi perhatian masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Peningkatan emisi gas rumah kaca pada proses flaring merupakan dampak penting hipotetik (DPH).	Disimpulkan sebagai DPH	Gas rumah kaca apabila teremisikan ke atmosfer, maka akan menyebar secara horizontal dan vertikal mula-mula secara regional dan berlanjut secara global, oleh karena itu batas ekologi penyebaran gas rumah kaca adalah bersifat global.	Berlangsung pada ruang dan waktu yang sama selama masa operasi OLNG dengan estimasi waktu selama 5 tahun. Emisi gas rumah kaca selama masa operasi OLNG akan diprediksi menggunakan perhitungan estimasi GRK sesuai dengan pedoman IPCC. Batas waktu kajian dampak untuk GRK adalah lebih dari 20 tahun.
14.	Pengoperasian OLNG: Pasokan Air (Desalinasi Air Laut) dan Pembuangan <i>Brine Water</i> di OLNG	A. Tidak ada pengelolaan secara khusus terhadap peningkatan salinitas akibat pembuangan limbah proses desalinasi B. Inpex akan mengikuti Persetujuan teknis (Pertek) pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut oleh Inpex Masela Ltd No. S.376/PPKL/PPKP/PKI.I/9/2021.	Kualitas Air Laut	Peningkatan Salinitas	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Pada tahap operasi Kilang OLNG diperlukan air tawar (<i>fresh water</i>) untuk air utilitas, air minum untuk personel dan <i>portable water system</i>, kemudian sebagai bahan baku air demin, untuk air tambahan (<i>make up</i>), dan <i>fire water system</i>. Air tawar diperoleh dari pengolahan air laut dengan proses desalinasi. Proses desalinasi air laut akan menggunakan membran (<i>reverse osmosis</i> - RO) untuk memisahkan garam dari air laut. Air buangan (<i>reject water</i>) dari proses desalinasi mengandung kadar garam yang tinggi (<i>Brine Water</i> atau limbah air asin) dan akan dibuang kembali ke laut. Volume air laut yang akan diolah di <i>Desalination Facility</i> sebesar 9.600 m³/hari untuk memperoleh air tawar (<i>fresh water</i>) sebesar 2.400 m³/hari,	Disimpulkan sebagai DPH	Pembuangan <i>Brine Water</i> oleh proses desalinasi air laut untuk pasokan air di OLNG akan dibuang melalui <i>outfall</i> di Teluk Saumlaki yang mengakibatkan	Peningkatan salinitas air laut akan dimodelkan menggunakan menggunakan data hidrooseanografi. Batas waktu kajian dampak berupa sebaran peningkatan salinitas air laut

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					sehingga air asin (<i>brine water</i>) yang terpisahkan dari proses desalinasi yaitu sebesar 7.200 m³/hari. B. Kondisi rona lingkungan Berdasarkan data rona lingkungan yang diambil dari hasil survei rona pada musim kemarau (2019), salinitas di perairan Teluk Saumlaki berkisar antara 29,9 – 34,4‰ dengan rata-rata 33,7‰. Sedangkan pada musim hujan (2020), salinitas di perairan Teluk Saumlaki berkisar antara 31,2 – 33,7‰ dengan rata-rata 32,5. Baku mutu (BM) untuk coral & lamun = Alami s/d 34. Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut) mengatur bahwa perubahan salinitas diperbolehkan ± <5 0/00 dari rata-rata salinitas musiman. C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan Pembuangan konsentrat <i>Brine Water</i> dari proses desalinasi air laut dapat meningkatkan salinitas air di lokasi pembuangan (Teluk Saumlaki) secara signifikan. <i>Outfall</i> pembuangan limbah ini akan menjadi satu saluran pembuangan umum (<i>common outfall</i>) dengan <i>outfall</i> pembuangan limbah <i>sewage treatment plan</i> (STP) dan <i>outfall waste water treatment plan</i> (WWTP) di dekat TUKS pemuatan LNG dan kondensat. D. Intensitas perhatian masyarakat Hasil konsultasi publik menunjukkan bahwa adanya intensitas perhatian masyarakat terhadap dampak lingkungan dari kegiatan desalinasi air laut dan pembuangan <i>brine water</i> akan meningkatkan salinitas air dan mempengaruhi biota air. E. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian rencana usaha dan/atau kegiatan desalinasi air laut dan pembuangan <i>brine water</i> untuk keperluan air utilitas, air minum untuk personel, pada tahap operasi OLNG diidentifikasi sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal.		peningkatan salinitas air laut. Persebaran dampak peningkatan salinitas air laut di Teluk Saumlaki diperkirakan maksimum sekitar 300 m dari titik <i>outfall</i>. Arus laut di Teluk Saumlaki dominan disebabkan gerakan pasang-surut, maka persebaran dampak adalah ke arah utara pada saat pasang dan ke arah selatan pada saat surut.	adalah selama 5 tahun.
15.	Pengoperasian OLNG: Sistem Pendinginan Menggunakan Udara	Melakukan pemetaan penyebaran panas yang dihasilkan dari proses pendinginan.	Suhu udara rata-rata selama periode tahun 2014 – 2023 berkisar pada 25,9 °C – 29,33 °C. Suhu udara rata-rata maksimum bulanan selama	Dispersi Panas	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Turbin gas penggerak kompresor (GTD) diperlukan untuk menggerakkan kompresor-kompresor refrigeran di Unit Pencairan Gas. Direncanakan akan dipasang empat (4) turbin gas penggerak kompresor dengan kapasitas masing-masing 110 MW. jumlah bahan bakar gas yang diperlukan oleh turbin gas penggerak kompresor (GTD) diperkirakan sebesar 94,5 ton/jam. Diperkirakan selama operasi normal dioperasikan 3 (tiga) GTG dengan 1 (satu) GTG sebagai cadangan. Berdasarkan hasil simulasi proses dalam studi Pra-FEED, jumlah bahan bakar gas yang diperlukan oleh turbin gas pembangkit listrik (GTG) diperkirakan sebesar 20,5 ton/jam B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi lingkungan tergolong normal dengan kisaran 25,7 °C – 29,33 °C. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
			periode tersebut berkisar 27,0 °C – 30,0 °C, sedangkan suhu udara rata-rata minimum berkisar 25,7 °C – 28,8 °C.		Panas yang dihasilkan dalam proses di OLNG berasal dari pendinginan <i>refrigant</i> C3-MR menggunakan <i>finfan cooler</i>. Dampak ini diperkirakan akan menyebar secara vertikal sehingga tidak mempengaruhi lingkungan di sekitar lokasi persebaran panas D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terdapat kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Dampak disimpulkan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH)			
16.	Pengoperasian TUKS: Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS	A. Menggunakan penerangan hanya apabila diperlukan. B. Melakukan pemetaan terhadap jangkauan pendaran cahaya.	Cahaya	Pendaran Cahaya (Dampak Visual)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas TUKS yang akan digunakan yaitu: TUKS dermaga pemuatan LNG dan kondensat, TUKS dermaga bongkar muat, <i>causeway</i> dan <i>trestle bridge</i>. B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan dokumen Andal INPEX, tidak terdapat sumber cahaya di daerah OLNG pada malam hari sehingga iluminansi horizontal dan vertikal pada area unit diasumsikan bernilai sebesar 0 lux. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pendaran cahaya merupakan <i>given impact</i> atau dampak yang tidak terhindarkan. Keberadaan dan pengoperasian TUKS menimbulkan pendaran cahaya yang bersumber dari penerangan yang digunakan sebagai bagian dari pengoperasian TUKS. Dampak pendaran cahaya ini dapat mengganggu biota dan aktivitas penduduk. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Pendaran cahaya tidak menjadi perhatian masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Pendaran cahaya akibat Keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas TUKS digolongkan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus terhadap perubahan <i>water regim</i> dan gelombang, karena perubahan <i>water regim</i> dan gelombang merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>) dari kegiatan pembangunan <i>breakwater</i> . Namun demikian perubahan <i>water regim</i> dan gelombang akan dimodelkan dan dipantau.	Oseanografi	Perubahan pola arus dan gelombang	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan <i>causeway</i> sepanjang 2 Km, lebar 15 m dan lebar <i>slope</i> 60 m menjorok ke tengah teluk di OLNG. B. Kondisi Rona Lingkungan Di rencana lokasi pembangunan TUKS Teluk Saumlaki, pola arus cenderung dipengaruhi oleh proses pasang surut, serta musim di mana pada saat pasang massa air memasuki teluk dan sebaliknya pada saat surut massa air meninggalkan teluk dengan kecepatan arus berkisar antara 20-30 cm/detik. Secara umum pola arus pada saat musim timur sama dengan musim barat, hanya saja terlihat bahwa arus lebih kuat bagian pantai dan massa air lebih terdorong ke arah pantai.	Disimpulkan sebagai DPH	Dampak terhadap perubahan <i>water regim</i> diperkirakan menyebar di daerah tepi pantai (<i>near shore</i>) sisi barat Teluk Saumlaki	Perubahan pola arus dan gelombang, dan timbulnya abrasi serta akresi pantai akan berlangsung dalam jangka waktu panjang Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Pada musim timur gelombang merambat masuk melalui bagian tengah mulut teluk. Pada musim timur kondisi gelombang dalam teluk lebih bergejolak dibandingkan dengan musim barat. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS yang sifatnya permanen akan menyebabkan perubahan <i>water regim</i> di Teluk Saumlaki. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak perubahan pola arus dan gelombang tidak muncul saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Perubahan pola arus dan gelombang merupakan Dampak Penting Hipotetik (DPH). Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Primer.			operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak selama 5 tahun.
				Timbulnya Abrasi dan Akresi	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan <i>causeway</i> sepanjang 2 Km, lebar 15 m dan lebar <i>slope</i> 60 m menjorok ke tengah teluk di OLNG. B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan hasil pemodelan gelombang di lokasi studi kondisi tersebut hanya pada saat pasang <i>tidal flat</i> tertutup air laut, itu pun dangkal sekali, sehingga energi gelombang kecil. Gelombang akan pecah karena tidak stabil, rasio antara tinggi gelombang dan panjang gelombang sudah melebihi 1/7. Energi gelombang sudah pecah di area <i>slope</i> kedalaman sehingga perubahan garis pantai menjadi sangat kecil. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peningkatan abrasi dan akresi pantai merupakan dampak turunan dari adanya perubahan <i>water regim</i> dan gelombang. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak timbulnya abrasi dan akresi tidak muncul saat konsultasi publik. Dampak perubahan pola arus dan gelombang tidak muncul saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Peningkatan abrasi dan akresi pantai merupakan dampak turunan dari adanya perubahan <i>water regim</i> dan gelombang. Oleh karena itu, dampak tersebut dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH). Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Primer.	Disimpulkan sebagai DPH	Penyebaran dampak abrasi-akresi garis pantai diperkirakan menyebar pada garis pantai pada lokasi-lokasi tertentu.	Perubahan pola arus dan gelombang, dan timbulnya abrasi serta akresi pantai akan berlangsung dalam jangka waktu panjang Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak selama 5 tahun.
		Pembukaan ladang lamun dilakukan terbatas pada daerah konstruksi dan atau operasi.	Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan Terhadap Penyusutan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Selama pengisian LNG ke kapal, pompa pada masing-masing tangki akan mengalirkan LNG melalui loading line ke loading arms LNG di ujung dermaga (jetty head loading platform) dengan laju alir maksimum sebesar 12.000 m³/jam. Kegiatan pemuatan LNG ini akan dilakukan secara rutin yaitu diperkirakan akan dilakukan setiap 2-3 hari pada kondisi operasi normal.	Disimpulkan sebagai DPH	Sebagai dampak turunan dari adanya pendaran cahaya oleh keberadaan	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi dengan estimasi batas

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Tambahan kapal (berth) LNG akan didesain untuk bisa mengakomodasi ukuran kapal tanker LNG dari 20.000 m3 sampai 216.000 m3. B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada tahun 2019, teridentifikasi dua jenis penyu yang di pelihara warga di Pulau Matakus. Kedua jenis penyu tersebut adalah penyu hijau (<i>Chelonia mydas</i>) dan penyu sisik (<i>Eretmochelys imbricata</i>) yang tertangkap di perairan Pulau Matakus. Observasi juga dilakukan di Pantai Pasir Panjang yang terletak sekitar 1,5 km di sebelah barat Desa Lermatang. Pantai ini diindikasikan sebagai tempat penyu bertelur berdasarkan informasi dari masyarakat. Kondisi lokasi yang berupa pantai berpasir dengan lebar pasir pantai sekitar 10-15 meter dan kemiringan pantai sekitar 29-30 derajat. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS berpotensi menyebabkan memberikan gangguan terhadap penyu yaitu menyebabkan berkurangnya ladang lamun (berkurangnya <i>feeding ground</i>) akibat pembukaan yang dilakukan terbatas pada daerah konstruksi dan atau operasi kilang OLNG. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Berdasarkan hasil konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan yang sudah dilakukan, gangguan terhadap mamalia laut untuk Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS tidak menjadi perhatian yang tinggi dari masyarakat. E. Kesimpulan Terdapat tiga jenis penyu yang bermigrasi di sekitar wilayah kerja, antara lain penyu belimbing, penyu hijau dan penyu lekang. Namun jenis penyu yang melintas (± 50 km) dari batas terluar wilayah kerja Babar Selaru hanya penyu hijau untuk mencari makan di padang lamun sekitar pulau-pulau kecil sekitar. Hal ini menjadikan Kegiatan di TUKS termasuk Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Turunan dari pendaran cahaya (dampak visual).		TUKS. Terdapat beberapa spot (lokasi) tempat memijahnya penyu di sisi selatan pantai Teluk Saumlaki Barat. Persebaran dampak pendaran cahaya dari keberadaan beberapa jenis TUKS INPEX di Teluk Saumlaki bagian Barat diperkirakan menyebar masing-masing dalam radius sekitar 250 m dari sumber cahaya.	waktu kajian dampak 5 tahun.
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus terhadap gangguan terumbu karang. Gangguan terhadap terumbu karang merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Namun demikian perubahan habitat terumbu karang akan dipantau, serta akan dilakukan penanam kembali terumbu karang pada lokasi yang sesuai (offset) .		Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan <i>causeway</i> sepanjang 2 Km, lebar 15 m dan lebar <i>slope</i> 60 m menjorok ke tengah teluk di OLNG B. Kondisi Rona Lingkungan Hasil pemantauan Desember 2023 terhadap komunitas terumbu karang di perairan Lokasi kegiatan, kondisi penutupan terumbu karang di sekitar perairan Saumlaki berada pada kisaran 36,72 % sd. 77,04 % termasuk kategori sedang hingga baik sekali. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Keberadaan TUKS mengganggu ekosistem terumbu karang karena berada di area terumbu karang.	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak dapat terjadi dari mulut Teluk Saumlaki hingga ke TUKS INPEX.	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					D. Intensitas Perhatian Masyarakat Gangguan terhadap terumbu karang menjadi perhatian masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Gangguan dari keberadaan dan pengoperasian TUKS terhadap terumbu karang merupakan Dampak Penting Hipotetik (DPH).			
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus terhadap padang lamun/rumput laut dan gangguan terhadap padang lamun/rumput laut merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Namun demikian perubahan padang lamun/rumput laut akan dipantau.		Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas TUKS yang akan digunakan yaitu: TUKS dermaga pemuatan LNG dan kondensat, TUKS dermaga bongkar muat, <i>causeway</i> dan <i>trestle bridge</i> . B. Kondisi Rona Lingkungan Terdapat tiga jenis lamun yang ditemukan di area studi yaitu <i>Enhalus acoroides</i> , <i>Thallasia sp.</i> dan <i>Haloudle sp.</i> Penutupan lamun di Kepulauan Tanimbar mencapai 60% yang didominasi oleh <i>Thallasia hemprichii</i> 45,88%, <i>Halophila minor</i> 37,10%. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Keberadaan TUKS dan pengoperasiannya dapat mengganggu ekosistem lamun karena dapat mengurangi luas habitat lamun, mempengaruhi kualitas air dan mempengaruhi arus dan gelombang. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Gangguan terhadap lamun dan rumput laut menjadi perhatian masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Gangguan dari keberadaan dan pengoperasian TUKS terhadap ekosistem lamun termasuk Dampak Penting Hipotetik (DPH).	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak dapat terjadi dari mulut Teluk Saumlaki hingga ke TUKS INPEX.	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun.
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus terhadap mangrove karena merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Namun demikian perubahan mangrove akan dipantau.		Gangguan Terhadap Mangrove	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas TUKS yang akan digunakan yaitu: TUKS dermaga pemuatan LNG dan kondensat, TUKS dermaga bongkar muat, <i>causeway</i> dan <i>trestle bridge</i> . B. Kondisi Rona Lingkungan Hutan mangrove di dekat area TUKS adalah hutan mangrove sekunder. Terdapat setidaknya enam jenis mangrove di lokasi, antara lain: <i>Avicennia Marina</i> , <i>Ceriops tagal</i> , <i>Rhizophora apiculate</i> , <i>R. Mucronata</i> , <i>Bruguera sp.</i> , dan <i>Xylocarpus granatum</i> . C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Keberadaan dan pengoperasian TUKS dapat mempengaruhi ekosistem mangrove karena dapat menyebabkan perubahan kualitas air dan mempengaruhi pola arus dan gelombang. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Gangguan terhadap mangrove menjadi perhatian masyarakat pada saat konsultasi publik E. Kesimpulan Gangguan dari keberadaan dan pengoperasian TUKS terhadap ekosistem mangrove termasuk Dampak Penting Hipotetik (DPH).	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak dapat terjadi di lokasi pembangunan TUKS	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
			Sosial Ekonomi	Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan <i>Ecosystem Services</i>	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas TUKS yang akan digunakan yaitu: TUKS dermaga pemuatan LNG dan kondensat, TUKS dermaga bongkar muat, <i>causeway</i> dan <i>trestle bridge</i>. B. Kondisi Rona Lingkungan Mata pencarian masyarakat di lokasi jalan lintas sebagai petani/ pekebun/ pengambil manfaat hutan. Selain itu, lokasi TUKS juga beririsan dengan lokasi nelayan menanam rumput laut dan menangkap ikan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Adanya keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintasnya, dapat menyebabkan perubahan pada akses ke sumber mata pencarian (<i>livelihood</i>). D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan <i>Ecosystem Services</i> menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Adanya keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan <i>lintasnya</i>, dapat menyebabkan perubahan pada akses ke sumber mata pencarian (<i>livelihood</i>). Dampak ini termasuk dalam Dampak Penting Hipotetik dan akan dikaji lebih lanjut dalam Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Primer.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus.	Keberadaan dan pengoperasian TUKS serta jalan akses ke TUKS akan menerapkan exclusion zone sehingga akan membatasi dan mengganggu akses dan kegiatan perikanan tradisional serta lalu lintas tradisional masyarakat. Adanya pembatasan ini menyebabkan akses masyarakat ke sumber mata pencarian menjadi terbatas. Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun. Perubahan akses ke sumber mata pencarian (<i>Ecosystem Services</i>) terutama akan terjadi terhadap sumber daya perikanan.
		A. Menginformasikan tentang transportasi dan bahan kepada Kantor Syahbandar kabupaten secara berkala.		Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas TUKS yang akan digunakan yaitu: TUKS dermaga pemuatan LNG dan kondensat, TUKS dermaga bongkar muat, <i>causeway</i> dan <i>trestle bridge</i>. B. Kondisi Rona Lingkungan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu:	Keberadaan dan pengoperasian TUKS serta jalan akses ke TUKS akan menerapkan

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		B. INPEX akan mematuhi peraturan yang berlaku terkait navigasi (PP No. 5 Tahun 2010).			Kondisi kegiatan perikanan utama adalah kapal penangkap ikan pada saat tahap konstruksi sudah dapat diantisipasi, dan melakukan pelayaran pada jalur yang lebih aman terhadap bahaya navigasi Masyarakat melakukan budidaya rumput laut di sepanjang pantai Lermatang. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS diprediksi akan memberikan dampak pada masyarakat. Adanya TUKS di lokasi baru sedikit banyak dapat mempengaruhi rute nelayan yang terbiasa beroperasi di daerah tersebut. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS diprediksi akan memberikan dampak pada masyarakat. Adanya TUKS di lokasi baru sedikit banyak dapat mempengaruhi rute nelayan yang terbiasa beroperasi di daerah tersebut. Dengan demikian, gangguan terhadap kegiatan perikanan akibat keberadaan dan pengoperasian TUKS disimpulkan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH)		Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Lauran, Desa Kabayat, Desa Ingei, Desa Wowonda	exclusion zone sehingga akan membatasi dan mengganggu akses dan kegiatan perikanan tradisional serta lalu lintas tradisional masyarakat. Adanya pembatasan ini menyebabkan akses masyarakat ke sumber mata pencaharian menjadi terbatas. Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun. Perubahan akses ke sumber mata pencaharian (<i>Ecosystem Services</i>) terutama akan terjadi terhadap sumber daya perikanan.
			Sosial Budaya	Kekhawatiran Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas TUKS yang akan digunakan yaitu: TUKS dermaga pemuatan LNG dan kondensat, TUKS dermaga bongkar muat, <i>causeway</i> dan <i>trestle bridge</i>. B. Kondisi Rona Lingkungan Masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa perlu khawatir akan adanya gangguan. Tidak ada kekhawatiran masyarakat yang timbul dari adanya keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas (<i>Causeway</i>) ke TUKS. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa	Merupakan kelanjutan dari dampak pada tahap konstruksi. Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi OLNG dengan estimasi

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Keberadaan dan pengoperasian TUKS berpotensi menimbulkan gangguan aktivitas perikanan dan lalu-lintas laut para nelayan lokal. Walaupun gangguannya kecil, hal ini mungkin dapat memicu keresahan di antara nelayan dan apabila tidak dikelola dengan seksama dapat memunculkan konflik dengan proyek. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Kekhawatiran masyarakat akibat keberadaan dan pengoperasian TUKS menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Keresahan masyarakat tergolong sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam studi Andal.		Lermatang Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	batas waktu kajian dampak 5 tahun. Perubahan sosial budaya akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.
		A. Mengikuti manajemen penanganan keluhan yang dibuat. B. Menjalin komunikasi efektif dengan para <i>stakeholder</i> .		Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas TUKS yang akan digunakan yaitu: TUKS dermaga pemuatan LNG dan kondensat, TUKS dermaga bongkar muat, <i>causeway</i> dan <i>trestle bridge</i> . B. Kondisi Rona Lingkungan Belum ada keluhan dan harapan masyarakat karena keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas (<i>Causeway</i>) ke TUKS. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Muncul harapan dan keluhan masyarakat sebagai akibat dari adanya kekhawatiran masyarakat yang disebabkan oleh perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan Ecosystem Services, gangguan terhadap kegiatan perikanan, perubahan norma dan nilai sosial, peningkatan kebisingan, gangguan terhadap padang lamun/rumput laut, gangguan transportasi laut dan gangguan terhadap transportasi darat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini mendapat perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat dan dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH)	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Luran, Desa Kabayat, Desa Ingei, Desa Wowonda	Merupakan dampak turunan dari kekhawatiran masyarakat dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun.
		A. INPEX akan mematuhi peraturan yang berlaku tentang navigasi (PP No. 5 Tahun 2010). B. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan. C. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan aktivitas di laut. D. Menyiapkan rambu-rambu keselamatan pelayaran. E. Menyiapkan prosedur standar keselamatan pelayaran.	Transportasi	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jalan lintasan (<i>Causeway</i>) di perlukan untuk menghubungkan arus lalu lintas dari fasilitas OLNG di darat ke TUKS dan platform pemuatan. Jalan lintas TUKS ini juga menyediakan rute yang efisien untuk koridor pipa antara tanki penyimpanan LNG dan kondensat di darat dan platform pemuatan, jarak TUKS LNG ke pantai kira-kira 2 Km. Lebar jalan Lintasan (<i>Causeway</i>) terbagi menjadi 2 bagian, yaitu jalan akses dari pantai ke TUKS Pemuatan Material (GP Wharf/MOF) adalah 15 m untuk mengakomodasi operasi lalu lintas dan memuat jaringan pipa, dan lebar jalan 6 m untuk jalan akses dari persimpangan TUKS Pemuatan Material (GP Wharf/MOF) menuju zona transisi ke Jembatan Pipa (<i>Trestle Bridge</i>). Pembangunan <i>Causeway</i> diperkirakan berlangsung selama maksimum 2 tahun.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki,	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Rencana pembangunan jalan lintasan ke TUKS, direncanakan urugannya didapat dari hasil pengerukan dasar laut di sekitar lokasi pembangunan jalan lintasan tersebut sehingga bangkitan atau ritasi hasil pengerukan ke lokasi pembangunan memotong perlintasan kapal-kapal nelayan maupun kapal penumpang antar pulau. Dengan adanya pembangunan tersebut, maka alur pelayaran kapal-kapal tersebut agak bergeser ke selatan. Pengerukan akan berlangsung selama 3 bulan. B. Kondisi Rona Lingkungan Para pengguna alur pelayaran berlangsung normal tanpa adanya daerah zona terlarang dan terbatas. Berdasarkan pemantauan lalu lintas laut di Teluk Dalam Pulau Yamdena diketahui pergerakan lalu lintas laut terpantau sebanyak 105 unit didominasi oleh kapal nelayan sebanyak 93 unit, dengan jam sibuk terpantau pada pukul 03 - 09 dan 15 – 18 serta di lintas Selat Nustual diketahui pergerakan lalu lintas laut terpantau sebanyak 5 unit didominasi oleh kapal nelayan sebanyak 5 unit yang terpantau dari pukul 12 – 18. waktu frekuensi tertinggi saat kedatangan terutama kapal-kapal dalam negeri adalah pada kelompok waktu 06.00 – 09.00 yang dilakukan oleh kapal-kapal Nusantara dengan frekuensi sebanyak 26 unit dan kapal-kapal Perla dengan frekuensi sebanyak 28 unit sehingga total frekuensi 54 unit, sedangkan waktu dengan frekuensi tertinggi saat keberangkatan adalah di kelompok waktu 15.00 – 18.00 yang dilakukan berturut-turut oleh Kapal-kapal Nusantara 20 unit, Perintis 11 unit, dan Pertamina 4 sehingga total frekuensi keberangkatan 35 unit. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dengan adanya daerah zona terlarang dan terbatas untuk pembangunan jalan lintasan (causeway) ke TUKS, maka para pengguna alur pelayaran harus menghindari dari area tersebut yang berakibat kepada berubah jarak dan waktu tempuh. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Kegiatan ini berdampak langsung kepada masyarakat yang khususnya menggunakan transportasi laut, namun pada saat konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan yang sudah dilakukan, dampak ini tidak menjadi intensitas perhatian masyarakat. E. Kesimpulan Pemuatan dan transportasi LNG dilaut diprediksi akan dilakukan menggunakan kapal tanker dengan yang akan merapat di TUKS sebanyak 3 hari sekali. Dengan adanya lalu lintas tersebut, setidaknya lalu lintas pelayaran yang ada saat ini akan lebih padat. Dengan demikian, dampak gangguan transportasi laut akibat pemuatan dan transportasi LNG dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH).		Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
17.	Pengoperasian TUKS: Pemuatan dan Transportasi LNG	Tidak terdapat pengelolaan secara khusus gangguan terhadap mamalia laut. Gangguan terhadap mamalia laut merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>) dari kegiatan.	Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan Terhadap Mamalia Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pada kondisi tertentu (diperkirakan sekitar 2 kali dalam setahun), kapal LNG yang datang ke dermaga adalah kapal dari <i>dry-dock</i> yang penuh dengan <i>gas inert</i> (CO₂ atau N₂) sehingga harus dilakukan proses pendinginan kapal (<i>cool down</i>) dan <i>venting gas inert</i> sebelum memulai pemuatan LNG. Selama pengisian LNG ke kapal, pompa pada masing-masing tangki akan mengalirkan LNG melalui <i>loading line</i> ke <i>loading arms</i> LNG di ujung dermaga (<i>jetty head loading platform</i>) dengan laju alir maksimum sebesar 12.000 m³/jam. Kegiatan pemuatan LNG ini akan dilakukan secara rutin yaitu diperkirakan akan dilakukan setiap 2-3 hari pada kondisi operasi normal. Semua uap gas yang dihasilkan selama proses pengapalan akan dikembalikan melalui <i>vapour return line</i>. Uap tersebut juga akan ditekan kembali (<i>recompress</i>) menggunakan Kompresor BOG untuk dialirkan ke sistem bahan bakar gas. Tambatan kapal (<i>berth</i>) LNG akan didesain untuk bisa mengakomodasi ukuran kapal tanker LNG dari 20.000 m³ sampai 216.000 m³. B. Kondisi Rona Lingkungan Untuk data rona lingkungan kebisingan bawah laut alami di lokasi studi tidak tersedia. Menurut Veeraiyan and Rajendran, nilai kebisingan alami di bawah laut berkisar antara 60 – 90 dB re 1 µPa dalam rentang 10-100 Hz. Keberadaan mamalia laut berdasarkan data rona yang dikumpulkan pada tahun 2012, 2013, 2019 dan 2020 dijumpai 13 jenis mamalia laut yang terdiri dari kelompok paus sebanyak 8 jenis, kelompok lumba-lumba 4 jenis, dan 1 jenis kelompok sirenia yang dijumpai di sekitar lokasi kajian. 13 Jenis mamalia laut yang dijumpai di lokasi studi termasuk dalam rentang suara <i>high frequency</i>, <i>low frequency</i> dan <i>sirenians frequency</i>, sehingga diketahui rentang nilai TTS (<i>Temporary Threshold Shifts</i>/Ambang Batas Kebisingan Sementara) terendah sebesar 213 dB re 1 µPa dan nilai PTS (<i>Permanent Threshold Shifts</i>/Ambang Batas Kebisingan Permanen) terendah sebesar 219 dB re 1 µPa. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Proses Pemuatan dan Transportasi LNG di TUKS selama tahap operasi menurut Martin et al, 2021 akan meningkatkan kebisingan bawah laut alami sebesar 165 – 175 dB re 1 µPa dan 192 dB re 1 µPa yang menyebabkan gangguan terhadap mamalia laut. Gangguan terhadap mamalia laut merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>) dari kegiatan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Berdasarkan hasil konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan yang sudah dilakukan, gangguan terhadap mamalia laut akibat peningkatan kebisingan yang berasal dari Pemuatan dan Transportasi LNG di TUKS selama tahap operasi tidak menjadi perhatian yang tinggi dari masyarakat. E. Kesimpulan	Disimpulkan sebagai DPH	Sebaran dampak menyebar sangat luas dari lokasi TUKS di Teluk Saumlaki hingga FPSO di laut lepas Arafura serta rute perjalanan kapal kargo di dalam batas wilayah studi	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi dengan estimasi waktu kajian dampak selama 5 tahun.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Tidak terdapat pengelolaan secara khusus untuk gangguan terhadap mamalia laut. Gangguan terhadap mamalia laut merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>) dari kegiatan kegiatan Pemuatan dan Transportasi LNG di TUKS selama tahap operasi. Maka gangguan mamalia laut akibat Pemuatan dan Transportasi kondensat di TUKS selama tahap operasi menjadi Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut.			
		A. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan. B. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan aktivitas di laut. C. Menyiapkan rambu-rambu keselamatan pelayaran. Menyiapkan prosedur standar keselamatan pelayaran.	Sosial Ekonomi	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengisian LNG ke kapal, pompa pada masing-masing tangki akan mengalirkan LNG melalui <i>loading line</i> ke <i>loading arms</i> LNG di ujung TUKS (<i>jetty head loading platform</i>) dengan laju alir maksimum sebesar 12.000 m³/jam. Kegiatan pemuatan LNG ini akan dilakukan secara rutin yaitu diperkirakan akan dilakukan setiap 2-3 hari pada kondisi operasi yang normal menggunakan kapal tanker LNG dari 20.000 m³ sampai 216.000 m³. B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi kegiatan perikanan utama adalah kapal penangkap ikan pada saat tahap konstruksi sudah dapat diantisipasi, dan melakukan pelayaran pada jalur yang lebih aman terhadap bahaya navigasi Masyarakat melakukan budidaya rumput laut di sepanjang pantai Lermatang. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pemuatan dan transportasi LNG akan menerapkan zona batasan bagi nelayan/ masyarakat. Pertimbangan keselamatan, maka zona eksklusi (<i>exclusion zone</i>) keselamatan akan ditetapkan di sepanjang koridor lokasi pemuatan dan transportasi LNG. <i>Exclusion zone</i> akan membatasi akses nelayan ke lokasi penangkapan ikan. Hal tersebut juga memungkinkan daerah jangkauan nelayan menjadi lebih jauh dan biaya yang dikeluarkan juga lebih besar. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini mendapat perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Gangguan aktivitas nelayan karena pembangunan TUKS disimpulkan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Primer.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Adanya pembatasan ini menyebabkan akses masyarakat ke sumber mata pencaharian menjadi terbatas. Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun.
		A. INPEX akan menyusun, mensosialisasikan dan menerapkan manajemen penanganan keluhan kepada masyarakat. B. Menjalin komunikasi efektif dengan para stakeholder.	Sosial Budaya	Kekhawatiran Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengisian LNG ke kapal, pompa pada masing-masing tangki akan mengalirkan LNG melalui <i>loading line</i> ke <i>loading arms</i> LNG di ujung TUKS (<i>jetty head loading platform</i>) dengan laju alir maksimum sebesar 12.000 m³/jam. Kegiatan pemuatan LNG ini akan dilakukan secara rutin yaitu diperkirakan akan dilakukan setiap 2-3 hari pada kondisi operasi yang normal menggunakan kapal tanker LNG dari 20.000 m³ sampai 216.000 m³. B. Kondisi Rona Lingkungan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa	Merupakan kelanjutan dari dampak pada tahap konstruksi. Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi OLNG

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Mayoritas masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa perlu khawatir akan adanya gangguan Tidak ada kekhawatiran masyarakat yang timbul dari adanya kegiatan pemuatan dan transportasi LNG. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Masyarakat memiliki kekhawatiran tentang kegiatan pemuatan dan transportasi LNG akan mengganggu aktivitas nelayan di laut dengan adanya beberapa larangan. Selain pembatasan lokasi mencari ikan, nelayan juga khawatir jarak tempuh ke lokasi mencari ikan akan lebih jauh dengan adanya beragam larang dilaut. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini mendapat perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Kekhawatiran masyarakat akibat adanya aktivitas pemuatan dan transportasi LNG di kategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan perlu di kaji lebih lanjut dalam Andal.		Lauran, Desa Kabyarat, Desa Ingei, Desa Wowonda	dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun. Perubahan sosial budaya akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.
				Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengisian LNG ke kapal, pompa pada masing-masing tangki akan mengalirkan LNG melalui <i>loading line</i> ke <i>loading arms</i> LNG di ujung TUKS (<i>jetty head loading platform</i>) dengan laju alir maksimum sebesar 12.000 m³/jam. Kegiatan pemuatan LNG ini akan dilakukan secara rutin yaitu diperkirakan akan dilakukan setiap 2-3 hari pada kondisi operasi yang normal menggunakan kapal tanker LNG dari 20.000 m³ sampai 216.000 m³. B. Kondisi Rona Lingkungan Belum ada keluhan dan harapan masyarakat karena pemuatan dan transportasi LNG. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pengisian dan pemuatan memunculkan harapan dan keluhan masyarakat sebagai akibat dari adanya kekhawatiran masyarakat yang disebabkan oleh perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan Ecosystem Services, gangguan terhadap kegiatan perikanan, perubahan norma dan nilai sosial, peningkatan kebisingan, gangguan terhadap padang lamun/rumput laut, gangguan transportasi laut dan gangguan terhadap transportasi darat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini mendapat perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Sebagai dampak turunan dari: Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian (<i>Ecosystem Services</i>) Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan Batas waktu kajian dampak adalah 5 tahun.
		A. INPEX akan mematuhi peraturan yang berlaku tentang navigasi (PP No. 5 Tahun 2010). B. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan.	Transportasi	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pada kondisi tertentu (diperkirakan sekitar 2 kali dalam setahun), kapal LNG yang datang ke dermaga adalah kapal dari <i>dry-dock</i> yang penuh dengan <i>gas inert</i> (CO₂ atau N₂) sehingga harus dilakukan proses pendinginan kapal (<i>cool down</i>) dan <i>venting gas inert</i> sebelum memulai pemuatan LNG.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu:	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi dengan

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		C. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan aktivitas di laut. D. Menyiapkan rambu-rambu keselamatan pelayaran. E. Menyiapkan prosedur standar keselamatan pelayaran.			Selama pengisian LNG ke kapal, pompa pada masing-masing tangki akan mengalirkan LNG melalui <i>loading line ke loading arms</i> LNG di ujung dermaga (<i>jetty head loading platform</i>) dengan laju alir maksimum sebesar 12.000 m³/jam. Kegiatan pemuatan LNG ini akan dilakukan secara rutin yaitu diperkirakan akan dilakukan setiap 2-3 hari pada kondisi operasi normal. Semua uap gas yang dihasilkan selama proses pengapalan akan dikembalikan melalui <i>vapour return line</i>. Uap tersebut juga akan ditekan kembali (<i>recompress</i>) menggunakan Kompresor BOG untuk dialirkan ke sistem bahan bakar gas. Tambatan kapal (<i>berth</i>) LNG akan didesain untuk bisa mengakomodasi ukuran kapal tanker LNG dari 20.000 m³ sampai 216.000 m³. B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi pada saat ini diperkirakan, para pengguna alur pelayaran sudah terbiasa dengan adanya zona terlarang dan terbatas pada tahap konstruksi dari pembangunan jalan lintasan ke TUKS C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dengan adanya daerah zona terlarang dan terbatas untuk keberadaan dan pengoperasi TUKS dan jalan lintas (<i>causeway</i>) ke TUKS, pemuatan dan transportasi LNG serta kondensat pada tahap operasi, maka para pengguna alur pelayaran harus menghindari dari area tersebut yang berakibat kepada berubah jarak dan waktu tempuh. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Kegiatan ini berdampak langsung kepada masyarakat yang khususnya menggunakan transportasi laut, namun pada saat konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan yang sudah dilakukan, dampak ini tidak menjadi intensitas perhatian masyarakat. E. Kesimpulan Pemuatan dan transportasi LNG di laut diprediksi akan dilakukan menggunakan kapal tanker dengan yang akan merapat di TUKS sebanyak 3 hari sekali. Dengan adanya lalu lintas tersebut, setidaknya lalu lintas pelayaran yang ada saat ini akan lebih padat. Dengan demikian, dampak gangguan transportasi laut akibat pemuatan dan transportasi kondensat dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH).		Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Lauran, Desa Kabayat, Desa Ingei, Desa Wowonda	estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun.
18.	Pengoperasian TUKS: Pemuatan dan Transportasi Kondensat	Membuat dan menerapkan prosedur pemuatan dan transportasi kondensat secara ketat.	Kualitas Udara Rona awal di darat lokasi OLNG: Benzen < 0,1 mg/m ³ Toluene < 0,25 mg/m ³	Peningkatan Konsentrasi VOC (sebagai BTEX)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Selama pengisian kondensat dari tangki penyimpanan kondensat ke kapal, pompa pada tangki akan mengalirkan kondensat dengan laju alir maksimum 3000 m³/jam melalui <i>loading line ke loading arms</i> kondensat di ujung dermaga (<i>jetty head loading platform</i>). Kegiatan pemuatan produk kondensat ini akan dilakukan secara rutin yaitu pada kondisi operasi normal diperkirakan akan dilakukan setiap 1-3 bulan dan tidak akan dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan pemuatan LNG. B. Kondisi Rona Lingkungan	Disimpulkan sebagai DPH	Penyebaran dampak kualitas udara akan menyebar secara dominan ke arah Barat Laut dengan jarak	Berlangsung pada ruang dan waktu yang sama selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak selama 5 tahun

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
			Etilbenzen < 0,1 mg/m ³ Xylene < 0,1 mg/m ³		Hasil pengukuran rona awal di lokasi proyek menunjukkan konsentrasi VOC (BTEX) 3 jam berkisar antara <0,1 - <0,25 mg/Nm³ C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kondensat gas merupakan hidrokarbon dalam bentuk cair dengan berat molekul yang besar. Dalam proses pemuatan dan transportasi, akan terjadi penguapan sejumlah kondensat ke atmosfer dalam bentuk BTEX, sehingga sejumlah konsentrasi BTEX akan rilis ke atmosfer. BTEX tergolong sebagai polutan udara yang berbahaya karena bersifat toksik dan mudah terbakar, sehingga keberadaannya di atmosfer perlu dikelola secara ketat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terungkap adanya kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Peningkatan konsentrasi BTEX tergolong sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH).		maksimum sekitar 2.5 km	
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus gangguan terhadap mamalia laut. Gangguan terhadap mamalia laut merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>) dari kegiatan.	Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan Terhadap Mamalia Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pemuatan produk kondensat ini akan dilakukan secara rutin yaitu pada kondisi operasi normal diperkirakan akan dilakukan setiap 1-3 bulan dan tidak akan dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan pemuatan LNG. Tambatan kapal (berth) kondensat akan didesain untuk bisa mengakomodasi ukuran kapal tanker kondensat dari 25.000 DWT sampai 115.000 DWT. Kegiatan pemuatan produk kondensat akan dilakukan ketika kapal berada di tambatan kapal (berth). Selama pengisian kondensat dari tangki penyimpanan kondensat ke kapal, pompa pada tangki akan mengalirkan kondensat dengan laju alir maksimum 3.000 m³/jam melalui loading line ke loading arms kondensat di ujung dermaga (jetty head loading platform). Berdasarkan data dari Pra-FEED, kapasitas tangki penyimpanan kondensat adalah 60.000 m³. Kemungkinan akan ada beberapa penyesuaian untuk mengakomodir berbagai perubahan yang mungkin terjadi. B. Kondisi Rona Lingkungan Untuk data rona lingkungan kebisingan bawah laut alami di lokasi studi tidak tersedia. Menurut Veeraiyan and Rajendran, nilai kebisingan alami di bawah laut berkisar antara 60 – 90 dB re 1 µPa dalam rentang 10-100 Hz. Keberadaan mamalia laut berdasarkan data rona yang dikumpulkan pada tahun 2012, 2013, 2019 dan 2020 dijumpai 13 jenis mamalia laut yang terdiri dari kelompok paus sebanyak 8 jenis, kelompok lumba-lumba 4 jenis, dan 1 jenis kelompok sirenia yang dijumpai di sekitar lokasi kajian. 13 Jenis mamalia laut yang dijumpai di lokasi studi termasuk dalam rentang suara <i>high frequency</i>, <i>low frequency</i> dan <i>sirenians frequency</i>, sehingga diketahui rentang nilai TTS (<i>Temporary Threshold Shifts</i>/Ambang Batas Kebisingan Sementara) terendah sebesar 213 dB re 1 µPa dan nilai PTS (<i>Permanent Threshold Shifts</i>/Ambang Batas Kebisingan Permanen) terendah sebesar 219 dB re 1 µPa.	Disimpulkan sebagai DPH	Sebaran dampak menyebar sangat luas dari lokasi TUKS di Teluk Saumlaki hingga FPSO di laut lepas Arafura serta rute perjalanan kapal kargo di dalam batas wilayah studi	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi dengan estimasi waktu kajian dampak selama 5 tahun.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Proses Pemuatan dan Transportasi Kondensat di TUKS selama tahap operasi menurut Martin et al, 2021 akan meningkatkan kebisingan bawah laut alami sebesar 165 – 175 dB re 1 µPa dan 192 dB re 1 µPa yang menyebabkan gangguan terhadap mamalia laut. Gangguan terhadap mamalia laut merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>) dari kegiatan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Berdasarkan hasil konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan yang sudah dilakukan, gangguan terhadap mamalia laut akibat peningkatan kebisingan yang berasal dari Pemuatan dan Transportasi kondensat di TUKS selama tahap operasi tidak menjadi perhatian yang tinggi dari masyarakat. E. Kesimpulan Tidak terdapat pengelolaan secara khusus untuk gangguan terhadap mamalia laut. Gangguan terhadap mamalia laut merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>) dari kegiatan kegiatan Pemuatan dan Transportasi kondensat di TUKS selama tahap operasi. Maka gangguan mamalia laut akibat Pemuatan dan Transportasi kondensat di TUKS selama tahap operasi menjadi Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut.			
		A. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan. B. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan aktivitas di laut. C. Menyiapkan rambu-rambu keselamatan pelayaran. D. Menyiapkan prosedur standar keselamatan pelayaran.	Sosial Ekonomi	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pemuatan dan transportasi kondensat akan dilakukan secara rutin yaitu diperkirakan akan dilakukan setiap 1-3 bulan, menggunakan ukuran kapal tanker kondensat dari 25.000 DWT sampai 115.000 DWT. B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi kegiatan perikanan utama adalah kapal penangkap ikan pada saat tahap konstruksi sudah dapat diantisipasi, dan melakukan pelayaran pada jalur yang lebih aman terhadap bahaya navigasi Masyarakat melakukan budidaya rumput laut di sepanjang pantai Lermatang. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pemuatan dan transportasi Kondensat akan menerapkan zona batasan bagi nelayan/ masyarakat. Pertimbangan keselamatan, maka zona eksklusi (<i>exclusion zone</i>) keselamatan akan ditetapkan di sepanjang koridor lokasi pemuatan dan transportasi LNG. <i>Exclusion zone</i> akan membatasi akses nelayan ke lokasi penangkapan ikan. Hal tersebut juga memungkinkan daerah jangkauan nelayan menjadi lebih jauh dan biaya yang dikeluarkan juga lebih besar. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini mendapat perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Gangguan aktivitas nelayan karena pembangunan TUKS disimpulkan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan dikaji lebih lanjut dalam Andal.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Primer.			
			Sosial Budaya	Kekhawatiran Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pemuatan dan transportasi kondensat akan dilakukan secara rutin yaitu diperkirakan akan dilakukan setiap 1-3 bulan, menggunakan ukuran kapal tanker kondensat dari 25.000 DWT sampai 115.000 DWT. B. Kondisi Rona Lingkungan Mayoritas masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa perlu khawatir akan adanya gangguan Tidak ada kekhawatiran masyarakat yang timbul dari adanya kegiatan pemuatan dan transportasi kondensat. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Masyarakat memiliki kekhawatiran tentang kegiatan pemuatan dan transportasi kondensat akan mengganggu aktivitas nelayan di laut dengan adanya beberapa larangan. Selain pembatasan lokasi mencari ikan, nelayan juga khawatir jarak tempuh ke lokasi mencari ikan akan lebih jauh dengan adanya beragam larang dilaut. Keresahan tersebut akan menimbulkan sikap kurang mendukung terhadap proyek. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini mendapat perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Kekhawatiran masyarakat akibat adanya aktivitas pemuatan dan transportasi kondensat di kategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan perlu di kaji lebih lanjut dalam Andal..	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Luran, Desa Kabyarat, Desa Ingei, Desa Wowonda	Merupakan kelanjutan dari dampak pada tahap konstruksi. Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi OLNG dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun. Perubahan sosial budaya akan berlangsung terutama di lokasi sekitar tapak proyek OLNG meliputi desa-desa di sekitarnya dan Kota Saumlaki dan desa-desa di sekitarnya.
		A. INPEX akan menyusun, mensosialisasikan dan menerapkan manajemen penanganan keluhan kepada masyarakat. B. Menjaln komunikasi efektif dengan para stakeholder.		Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pemuatan dan transportasi kondensat akan dilakukan secara rutin yaitu diperkirakan akan dilakukan setiap 1-3 bulan, menggunakan ukuran kapal tanker kondensat dari 25.000 DWT sampai 115.000 DWT. B. Kondisi Rona Lingkungan Belum ada keluhan dan harapan masyarakat karena pemuatan dan transportasi kondensat. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pengisian dan pemuatan memunculkan harapan dan keluhan masyarakat sebagai akibat dari adanya kekhawatiran masyarakat yang disebabkan oleh perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan Ecosystem Services, gangguan terhadap kegiatan perikanan, perubahan norma dan nilai sosial, peningkatan kebisingan, gangguan terhadap padang lamun/rumput laut, gangguan transportasi laut dan gangguan terhadap transportasi darat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini mendapat perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat. Batas waktu kajian dampak adalah 5 tahun.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat.			
		A. INPEX akan mematuhi peraturan yang berlaku tentang navigasi (GR No. 5 Tahun 2010). B. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan. C. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan aktivitas di laut. D. Menyiapkan rambu-rambu keselamatan pelayaran. E. Menyiapkan prosedur standar keselamatan pelayaran.	Transportasi	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Produk kondensat yang didapatkan dari proses pemisahan tersebut disimpan dalam tangki dan dikirim ke area TUKS untuk dikapalkan menggunakan kapal kondensat. Total kapasitas produksi dan pemuatan produk LNG sebesar 9,5 MTPA dan produk kondensat sebesar 6.392 barel/hari, dengan masa operasi kilang selama tiga puluh (30) tahun. Pengisian LNG ke kapal, menggunakan pompa pada masing-masing tangki akan mengalirkan LNG melalui loading line ke loading arms LNG di ujung TUKS (jetty head loading platform) dengan laju alir maksimum sebesar 12.000 m³/jam. Kegiatan pemuatan LNG ini akan dilakukan secara rutin yaitu diperkirakan akan dilakukan setiap 2-3 hari pada kondisi operasi yang normal menggunakan kapal tanker LNG dari 20.000 m³ sampai 216.000 m³. Kegiatan pemuatan dan transportasi kondensat akan dilakukan secara rutin yaitu diperkirakan akan dilakukan setiap 1-3 bulan, menggunakan ukuran kapal tanker kondensat dari 25.000 DWT sampai 115.000 DWT. B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi pada saat ini diperkirakan, para pengguna alur pelayaran sudah terbiasa dengan adanya zona terlarang dan terbatas pada tahap konstruksi dari pembangunan jalan lintasan ke TUKS. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dengan adanya daerah zona terlarang dan terbatas untuk keberadaan dan pengoperasi TUKS dan jalan lintas (causeway) ke TUKS, pemuatan dan transportasi LNG serta kondensat pada tahap operasi, maka para pengguna alur pelayaran harus menghindari dari area tersebut yang berakibat kepada berubah jarak dan waktu tempuh. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Kegiatan ini berdampak langsung kepada masyarakat yang khususnya menggunakan transportasi laut, namun pada saat konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan yang sudah dilakukan, dampak ini tidak menjadi intensitas perhatian masyarakat. E. Kesimpulan Pemuatan dan transportasi Kondensat di laut diprediksi akan dilakukan menggunakan kapal tanker dengan yang akan merapat di TUKS. Diperkirakan akan dilakukan setiap 1-3 bulan dan tidak akan dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan pemuatan LNG. Dengan adanya lalu lintas tersebut, setidaknya lalu lintas pelayaran yang ada saat ini akan lebih padat. Dengan demikian, dampak gangguan transportasi laut akibat pemuatan dan transportasi kondensat dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH).	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Lauran, Desa Kabyarat, Desa Ingei, Desa Wowonda	Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun.
19.	Konsumsi Bahan Bakar	A. Melakukan pemantauan dan pemeriksaan rutin terhadap mesin-mesin kendaraan dan peralatan yang menggunakan bahan	Kualitas Udara ambien:	Peningkatan Konsentrasi SO ₂ dan NO _x , dan CO	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kebutuhan bahan bakar minyak diesel maksimum diperkirakan sebesar 1.706 m ³ /tahun. Konsumsi bahan bakar diesel selama masa operasi Kilang	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		bakar sehingga selalu dalam kondisi optimal. B. Melakukan monitoring secara rutin terhadap emisi dari knalpot kendaraan dan peralatan-peralatan yang menggunakan bahan bakar. C. Menerapkan rencana pengelolaan gas rumah kaca yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan, regulasi di Indonesia, dan regulasi internasional. D. Menghitung, dan melaporkan seluruh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan berdasarkan regulasi nasional dan internasional. Memprediksi emisi gas rumah kaca di masa depan untuk mengantisipasi potensi dampak yang dihasilkan di masa depan.	CO < 100 ug/m ³ NO ₂ < 5ug/m ³ SO ₂ < 20-21 ug/m ³ O ₃ < 20ug/m ³ HC K 50 ug/m ³ TSP 13,1-77,5 ug/m ³ PM10 2,5-72,5 ug/m ³ PM2,5 0,9-61,5 ug/m ³		OLNK diperkirakan sebesar 2.000 m ³ /bulan dan total kapasitas penyimpanan sebesar 2.000 m ³ . B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi rona lingkungan untuk parameter NO ₂ , dan SO ₂ di sekitar OLNK tergolong baik. Kadar SO ₂ dan NO ₂ maksimum yang terukur di lapangan berada di bawah 50% baku mutu udara ambien menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembakaran bahan bakar fosil dapat menghasilkan sejumlah kecil gas buang dalam bentuk SO ₂ dan NOx. Dalam kondisi pembakaran tidak sempurna, gas CO dapat pula dihasilkan. Namun, total emisi ketiga gas tersebut tidak dalam jumlah besar. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak ada kekhawatiran masyarakat terkait dampak peningkatan konsentrasi SO ₂ , NOx dan CO akibat konsumsi bahan bakar E. Kesimpulan Dampak yang dihasilkan dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).			
			Gas Rumah Kaca	Peningkatan Emisi CO ₂ , CH ₄ dan N ₂ O	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Emisi gas rumah kaca berasal dari beberapa kegiatan yaitu: konsumsi bahan bakar, emisi penggerak turbin gas dan emisi PLTG, AGRU, dan flaring. B. Kondisi Rona Lingkungan Secara nasional emisi CO ₂ dari aktivitas antropogenik adalah 1200 juta ton CO ₂ e per tahun C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Diperkirakan laju emisi CO ₂ dari tahap operasi adalah sebesar 7,698,890 ton per tahun. Peningkatan emisi CO ₂ akan berlangsung secara menerus selama tahap operasi berlangsung. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Peningkatan emisi gas rumah kaca tidak menjadi isu pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Dampak disimpulkan Dampak Penting Hipotetik (DPH)	Disimpulkan sebagai DPH	Gas rumah kaca apabila teremisikan ke atmosfer, maka akan menyebar secara horizontal dan vertikal mula-mula secara regional dan berlanjut secara global, oleh karena itu batas ekologi penyebaran gas rumah kaca adalah bersifat global.	Konsumsi bahan bakar sebagai penghasil gas rumah kaca selama masa operasi SURF, FPSO, GEP dan OLNK. Emisi GRK akan berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda dengan estimasi waktu kajian dampak selama 5 tahun.
		Membangun tangki bahan bakar yang dibuat anti air dilengkapi dengan tanggul sebagai penampungan sekunder.	Tanah	Peningkatan Konsentrasi <i>Total Petroleum Hydrocarbon</i> (TPH)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Konsumsi bahan bakar diesel selama masa operasi Kilang OLNK diperkirakan sebesar 2.000 m ³ /bulan. B. Kondisi Rona Lingkungan	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Konsentrasi senyawa organik (pestisida dan hidrokarbon) di bawah batas kemampuan ukur alat laboratorium (tidak terdeteksi). Demikian juga untuk Benz(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Pentachlorophenol dan Thallium. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Konsumsi bahan bakar dapat mencemari tanah akibat adanya kebocoran tangki ataupun ceceran bahan bakar yang tidak disengaja. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Pencemaran TPH tanah tidak menjadi fokus masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Peningkatan konsentrasi TPH akibat tumpahan bakar dapat dikelola sejak awal sehingga tanah tidak tercemar. Dengan demikian, dampak ini dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH), namun pengelolaan dan pemantauannya akan tetap dimasukkan dalam RKL dan RPL.			
		A. Membangun tempat penyimpanan dan pengisian bahan bakar yang dilapisi oleh <i>concrete</i> atau material lainnya yang kedap air dan dilengkapi dengan tanggul. B. Mengimplementasikan SOP tumpahan minyak. C. Memenuhi peraturan yang berlaku tentang Baku Mutu Pembuangan Air Limbah Drainase Kegiatan Pengilangan LNG dan LPG Terpadu yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2010.	Kualitas Air Permukaan Kualitas Air Laut	Peningkatan Konsentrasi Minyak dan Lemak (Total Hidrokarbon)	A. <u>Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan</u> Kebutuhan bahan bakar minyak diesel maksimum diperkirakan sebesar 1.706 m³/tahun. Konsumsi bahan bakar diesel selama masa operasi Kilang OLNG diperkirakan sebesar 2.000 m³/bulan dan total kapasitas penyimpanan sebesar 2.000 m³. Ceceran atau tumpahan minyak diesel tersebut berpotensi mencemari air permukaan dan air laut. B. <u>Kondisi rona lingkungan</u> Kadar minyak dan Lemak pada air sungai hasil pengamatan pada musim kemarau (November 2019) dan musim hujan (Maret 2020) dengan nilai <1 mg/L (BM 1 mg/L). Hasil analisis sampling air laut di <i>nearshore</i> (Teluk Saumlaki) dan di offshore) pada musim kemarau (November 2019) dan musim hujan (Maret 2020), konsentrasi minyak dan lemak masih di bawah batas kemampuan ukur alat laboratorium (tidak terdeteksi) dan di bawah nilai ambang baku mutu yaitu <0,2 mg/L, begitu juga di perairan Maluku Barat Daya (MBD) bahwa konsentrasi minyak lemak masih di bawah baku mutu yaitu <0,3 mg/L. C. <u>Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan</u> Penggunaan bahan bakar yang kurang baik dapat menyebabkan terjadinya kebocoran dan tumpahan (ceceran) bahan bakar. Tumpahan bahan bakar tersebut dapat terbawa limpasan air hujan dan terbawa air drainase menuju badan air (air permukaan/sungai dan/atau air laut). Tumpahan bahan bakar di atas kapal juga dapat mengalir menuju air laut. Akan tetapi, dampak tumpahan bahan bakar ini sudah dikelola sejak awal dengan membangun tempat penyimpanan dan pengisian bahan bakar yang dapat mengantisipasi ceceran dan/atau tumpahan bahan bakar mencemari air permukaan maupun air laut D. <u>Intensitas perhatian masyarakat</u>	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Hasil konsultasi publik, tidak ada intensitas perhatian masyarakat terhadap dampak lingkungan berupa peningkatan konsentrasi minyak dan lemak (Total Hidrokarbon) akibat limbah drainase tempat penyimpanan dan pengisian bahan bakar. E. Kesimpulan Berdasarkan penjeian di atas dan dengan disiapkan rencana pengelolaan, maka dampak rencana usaha dan/atau kegiatan konsumsi bahan bakar ini diidentifikasi sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH), tidak akan dikaji dalam Andal RKL dan RPL.			
20.	Pengolahan Limbah: Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah Proses, dan Limbah Terkontaminasi)	A. Air limbah proses akan diolah di fasilitas Pengolahan Air Limbah (Waste Water Treatment Plant atau WWTP). Air limbah domestik akan diolah menggunakan IPAL limbah domestik (<i>sewage treatment plant</i>, STP) yang memenuhi persyaratan sesuai SNI 8455:2017 (Perencanaan pengolahan air limbah rumah tangga dengan sistem reaktor anaerobik bersekat (SRAB)) atau Standard internasional lainnya B. Air limbah yang terkontaminasi bahan kimia dan air limbah B3 akan dikirim ke pengelola limbah B3 yang memiliki izin dari KLHK C. Inpex akan mengikuti Persetujuan teknis (Pertek) pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut oleh Inpex Masela Ltd No. S.376/PPKL/PPKP/PKI.I/9/2021. D. INPEX akan memenuhi baku mutu air limbah yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi. E. INPEX akan memenuhi baku mutu kualitas air laut ambien (Lampiran VIII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 untuk Biota Laut) dan Annex I MARPOL 73/78.	Kualitas Air Laut	Peningkatan pada pH, Minyak dan Lemak (Total Hidrokarbon), TSS, Klorin Bebas, Sulfida, DO, BOD, COD, TOC, Ortofosfat (PO ₄ -P), Nitrat (NO ₃ -N), Total Fenol, dan Merkuri.	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Jumlah tenaga kerja yang direncanakan akan direkrut pada tahap operasi adalah total sejumlah 850 personel terdiri dari tenaga kerja untuk Kilang OLNG termasuk seluruh TUKS sejumlah 636 tenaga kerja, dan FPSO (termasuk SURF dan GEP yang akan dioperasikan secara <i>remote</i> dari FPSO) sejumlah 214 tenaga kerja. Jumlah limbah cair (<i>Black and grey water</i> yang dihasilkan dari tenaga kerja di OLNG dan TUKS sekitar 600 m³/hari dan diolah di <i>Sewage Treatment Plant</i> (STP). Sementara itu, limbah proses dan penunjang berupa limbah terkontaminasi minyak berlanjutan dan limbah terkontaminasi minyak abnormal dialirkan ke WWTP COC <i>drain treatment</i> dan WWTP AOC <i>drain treatment</i> yang masing-masing berkapasitas 240 m³/hari, limbah dari air tumpahan dan kebocoran bahan kimia dialirkan ke WWTP <i>Chemically Contaminated water treatment</i> berkapasitas 240 m³/hari, dan air lindi sampah organik Non-B3 dialirkan ke WWTP <i>Leachate treatment</i> berkapasitas 1200 m³/hari. Limbah hasil olahan di WWTP ini dialirkan ke saluran pembuangan umum (<i>common outfall</i>). B. Kondisi rona lingkungan Berdasarkan data rona lingkungan yang diambil dari hasil survei pada musim kemarau 2019 dan musim hujan 2020, di perairan Saumlaki konsentrasi dari parameter-parameter terdampak sebagai berikut: pH 7,21-8,38 (BM 6,5-8,5); Minyak dan Lemak (Total Hidrokarbon) <1 mg/L (BM <1 mg/L); TSS 2-7 mg/L (BM coral dan lamun 20 mg/L), Klorin Bebas tidak dipersyaratkan; Sulfida <0,002 mg/L (BM 0,01 mg/L); DO 4-5,85 mg/L (BM >5 mg/L); BOD <2 mg/L (BM 20 mg/L); COD 3-8 mg/L (BM tidak ada), TOC tidak dipersyaratkan; Ortofosfat (PO₄-P) 0,03-0,306 mg/L (BM 0,015 mg/L); Nitrat (NO₃-N) 0,006-0,066 mg/L (BM 0,006 mg/L); Total Fenol <0,001 mg/L (BM 0,002 mg/L), dan Merkuri <0,00005 mg/L (BM 0,001 mg/L). C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan Pembuangan air limbah (limbah domestik, limbah berminyak, dan limbah terkontaminasi) pada tahap konstruksi dari kegiatan pekerja diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan adanya Peningkatan Kualitas Air Laut berupa peningkatan beberapa parameter yaitu Klorin Bebas, BOD,COD, TOC, Ortofosfat, Nitrat, Merkuri, Sulfida dan Total Fenol dan benda terapung serta buih busa. Air limbah yang dihasilkan selama kegiatan operasi, kapasitas	Disimpulkan sebagai DPH (Kecuali Perubahan pH dan Penurunan Konsentrasi DO)	Persebaran dampak di perairan Teluk Saumlaki diperkirakan maksimum sekitar 300 m dari titik <i>outfall</i> . Arus laut di Teluk Saumlaki dominan disebabkan gerakan pasang-surut, maka persebaran dampak adalah ke arah utara pada saat pasang dan ke arah selatan pada saat surut.	Perubahan kualitas air laut karena pembuangan air limbah yang telah diolah akan dimodelkan menggunakan data hidro-oseanografi. Batas waktu kajian dampak sebaran polutan pada air laut adalah selama 5 tahun.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					desain fasilitas pengolahan air limbah akan memperhitungkan jumlah maksimum tenaga kerja operasi yang akan berada di lokasi kilang OLNG dengan Fasilitas Pengolahan Air Limbah. D. Intensitas perhatian masyarakat Hasil konsultasi publik tidak ada intensitas perhatian masyarakat terhadap dampak lingkungan berupa penurunan kualitas air akibat pembuangan air limbah (limbah domestik, limbah berminyak, dan limbah terkontaminasi). E. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian rencana usaha dan/atau kegiatan Pembuangan Air Limbah (limbah domestik, limbah berminyak, dan limbah terkontaminasi) pada tahap operasi diidentifikasi sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH), akan dikaji dalam Andal dan RKL dan RPL, kecuali terhadap penurunan pH dan DO.			
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus terhadap gangguan terumbu karang. Gangguan terhadap terumbu karang merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Namun demikian perubahan habitat terumbu karang akan dipantau, serta akan dilakukan penanam kembali terumbu karang pada lokasi yang sesuai (<i>offset</i>)		Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Diperkirakan total air limbah yang dihasilkan adalah 9.720 m³/hari. Semua air limbah akan dioleh terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Air limbah proses akan diolah di fasilitas Pengolahan Air Limbah (<i>Wastewater Treatment Plant</i> atau WWTP). Air limbah <i>Sewage</i> akan diolah menggunakan IPAL limbah domestik (<i>sewage treatment plant</i>) yang memenuhi persyaratan. . Air limbah yang terkontaminasi bahan kimia dan air limbah B3 akan dikirim ke pengelola limbah B3 yang memiliki izin dari KLHK B. Kondisi Rona Lingkungan Hasil pemantauan Desember 2023 terhadap komunitas terumbu karang di perairan Lokasi kegiatan, kondisi penutupan terumbu karang di sekitar perairan Saumlaki berada pada kisaran 36,72 % sd. 77,04 % termasuk kategori sedang hingga baik sekali. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembuangan air limbah ke laut dapat mengganggu ekosistem terumbu karang karena dapat memperburuk kualitas perairan, terutama faktor-faktor pendukung yang penting bagi kelangsungan hidup terumbu karang. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Gangguan terhadap terumbu karang menjadi perhatian masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Kegiatan pengolahan dan pembuangan air limbah akan mengganggu dan berdampak pada habitat terumbu karang. Sehingga kegiatan ini termasuk dalam Dampak Penting Hipotetik (DPH).	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak oleh pembuangan air limbah di perairan Teluk Saumlaki diperkirakan maksimum sekitar 300 m dari titik outfall. Arus laut di Teluk Saumlaki dominan disebabkan gerakan pasang-surut, maka persebaran dampak adalah ke arah utara pada saat pasang dan ke arah selatan pada saat surut.	Perubahan kualitas air laut karena pembuangan air limbah yang telah diolah akan dimodelkan menggunakan data hidro-oseanografi. Batas waktu kajian sebaran dampak adalah selama 5 tahun.
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus terhadap padang lamun/rumput laut dan gangguan terhadap padang lamun/rumput laut merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak		Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Diperkirakan total air limbah yang dihasilkan adalah 9.720 m³/hari. Semua air limbah akan dioleh terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Air limbah proses akan diolah di fasilitas Pengolahan Air Limbah (<i>Wastewater</i>	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak oleh pembuangan air limbah di	Perubahan kualitas air laut karena pembuangan air limbah yang telah

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		dapat dihindarkan (<i>given impact</i>). Namun demikian perubahan habitat padang lamun akan dipantau.			<i>Treatment Plant</i> atau WWTP). Air limbah <i>Sewage</i> akan diolah menggunakan IPAL limbah domestik (<i>sewage treatment plant</i>) yang memenuhi persyaratan. . Air limbah yang terkontaminasi bahan kimia dan air limbah B3 akan dikirim ke pengelola limbah B3 yang memiliki izin dari KLHK. B. Kondisi Rona Lingkungan Terdapat tiga jenis lamun yang ditemukan di area studi yaitu <i>Enhalus acoroides</i>, <i>Thallasia sp.</i> dan <i>Haloudle sp.</i> Penutupan lamun di Kepulauan Tanimbar mencapai 60% yang didominasi oleh <i>Thallasia hemprichii</i> 45,88%, <i>Halophila minor</i> 37,10%. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pengolahan dan pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu akan dapat mengganggu dan berdampak pada habitat padang lamun dan rumput laut. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Gangguan terhadap lamun dan rumput laut menjadi perhatian masyarakat pada saat konsultasi publik E. Kesimpulan Kegiatan pengolahan dan pembuangan air limbah akan mengganggu dan berdampak pada habitat padang lamun dan rumput laut. Sehingga kegiatan ini termasuk dalam Dampak Penting Hipotetik (DPH).		perairan Teluk Saumlaki diperkirakan maksimum sekitar 300 m dari titik <i>outfall</i> . Arus laut di Teluk Saumlaki dominan disebabkan gerakan pasang-surut, maka persebaran dampak adalah ke arah utara pada saat pasang dan ke arah selatan pada saat surut.	diolah akan dimodelkan menggunakan data hidro-oseanografi. Batas waktu kajian sebaran dampak adalah selama 5 tahun.
21.	Pengelolaan Limbah: Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, dan Limbah Terkontaminasi) dari Kegiatan di Lepas Pantai	A. Air limbah proses akan diolah di fasilitas Pengolahan Air Limbah (<i>Waste Water Treatment Plant</i> atau WWTP). Air limbah <i>Sewage</i> akan diolah menggunakan IPAL limbah domestik (<i>sewage treatment palnt</i>) yang memenuhi persyaratan sesuai SNI 8455:2017 (Perencanaan pengolahan air limbah rumah tangga dengan sistem reaktor anaerobik bersekat (SRAB)) atau Standard internasional lainnya. B. Air berminyak dari sistem pembuangan terbuka, sistem drainase lambung kapal, air pencucian dan pancuran pengaman outlet ditampung <i>dalam slop tank system</i> (slop tank kotor), kemudian slop tank bersih dengan kapasitas masing-masing 6.680 m³. C. Air limbah yang terkontaminasi bahan kimia dan air limbah B3 akan dikirim ke pengelola limbah B3 yang memiliki izin dari KLHK	Kualitas Air Laut	Perubahan Konsentrasi Minyak dan Lemak (Total Hidrokarbon), TSS, Klorin Bebas, Sulfida, DO, BOD, COD, TOC, dan Ortofosfat (PO ₄ -P) dan Nitrat (NO ₃ -N)	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Jumlah tenaga kerja yang direncanakan akan direkrut pada tahap operasi di FPSO (termasuk SURF dan GEP yang akan dioperasikan secara remote dari FPSO) sejumlah 214 tenaga kerja.Tenaga kerja di FPSO akan menghasilkan limbah domestik cair sekitar 57,6 m³/hari. Selain itu akan dihasilkan air limbah lambung kapal dan open drain (<i>slop tank system</i>) 1.814,4 m³/hari serta limbah drainase dek FPSO. Air terkontaminasi minyak yang diterima dari beberapa kegiatan (daintarnya pencucian dan keluaran <i>safety shower</i>), sistem pembuangan terbuka dan sistem lambung kapal. Air dan minyak akan dipisahkan di <i>slop tank</i> sebelum dibuang ke laut. Air drainase dek yang terkontaminasi minyak dan ceceran bahan kimia non-B3. B. Kondisi rona lingkungan Berdasarkan data rona lingkungan yang diambil dari hasil survei di sekitar lokasi calon FPSO atau offshore, konsentrasi dari parameter-parameter yang diidentifikasi akan terdampak diantaranya adalah sebagai berikut: minyak dan lemak <0,2 mg/L (BM 1 mg/L) ; TSS <2 mg/L (BM 20 mg/L); Klorin Bebas: tidak ada data karena tidak dipersyaratkan; Sulfida <0,007 mg/L (BM 0,01 mg/L) DO<4 mg/L (BM>5 mg/L); BOD 6 mg/L (BM 20 mg/L);	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		D. Inpex akan mengikuti Persetujuan teknis (Pertek) pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut oleh Inpex Masela Ltd No. S.376/PPKL/PPKP/PKI.I/9/2021. E. INPEX akan memenuhi baku mutu air limbah yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi. F. INPEX akan memenuhi baku mutu kualitas air laut ambien (Lampiran VIII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 untuk Biota Laut).			COD dan TOC tidak ada data dan tidak dipersyaratkan; Ortofosfat <0,01 mg/L (BM 0,015 mg/L); Nitrat <0,002 mg/L (BM 0,06 mg/L). C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan Pembuangan Air Limbah (limbah domestik, limbah berminyak, dan limbah terkontaminasi) pada tahap operasi dari kegiatan pekerja dan kegiatan operasional lainnya diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan berupa penurunan kualitas air laut berupa peningkatan beberapa parameter yaitu Minyak dan Lemak (Total Hidrokarbon), TSS, Klorin Bebas, Sulfida, DO, BOD, COD, TOC, dan Ortofosfat (PO₄-P) dan Nitrat (NO₃-N), benda terapung serta buih busa. D. Intensitas perhatian masyarakat Hasil konsultasi publik diperoleh bahwa tidak ada intensitas perhatian masyarakat terhadap dampak lingkungan berupa penurunan kualitas air akibat pembuangan air limbah (limbah domestik, limbah berminyak, dan limbah terkontaminasi) di FPSO. E. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian rencana usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan dan pembuangan air limbah (limbah domestik, limbah berminyak, dan limbah terkontaminasi) diidentifikasi sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH), namun pengelolaan dan pemantauannya akan tetap dimasukkan dalam RKL dan RPL.			
22.	Pengolahan Limbah: Pengolahan dan Pembuangan Air Terproduksi	A. Pembangunan dan pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Terproduksi. B. Inpex akan mengikuti Persetujuan teknis (Pertek) pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut oleh Inpex Masela Ltd No. S.376/PPKL/PPKP/PKI.I/9/2021 C. INPEX akan memenuhi baku mutu air limbah yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi	Kualitas Air Laut	Peningkatan Konsentrasi Minyak dan Lemak (Total Hidrokarbon), TSS, BTEX, dan Merkuri	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Air terproduksi (<i>produced water</i>) di FPSO diolah di Degassing Section, Hidrokarbon extraction dan Merkuri removal system. Sistem pengolahan air terproduksi pada fasilitas FPSO didesain untuk mengolah air terproduksi dengan kapasitas desain sekitar 16.000 bpd untuk memenuhi spesifikasi proyek dengan kriteria kandungan minyak di dalam air kurang dari 50 mg/L, sebelum dibuang ke laut. B. Kondisi rona lingkungan Berdasarkan data rona lingkungan di <i>Offshore</i> yang diperoleh dari hasil analisis sampling pada musim hujan (Maret 2020), nilai minyak dan lemak dibawah baku mutu, yakni <0,2 mg/L (BM <1 mg/L berdasarkan PP 22 tahun 2021 Lampiran VIII); TSS <2 mg/L (BM 20 mg/L); Merkury <0,0005 mg/L (BM 0,001 mg/L); BTEX tidak terdeteksi dan tidak dipersyaratkan dalam PP 22 tahun 2021 Lampiran VIII. Sementara itu Teluk Saumlaki, hasil pengamatan pada musim kemarau (November 2019) dan musim hujan (Maret 2020) nilai parameter minyak dan lemak <1 mg/L (BM <1 mg/L); TSS 2-7 mg/L (BM 20 mg/L); Merkury <0,00005 mg/L (BM 0,001 mg/L); BTEX tidak terdeteksi dan tidak dipersyaratkan dalam PP 22 tahun 2021 Lampiran VIII. Sedangkan hasil analisis sample bulan Januari 2024 di perairan pesisir Maluku Barat Daya (MBD), nilai parameter minyak dan lemak <0,3 mg/L (BM <1 mg/L); TSS <3-21 mg/L (BM 20 mg/L); Merkury <0,0002 mg/L (BM 0,001 mg/L); BTEX tidak terdeteksi dan tidak dipersyaratkan dalam PP 22 tahun 2021 Lampiran VIII	Disimpulkan sebagai DPH	Persebaran dampak diperkirakan maksimum sekitar 1.000 m dari titik <i>outfall</i> yang secara dominan persebarannya ke arah Barat Laut.	Berlangsung pada ruang dan waktu yang sama selama masa operasi FPSO dengan estimasi batas waktu kajian dampak selama 5 tahun.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan Adanya penurunan kualitas air laut yang berupa peningkatan Konsentrasi Minyak dan Lemak (Total Hidrokarbon) akibat pembuangan limbah air terproduksi dengan pengelolaan akan mengacu pada Pertek No. S.376/PPKL/PPKP/PKI.I/9/2021. Parameter lainnya mengacu pada PP No 22 Tahun 2021 Lampiran VIII untuk biota laut dan BTEX mengacu pada modifikasi <i>Federal water quality guidelines</i> - Benzene, toluene, ethylbenzene, xylene (BTEX), <i>Canadian Environmental Protection Act, 1999</i>. D. Intensitas perhatian masyarakat Hasil konsultasi publik terdapat adanya intensitas perhatian masyarakat terhadap dampak lingkungan berupa peningkatan Konsentrasi Minyak dan Lemak (Total Hidrokarbon) dan bahan pencemar lainnya akibat pembuangan air terproduksi. E. Kesimpulan Berdasarkan penjelan diatas Dengan demikian rencana usaha dan/atau kegiatan Pembuangan Air terproduksi ditahap operasi diidentifikasi sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH), akan di kaji dalam Andal dan RKL dan RPL.			
23.	Pengolahan Limbah: Pengelolaan Air <i>Ballast</i>	Mengelola air <i>ballast</i> agar aman terhadap lingkungan dalam kegiatan pengambilan dan pembuangan air.	Biota Pesisir dan Biota Laut	Introduksi Spesies Ekstotik Biota Laut	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Untuk kapal-kapal besar (Kapal Tanker LNG, Kapal Kondensat), pembuangan pengelolaan air limbah (<i>bilge water</i>, air limbah mengandung minyak, air ballast, air limbah sanitari) kapal dilakukan secara independen di luar daerah kerja INPEX, sesuai dengan ketentuan MARPOL dan PP No. 21 Tahun 2010. B. Kondisi rona lingkungan Berdasarkan data rona lingkungan yang diperoleh dari hasil analisis sampling pada musim kemarau (November 2019) dan musim hujan (Maret 2020), nilai minyak lemak di bawah baku mutu<0,3 - <1 mg/L (PP 22 tahun 2021 Lampiran VIII) di sekitar perairan Saumlaki dan Maluku Barat Daya. C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan Adanya gangguan terhadap biota perairan dari kegiatan pembuangan air balas dari kapal berupa adanya peningkatan Konsentrasi Minyak dan Lemak (Total Hidrokarbon). Pengelolaan mengikuti ketentuan MARPOL dan PP No. 21 Tahun 2010 . D. Intensitas perhatian masyarakat Hasil konsultasi publik tidak adanya intensitas perhatian masyarakat terhadap dampak lingkungan berupa peningkatan Konsentrasi Minyak dan Lemak (Total Hidrokarbon) akibat air balas dari kapan kapal pendukung dan operasi. E. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas dengan demikian rencana usaha dan/atau kegiatan pembuangan air balas dari kapal pendukung dan kapal operasi diidentifikasi sebagai Dampak Penting Hipotetik (DTPH), tidak akan dikaji dalam Andal RKL dan RPL.	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
24.	Pengolahan Limbah: Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	A. Menerapkan prinsip minimalisasi sampah di seluruh rangkaian kegiatan B. Menerapkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan melakukan pengomposan untuk limbah yang bersifat mudah terurai (biodegradable), daur ulang untuk limbah yang bersifat inert, pembakaran di insinerator limbah Non B3 untuk limbah-limbah yang tidak dapat didaur-ulang maupun dikomposkan, serta pembuangan akhir di <i>sanitary landfill</i>	Kesehatan Masyarakat	Perubahan Penyakit Menular	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja yang besar pada tahap operasi sejumlah 850 personel terdiri dari tenaga kerja untuk Kilang OLNG termasuk seluruh TUKS sejumlah 636 orang, dan FPSO (termasuk SURF dan GEP yang akan dioperasikan secara <i>remote</i> dari FPSO) sejumlah 214 orang. B. Kondisi Rona Lingkungan Berdasarkan data sekunder untuk prevalensi penyakit 10 penyakit terbanyak dari tahun 2021 – 2023 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah ISPA yaitu tahun dengan prevalensi berturut-turut sebesar 14,6%, 15,7% dan 12,7% C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Jumlah populasi yang besar dari orang yang berada wilayah proyek serta kontak antara masyarakat pendatang dan masyarakat setempat yang meningkat (kadang-kadang diikuti oleh kondisi kesehatan lingkungan yang memburuk akibat populasi berlebih) kemungkinan prevalensi penyakit di daerah penelitian juga berubah, peningkatan kejadian penyakit yang ada dan baru sama. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perubahan penyakit menular merupakan aspek yang menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Kegiatan ini dikategorikan mempunyai Dampak Penting Hipotetik (DPH) terhadap perubahan penyakit menular dan perlu dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Turunan dari: Peningkatan migrasi (mobilitas penduduk), Perubahan norma dan nilai sosial; dan Perubahan sanitasi lingkungan	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus	Dampak terhadap kesehatan masyarakat merupakan dampak turunan oleh adanya perubahan terhadap demografi terutama oleh adanya influx (immigrasi) penduduk ke wilayah kerja INPEX. Dampak Berlangsung pada ruang dan waktu yang berbeda selama masa operasi OLNG dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun.
				Perubahan Sanitasi Lingkungan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja yang besar pada tahap operasi sejumlah 850 personel terdiri dari tenaga kerja untuk Kilang OLNG termasuk seluruh TUKS sejumlah 636 orang, dan FPSO (termasuk SURF dan GEP yang akan dioperasikan secara <i>remote</i> dari FPSO) sejumlah 214 orang. B. Kondisi Rona Lingkungan Indikator sanitasi layak mengacu kepada 5 pilar indikator Sanitasi total berbasis masyarakat Adlah Stop BABS , Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga dengan cakupan 90%. Berdasarkan data STBM Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk sanitasi layak 81,37% , desa dengan STBM 91,46% dan Desa stop BABS 46% C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja akan mendorong para tenaga kerja dan pencari kerja menuju kampung-kampung di sekitar proyek.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Lauran, Desa Kabyarat, Desa Ingei, Desa Wowonda	Dampak terhadap kesehatan masyarakat merupakan dampak turunan oleh adanya perubahan terhadap demografi terutama oleh adanya influx (immigrasi) penduduk ke wilayah kerja INPEX. Dampak Berlangsung pada ruang dan waktu

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Pertambahan para pendatang ini diperkirakan terjadinya perubahan atau penurunan sanitasi lingkungan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perubahan sanitasi lingkungan merupakan aspek yang menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja akan mendorong para tenaga kerja dan pencari kerja menuju kampung-kampung di sekitar proyek. Pertambahan para pendatang ini diperkirakan menyebabkan tekanan pada kondisi kesehatan lingkungan kampung-kampung di sekitar proyek. Kegiatan ini berpotensi akan menimbulkan Dampak Penting Hipotetik (DPH) terhadap perubahan sanitasi lingkungan dan perlu dikaji lebih lanjut dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Primer.			yang berbeda selama masa operasi O LNG dengan estimasi batas waktu kajian dampak 5 tahun.
25.	Pengolahan Limbah: Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari Kegiatan di Lepas Pantai	A. INPEX akan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam: (1) pengelolaan sampah (sesuai UU No 18 Tahun 2008); (2) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (sesuai PP No. 81 Tahun 2012). B. Pembuangan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tidak akan dilakukan di lepas pantai, melainkan akan ditransportasi ke darat dan dikelola lebih lanjut.	Kualitas Air Laut	Perubahan Jumlah Sampah (Benda Terapung), Konsentrasi TSS, DO, BOD, COD, TOC, dan Ortofosfat (PO ₄ -P) dan Nitrat (NO ₃ -N)	A. Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Jumlah tenaga kerja yang direncanakan akan direkrut pada tahap operasi di FPSO (termasuk SURF dan GEP yang akan dioperasikan secara <i>remote</i> dari FPSO) sejumlah 214 tenaga kerja. Jika diasumsikan bahwa setiap pekerja menghasilkan limbah padat 0,4 kg/hari (UNESCO/WHO/UNEP, 1992 <i>Water Quality Assessment</i>), maka akan menghasilkan limbah padat ± 85,6 kg/hari. Selain itu akan dihasilkan air limbah padat Non B3 yang berasal dari kegiatan domestik (perkantoran, camp tenaga kerja) dan dari kegiatan proses maupun pendukung operasional lainnya. B. Kondisi rona lingkungan Berdasarkan data rona lingkungan yang diambil dari hasil survei di sekitar lokasi calon FPSO atau <i>offshore</i>, konsentrasi dari parameter-parameter yang diidentifikasi akan terdampak diantaranya Benda terapung Nihil (BM Nihil); TSS <2 mg/L (BM 20 mg/L); DO<4 mg/L (BM>5 mg/L); BOD 6 mg/L (BM 20 mg/L); COD dan TOC tidak ada data dan tidak dipersyaratkan; Ortofosfat <0,01 mg/L (BM 0,015 mg/L); Nitrat <0,002 mg/L (BM 0,06 mg/L). C. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan Limbah padat akan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku, dipilah dan dikumpulkan sesuai kategorinya dalam wadah yang baik dan benar, sehingga mencegah timbulnya benda terapung di sekitar fasilitas FPSO. Apabila limbah yang terkumpul langsung dibuang ke laut, maka dapat menyebabkan peningkatan benda terapung, TSS, BOD, COD, TOC, Fosfat dan Nitrat, terutama sampah domestik. Peningkatan konsentrasi BOD, COD dan TOC akan seiring dengan penurunan konsentrasi DO. D. Intensitas perhatian masyarakat Hasil konsultasi publik tidak ada intensitas perhatian masyarakat terhadap dampak lingkungan berupa penurunan kualitas air akibat pembuangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari kegiatan di lepas pantai.	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					E. Kesimpulan Berdasarkan penjelan di atas, dengan demikian rencana usaha dan/atau kegiatan pengolahan dan pembuangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari kegiatan di lepas pantai, diidentifikasi sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) , namun pengelolaan dan pemantauannya akan tetap dimasukkan dalam RKL dan RPL.			

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
D. Tahap Pasca Operasi								
1	Penutupan dan Pembongkaran Seluruh Fasilitas	Melakukan pengurangan timbulan debu dengan cara penyiraman/ penyemprotan air ke permukaan tanah pada lokasi proyek terutama pada hari-hari tidak hujan.	Kualitas Udara CO < 100 ug/m³ NO₂ < 5ug/m³ SO₂ < 20-21 ug/m³ O₃ < 20ug/m³ HC K 50 ug/m³ TSP 13,1-77,5 ug/m³ PM10 2,5-72,5 ug/m³ PM2,5 0,9-61,5 ug/m³	Peningkatan Konsentrasi Partikulat (TSP, PM₁₀ dan PM₂.₅)	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penutupan dan Pembongkaran Fasilitas Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya, FPSO, SURF dan GEP B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi rona lingkungan untuk parameter NO₂, dan SO₂ di sekitar OLNG tergolong baik. Kadar SO₂ dan NO₂ maksimum yang terukur di lapangan berada di bawah 50% baku mutu udara ambien menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembongkaran (demolisi) bangunan dapat menimbulkan timbulan debu (partikulat). D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terdapat kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Kegiatan penutupan dan pembongkaran seluruh fasilitas akan dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, dan diperkirakan tidak menimbulkan dampak penting. Oleh karena itu dampak ini termasuk Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH)	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
		Mengupayakan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebisingan pada malam hari.	Kebisingan Lsm: 45,1-54,5 dBA	Peningkatan Kebisingan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penutupan dan Pembongkaran Fasilitas Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya, FPSO, SURF dan GEP B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi kebisingan tergolong baik, Lsm < 55 dBA C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembongkaran (demolisi) bangunan dapat menimbulkan kebisingan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Tidak terungkap adanya kekhawatiran masyarakat E. Kesimpulan Dampak digolongkan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
		Penutupan kilang hanya di dalam lokasi keberadaan kilang dan dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan jarak terdekat dengan pemukiman maupun infrastruktur umum untuk menghindari terjadinya dampak turunan.	Fisiografi	Perubahan Lanskap	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Area OLNG dan fasilitas pendukung kurang lebih seluas <700 ha. B. Kondisi Rona Lingkungan Lokasi berupa OLNG dan fasilitas pendukung serta TUKS. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penutupan kilang OLNG berdampak pada perubahan lanskap akibat adanya bangunan-bangunan yang dihilangkan dari fasilitas OLNG yang memberikan perubahan dari tatanan sebelumnya. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini tidak muncul saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Penutupan kilang OLNG berdampak pada perubahan lanskap akibat adanya bangunan-bangunan yang dihilangkan dari fasilitas OLNG yang memberikan	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					perubahan dari tatanan sebelumnya. Namun perubahan ini tidak berdampak besar sehingga dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).			
		Segera melakukan penanaman pada lokasi kegiatan setelah pembersihan lahan/penutupan kilang selesai dilakukan.	Biota Terestrial dan Ekosistem	Perubahan Tutupan Lahan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Area OLNG dan fasilitas pendukung kurang lebih seluas <700 ha B. Kondisi Rona Lingkungan Lokasi berupa OLNG dan fasilitas pendukung serta TUKS. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Lahan bekas OLNG dan fasilitas pendukungnya akan diserahkan ke pemerintah. Penanganan lahan yang diserahkan tergantung kesepakatan yang dibuat di awal atau tergantung pada kesepakatan-kesepakatan lain/peraturan pada saat pasca operasi. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Perubahan tutupan lahan pada saat pasca operasi tidak menjadi perhatian masyarakat pada saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Sehingga perubahan tutupan lahan akibat dari kegiatan penutupan kilang OLNG diperkirakan termasuk dalam Dampak Penting Tidak Hipotetik (DTPH), namun tetap akan dilakukan pengelolaan.	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
		Tidak terdapat pengelolaan secara khusus gangguan terhadap mamalia laut. Gangguan terhadap mamalia laut merupakan konsekuensi (dampak) yang tidak dapat dihindarkan (<i>given impact</i>) dari kegiatan.	Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan Terhadap Mamalia Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 1. Penutupan Sumur Sumur-sumur akan ditutup (<i>plug</i>) dan ditinggalkan secara permanen. <i>Well head</i> akan ditinggalkan di lokasi. <i>Subsea trees</i> akan dibongkar dan dibawa ke tempat pembuangan. Namun, analisis risiko akan dilakukan untuk menentukan jika <i>subsea trees</i> dapat ditinggalkan di tempat. Semua isolasi maupun katup-katup akan dipastikan dalam keadaan tertutup. Pekerjaan penutupan sumur ini akan dilakukan secara batch dengan tahapan pekerjaan sebagai berikut: - Run anchors - Run BOP dan land on Christmas Tree - Kill the well - Recover BOP dan Christmas Tree - Run BOP - Recover completion - Set cement plug - Pull BOP - Recover anchor 2. Fasilitas Bawah Laut dan Pipa Kegiatan-kegiatan ASR (<i>Abandonment and Site Restoration</i>) meliputi: - <i>Subsea flowline</i> akan dibersihkan, dibilas, dan diisi dengan air laut. Setelah kedua sisi ditutup, akan ditinggalkan di tempat, minimal dengan kedua ujung tertanam.	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					- Pipa penyalur bawah laut akan dibersihkan, dibilas dari hidrokarbon dan ditinggalkan di tempat dengan ujungnya tertanam sedalam 1 (satu) meter di bawah mudline dasar laut. Penanganan bahan-bahan berbahaya dan beracun (B3) dan tidak berbahaya yang tidak digunakan lagi serta pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. - <i>Umbilicals</i> akan diterminasi, dipasang <i>pulling head</i>, dibersihkan, dan diisi dengan air laut dan dibiarkan di tempat. Beban mungkin ditambahkan untuk stabilisasi. - <i>Fiber optics</i> dan kabel bawah laut, termasuk <i>umbilicals fiber optics</i> dan kabel akan diputus daya, diterminasi, dan dibiarkan di tempat. - <i>Wellheads, jumpers, manifolds</i>, struktur bawah laut (<i>manifolds, Pipeline End Terminations</i> (PLETs), dan <i>Umbilical Termination Assemblies</i> (UTAs)) akan dibersihkan, dibilas dari hidrokarbon dan dibiarkan di tempat dengan pertimbangan untuk konversi <i>artificial reefs</i>. Pembongkaran fasilitas akan mengikuti ketentuan dalam Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran dan Bangunan dan/atau instalasi di Perairan. 3. FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>) Kegiatan-kegiatan Pasca Operasi (ASR) berikut ini akan dilaksanakan terkait fasilitas FPSO: - FPSO akan dibersihkan dari seluruh hidrokarbon, bahan berbahaya dan beracun. <i>Seawater intake caisson, flowline</i> dan <i>umbilical riser</i> akan dipindahkan. FPSO akan disertifikasi “aman dan bersih” sebelum pelepasan alat-alat pendukung. FPSO akan dibawa ke dermaga terlindung untuk pembuangan atau penggunaan selanjutnya. - Sistem mooring (<i>anchor chains</i>) akan dilepaskan dari FPSO dan ditinggal di tempat - <i>Flowline riser</i> akan dibersihkan, disiram dari hidrokarbon dan diambil untuk dipotong lalu dibuang. 4. Kilang OLNG (<i>Onshore LNG</i>) Kegiatan-kegiatan Pasca Operasi (ASR) berikut ini akan dilaksanakan terkait fasilitas OLNG sebelum proses pelepasan: - Fasilitas OLNG akan dibersihkan dari seluruh hidrokarbon, bahan berbahaya dan beracun. - Tangki LNG, kondensat, refrigeran, diesel dan tangki hidrokarbon yang lain dan semua obyek baja di atas permukaan dan alat-alat akan dibongkar. Baja dan alat-alat yang dibongkar akan dibawa ke fasilitas pembuangan dengan persetujuan Pemerintah. - Fasilitas berikut yang bisa digunakan kembali atau ditransfer (camp konstruksi, jalan, bangunan kantor dan gudang, pengolahan air, dermaga dan pembangkit listrik) akan didiskusikan dengan pemerintah dan pihak yang akan menerima fasilitas.			

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					- Tanah lokasi OLNG akan diremediasi dan ditanam kembali seperlunya untuk mencegah erosi dan meningkatkan stabilitas tanah, namun tanah tidak akan dikembalikan ke kontur semula. - Fondasi dan <i>footings</i> akan ditinggalkan di lokasi. Pola drainase alami akan dikembalikan bila memungkinkan. - Tenaga kerja operasi yang terlatih dan penduduk setempat akan dipekerjakan untuk aktivitas pembongkaran, bila memungkinkan. - Aktivitas <i>decommisioning</i> termasuk survei (untuk memeriksa kontaminasi) dan serah-terima (<i>handover</i>) ke operator, serta restorasi wilayah lapangan dari fasilitas-fasilitas pendukung di darat. 5. Pengelolaan Fasilitas yang Ditinggalkan Fasilitas yang sudah ditutup dan ditinggalkan akan dan/atau dapat menjadi milik Pemerintah atau didemolisi (dipotong-potong) atau dipertimbangkan untuk digunakan kembali di lokasi lain, sesuai kelak keputusan Pemerintah. B. Kondisi Rona Lingkungan Untuk data rona lingkungan kebisingan bawah laut alami di lokasi studi tidak tersedia. Menurut Veeriyen and Rajendran, nilai kebisingan alami di bawah laut berkisar antara 60 – 90 dB re 1 μPa dalam rentang 10-100 Hz. Keberadaan mamalia laut berdasarkan data rona yang dikumpulkan pada tahun 2012, 2013, 2019 dan 2020 dijumpai 13 jenis mamalia laut yang terdiri dari kelompok paus sebanyak 8 jenis, kelompok lumba-lumba 4 jenis, dan 1 jenis kelompok sirenia yang dijumpai di sekitar lokasi kajian. 13 Jenis mamalia laut yang dijumpai di lokasi studi termasuk dalam rentang suara <i>high frequency</i>, <i>low frequency</i> dan <i>sirenians frequency</i>, sehingga diketahui rentang nilai TTS (<i>Temporary Threshold Shifts</i>/Ambang Batas Kebisingan Sementara) terendah sebesar 213 dB re 1 μPa dan nilai PTS (<i>Permanent Threshold Shifts</i>/Ambang Batas Kebisingan Permanen) terendah sebesar 219 dB re 1 μPa. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penutupan dan Pembongkaran Seluruh Fasilitas pada tahap pasca operasi menurut Martin et al, 2021 akan meningkatkan kebisingan bawah laut alami sebesar 210 - 230 dB re 1 μPa yang menyebabkan gangguan terhadap mamalia laut. Peningkatan kebisingan bawah laut akibat Penutupan dan Pembongkaran Seluruh Fasilitas bersifat <i>intermitent</i> dan akan berkurang <i>gradually</i> dengan bertambahnya jarak dari sumber kebisingan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Berdasarkan hasil konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan yang sudah dilakukan, gangguan terhadap mamalia laut akibat peningkatan kebisingan yang dihasilkan dari kegiatan Penutupan dan Pembongkaran Seluruh Fasilitas pada tahap pasca operasi tidak menjadi perhatian yang tinggi dari masyarakat. E. Kesimpulan			

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Peningkatan kebisingan bawah laut akibat Penutupan dan Pembongkaran Seluruh Fasilitas bersifat <i>intermitent</i> dan akan berkurang <i>gradually</i> dengan bertambahnya jarak dari sumber kebisingan. Maka gangguan mamalia laut kegiatan Penutupan dan Pembongkaran Seluruh Fasilitas selama tahap pasca operasi menjadi Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).			
		A. Memberikan sosialisasi kepada nelayan, pemerintah daerah setempat dan pihak lain terkait kegiatan penutupan kilang OLNG. B. Menyusun, mensosialisasikan dan menerapkan manajemen penanganan keluhan kepada masyarakat. C. Menjalinkan komunikasi efektif dengan para stakeholder.	Sosial Ekonomi	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penutupan dan Pembongkaran Fasilitas Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya, FPSO, SURF dan GEP. B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi kegiatan perikanan utama adalah kapal penangkap ikan pada saat tahap konstruksi sudah dapat diantisipasi, dan melakukan pelayaran pada jalur yang lebih aman terhadap bahaya navigasi Masyarakat melakukan budidaya rumput laut di sepanjang pantai Lermatang. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembongkaran Kilang OLNG dan fasilitas pendukung akan membutuhkan pengangkutan material yang telah dibongkar melalui jalur laut. Transportasi kapal pengangkut akan berlangsung dalam waktu singkat dan disosialisasikan kepada masyarakat selama jadwal pengangkutan berlangsung. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini tidak menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Pembongkaran Kilang OLNG dan fasilitas pendukung akan membutuhkan pengangkutan material yang telah dibongkar melalui jalur laut. Transportasi kapal pengangkut akan berlangsung dalam waktu singkat dan disosialisasikan kepada masyarakat selama jadwal pengangkutan berlangsung. Dengan demikian, dampak gangguan kegiatan perikanan dari aktivitas ini disimpulkan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) namun tetap perlu dilakukan pengelolaan.	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
			Sosial Budaya	Kekhawatiran Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penutupan dan Pembongkaran Fasilitas Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya, FPSO, SURF dan GEP. B. Kondisi Rona Lingkungan Belum ada keluhan dan harapan masyarakat karena penutupan dan pembongkaran fasilitas. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan penutupan dan pembongkaran kilang OLNG tidak akan menimbulkan kekhawatiran yang berarti dari masyarakat, yang merupakan dampak turunan dari gangguan terhadap kegiatan perikanan. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini tidak menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Kegiatan penutupan kilang OLNK tidak akan menimbulkan kekhawatiran yang berarti dari masyarakat, yang merupakan dampak turunan dari gangguan terhadap kegiatan perikanan, Sehingga dampak tersebut dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).			
				Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penutupan dan Pembongkaran Fasilitas Kilang OLNK dan fasilitas pendukungnya, FPSO, SURF dan GEP. B. Kondisi Rona Lingkungan Mayoritas masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan dan petani dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa perlu khawatir akan adanya gangguan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan penutupan dan pembongkaran kilang OLNK tidak akan menimbulkan harapan dan keluhan yang berarti dari masyarakat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini tidak menjadi perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat.	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
		A. Memberikan sosialisasi kepada nelayan, pemerintah daerah, masyarakat sekitar dan pihak lain terkait kegiatan penutupan kilang OLNK. B. Menyediakan rambu-rambu lalu lintas dan tanda bahaya. Bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk mengatur lalu lintas di darat dan laut.	Transportasi	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Tangki LNG, kondensat, refrigeran, diesel dan tangki hidrokarbon yang lain dan semua obyek baja di atas permukaan dan alat-alat akan dibongkar. Baja dan alat-alat yang dibongkar akan dibawa ke fasilitas pembuangan dengan persetujuan pemerintah, fasilitas yang sudah ditutup dan ditinggalkan akan dan/atau dapat menjadi milik pemerintah atau didemolisi (dipotong-potong) atau dipertimbangkan untuk digunakan kembali di lokasi lain, sesuai kelak keputusan pemerintah. Hasil bongkaran dari penutupan akan diangkut melalui transportasi laut. B. Kondisi Rona Lingkungan Kondisi pada akhir tahap operasi diperkirakan, para pengguna alur pelayaran sudah terbiasa dengan adanya zona terlarang dan terbatas pada tahap konstruksi serta tahap operasi. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dengan adanya penutupan dan pembongkaran seluruh fasilitas pada tahap pasca operasi akan ada daerah zona terlarang dan terbatas untuk keselamatan navigasi serta peningkatan arus lalu lintas laut yang berasal dari bangkitan dari kapal-kapal pengangkut bongkaran, maka para pengguna alur pelayaran harus menghindari dari area tersebut yang berakibat kepada berubah jarak dan waktu tempuh. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Kegiatan ini berdampak langsung kepada masyarakat yang khususnya menggunakan transportasi laut, namun hasil konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan yang sudah dilakukan, dampak ini tidak menjadi intensitas perhatian masyarakat.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Lauran, Desa Kabyarat, Desa Ingei, Desa Wowonda	Berlangsung pada ruang dan waktu berbeda yang dapat berlangsung sekitar 1-2 tahun selama proses pembongkaran seluruh fasilitas kilang OLNK dan fasilitas pendukungnya.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					E. Kesimpulan Kegiatan pembongkaran Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya diperkirakan dapat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama mereka yang biasanya melintasi perairan di sekitar area kilang OLNG untuk akses transportasi sehari-hari mereka. Selain itu, transportasi pengangkutan barang hasil kegiatan penutupan kilang diprediksi akan mengganggu masyarakat terutama nelayan yang umumnya menggunakan transportasi laut untuk menuju pusat kota. Sehingga Gangguan terhadap transportasi laut dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan memerlukan pengkajian lebih lanjut dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Primer.			
				Gangguan Terhadap Transportasi Darat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penutupan dan Pembongkaran Fasilitas Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya, FPSO, SURF dan GEP akan dilakukan pada berhenti beroperasi Kilang OLNG, pembongkaran dilakukan selama 2 tahun. B. Kondisi Rona Lingkungan Beberapa ruas jalan di sekitar rencana kegiatan diperkirakan pada tahun demobilisasi kinerjanya sudah melampau batas kinerja 0.7. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Seluruh hasil-hasil bongkaran yang diangkut melalui jalan darat dan melalui laut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap transportasi darat. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Gangguan terhadap transportasi darat tidak menjadi isu saat konsultasi publik E. Kesimpulan Pengangkutan hasil penutupan Kilang dilakukan hanya menggunakan transportasi laut. gangguan terhadap kegiatan transportasi darat dikategorikan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH).	Disimpulkan sebagai DTPH	-	-
2.	Pelepasan Tenaga Kerja Operasional	A. Menginformasikan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang jumlah pelepasan tenaga kerja selama masa operasi dan akhir masa operasi dan juga kepada Kepala Desa dan Camat secara terbuka dan transparan. B. INPEX akan mengikuti ketentuan-ketentuan tentang pelepasan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan.	Sosial Ekonomi	Perubahan Kesempatan Kerja	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pelepasan tenaga kerja tahap operasi sebanyak 850 tenaga kerja. B. Kondisi Rona Lingkungan Sebanyak 850 jiwa bekerja pada kegiatan operasi. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Demobilisasi tenaga kerja proyek akan melibatkan pelepasan tenaga kerja yang sebagian diantaranya merupakan tenaga kerja setempat. Hal ini dianggap sebagai jumlah yang signifikan pada tenaga kerja setempat yang diserap oleh proyek yang nantinya akan kehilangan pekerjaan. Kegiatan ini juga akan mengakibatkan dampak sekunder berupa penurunan mata pencaharian dan dampak tersier lebih lanjut dari perubahan pola mata pencaharian. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini mendapat perhatian masyarakat saat konsultasi publik.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun	Berlangsung pada ruang dan waktu berbeda yang dapat berlangsung sekitar 1-2 tahun selama proses pembongkaran seluruh fasilitas kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					E. Kesimpulan Perubahan kesempatan kerja dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan perlu pengkajian lebih lanjut dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Primer.		dan Desa Matakus, serta desa-desa pada pulau-pulau kecil di Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu; pulau Masela, Pulau Bababr, Pulau Luang, Pulau Lakor, Pulau Moa, Pulau Leti dan sekitarnya	
				Perubahan Peluang Usaha Lokal	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pelepasan tenaga kerja tahap operasi sebanyak 850 tenaga kerja. B. Kondisi Rona Lingkungan Jumlah usaha/perorangan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tercatat sebanyak 12.649 unit meliputi skala mikro kecil (99,49%) dan skala menengah besar (0,51%). Banyaknya usaha di Kabupaten Maluku Barat Daya tercatat sebanyak 6.461 unit terdiri dari usaha skala mikro kecil (99,47%) dan skala menengah besar (0,53%). Banyaknya usaha mikro di Kecamatan Tanimbar Selatan tercatat 770 unit dan di Kecamatan Wertamrian sebanyak 121 unit usaha yang meliputi bidang perdagangan, hotel, dan restoran. Usaha skala kecil terbanyak adalah usaha perdagangan dan usaha bangunan yang berkembang di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian. Di dua kecamatan, tercatat koperasi yang bergerak pada jenis usaha simpan pinjam, bahan bakar minyak (BBM), pertanian, perikanan, waserda, reparasi, dan warnet. Di Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat Usaha Pengolahan Ikan (UPI) sebanyak 5 unit serta 7 Koperasi yang bergerak di sektor perikanan C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pelepasan tenaga kerja proyek diperkirakan akan menimbulkan dampak yang penting terhadap permintaan barang dan jasa di pasar lokal serta pada pemasok lokal untuk kegiatan operasional proyek. Hal ini juga akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan mata pencaharian. Pelepasan tenaga kerja diidentifikasi memiliki dampak potensial terhadap pertumbuhan populasi pada akhir tahap pasca operasi akibat terjadinya migrasi keluar, di mana berdampak juga terhadap menurunnya aktivitas ekonomi yang dibawa oleh para pendatang. D. Intensitas Perhatian Masyarakat	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Lauran, Desa Kabyarat, Desa Ingei, Desa Wowonda, serta desa-desa pada pulau-pulau kecil di Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu; pulau Masela, Pulau Bababr, Pulau Luang, Pulau Lakor, Pulau Moa, Pulau Leti dan sekitarnya	Berlangsung pada ruang dan waktu berbeda yang dapat berlangsung sekitar 1-2 tahun selama proses pembongkaran seluruh fasilitas kilang OLNK dan fasilitas pendukungnya.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Dampak ini mendapat perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Perubahan peluang usaha lokal dikategorikan Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan akan memerlukan pengkajian lebih lanjut dalam studi Andal. Dalam studi kajian Andal, adanya dampak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori Dampak Primer.			
				Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pelepasan tenaga kerja tahap operasi sebanyak 850 tenaga kerja. B. Kondisi Rona Lingkungan Nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.945.953,-/bulan. Berdasarkan hasil survei, 34,5 % responden di wilayah studi memiliki pengeluaran sebesar Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 2.400.664,- /bulan dan 33% responden di wilayah studi berada pada kelompok pengeluaran kurang dari Rp 1.000.000,- /bulan. Sisanya berada pada kelompok pengeluaran antara Rp 2.400.644,- sampai lebih dari Rp 4.000.000,-. /bulan Rata-rata pengeluaran rutin rumah tangga masyarakat adalah Rp 2.411.866,- /bulan. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pelepasan tenaga kerja operasi akan menyebabkan perubahan tingkat pendapatan masyarakat karena terpengaruh hilangnya pendapatan dan menurunnya peluang usaha. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini mendapat perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Merupakan dampak turunan dari Perubahan Partisipasi Tenaga Kerja (Peluang Kerja) dan Perubahan Peluang Usaha Lokal	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus, serta desa-desa pada pulau-pulau kecil di Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu; pulau Masela, Pulau Bababr, Pulau Luang, Pulau Lakor, Pulau Moa, Pulau Leti dan sekitarnya	Berlangsung pada ruang dan waktu berbeda yang dapat berlangsung sekitar 1-2 tahun selama proses pembongkaran seluruh fasilitas kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya.
				Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pelepasan tenaga kerja tahap operasi sebanyak 850 tenaga kerja. B. Kondisi Rona Lingkungan Sektor pertanian merupakan sektor utama sumber mata pencaharian masyarakat, di samping nelayan, usaha kecil menengah, guru, dan lain sebagainya. Di bidang pertanian, masyarakat membudidayakan tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, kehutanan, dan juga peternakan.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa	Berlangsung pada ruang dan waktu berbeda yang dapat berlangsung sekitar 1-2 tahun selama proses pembongkaran

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pelepasan tenaga kerja operasi membuat tenaga kerja yang dilepas untuk mencari pekerjaan baru. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini mendapat perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Merupakan dampak turunan dari Perubahan Partisipasi Tenaga Kerja (Peluang Kerja) dan Perubahan Peluang Usaha Lokal dan dikategorikan sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH).		Olilit, Desa Sifnana, Desa Luran, Desa Kabyarat, Desa Ingei, Desa Wowonda, serta desa-desa pada pulau-pulau kecil di Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu; pulau Masela, Pulau Bababr, Pulau Luang, Pulau Lakor, Pulau Moa, Pulau Leti dan sekitarnya	seluruh fasilitas kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya.
		A. INPEX akan menyusun, mensosialisasikan dan menerapkan manajemen penanganan keluhan kepada masyarakat. B. Menjalinkan komunikasi efektif dengan para <i>stakeholder</i> .	Sosial Budaya	Kekhawatiran Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pelepasan tenaga kerja tahap operasi sebanyak 850 tenaga kerja. B. Kondisi Rona Lingkungan Mayoritas masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan dan petani dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa perlu khawatir akan adanya gangguan. Tidak ada kekhawatiran masyarakat yang timbul dari adanya kegiatan pelepasan tenaga kerja operasional. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pelepasan tenaga kerja akan memberikan persepsi negatif terhadap masyarakat yang apabila tidak dikelola dengan benar akan dapat menimbulkan ketegangan sosial. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini mendapat perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Kekhawatiran masyarakat terkait pelepasan tenaga kerja merupakan Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan perlu dikaji lebih lanjut dalam Andal.	Disimpulkan sebagai DPH	Desa-desa sekitar lokasi proyek yang akan terdampak langsung oleh aktivitas proyek yaitu: Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Tumbur, Desa Lorulun dan Desa Matakus, serta desa-desa pada pulau-pulau kecil di Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu; pulau Masela,	Berlangsung pada ruang dan waktu berbeda yang dapat berlangsung sekitar 1-2 tahun selama proses pembongkaran seluruh fasilitas kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya.

No	Deskripsi Kegiatan yang Berpotensi Menghasilkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
							Pulau Bababr, Pulau Luang, Pulau Lakor, Pulau Moa, Pulau Leti dan sekitarnya	
				Harapan dan Keluhan Masyarakat	A. Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pelepasan tenaga kerja tahap operasi sebanyak 850 tenaga kerja. B. Kondisi Rona Lingkungan Mayoritas masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan dan petani dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa perlu khawatir akan adanya gangguan. Tidak ada kekhawatiran masyarakat yang timbul dari adanya kegiatan pelepasan tenaga kerja operasional. C. Pengaruh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan pelepasan tenaga kerja operasi memunculkan harapan dan keluhan masyarakat sebagai akibat dari adanya kekhawatiran masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan menurunnya peluang usaha lokal. D. Intensitas Perhatian Masyarakat Dampak ini mendapat perhatian masyarakat saat konsultasi publik. E. Kesimpulan Merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	Disimpulkan sebagai DPH	Desa- desa yang terpengaruh oleh proyek yaitu: Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Lauran, Desa Kabyarat, Desa Ingei, Desa Wowonda, serta desa- desa pada pulau-pulau kecil di Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu; pulau Masela, Pulau Bababr, Pulau Luang, Pulau Lakor, Pulau Moa, Pulau Leti dan sekitarnya	Berlangsung pada ruang dan waktu berbeda yang dapat berlangsung sekitar 1-2 tahun selama proses pembongkaran seluruh fasilitas kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dampak potensial, diperoleh Dampak Penting Hipotetik (DPH) berdasarkan perubahan yang dikemukakan pada Bab I, Tabel I-5 dan Tabel I-7 yang dirangkum pada **Tabel V-2** dan matriks **Tabel V-3** serta **Tabel V-4**.

Tabel V-2. Daftar Dampak Penting Hipotetik yang Diprakirakan Dampaknya (Bab VI)

Komponen Lingkungan	Parameter Lingkungan yang Diidentifikasi Sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH)	Sumber Dampak	Jenis Dampak
A. Tahap Pra-Konstruksi			
Sosial Ekonomi	Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan <i>Ecosystem Services</i>	Pengadaan Lahan	Dampak Primer
Sosial Budaya	Kekhawatiran Masyarakat		Dampak Turunan dari Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan <i>Ecosystem Services</i>
	Pengaruh Terhadap Masyarakat Adat		Dampak Primer
	Harapan dan Keluhan Masyarakat		Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat
B. Tahap Konstruksi			
Demografi	Peningkatan migrasi (mobilitas penduduk)	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Dampak Primer
	Perubahan komposisi penduduk (usia, jenis kelamin, pendidikan, etnis, agama, mata pencaharian)		Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)
	Perubahan pertumbuhan populasi		Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)
	Perubahan kepadatan penduduk		Dampak Turunan dari Perubahan Pertumbuhan Populasi
	Gangguan terhadap keamanan masyarakat		Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial
Sosial Ekonomi	Kesempatan kerja		Dampak Primer
	Perubahan peluang usaha lokal		Dampak Primer
	Perubahan tingkat pendapatan masyarakat		Dampak Turunan dari Kesempatan Kerja dan Perubahan Peluang Usaha Lokal
	Perubahan pola mata pencaharian masyarakat		Dampak Turunan dari Kesempatan Kerja dan Perubahan Peluang Usaha Lokal
Sosial Budaya	Kekhawatiran masyarakat		Dampak Turunan dari Kesempatan Kerja, Perubahan Peluang Usaha Lokal, Ganguan Kegiatan Perikanan dan Gangguan Terhadap Transportasi Darat
	Perubahan budaya		Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)
	Perubahan norma dan nilai sosial		Dampak Turunan dari Perubahan Budaya
	Pengaruh terhadap warisan budaya		Dampak Turunan dari Perubahan Budaya dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial
	Gangguan terhadap situs sakral masyarakat		Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial
	Harapan dan keluhan masyarakat		Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat
	Pengaruh terhadap kelompok masyarakat rentan (wanita, anak-anak miskin, lansia dan cacat)		Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)

Komponen Lingkungan	Parameter Lingkungan yang Diidentifikasi Sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH)	Sumber Dampak	Jenis Dampak
Kesehatan Masyarakat	Perubahan penyakit menular		Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk), Perubahan Norma dan Nilai Sosial, Perubahan Sanitasi lingkungan, Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat dan Perubahan Status Gizi Masyarakat
	Perubahan penyakit tidak menular		Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk), Perubahan Norma dan Nilai Sosial, Perubahan Sanitasi lingkungan, Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat dan Perubahan Status Gizi Masyarakat
	Peningkatan penyalahgunaan zat aditif (narkoba, alkohol)		Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial
	Perubahan status gizi masyarakat		Dampak Turunan dari Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat
	Perubahan sanitasi lingkungan		Dampak Turunan dari Perubahan Kepadatan Penduduk
Mobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja			
Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan terhadap mamalia laut	Mobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja Menggunakan Jalur Laut serta Jalur Darat	Dampak Primer
Kebisingan	Peningkatan kebisingan	Mobilisasi Material dan Tenaga Kerja Menggunakan Helikopter	Dampak Primer
Biota Terestrial dan Ekosistem	Gangguan terhadap habitat kritis dan spesies kunci (trigger species)		Dampak Turunan dari Peningkatan Kebisingan
Kualitas Udara	Peningkatan konsentrasi Partikulat (TSP, PM10 dan PM2.5)	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	Dampak Primer
Kebisingan	Peningkatan kebisingan		Dampak Primer
Hidrologi	Perubahan pola drainase		Dampak Primer
	Peningkatan aliran air permukaan		Dampak Turunan dari Perubahan Pola Drainase
Tanah	Peningkatan erosi tanah		Dampak Turunan dari Peningkatan Aliran Permukaan
Kualitas Air Permukaan	Perubahan muka air tanah		Dampak Primer
Biota Terestrial dan Ekosistem	Perubahan fungsi lahan		Dampak Primer
	Gangguan terhadap habitat kritis dan spesies kunci (trigger species)		Dampak Turunan dari Perubahan Fungsi Lahan dan Peningkatan Kebisingan
Sosial Ekonomi	Perubahan pola mata pencaharian masyarakat		Dampak Turunan dari: Perubahan Usaha Bisnis Lokal, Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services
	Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem services		Dampak Primer
Sosial Budaya	Kekhawatiran masyarakat	Dampak Turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal, Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat, Perubahan Akses Ke Sumber Mata	

Komponen Lingkungan	Parameter Lingkungan yang Diidentifikasi Sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH)	Sumber Dampak	Jenis Dampak
			Pencapaian dan Ecosystem Services dan Gangguan Terhadap Transportasi Darat
	Harapan dan keluhan masyarakat		Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat
Pemasangan GEP			
Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan terhadap bentos	Pemasangan Pipa GEP Lepas Pantai	Dampak Primer
Sosial Ekonomi	Gangguan terhadap kegiatan perikanan		Dampak Primer
Sosial Budaya	Kekhawatiran masyarakat		Dampak Turunan dari Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan Ecosystem Services, Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang, Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut dan Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan
	Harapan dan keluhan masyarakat		Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat
Kualitas Air Laut	Peningkatan konsentrasi TSS	Pemasangan Pipa GEP di Perairan Pantai (HDD/Trenching)	Dampak Primer
Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan terhadap bentos		Dampak Primer
Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan terhadap plankton		Dampak Primer
	Gangguan terhadap habitat terumbu karang		Dampak Primer
	Gangguan terhadap padang lamun/rumput laut		Dampak Primer
Sosial Ekonomi	Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem services	Pendaratan Pipa (GEP) ke OLNG Berdekatan dengan Causeway	Dampak Primer
Sosial Budaya	Kekhawatiran masyarakat		Dampak Turunan dari Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan Ecosystem Services, Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang, Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut dan Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan
	Pengaruh terhadap masyarakat adat		Dampak Primer
	Harapan dan keluhan masyarakat		Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat
Pembangunan Fasilitas OLNG dan TUKS serta Pendukungnya			
Kualitas Air Laut	Peningkatan salinitas	Pasokan Air (Desalinasi Air Laut) dan Pembuangan Braine Water	Dampak Primer
Kebisingan	Peningkatan kebisingan	Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	Dampak Primer
Sosial Ekonomi	Perubahan peluang usaha lokal		Dampak Primer
	Perubahan tingkat pendapatan masyarakat		Dampak Turunan dari Peluang Usaha Lokal
	Perubahan pola mata pencaharian masyarakat		Dampak Turunan dari Perubahan Usaha Bisnis Lokal dan Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services
Sosial Budaya	Kekhawatiran masyarakat		Dampak Turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal, Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat,

Komponen Lingkungan	Parameter Lingkungan yang Diidentifikasi Sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH)	Sumber Dampak	Jenis Dampak
			Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Services dan Gangguan Terhadap Transportasi Darat
	Harapan dan keluhan masyarakat		Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat
Kualitas Udara	Peningkatan konsentrasi Partikulat (TSP, PM10 dan PM2.5)		Dampak Primer
Sosial Ekonomi	Perubahan pola mata pencarian masyarakat		Dampak Turunan dari Perubahan Usaha Bisnis Lokal dan Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Services
	Perubahan akses ke sumber mata pencarian dan ecosystem services		Dampak Primer
Sosial Budaya	Kekhawatiran masyarakat	Pengalihan dan Pembangunan Jalan	Dampak Turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal, Perubahan Pola Mata Pencarian Masyarakat, Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Services dan Gangguan Terhadap Transportasi Darat
	Pengaruh terhadap masyarakat adat		Dampak Primer
	Harapan dan keluhan masyarakat		Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat
Transportasi	Gangguan terhadap transportasi darat		Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) dan Perubahan Populasi Penduduk dari Kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja
Kualitas Air Laut	Peningkatan konsentrasi TSS		Dampak Primer
Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan terhadap bentos	Pengerukan dan Pembuangan Hasil Pengerukan	Dampak Primer
	Gangguan terhadap habitat terumbu karang		Dampak Primer
	Gangguan terhadap padang lamun/rumput laut		Dampak Primer
Kualitas Air Laut	Peningkatan konsentrasi TSS		Dampak Primer
Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan terhadap bentos		Dampak Primer
	Gangguan terhadap mangrove		Dampak Primer
	Gangguan terhadap habitat terumbu karang		Dampak Primer
	Gangguan terhadap padang lamun/rumput laut		Dampak Primer
Sosial Ekonomi	Gangguan terhadap kegiatan perikanan	Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS	Dampak Primer
Sosial Budaya	Kekhawatiran masyarakat		Dampak Turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal, Perubahan Pola Mata Pencarian Masyarakat, Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Services dan Gangguan Terhadap Transportasi Darat
	Harapan dan keluhan masyarakat		Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat
Transportasi	Gangguan terhadap transportasi laut		Dampak Primer
Pengolahan Limbah			
Kualitas Air Laut	peningkatan konsentrasi TSS		Dampak Primer

Komponen Lingkungan	Parameter Lingkungan yang Diidentifikasi Sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH)	Sumber Dampak	Jenis Dampak
	Peningkatan konsentrasi DO	Hydrotest dan Pembuangan Air Hydrotest	Dampak Primer
Kesehatan Masyarakat	Perubahan sanitasi lingkungan	Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga serta Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dampak Primer
Sosial Ekonomi	Kesempatan kerja	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	Dampak Primer
	Perubahan peluang usaha lokal		Dampak Primer
	Perubahan tingkat pendapatan masyarakat		Dampak Turunan dari Kesempatan Kerja dan Perubahan Peluang Usaha Lokal
	Perubahan pola mata pencaharian masyarakat		Dampak Turunan dari Kesempatan Kerja dan Perubahan Peluang Usaha Lokal
Sosial Budaya	Kekhawatiran masyarakat		Dampak Turunan dari Kesempatan Kerja, Perubahan Peluang Usaha Lokal, Gangguan Kegiatan Perikanan dan Gangguan Terhadap Transportasi Darat
	Harapan dan keluhan masyarakat		Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat
C. Tahap Operasi			
Sosial Ekonomi	Kesempatan kerja	Penerimaan Tenaga Kerja Operasi	Dampak Primer
	Perubahan tingkat pendapatan masyarakat		Dampak Turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja
Sosial Budaya	Kekhawatiran masyarakat		Dampak Turunan dari Peningkatan Kebisingan, Perubahan Kesempatan Kerja dan Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan
	Harapan dan keluhan masyarakat		Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat
Mobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja			
Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan terhadap mamalia laut	Mobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja Menggunakan Jalur Laut serta Jalur Darat	Dampak Primer
Sosial Ekonomi	Gangguan terhadap kegiatan perikanan		Dampak Primer
Kebisingan	Peningkatan kebisingan	Mobilisasi Material dan Tenaga Kerja Menggunakan Helikopter	Dampak Primer
Biota Terestrial dan Ekosistem	Gangguan terhadap habitat kritis dan spesies kunci (trigger species)		Dampak Turunan dari Peningkatan Kebisingan
Pengoperasian FPSO			
Cahaya	Pendaran cahaya (dampak visual)	Keberadaan dan Pengoperasian FPSO	Dampak Primer
Kualitas Air Laut	Peningkatan Salinitas	Pasokan Air (Desalinasi Air Laut) dan Pembuangan Brine Water	Dampak Primer

Komponen Lingkungan	Parameter Lingkungan yang Diidentifikasi Sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH)	Sumber Dampak	Jenis Dampak
Kualitas Air Laut	Peningkatan temperatur	Sistem Pendinginan dan Pembuangan Air Pendingin	Dampak Primer
Kualitas Udara	Peningkatan konsentrasi SO ₂ dan NO _x	Emisi Penggerak Turbin Gas dan Emisi PLTG	Dampak Primer
Gas Rumah Kaca	Peningkatan emisi CO ₂ , CH ₄ , dan N ₂ O		Dampak Primer
Kualitas Udara	Peningkatan konsentrasi VOC (sebagai BTEX)	Pemuatan dan Transportasi Kondensat	Dampak Primer
Pengoperasian OLNG			
Kebisingan	Peningkatan kebisingan	Keberadaan dan pengoperasian Kilang OLNG	Dampak Primer
Cahaya	Pendaran cahaya (dampak visual)		Dampak Primer
Biota Terestrial dan Ekosistem	Gangguan terhadap habitat kritis dan spesies kunci (trigger species)		Dampak Turunan dari Peningkatan Kebisingan Pendaran Cahaya (Dampak Visual)
Demografi	Peningkatan migrasi (mobilitas penduduk)		Dampak Primer
	Perubahan komposisi penduduk (usia, jenis kelamin, pendidikan, etnis, agama, mata pencaharian)		Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)
	Perubahan pertumbuhan populasi		Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)
	Perubahan kepadatan penduduk		Dampak Turunan dari Perubahan Pertumbuhan Populasi
	Gangguan terhadap keamanan masyarakat		Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial
Sosial Ekonomi	Perubahan peluang usaha lokal		Dampak Primer
	Perubahan tingkat pendapatan masyarakat		Dampak Turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal
	Perubahan pola mata pencaharian masyarakat		Dampak Turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal
Sosial Budaya	Kekhawatiran masyarakat		Dampak Turunan dari Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services, Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan, Perubahan Norma dan Nilai Sosial, Peningkatan Kebisingan, Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut, Gangguan Transportasi Laut dan Gangguan Terhadap Transportasi Darat
	Perubahan budaya		Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)
	Perubahan norma dan nilai sosial		Dampak Turunan dari Perubahan Budaya
	Pengaruh terhadap warisan budaya		Dampak Turunan dari Perubahan Budaya, serta Perubahan Norma dan Nilai Sosial
	Pengaruh terhadap masyarakat adat		Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk), Perubahan Budaya serta Perubahan Norma dan Nilai Sosial
	Harapan dan keluhan masyarakat		Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat
Kesehatan Masyarakat	Perubahan penyakit menular		Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk),

Komponen Lingkungan	Parameter Lingkungan yang Diidentifikasi Sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH)	Sumber Dampak	Jenis Dampak
			Perubahan Norma dan Nilai Sosial dan Perubahan Sanitasi Lingkungan
	Perubahan penyakit tidak menular		Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk), Perubahan Norma dan Nilai Sosial, Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat dan Perubahan Status Gizi Masyarakat
	Perubahan status gizi masyarakat		Dampak Turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal dan Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat
	Perubahan sanitasi lingkungan		Dampak Primer
	Perubahan fasilitas kesehatan dan akses ke layanan kesehatan		Dampak Primer
Transportasi	Gangguan terhadap transportasi darat		Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) dan Perubahan Populasi Penduduk dari Kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja
Kualitas Udara	Peningkatan konsentrasi H ₂ S	Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU)	Dampak Primer
Gas Rumah Kaca	Peningkatan emisi CO ₂ , CH ₄ , dan N ₂ O		Dampak Primer
Kualitas Udara	Peningkatan konsentrasi SO ₂ dan NO _x	Emisi Penggerak Turbin Gas dan Emisi PLTG	Dampak Primer
Gas Rumah Kaca	Peningkatan emisi CO ₂ , CH ₄ , dan N ₂ O		Dampak Primer
Gas Rumah Kaca	Peningkatan emisi CO ₂ , CH ₄ , dan N ₂ O	Flaring (HP Wet, HP Dry and LP Dry Flaring)	Dampak Primer
Kualitas Air Laut	Peningkatan salinitas	Pasokan Air (Desalinasi Air Laut) dan Pembuangan Brine Water	Dampak Primer
Pengoperasian TUKS			
Oseanografi	Perubahan pola arus	Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS	Dampak Primer
	Timbulnya abrasi dan akresi		Dampak Turunan dari Perubahan Pola Arus dan Gelombang
Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan terhadap mangrove		Dampak Primer
	Gangguan terhadap penyu		Dampak Primer
	Gangguan terhadap habitat terumbu karang		Dampak Primer
	Gangguan terhadap padang lamun/rumput laut		Dampak Primer
Sosial Ekonomi	Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem services		Dampak Primer
	Gangguan terhadap kegiatan perikanan		Dampak Primer
Sosial Budaya	Kekhawatiran masyarakat		Dampak Turunan dari Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services, Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan, Perubahan Norma dan Nilai Sosial, Peningkatan Kebisingan, Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut, Gangguan Transportasi Laut dan Gangguan Terhadap Transportasi Darat

Komponen Lingkungan	Parameter Lingkungan yang Diidentifikasi Sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH)	Sumber Dampak	Jenis Dampak
	Harapan dan keluhan masyarakat		Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat
Transportasi	Gangguan terhadap transportasi laut		Dampak Primer
Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan terhadap mamalia laut		Dampak Primer
Sosial Ekonomi	Gangguan terhadap kegiatan perikanan		Dampak Primer
Sosial Budaya	Kekhawatiran masyarakat	Pemuatan dan Transportasi LNG	Dampak Turunan dari Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services, Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan, Perubahan Norma dan Nilai Sosial, Peningkatan Kebisingan, Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut, Gangguan Transportasi Laut dan Gangguan Terhadap Transportasi Darat
	Harapan dan keluhan masyarakat		Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat
Transportasi	Gangguan terhadap transportasi laut		Dampak Primer
Kualitas Udara	Peningkatan konsentrasi VOC (sebagai BTEX)		Dampak Primer
Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan terhadap mamalia laut		Dampak Primer
Sosial Ekonomi	Gangguan terhadap kegiatan perikanan		Dampak Primer
Sosial Budaya	Kekhawatiran masyarakat	Pemuatan dan Transportasi Kondensat	Dampak Turunan dari Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services, Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan, Perubahan Norma dan Nilai Sosial, Peningkatan Kebisingan, Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut, Gangguan Transportasi Laut dan Gangguan Terhadap Transportasi Darat
	Harapan dan keluhan masyarakat		Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat
Transportasi	Gangguan terhadap transportasi laut		Dampak Primer
Gas Rumah Kaca	Peningkatan emisi CO ₂ , CH ₄ , dan N ₂ O	Konsumsi Bahan Bakar	Dampak Primer
Pengolahan Limbah			
Kualitas Air Laut	Peningkatan konsentrasi minyak dan lemak (total hidrokarbon)	Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, dan Limbah Terkontaminasi)	Dampak Primer
	peningkatan konsentrasi TSS		Dampak Primer
	Peningkatan konsentrasi Klorin Bebas		Dampak Primer
	Peningkatan konsentrasi Sulfida		Dampak Primer
	Peningkatan konsentrasi BOD, COD, TOC		Dampak Primer
	peningkatan konsentrasi Fosfat (PO ₄ -P) dan Nitrat (NO ₃ -N)		Dampak Primer
	Peningkatan konsentrasi Total Fenol		Dampak Primer
	Peningkatan konsentrasi Merkuri		Dampak Primer
Biota Pesisir dan Biota Laut	Gangguan terhadap habitat terumbu karang		Dampak Turunan dari Adanya Perubahan Kualitas Air Laut

Komponen Lingkungan	Parameter Lingkungan yang Diidentifikasi Sebagai Dampak Penting Hipotetik (DPH)	Sumber Dampak	Jenis Dampak
	Gangguan terhadap padang lamun/rumput laut		Dampak Turunan dari Adanya Perubahan Kualitas Air Laut
Kualitas Air Laut	Peningkatan konsentrasi minyak dan lemak (total hidrokarbon)	Pengolahan dan Pembuangan Air Terproduksi	Dampak Primer
	peningkatan konsentrasi TSS		Dampak Primer
	Peningkatan konsentrasi BTEX		Dampak Primer
	Peningkatan konsentrasi Merkuri		Dampak Primer
Kesehatan Masyarakat	Perubahan penyakit menular	Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga serta Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk), Perubahan Norma dan Nilai Sosial serta Perubahan Sanitasi Lingkungan
	Perubahan sanitasi lingkungan		Dampak Primer
D. Tahap Pasca Operasi			
Transportasi	Gangguan terhadap transportasi laut	Penutupan dan Pembongkaran Seluruh Fasilitas	Dampak Primer
Sosial Ekonomi	Kesempatan kerja	Pelepasan Tenaga Kerja Operasional	Dampak Primer
	Perubahan peluang usaha lokal		Dampak Primer
	Perubahan tingkat pendapatan masyarakat		Dampak Turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja, Perubahan Peluang Usaha Lokal dan Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat
	Perubahan pola mata pencaharian masyarakat		Dampak Turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja dan Perubahan Peluang Usaha Lokal
Sosial Budaya	Kekhawatiran masyarakat		Dampak Turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja, Perubahan Peluang Usaha Lokal, Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat, Gangguan Terhadap Transportasi Laut dan Gangguan Terhadap Transportasi Darat
	Harapan dan keluhan masyarakat		Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat

[illegible]

Keterangan:

✓ Dampak Penting Hipotetik (DPH)

- ✓ Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH)

Tabel V-4. Matriks Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) Tahap Operasi dan Pasca Operasi

[illegible]

Keterangan:

✓	Dampak Penting Hipotetik (DPH)
✓	Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH)

5.2 Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian

Batas wilayah studi merupakan batas terluar dari hasil tumpang susun (*overlay*) batas proyek, batas ekologi, batas sosial, dan batas administrasi. Disamping itu, batas wilayah studi ditetapkan dengan mempertimbangkan kendala yang mungkin timbul kelak dari sisi ketersediaan waktu, aksesibilitas, dana, dan tenaga ahli dalam kajian dampak lingkungan serta pelaksanaan RKL dan RPL. Penjelasan secara rinci batas proyek, batas ekologi, batas sosial, dan batas administrasi untuk proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi adalah sebagai berikut:

5.2.1 Batas Wilayah Studi

5.2.1.1 Batas Proyek

Batas proyek mencakup semua ruang tempat berlangsungnya kegiatan fisik baik pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca-operasi untuk Proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi termasuk fasilitas pendukungnya yang berlokasi di perairan laut lepas Arafura, perairan pantai Teluk Saumlaki, dan darat di Pulau Yamdena, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel V5**.

Tabel V-5. Kegiatan Utama Pengembangan Lapangan Gas Abadi dan Batas Proyek

No	Kegiatan	Deskripsi	Batas Proyek
1	Pembangunan dan pengoperasian sumur gas bawah laut termasuk perpipaan SURF (<i>Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines</i>) menuju Fasilitas Pengolahan Gas terapung (FPSO) di lepas pantai Arafura.	SURF terdiri dari 4 (empat) pusat sumur pengeboran gas alam (DC- <i>Drilling Centers</i>). Pada masing-masing DC direncanakan akan dibor sebanyak 3-6 sumur sehingga secara menyeluruh terdiri dari maksimum 24 sumur produksi yang akan mengalirkan gas dari sumur ke FPSO. Kedalaman laut di sekitar lapangan sumur adalah sekitar 600 sampai 800 meter.	SURF yang meliputi <i>Drilling Center</i> (DC) dan sumur-sumur gas akan berada di dalam batas <i>resevoir</i> (lapangan) gas. Keempat DC termasuk perpipaan SURF ditempatkan sedemikian rupa di dalam batas <i>reservoir</i> gas sehingga secara efisien dan efektif dapat terhubung dengan FPSO. Dengan demikian batas proyek untuk lokasi-lokasi DC dan SURF adalah sama dengan batas terluar <i>resevoir</i> gas Lapangan Gas Abadi. Setiap DC memiliki daerah <i>restricted area</i> dengan radius 2 km yang ditetapkan oleh INPEX. Atau sesuai PP No 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut, menetapkan area terlarang adalah 500 m dari sisi terluar instalasi atau bangunan, dan zona terbatas 1.250 m dari sisi terluar zona terlarang sehingga total zona terbatas (<i>exclusion zone</i>) adalah pada radius 1.750 m dari bangunan di laut.
2	FPSO (<i>Floating Production, Storage and Offloading Facilities</i>) atau Fasilitas Pengolahan Gas	Gas dari sumur-sumur bawah laut dari setiap DC akan dialirkan ke FPSO untuk pemisahan gas dari air dan kondensat. Kondensat yang	FPSO ditempatkan sedemikian untuk dapat menerima gas dari sumur-sumur gas (DC) serta SURF secara efisien dan efektif dengan posisi terbaik yang bertujuan

No	Kegiatan	Deskripsi	Batas Proyek
	Terapung di lepas pantai Arafura	dihasilkan di FPSO akan diekspor (<i>offloading</i>) menggunakan tanker lepas pantai.	untuk mengoptimalkan panjang <i>flowline</i> serta menjaga fleksibilitas pengembangan di masa mendatang. FPSO berada di dalam batas <i>resevoir</i> (lapangan) gas. FPSO menggunakan sistem tata letak penambatan tersebar (<i>spread mooring layout</i>). Batas proyek untuk lokasi FPSO adalah sama dengan batas terluar <i>resevoir</i> gas Lapangan Gas Abadi. FPSO akan memiliki <i>restricted area</i> dengan radius 2 km yang ditetapkan oleh INPEX. Atau sesuai PP No 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut, menetapkan area terlarang adalah 500 m dari sisi terluar instalasi atau bangunan, dan zona terbatas 1.250 m dari sisi terluar zona terlarang sehingga total zona terbatas (<i>exclusion zone</i>) adalah pada radius 1.750 m dari bangunan di laut.
3	GEP (<i>Gas Export Pipeline</i>) atau pipa gas bawah laut dari FPSO ke GRF (<i>Gas Receiving Facility</i>) atau fasilitas penerima gas di darat.	GEP (<i>Gas Export Pipeline</i>) atau pipa gas bawah laut akan mengalirkan gas kering yang telah dikontrol titik embunnya ke kilang OLNG di darat di Pulau Yamdena untuk diproses menjadi gas alam cair atau LNG. Pipa gas bawah laut memiliki diameter 32 inci terbentang dari FPSO menuju OLNG disisi Barat Teluk Saumlaki, Pulau Yamdena, akan melewati Palung Tanimbar dengan kedalaman 1.500 m Mendekati garis pantai, pemasangan pipa akan dilakukan menggunakan teknik Penggalan (<i>Trenching</i>) dan/atau HDD (<i>Horizontal Directional Drilling</i>). Pendataran pipa (GEP) menuju ke Kilang OLNG melalui jalur pipa dekat dengan <i>Causeway</i>	GEP (pipa gas bawah laut) akan dibentangkan dari <i>riser</i> di area FPSO ke kilang OLNG di darat sepanjang lebih kurang 167,26 km. Batas proyek untuk jalur pipa dari FPSO ke Kilang OLNG, didasarkan atas data dan informasi yang tersedia dari Pra-FEED adalah sebagai berikut: - Terdapat koridor pipa yang ditentukan berdasarkan kajian dari sisi aspek keselamatan melalui survai <i>geo-hazard</i> pada tahap Pra-FEED untuk mengidentifikasi potensi bahaya di dasar laut. Jalur pipa ditetapkan berada di dalam koridor yang telah ditentukan. - Koridor peletakan pipa menuju Kilang OLNG yang mendekati <i>Causeway</i> - Setelah pemasangan pipa gas bawah laut (GEP) selesai dilakukan, maka akan bersifat permanen. Jalur pipa akan memiliki zona terlarang

No	Kegiatan	Deskripsi	Batas Proyek
			pada area 500 m dari sisi terluar instalasi atau bangunan, dan zona terbatas 1.250 m dari sisi terluar zona terlarang sehingga total zona terbatas (<i>exclusion zone</i>) adalah 1.750 m di sisi kiri dan kanan dari <i>center line</i> jalur pipa sesuai PP No 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut.
4	Kilang OLNG (<i>Onshore Liquefied Natural Gas</i>) termasuk fasilitas pendukung dan TUKS	Kilang OLNG berlokasi di darat (<i>onshore</i>) di sisi Barat Teluk Saumlaki, pulau Yamdena. Gas kering dari FPSO dikirim melalui GEP ke Kilang OLNG sebagai bahan baku (umpan) untuk diolah menjadi LNG. Fasilitas OLNG didesain dengan 2 (dua) <i>train</i> yang akan mampu untuk menghasilkan rata-rata tahunan produk LNG sebesar 9,5 MTPA, kondensat sekitar 4.360 bpd dan gas pipa sejumlah 150 mmcf. Fasilitas OLNG meliputi konstruksi dan pengoperasian komponen-komponen kegiatan utama dan pendukung sebagai berikut: A. Kilang LNG beserta fasilitas pendukungnya antara lain perkantoran, mess karyawan, utilitas, <i>lay-down</i> area, perbengkelan, lokasi pengolahan air limbah dan limbah padat, tempat penyimpanan sementara limbah B3, dan lain-lainnya. B. Relokasi jalan, sekitar lingkaran batas proyek kilang OLNG C. TUKS-) dengan komponen sebagai berikut: D. Pembangunan dan pengoperasian jalan lintas ke TUKS (<i>Causeway</i>) E. Pembangunan dan pengoperasian TUKS Pionir, TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat, dan TUKS Bongkar Muat	- Kilang OLNG termasuk fasilitas pendukungnya akan menempati area <700 ha berdasarkan hasil kajian studi rancang/desain. - Batas proyek untuk relokasi jalan adalah dari persimpangan jalan lama Bomaki – Lermatang ke pertemuan jalan Lermatang – Latdalam, dengan bahu jalan selebar 3,5 m. - Batas proyek untuk TUKS Pionir, TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat, dan TUKS Bongkar Muat (MOF): • Jalan lintas ke TUKS (<i>Causeway</i>) pada bagian darat dengan batas proyek 500 m sisi kanan dan kiri jalan sebagai <i>exclusion zone</i> • Batas proyek <i>Causeway</i> bagian laut adalah zona terlarang pada area 500 m dari sisi terluar <i>Causeway</i>, dan zona terbatas 1.250 m dari sisi terluar zona terlarang sehingga total zona terbatas (<i>exclusion zone</i>) adalah pada radius 1.750 m dari bangunan di laut sesuai PP No 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut • Batas proyek untuk TUKS Pionir, TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat, dan TUKS Bongkar Muat (MOF) masing-masing

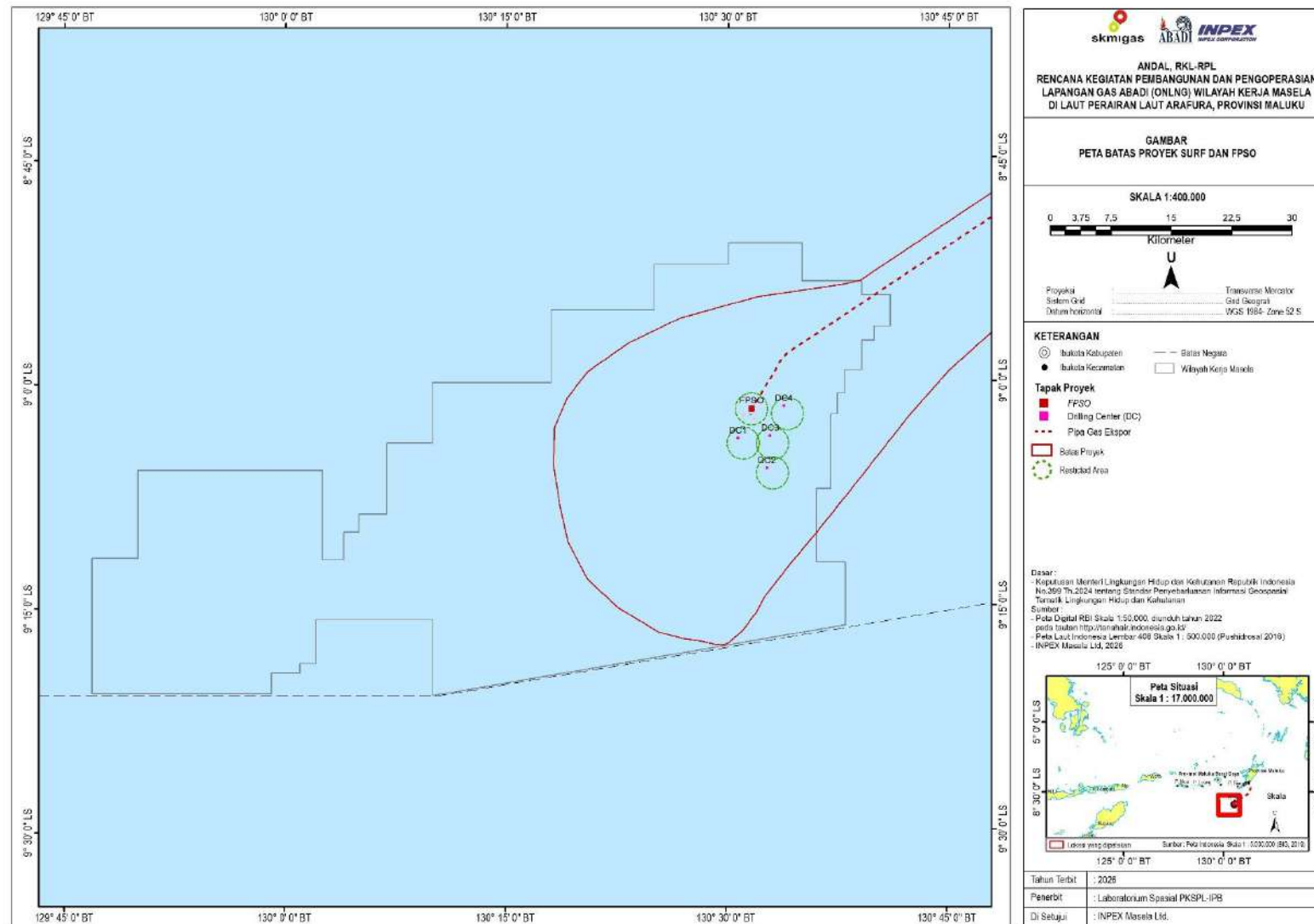
No	Kegiatan	Deskripsi	Batas Proyek
		(MOF) berlokasi di Pulau Nustual	adalah zona terlarang pada area 500 m dari sisi terluar bangunan TUKS, dan zona terbatas 1.250 m dari sisi terluar zona terlarang sehingga total zona terbatas (<i>exclusion zone</i>) adalah pada radius 1.750 m dari bangunan di laut sesuai PP No 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut

Keterangan:

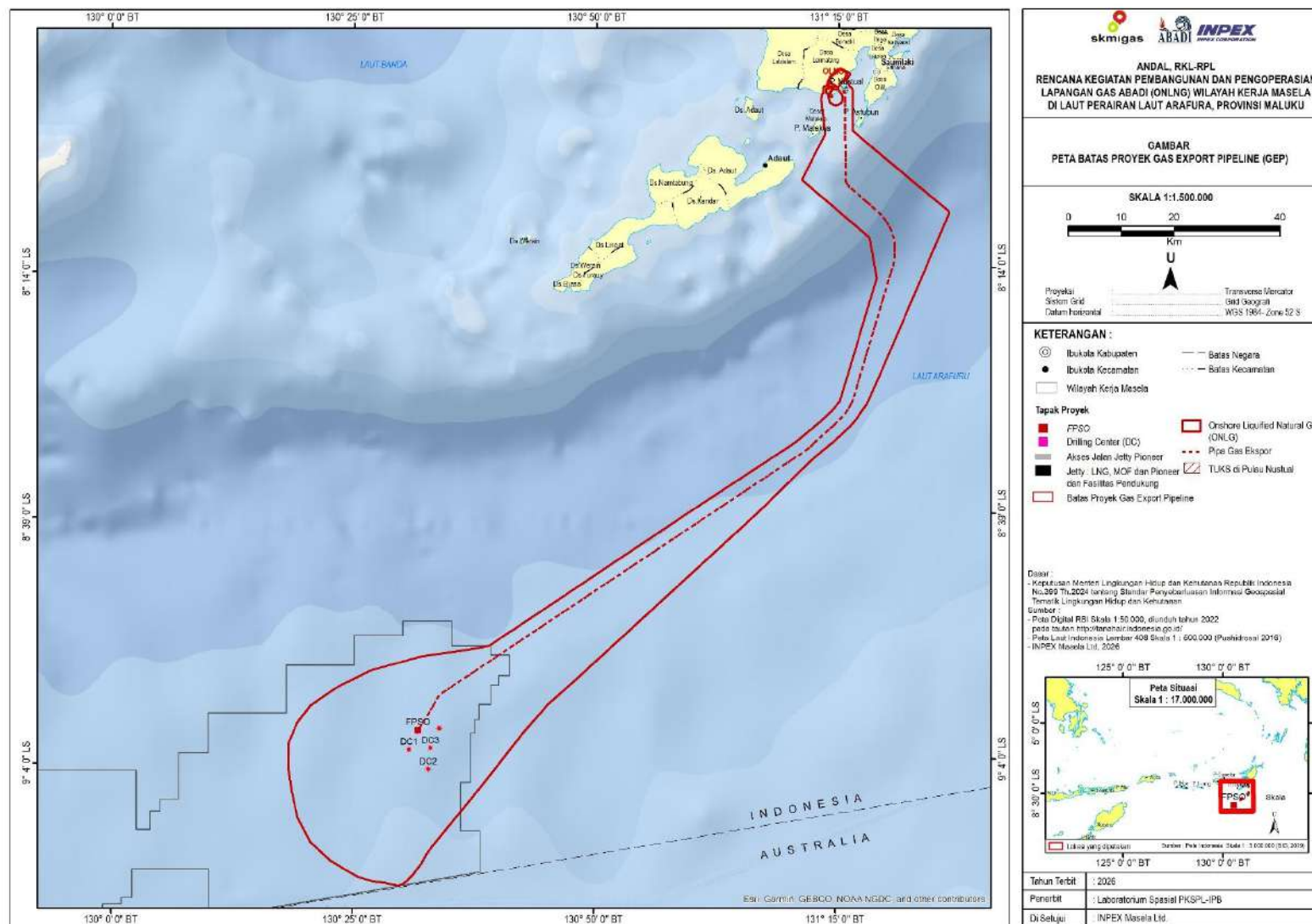
- Kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (termasuk semua TUKS) akan memiliki daerah terlarang terbatas (*safety exclusion zone*) di dalam Daerah Kerja Pelabuhan (DLKR - Daerah Lingkungan Kerja; dan DLKP – Daerah Lingkungan Kepentingan) yang direkomendasikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- Jalur pelayaran dan daerah berlabuh (*anchorage area*) untuk Kapal Tanker LNG, Tanker Kondensat dan kapal lainnya. Lebar jalur pelayaran adalah 2 km.

Batas proyek untuk SURF dan FPSO ditunjukkan pada **Peta V1**, untuk GEP ditunjukkan pada **Peta V2**, untuk OLNG dan TUKS ditunjukkan pada **Peta V3**, Batas Proyek secara menyeluruh ditunjukkan pada **Peta V4**.

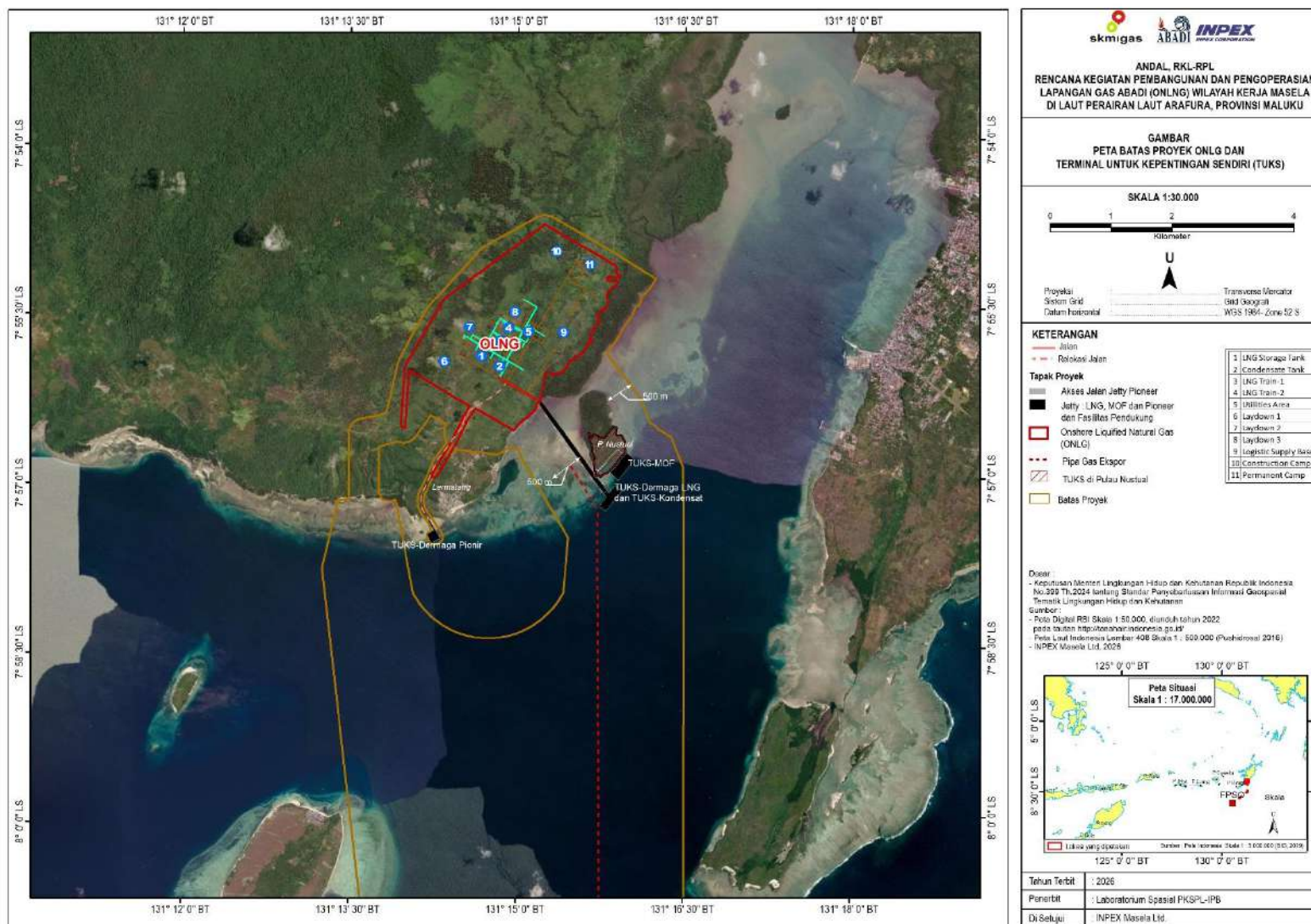
.



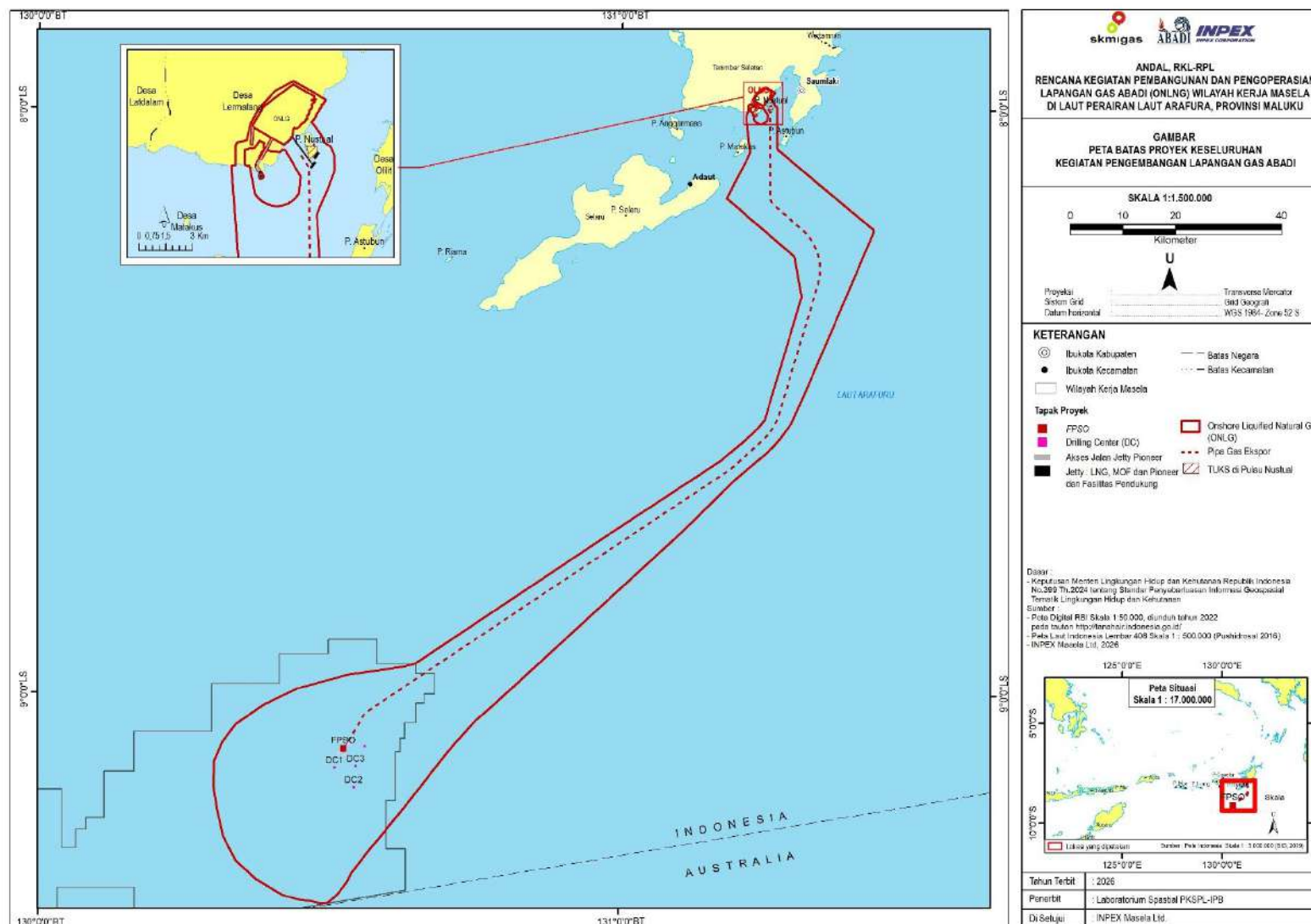
Peta V-1. Batas Proyek SURF dan FPSO



Peta V-2.Batas Proyek GEP



Peta V-3.Batas Proyek OLNG dan TUKS



Peta V-4. Batas Proyek Keseluruhan Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi

5.2.1.2 Batas Ekologi

Batas ekologi ditentukan dengan memperhatikan persebaran ruang dampak untuk setiap **Dampak Penting Hipotetik (DPH)** parameter lingkungan hidup baik pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi yang diakibatkan oleh kegiatan proyek melalui media ekologi, terutama melalui media udara dan air. Batas ekologi meliputi ekosistem darat dan laut yang akan terkena dampak oleh kegiatan proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi. Rincian batas ekologis untuk setiap komponen lingkungan hidup yang diidentifikasi sebagai dampak penting hipotetik adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Udara:

- Tahap konstruksi: Pada tahap konstruksi diidentifikasi DPH terhadap kualitas udara adalah peningkatan konsentrasi partikulat (TSP, PM₁₀ dan PM_{2.5}) bersumber dari kegiatan-kegiatan Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Pengoperasian Alat Berat, Peledakan, Gali-Urug, Perataan dan Pemadatan), Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, dan Pengalihan dan Pembangunan Jalan. Emisi berasal dari pemakaian bahan bakar oleh alat berat dan kendaraan yang digunakan selama masa konstruksi yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan konsentrasi PM₁₀ dan PM_{2.5} selama masa konstruksi berlangsung. Selain itu terdapat emisi *fugitive* baik TSP, PM₁₀ maupun PM_{2.5} baik dari aktivitas alat berat maupun resuspensi debu jalan saat berlangsungnya mobilisasi kendaraan. Wilayah persebaran dampak bersifat lokal dengan **radius sekitar 320 m dari pusat sumber emisi** (berdasarkan hasil pemodelan dengan AERMOD).
- Tahap operasi: Dampak terhadap kualitas udara berupa peningkatan konsentrasi SO₂ dan NO_x bersumber dari Emisi Penggerak Turbin Gas dan Emisi PLTG pada FPSO dan OLNG, peningkatan konsentrasi H₂S dan Merkuri dari Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU) di OLNG, peningkatan konsentrasi BTEX dari pemuatan kondensat di FPSO dan OLNG. Berdasarkan hasil pemodelan dengan AERMOD:
 - Di FPSO, secara umum sebaran emisi SO₂ dan NO_x dari Penggerak Turbin Gas dan Emisi PLTG dominan mengarah ke Barat Laut dari pusat sumber emisi, dengan sebaran yang bersifat lokal pada **jarak sekitar 400 m ke arah Barat Laut**.
 - Di FPSO, emisi BTEX dari pemuatan kondensat tersebar ke arah **Barat Laut pada jarak 300 m** dari pusat sumber emisi.
 - Di Kilang OLNG, secara umum sebaran emisi SO₂ dan NO_x dari Penggerak Turbin Gas dan Emisi PLTG dominan mengarah ke Barat Laut dari pusat sumber emisi, dengan sebaran yang bersifat lokal yang terjadi di **dalam area Kilang OLNG**.
 - Di Kilang OLNG, secara umum sebaran merkuri diperkirakan terjadi **pada jarak sekitar 3,1 km ke arah Barat Laut** dari cerobong AGRU dengan konsentrasi maksimum sebesar $7,2 \times 10^{-6} \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ (tinggi cerobong 20 m).
 - Di Kilang OLNG, secara umum sebaran H₂S terjadi **pada jarak sekitar 3 km ke arah Barat Laut** dari cerobong AGRU dengan konsentrasi maksimum sebesar $91 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ bila tinggi cerobong 20 m.
 - Di TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat, **sebaran BTEX bersifat lokal hanya terjadi di sekitar TUKS** dengan konsentrasi maksimum 3 jam sebesar $55 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

Batas ekologi penyebaran dampak kualitas udara tercantum pada **Peta V5** untuk OLNG dan **Peta V6** untuk FPSO.

2. Kebisingan:

- Tahap_Konstruksi: Sumber utama dampak terhadap kebisingan pada Kilang OLNG adalah Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Pengoperasian Alat Berat, Peledakan, Gali-Urug, Perataan dan Pemadatan), Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, serta Transportasi Tenaga Kerja Menggunakan Helikopter
- Tahap Operasi: Sumber utama dampak terhadap kebisingan adalah Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG serta Transportasi Tenaga Kerja Menggunakan Helikopter

Prakiraan dampak kebisingan dimodelkan dengan menggunakan perangkat lunak *SoundPlan*:

- Pada tahap konstruksi dampak terhadap kebisingan dimodelkan dengan berbagai skenario. Hasil pemodelan menunjukkan dengan seluruh skenario yang dimodelkan dapat menyebabkan peningkatan kebisingan di Desa Lermatang (berjarak sekitar 2 km dari OLNG) sebesar berkisar 5-10 dB. Persebaran dampak diperkirakan dalam radius 2 km.
- Pada tahap operasi dampak terhadap kebisingan dimodelkan dengan dua skenario yaitu Skenario A - Kondisi Operasi Normal dan Skenario B - kondisi Maximum Emergency *Flaring*. Hasil pemodelan menunjukkan dari dua skenario yang dimodelkan tersebut tidak menyebabkan peningkatan kebisingan di Desa Lermatang. Persebaran dampak kebisingan hanya terjadi masih dalam batas tapak proyek.
- Hasil pemodelan dampak kebisingan oleh Transportasi Tenaga Kerja Menggunakan Helikopter dengan skenario ketinggian 500, 1.000 dan 1.500 m terhadap reseptor masusia di Desa Lermatang dan reseptor satwa liar (burung) di Pulau Matakus, kebisingan maksimum adalah 40 dBA (untuk skenario helikopter terbang dengan ketinggian 500 m). Persebaran dampak diperkirakan terjadi pada reseptor dalam radius sekitar 300 m.

Timbulnya kebisingan di Pulau Matakus akan menimbulkan dampak turunan berupa gangguan terhadap “habitat kritis dari spesies kunci (*Trigger Species*)”.

Batas ekologi persebaran dampak kebisingan pada tahap konstruksi dan operasi tercantum pada **Peta V7**.

3. Cahaya:

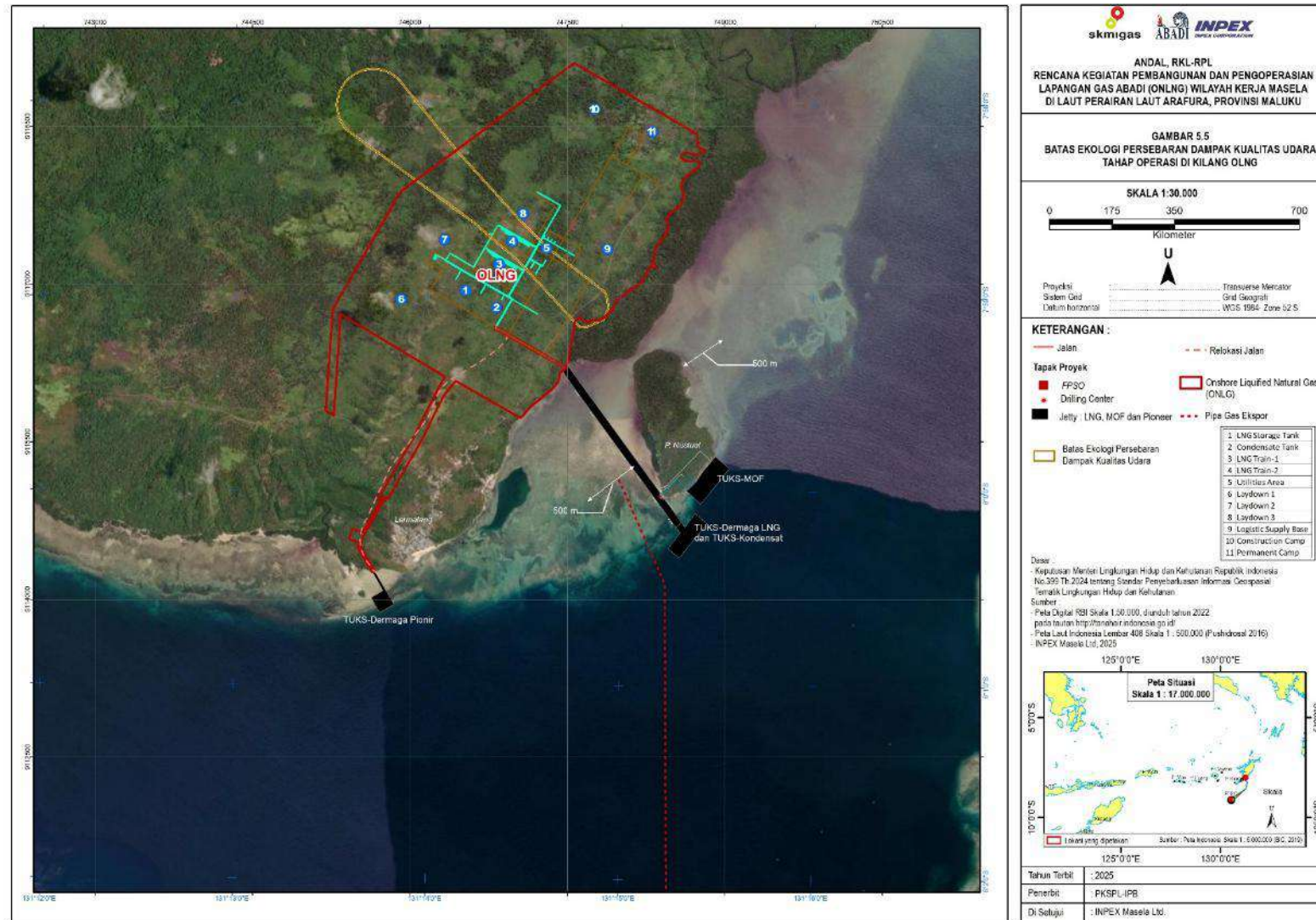
Disamping itu keberadaan dan pengoperasian TUKS, secara khusus diidentifikasi akan berdampak terhadap perilaku penyu (terutama pada *breeding ground* di pantai Lermatang), namun hal ini sangat tergantung dari hasil simulasi pendaran cahaya.

Simulasi pendaran cahaya dari ketiga sumber dampak tersebut di atas dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak *DIALux evo* dan diperoleh nilai iluminasi horizontal dan vertikal pada perimeter plan dengan sejumlah variasi jarak:

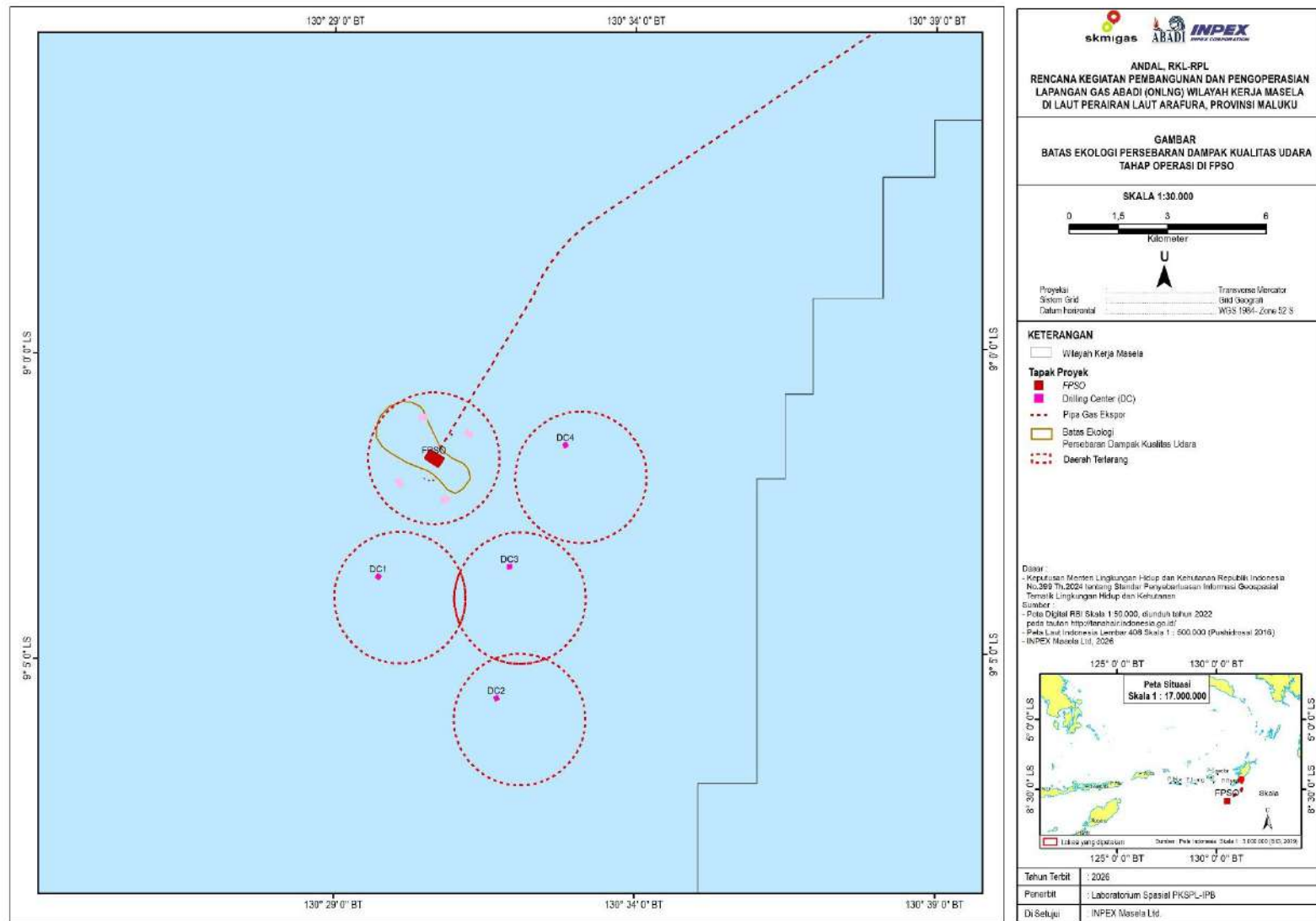
- Berdasarkan hasil simulasi pada FPSO untuk mencapai iluminansi vertikal nol Lux, jarak maksimum pada malam hari adalah 169 meter ke arah Tenggara. Dengan demikian persebaran dampak pendaran cahaya adalah dalam radius 167 m. Jarak ini masih berada dalam batas Zona Terlarang (500 m dari terluar bangunan FPSO) sesuai PP No 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

- Berdasarkan hasil simulasi pada OLNG dan TUKS. Pendaran cahaya vertikal untuk mencapai iluminansi nol lux di area Kilang OLNG, penyebaran pendaran cahaya adalah sekitar 410 m ke arah Barat dan masih berada dalam kawasan Kilang OLNG. Sedangkan Untuk mencapai iluminansi vertikal nol Lux pada TUKS jarak maksimum adalah 451 meter ke arah sekitar 451 m. Dengan demikian persebaran dampak pendaran cahaya untuk daerah TUKS **adalah dalam radius 451 m**. Jarak ini masih berada dalam batas Zona Terlarang (500 m dari terluar bangunan FPSO) sesuai PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

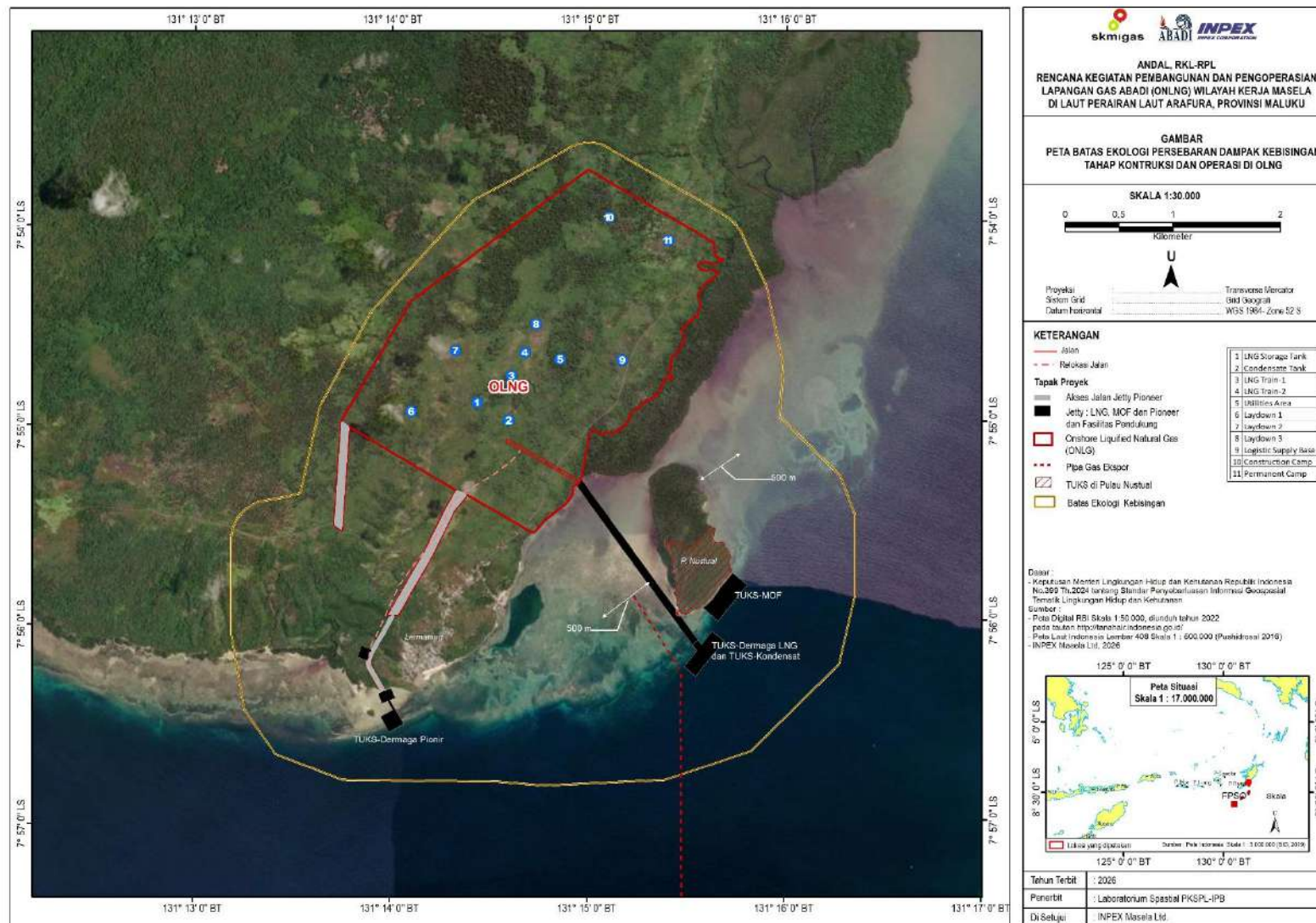
Batas ekologi persebaran dampak pendaran cahaya tercantum dalam **Peta V-9** tahap operasi OLNG.



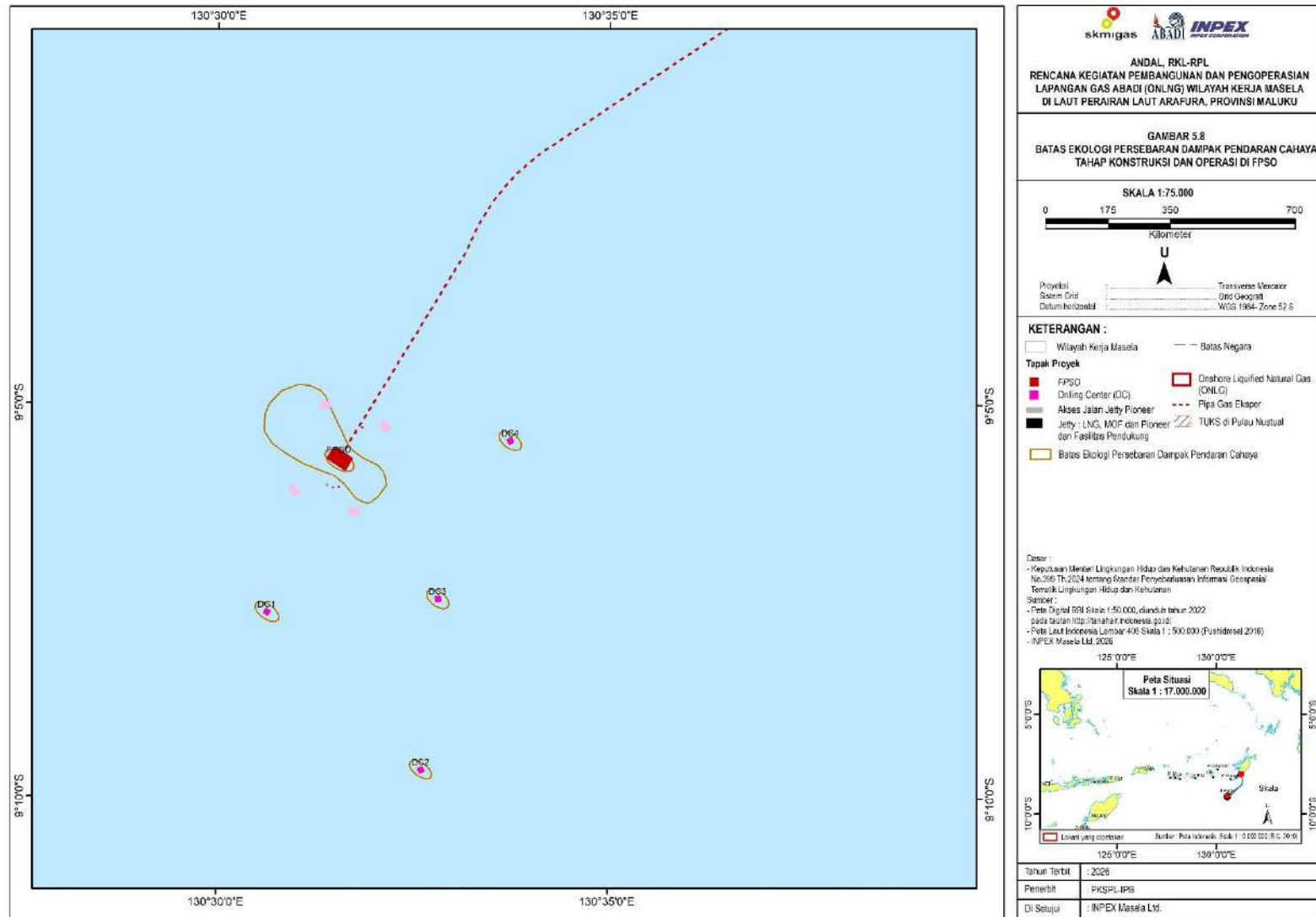
Peta V-5. Batas Ekologi Penyebaran Dampak Kualitas Udara Tahap Operasi di Kilang OLNG



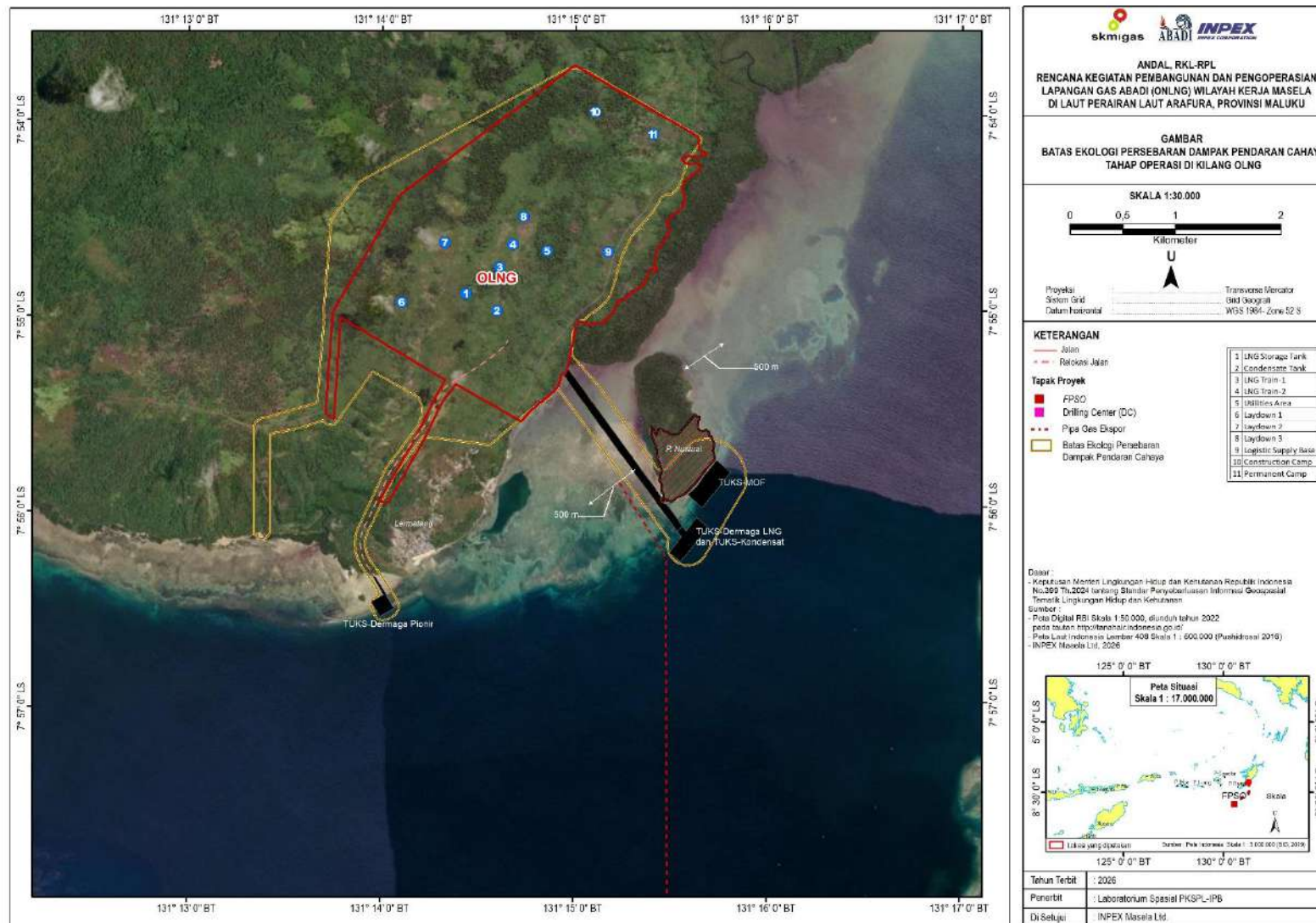
Peta V-6. Batas Ekologi Penyebaran Dampak Kualitas Udara Tahap Operasi di FPSO



Peta V-7.Batas Ekologi Penyebaran Dampak Kebisingan di OLNG Pada Tahap Konstruksi dan Operasi



Peta V-8.Batas Ekologi Penyebaran Dampak Pendaran Cahaya di FPSO Pada Tahap Operasi



Peta V-9. Batas Ekologi Persebaran Dampak Cahaya di OLANG Pada Tahap Operasi

4. Hidrologi dan Tanah:

- Tahap Konstruksi: Sumber utama dampak terhadap perubahan pola drainase adalah Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Pengoperasian Alat Berat, Peledakan, Gali-Urug, Perataan dan Pemadatan), perubahan pola drainase akan menimbulkan dampak turunan terhadap peningkatan laju aliran air permukaan, yang selanjutnya menimbulkan dampak turunan berupa peningkatan erosi tanah.
- Tahap Operasi: Tidak diidentifikasi adanya dampak penting hipotetik (DPH) terhadap hidrologi dan Tanah.

Persebaran dampak hidrologi dan tanah terbatas akan terjadi di dalam tapak proyek OLANG seluas <700 ha dan diperkirakan tidak menyebar keluar dari batas proyek. Di dalam batas proyek akan dibangun saluran-saluran drainase dan *sediment trap* sebelum aliran permukaan dialirkan ke badan air beberapa anak sungai di luar tapak proyek.

- Pola Drainase: Menggunakan Peta DEM Nasional 8 m, diidentifikasi pola drainase di lokasi tapak proyek berbentuk tulang ikan (*fish bone*). Air mengalir dari parit tersier menuju sekunder yang selanjutnya masuk ke dalam parit primer dengan sudut relatif lancip (<90°) di mana parit primer membentang di bagian tengah sebagai saluran drainase utama. Perubahan pola drainase pada lokasi tapak proyek, dampak perubahan tersebut terlihat secara rata-rata sekitar 59,7%. Sekitar 38.7% pada DAS Lermatang, 18.9% pada DAS Siok, dan 86,4% pada DAS yang sungainya mengalir ke sebelah selatan tapak proyek. Persebaran dampak hanya terjadi **dalam batas tapak proyek**.
- Aliran Permukaan: Perubahan aliran permukaan yang akan keluar dari tapak proyek sebagai aliran puncak, adalah menggunakan metode rasional $Q_p = 0,00278 C_i A$. Mengingat bahwa waktu konstruksi adalah sekitar 5 tahun, maka untuk Alur Sungai Siok, Alur Sungai Lermatang dan Alur Sungai Selatan menyebabkan pertambahan debit tanpa dan dengan proyek masing-masing adalah 5,7 m³/dt, 7,9 m³/dt, dan 3,4 m³/dt. Persebaran dampak hanya terjadi **dalam batas tapak proyek**.
- Erosi Tanah: Tutupan lahan di tapak proyek saat ini terdiri dari ladang, kebun campuran, semak belukar, dan hutan lahan kering sekunder, dengan topografi berkisar antara datar-bergelombang dengan kemiringan lereng 0 – 15%. Erosi tanah diprediksi dengan model USLE: $A = R \times K \times L \times S \times C \times P$. Hasil prediksi menunjukkan, sebelum kegiatan proyek tingkat erosi tanah rata-rata 162,1 ton/ha/tahun dan setelah kegiatan proyek menjadi rata-rata 231,6 ton/ha/tahun atau antara sebelum dan setelah kegiatan terjadi peningkatan sebesar 69,5 ton/ha/tahun. Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Bahaya Erosi (Departemen Kehutanan, 1998), sebelum kegiatan erosi tanah tergolong **sedang** dan setelah kegiatan menjadi **berat**. Persebaran dampak hanya terjadi **dalam batas tapak proyek**.

Batas ekologi persebaran dampak hidrologi dan tanah tercantum dalam **Peta V10**.

5. Oseanografi:

- Tahap Konstruksi: Tidak diidentifikasi adanya dampak penting hipotetik (DPH) terhadap aspek oseanografi – perubahan pola arus dan gelombang,

- Tahap Operasi: Sumber utama dampak terhadap oseanografi dalam bentuk perubahan pola arus dan gelombang bersumber dari Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (*Causeway*) ke TUKS, yang selanjutnya menimbulkan dampak turunan berupa timbulnya abrasi dan akresi.
 - Pola Arus: Aliran arus di laut sangat ditentukan oleh kedalaman laut (batimetri) dan bentuk atau morfologi dari pantai. Perubahan pola arus diperkirakan akan terjadi karena adanya bangunan *Causeway* sepanjang 2 km, lebar 15 m dan lebar *slope* 60 m menjorok ketengah teluk di OLNK. Di rencana lokasi pembangunan TUKS Teluk Saumlaki, pola arus cenderung dipengaruhi oleh proses pasang surut, serta musim di mana pada saat pasang massa air memasuki teluk dan sebaliknya pada saat surut massa air meninggalkan teluk dengan kecepatan arus berkisar antara 20-30 cm/detik.
 - Pemodelan perubahan pola arus akibat keberadaan *Cuseway* menggunakan Modul Model Hydrodynamic (HD). Pemodelan dilakukan untuk musim Barat dan Musim Timur, hasil pemodelan menunjukkan tidak adanya perubahan pola arus yang signifikan karena secara alami sudah ada Pulau Nustual dan posisi *Causeway* menghadap mulut teluk sehingga aliran arusnya mengikuti. Persebaran dampak terjadi **secara lokal dalam skala yang kecil**.
 - Gelombang: Gelombang yang terjadi di Teluk Saumlaki dominan dipengaruhi oleh proses perambatan gelombang lepas pantai yang memasuki teluk serta musim. Pada Musim Barat, gelombang merambat masuk ke Teluk Saumlaki melalui sisi kanan mulut teluk. Energi gelombang lebih besar di luar teluk, dan menjadi berkurang ke arah kepala teluk. Pada Musim Timur gelombang masuk melalui bagian tengah mulut teluk. Pada Musim Timur kondisi gelombang dalam teluk lebih bergejolak dibandingkan dengan Musim Barat.
 - Pemodelan perubahan pola gelombang akibat keberadaan *Causeway* dan TUKS menggunakan Modul Model *Spectral Wave* (SW). Pemodelan dilakukan untuk musim Barat dan Musim Timur, hasil pemodelan menunjukkan tidak adanya perubahan pola gelombang yang signifikan, karena sebagian besar bangunan *Causeway* berada pada daerah *tidal flat*. Pada saat surut terendah di *tidal flat* ketinggian air sekitar 30-40 cm. Persebaran dampak terjadi **secara lokal dalam skala yang kecil**.
 - Abrasi dan Akresi: Timbulnya akresi dan abrasi merupakan dampak turunan dari perubahan arus dan gelombang oleh keberadaan *Causeway* dan TUKS. Fenomena abrasi dan akresi di tapak proyek terjadi secara alami yang teramati sebelum adanya pembangunan, namun berdasarkan citra satelit secara seri dari tahun 2005-2010 tidak terlihat secara nyata adanya perubahan garis pantai/abrasi di sekitar lokasi studi, salah satu penyebabnya karena lokasi proyek didominasi pantai karang. Perubahan garis pantai memerlukan sumber sedimen yang akan dipindahkan oleh proses deformasi gelombang menjadi *litoral drift*.
 - Pemodelan timbulnya abrasi dan akresi akibat keberadaan *Causeway* dan TUKS menggunakan gabungan Modul Model *Hydrodynamic* (HD), Modul Model *Spectral Wave* (SW), dan Modul Model Adveksi-Dispersi (AD via EcoLab) untuk masukan air

tawar dari sungai. Pemodelan dilakukan untuk musim Barat dan Musim Timur, hasil pemodelan menunjukkan (a) Pada saat musim barat di mana energi gelombang yang sampai ke pantai di sisi kiri teluk relatif kecil, sehingga proses perubahan garis pantainya kecil. Kalaupun tidak ada *Causeway*, juga terjadi proses abrasi secara alami, (b) Proses akresi terlihat lebih dominan terjadi pada saat Musim Timur, penambahan/sedimentasi terlihat terjadi di sekitar TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat, *Causeway* dan TUKS Pionir, dan bersifat lokal. Persebaran dampak terjadi secara **lokal dalam skala yang kecil**.

Batas ekologi persebaran dampak perubahan pola arus, gelombang, dan timbulnya abrasi dan akresi garis pantai ditunjukkan pada **Peta V11**.